LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : 567/-073.61
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Representasi Manajemen

Jakarta, 26 Mei 2017

Kepada

Yth. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2016, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2016, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan hormat saya sampaikan hal sebagai berikut :

1. Surat representasi ini disampaikan terbatas pada hal-hal yang sifatnya material, tanpa melihat besarnya nilai atau volume, namun juga menyangkut kekeliruan dan kesalahan penyajian informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan, representasi berikut ini telah disampaikan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selama pemeriksaan :

   a. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);

   b. Telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI);

   c. Seluruh transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;

   d. Rekening yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semuanya sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

   e. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;

f. Adanya tindakan pelanggaran hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan, sejauh ini sedang diteliti;

g. Pada dasarnya semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;

h. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;

i. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memenuhi semua aspek Perjanjian Kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;

j. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2016 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;

k. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan panyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern; dan

l. Saya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.

3. Efektivitas sistem pengendalian intern telah dilakukan dalam hal penilaian :

   a. Keandalan laporan keuangan : transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah; dan

   b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku : transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.

4. Kelemahan-kelemahan signifikan yang ada pada parancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan material, kiranya telah disampaikan secara menyeluruh.

5. Identifikasi dan pengungkapan seluruh peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan, termasuk kejadian ketidakpetuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga saya bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian surat representasi ini saya sampaikan sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Pernyataan ini adalah merupakan tanggung jawab saya.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 26 Mei 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2016 AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2016	Realisasi Audited 2016	(%)	Realisasi Audited 2015
1	**PENDAPATAN**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**					
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	33.100.000.000.000	31.613.197.634.662	95,51	29.076.926.598.506
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	649.175.000.000	675.475.066.072	104,05	459.459.498.063
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	324.739.130.552	303.204.423.956	93,37	527.280.486.037
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	4.427.870.709.186	4.296.140.463.026	97,02	3.622.510.233.102
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)**		**38.501.784.839.738**	**36.888.017.587.716**	**95,81**	**33.686.176.815.708**
8						
9	**PENDAPATAN TRANSFER**					
10	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**					
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	12.302.767.116.994	12.304.612.421.602	100,01	5.751.741.852.400
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	43.142.663.000	83.970.656.912	194,63	135.525.792.297
13	Dana Alokasi Umum		-	-	~	-
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	3.644.458.246.000	2.883.078.374.200	79,11	-
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)**		**15.990.368.025.994**	**15.271.661.452.714**	**95,51**	**5.887.267.644.697**
16						
17	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**					
18	Dana Otonomi Khusus		-	-	~	-
19	Dana Penyesuaian		-	-	~	2.755.110.753.389
20	**Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)**		**-**	**-**	**~**	**2.755.110.753.389**
21	**Total Pendapatan Transfer (15 + 20)**		**15.990.368.025.994**	**15.271.661.452.714**	**95,51**	**8.642.378.398.086**
22						
23	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH**					
24	Pendapatan Hibah	5.1.1.3	2.669.095.600.000	1.625.027.272.083	60,88	1.880.682.954.789
25	Pendapatan Dana Darurat		-	-	~	-
26	Pendapatan Lainnya		-	-	~	-
27	**Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (24 s/d 26)**		**2.669.095.600.000**	**1.625.027.272.083**	**60,88**	**1.880.682.954.789**
28	**JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)**		**57.161.248.465.732**	**53.784.706.312.513**	**94,09**	**44.209.238.168.583**
29	**BELANJA**					
30	**BELANJA OPERASI**					
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.a	21.484.497.759.347	19.359.807.013.530	90,11	17.312.344.016.739
32	Belanja Barang	5.1.2.1.1.b	16.812.849.152.875	13.062.670.779.326	77,69	10.633.820.105.891
33	Bunga	5.1.2.1.1.c	30.000.000.000	11.739.277.402	39,13	5.478.639.527
34	Subsidi	5.1.2.1.1.d	1.335.426.275.800	903.898.736.862	67,69	659.081.781.344
35	Hibah	5.1.2.1.1.e	2.248.455.193.332	2.161.217.950.484	96,12	1.717.428.915.536
36	Bantuan Sosial	5.1.2.1.1.f	2.503.493.425.000	2.452.948.130.000	97,98	2.087.123.200.000
37	**Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)**		**44.414.721.806.354**	**37.952.281.887.604**	**85,45**	**32.415.276.659.037**
38						
39	**BELANJA MODAL**					
40	Belanja Tanah	5.1.2.1.2.a	3.032.948.358.774	1.970.939.912.239	64,98	3.451.775.763.772
41	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.1.2.b	2.288.861.798.125	1.780.464.137.977	77,79	2.002.190.574.946
42	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.1.2.c	2.649.835.256.840	1.687.059.996.551	63,67	2.063.978.323.661
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.1.2.d	4.351.189.733.684	3.287.656.766.815	75,56	2.685.243.694.385
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.1.2.e	303.312.158.476	239.349.200.951	78,91	40.828.352.444
45	Belanja Aset Lainnya			-	~	-
46	**Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)**		**12.626.147.305.899**	**8.965.470.014.533**	**71,01**	**10.244.016.709.208**
47						
48	**BELANJA TAK TERDUGA**					
49	Belanja Tak Terduga	**5.1.2.1.3**	108.411.688.403	744.309.687	0,69	877.074.802
50	**Jumlah Belanja Tak Terduga (49)**		**108.411.688.403**	**744.309.687**	**0,69**	**877.074.802**
51	**Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)**		**57.149.280.800.656**	**46.918.496.211.824**	**82,10**	**42.660.170.443.047**
52						
53	**TRANSFER**					
54	**TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA**					
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		-	-	~	-
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	-	~	-
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-	~	-
58	**Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)**		**-**	**-**	**~**	**-**
59						
60	**TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN**					
61	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	**5.1.2.1.4**	213.601.848.300	208.527.191.300	97,62	371.152.504.510
62	Bantuan Keuangan Lainnya		2.157.666.410	1.786.842.730	82,81	-
63	**Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan (61 s/d 62)**		**215.759.514.710**	**210.314.034.030**	**97,48**	**371.152.504.510**
64	**Jumlah Transfer (58 + 63)**		**215.759.514.710**	**210.314.034.030**	**97,48**	**371.152.504.510**
65	**JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (51 + 64)**		**57.365.040.315.366**	**47.128.810.245.854**	**82,16**	**43.031.322.947.557**
66						
67	**SURPLUS/DEFISIT (28 - 65)**		**(203.791.849.634)**	**6.655.896.066.659**	**~**	**1.177.915.221.026**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 dan 2015

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	Anggaran 2016	Realisasi Audited 2016	(%)	Realisasi Audited 2015
68						
69	**PEMBIAYAAN**	**5.1.3**				
70	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**					
71	Penggunaan SiLPA		4.933.519.451.750	4.933.519.451.750	100,00	9.160.897.609.233
72	Pencairan Dana Cadangan		-	-	~	-
73	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	~	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		379.902.397.884	335.756.625.269	88,38	48.884.300.406
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
76	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	~	-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	~	-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	~	-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	~	-
80	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	~	-
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	~	-
	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		435.368.000.000	338.475.881.319	77,74	
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
83	**Jumlah Penerimaan (71 s/d 82)**		**5.748.789.849.634**	**5.607.751.958.338**	**97,55**	**9.209.781.909.639**
84						
85	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**					
86	Pembentukan Dana Cadangan		-	81.575.989.831	~	78.999.209.715
93	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5.544.998.000.000	4.475.782.698.443	80,72	5.371.093.824.789
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-	~	4.084.644.411
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-	~	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-	~	-
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-	~	-
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-	~	-
94	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-	~	-
95	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-	~	-
96	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-	~	-
97	**Jumlah Pengeluaran (86 s/d 96)**		**5.544.998.000.000**	**4.557.358.688.274**	**82,19**	**5.454.177.678.915**
98	**PEMBIAYAAN NETO (83 - 97)**		**203.791.849.634**	**1.050.393.270.064**		**3.755.604.230.724**
99	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 98)**			**7.706.289.336.723**		**4.933.519.451.750**

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

TAHUN ANGGARAN 2016

AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2017

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
Saldo Anggaran Lebih Awal		4.933.519.451.750,00	9.160.897.609.233,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		(4.933.519.451.750,00)	(9.160.897.609.233,00)
Subtotal	5.2	**-**	**-**
Pendapatan		53.784.706.312.513,00	44.209.238.168.583,00
Belanja		(47.128.810.245.854,00)	(43.031.322.947.557,00)
Surplus	5.2	**6.655.896.066.659,00**	**1.177.915.221.026,00**
Penerimaan Pembiayaan		5.607.751.958.338,00	9.209.781.909.639,00
Pengeluaran Pembiayaan		(4.557.358.688.274,00)	(5.454.177.678.915,00)
Pembiayaan Netto	5.2	**1.050.393.270.064,00**	**3.755.604.230.724,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)		7.706.289.336.723,00	4.933.519.451.750,00
Subtotal	5.2	**7.706.289.336.723,00**	**4.933.519.451.750,00**
Saldo Anggaran Lebih Akhir		**7.706.289.336.723,00**	**4.933.519.451.750,00**

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
PENDAPATAN					
Pendapatan Asli Daerah					
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1.1.1	31.802.399.896.090,00	30.021.691.108.000,00	1.780.708.788.090,00	5,93
Pendapatan Retribusi Daerah	5.3.1.1.1.2	677.424.218.710,00	414.943.915.696,00	262.480.303.014,00	63,26
Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.1.3	2.317.418.705.808,00	15.363.325.157,00	2.302.055.380.651,00	14.984,10
Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.1.4	12.336.862.026.751,00	9.194.970.401.858,00	3.141.891.624.893,00	34,17
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		**47.134.104.847.359,00**	**39.646.968.750.711,00**	**7.487.136.096.648,00**	**18,88**
Pendapatan Transfer					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**5.3.1.1.2**				
Bagi Hasil Pajak		13.442.379.620.970,00	11.327.202.422.389,00	2.115.177.198.581,00	18,67
Dana Alokasi Khusus - LO		2.883.078.374.200,00	-	2.883.078.374.200,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		**16.325.457.995.170,00**	**11.327.202.422.389,00**	**4.998.255.572.781,00**	**44,13**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya					
Dana Penyesuaian		-	2.755.110.753.389,00	(2.755.110.753.389,00)	(100,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		**-**	**2.755.110.753.389,00**	**(2.755.110.753.389,00)**	**(100,00)**
Jumlah Pendapatan Transfer		**16.325.457.995.170,00**	**14.082.313.175.778,00**	**2.243.144.819.392,00**	**15,93**
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.3.1.1.3				
Pendapatan Hibah		1.742.140.897.114,00	1.910.504.881.067,00	(168.363.983.953,00)	(8,81)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		**1.742.140.897.114,00**	**1.910.504.881.067,00**	**(168.363.983.953,00)**	**(8,81)**
JUMLAH PENDAPATAN		**65.201.703.739.643,00**	**55.639.786.807.556,00**	**9.561.916.932.087,00**	**17,19**
BEBAN					
Beban Operasi					
Beban Pegawai	5.3.1.2.1.a	19.422.081.375.665,00	17.451.577.953.165,00	1.970.503.422.500,00	11,29
Beban Persediaan	5.3.1.2.1.b	2.365.636.175.652,00	2.537.304.538.469,00	(171.668.362.817,00)	(6,77)
Beban Barang	5.3.1.2.1.c	2.305.331.198.302,00	2.010.889.393.803,00	294.441.804.499,00	14,64
Beban Jasa	5.3.1.2.1.d	5.795.398.601.634,00	3.786.735.915.447,00	2.008.662.686.187,00	53,04
Beban Pemeliharaan	5.3.1.2.1.e	1.967.747.589.654,00	1.335.308.308.102,00	632.439.281.552,00	47,36
Beban Perjalanan Dinas	5.3.1.2.1.f	29.300.979.507,00	50.471.093.060,00	(21.170.113.553,00)	(41,95)
Beban Bunga	5.3.1.2.1.g	11.739.277.402,00	5.294.660.335,00	6.444.617.067,00	121,72
Beban Subsidi	5.3.1.2.1.h	903.898.736.862,00	659.081.781.344,00	244.816.955.518,00	37,15
Beban Hibah	5.3.1.2.1.i	2.161.217.950.484,00	1.717.428.915.536,00	443.789.034.948,00	25,84
Beban Bantuan Sosial	5.3.1.2.1.j	2.452.948.130.000,00	2.087.123.200.000,00	365.824.930.000,00	17,53
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.1.2.1.k	4.872.299.699.970,00	4.651.850.075.752,00	220.449.624.218,00	4,74
Beban Penyisihan Piutang	5.3.1.2.1.l	644.082.869.416,00	437.667.615.684,00	206.415.253.732,00	47,16
Beban Lain-lain	5.3.1.2.1.m	195.730.059.812,00	564.544.439.618,00	(368.814.379.806,00)	(65,33)
Jumlah Beban Operasi		**43.127.412.644.360,00**	**37.295.277.890.315,00**	**5.832.134.754.045,00**	**15,64**
Beban Transfer	5.3.1.2.2				
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		210.314.034.030,00	371.152.504.510,00	(160.838.470.480,00)	(43,33)
Jumlah Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		**210.314.034.030,00**	**371.152.504.510,00**	**(160.838.470.480,00)**	**(43,33)**
JUMLAH BEBAN		**43.337.726.678.390,00**	**37.666.430.394.825,00**	**5.671.296.283.565,00**	**15,06**
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN OPERASIONAL		**21.863.977.061.253,00**	**17.973.356.412.731,00**	**3.890.620.648.522,00**	**21,65**
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Non Operasional	**5.3.2.1**				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		11.735.167.222,00	84.210.305.562,00	(72.475.138.340,00)	(86,06)
Jumlah Surplus Non Operasional		**11.735.167.222,00**	**84.210.305.562,00**	**(72.475.138.340,00)**	**(86,06)**
Defisit Non Operasional	**5.3.2.2**				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		69.813.629.640,00	373.516.220,00	69.440.113.420,00	18.590,92
Jumlah Defisit Penjualan Aset Non Lancar		**69.813.629.640,00**	**373.516.220,00**	**69.440.113.420,00**	**18.590,92**
JUMLAH SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(58.078.462.418,00)**	**83.836.789.342,00**	**(141.915.251.760,00)**	**(169,28)**
SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA		**21.805.898.598.835,00**	**18.057.193.202.073,00**	**3.748.705.396.762,00**	**20,76**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
POS LUAR BIASA	**5.3.3**				
Pendapatan Luar Biasa					
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		**-**	**-**	**-**	**0,00**
Beban Luar Biasa					
Beban Luar Biasa		1.538.053.806,00	1.582.441.003,00	(44.387.197,00)	(2,80)
Jumlah Beban Luar Biasa		**1.538.053.806,00**	**1.582.441.003,00**	**(44.387.197,00)**	**(2,80)**
POS LUAR BIASA		**(1.538.053.806,00)**	**(1.582.441.003,00)**	**44.387.197,00**	**(2,80)**
SURPLUS		**21.804.360.545.029,00**	**18.055.610.761.070,00**	**3.748.749.783.959,00**	**20,76**

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016	31 Desember 2015
EKUITAS AWAL	**5.4.1.1**	**420.104.811.786.307,00**	**424.776.006.494.695,00**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	**5.4.1.2**		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap s.d. Tahun 2014		-	(24.737.392.389.270,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Fasos Fasum s.d. Tahun 2014		-	(1.100.232.508.224,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dijual		-	(41.835.372.724,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud s.d. Tahun 2014		-	(67.352.851.866,00)
Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan		**-**	**(25.946.813.122.084,00)**
KOREKSI EKUITAS	**5.4.1.3**		
Koreksi Penambahan Ekuitas		**2.771.191.181.891,00**	**4.102.871.354.386,00**
Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang		123.451.664.142,00	721.254.452,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Persediaan		21.452.028.936,00	2.398.671.501,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Investasi		80.996.166.299,00	-
Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya		673.560.055.167,00	3.806.981.158.772,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		1.651.231.213.549,00	-
Koreksi Penyajian Kewajiban		3.974.234.164,00	25.883.411.917,00
Koreksi Penambahan Lain-lain		216.525.819.634,00	266.886.857.744,00
Koreksi Pengurangan Ekuitas		**3.188.524.243.360,00**	**882.863.701.760,00**
Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang		7.769.704.576,00	94.234.550.751,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Persediaan		4.611.307.752,00	14.261.489.915,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Investasi		77.309.253,00	55.669.603.863,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Aset Tetap dan Aset Lainnya		802.899.998.669,00	346.422.673.516,00
Koreksi Penyajian Saldo Awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		1.948.833.887.386,00	-
Koreksi Penyajian Saldo Awal Kewajiban		11.448.024.654,00	126.936.893.576,00
Lain-lain		412.884.011.070,00	245.338.490.139,00
Jumlah Koreksi Ekuitas		**(417.333.061.469,00)**	**3.220.007.652.626,00**
SURPLUS - LAPORAN OPERASIONAL	**5.4.1.4**	**21.804.360.545.029,00**	**18.055.610.761.070,00**
EKUITAS AKHIR		**441.491.839.269.867,00**	**420.104.811.786.307,00**

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

NERACA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Kas Daerah	5.5.1.1.1	7.684.222.409.201,00	4.447.646.232.438,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.2	22.118.245.979,00	816.807.645.256,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.3	230.712.654,00	-
Kas dan Setara Kas BLUD	5.5.1.1.4	1.017.166.144.568,00	1.017.491.155.074,00
Piutang Pajak	5.5.1.1.5.1	6.615.787.893.791,00	6.310.691.128.624,00
Penyisihan Piutang Pajak		(3.332.144.371.361,00)	(2.735.632.100.316,00)
Piutang Retribusi	5.5.1.1.5.2	59.231.344.954,00	31.195.082.860,00
Penyisihan Piutang Retribusi		(29.294.928.036,00)	(22.518.014.465,00)
Piutang BLUD	5.5.1.1.5.3	370.867.306.668,00	356.383.764.220,00
Penyisihan BLUD		(43.854.005.828,00)	(40.002.354.569,00)
Piutang Dana Transfer	5.5.1.1.5.4	6.496.853.041.149,00	5.459.274.194.651,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.1.5.5	17.099.762.096,00	17.103.762.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi		(5.196.326.737,00)	(5.198.326.738,00)
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	5.5.1.1.5.6	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan		(4.857.672,00)	(4.857.672,00)
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	5.5.1.1.5.7	17.111.434.243,00	20.501.789.384,00
Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset		(7.795.737.182,00)	(593.443.678,00)
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	5.5.1.1.5.8	104.433.452.127,00	100.749.956.231,00
Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset		(20.351.519.518,00)	(592.332.844,00)
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	5.5.1.1.5.9	43.440.001.183,00	44.114.013.599,00
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	5.5.1.1.5.10	3.844.678.244,00	3.674.517.300,00
Piutang Lainnya	5.5.1.1.5.11	2.572.168.307.848,00	731.164.994.198,00
Penyisihan Piutang Lainnya		(20.911.634.162,00)	(11.578.943.046,00)
Aset Lancar Lainnya	5.5.1.1.7	233.889.610.831,00	158.298.034.978,00
Persediaan	5.5.1.1.8	823.482.567.774,00	750.543.243.114,00
Jumlah Aset Lancar		**22.623.365.067.145,00**	**17.450.490.675.026,00**
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Nonpermanen	5.5.1.2.1	70.545.184.800,00	409.862.523.178,00
Investasi dalam Dana Bergulir		558.634.400.664,00	897.187.591.237,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih		(488.089.215.864,00)	(487.325.068.059,00)
Investasi Permanen	5.5.1.2.2	28.538.334.849.185,00	22.098.228.136.608,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**28.608.880.033.985,00**	**22.508.090.659.786,00**
Aset tetap	5.5.1.3	**382.499.763.351.880,00**	**363.584.467.256.156,00**
Tanah		295.047.301.522.144,00	284.068.689.312.488,00
Peralatan dan Mesin		20.694.146.032.418,00	18.986.813.894.851,00
Gedung dan Bangunan		25.196.220.526.094,00	24.169.792.568.590,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		35.571.427.457.658,00	32.306.882.017.848,00
Aset Tetap Lainnya		1.364.063.565.649,00	1.422.710.645.797,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		4.626.604.247.917,00	2.629.578.816.582,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.5.1.3.1	**(32.878.267.871.012,00)**	**(29.181.425.283.107,00)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(10.928.876.502.095,00)	(8.720.575.513.975,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(8.736.621.964.078,00)	(9.252.509.523.776,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		(13.049.792.501.421,00)	(11.208.289.041.206,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(162.976.903.418,00)	(51.204.150,00)
Jumlah Aset tetap		**349.621.495.480.868,00**	**334.403.041.973.049,00**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Dana Cadangan	5.5.1.4	**1.127.791.738.847,00**	**1.046.215.749.016,00**
Aset Lainnya			
Tagihan Penjualan Angsuran	5.5.1.5.1	48.524.770.867,00	50.949.015.300,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.5.3	6.385.119.814.778,00	6.554.369.249.425,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga		(400.512.727.332,00)	(278.165.572.423,00)
Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.4	220.728.943.724,00	200.362.096.132,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.5.5	(148.473.981.973,00)	(102.917.195.195,00)
Aset Lain-lain	5.5.1.5.6	36.863.408.468.608,00	40.223.272.327.802,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		(1.973.104.608.590,00)	(994.319.774.387,00)
Jumlah Aset Lainnya		**40.995.690.680.082,00**	**45.653.550.146.654,00**
JUMLAH ASET		**442.977.223.000.927,00**	**421.061.389.203.531,00**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang PFK	5.5.2.1.1	1.842.964.101,00	328.601.120.662,00
Pendapatan Diterima di Muka	5.5.2.1.2	499.741.678.825,00	82.396.090.395,00
Utang Belanja	5.5.2.1.3	445.239.100.211,00	342.052.450.888,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.4	1.501.393.820,00	5.819.970.609,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**948.325.136.957,00**	**758.869.632.554,00**
Kewajiban Jangka Panjang	5.5.2.2		
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.5.2.2.1.1	504.949.300.724,00	169.192.675.455,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.2.2.2	32.109.293.379,00	28.515.109.215,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**537.058.594.103,00**	**197.707.784.670,00**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.485.383.731.060,00**	**956.577.417.224,00**
EKUITAS	5.5.3	**441.491.839.269.867,00**	**420.104.811.786.307,00**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**442.977.223.000.927,00**	**421.061.389.203.531,00**

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	**8.723.737.512.402,00**	**6.281.945.032.768,00**
Kas di Kas Daerah	**7.684.222.409.201,00**	**4.447.646.232.438,00**
Kas Daerah	7.684.218.354.701,00	4.118.062.593.224,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	1.771.000,00	324.469.034.806,00
Kas Transitoris	2.283.500,00	5.114.604.408,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	**22.118.245.979,00**	**816.807.645.256,00**
Sisa Belanja yang Belum Disetor	21.603.202.103,00	813.781.599.291,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	2.377.506,00	20.400.493,00
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	414.974.370,00	3.005.645.472,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	97.692.000,00	-
Kas di Bendahara Penerimaan	**230.712.654,00**	**-**
Pendapatan yang Belum Disetor	230.712.654,00	-
Kas dan Setara Kas BLUD	**1.017.166.144.568,00**	**1.017.491.155.074,00**
Kas Tunai	1.320.020.275,00	2.521.825.239,00
Kas di Bank	1.013.150.761.377,00	1.012.718.896.555,00
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	1.086.455.531,00	871.302.184,00
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.608.907.385,00	1.366.064.096,00
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	-	13.067.000,00
Piutang Pajak	**6.615.787.893.791,00**	**6.310.691.128.624,00**
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	79.063.988.854,00	50.386.958.545,00
Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	242.507.010,00	238.627.010,00
Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.030.050.322,00	4.095.221.225,00
Piutang Pajak Air Tanah	80.602.138.853,00	83.087.525.295,00
Piutang Pajak Hotel	15.391.169.367,00	17.476.631.388,00
Piutang Pajak Restoran	112.566.232.430,00	129.880.233.572,00
Piutang Pajak Hiburan	52.809.224.249,00	67.165.075.129,00
Piutang Pajak Reklame	233.791.725.093,00	210.655.068.042,00
Piutang Pajak Parkir	5.265.394.798,00	2.794.391.418,00
Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	19.595.436.532,00	17.841.149.604,00
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	6.012.430.026.283,00	5.727.070.247.396,00
Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih	**(3.332.144.371.361,00)**	**(2.735.632.100.316,00)**
Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	(13.255.325.311,00)	(6.547.112.108,00)
Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	(238.646.410,00)	(186.711.910,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	(1.905.960.472,00)	(1.870.701.629,00)
Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(46.183.583.436,00)	(41.969.850.401,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(11.890.494.875,00)	(9.813.638.292,00)
Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(78.808.377.905,00)	(65.890.159.837,00)
Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(30.960.138.531,00)	(26.886.062.252,00)
Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(65.585.931.254,00)	(33.739.336.882,00)
Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(1.897.838.734,00)	(1.255.719.083,00)
Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(17.651.554.916,00)	(16.027.168.610,00)
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(3.063.766.519.517,00)	(2.531.445.639.312,00)
Piutang Pajak Netto	**3.283.643.522.430,00**	**3.575.059.028.308,00**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Piutang Retribusi	**59.231.344.954,00**	**31.195.082.860,00**
Piutang Retribusi Jasa Umum	1.018.105.981,00	1.249.583.586,00
Piutang Retribusi Jasa Usaha	32.753.071.092,00	7.793.183.800,00
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	25.460.167.881,00	22.152.315.474,00
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih	**(29.294.928.036,00)**	**(22.518.014.465,00)**
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	(890.347.719,00)	(792.491.386,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	(7.605.944.850,00)	(4.490.104.994,00)
Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(20.798.635.467,00)	(17.235.418.085,00)
Piutang Retribusi Netto	**29.936.416.918,00**	**8.677.068.395,00**
Piutang BLUD	**370.867.306.668,00**	**356.383.764.220,00**
Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	1.733.616.250,00	1.062.215.500,00
Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	2.625.000,00	4.980.000,00
Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452,00	721.254.452,00
Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	93.985.512,00	93.985.512,00
Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	28.057.402.997,00	28.104.300.997,00
Piutang BLUD RSUD dan RSKD	339.908.012.956,00	302.837.407.777,00
Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	328.590.000,00	664.800.000,00
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	11.361.478.169,00
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	1.230.225.416,00
Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	10.281.296.896,00
Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway	21.819.501,00	21.819.501,00
Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih	**(43.854.005.828,00)**	**(40.002.354.569,00)**
Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	(8.623.157,00)	(7.759.203,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	(13.125,00)	(112.175,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	(721.254.452,00)	(721.254.452,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda	(93.985.512,00)	(93.985.512,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	(26.546.746.972,00)	(26.797.727.992,00)
Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	(16.447.952.912,00)	(10.752.836.240,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulans Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	(35.320.600,00)	(127.500.000,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-	(1.084.995.293,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	-	(35.175.269,00)
Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-	(380.899.335,00)
Penyisihan Piutang Ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway	(109.098,00)	(109.098,00)
Piutang BLUD Netto	**327.013.300.840,00**	**316.381.409.651,00**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Piutang Dana Transfer	**6.496.853.041.149,00**	**5.459.274.194.651,00**
Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	6.468.079.406.682,00	5.385.395.888.600,00
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	28.773.634.467,00	73.878.306.051,00
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	17.099.762.096,00	17.103.762.096,00
Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(5.196.326.737,00)	(5.198.326.738,00)
Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	**11.903.435.359,00**	**11.905.435.358,00**
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	971.534.331,00	971.534.331,00
Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	(4.857.672,00)	(4.857.672,00)
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan Netto	**966.676.659,00**	**966.676.659,00**
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	17.111.434.243,00	20.501.789.384,00
Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	(7.795.737.182,00)	(593.443.678,00)
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Netto	**9.315.697.061,00**	**19.908.345.706,00**
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	104.433.452.127,00	100.749.956.231,00
Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset	(20.351.519.518,00)	(592.332.844,00)
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Netto	**84.081.932.609,00**	**100.157.623.387,00**
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN	**43.440.001.183,00**	**44.114.013.599,00**
Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan	**3.844.678.244,00**	**3.674.517.300,00**
Piutang Lainnya	**2.572.168.307.848,00**	**731.164.994.198,00**
Piutang Dividen/Kontribusi	-	485.014.572,00
Piutang Bunga Deposito	16.800.410.959,00	11.850.068.493,00
Piutang Sanksi Pajak	127.794.691.906,00	127.794.691.906,00
Piutang Denda Retribusi	4.647.072.546,00	4.601.240.773,00
Piutang Tunjangan	4.419.140.000,00	4.419.140.000,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	467.779.919,00	1.675.259.235,00
Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	971.106.907,00	1.013.415.790,00
Piutang Sanksi SP3L	44.603.324.164,00	-
Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefiesien Lantai Bangunan	2.361.550.057.047,00	579.326.163.429,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	10.020.000.000,00	-
Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	864.550.000,00	-
Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	30.174.400,00	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Lainnya	**(20.911.634.162,00)**	**(11.578.943.046,00)**
Penyisihan Piutang Denda Retribusi	(4.461.279.894,00)	(4.260.820.891,00)
Penyisihan Piutang Tunjangan	(4.419.140.000,00)	(4.419.140.000,00)
Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	-	(2.351.338,00)
Penyisihan Piutang Sanksi SP3L	(223.016.621,00)	-
Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan	(11.807.750.285,00)	(2.896.630.817,00)
Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	(432.275,00)	-
Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	(15.087,00)	-
Piutang Lainnya Netto	**2.551.256.673.686,00**	**719.586.051.152,00**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Aset Lancar Lainnya	**233.889.610.831,00**	**158.298.034.978,00**
Belanja Dibayar di Muka	**18.305.829.516,00**	**24.556.101.071,00**
Asuransi Dibayar di muka	17.833.452.767,00	21.994.670.871,00
Sewa Dibayar di muka	-	2.561.430.200,00
BBM Dibayar Dimuka	472.376.749,00	-
Uang Muka Kerja	**215.583.781.315,00**	**133.741.933.907,00**
Uang Muka Kerja di SKPD	215.157.481.660,00	133.414.843.537,00
Uang Muka Kerja di BLUD	426.299.655,00	327.090.370,00
Persediaan	**823.482.567.774,00**	**750.543.243.114,00**
JUMLAH ASET LANCAR	**22.623.365.067.145,00**	**17.450.490.675.026,00**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	**70.545.184.800,00**	**409.862.523.178,00**
Investasi dalam Dana Bergulir	558.634.400.664,00	897.187.591.237,00
Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih	(488.089.215.864,00)	(487.325.068.059,00)
Investasi Permanen	**28.538.334.849.185,00**	**22.098.228.136.608,00**
Penyertaan Modal pada BUMD	**2.795.285.038.498,00**	**2.142.266.203.893,00**
Penyertaan Modal PD Darma Jaya	139.523.362.521,00	70.432.916.065,00
Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya	1.000.941.271.594,00	1.046.058.060.401,00
Penyertaan Modal PD Pasar Jaya	984.483.922.648,00	509.599.788.856,00
Penyertaan Modal PD PAL Jaya	670.336.481.735,00	516.175.438.571,00
Penyertaan Modal pada PT Patungan	**25.743.049.810.687,00**	**19.955.961.932.715,00**
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya	2.500.120.563.894,00	1.942.067.255.754,00
Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang	370.392.324.341,00	49.234.489.310,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung	181.076.447.872,00	161.799.741.564,00
Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk	197.026.003.306,00	222.250.087.306,00
Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol	1.222.911.168.728,00	1.211.045.540.918,00
Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
Penyertaan Modal PT Cemani Toka	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
Penyertaan Modal PT Pakuan International	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo	5.345.411.626.398,00	4.322.661.011.016,00
Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta	7.394.775.810.291,00	5.884.333.774.627,00
Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo	467.364.638.555,00	484.300.436.222,00
Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta	5.486.645.869.800,00	3.759.293.639.511,00
Penyertaan Modal PT Transportasi Jakarta	1.938.497.114.623,00	1.481.923.171.895,00
Penyertaan Modal PT Penjamin Kredit Daerah	297.567.065.879,00	95.791.607.592,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**28.608.880.033.985,00**	**22.508.090.659.786,00**
ASET TETAP	**382.499.763.351.880,00**	**363.584.467.256.156,00**
Tanah	295.047.301.522.144,00	284.068.689.312.488,00
Peralatan dan Mesin	20.694.146.032.418,00	18.986.813.894.851,00
Gedung dan Bangunan	25.196.220.526.094,00	24.169.792.568.590,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35.571.427.457.658,00	32.306.882.017.848,00
Aset Tetap Lainnya	1.364.063.565.649,00	1.422.710.645.797,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.626.604.247.917,00	2.629.578.816.582,00

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	**(32.878.267.871.012,00)**	**(29.181.425.283.107,00)**
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.928.876.502.095,00)	(8.720.575.513.975,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(8.736.621.964.078,00)	(9.252.509.523.776,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(13.049.792.501.421,00)	(11.208.289.041.206,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(162.976.903.418,00)	(51.204.150,00)
JUMLAH ASET TETAP	**349.621.495.480.868,00**	**334.403.041.973.049,00**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	1.127.791.738.847,00	1.046.215.749.016,00
JUMLAH DANA CADANGAN	**1.127.791.738.847,00**	**1.046.215.749.016,00**
ASET LAINNYA		
Tagihan Penjualan Angsuran	**48.524.770.867,00**	**50.949.015.300,00**
Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun	48.524.770.867,00	50.949.015.300,00
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**6.385.119.814.778,00**	**6.554.369.249.425,00**
Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer*/BOT)	3.024.998.547.572,00	3.050.991.629.572,00
Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate*/BTO)	1.122.210.704.808,00	1.122.210.704.808,00
Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	1.969.555.686.398,00	2.112.812.039.045,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	**(400.512.727.332,00)**	**(278.165.572.423,00)**
Akumulasi Penyusutan Bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	(61.764.162.572,00)	(57.537.301.683,00)
Akumulasi Penyusutan Bangun serah guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	(143.240.511.633,00)	(85.094.846.465,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	(195.508.053.127,00)	(135.533.424.275,00)
Aset Tidak Berwujud	**72.254.961.751,00**	**97.444.900.937,00**
Aset Tidak Berwujud	220.728.943.724,00	200.362.096.132,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(148.473.981.973,00)	(102.917.195.195,00)
Aset Lain-Lain	**36.863.408.468.608,00**	**40.223.272.327.802,00**
Aset Rusak Berat	907.176.584.877,00	709.243.641.668,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(195.436.651.830,00)	-
Aset Belum Validasi	14.517.766.519.533,00	14.517.766.519.533,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya	135.809.000,00	135.809.000,00
Aset Lain-Lain BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
Kas Dikonsinyasikan	185.568.748.693,00	131.470.023.862,00
Aset Fasos dan Fasum	21.417.935.080.907,00	24.840.502.577.896,00
Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
Aset di BP THR Lokasari	12.472.994.111,00	13.224.373.345,00
Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya	-	7.272.459.181,00
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	**(1.973.104.608.590,00)**	**(994.319.774.387,00)**
Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum	(1.973.104.608.590,00)	(994.319.774.387,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	**40.995.690.680.082,00**	**45.653.550.146.654,00**
JUMLAH ASET	**442.977.223.000.927,00**	**421.061.389.203.531,00**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	**1.842.964.101,00**	**328.601.120.662,00**
Utang PFK di PPKD	99.463.000,00	324.469.034.806,00
Utang PFK di SKPD	1.743.501.101,00	4.132.085.856,00
Pendapatan Diterima di Muka	**499.741.678.825,00**	**82.396.090.395,00**
Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda oleh Pihak III	25.939.367.165,00	22.875.263.546,00
Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO	8.029.893.944,00	8.336.729.911,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD	1.751.595.885,00	1.555.283.283,00
Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda	9.558.450.000,00	15.283.850.000,00
Pendapatan Retribusi Diterima di Muka	17.779.280.429,00	14.203.442.632,00
Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	19.339.416.959,00
Pendapatan Pajak Diterima di Muka	435.655.694.152,00	802.104.064,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	1.027.397.250,00	-
Utang Belanja	**445.239.100.211,00**	**342.052.450.888,00**
Utang Belanja Pegawai	219.693.929.428,00	157.429.357.293,00
Utang Belanja TALI	436.324.908,00	747.924.806,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	78.487.796.446,00	63.239.308.201,00
Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS	2.403.252.865,00	4.686.258.162,00
Utang Belanja BLUD	71.157.554.989,00	65.304.595.501,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	73.060.241.575,00	50.645.006.925,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	**1.501.393.820,00**	**5.819.970.609,00**
Utang Jaminan	2.283.500,00	5.114.604.408,00
Utang Restitusi Pajak	1.499.110.320,00	705.366.201,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**948.325.136.957,00**	**758.869.632.554,00**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Kepada Pemerintah Pusat	**504.949.300.724,00**	**169.192.675.455,00**
Utang Proyek JEDI	504.949.300.724,00	169.192.675.455,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	**32.109.293.379,00**	**28.515.109.215,00**
Utang Jangka Panjang di BLUD	32.109.293.379,00	28.515.109.215,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**537.058.594.103,00**	**197.707.784.670,00**

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2016 (Audited)	31 DESEMBER 2015 (Audited)
JUMLAH KEWAJIBAN	1.485.383.731.060,00	956.577.417.224,00
JUMLAH EKUITAS	441.491.839.269.867,00	420.104.811.786.307,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	442.977.223.000.927,00	421.061.389.203.531,00

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

LAPORAN ARUS KAS
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016 Audited (Rp)	31 Desember 2015 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1.1.a	31.613.197.634.662,00	29.076.926.598.506,00
Penerimaan Retribusi daerah	5.6.1.1.b	675.475.066.072,00	459.459.498.063,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1.1.c	303.204.423.956,00	527.280.486.037,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	5.6.1.1.d	4.355.459.745.849,00	3.530.447.056.431,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.1.1.e	12.304.612.421.602,00	5.751.741.852.400,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.1.1.f	83.970.656.912,00	135.525.792.297,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1.1.g	0,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.6.1.1.g	2.883.078.374.200,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.6.1.1.h	0,00	2.755.110.753.389,00
Penerimaan Hibah	5.6.1.1.i	11.097.600.000,00	10.589.130.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**52.230.095.923.253,00**	**42.247.081.167.123,00**
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pegawai	5.6.1.2.a	19.359.807.013.530,00	17.312.344.016.739,00
Pembayaran Barang	5.6.1.2.b	13.014.920.989.234,00	10.584.935.805.485,00
Pembayaran Bunga	5.6.1.2.c	11.739.277.402,00	5.478.639.527,00
Pembayaran Subsidi	5.6.1.2.d	903.898.736.862,00	659.081.781.344,00
Pembayaran Hibah	5.6.1.2.e	2.161.217.950.484,00	1.717.428.915.536,00
Pembayaran Bantuan Sosial	5.6.1.2.f	2.452.948.130.000,00	2.087.123.200.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.6.1.2.g	210.314.034.030,00	371.152.504.510,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1.2.h	744.309.687,00	877.074.802,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**38.115.590.441.229,00**	**32.738.421.937.943,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**14.114.505.482.024,00**	**9.508.659.229.180,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Kas Masuk :	5.6.2.1		
Penjualan atas Tanah		0,00	78.888.677.000,00
Penjualan atas Brandgang		0,00	0,00
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai		333.248.664,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		6.692.905.476,00	7.617.870.887,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		7.781.033.112,00	5.556.628.784,00
Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman		338.475.881.320,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**353.283.068.572,00**	**92.063.176.671,00**
Arus Kas Keluar :	5.6.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan	5.6.2.2.a	81.575.989.831,00	78.999.209.715,00
Perolehan Tanah		1.970.939.912.239,00	3.451.775.763.772,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		2.128.024.270.086,00	2.002.190.574.946,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		1.693.089.644.158,00	2.063.978.323.661,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		2.953.696.738.790,00	2.685.243.694.385,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		6.345.841.670,00	40.828.352.444,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.6.2.2.c	2.861.853.026.360,00	3.501.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.6.2.2.d	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**11.695.525.423.134,00**	**13.824.015.918.923,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		**(11.342.242.354.562,00)**	**(13.731.952.742.252,00)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Kas Masuk :			
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2015)	5.6.3.1	813.781.599.291,00	374.971.318.364,00
Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2015		1.675.259.235,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**815.456.858.526,00**	**374.971.318.364,00**
Arus Kas Keluar :			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	5.6.3.2.a	0,00	4.084.644.411,00
Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2016)		21.603.202.103,00	0,00
Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)	5.6.3.2.b	467.779.919,00	813.781.599.291,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**22.070.982.022,00**	**817.866.243.702,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**793.385.876.504,00**	**(442.894.925.338,00)**

URAIAN	Catatan	31 Desember 2016 Audited (Rp)	31 Desember 2015 Audited (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Kas Masuk :			
Penerimaan Uang Jaminan	5.6.4.1	343.265.050,00	74.679.500,00
Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran	5.6.4.2	61.410.498,00	399.754.105,00
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.3	3.216.017.892.289,00	368.891.709.589,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**3.216.422.567.837,00**	**369.366.143.194,00**
Arus Kas Keluar :			
Hasil Eksekusi atas Jaminan		5.455.585.958,00	6.892.175.576,00
Penyetoran Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran ke Kas Daerah		61.410.498,00	399.754.105,00
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.4.3	3.540.283.069.748,00	316.452.058.679,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**3.545.800.066.204,00**	**323.743.988.360,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		**(329.377.498.367,00)**	**45.622.154.834,00**
KOREKSI SiLPA		**0,00**	**0,00**
KOREKSI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK		**0,00**	**(1.675.259.235,00)**
Kenaikan (Penurunan) Kas	5.6.5	**3.236.271.505.599,00**	**(4.622.241.542.811,00)**
Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah		**4.447.646.232.438,00**	**9.069.887.775.249,00**
Saldo Awal Kas BLUD		**1.017.470.815.732,00**	**0,00**
Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Kas dan Setara Kas BLUD		**8.701.388.553.769,00**	**4.447.646.232.438,00**
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		**230.712.654,00**	**0,00**
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		**22.118.245.979,00**	**816.807.645.256,00**
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas BLUD		**0,00**	**1.017.491.155.074,00**
Saldo Akhir Kas		**8.723.737.512.402,00**	**6.281.945.032.768,00**

Jakarta,

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2016
AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
2017

DAFTAR ISI

			Halaman
Daftar Isi…….....			**i**
Daftar Tabel……			**iii**
Daftar Lampiran…….....			**vii**
Daftar Grafik……			**viii**
BAB I	**Pendahuluan……**	**I -**	**1**
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan…….....	I -	1
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan……	I -	4
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan……	I -	7
BAB II	**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD……**	**II -**	**1**
	2.1 Ekonomi Makro……...	II -	1
	2.2 Kebijakan Keuangan…….....	II -	31
	2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD……	II -	37
BAB III	**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan ……..**	**III -**	**1**
	3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan…….....	III -	1
BAB IV	**Kebijakan Akuntansi……**	**IV -**	**1**
	4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	IV -	4
	4.2 Basis Akuntansi Yang Men dasari Penyusunan Laporan Keuangan	IV -	5
	4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan……..	IV -	6
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan….....	IV -	52
BAB V	**Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....**	**V -**	**1**
	5.1 Laporan Realisasi Anggaran …….....	V -	1
	5.1.1 Pendapatan Daerah……	V -	1
	5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer……...	V -	88

5.1.3 Transfer ……..... V - 154
5.1.4 Pembiayaan Daerah ……..... V - 155
5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih……. V - 158
5.3 Laporan Operasional……..... V - 160
5.3.1 Kegiatan Operasional……..... V - 161
5.3.2 Kegiatan Non Operasional……. V - 210
5.3.3 Pos Luar Biasa……. V - 214
5.4 Laporan Perubahan Ekuitas……. V - 214
5.5 Neraca ……. V - 221
5.5.1 Aset……... V - 221
5.5.2 Kewajiban……... V - 431
5.5.3 Ekuitas……... V - 454
5.6 Laporan Arus Kas……..... V - 461
5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi……... V - 461
5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi……..... V - 468
5.6.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan……..... V - 471
5.6.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris……... V - 483
5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas……... V - 475
BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan .....
6.1 Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi…….. VI - 1
6.2 Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok…… VI - 2
6.3 Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional…….. VI - 3
6.4 Kerjasama Antar Daerah……. VI - 5
6.5 Kerjasama Luar Negeri…….. VI - 11
6.6 Pembangunan Ruang Publik Terpadu Rumah Anak (RPTRA)…….. VI - 16
6.7 Penyelenggaran Tugas Pembantuan dan Dekonsenyrasi……... VI - 20

BAB VII Penutup..... VII - 1

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
1.	Tabel 2.1	Ekspor Produk-produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan Tahun 2016	II - 4
2.	Tabel 2.2	Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut Golongan Barang HS 2 Dijit	II - 5
3.	Tabel 2.3	Nilai Impor Melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Dijit	II - 7
5.	Tabel 2.4	Impor Melalui DKI Jakarta menurut Negara asal Tahun 2016	II - 8
6.	Tabel 2.5	PBRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar HB (milyar rupiah) Tahun 2011-2016	II - 23
7.	Tabel 2.6	Distribusi Persentase PDRB – HB Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2011-2016	II - 24
8.	Tabel 2.7	Distribusi Persentase PDRB – HK Menurut Pengeluaran (persen) Tahun 2014-2016	II - 25
9.	Tabel 2.8	PDRB-Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar HB (milyar rupiah) Tahun 2014-2016	II - 28
10.	Tabel 2.9	PDRB-Menurut Lapangan usaha Atas Dasar HK 2010 (milyar rupiah) Tahun 2014-2016	II - 29
11.	Tabel 2.10	Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta Tahun 2010-2015	II - 30
12.	Tabel 3.1	Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	III - 5
13.	Tabel 5.1	Rekapitulasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2015	V - 2
14.	Tabel 5.2	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015	V - 3
15.	Tabel 5.3	Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016	V - 30
16.	Tabel 5.4	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2016	V - 31
17.	Tabel 5.5	Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2016	V - 43
18.	Tabel 5.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2016	V - 55
19.	Tabel 5.7	Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016	V - 59
20.	Tabel 5.8	Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2016	V - 60

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
21.	Tabel 5.9	Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) TA 2016	V - 61
22.	Tabel 5.10	Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016	V - 63
22.	Tabel 5.11	Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2016	V - 65
23.	Tabel 5.12	Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	V - 72
24.	Tabel 5.13	Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT-BTO) Tahun Anggaran 2016	V - 74
25.	Tabel 5.14	Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2016	V - 76
26.	Tabel 5.15	Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015	V - 82
27.	Tabel 5.16	Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016	V - 90
28.	Tabel 5.17	Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016	V - 115
29.	Tabel 5.18	Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015	V - 153
30.	Tabel 5.19	Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah Tahun Anggaran 2016	V - 162
31.	Tabel 5.20	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2016	V - 163
32.	Tabel 5.21	Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2016	V - 164
33.	Tabel 5.22	Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2016	V - 171
34.	Tabel 5.23	Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO (Dividen) Tahun Anggaran 2016	V - 177
35.	Tabel 5.24	Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya (PAD) - LO Tahun Anggaran 2016	V - 180
36	Tabel 5.25	Rekapitulasi Beban Daerah Tahun Anggaran 2016	V - 200
37.	Tabel 5.26	Kas di Bank Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 222
38.	Tabel 5.27	Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih Per 31 Desember 2016	V - 248
39.	Tabel 5.28	Saldo Piutang BLUD Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 249

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
40.	Tabel 5.29	Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 251
41.	Tabel 5.30	Piutang BLUD RSUD dan RSKD Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 252
42.	Tabel 5.31	Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2016	V - 263
43.	Tabel 5.32	Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2015	V - 263
44.	Tabel 5.33	Perhitungan Piutang Bunga Deposito Per 31 Desember 2016	V - 265
45.	Tabel 5.34	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2015	V - 284
46.	Tabel 5.35	Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2016	V - 286
47.	Tabel 5.36	Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB Per 31 Desember 2016	V - 287
48.	Tabel 5.37	Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2016	V - 289
49.	Tabel 5.38	Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 292
50.	Tabel 5.39	Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 313
51.	Tabel 5.40	UMK Pengadaan Busway yang Diakuai Sebagai KDP Per 31 Desember 2016	V - 361
52.	Tabel 5.41	Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2016	V - 371
53.	Tabel 5.42	Aset Lainnya Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 372
54.	Tabel 5.43	Rincian Tagihan Penjualan Angsuran Per 31 Desember 2016	V - 373
55.	Tabel 5.44	Aset Lain-lain Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 383
56.	Tabel 5.45	Kewajiban Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 431
57.	Tabel 5.46	Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 432
58.	Tabel 5.47	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 433
59.	Tabel 5.48	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 433

No.	Tabel	Keterangan	Halaman
60.	Tabel 5.49	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2016	V - 434
61.	Tabel 5.50	Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2016	V - 435
62.	Tabel 5.51	Rincian Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 437
63.	Tabel 5.52	Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 447
64.	Tabel 5.53	Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2016	V - 448
65.	Tabel 5.54	Utang Belanja BLUD Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 448
66.	Tabel 5.55	Utang Belanja BLUD, RSUD, dan RSKD Per 31 Desember Tahun 2016 dan 2015	V - 449
67.	Tabel 5.56	Utang jangka Pendek lainnya Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 451
68.	Tabel 5.57	Kewajiban Jangka Panjang Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 451
69.	Tabel 5.58	Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Cengkareng Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 453
70	Tabel 5.59	Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Pasar Rebo Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 453
71	Tabel 5.60	Arus Kas Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 462
72	Tabel 5.61	Arus Kas Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 469
73	Tabel 5.62	Arus Kas Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2016 dan 2015	V - 472
74	Tabel 5.63	Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2016	V - 475
75	Tabel 6.1	Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP) Tahun Anggaran 2016	VI - 23
78	Tabel 6.2	Nilai Dana Dekonsentrasi yang diterima DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016	VI - 27

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Daftar Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2016
Lampiran	2	Daftar Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016
Lampiran	3	Daftar Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2016
Lampiran	4	Rekapitulasi Daftar Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016
Lampiran	5	Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016
Lampiran	6	Daftar *Stock Opname* Persediaan di SKPD per 31 Desember 2016
Lampiran	7	Ikhtisar Perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016
Lampiran	8	Daftar Realisasi Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah per 31 Desember 2016
Lampiran	9	Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan (KDP) per 31 Desember 2016
Lampiran	10	Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO dan KSO Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016
Lampiran	11	Daftar Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2016
Lampiran	12	Pendapatan Diterima di muka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa per 31 Desember 2016
Lampiran	13	Pendapatan Diterima di muka atas Kontribusi BOT/ BTO per 31 Desember 2016
Lampiran	14	Pendapatan Diterima di muka atas Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda per 31 Desember 2016
Lampiran	15	Daftar Utang Pegawai dan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 2016
Lampiran	16	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2016
Lampiran	17	Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) per 31 Desember 2016
Lampiran	18	Data Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Periode Pembangunan 2015 - 2016
Lampiran	19	Daftar Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Yang Beratas Nama Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Per 31 Desember 2016

DAFTAR GRAFIK

No.	Grafik	Keterangan	Halaman
1.	Grafik 2.1	Ekspor Melauli DKI Jakarta DKI Jakarta Tahun 2016	II - 2
2.	Grafik 2.2	Ekspor Produk DKI Jakarta Tahun 2016	II - 3
3.	Grafik 2.3	Nilai Ekspor Melauli DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta Bulan Januari-Februari Tahun 2014, 2015 dan 2016	II - 5
4.	Grafik 2.4	Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2016	II - 6
5.	Grafik 2.5	Impor Melalui DKI Jakarta Tahun 2010-2016	II - 7
6.	Grafik 2.6	Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang, Januari-Desember 2015 dan 2016	II - 9
7.	Grafik 2.7	Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2016	II - 10
8.	Grafik 2.8	Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2010-2016	II - 10
9.	Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2008-2016	II - 11
10.	Grafik 2.10	Infasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010 – 2016	II - 14
11.	Grafik 2.11	Perkembangan Inflasi DKI Jakarta Bulan Desember 2015 dan Januari – Desember	II - 14
12.	Grafik 2.12	Laju Inflasi DKI Jakarta menurut kelompok Pengeluaran	II - 17
13.	Grafik 2.13	PDRB Harga berlaku (triliun rupiah) Tahun 2010- 2016	II - 18
14.	Grafik 2.14	PDRB Harga Konstan 2010 (triliun rupiah) Tahun 2010 – 2016	II - 19

15	Grafik 2.15	PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (juta rupiah) Tahun 2011 – 2016	II	-	19
16	Grafik 2.16	PDRB perkapita atas dasar harga Konstan (juta rupiah) Tahun 2010 – 2016	II	-	20
17	Grafik 2.17	Investasi PMA dan PMDN di DKI Jakarta Tahun 2011-2015	II	-	31

BAB I

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pengguna anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah maka kepala daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

   Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

   Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

   Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

   Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

   Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

   CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi

penjelasan yang berkaitan dengan Realisasi Pencapaian Target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, Penjelasan Pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 adalah berbasis Akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Tahun Anggaran 2016 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun

jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2016.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrual;
28. Peraturan Gubernur Nomor 208 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual;
29. Peraturan Gubernur Nomor 1767 Tahun 2016 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
30. Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
31. Instruksi Sekretaris Daerah nomor 67 Tahun 2016 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II : Memuat kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi

berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari komponen-komponen laporan realisasi anggaran, komponen-komponen laporan perubahan saldo anggaran lebih, komponen-komponen neraca, komponen-komponen laporan operasional, komponen-komponen laporan arus kas dan komponen-komponen laporan perubahan ekuitas.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VII : Penutup berisi kesimpulan atas Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016.

BAB II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah) dengan menggunakan model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel penjelas/penentu (*exogeneous*) yang diperkirakan mempengaruhi besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan menggunakan persamaan simultan.
2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

   Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun 2016 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Melalui DKI Jakarta

Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2016 mencapai 46.031,70 juta US $ atau lebih rendah 0,68 persen dari periode yang sama tahun 2015 yakni sebesar 46.347,11 juta US $. Sepanjang periode 2016 tercatat nilai ekspor melalui DKI Jakarta tertinggi terjadi pada bulan Juni (4.424,10 juta US $) dan terendah terjadi di bulan Juli (2.784,48 juta US $). Menurunnya nilai ekspor melalui DKI Jakarta ini disebabkan belum pulihnya kondisi perekonomian global.

Grafik 2.1

Ekspor Melalui DKI Jakarta Tahun 2016 (Juta US$)

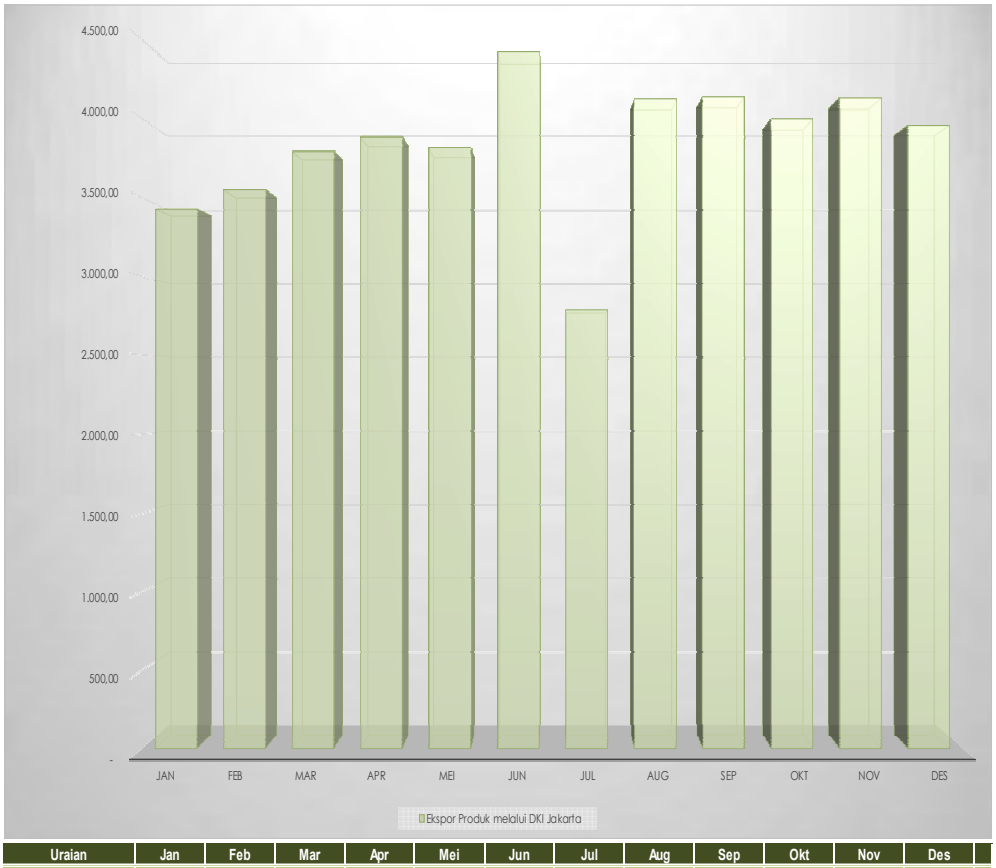

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ekspor Produk melalui DKI Jakarta	3.424,66	3.546,80	3.794,04	3.882,90	3.815,55	4.424,10	2.784,48	4.128,32	4.141,08	3.996,91	4.134,00	3.958,86

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

2) Ekspor Produk DKI Jakarta

Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 11.033,14 juta US$, lebih rendah 4,43 persen bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2015 yang sebesar 11.544,14 juta US$. Ekspor ini mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian Jakarta karena dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta. Persentase ekspor produk DKI Jakarta terbesar pada tahun 2016 dicapai pada bulan Juni yaitu sebesar 1.090,59 juta US $, atau naik sebesar 9,93 persen dibandingkan bulan Mei 2016. Komoditas yang paling banyak diekspor pada bulan ini adalah golongan barang kendaraan dan bagiannya, perhiasan dan permata. Kedua jenis barang ini berkontribusi sebesar 44,58 persen terhadap total ekspor produk DKI Jakarta. Dan terendah pada bulan Juli yaitu sebesar 695,71 juta US $. Produk kendaraan dan bagiannya merupakan produk unggulan bagi DKI Jakarta. Secara grafis ekspor produk DKI Jakarta dapat dilihat pada grafik 2.2 berikut.

Grafik 2.2

Ekspor Produk DKI Jakarta 2016 (Juta US$)

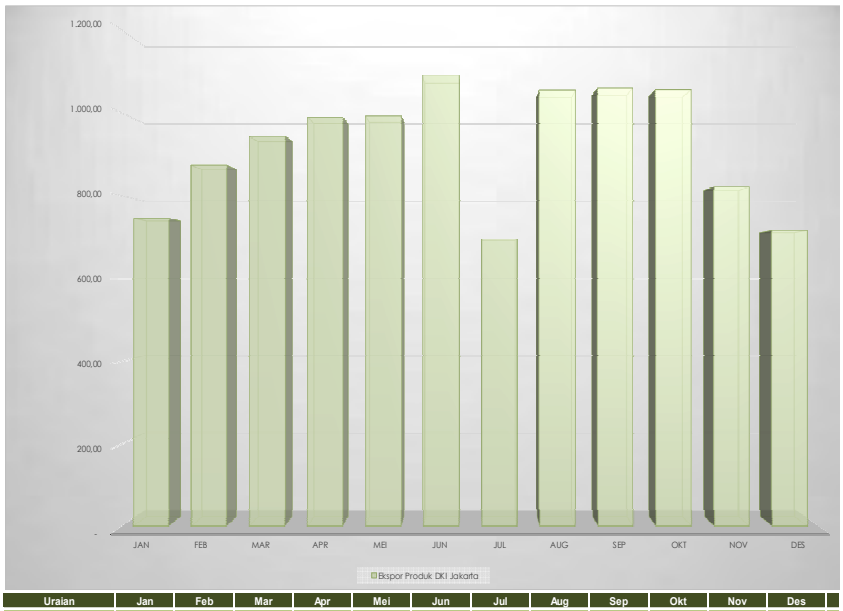

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Ekspor Produk DKI Jakarta	743,87	872,77	943,04	988,78	992,10	1.090,59	695,71	1.054,76	1.060,12	1.055,66	820,56	715,18

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Adapun ekspor produk – produk DKI Jakarta menurut negara tujuan dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan Tahun 2016

NEGARA TUJUAN		NILAI CIF (JUTA US$)
ASEAN		**5.117,02**
1	Philippines	1.470,87
2	Singapore	1.642,42
3	Thailand	772,41
4	Malaysia	641,41
5	Vietnam	486,53
	Asean Lainnya	103,38
ASIA		**3.166,67**
6	Hongkong	506,84
7	Saudi Arabia	422,49
8	Tiongkok	654,49
9	Japan	448,13
10	United Arab Emirates	213,48
	Asia Lainnya	921,24
Australia dan Oceania		**298,33**
11	Australia	232,82
	Australia dan Oceania lainnya	65,51
Amerika		**1.418,09**
12	United States	959,42
	Amerika Lainnya	458,67
Total 12 Negara		**8.451,31**
Lainnya		**2.581,74**
Total		**11.033,05**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Sedangkan nilai ekspor produk DKI Jakarta menurut golongan barang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2

Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Golongan Barang HS 2 Dijit Tahun 2016

GOLONGAN BARANG		NILAI CIF (JUTA US$)
1	Kendaraan dan Bagiannya	3.029,51
2	Perhiasan/Permata	1.835,25
3	Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik	864,30
4	Pakaian Jadi Bukan Rajutan	498,95
5	Ikan dan Udang	759,07
6	Mesin/Peralatan Listrik	460,55
7	Barang-barang Rajutan	386,85
8	Berbagai Produk Kimia	248,20
9	Plastik dan Barang dari Plastik	220,94
10	Tembaga	244,56
Total 10 Komoditi		**8.548,18**
Lainnya		**2.484,87**
Total Ekspor Produk DKI Jakarta		**11.033,05**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Sementara itu jika dilihat dari negara tujuan, diketahui bahwa selama beberapa tahun terakhir Singapura menjadi negara tujuan utama ekspor produk DKI Jakarta sebesar 14,89 persen termasuk pada tahun 2015. Sementara bila ditinjau menurut komoditi, ekspor produk DKI Jakarta yang terbesar selama periode Januari – Desember 2016 adalah kendaraan dan bagiannya sebesar 27,46 persen.

Grafik 2.3

Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta
Bulan Januari-Desember Tahun 2014,2015 dan 2016

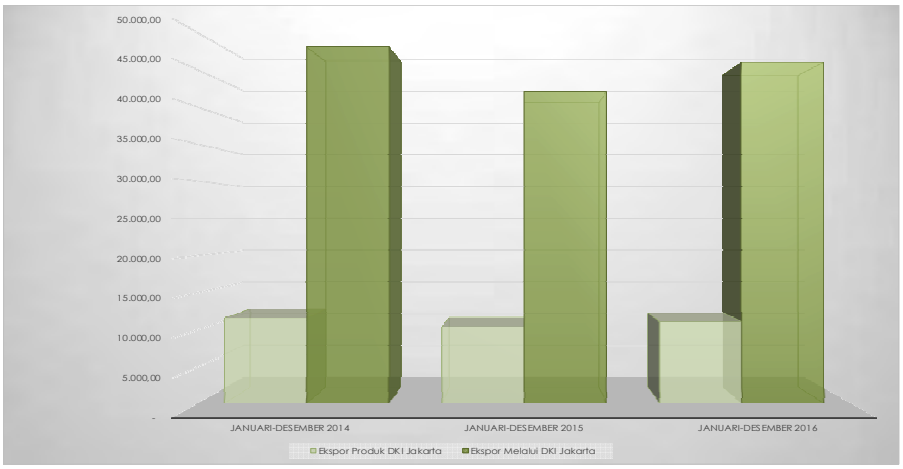

Uraian	Januari-Desember 2014	Januari-Desember 2015	Januari-Desember 2016
Ekspor Produk DKI Jakarta	11.546,19	10.317,96	11.033,05
Ekspor Melalui DKI Jakarta	48.079,48	42.072,84	46.031,70

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

3) Impor

Nilai impor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2016 mencapai 71.444,36 juta US $ atau lebih rendah 0,41 persen dari periode yang sama tahun 2015 yakni sebesar 71.154,56 juta US $. Sepanjang periode 2016 tercatat nilai impor melalui DKI Jakarta tertinggi terjadi pada bulan November (6.818,90 juta US $) dan terendah terjadi di bulan Juli (4.588,35 juta US $).

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau Broad Economic Category, nilai impor Januari-Desember 2016 untuk dua dari tiga golongan mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode Januari-Desember 2015. Golongan penggunaan barang konsumsi mengalami kenaikan 17,13 persen, penggunaan barang bahan baku dan penolong mengalami kenaikan 2,14 persen dan penggunaan barang modal mengalami penurunan 13,51 persen. Dari ketiga jenis golongan tersebut, proporsi terbesar adalah nilai impor bahan baku dan penolong 69,61 persen.

Grafik 2.4
Impor Melalui DKI Jakarta 2016 (Juta US $)

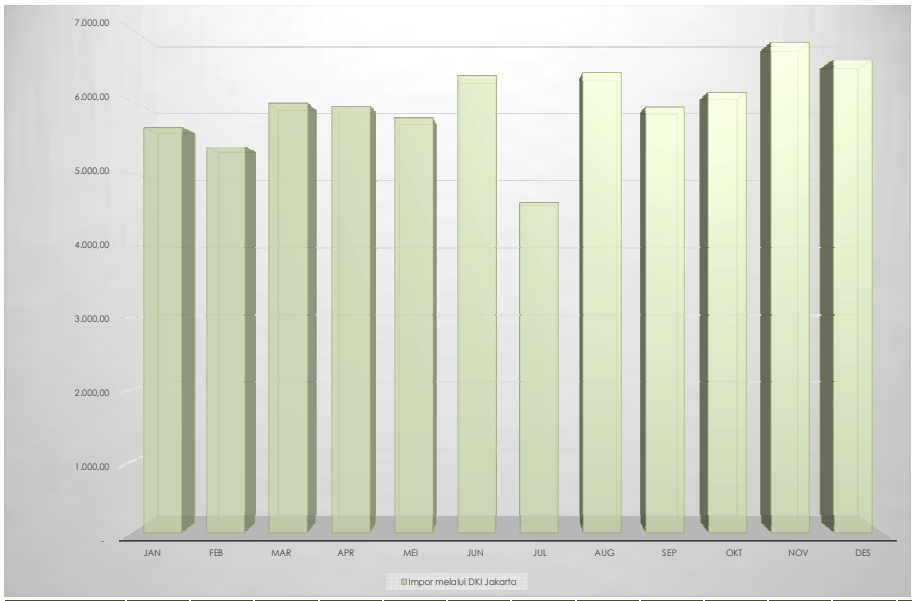

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Impor melalui DKI Jakarta	5.631,76	5.362,96	5.971,10	5.929,25	5.766,15	6.356,13	4.588,35	6.399,57	5.920,94	6.126,14	6.818,90	6.573,11

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Adapun impor yang dilakukan melalui DKI Jakarta dapat dilihat pada Grafik 2.5 berikut.

Grafik 2.5

Impor Melalui DKI Jakarta 2010-2016 (Juta US $)

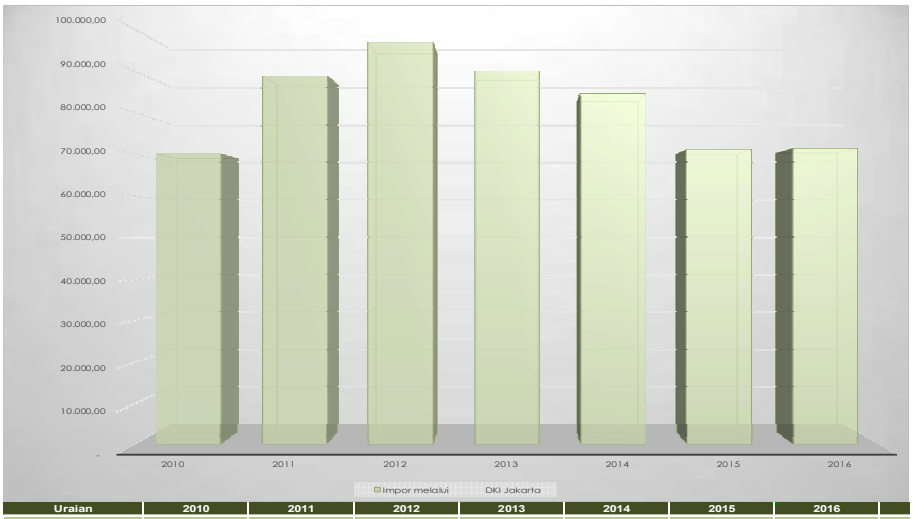

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Impor melalui DKI Jakarta	70.069,00	88.874,00	96.926,00	90.108,00	84.628,51	71.154,56	71.444,35

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Sedangkan nilai impor melalui DKI Jakarta menurut golongan barang dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3

Nilai Impor Melalui DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Dijit Tahun 2016

GOLONGAN BARANG		NILAI CIF (JUTA US$)
1	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	12.741,35
2	Mesin/Peralatan Listrik	11.076,75
3	Plastik dan Barang dari Plastik	4.488,94
4	Kendaraan dan Bagiannya	4.654,81
5	Besi dan Baja	3.670,61
6	Bahan Kimia Organik	1.999,52
7	Bahan Bakar Mineral	1.712,81
8	Perangkat Optik	1.845,54
9	Kapas	1.465,31
10	Kain Rajutan	1.083,47
Total 10 Komoditi		**44.739,11**
Lainnya		**26.705,24**
Total Impor Melalui DKI Jakarta		**71.444,35**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Selain nilai impor melalui DKI Jakarta m enurut golongan Barang HS, untuk memberikan informasi tentang impor yang lebih lengkap maka berikut disajikan data impor melalui DKI Jakarta menurut negara asal pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4

Impor Melalui DKI Jakarta menurut Negara Asal Tahun 2016

NEGARA ASAL		NILAI CIF (JUTA US$)
ASEAN		**16.880,06**
1	Singapore	4.499,93
2	Thailand	6.061,17
3	Malaysia	2.548,61
4	Vietnam	2.451,77
Asean Lainnya		1.318,58
ASIA		**39.093,38**
5	China	18.173,16
6	Japan	10.399,87
7	Korea, Republic Of	4.735,33
8	Taiwan, Province Of China	2.015,18
9	Hongkong	1.248,29
Asia Lainnya		2.521,55
AUSTRALIA dan OCEANIA		**2.351,55**
10	Australia	1.876,11
Australia dan Oceania Lainnya		475,44
AMERIKA		**5.552,99**
11	United States	3.968,56
Amerika Lainnya		1.584,43
EROPA		**7.596,82**
12	Germany	2.080,13
Eropa Lainnya		5.516,69
Total 12 Negara		**60.058,11**
Lainnya		**11.386,24**
Total		**71.444,35**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Selanjutnya Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang dapat dilihat pada Grafik 2.6 berikut.

Grafik 2.6

Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan Barang
Bulan Januari-Desember 2015 dan 2016

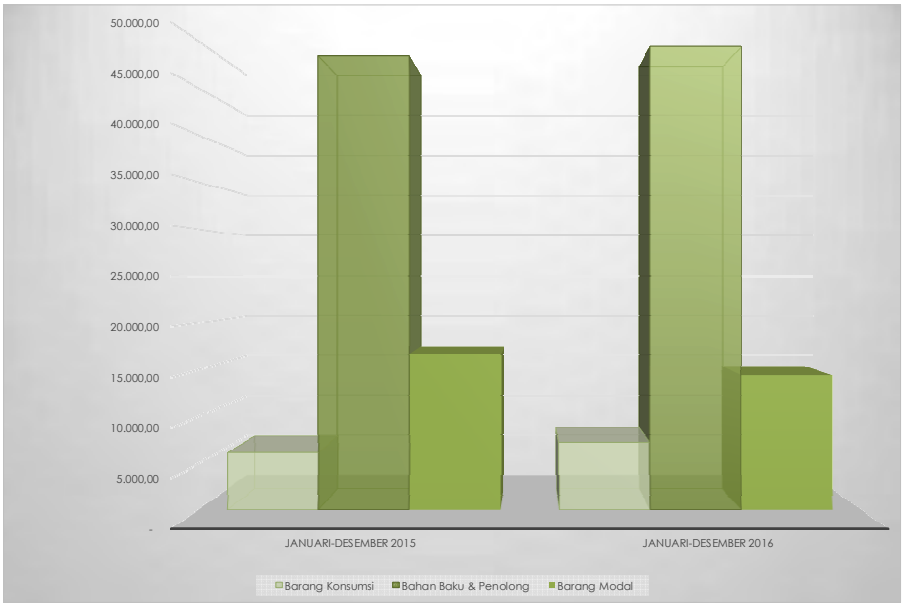

Uraian	Januari-Desember 2015	Januari-Desember 2016
Barang Konsumsi	6.139,53	7.191,00
Bahan Baku & Penolong	48.381,26	49.416,00
Barang Modal	16.633,77	14.387,00

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari gambaran tingkat kunjungan pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat perbelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu, inisiatif dan upaya berbagai kalangan untuk menyelengarakan event tetap berskala internasional, seperti Jakarta International Java Jazz, Indonesia Fashion Week, Jakarta Fashion and Food Festival dan event internasional lainnya menjadi alasan wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Jakarta.

Jumlah wisman yang berkunjung ke DKI Jakarta pada tahun 2016 sebesar 2.512.005 kunjungan atau meningkat sebesar 134.779 kunjungan (5,67 persen) jika dibandingkan tahun 2015 sebesar 2.377.226 kunjungan.

Secara grafis kunjungan wisatawan mancanegara dapat dilihat pada Grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7

Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta Tahun 2016
(ribu kunjungan)

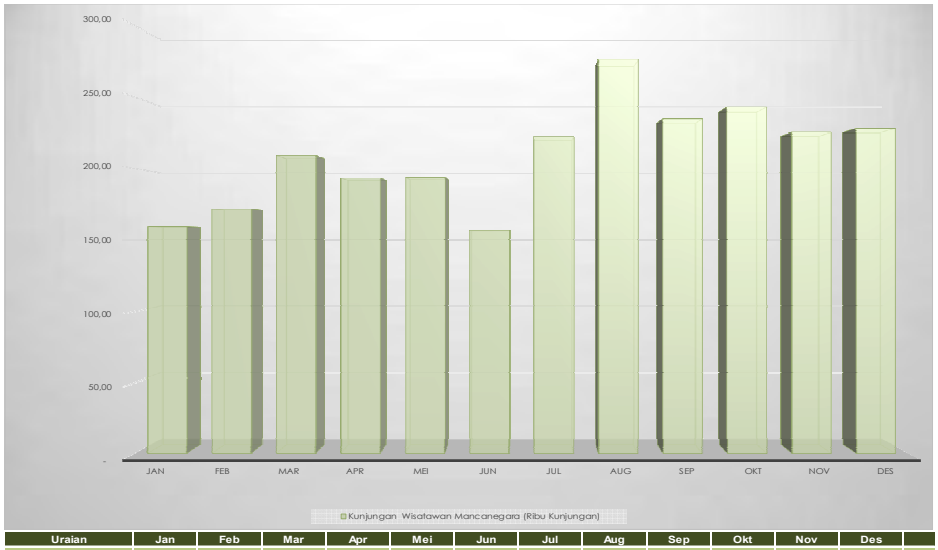

Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Ribu Kunjungan)	158,90	171,50	208,80	193,20	193,70	156,30	222,14	276,26	234,89	243,01	225,30	227,94

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Adapun jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke DKI Jakarta selama 7 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 2.8 berikut.

Grafik 2.8

Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung ke DKI Jakarta 2010-2016
(Juta Kunjungan)

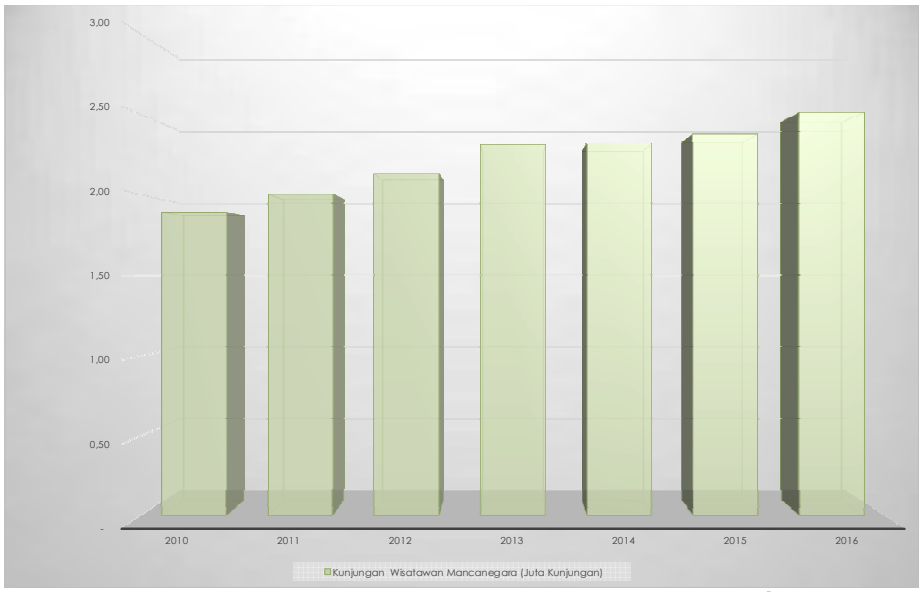

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan)	1,89	2,00	2,13	2,31	2,32	2,38	2,51

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian DKI Jakarta tahun 2016 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (tahun dasar 2010) mencapai 2.177,12 triliun rupiah dan PDRB perkapita per tahun mencapai 207,99 juta rupiah. Ekonomi DKI Jakarta tahun 2016 tumbuh sebesar 5,85 persen, melambat dibanding tahun 2015 sebesar 5,88 persen. Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pengangkutan dan Komunikasi merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,88 persen, diikuti oleh Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan sebesar 12,02 persen dan Jasa-jasa sebesar 11,36 persen.

Struktur perekonomian DKI Jakarta menurut lapangan usaha tahun 2016 didominasi oleh empat lapangan usaha utama yaitu Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan (37,01 persen); Perdagangan, Hotel dan Restoran (21,50 persen); Industri Pengolahan (13,55 persen); Konstruksi (12,88 persen) dan Pengangkutan dan Komunikasi (10,73 persen). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tahun 2016, lapangan usaha Keuangan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,45 persen; diikuti Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 1,40 persen; dan Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,04 persen.

Grafik 2.9

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2008-2016 (persen)

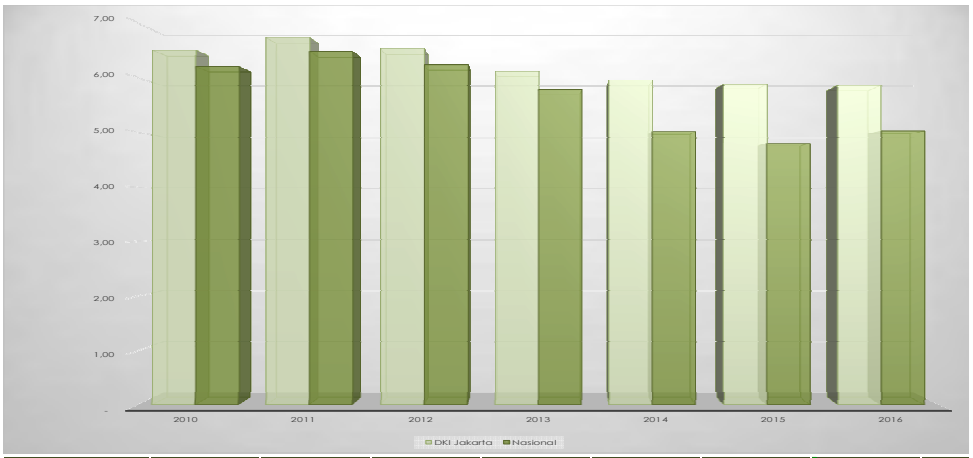

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	6,50	6,73	6,53	6,11	5,95	5,88	5,85
Nasional	6,20	6,48	6,23	5,78	5,01	4,79	5,02

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2016 adalah sebesar 2,37 persen, lebih rendah dari inflasi tahun 2015 yaitu 3,30 persen serta dari rata-rata lima tahun sebelumnya sebesar 4,95%. Pencapaian inflasi ini terutama dipengaruhi oleh perkembangan harga energy internasional yang masih terjaga yang kemudian diikuti diikuti dengan penurunan harga-harga komoditas energy dan transportasi di Jakarta. Di satu sisi, belum mebaiknya permintaan masyarakat akibat aktivias perekonomian yang belum terlalu bergairah, turut menyebabkan tekanan inflasi dari sisi permintaan (demand pull) yang relative terbatas. Di sisi lain, harga pangan secara umum juga masih terkendali, melalui perbaikan manajemen stok dan efisiensi rantai pasokan pangan.

Berdasarkan pembagian per kelompok komoditas, inflasi yang rendah pada tahun 2016 terjadi pada sebagian besar kelompok barang dan jasa. Kebijakan pemerintah menurunkan harga energy pada awal tahun 2016, menjadi penyebab utama rendahnya tekanan inflasi pada kelompok Transportasi yang mengalami deflasi 1,28%, Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar yang mengalami inflasi 2,42% dan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau yang mengalami inflasi 4,02% selain disebabkan kebijakan pemerintah menurunkan harga energy juga disebabkan perbaikan daya beli masyarakat yang masih terbatas, serta pergerakan nilai tukar yang stabil. Harga komoditas energy yang masih rendah juga memberikan dampak positif bagi biaya produksi berbagai lapangan usaha, sehingga tekanan inflasi dari sisi biaya (cost push) juga relatif terbatas.

Komoditas Pendidikan mengalami inflasi yang rendah sebesar 2,14%, jenis pendidikan yang banyak dan beragam untuk berbagai jenjang pendidikan menyebabkan harga yang ditawarkan menjadi lebih kompetitif. Pada kelompok Sandang, inflasi yang lebih rendah disebabkan oleh harga emas perhiasan yang cenderung stabil sebagai dampak dari harga emas dunia yang relative rendah serta permintaan yang terbatas mengakibatkan inflasi sebesar 4,17%. Inflasi kelompok Bahan Makanan bergerak relative terkendali, ditengah berlangsungnya fenomena La-Nina yang menyebabkan hujan berkepanjangan. Penguatan peran dan sinergi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta di bidang pangan, mampu menjaga pencapaian inflasi bahan makanan yang terkendali. Perbaikan rantai pasokan pangan, manajemen stok yang lebih baik serta berbagai kegiatan stabilisasi harga lainnya, membantu menjaga harga pangan dari fluktuasi yang berlebihan. Selain dari BUMD, peran TPID Jakarta melalui program stabilisasi harga, antara lain operasi pasar dan pasar murah yang rutin dilakukan, juga turut menahan gejolak inflasi pangan di ibukota yang mengalami inflasi 5,31%.

Dari seluruh kelompok barang, hanya kelompok kesehatan yang mengalami inflasi lebih tinggi. Upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, baik melalui Kartu Jakarta Sehat, maupun BOJS Kesehatan mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang mendorong meningkatnya permintaan akan jasa layanan kesehatan.

Grafik 2.10

Inflasi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2010 – 2016 (%)

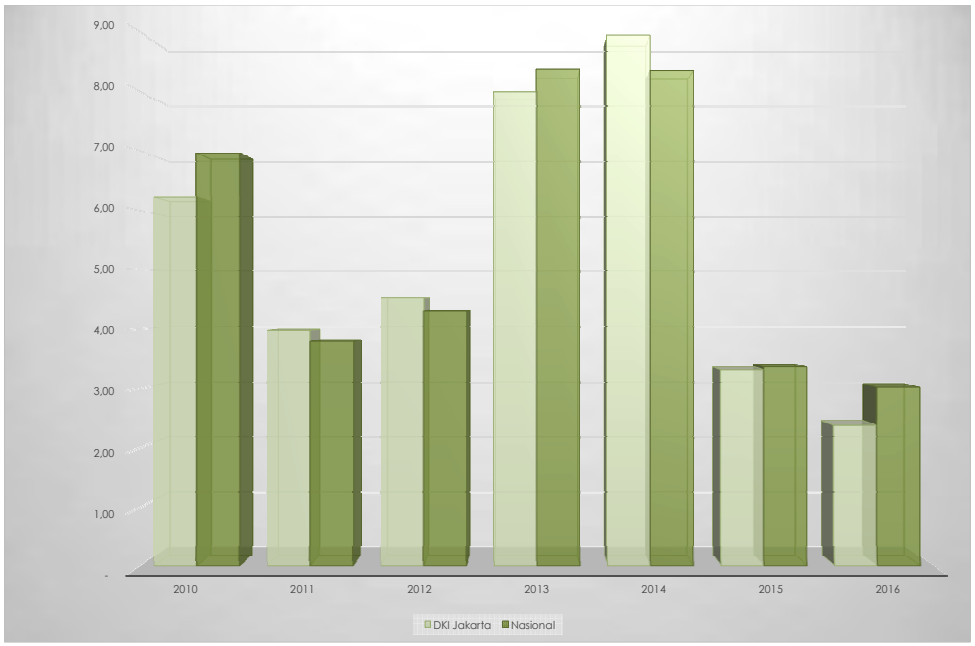

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DKI Jakarta	6,21	3,97	4,52	8,00	8,95	3,30	2,37
Nasional	6,96	3,79	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Grafik 2.11

Perkembangan Infasi DKI Jakarta Bulan Desember 2015 dan Januari - Desember 2016

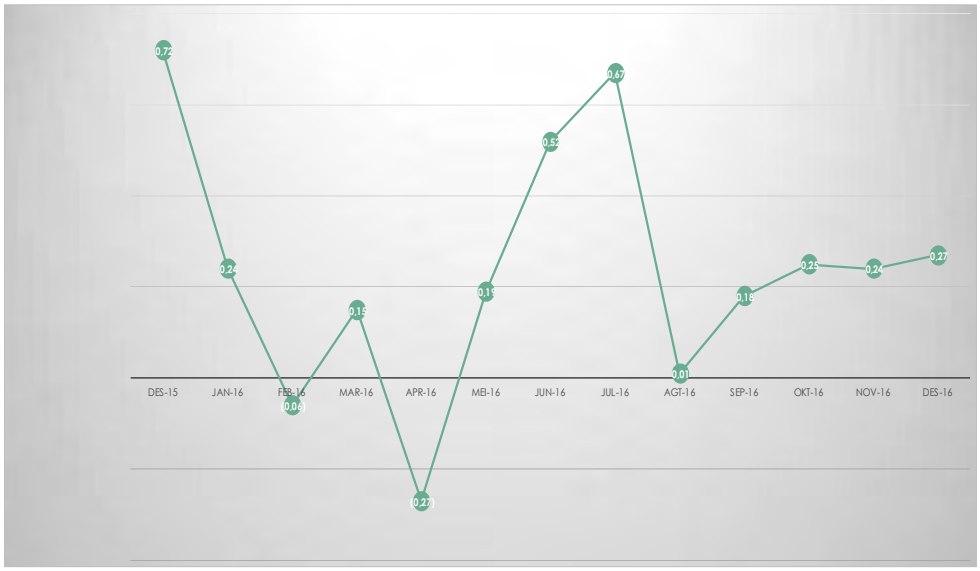

Uraian	Des-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	Mei-16	Jun-16	Jul-16	Agt-16	Sep-16	Okt-16	Nov-16	Des-16
Perkembangan Inflasi	0,72	0,24	(0,06)	0,15	(0,27)	0,19	0,52	0,67	0,01	0,18	0,25	0,24	0,27

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Berdasarkan disagregasi inflasi, rendahnya inflasi pada tahun 2016 didukung oleh deflasi kelompok administered prices, rendahnya inflasi inti dan terkendalnya volatile food. Kelompok administered prices

kembali mengalami deflasi pada triwulan IV 2016 dan menjadi salah satu penyebab rendah dan terkendalinya inflasi Jakarta. Penurunan harga BBM nonsubsidi pada triwulan I 2016 seperti pertamax dan pertalite, yang kemudian diikuti pula dengan turunnya tariff BBM bersubsidi pada April 2016, masih memberikan dampak yang cukup signifikan hingga akhir tahun 2016. Penurunan harga BBM, baik nonsubsidi maupun bersubsidi menyebabkan komoditas bensin mengalami deflasi sebesar 11,14% pada triwulan IV.

Rendahnya Inflasi Inti, belum solidnya perbaikan permintaan masyarakat hingga akhir tahun 2016 turut memengaruhi pergerakan inflasi inti yang terpantau rendah. Tekanan permintaan rumah tangga yang masih rendah tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 yang mencapai 5,49% atau lebih rendah dari rata-rata lima tahun sebelumnya sebesar 5,94%. Nilai tukar rupiah yang cenderung menguat sejak awal tahun 2016 turut berkontribusi terhadap terjaganya inflasi inti. Rupiah yang cenderung menguat menjadikan harga barang-barang impor, baik bahan baku produksi, barang modal maupun barang konsumsi menjadi lebih murah. Selain itu, harga energy yang relative rendah, turut membantu mengurangi tekanan biaya produksi, sehingga harga jual barang dan jasa dari produsen dapat dipertahankan stabil.

Volatile foods, inflasi kelompok bahan makanan yang sebesar 5,31% lebih rendah dari rata-rata inflasi kelompok bahan makanan pada lima tahun sebelumnya sebesar 7,52%. Deflasi subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya sebesar 0,12% serta rendahnya inflasi subkelompok daging dan hasil-hasilnya yang tercatat sebesar 2,19% menjadi penyumbang utama terkendalinya kelompok bahan makanan. Beras, yang termasuk dalam komoditas subkelompok padi-padian mengalami deflasi sebesar 0,83% jauh lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 11,57%. TPID Jakarta cukup berperan dalam pegendalian harga beras antara lain melalui perluasan kerjasama antar daerah dalam memasok beras ke DKI

Jakarta melalui standby buyer beras maupun pengelola Sistem Resi Gudang (SRG). Harga beras yang stabil dan cenderung turun, mampu menahan laju inflasi kelompok bahan makanan, mengingat bobotnya cukup besar dalam perhitungan inflasi. Harga subkelompok daging dan hasil-hasilnya yang stabil, turut mendukung terkendalinya inflasi bahan makanan. Daging ayam mengalami deflasi sebesar 1,3%, jauh lebih rendaj dari Desember tahun lalu yang mengalami inflasi 17,64%. Harga daging sapi yang juga relative stabil, dengan inflasi sebesar 5,5%, yang juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 10,01%. Upaya TPID Jakarta, melalui salah satu BUMD Pangan, untuk menjaga kesinambungan pasokan dilakukan dengan menyelenggarakan program pembelian sapi dari Provinsi NTT melalui kapal ternak, impr sapi, maupun breeding sapi. Kinerja volatile food pada triwulan IV 2016 sedikit terganggu oleh fenomena La-Nina. Hujan yang berkepanjangan, terutama di daerah sentra Hortikultura, menyebabkan kerusakan pada komoditas tersebut seperti aneka cabai dan bawang merah (kelompok bumbu-bumbuan), sehingga pasokan yang masuk ke ibukota turun. Kelompok Bumbu-bumbuan mengalami inflasi sebesar 30,70% diantaranya Bawang Merah mengalami inflasi 30,70% sementara Cabai Merah mengalami inflasi sebesar 45,49%. Walau demikian, deflasi subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya, serta relative stabil inflasi subkelompok pangan lainnya, mampu menahan gejolak bumbu-bumbuan yang berujung pada terkendalinya inflasi makanan.

Penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta BUMD yang bergerak dibidang pangan melalui TPID sangat diperlukan untuk memastikan terkendalinya inflasi di Ibukota. Pada tahun 2016, program kegiatan TPID Jakarta masih difokuskan pada pencapaian empat hal pokok yaitu Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi dan Keterjangkauan Harga.

Grafik 2.12

Laju Inflasi DKI Jakarta Tahun 2016 menurut Kelompok Pengeluaran

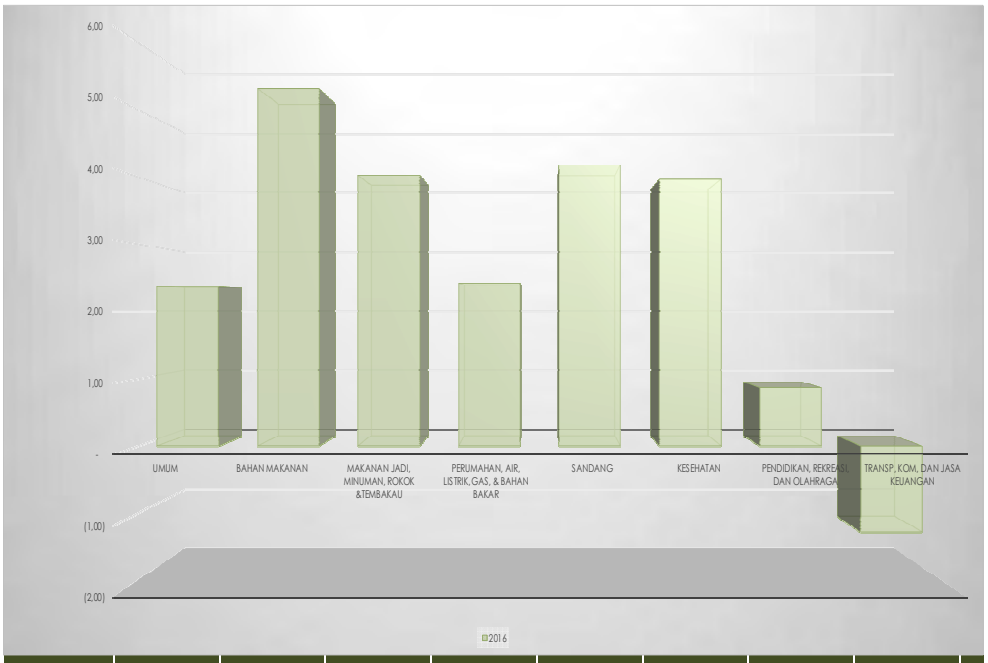

Uraian	Umum	Bahan Makanan	Makanan Jadi, Minuman, Rokok &Tembakau	Perumahan, Air, Listrik, Gas, & Bahan Bakar	Sandang	Kesehatan	Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga	Transp, Kom, dan Jasa Keuangan
2016	2,37	5,31	4,02	2,42	4,17	3,96	0,86	(1,28)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

d. Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2016 tumbuh sebesar 5,85 persen atau sedikit lebih rendah dari pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,88 persen. Namun demikian angka pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan seluruh Provinsi di Indonesia dan masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional yakni sebesar 5,02 persen. Lebih rendahnya pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2016 tersebut seiring dengan masih lemahnya pemulihan perekonomian global dan nasional sehingga berpengaruh pada masih terbatasnya kinerja ekspor ke luar negeri dan kinerja perdagangan antardaerah. Ditengah lemahnya pemulihan perekonomian tersebut, terdapat beberapa faktor positif yang mendorong pertumbuhan yaitu dorongan konsumsi rumah tangga dan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara.

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 2.177,12 triliun rupiah, meningkat sebesar 193,70 triliun rupiah atau 9,77% dibandingkan PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebesar 1.983,42 triliun rupiah.

Grafik 2.13

PDRB – Harga Berlaku (Triliun Rp) Tahun 2010-2016

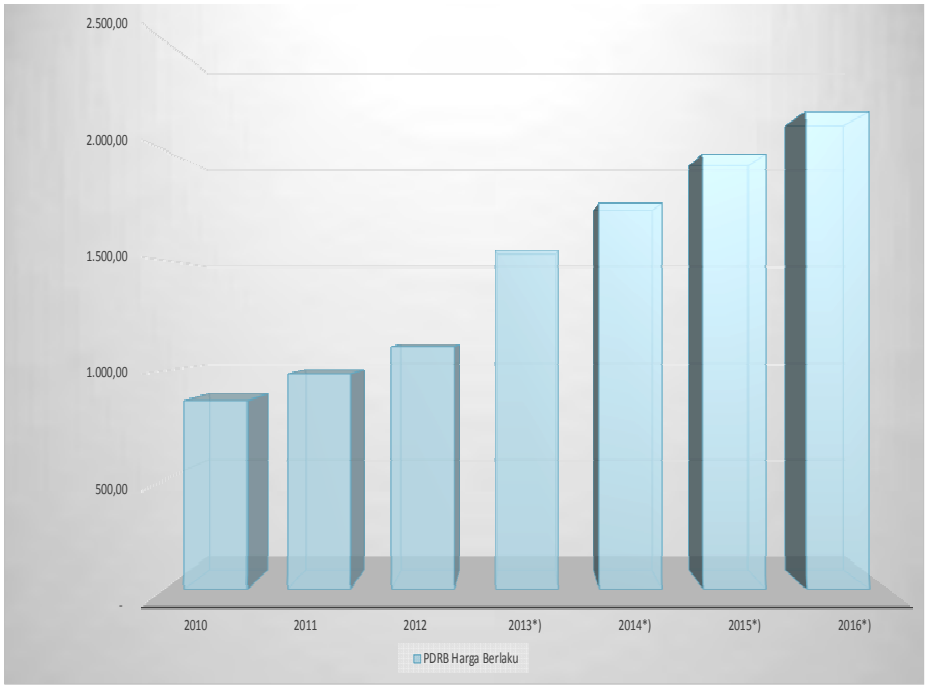

Uraian	2010	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)
PDRB Harga Berlaku	861,99	982,52	1.103,69	1.547,04	1.761,41	1.983,42	2.177,12

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2016 atas dasar harga konstan mencapai 1.539,38 triliun rupiah, meningkat sebesar 85,27 triliun rupiah atau 5,85% dibandingkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2014 sebesar 1.454,10 triliun rupiah.

Grafik 2.14

PDRB – Harga Konstan 2010 (Triliun Rp) Tahun 2010 – 2016

Uraian	2010	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)
PDRB Harga Konstan	395,62	422,24	449,81	1.297,20	1.374,35	1.454,10	1.539,38

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

Tahun 2009-2012 menggunakan Tahun Dasar 2000

**) Tahun 2013-2015 menggunakan Tahun Dasar 2010*

3) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 mencapai 207,99 juta rupiah, meningkat sebesar 13,12 juta rupiah per kapita atau 6,73% dibanding tahun 2015 sebesar 194,87 juta rupiah. Dan secara Nasional, PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku mencapai 4,34 kali lebih tinggi dari PDRB per kapita Nasional.

Grafik 2.15

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah) Tahun 2011-2016

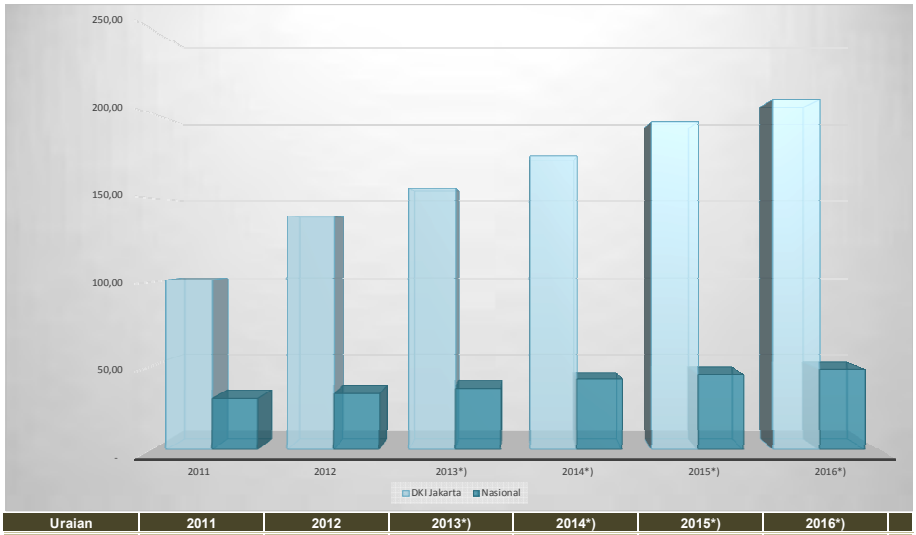

Uraian	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)
DKI Jakarta	100,98	138,86	155,17	174,82	194,87	207,99
Nasional	30,70	33,50	36,50	41,81	45,18	47,96

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kapita secara riil. Pada tahun 2016 PDRB per kapita meningkat sebesar 4,19 juta rupiah per kapita atau 2,93%, yaitu dari 142,87 juta rupiah di tahun 2015 menjadi 147,06 juta rupiah di tahun 2016.

Grafik 2.16

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)
Tahun 2010-2016

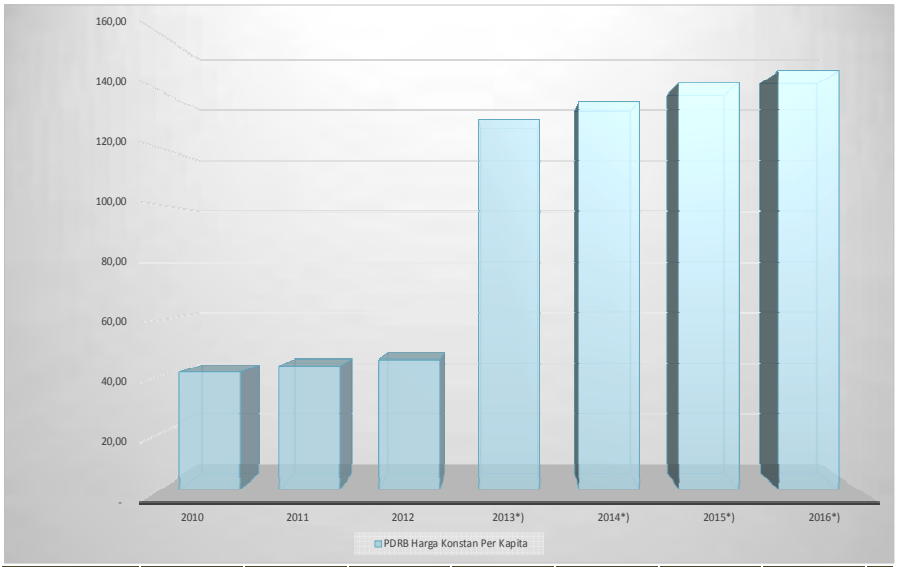

Uraian	2010	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)
PDRB Harga Konstan Per Kapita	41,18	43,40	45,61	130,11	136,41	142,87	147,06

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

<u>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Pengeluaran</u>

Pertumbuhan dari pendekatan Pengeluaran

a) Konsumsi Rumah Tangga : konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,49 persen pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,31 persen pada tahun 2015. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan konsumsi yang membaik signifikan dan tidak terlepas dari lebih baiknya persepsi maupun optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian domestik yang tercermin pada hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Meningkatnya penghasilan dan pendapatan masyarakat, yang didorong oleh bertambahnya ketersediaan lapangan pekerjaan

menyebabkan kondisi keuangan rumah tangga lebih leluasa untuk melakukan konsumsi dan belanja. Kondisi keuangan rumah tangga tersebut didukung oleh rendahnya tingkat inflasi sehingga dengan pendapatan riil yang lebih tinggi dapat digunakan untuk berbelanja barang dengan kuantitas lebih banyak karena harganya tidak memiliki kenaikan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu.

b) Konsumsi Pemerintah : konsumsi pemerintah tercatat tumbuh sebesar 2,43 persen pada tahun 2016, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,82 persen pada tahun 2015. Kontraksi pertumbuhan konsumsi pemerintah terjadi karena adanya efisiensi dan pemotongan anggaran Pemerintah Pusat yang dilakukan untuk mencegah peningkatan defisit penerimaan pajak pada tahun 2016, serta untuk penghematan anggaran. Pemotongan dan penghematan anggaran tersebut diimplementasikan melalui *self-blocking* atau tidak dicairkannya sebagian anggaran. Sebagai ibukota negara, sejumlah kantor pusat kementerian/ lembaga (K/L) memusatkan kegiatan dan koordinasi di kota Jakarta, sehingga pengeluaran anggaran dan belanja K/L tersebut tercatat sebagai nilai tambah konsumsi pemerintah dalam PDRB DKI Jakarta. Pangsa konsumsi K/L tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pangsa konsumsi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dinamika yang terjadi pada penyerapan anggaran K/L akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan konsumsi pemerintah. Pada tahun 2016, penyerapan K/L baru mencapai 89 persen, relatif lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tahun 2015 sebesar 91 persen.

   Namun demikian dari sisi APBD DKI Jakarta, serapan belanja APBD DKI Jakarta sebesar 82,40 persen pada tahun 2016 relatif lebih baik dibandingkan penyerapan tahun sebelumnya sebesar 71,90 persen pada tahun 2015.

c) Investasi : kinerja investasi DKI Jakarta tumbuh sebesar 1,57 persen pada tahun 2016. Pada tahun ini terjadi perlambatan pada kinerja investasi bangunan yang memiliki pangsa paling besar

terhadap komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 78 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari terhambatnya pembangunan proyek dan konstruksi yang diiinisiasi oleh pemerintah karena terjadi penundaan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) pemerintah dari APBN ke APBD Provinsi DKI Jakarta sebagai imbas dari adanya pemotongan anggaran pusat dan defisit penerimaan pajak.

Sementara itu, peran swasta dalam kegiatan investasi masih terbatas, yang terindikasi dari penyaluran kredit investasi sebesar 11 persen pada tahun 2016. Masih rendahnya investasi swasta tersebut tidak terlepas dari perilaku investor swasta yang masih melanjutkan perilaku *wait-and-see* terhadap kondisi ekonomi saat ini.

d) Ekspor : Pertumbuhan ekspor luar negeri tumbuh sebesar minus 0,42 persen pada tahun 2016, membaik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar minus 1,00 persen pada tahun 2015. Membaiknya pertumbuhan ekspor tahun 2016 masih lebih banyak ditopang oleh ekspor jasa melalui kunjungan wisatawan mancanegara yang memiliki rata-rata pangsa diatas 50 persen terhadap keseluruhan komponen ekspor luar negeri. Hal ini merupakan dampak positif dari pemberlakuan pembebasan visa kunjungan ke Indonesia bagi wisatawan dari beberapa negara.

Sejalan dengan membaiknya ekspor tersebut, impor DKI Jakarta sebesar minus 0,73 persen pada tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar minus 11,34 persen pada tahun 2015. Membaiknya impor tersebut merespons pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2016, dengan impor barang konsumsi yang mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 10,70 persen dan menopang pertumbuhan impor secara keseluruhan, di samping impor bahan baku dan barang modal yang juga tumbuh positif.

5) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2016 terbesar ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 58,70 persen, meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 58,38 persen. Kontribusi terbesar kedua ada pada investasi yakni komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 39,23 persen, melambat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 40,77 persen. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen perubahan inventori yang hanya 0,82 persen selama tahun 2016.

Tabel 2.5

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar HB (Miliar Rupiah)
Tahun 2011-2016

Pengeluaran	Tahun					
	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	560.065,23	627.777,28	943.845,00	1.069.514,00	1.157.939,53	1.277.890,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT			26.805,00	35.404,00	35.719,00	41.305,00
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	97.222,26	106.134,94	211.845,00	220.735,00	240.119,62	256.313,00
Pembentukan Modal Tetap Bruto	375.731,85	426.812,14	683.499,00	725.064,00	808.551,79	854.178,00
Perubahan Inventori			3.685,00	3.489,00	5.556,04	17.857,00
Ekspor Barang dan Jasa	540.935,50	620.131,70	272.126,00	298.308,00	329.760,73	330.150,00
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	591.421,24	677.163,40	964.203,00	1.164.992,00	951.755,60	924.439,00
Net Ekspor Antar Daerah			369.436,00	573.885,00	357.529,42	323.867,00
Produk Domestik Regional Bruto	**982.533,60**	**1.103.692,66**	**1.547.038,00**	**1.761.407,00**	**1.983.420,53**	**2.177.121,00**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

Tabel 2.6

Distribusi Persentase PDRB-HB Menurut Pengeluaran (Persen)
Tahun 2011-2016

Pengeluaran	Tahun					
	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	57,00%	56,88%	61,01%	60,72%	58,38%	58,70%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT			1,73%	2,01%	1,80%	1,90%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,90%	9,62%	13,69%	12,53%	12,11%	11,77%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,24%	38,67%	44,18%	41,16%	40,77%	39,23%
Perubahan Inventori			0,24%	0,20%	0,28%	0,82%
Ekspor Barang dan Jasa	55,06%	56,19%	17,59%	16,94%	16,63%	15,16%
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	60,19%	61,35%	62,33%	66,14%	47,99%	42,46%
Net Ekspor Antar Daerah			23,88%	32,58%	18,02%	14,88%
Produk Domestik Regional Bruto	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

6) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2016 naik 5,85 persen. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah komponen pengeluaran konsumsi pengeluaran konsumsi LNPRT (Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga) yang naik sebesar 11,67 persen. Terbesar kedua dan ketiga adalah Net Ekspor Antar Daerah dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang masing-masing naik sebesar 5,75 persen dan 5,49 persen. Sedangkan yang terkecil adalah komponen ekspor barang jasa yang menurun sebesar minus 0,42 persen.

Tabel 2.7

Distribusi Persentase PDRB-HK Menurut Pengeluaran (Persen)
Tahun 2014-2016

Pengeluaran	Tahun (Milyar Rp)			Pertumbuhan (%)		
	2014*)	2015*)	2016*)	2014*)	2015*)	2016*)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	808.336	850.790	897.529	3,19%	5,25%	5,49%
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	28.361	27.041	30.196	0,32%	-4,65%	11,67%
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	172.922	179.519	183.888	0,26%	3,82%	2,43%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	638.378	654.605	664.857	1,44%	2,54%	1,57%
Perubahan Inventori	2.850	5.602	9.250	-0,03%	96,56%	65,12%
Ekspor Barang dan Jasa	230.290	227.743	226.783	-0,10%	-1,11%	-0,42%
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	797.671	710.306	705.092	0,73%	-10,95%	-0,73%
Net Ekspor Antar Daerah	289.926	219.352	231.965	0,14%	-24,34%	5,75%
Produk Domestik Regional Bruto	**1.373.392**	**1.454.346**	**1.539.376**	**5,95%**	**5,89%**	**5,85%**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan Lapangan Usaha

Pertumbuhan dari pendekatan Lapangan Usaha

a) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor : membaiknya konsumsi rumah tangga pada tahun 2016 berdampak positif pada pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 4,66 persen pada tahun 2016, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,67 persen pada tahun 2015. Meningkatnya kegiatan belanja masyarakat yang tercermin pada peningkatan belanja rumah tangga pada akhir tahun khususnya menjelang hari raya natal dan tahun baru 2017.

   Membaiknya sektor perdagangan juga tercermin pada indeks Survei Perdagangan Eceran (SPE) Bank Indonesia yang meningkat pada akhir tahun 2016, terutama pada indeks penjualan makanan minuman, indeks penjualan barang rumah tangga, serta indeks penjualan barang rekreasi.

b) Jasa Keuangan dan Asuransi : lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi mencatat perlambatan pertumbuhan. Lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi tumbuh sebesar 8,50 persen, melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,72 persen. Hal ini tercermin dari melambatnya kinerja pasar modal di penghujung tahun 2016. Hal tersebut didorong oleh dinamika dan gejolak ekonomi di negara-negara maju seperti Eropa dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) dan direalisasikannya penyesuaian *Fed Fund Rate* (FFR) di Amerika Serikat pada Desember 2016, sehingga mendorong aliran dana keluar dari negara-negara berkembang menuju Amerika Serikat. Keluarnya dana asing tersebut juga berpengaruh pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

c) Lapangan Usaha Lainnya : lapangan usaha lainnya seperti Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Transportasi juga menjadi sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2016. Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan informasi masyarakat, terjadi perubahan pola komunikasi seluler masyarakat, yaitu dari pemakai telepon (*voice*) dan *short message services* (sms) menjadi pemakai data. Selain itu, penetrasi penggunaan social media yang semakin tinggi turut berdampak pada pertumbuhan pembelian dan pemakaian data selular. Tingginya permintaan masyarakat akan data yang lebih cepat, mendorong pelaku usaha untuk terus mengembangkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pelanggannya. Hal tersebut mendorong lapangan usaha informasi dan komunikasi masih tumbuh pada level yang relatif tinggi sebesar 10,82 persen pada tahun 2016 meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 10,05 persen pada tahun 2015.

   Semakin maraknya pengguna layanan transportasi yang berbasis aplikasi telepon pintar juga mendorong kinerja pertumbuhan jasa transportasi, disamping moda transportasi umum konvensional

seperti bus Transjakarta dan angkutan kereta *Commuter Line* dengan jumlah penumpang yang semakin tinggi. Selain itu, pertumbuhan lapangan usaha transportasi juga didorong oleh bertambahnya frekuensi penerbangan dan jumlah penumpang yang melakukan penerbangan melalui bandara Halim Perdanakusuma untuk penerbangan komersial yang terus melanjutkan tren peningkatan. Dengan perkembangan tersebut, lapangan usaha transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 11,24 persen pada tahun 2016, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 9,04 persen pada tahun 2015.

d) Konstruksi : pertumbuhan lapangan usaha konstruksi tumbuh sebesar 1,37 persen pada tahun 2016, melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 3,99 persen pada tahun 2015. Salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan lapangan usaha konstruksi adalah karena tertundanya sebagian proyek konstruksi sebagai akibat dari defisit penerimaan pajak dan penundaan pemberian DBH dari APBN ke APBD yang akan digunakan untuk pendanaan proyek konstruksi.

e) Industri pengolahan : membaiknya permintaan berdampak pada pertumbuhan positif lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh sebesar 3,64 persen pada tahun 2016, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,08 persen pada tahun 2015. Pertumbuhan positif lapangan usaha industri pengolahan tidak terlepas dari kontribusi alat angkut di DKI Jakarta yang memiliki pangsa dominan sebesar 56 persen. Dari segi pembiayaan, pertumbuhan positif lapangan usaha industri pengolahan juga tercermin dari pertumbuhan kredit ke sektor industri pengolahan yang mengalami peningkatan setelah mengalami penurunan pada tahun 2015.

7) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (*Service City*) tercermin dari struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut sektoral (lapangan usaha). Sekitar 72,91 persen PDRB Jakarta berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa,

dan pengangkutan), sebesar 26,76 persen berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,33 persen dari sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Tabel 2.8

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar HB (Miliar Rupiah)
Tahun 2014-2016

Lapangan Usaha	Tahun						Struktur (%)
	2011	2012	2013*)	2014*)	2015*)	2016*)	2016*)
Pertanian	919	968	1,618	1,711	1,867	1,985	0.09%
Pertambangan dan Penggalian	4,934	5,182	4,288	4,541	5,033	5,181	0.24%
Industri Pengolahan	153,621	172,335	209,779	239,597	274,492	295,043	13.55%
Listrik Gas dan Air Bersih	95,884	10,234	5,749	6,285	6,775	7,129	0.33%
Konstruksi	112,056	126,274	210,651	234,184	261,074	280,432	12.88%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	204,474	224,043	340,870	397,029	436,202	468,080	21.50%
Pengangkutan dan Komunikasi	101,102	114,229	160,071	183,233	206,909	233,561	10.73%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	271,632	305,618	367,616	413,594	719,345	805,837	37.01%
Jasa-jasa	124,211	140,811	246,396	281,233	71,724	79,871	3.67%
Produk Domestik Regional Bruto	**982,533.60**	**1,103,692.66**	**1,547,037.80**	**1,761,407.10**	**1,983,420.53**	**2,177,119.00**	**100.00%**
PDRB Tanpa Migas	**977,599.23**	**1,098,510.57**	**1,542,749.80**	**1,756,866.10**	**1,978,387.80**	**2,171,938.00**	**99.76%**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

8) PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan

Sumbangan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,45 persen diberikan oleh sektor keuangan-real estate-jasa perusahaan yang tumbuh sebesar 6,89 persen diikuti sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu sebesar 1,40 persen dengan laju pertumbuhan 10,92 persen dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 1,04 persen dengan laju pertumbuhan 4,93 persen. Sedangkan untuk sektor-sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1 persen seperti, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sedangkan sektor pertanian, sektor pertambangan-penggalian dan sektor listrik-gas-air bersih menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni kurang dari 0,1 poin.

Tabel 2.9

PDRB – Menurut Lapangan usaha Atas Dasar HK 2010 (Miliar Rupiah)
Tahun 2014-2016

Lapangan Usaha	Nilai (Milyar Rp)			Laju Pertumbuhan Tahun 2016	Sumber Pertumbuhan (%)
	2014*)	2015*)	2016*)		
Pertanian	1,355	1,375	1,388	0.95%	0.00%
Pertambangan dan Penggalian	2,977	2,956	2,912	-1.49%	0.00%
Industri Pengolahan	178,117	186,809	193,610	3.64%	0.47%
Listrik Gas dan Air Bersih	4,376	4,576	4,571	-0.11%	0.00%
Konstruksi	187,587	195,805	198,486	1.37%	0.18%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	297,813	307,445	322,615	4.93%	1.04%
Pengangkutan dan Komunikasi	170,348	187,059	207,488	10.92%	1.40%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	333,653	516,601	552,210	6.89%	2.45%
Jasa-jasa	198,123	51,720	56,098	8.46%	0.30%
Produk Domestik Regional Bruto	**1,374,349**	**1,454,346**	**1,539,378**	**5.85%**	**5.85%**
PDRB Tanpa Migas	**1,371,372**	**1,451,390**	**1,536,466**	**5.86%**	

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*) Atas Tahun Dasar 2010

9) Koefisien Gini

Koefisien Gini di DKI Jakarta selama periode 2014-2016 terus menunjukkan penurunan. Pada September 2016, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk DKI Jakarta yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,397. Angka ini menurun sebesar 0,014 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2016 yang sebesar 0,411. Sementara itu jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2015 yang sebesar 0,421, Gini Ratio September 2016 turun sebesar 0,024 poin. Dan distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 16,49 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan sedang.

Tabel 2.10

Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta Tahun 2010-2016

Tahun	Tahun			Gini Ratio
	40 % Berpendapatan Rendah	40 % Berpendapatan Sedang	20 % Berpendapatan Tinggi	
2010	18.25	34.08	47.66	38.10%
2011	16.96	35.37	47.67	38.50%
2012	15.67	33.94	50.39	39.70%
2013	17.59	31.51	50.90	36.40%
2014	14.66	35.55	49.79	43.60%
2015	16.57	33.48	49.95	42.11%
2016	16.49	37.29	46.22	39.70%

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

*Data Per September Setiap Tahunnya

Menurunnya ketimpangan pendapatan tercermin dari membaiknya distribusi pendapatan. Perbaikan kondisi ketimpangan disebabkan oleh pergerakan komposisi pendapatan kelas menengah atas dalam perekonomian. 40% masyarakat berpendapatan sedang mengalami perbaikan penguasaan kue ekonomi yang cukup baik. Pada September 2016 kelompok tersebut menguasai 37,29 persen meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (September 2015) yang hanya sebesar 33,48 persen. Sementara itu, porsi penguasaan kue perekonomian dari 20 persen masyarakat berpendapatan tertinggi (masyarakat kaya) mengalami penurunan. Pada September 2015 kelompok masyarakat kaya mampu menguasai perekonomian hingga 49,95 persen dan semakin turun pada September 2016 yaitu sebesar 46,22 persen. Namun, 40 persen kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah relatif tidak mengalami peningkatan yang signifikan terhadap penguasaan output perekonomian. Per September 2016 kelompok ini mendapatkan porsi sebesar 16,49 persen dari output yang dihasilkan perekonomian. Atau turun dari periode yang sama tahun sebelumnya (September 2015) yang sebesar 16,57 persen. Menurunnya kinerja lapangan usaha industri pengolahan dan

perdagangan besar dan eceran, yang merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, ditengarai menjadi salah satu faktor terbatasnya perbaikan pendapatan masyarakat dari kelompok berpendapatan rendah.

10) Investasi

Realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar 45,24 Triliun rupiah. Sedangkan realisasi investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2015 adalah sebesar 15,51 Triliun rupiah.

Grafik 2.17

Investasi PMA dan PMDN di Jakarta Tahun 2011-2015

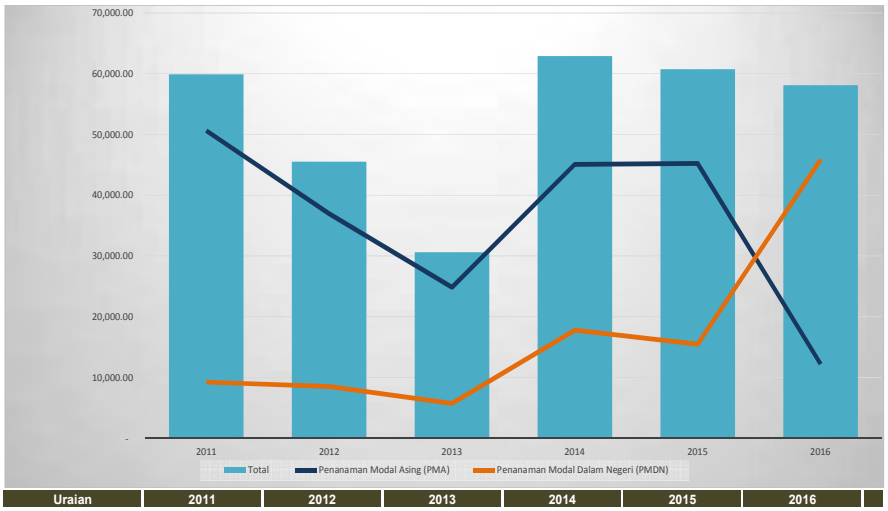

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Penanaman Modal Asing (PMA)	50,652.83	36,969.49	24,874.82	45,093.63	45,242.41	12,216.89
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	9,256.40	8,540.07	5,754.46	17,811.43	15,512.73	45,875.57
Total	**59,909.23**	**45,509.56**	**30,629.28**	**62,905.06**	**60,755.14**	**58,092.46**

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta 2017

2.2 Kebijakan Keuangan

Untuk tahun 2016, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. dan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2016 tetap difokuskan pada langkah-langkah antara lain : (1) meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Daerah; (2) meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan yang lebih rasional dan proporsional; (3) meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pokok di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan di tahun 2016. Kebijakan ini selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2016 dilakukan dengan memperhatikan kebijakan yang ada pada RPJMD 2013 – 2017 dan RKPD tahun 2016. Kebijakan pendapatan daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah dan Dana Perimbangan serta Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehubungan dengan kebijakan tersebut telah dilakukan langkah-langkah yang berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif sebagai berikut :

1. Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

   a. Melakukan perubahan tarif pajak progresif untuk Kendaraan Bermotormilik pribadi;
   b. Memperhitungkan dampak kebijakan Pemerintah pusat atas penghapusanBBM bersubsidi secara bertahap;

c. Memperhitungkan dampak kebijakan Pemerintah pusat atas peningkatanTarif Dasar Listrik (TDL);
d. Melakukan penyesuaian nilai Zona Nilai Tanah (ZNT) dan pemuktahiran basis data PBB P2;
e. Meningkatkan tarif pajak hiburan terhadap jenis hiburan tertentu;
f. Meningkatkan jumlah wajib pajak yang dapat dimonitor secara *Online*;
g. Menyempurnakan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi;
h. Memonitor dan mengevaluasi secara optimal semua jenis pajak.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
   a. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD;
   b. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga;
   c. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
   d. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui *Debt Management.*
3. Kebijakan Dana Perimbangan

   Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta perolehan DAU dan meningkatkan kerjasama intensifikasi pemungutan PPh orang pribadi.
4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

   Kebijakan umum lain-lain pendapatan yang sah difokuskan untuk melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT sesuai perjanjian perubahan (*amandemen*) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan

Hibah (NPPH), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2016 tetap ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari tingkat kota/kabupaten administrasi ke bawah terus menjadi perhatian seiring dengan pendelegasian kewenangan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dimaksud. Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Yang Bersifat Mengikat

a. Memenuhi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai, yaitu :

1) Menaikan gaji pokok berdasarkan gaji dan tunjangan 2016 serta *acress* sebesar 2,5 persen;

2) Menaikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) yang berbasis kinerja individu berdasarkan *merit point – reward and punishment*;

b. Memenuhi Belanja Bunga dan mengalokasikan untuk :

1) Pembayaran *Tipping Fee* Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang;
2) Pembayaran rekening Penerangan Jalan Umum (PJU);
3) Pembayaran belanja Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI) untuk 12 bulan secara hemat dan efisien, serta pengalokasian untuk Belanja Pengolahan Air Limbah di setiap gedung Pemda.

B. Kebijakan Terkait Pemenuhan Belanja Prioritas Dalam Pencapaian Visi Dan Misi RPJMD

1) Melaksanakan Program Unggulan dan Program Prioritas dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD.
2) Mengedapankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan.
3) Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan nasional *(Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Environtment*, MDG's dan MP3EI) serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan.
4) Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat serta program-program yang didanai oleh Lembaga Keuangan Internasional.
5) Mengakomodir seluruh program pembangunan yang dijaring melalui Aspirasi Masyarakat dalam Musrenbang.
6) Mengakomodir kegiatan-kegiatan aspirasi masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD pada kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, gedung sekolah, puskesmas; pengadaan truk dan alat berat; serta pembebasan lahan untuk RTH, ruang interaksi publik dan infrastruktur lainnya
7) Meningkatkan Kerjasama Jabodetabek antara lain meliputi: pembebasan lahan Waduk, pengelolaan sampah dan pengamanan ketersediaan pangan.
8) Meningkatkan Kerjasama Jabodetabek antara lain meliputi :
    1) Pembebasan lahan untuk Waduk;
    2) Pembangunan infrastruktur terkait penanganan banjir, penanganan transportasi dan pengelolaan sampah;
9) Meningkatkan peran Jakarta sebagai Ibukota Negara antara lain meliputi :
    1) Pengembangan Transportasi;
    2) Penanganan Banjir;
    3) Pengembangan Perumahan Rakyat;
    4) Penataan Air Bersih dan Air Limbah;

5) Penyediaan Energi;

C. Kebijakan Terkait Pengalokasian Belanja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

1) Melaksanakan program yang bersifat pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD / UKPD.
2) Meningkatkan pelayanan masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten hingga Provinsi, termasuk penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW.
3) Mendelegasikan sebagian tugas-tugas Provinsi ke Kota/Kabupaten antara lain melalui pengaturan pelaksanaan tugas-tugas pemeliharaan khususnya terkait pemeliharaan jalan, saluran, penanganan kebersihan, perbaikan taman dan penerangan jalan umum;
4) Memaksimalkan kegiatan-kegiatan dilaksanakan dengan mekanisme swakelola;
5) Memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang terkait langsung dengan pelayanan publik dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang berorientasi untuk kepentingan aparatur dengan:
   1) Tidak menganggarkan pemberian honorarium kepada PNS kecuali untuk Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber dan Pegawai Non PNS.
   2) Tidak menganggarkan Biaya Pengendalian Teknis.

D. Kebijakan Terkait Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga

Memenuhi Belanja untuk pengalokasian hibah dan bantuan sosial serta bantuan keuangan dan belanja tak terduga sesuai dengan tingkat rasionalitas.

Untuk melihat perkembangan Belanja Daerah dapat dilihat ringkasan rencana dan realisasi Belanja Daerah pada tahun 2012-

2016 berikut:

No.	Uraian	2012		2013		2015		2016	
		Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi	Penetapan	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	11.507,41	11.673,11	14.968,96	13.148,63	17.125,17	12.634,34	26.360,69	23.768,62
2.	Belanja Langsung	22.319,62	19.885,59	31.609,90	25.145,76	46.524,35	25.167,77	31.004,34	23.360,18
JUMLAH BELANJA DAERAH		**30.922,35**	**33.827,03**	**46.578,86**	**38.294,39**	**63.649,52**	**37.802,11**	**57.365,04**	**47.128,81**

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, juga terdapat komponen pembiayaan daerah yang meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul antara lain karena ada selisih pendapatan dan belanja.

Sumber penerimaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan sumber pengeluaran daerah terdiri dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Unggulan

1. Pengembangan Sistem Transportasi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

a) Pemeliharaan terminal bus, meliputi : pemeliharaan Terminal Bus Kampung Rambutan, Kalideres, Pulogadung, Tanjung Priok, Grogol, Pasar Minggu, dan Kampung Melayu.

b) Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Bulan Desember 2016. Pengoperasian terminal tersebut dilaksanakan secara bertahap mengingat pemindahan

perusahaan angkutan (PO) yang sebelumnya beroperasi di Terminal Terpadu Pulogadung cukup kompleks. Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota Antar Propinsi yang telah dioperasikan di Terminal Terpadu Pulogebang utamanya adalah bus dengan tujuan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari 110 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah 1.800 bus yang telah terdaftar, saat ini yang telah aktif beroperasi di Terminal Terpadu Pulo Gebang sejumlah 55 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah armada sebanyak 220 bus. Dalam usaha memaksimalkan pengoperasian Terminal Terpadu Pulogebang telah dilaksanakan operasi penertiban terminal bayangan di sekitar Terminal Pulogadung.

c) Pemeliharaan lift dan juga tangga berjalan/ eskalator untuk menunjang pengoperasian layanan Terminal Terpadu Pulogebang serta kegiatan lainnya untuk masyarakat.

d) Peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Setiabudi Utara, Jakarta Selatan serta beberapa kegiatan pemeliharaan selasar maupun bangunan JPO lainnya di beberapa koridor *busway* dalam usaha mendukung operasional angkutan massal berbasis jalan demi terciptanya kenyamanan bagi pengguna fasilitas umum.

e) Penyediaan prasarana serta pengamanan Angkutan Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru di seluruh terminal dibawah koordinasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan serta di Terminal Terpadu Pulo Gebang yang sudah mulai digunakan untuk operasional beberapa Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang telah mulai memindahkan layanannya ke terminal tersebut.

f) Pelaksanaan konsultansi berupa Survey Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) PT. Transportasi Jakarta terkait dengan jumlah *Public Service Obligation* (PSO) yang harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas

pelayanan PT. Transportasi Jakarta. Selain itu, telah dilaksanakan pula Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke sebagai dokumen acuan pengembangan Pelabuhan Muara Angke.

g) Pengadaan GPS Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Angkutan Sekolah dan Perawatan Halte Bus Sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan sekolah di Provinsi DKI Jakarta.

h) Pelaksanaan evaluasi rute layanan angkutan sekolah yang sebelumnya pada tahun 2015 terdapat 19 (sembilan belas) rute reguler dan 8 (delapan) rute zonasi, pada tahun 2016 untuk rute reguler terdapat penambahan 5 (lima) rute baru dan penghapusan 1 (satu) rute, sedangkan pada rute zonasi terdapat pengembangan 3 (tiga) rute baru. Dengan demikian secara total pada tahun 2016 terdapat total 34 (tiga puluh empat) rute layanan angkutan sekolah, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) rute reguler dan 11 (sebelas) rute zonasi. Kegiatan evaluasi dan pengembangan layanan angkutan sekolah ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan layanan kepada masyarakat.

i) Perawatan gudang bengkel Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebagai upaya agar pelaksanaan perawatan armada angkutan sekolah semakin optimal.

2) Program Pembangunan Angkutan Massal Berbasis Rel

a) Pengadaan Tanah untuk koridor MRT Lebak Bulus - Bunderan Senayan seluas 12.274 m^2.

b) Penyelesaian pembebasan lahan 25 (dua puluh lima) bidang tanah seluas 2.289 m^2, untuk pembangunan Depo MRT di Lebak Bulus, yang sebelumnya tertunda pembebasannya pada tahun 2015.

c) Pelaksanaan jasa konsultansi Kajian Penyusunan SPM dan SOP Kereta Api Ringan/ LRT yang diperlukan untuk mempersiapkan pengoperasian kereta api ringan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu telah dilaksanakan pula penyusunan Kajian *Willingness To Pay/ Ability To Pay* (WTP/ATP) Angkutan Kereta Api Ringan yang diperlukan dalam penyusunan tarif angkutan Kereta Api Ringan/ LRT.

3) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

a) Penyelesaian Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta seluas 409.364 m^2 dengan panjang 49.129 m, meliputi:

- Jl. S. Parman menggunakan beton *rapid setting* seluas 10.950 m^2 dengan panjang 1.944 m
- Jl. Latumenten berupa *Cold Mix Recycling by Foam Bitumen* (CMFRB) seluas 10.021 m^2 dengan panjang 1.028 m dan perkerasan aspal seluas 20.677 m^2 dengan panjang 2.121 m
- Jl. Makaliwe berupa CMFRB seluas 12.274 m^2 dengan panjang 1.259 m dan perkerasan aspal seluas 25.485 m^2 dengan panjang 2.692 m
- Jl. Pantai Indah Timur berupa CMFRB seluas 11.073 m^2 dengan panjang 1.582 m dan perkerasan aspal seluas 11.835 m^2 dengan panjang 1.691 m
- Jl. Joglo Raya berupa CMFRB seluas 5.867 m^2 dengan panjang 903 m dan perkerasan aspal seluas 34.500 m^2 dengan panjang 3.592 m
- Jl. Jeruk Joglo berupa CMFRB seluas 22.252 m^2 dengan panjang 3.179 m dan perkerasan aspal seluas 24.585 m2 dengan panjang 3.512 m
- Jl. Sutoyo berupa CMFRB seluas 26.912 m^2 dengan panjang 2.911 m dan perkerasan aspal seluas 29.406 m^2 dengan panjang 3.267 m
- Jl. Perintis Kemerdekaan berupa CMFRB seluas 26.567 m^2 dengan panjang 2.415 m dan perkerasan aspal seluas

29.634 m^2 dengan panjang 2.694 m

- Jl. Bekasi Raya berupa CMFRB seluas 1.579 m^2 dengan panjang 105 m dan perkerasan aspal seluas 1.824 m^2 dengan panjang 122 m
- Jl. Pulogebang berupa CMFRB seluas 3.055 m^2 dengan panjang 204 m dan perkerasan aspal seluas 3.752 m^2 dengan panjang 250 m
- Jl. Wahidin & Benteng berupa CMFRB seluas 4.683 m^2 dengan panjang 669 m dan perkerasan aspal seluas 9.549 m^2 dengan panjang 1.364 m
- Jl. Panjang dengan pekerjaan aspal seluas 67.064 m^2 dengan panjang 9.581 m
- Jl. Kebon Sirih dengan perkerasan aspal seluas 11.574 m^2 dengan panjang 1.653 m
- Jl. Ridwan Rais dengan perkerasan aspal seluas 9.232 m^2 dengan panjang 1.319 m
- Jl. Merdeka Selatan dengan perkerasan aspal seluas 31.808 m^2 dengan panjang 4.544 m
- Jl. Merdeka Timur seluas 15.337 m^2 dengan panjang 2.191 m
- Silang Monas dengan perkerasan aspal seluas 17.774 m^2 dengan panjang 889 m
- Perempatan Tugu Tani dengan perkerasan aspal seluas 1.759 m^2 dengan panjang 88 m
- Perempatan sabang dengan perkerasan aspal seluas 1.526 m^2 dengan panjang 76 m
- Jl. Prapatan dengan perkerasan aspal seluas 7.344 m^2 dengan panjang 668 m
- Jl. Gatot Subroto dengan perkerasan aspal seluas 32.334 m^2 dengan panjang 3.404 m
- Jl. Taman Mini I dengan perkerasan aspal seluas 11.442 m^2 dengan panjang 1.467 m

Lokasi – lokasi tersebut juga dilengkapi dengan Pekerjaan Marka dengan total volume sebesar 12.797 m^2

b) Penyelesaian Peningkatan Jalan di lima kota administrasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Bina Marga seluas 653.795 m^2 antara lain :

Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 46.734 m^2 meliputi:

- Kecamatan Cempaka Putih seluas 8.530 m^2 yang berlokasi di Jl. Cempaka Warna Komplek Taman Lagura Komplek Cempaka Indah dan Jl. Kebanggaan
- Kecamatan Gambir seluas 10.641 m^2 yang berlokasi di Jl. Batu Tulis 1, Jl. Batu Tulis 3 Lanjutan, Jl. Batu Tulis 5, Jl. Batu Tulis 6, Jl. Batu Tulis 8, Jl. Batu Tulis 9, Jl. Batu Tulis 10, Jl. Batu Tulis 13, Jl. Batu Tulis 14, Jl. Batu Tulis 15, Jl. Supiori, Jl. Inspeksi Kali Krukut, Jl. Duri B Masjid, Jl. Duri B1, Jl. Duri B7 dan Jl. Batu Tulis 4
- Kecamatan Kemayoran seluas 8.533 m^2 yang berlokasi di Jl. Mutiara Raya, Jl. Bangau 2, Jl. Bangau 3, Jl. Bangau 4, Jl. Bangau 5, Jl. Bangau 6, Jl. Bangau 9, Jl. Bangau Buntu, Jl. Kepu Dalam 1 Lanjutan, Jl. Kepu Dalam 3 Lanjutan, Jl. Kali Baru Timur (Pasar Nangka).
- Kecamatan Menteng seluas 1.658 m^2 yang berlokasi di Jl. Gondangdia sejajar Rel KA,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 7.574 m^2 yang berlokasi di Jl. Gotong Royong, Jl. Kartini 8 Dalam, Jl. Kartini 13 Dalam, Jl. Puspernerbad, Jl. Gunung Sahari 10 Lanjutan, Jl. Karang Anyar B3 Lanjutan, Jl. P. Karang Anyar, Jl. Kartini 10 A, Jl. Kartini 10 B, Jl. Lautze Lanjutan
- Kecamatan Senen seluas 7.374 m^2 yang berlokasi di Jl. Inspeksi Kali Sentiong, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung, Jl. Kenari 2, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung lanjutan, Jl. Inspeksi Kali Sentiong lanjutan
- Kecamatan Tanah Abang seluas 2.424 m^2 yang berlokasi di Jl. Abdul Jalil 1, Jl. Abdul Jalil 2

Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 273.685 m^2 meliputi :

- Kecamatan Penjaringan seluas 68.958 m^2 yang berlokasi di Jl. 21 RT 013 RW 08, Jl. X RT 015 RW 08, Jl. A1, RT 012 RW 08, Jl. P RW 08, Jl. M RT 05 RW 08, Jl. Kampung Gusti, Jl. Teluk Gong Selatan (Jl. Fajar), Jl. D Teluk Gong Selatan, Jl. Kamal Raya, Jl. Kapuk Raya
- Kecamatan Pademangan seluas 23.561 m^2 yang berlokasi di Jl. Kampung Bandan, Jl. Pademangan VII RT 005 s.d RT 007, Jl. Pademangan II RT 008 RW 05, Jl. Pademangan III Gang 10 dan Jl. Pademangan IV Gang 10, Jl. Pademangan IV Gang 25, Jl. Pademangan III Gang 28 dan Jl. Pademangan IV Gang 28, Jl. Waspada Raya Sisi Rel Menuju Budi Mulya, Jl. Hidup Baru III, Jl. Satria I, Jl. Pemandangan II,III , Jl. Gang Madrasah RT 008-013 Kel. Ancol, Jl. Ketel
- Kecamatan Tanjung Priok seluas 45.434 m^2 yang berlokasi di Jl. Agung Karya 6, Jl. Agung Utara 3, Jl. Pasar Bambu Kuning, Jl. Ancol Selatan 2 (Jl. Swasembada Barat IX), Jl. Cemara, Jl. Mesjid Nurul Yaqin, Jl. Pos Yandu 1, Santo Lucas, Jl. Pulo Besar RT 001 s.d RT 005, Jl. Pulo Besar 2 (Jl. Danau Elok VI), Jl. KB Sejahtera, Jl. Kembang Sereh, Komplek Kebersihan, Jl. Kenanga, Komplek Kebersihan, Jl. Melati, Komplek Kebersihan, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Flamboyan 1,2,3,4,5, Komplek Kebersihan, Pelebaran Jl. H .Mawar + (Jl. Gadang-1), Jl. Papanggo 1 D RW 02 dan Rw 03, Jl. Papanggo IV, Jl. Papanggo III C RT 004/ RW 06 (Jl. Swasembada Barat IX), Jl. Warakas IV Gg 18 RT 10 RW 14 , Jl. Warakas IV Gg 6 RT 009 RW 06, Jl. Warakas VIII Gg 10 + (Jl. Agung Utara 6A), Jl. Warakas IV Gg 16,17 RW 14 + (Jl. Cempaka Puskesmas), Jl. Warakas Gg A RW 14 (SMA 18), Jl. Warakas III Gg 15 RW 14, Jl. Warakas V Gg 4 RW 07,08, Jl. Warakas V Gg 2 RW 08,

Jl. Gadang Terusan, Jl. Gembira, Jl. Swasembada Timur XXIV, Jl. Swasembada Timur XXI, Jl. Swasembada Timur XXII, Jl. Jati VD (Opritan Sunter C. Sisi Utara dan Selatan), Jl. Cucut, Jl. Samudra III (Jl. Tawes), Jl. Muara Raya RW 12

- Kecamatan Koja seluas 46.004 m^2 yang berlokasi di Jl. Cipeucang II, Jl. Cipeucang III, Jl. Cipeucang IV, Jl. Samping Rusun Sindang, Jl. Lontar 5, Jl. Walang Permai, Jl. Maja, Jl. Walang Mandiri, Jl. Taman Walang, Jl. Walang Timur, Jl. Toar Raya Gang Buntu, Jl. Toar Tengah Lanjutan, Jl. Pasar Koja Baru, Jl. Geladak, Jl. Haluan, Jl. Dewi Dewi, Jl. Lambung, Jl. Janur Hijau, Jl. Pembangunan 1, Jl. Inspeksi Kali Sunter, Jl. Cemara Angin, Jl. Rawa Badak Barat, Jl. Bendungan Melayu Selatan, Jl. Manggar Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl. Mangga Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl. Mawar, Jl. Maja Ujung (dari Jl.Komplek BPP menuju Jl. Mindi)
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 42.786 m^2 yang berlokasi di Jl. Teguh I (Jl. Banyo - I), Jl. Teguh II (Jl. Banyo- II), Jl. Teguh III (Jl. Banyo - III), Jl. Pelepah Indah 1, Jl. Griya Pratama, Jl. Griya Pratama I, Jl. Griya Pratama II, Jl. Griya Pratama III, Jl. Griya Pratama IV, Jl. Griya Pratama V, Jl. Griya Pratama VI, Jl. Griya Pratama VII, Jl. Pelangi (Jl. Taska), Jl. Melodi Mas I, Jl. Melodi Mas III, Jl. Melodi Mas IV, Jl. Musik Raya, Jl. Kelapa Lilin Raya LA dan LB, Jl. Mandolin, Jl. Legong, Jl. Seudati, Jl. Serimpi, Jl. Ketuk Tilu, Jl. Bondan, Jl. Tj Katung, Jl. Kendang Sisi Mesjid Al Huda, Jl. Reog dan Jl. Pisok + (Jl. Ballyra Raya), Jl. Janger dan Jl.Polka, Jl. Masuk SMU 45, Jl. Tifa dan Jl. Gambang, Jl. Harpa 1, Jl. Bonang, Jl. Kecapi, Jl. Mesjid Al Ihsan, Jl. Giro Raya, Jl. Giro 1, Jl. Simponi Mas Raya, Jl. Simponi Mas 5, Jl. Simponi Mas 2, Jl. Simponi Mas 1, Jl. Simponi Mas 6, Penghubung Jl.

Simfoni Mas 4 dan Jl. Simfoni Mas 3, Jl. Pelangi, Jl. Sutra Ungu, Jl. Merah Delima, Jl. Merah Delima Taman, Jl. Gading Raya

- Kecamatan Cilincing seluas 46.942 m^2 yang berlokasi di Jl. Nusantara, H. Kari (Masjid Al Fajar), Jl. Taruna Raya, Jl. Taruna 1, Jl. Taruna 2, Jl. Taruna 3, Jl. Remaja 3, Jl. Remaja 4, Jl. Dewa Ruci Raya, Jl. Angin Badai, Jl. Angin Mamiri + Jl. Angin Pasat + Jl. Angin Gending, Jl. Angin Prahara, Jl. Angin Kumbang, Jl. Angin Tongi, Jl. Belimbing, Jl. Duren, Jl. Gang 1 R, Jl. Kebon Baru, Jl. Camar 3 Sisi Utara dan Jl.Camar 3 Sisi Selatan, Jl. Madya Kebantenan TPU Budi Darma, Jl. Sarang Bango Menuju Malaka, Jl. Gudang Peluru (Dari Jl.Akses Marunda POM Bensin), Jl. Inspeksi Kali Banglio sisi Utara, Jl. Rorotan IX RT 017 RW 07 , Jl. Cilincing Pagi.

Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 231.075 m^2 meliputi:

- Kecamatan Taman Sari seluas 21.402 m^2 yang berlokasi di Jl. Pintu Besar Selatan. 1, Jl. Pintu Besar Selatan. 2, Jl. Labu Dalam, Jl. Mangga Besar. I, Jl. Keadilan Raya 7, Jl. Petak Sembilan, Jl. Gedong, Jl. Delima, Jl. Mangga Besar. 2, Jl. Kemurnian. I, Jl. Mangga Dua. 2, Jl. Duku, Jl. Kebon Jeruk. 15, Jl. Kebon Jeruk. 9 Lanjutan, Jl. Keadilan. 1, Jl. Keadilan. 4, Jl. Keadilan. 5, Jl. Keadilan. 6, Jl. Keadilan. 7, Jl. Madu, Jl. Talib III Baru dan Ketapang Utara 7, Jl. Kebon Jeruk. 4, Jl. Kaligot Kecil, Jl. Kemurnian. 2, Jl. Keselamatan Dalam, Jl. Kemang, Jl. Kebon Jeruk 6.
- Kecamatan Tambora seluas 13.755 m^2 yang berlokasi di Jl. Kali Anyar 1, Jl. Kali Anyar 2, Jl. Kali Anyar 3, Jl. Kali Anyar 5, Jl. Kali Anyar 7, Jl. Kali Anya. 4, Jl. Kali Anyar 10, Jl. Jembatan Besi 12, Jl. Kali Anyar 9, Jl. Angke Indah Gg. 5 Blok B, Jl. Songsi, Jl. Rahayu I, Jl. Laksa 2, Jl. Laksa 4, Jl. Angke Jaya 3 (Perumahan Angke Jaya), Jl.

Angke Jaya 9 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Angke Jaya 6 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Rusun Angke, Jl. Pengukiran Raya, Jl. Jembatan Besi 8, Jl. Gedong Panjang, Jl. Bandengan Utara, Jl. Bandengan Utara 1 Dalam, Jl. Tambora 5 Gg Daging, Jl. Duri Selatan 1

- Kecamatan Grogol Petamburan seluas 51.780 m^2 yang berlokasi di Jl. Hadiah Utama IIA, Jl. Hadiah Utama IIB, Jl. Hadiah Utama IIC, Jl. Satria 2, Jl. Satria 3, 3A, Jl. Satria 5, Jl. Hadiah Utama IIE, Jl. Hadiah Utama IIF, Jl. Satria 6, Jl. Satria 7, Jl. Satria 8, Jl. Hadiah Utama IIG. IIH, Jl. Hadiah IA, Jl. Hadiah 9, Jl. Hadiah 11C, Jl. Hadiah 4, Jl. Hadiah 11, Jl. Satria 9, Jl. Swadaya 3, Jl. Swadaya 4, Jl. Swadaya 5, Jl. Latumenten III Barat, Jl. Latumenten III , Jl. Hadiah 10, Jl. Hadiah IB, Jl. Hadiah 1 Dalam, Jl. Hadiah 11B, Jl. Hadiah 9A, Jl. Hadiah 8, Jl. Hadiah 7, Jl. Hadiah 6, Jl. Hadiah Utama 5, Jl. Hadiah Utama 5 A, Jl. Hadiah Utama 5C Depan Sekolah, Jl. Empang Bahagia Raya, Jl. Swadaya 2, Jl. Wijaya Kusuma 3, Jl. Satria 1, Jl. Amanah, Jl. Wijaya Kusuma 2, Jl. Perdana I (Belakang Kantor Kelurahan Wijaya Kusuma), Jl. Komplek BNI 46 (Blok DD), Jl. Hadiah 5B, Jl. Empang Bahagia 6, Jl. Empang Bahagia 5, Jl. Empang Bahagia 7, Jl. Hadiah 3, Jl. Rasa Sayang, Jl. Wesel, Jl. Jelambar Barat, Jl. Jelambar Barat 3C, Jl. Jelambar Selatan 3, Jl. Jelambar Baru 9, Jl. Jelambar Baru 2, Jl. Jelambar Barat 1, Jl. Hadiah 2, Jl. Jelambar Selatan 17, Jl. Jelambar Selatan 16, Jl. Jelambar Selatan 15, Jl. Jelambar Selatan 14, Jl. Jelambar Selatan 13, Jl. Jelambar Selatan 12, Jl. Jelambar Selatan 11, Jl. Empang Bahagia. 4E, Jl. Jelambar Selatan 2 Gg. 18, Jl. Jelambar Selatan Barat 2, Jl. Komplek Pusri, Jl. Jelambar Barat 2F, Jl. Kusuma Timur Belakang Kantor Kelurahan, Jl. Wijaya Kusuma 8, Jl. Komplek Pusri Lanjutan, Jl. Jelambar Selatan 2

- Kecamatan Palmerah seluas 17.236 m^2 yang berlokasi di Jl. Kota Bambu Utara 4, Jl. Bidara Raya, Jl. Mangga, Jl. Sakti 2, Jl. Sakti 3, Jl. Sakti 5, Jl. Studio Monitor, Jl. Rawa Belong 5D/ Televisi, Jl. Tomang Raya RW 004 (Depan TPS/ Jl. Pelita), Jl. Sakti 9, Jl. Tomang Ancak, Jl. Seroja, Jl. Delima, Jl. Manggis 2, Jl. Nanas, Jl. Timbul, Jl. Semangka 4, Jl. Semangka 2 dan 3, Jl. Sawo 2, Jl. Muhdom, Jl. Manggis, Jl. Kamera 1, Jl. Kaca Piring, Jl. Anyelir.
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 24.545 m^2 yang berlokasi di Jl. H. Kelik, Jl. Ratu Kamboja, Jl. Ratu Kemuning, Jl. Surya Mulia 1, Jl. Surya Mulia 2, Jl. Surya Mulia 3A dan 3, Jl. Surya Mulia 4, Jl. Surya Mulia 5, Jl. Salam 21, Jl. Surya Mulia Raya, Jl. Asia Baru Raya, Jl. Asia Baru 2, Jl. Duri Mas 7 (Depan SDN 13), Jl. Kepa Listrik, Jl. Kepa Listrik Blok T1, Jl. Mangga 22, Jl. Mangga 23, Jl. Mangga 14 Ujung, Jl. Taman Cosmos (tambahan), Jl. EE Kedoya Utara
- Kecamatan Kembangan seluas 28.408 m^2 yang berlokasi di Jl. Kembangan Utara, Jl. H. Kutong, Jl. Marwah, Jl. Delima Raya, Jl. Delima 1, Jl. Delima 2, Jl. Delima 3, Jl. Delima 4, Jl. Delima 5, Jl. Delima 6, Jl. Delima 7, Jl. Delima 9, Jl. H. Sa'aba, Jl. Komplek Keuangan, Jl. Komplek Pajak, Jl. Komplek DPA, Jl. Insp Cengkareng Drain Sisi Timur, Jl. Lapangan Merah, Jl. Pemancingan Ujung, Jl. Komplek Migas, Jl. Srengseng Raya Jl. Penyelesaian Tomang 5, Jl. Jati Blok 26, Jl. Kartika, Jl. Penyelesaian Tomang 2 Blok 118, Jl. Teratai 3, Jl. Teratai 4, Jl. Zamzam 1, Jl. Zamzam 2, Jl. Musdalifah, Jl. Siantan
- Kecamatan Cengkareng seluas 36.606 m^2 yang berlokasi di Jl. Melati Raya Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Arah Sekolah, Jl. Dollar Kel. Kapuk, Jl. Cengkareng Indah 2 Jalur Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng

Indah Kel. Kapuk (1), Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Kel. Kapuk (2), Jl. Bojong Raya Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Sawah Kel. Kapuk, Jl. Peternakan 3 Dalam Kel. Kapuk, Jl. Peternakan Raya Kel. Kapuk, Jl. Al Hikmah Lanjutan Kel. Rawa Buaya, Jl. Bina Serasih Cengkareng Barat (Kebersihan), Jl. Dharmawanita 1 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 (tambahan) Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Poglar Kel Kapuk, Jl. Pedongkelan Belakang Kel. Cengkareng Timur, Jl. Mangga Ubi Kel. Kapuk, Jl Peternakan 2 Kel. Kapuk, Jl. Dharmawanita 2 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Cengkareng, Jl. Cengkareng Indah (Pos RW-Timur), Jl. Cengkareng Indah (Koramil-B), Jl. Cengkareng Indah (dekat Waru-Barat), Jl. Rawa Buaya, Jl. Cengkareng Indah (tambahan Pos RW), Jl. Blok D (seberang Koramil), Jl. Waru 8 RW 014 Kel. Kapuk, Jl. Jaya Kel. Cengkareng Barat, Jl. Kincir Kel. Cengkareng Timur, Jl. Dharmawanita 3 Ujung, Jl. AMD Duri Kosambi, Jl. AMD Manunggal Rawa Gabus, Jl Timbul.

- Kecamatan Kalideres seluas 37.343 m^2 yang berlokasi di Jl. Taraso, Jl. Bima Dalam, Jl. Mirinda, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bodeman, Jalan di bawah *Fly Over* Jl. Sahabat, Jl. Albasiah, Jl. Warung Gantung, Jl. Teraso Dalam, Jl. Trisula, Jl. Rawa Kompeni, Jl. Yudistira, Jl. Sukatani, Jl. Toram. 2, Jl. Toram Raya, Jl. Toram. 1, Jl. Prima Raya, Jl. Tanjung Pura. 5, Jl. Tanjung Pura. 4, Jl Menvo, Jl Prepedan Dalam, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bhakti 2, Jl. Bhakti. 4, Jl. Alhuriyah, Jl. Prima Dalam, Jl. Al-Ikhlas, Jl. H. Biin, Jl. Cimone, Jl. Kampus Mede, Jl M. Soleh, Jl. Bayam, Jl. H. Sura, Jl. Raya Kramat Semanan.

Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 26.142 m^2 meliputi:

- Zona 1 (Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Cilandak, Kebayoran Lama dan

Pesanggrahan) seluas 12.676 m^2 yang berlokasi di Jl. Pondok Karya 1a, Jl. Nipah 12, Jl. Pondok Karya 1c, Jl. Nipah 15, Jl. Duren Bangka, Jl. Nipah Raya dan Nipah 11, Jl. Pulo Gayung , Jl. Mas'ud, Jl. Kramat 1, Jl. Bunga Lili, Jl. KH. Muhasyim Raya, Jl. H. Djawahir, Jl. H. Aom, Jl. Bina Marga, Jl. Ahmad Nado, Jl. Pondok Karya 2, Jl. Galuh 1, Jl. Kemajuan, Jl. Jatayu, Jl. Dwijaya 4, Jl. Rengas.

- Zona 2 (Kecamatan Pancoran, Setiabudi, Tebet, Jagakarsa dan Pasar Minggu) seluas 13.466 m^2 yang berlokasi di Jl. Poncol, Jl. Gandaria 1, Jl. Gandaria VI, Jl. Gandaria Bawah Jl. Setu Mangga Bolong, Jl. Jati Padang Baru, Jl. U-Turn Abdullah Syafe'ie, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Timbul, Jl. Lenggong, Jl. Anggrek dan Anggrek 1, Jl. Gandaria Bawah Pertanian

Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 76.159 m^2 meliputi :

- Kecamatan Cipayung seluas 8.359 m^2 yang berlokasi di Jl. Bambu Hitam 1, Jl. Kp. Kramat, Jl. Setu Indah IV, Jl. Ali Ujung, Jl. Ridho Pondok Ranggon, Jl. Dalang, Jl. Mawar, Jl. H. Siun, Jl. Rawa Lindung, Jl. SMU 64, Jl. H. Deih
- Kecamatan Cakung seluas 10.924 m^2 yang berlokasi Jl. Swadaya PLN, Jl. Swadaya Akses, Jl. Bekasi Timur (di bawah FO Klender/ Depan Pasar Klender), Jl. Swadaya POS Kel. Pulogebang, Jl. Inspeksi Kali Buaran (Kp. Rawa Badung), Jl. Merdeka 4, Jl. Harapan Kel. Cakung Timur
- Kecamatan Duren Sawit seluas 10.062 m^2 yang berlokasi di Jl. Malaka I, Jl. Gading Raya, Jl. Bambu Mas Utara, Jl. Rawa Domba, Jl. Janur I, Jl. Tumpi, Jl. Tumpi 1, Jl. Mayang I, Jl. Betung Raya, Jl. Bambu Kuning
- Kecamatan Makasar seluas 4.955 m^2 yang berlokasi di Jl. Surya, Jl. Wira Jati IV, Jl. Keuangan, Jl. Pangkalan Jati V Ujung, Jl. Hermandal
- Kecamatan Kramat Jati seluas 6.658 m^2 yang berlokasi di

Jl. Condet Raya (depan Masjid Al Hawi) Jl. Al Bashor

- Kecamatan Pulogadung seluas 10.923 m^2 yang berlokasi di Jl. Pulo Nangka Timur Raya, Jl. Tembus Inspeksi Kali Buaran, Jl. Bangunan Barat, Jl. Sindang 1,2,3 dan Taman, Jl. Pulo Mas Utara
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 6.139 m^2 yang berlokasi di Jl. Cibubur Raya (Lapangan Tembak), Jl. BBKK, Jl. H. Moong Kel. Baru, Jl. Inspeksi, Jl. Kenanga, Jl. Waru
- Kecamatan Jatinegara seluas 4.829 m^2 yang berlokasi di Jl. Cipinang Indah Blok M-M1, Blok M1-Y, Jl. Kemuning, Jl. Pasar Ayam, Jl. Komplek Pendidikan, JL. Bekasi Barat 6
- Kecamatan Ciracas seluas 7.502 m^2 yang berlokasi di Jl. Inayah, Jl. Cibubur Raya, Jl. Al Ridho dan Jl. Permai, Jl. Bungur 2, Bungur 4, Jl. Persatuan, Jl. Manunggal, Jl. Cipinang, Jl. H. Marjuki
- Kecamatan Matraman seluas 5.808 m^2 yang berlokasi di Jl. Galur Sari Raya, Jl. Galur Sari 9, Jl. Nanas 1, Jl. Kayu Manis 3, Jl. Penggalang, Jl. Penegak, Jl. Gugus Depan

c) Penyelesaian Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar pada Jalan Arteri/ Kolektor seluas 154.079 m^2 dengan panjang 47.975 m di lima kota administrasi Provinsi DKI Jakarta, antara lain:

Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 49.441 m^2 dengan panjang 13.632 m.

Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga seluas 17.474 m^2 dengan panjang 4.151 m, meliputi :

- Jl. Jatibaru Raya dan Jl. H. Fachrudin seluas 10.386 m^2 dengan panjang 2.308 m,
- Jl. Merdeka Selatan seluas 823 m^2 dengan panjang 103 m,
- Jl. Caringin-Suryopranoto seluas 6.265 m^2 dengan panjang 1.740 m.

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat, meliputi :

- Kecamatan Cempaka Putih seluas 4.767 m^2 dengan panjang 1.606 m yang terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah 1 dan Jl. Cempaka Putih Tengah 30,
- Kecamatan Gambir seluas 4.195 m^2 dengan panjang 1.663 m yang terletak di Jl. KH. Hasyim Ashari (Roxy),
- Kecamatan Johar Baru seluas 1.398 m^2 dengan panjang 381 m yang terletak di Jl. Percetakan Negara 2,
- Kecamatan Kemayoran seluas 4.257 m^2 dengan panjang 1.021 m yang terletak di Jl. Bungur Besar Raya (sisi Tipikor),
- Kecamatan Menteng seluas 6.244 m^2 dengan panjang 1.649 m yang terletak di Jl. Srikaya (MNC) dan Jl. Purworejo,
- Kecamatan Sawah Besar seluas 4.083 m^2 dengan panjang 1.167 m yang terletak di Jl. Karang Anyar Raya,
- Kecamatan Senen seluas 2.484 m^2 dengan panjang 796 m yang terletak di Jl. Stasiun Senen,
- Kecamatan Tanah Abang seluas 4.539 m^2 dengan panjang 1.198 m yang terletak di Jl. Jatibaru dan Jl. Fachrudin.

Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Utara seluas 22.799 m^2 dengan panjang 7.276 m

Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi:

- Jl. Pluit Karang Raya seluas 6.515 m^2 dengan panjang 1.974 m

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, meliputi:

- Kecamatan Penjaringan seluas 2.663 m^2 dengan panjang 906 m yang terletak di Depan Waduk Pluit sisi Selatan, sebagian Pluit Timur, sebagian Pluit Selatan
- Kecamatan Pademangan seluas 1.839 m^2 dengan panjang 684 m yang terletak di Jl. Gn. Sahari depan

Samsat belok ke Jl. Hidup Baru

- Kecamatan Tanjung Priok seluas 2.709 m^2 dengan panjang 664 m yang terletak di Jl. Stasiun Tanjung Priok
- Kecamatan Koja seluas 2.673 m^2 sepanjang 843 m yang terletak di Jl. Kramat Jaya depan Islamic
- Kecamatan Kelapa Gading seluas 3.174 m^2 dengan panjang 1.290 m yang terletak di Jl. Yos Sudarso depan Kodamar
- Kecamatan Cilincing seluas 3.226 m^2 dengan panjang 915 m yang terletak di depan Rusun Marunda

Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Barat seluas 23.612 m^2 dengan panjang 8.876 m

Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, meliputi :

- Jl. Akses Rusun Pesakih, Daan Mogot seluas 3.050 m^2 dengan panjang 763 m
- Jl. Joglo Raya seluas 3.025 m^2 sepanjang 2.017 m

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi :

- Kecamatan Taman Sari seluas 1.084 m^2 dengan panjang 583 m yang terletak di Jl. Kebahagiaan,
- Kecamatan Tambora seluas 1.167 m^2 dengan panjang 468 m yang terletak di Jl. Kopi,
- Kecamatan Pal Merah seluas 3.062 m^2 dengan panjang 1.001 m yang terletak di Jl. Palmerah Utara dan Jl. KS Tubun (Museum Tekstil),
- Kecamatan Kebon Jeruk seluas 6.909 m^2 dengan panjang 2.058 m yang terletak di Jl. Kedoya Raya,
- Kecamatan seluas 2.797 m^2 dengan panjang 727 m Kembangan yang terletak di Jl. Pesanggrahan Raya,
- Kecamatan Cengkareng seluas 2.518 m^2 dengan panjang 1.259 m yang terletak di Jl. Daan Mogot Raya

Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 23.617 m^2 dengan panjang 8.550 m

Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :

- Jl. Melawai Raya seluas 5.124 m^2 dengan panjang 1.281 m

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi:

- Kecamatan Kebayoran Baru seluas 3.996 m^2 dengan panjang 1.332 m yang terletak di Jl. Bulungan, Jl. Iskandarsyah,
- Kecamatan Pesanggarahan seluas 3.244 m^2 dengan panjang 1.622 m yang terletak di Jl. RC. Veteran,
- Kecamatan Pancoran seluas 2.795 m^2 dengan panjang 932 m yang terletak di Jl. Pahlawan Kalibata,
- Kecamatan Setia Budi seluas 1.896 m^2 dengan panjang 758 m yang terletak di Jl. Taman Setiabudi 2, Taman Setiabudi 1,
- Kecamatan Tebet seluas 1.635 m^2 dengan panjang 654 m yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam 3, Jl. KH Abdullah Safei,
- Kecamatan Pasar Minggu seluas 4.927 m^2 dengan panjang 1.971 m yang terletak di Jl. Ragunan Raya, Jl. Pasar Minggu Raya, Jl. Warung Jati Barat.

Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Timur seluas 34.610 m^2 dengan panjang 9.641 m

Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi :

- Jl. Paus, Jl. Perserikatan, Jl. Kedondong seluas 8.663 m^2 dengan panjang 2.280 m

Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi :

- Kecamatan Cipayung seluas 3.457 m^2 dengan panjang 900 m yang terletak di Jl. Mabes Hankam,
- Kecamatan Cakung seluas 1.820 m^2 dengan panjang 521 m yang terletak di Jl. A di Samping Walikota Jakarta Timur,

- Kecamatan Duren Sawit seluas 3.053 m^2 dengan panjang 698 m yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai,
- Kecamatan Pulogadung seluas 1.831 m^2 dengan panjang 563 m,
- Kecamatan Kramat Jati seluas 3.786 m^2 dengan panjang 1.229 m yang terletak di Jl. Dewi Sartika,
- Kecamatan Jatinegara seluas 3.750 m^2 dengan panjang 921 m yang terletak di Jl. Bekasi Barat Raya (depan Stasiun KA Jatinegara),
- Kecamatan Pasar Rebo seluas 3.249 m^2 dengan panjang 1.253 m yang terletak di Jl. Gedong/ Jl. TB Simatupang,
- Kecamatan Ciracas seluas 1.762 m^2 dengan panjang 616 m yang terletak di Jl. Pusdika,
- Kecamatan Matraman seluas 3.239 m^2 dengan panjang 660 m yang terletak di Jl. Matraman Raya.

d) Telah dimulai pembangunan 3 Unit *Fly Over*, Simpang Tidak Sebidang dan 3 Unit *Underpass* dengan kegiatan *Multiyears* 2016-2017 antara lain :
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (*Fly Over*) Cipinang Lontar
- Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (*Fly Over*) Bintaro Permai-Rel KA
- Pembangunan *Fly Over* Pancoran
- Pembangunan *Underpass* Kartini
- Pembangunan *Underpass* Mampang-Kuningan
- Pembangunan *Underpass* Matraman-Salemba

e) Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok M-Cileduk yang dilakukan secara *Multiyears,* progres sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 sebesar 96,86 persen dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2017

f) Penyelesaian Peningkatan Jalur *Busway* seluas 12.714 m^2 dengan panjang 3.532 m dengan beton pada:

- Koridor 1 dengan lokasi Jl. Jendral Soedirman, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah Mada, Jl. Medan Merdeka Barat (Kementerian Perhubungan), Jl. MH. Thamrin (Sarinah), Jl. Sudirman (Ratu Plaza), Jl. Sisingamangaraja
- Koridor 2 dengan lokasi Jl. Pejambon, Jl. Senen Raya, Jl. Abdul Rahman Saleh, Jl. Letjend Soeprapto, Jl. Perwira, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Prapatan, Halte Atrium Senen,
- Koridor 3 dengan lokasi Jl. Daan Mogot Halte Sumur Bor, Terminal Kalideres,
- Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda, Jl. Sultan Agung,
- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Margasatwa Halte Ragunan,
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Metro Pondok Indah,
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. S Parman, Jl. Gatot Subroto depan Gedung BPJS
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. R. E. Martadinata Halte Tj. Priok.

g) Penyelesaian Pekerjaan *Concrete Barrier* (Separator Busway) sepanjang 130.706 m pada lokasi :
   - Koridor 1 dengan lokasi Jl. Panglima Polim, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Sudirman, Jl. Gajah Mada, Jl. Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gatot Subroto
   - Koridor 2 dengan lokasi Jl. Suprapto, Jl. Perintis Kemerdekaan
   - Koridor 3 dengan lokasi Jl. KH. Hasyim Ashari, JL. Kyai Tapa, Jl. Daan Mogot, Jl. Juanda, Jl. Veteran, Jl. Lapangan Banteng
   - Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda dan Jl. Pramuka
   - Koridor 5 dengan lokasi Jl. Jatinegara Barat dan Jl. Jatinegara Timur
   - Koridor 6 dengan lokasi Jl. Galunggung, Jl. Sultan Agung, Jl. Tambak, Jl. Matraman

- Koridor 7 dengan lokasi Jl. Otista Raya
- Koridor 8 dengan lokasi Jl. Panjang
- Koridor 9 dengan lokasi Jl. Grogol Arah Pluit, Jl. Otista s.d Semanggi, Jl. PGC Cililitan s.d Cawang
- Koridor 10 dengan lokasi Jl. Yos Sudarso
- Koridor 11 dengan lokasi Jl. Cawang s.d Kampung Melayu

h) Penyelesaian peningkatan/ pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 jembatan antara lain:

Dinas Bina Marga meliputi :

- Jembatan di Jl. Boulevard Timur-Jl. Pegangsaan Dua dengan konstruksi tiang pancang seluas 3.550 m^2 dengan panjang 100 m
- Jembatan Jl. Joglo Raya (depan Perumahan Kopilas) dengan konstruksi tiang pancang seluas 1.560 m^2 dengan panjang 78 m dan perkerasan aspal seluas 10.974 m^2 dengan panjang 1.137 m
- Jembatan Jl. Cassablanca seluas 46 m^2 dengan panjang 6 m dan perbaikan oprit dengan perkerasan aspal seluas 10.975 m^2 dengan panjang 1.568 m
- Jembatan di Jl. Teluk Gong Raya seluas 108 m^2 dengan panjang 18 m
- Jembatan di Jl. Anggrek Rosalina seluas 135 m^2 dengan panjang 15 m

Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi :

- Jembatan Jl. Kp. Bojong 2 Kec. Duren Sawit seluas 99 m^2 dengan panjang 19 m
- Jembatan Jl. Gelanggang Remaja 2 Kec. Makasar seluas 63 m^2 dengan panjang 18 m
- Jembatan Jl. H. Marda/ Pribadi Kec. Ciracas seluas 43 m^2 dengan panjang 14 m

i) Pelayanan penyelidikan dan pengujian oleh Unit Pengelola

Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran sebanyak 350 pelayanan dengan nilai retribusi mencapai Rp. 4.032.871.000,-

j) Penyelesaian Rehabilitasi/ Pemeliharan Jembatan Cinta di Kepulauan Seribu meliputi Pengecatan, Perbaikan Struktur Baja, Perbaikan Struktur Beton dan Pemasangan Batu Alam Andesite seluas 569 m^2 dengan panjang 140 m

C. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan antara lain:

1) Penyelesaian Jalan Layang Khusus Busway Kapten Tendean-Blok M- Cileduk yang direncanakan dapat selesai sampai dengan akhir tahun 2016 baru mencapai progres 96,86%, sehingga belum dapat difungsikan. Hal ini disebabkan kerena ada sebagian lahan yang belum bebas. Oleh karena itu, untuk penyelesaiannya akan dilanjutkan pembebasan dan pelaksanaannya di tahun 2017.
2) Proses pembangunan trotoar yang terkendala dengan PKL dan motor yang terparkir atau melintas hal tersebut ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dan memberikan sosisialisasi serta memasang bollard sehingga motor tidak lagi dapat melintas pada trotoar yang telah dibangun.
3) Dalam hal pengadaan tanah untuk jalan, khususnya dalam mendukung pembangunan MRT, terdapat lokasi/bidang tanah yang tidak sepakat dengan harga yang dinilai oleh konsultan appraisal. Mengingat pembangunan MRT tetap harus berjalan, maka langkah yang diambil terhadap yang tidak bersepakat adalah dilakukan konsinyasi melalui pengadilan.

2. Antisipasi Banjir, Rob Dan Genangan

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain:

1) **Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir**

a) Tahun 2016 telah diselesaikannya Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD Aliran Tengah dengan pemasangan sheetpile sepanjang 1.482,5 m di Luar Batang dan 1.039 m di Muara Baru lanjutan tahun 2015.

b) Tahun 2016 telah diselesaikannya Pembangunan Tanggul Pantai Fase A NCICD Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta dengan pemasangan Spun Pile sepanjang 61,45 m di Kamal Muara

c) Tahun 2016 telah diselesaikannya Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD Aliran Timur Provinsi DKI Jakarta dengan pemasangan Spun Pile sepanjang 250 m di Kali Blencong

d) Tahun 2016 telah diselesaikannya Pembangunan dan Peningkatan Sistem Polder Aliran Barat Provinsi DKI Jakarta di 2 (dua) lokasi di Jakarta Barat yaitu di Jalan Kyai Tapa dengan jumlah pompa 3 unit yang kapasitasnya per unit 2 m3/dt dan Jalan Susilo dengan jumlah pompa 2 unit yang kapasitasnya per unit 1 m3/dt

2) **Program Pengembangan Sistem Drainase**

a) Tahun 2016 telah diselesaikan Normalisasi Sungai/Kali/Waduk di Provinsi DKI Jakarta Aliran Tengah, berupa pemasangan sheet pile sepanjang 3.678,6 terdiri dari Ring Kanal = 256.6 m, Kali Ciliwung Lama = 245 m, Waduk Pluit = 1371 m, Kali Karang = 1806 m,

b) Tahun 2016 telah diselesaikan Normalisasi Sungai/Kali/Waduk di Provinsi DKI Jakarta Aliran Barat, berupa pemasangan sheet pile sepanjang 7.032,7 terdiri dari Kali Sekretaris = 857 m, Kali Grogol = 2.753,3 m dan Kali Apuran Bawah = 1.303 m

c) Tahun 2016 telah diselesaikan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of

Sentiong-Sunter Drain, Waduk Sunter Utara, Waduk Sunter Selatan & Waduk Sunter Timur III Sub-Projects ICB Package No. JUFMP-4, yang berupa : pengerukan sungai sepanjang 5.245 m terdiri dari Kali Sentiong sepanjang 4.245 m dan Kali Ancol = 1.000 m serta pemasangan sheet pile Kali Sentiong sisi kiri sepanjang 4.245 m dan sisi kanan sepanjang 4.245 m. Sedangkan untuk pemancangan sheet Pile di Waduk terdiri dari Waduk Sunter Selatan sepanjang 3.180 m, Waduk Sunter Utara sepanjang 874 m, Waduk Sunter Timur III sepanjang 1.505 m, Inlet-8 Waduk Sunter Utara sisi kiri sepanjang 492 m & sisi kanan sepanjang 492 m dan Outlet-1 Waduk Sunter Utara sisi kiri sepanjang 551 m & sisi kanan sepanjang 551 m,

d) Tahun 2016 telah diselesaikan Peningkatan Pemanfaatan Alat-alat berat untuk mendukung Peningkatan kapasitas waduk/kali/saluran yang berupa pembayaran gaji PHL & Supir dan BPJS sebanyak 276 orang, dan Operator alat berat sebanyak 111 orang.

e) Tahun 2016 Pendampingan Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Project (Administrasi) yang sekiranya akan digunakan untuk perubahan isi kontrak JEDI dan pendampingan hukum bila ada masalah tetapi tidak jadi digunakan, hal ini karena pelaksanaan kegiatan JEDI di tahun 2016 berjalan lancar sampai selesai.

f) Tahun 2016 telah diselesaikan Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Grogol-Sekretaris Drain, Paki-Kali Besar-Jelakeng Drain, Krukut Cideng Drain & Krukut Lama Drain Sub-Projects ICB Package No JUFMP-7, yang berupa : pengerukan sungai sepanjang 9.985 m terdiri dari Kali Grogol Sekretaris = 2.915m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2.085 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4.985 m serta pemasangan sheet pile sepanjang 7.151 m terdiri dari Kali

Grogol Sekretaris = 564 m Kali Pakin - Kali Besar - Kali Jelakeng = 2.441 m, Kali Krukut Cideng & Krukut Lama = 4.146 m

g) Tahun 2016 telah diselesaikan Pembayaran retensi/jaminan kepada penyedia untuk proyek JEDI Paket 1 porsi APBN (penerusan pinjaman) sebesar Rp. 8.554.399.625,-. Sesuai dengan klausul kontrak JEDI paket 1, ditetapkan bahwa terdapat retensi/jaminan sebesar 5% yang ditahan untuk setiap tagihan. Pada masa akhir kontrak tahun 2015, retensi untuk porsi APBD sudah dilakukan pembayaran.

3) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih

a) Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pemilik Ijin sebanyak 201 ijin terdiri dari:

a. Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 4 ijin
b. Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru 35 ijin
c. Pantek Baru sebanyak 14 ijin
d. Bor Perpanjangan sebanyak 110 ijin
e. Pantek Perpanjangan sebanyak 30 ijin
f. *Dewatering* sebanyak 8 ijin

b) Penyelesaian Pengadaan dan Pemasangan Meter Air, yaitu pemasangan meter air sebanyak 127 unit dan penggantiannya sebanyak 113 unit, sedangkan untuk pengadaannya tidak dilaksanakan karena stok tahun lalu masih ada.

c) Penyelesaian Pemeliharaan *Reverse Osmosis* (RO) di Rawa Kompeni Jakarta Barat, Rawa Melati Jakarta Barat, Kamal Muara Jakarta Utara, Kali Baru Jakarta Utara dan Marunda Jakarta Utara. Sedangkan di Kabupaten Kep. Seribu telah diselesaikan di 9 lokasi yaitu Pulau Untung Jawa, P. Pramuka, P. Harapan, P Kelapa, P. Kelapa Dua, P. Panggang, P. Lancang, P. Tidung dan P. Pari.

4) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana ke-PU-an

a) Penyelesaian Pengadaan Tanah Kali/ Saluran di Provinsi DKI Jakarta dengan luas sebesar 49.852 m^2 yang terdiri dari Saluran Warung Jengkol 664 m^2, Kali Krukut 516 m^2, Kali Ciliwung (Kel. Pejaten Timur) 36.332 m^2, Kali Pesanggrahan 1.476 m^2, Kali Sekretaris 1.501 m^2, Kali Angke Lama 3.378 m^2, dan Kali Sunter 5.985 m^2.

b) Penyelesaian Pengadaan Tanah Waduk, Situ, dan Embung di Provinsi DKI Jakarta dengan luas sebesar 120.890,5 m^2yang terdiri dari Waduk Kampung Rambutan 6.827 m^2, Embung di Jl. Cendrawasih 3.644 m^2, Waduk Jagakarsa 1.300 m^2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon 4.433 m^2, Waduk Rawa Lindung 800 m^2, Waduk Cimanggis 1.826 m^2, Waduk Kamal *Long Storage* 18.444 m^2, Embung di Jl. Sunter RT. 007/10 6.644 m^2, Waduk Lebak Bulus 3.564 m^2, Waduk di Jl. Pondok Gede Raya 13.009 m^2, Embung Lapangan Merah 2.580 m^2, Waduk Pondok Ranggon III 18.564 m^2, Embung Pekayon 17.056 m^2, Waduk Jl. Kaja 2 8.505 m^2, Waduk Brigif 4.268,50 m^2, Waduk Rawa Badung 4.871 m^2, Embung Jl. Kesatriaan 4.555 m^2

D. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan antara lain:

Pada tahun 2016 Normalisasi Sungai/ Kali/ Waduk di Sistem Aliran Timur masih terkendala oleh pembebasan lahan yang tidak terlaksana. Solusinya telah diprogramkan kembali pembebasan lahannya pada tahun 2017.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Kota

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Telah dilaksanakan Pembangunan Rumah Susun sebagai berikut:

a. Dalam tahap *finishing,* yakni berupa Rusunawa KS Tubun sebanyak 3 tower (524 unit/ *finishing*), Rusunawa Semper

sebanyak 1 tower (235 unit/ *finishing*), Rusunawa Cakung Barat sebanyak 4 blok (300 unit/ *finishing*), Rusunawa Rawa Bebek sebanyak 4 blok (400 unit/ *finishing*), Rusunawa Jatinegara Kaum sebanyak 3 blok (300 unit/ *finishing*), Rusunawa Jl. Bekasi Km.2 sebanyak 2 blok (200 unit/ *finishing*), Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/ *finishing*),

b. Dalam tahap struktur, yakni berupa Rusunawa Jatinegara Kaum sebanyak 3 blok (300 unit/ struktur, Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/ struktur) dan Rusunawa Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya sebanyak 2 tower (384 unit/ struktur).

2) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Penyelesaian Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebanyak 123 lokasi, dengan uraian Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 16 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Utara sebanyak 31 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Barat sebanyak 24 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebanyak 24 lokasi, Kota Administrasi Jakarta Timur sebanyak 28 lokasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 1 lokasi.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan dan solusinya antara lain Penyediaan rumah susun yang direncanakan sebanyak 1.835 unit belum seluruhnya dapat terealisir pada tahun 2016. Solusinya adalah telah diprogramkan pembangunan rumah susun pada tahun 2017 sebanyak 11.105 unit hunian.

4. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

a) Pengadaan alat-alat berat penunjang perbaikan jalan

sebanyak 8 unit yang terdiri dari Excavator Standar (3 Unit), Dump Truck Kecil (5 Unit)

b) Pengadaan Alat-Alat Berat dan kelengkapannya berupa Jack Hammer dan Power Pack sebanyak 20 Unit, Excavator Standard sebanyak 9 unit, Excavator Amphibious Mini sebanyak 12 Unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Excavator Amphibious Besar sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit, Dump Truck 10 - 17 M3 sebanyak 16 unit, Dump Truck 20 - 24 M3 sebanyak 56 unit, Dump Truck 4M3 sebanyak 153 unit, Self Loader sebanyak 1 Unit

c) Pemeliharan kendaraan dan Alat-alat berat yang terdiri dari Eskavator Kecil sebanyak 2 unit, Escavator Terapung Long Arm Besar sebanyak 4 unit, Escavator Terapung Long Arm Kecil sebanyak 3 unit, Escavator Long Arm sebanyak 7 unit, Escavator Standard sebanyak 3 unit, Dump Truk 13m3 sebanyak 12 unit dan Dump Truk 22m3 sebanyak 9 unit.

d) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 45 unit alat berat, 75 unit angkutan sampah, 30 unit KDO Lapangan Double Cabin dan 21 unit Road Sweeper.

e) Pemeliharaan Alat Berat Dinas Kebersihan (45 unit), Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truck (49 unit).

f) Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truck (9 unit), Perbaikan KDO Lapangan Lintas dan Angkutan Sampah (28 Unit), Perbaikan Kendaraan Road Sweeper (21 Unit) dan Perbaikan KDO Lapangan Double Cabin (30 Unit)

g) Pengadaan Perlengkapan dan peralatan Kebersihan terdiri dari Gerobak Motor (300 unit), Perlengkapan Bengkel 1 Paket (Tool kit, Mesin Gerinda, dll), Kantong Plastik Sampah 3 Jenis ukuran (600mmx850mmx 60micron,

600mmx225mmx60micron, 100cmx60cmx50micron), Tong Sampah Beroda 296 buah (HDPE 660ltr), Tong Sampah 661 buah(pilah tiga), Terpal Truk Sampah 559 buah (A3 uk 5x7m), Jaring Truk Sampah 266 buah (uk 5x7m), Tracking Truk 60 set, Alat-alat kebersihan (Alat kebersihan, bahan pembersih serta Alat Pengolah dan Pemusnah Sampah Ramah Lingkungan 16 unit), Gerobak Sampah (60 unit).

h) Pengadaan Alat Berat Kebersihan terdiri dari Road Sweeper Besar sebanyak 20 unit, Truk Compactor sebanyak 91 unit, Excavator Standart sebanyak 15 unit, Refuse Compactor sebanyak 5 unit, Dump Truck Besar sebanyak 88 unit, Truck Arm Roll Besar + Bak Kontainer sebanyak 45 unit, Truck Arm Roll Kecil + Bak Kontainer sebanyak 31 unit, Truck Tangki Air sebanyak 7 unit.

2) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan

a) Penanganan Kebersihan dengan Pekerja Lepas (PL) oleh 13.894 petugas (Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan 5 Wilayah Kota Administrasi, Unit Pengelola Sampah Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Badan Air

b) Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air di 5 wilayah Kota Administrasi oleh 3.947 petugas,

c) Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang dengan volume rata-rata 6.562 ton/hari

d) Pemantauan Kualitas Lingkungan di Sekitar TPST Bantargebang, SPA Sunter dan TPS 5 Wilayah Kota dan Kabupaten 1 dokumen

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

a) *Apresiasi Masyarakat Peduli-Kebersihan antara lain :*

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan 3R dan Bank Sampah di 5 wilayah kota
- Pembinaan dan pengembangan Bank Sampah sebanyak 475 Bank sampah

- Apresiasi masyarakat peduli kebersihan berupa pengadaan sepeda pengangkut sampah sebanyak 530 buah yang diberikan kepada pemenang lomba rumah bersih di 265 Kelurahan di DKI Jakarta

b) Tahun 2016 telah diselesaikanDukungan Pelayanan Toilet Berjalan sebanyak 809 event antara lain: KTT Luar Biasa OKI, TAFISA Games, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), Wisata Balaikota, HUT RI, HUT DKI, Tahun Baru dan event-event Pemprov lainnya serta pelayanan bantuan kebencanaan

4) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

a) Tahun 2016 telah diselesaikan Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air IImbah di Prov. DKI Jakarta yang terdiri dari IPAL Waduk Grogol (2 Unit), IPAL Waduk Melati, IPAL Waduk Sunter Selatan dan IPAL Malakasari.

b) Tahun 2016 telah diselesaikan Pembangunan sistem pengelolaan air limbah secara komunal di pemukiman yang terdiri dari Rusun Pulogebang 2 unit, Rusun Komarudin 3 unit dan Rusun Jatirawasari 1 unit.

c) Tahun 2016 telah diselesaikan Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah yang berupa rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Air sebanyak 8 dokumen dan jumlah hasil pengambilan sampel yang dilakukan sebagai fungsi pengawasan kinerja IPAL sebanyak 413 sampel.

5. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas RTH

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman

a) Pembangunan/Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b) Pembangunan Taman Jalur Hijau

c) Pembebasan Lahan untuk RTH sebanyak 57 lokasi seluas 180.296 m2 yang terdiri dari lahan PHU sebanyak 50 lokasi seluas 155.231 m2 dan makam sebanyak 7 lokasi seluas 25.065 m2.

2) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

a) Lomba Taman dan Penghijauan Lingkungan RT Tahun 2016 di 5 wilayah kota Jakarta

b) Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) tahun 2016

c) Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Green School 2016 melalui sosialisasi mengenai pengetahuan di Bidang Pertamanan di 5 Sekolah @ 50 peserta = 250 peserta

d) Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pertamanan melalui pelatihan keterampilan di Bidang Pertamanan dengan 8 Angkatan @ 30 orang= 240 orang peserta

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan antara lain

1) Pembangunan/ Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman Jalur Hijau belum dapat terlaksana. Solusinya akan dilakukan lelang lebih awal untuk pelaksanaan tahun yang akan datang.

6. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi Dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM**

a) Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL sebanyak 200 Gerobak yang akan diberikan kepada Pedagang.

b) Penataan PKL di Jakarta Pusat, di 5 Lokasi PKL sebagai berikut :

- Jl. Irian (JP 10) Jakarta Pusat sebanyak 16 unit
- Jl. Kesehatan (JP 17) sebanyak 18 unit
- Jl. Maja (JP 29) sebanyak 20 unit
- Jl. Menteng Kecil (JP 07) sebanyak 28 unit
- Jl. Biak (JP 16) sebanyak 35 unit

c) Pengadaan Tenda PKL di Jakarta Pusat sebanyak 11 unit

2) **Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja**

1) Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita sebanyak 25 orang

2) Temu Konsultasi Bursa Kerja Khusus bagi 50 SMK serta jumlah penempatan tenaga kerja dengan target sebanyak 18.750 orang dapat direalisasikan sebanyak 23.335 orang pada tahun 2016. Penyediaan Informasi Pasar Kerja *off-line* dan *on-line* berupa *job-fair* dengan melibatkan 195 perusahaan, 63.004 lowongan kerja dan menghasilkan 16.125 penempatan tenaga kerja pada tahun 2015.

3) Peningkatan Bulan Mutu Produktivitas terhadap 140 orang.

4) Akreditasi Lembaga pelatihan sebanyak 50 Lembaga Pelatihan Kerja.

5) Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka penentuan Upah Minimum Provinsi.

6) Peningkatan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita dan anak sebanyak 100 pengusaha dan pekerja.

7) Pembinaan perusahaan dalam rangka antisipasi penanganan mogok kerja dan unjuk rasa terhadap 200 orang.

8) Peningkatan peran dan fungsi LKS Tripartit Provinsi DKI

Jakarta yang dilaksanakan sebanyak 12 kali rapat/ sidang.

9) Pembinaan tata cara pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebanyak 200 orang.

10) Pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 200 orang.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan antara lain

1. Pengadaan Sarana Dagang bagi PKL yang dianggarkan untuk 800 gerobak baru dapat direalisasikan sebanyak 200 gerobak. Solusinya akan dilakukan lelang lebih awal untuk pelaksanaan tahun yang akan datang.

7. Pembangunan Budaya Multi-Kultur

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

a) Pembinaan komunitas yang berada di Kawasan Kota Tua, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kawasan Kota Tua Jakarta (Penyuluhan ke 7 kelurahan).

b) Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan sebanyak 12 adalah Pemeliharaan Ruang Tata Pamer Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Tata Pamer Museum Wayang, Pemeliharaan Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Gedung Mueum Tekstil, Pemeliharaan Taman dan Pagara Museum Tekstil, Pembuatan Patung Lilin, Penataan Taman Museum Seni Rupa dan Keramik, Perawatan Bangunan Cagar Budaya Museum Taman Prasasti, Perbaikan Pelataran Gedung VOC, Pekerjaan Restorasi Museum Kebaharian Jakarta, Perawatan Tata Pamer Museum Kebaharian, Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya (TSP dan TACB).

2) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan

Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat Nasional di Jakarta sebanyak 20 event terdiri dari : Festival Teater Jakarta, Pagelaran Kesenian Reguler di Perkampungan Budaya Betawi, Pergelaran Rutin Wayang Orang Bharata, Pementasan Rutin Sandiwara Sunda Miss Tjitjih, Pameran Tekstil Warisan Budaya Dunia, Pagelaran Wayang Rutin, Pekan Museum Seni Rupa, Pameran Keramik "Kendi : Teknologi, Fungsi dan Simbol", Pameran Lukisan Kontemporer, Pameran Wastra Asean, Pameran Kain Kulit Kayu, Festival Museum Seni Rupa, Pentas Pagelaran Wayang Dalang-Dalang terkenal, Pelatihan Membatik bagi Komunitas Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Napak Tilas Proklamasi, Perhelatan Lebaran Betawi, Gelar Budaya Betawi dan Budaya Nusantara, Pergelaran Kesenian Paken Raya Jakarta, Promosi Budaya pada Lebaran Betawi, Pergelaran Kesenian Terpilih.

3) **Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan,**

Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan kepulauan seribu adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi Pusat Kebudayaan adalah : PKJ-TIM; Teater Jakarta, Teater Kecil, Teater Studio, Galeri Cipta I dan II (Graha Bakti Budaya), Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata,Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Laboratorium Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya (Lab. Condet),Balai Kesenian di 5 Wilayah, Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII,Gedung Sangkrini Jaya Raya,Gedung Pusat Kesenian Betawi eks-Kodim Jakarta Timur, Rumah Si Pitung Jakarta Utara, Kawasan Kota Tua, Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan antara lain,

1. Masih rendahnya aspirasi dan penghargaan masyarakat terhadap aspek-aspek seni dan budaya. Sebagai solusinya dengan

mngupayakan peningkatan peran serta masyarakat antara lain : Penyelenggarakan *event-event* seni budaya (betawi dan nasional), pemberdayaan sanggar-sanggar, pemberian penghargaan terhadap pelaku seni dan penyelenggaraan berbagai lomba baik yang berjenjang maupun tingkat provinsi; Peningkatan nilai-nilai seni budaya tradisional dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghidupkan kembali tradisi masyarakat melalui kegiatan Lebaran Betawi, Festival Palang Pintu dan Penataan Rumah Khas Betawi sebagaimana dapat dilihat di Kawasan Perkampungan Budaya Betawi; dan Pemberlakuan wajib kunjung bagi pelajar ke museum dan destinasi pariwisata.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain :

1) Program Sistem Informasi dan Teknologi Pajak Daerah

a) Pengadaan Perangkat Optimalisasi Kinerja Sistem Pemungutan Pajak Daerah.

b) Implementasi *Digital Security* Sistem Aplikasi Pajak Daerah dan *Digital Forensic* Pemeriksaan Pajak Daerah serta Pembangunan *Single Sign On* Pajak Daerah.

c) Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Ruang Server, Pengadaan Upgrade Memori Server, Pengadaan Software PHP Maker dan Emulator Mainframe, Pengadaan Software Penunjang Integrasi Database Pajak Daerah, Pengadaan Alat dan Pencetakan Kartu NPWPD, Pengadaan Printer High Speed, Renewal Antivirus serta Pengadaan OS Linux Red Hat Enterprise dan Pengadaaan Renewal Warranty Server.

d) Pengembangan Sistem Aplikasi Pemungutan Pajak Reklame (SIM-R), Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Air Tanah (PAT), Pengembangan Sistem Pemungutan Pajak Daerah (SP2D) berbasis WEB, Pengembangan Web Site

Pajak Daerah, Pengembangan Aplikasi Pelaporan dan Backup Data PKB dan BBN KB, Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Data Wajib Pajak, Pengembangan Aplikasi Penilaian Individu dan Pasar Properti PBB-P2, Pengembangan Sistem Informasi Geografis Pajak Daerah dan Pengembangan Aplikasi BPHTB

e) Pembangunan Sistem Informasi Pajak Daerah Terkonsolidasi.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Telah terlayani sebanyak 4.564.309 dokumen perizinan dan non perizinan, yang terdapat pada 267 *outlet* di tingkat kelurahan, 44 *outlet* di tingkat kecamatan, 6 *outlet* di tingkat kota/ kabupaten dan 1 *outlet* di tingkat provinsi.

b) Telah dibuatnya sistem *Zero Delay Online* yakni sistem monitoring penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP, dengan *persentase* tepat waktu sebesar 99 persen.

c) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui mekanisme pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) *online* melalui portal "pelayanan.jakarta.go.id" dengan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 97 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasaan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8 persen jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2015 yang besarnya hanya mencapai 89 persen.

d) Telah diselesaikan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penyelesaian Pengaduan/ Keluhan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 100 persen pada tahun 2016 dan 2015.

e) Telah diselesaikan dan dikembangkan 60 jenis perizinan dan non perizinan secara *online* yang dapat diakses melalui 5 portal yaitu :

- http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id, sebanyak 1 Jenis Izin
- http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/, sebanyak 2 Jenis Izin
- https://simppsdbs.kemsos.go.id, sebanyak 2 Jenis Izin
- http://pelayanan.jakarta.go.id, sebanyak 50 Jenis Izin
- www.perizinan.kkp.go.id/izindaerah

sebanyak 5 jenis perizinan di dalam *portal* "http://pelayanan.jakarta.go.id" berisikan informasi mengenai jenis-jenis, persyaratan dan prosedur pengurusan terhadap 467 jenis perizinan dan non perizinan.

f) Telah dibuat h*otline* baru 1500-164 (layanan *Call center* BPTSP) guna memberikan kemudahan bagi pemohon yang ingin mendapatkan informasi mengenai prosedur, persyaratan perizinan dan non perizinan serta dapat digunakan untuk pesanan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dalam mengurus perizinan non perizinan.

g) Telah dilakukan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yakni :

- Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas perizinan dari pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus perizinan ke loket. Semua jenis perizinan dan non perizinan (467 jenis) dapat dilakukan melalui AJIB dengan syarat pemohon merupakan pimpinan/ karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo. Sampai dengan saat ini AJIB telah melayani sebanyak 96.254 perizinan dan non perizinan.
- Antar Jemput Izin Bermobil (AJIB) dengan *Mobile Service Unit* sebanyak 3 unit, telah melayani sebanyak 2.416 perizinan dan non perizinan.
- Sistem Antrian *Online* sehingga pemohon dapat menentukan sendiri waktu pengurusan dokumen

perizinan dan non perizinan.

- Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam untuk luas tanah >200 m^2, dengan syarat ketentuan berlaku.
- Tahun 2016 telah dilaksanakan *One Day Service* (ODS) yakni pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk 16 jenis perizinan dan non perizinan, dan dikembangkan layanan *Drive Thru* yaitu pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri (tanpa calo) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 jam untuk 2 jenis perizinan dan non perizinan.
- Dikembangkan portal "internalpelayananjakarta.net" yang didalamnya memuat panduan persyaratan, prosedur dan output perizinan dan non perizinan bagi 318 *outlet service point*.

h) Telah diselesaikan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP dengan sasaran para Kasatlak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan pejabat di lingkungan BPTSP dengan jumlah 1.000 peserta yang dibagi dalam beberapa sesi pertemuan atau 100 persen dari jumlah pegawai BPTSP.

i) Telah diselesaikan simplifikasi/ penyederhanaan persyaratan, jenis perizinan dan non perizinan dari semula sebanyak 518 jenis perizinan dan non perizinan menjadi sebanyak 476 jenis perizinan dan non perizinan.

j) BPTSP turut berkontribusi terhadap kenaikan peringkat indeks *Ease Of Doing Business* (EODB) dari peringkat 106 menjadi peringkat 91. Dengan meningkatnya EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang. Adapun kontribusi BPTSP

adalah :

- Kemudahan memulai bisnis dengan 13 prosedur dan membutuhkan 47 hari.
- Kemudahan mengurus izin kontruksi, prosedur pengurusan izin bangunan/ kontruksi yang semula 17 prosedur dan waktu 110 hari dipangkas menjadi 7 prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 48 hari.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan-permasalahan yang timbul adalah :

1) Jumlah ketersediaan SDM pada BPTSP sebanyak 1.260 pegawai sedangkan menurut analisa beban kerja kebutuhan pegawai BPTSP sebanyak 3.000 pegawai. Solusinya adalah dilakukan *recruitment* pegawai non PNS sebanyak 854 pegawai guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/ mahasiswa magang.
2) Kualitas SDM yang belum seluruhnya memahami serta memenuhi standar pelayanan. Solusinya adalah dengan memberikan bimbingan teknis regulasi dan kebijakan pelayanan perizinan dan non perizinan bagi para pegawai BPTSP.
3) Ruang pelayanan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standardisasi Prasarana dan Sarana Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya terstandarisasi. Solusinya adalah telah diprogramkan anggaran penataan ruang pelayanan dan penambahan sarana dan prasarana pada tahun anggaran 2017.

9. Peningkatan Kualitas Pendidikan

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

a) Tahun 2016 telah diselesaikan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi peserta didik TKN, SDN/MIN, SMPN/MTsN, SMAN/MAN, SMKN dan SLBN

sebesar Rp.1.283.104.998.391,- untuk 1.332.566 peserta didik terdiri dari :

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN bagi 2.669 peserta didik dengan total anggaran Rp.5.028.948.000,- yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 1.322 peserta didik dengan anggaran Rp.856.080.000,- dan BOP SLBN sejumlah 1.347 peserta didik dengan anggaran Rp.4.172.868.000,- dengan rincian :

- TKLBN sejumlah 27 peserta didik dengan anggaran Rp.88.308.000,-
- SDLBN sejumlah 769 peserta didik dengan anggaran Rp.2.057.844.000,-
- SMPLBN sejumlah 291 peserta didik dengan anggaran Rp.778.716.000,-
- SMALBN sejumlah 260 peserta didik dengan anggaran Rp.1.248.000.000,-

Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/MIN, SMPN/MTsN dan SMAN/SMKN/MAN bagi 1.329.897 peserta didik dengan total anggaran Rp.1.278.076.050.391,- terdiri dari :

- SDN sejumlah 833.837 peserta didik dengan anggaran Rp.412.008.163.674,-;
- SMPN sejumlah 312.381 peserta didik dengan anggaran Rp.270.601.167.072,-;
- SMAN/MAN sejumlah 131.779 peserta didik dengan anggaran Rp.384.124.428.457,-;
- SMKN sejumlah 54.900 peserta didik dengan anggaran Rp.211.342.291.188,-.

b) Tahun 2016 telah diselesaikan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLBN, SMP/SMPLBN, SMA/SMALBN dan SMKN dengan total anggaran Rp.422.082.400.490,- dengan rincian :

- SD/SDLBN dengan anggaran Rp.232.699.680.003,-;

- SMP/SMPLBN dengan anggaran Rp.103.374.648.821,-;
- SMALBN dengan anggaran Rp.56.226.310.528,-;
- SMKN dengan anggaran Rp.29.781.761.138,-.

c) Tahun 2016 telah diselesaikan meningkatnya pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu sebanyak 692.002 peserta dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 561.408 peserta didik dengan total anggaran Rp.2.442.858.030.000 dengan rincian :
   - tingkat SD/MI dengan anggaran Rp.983.924.400.000 untuk 381.455 peserta didik terdiri dari 291.575 peserta didik SD/MI Negeri dan 89.880 peserta didik SD/MI Swasta.
   - tingkat SMP/MTs dengan anggaran Rp.615.338.400.000 untuk 168.753 peserta didik terdiri dari 89.504 peserta didik SMP/MTs Negeri dan 79.249 peserta didik SMP/MTs Swasta.
   - tingkat SMA/SMK/MA dengan anggaran Rp.841.938.330.000 untuk 141.043 peserta didik terdiri dari 34.214 peserta didik SMA/SMK/MA Negeri dan 106.829 peserta didik SMA/SMK/MA Swasta.
   - PKBM dengan anggaran Rp.1.656.900.000 untuk 751 peserta didik terdiri dari 261 peserta didik PKBM Negeri dan 490 peserta didik PKBM Swasta.

d) Tahun 2016 telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 594 mahasiswa yang tersebar di 47 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dengan anggaran sebesar Rp.5.346.000.000,-.

2) Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

a) Rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 24 Sekolah yang terdiri dari 15 SDN dan 9 SMPN

b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 5 Sekolah yang terdiri dari 1 SMPN, 3 SMAN dan 1 SMKN

c) Lanjutan penyelesaian pembangunan rehab total sebanyak 9

gedung sekolah yang terdiri dari 2 SDN dan 6 SMPN serta pembangunan 1 Sekolah Terpadu di Marunda.

3) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

a) Pengadaan perangkat IT Dalam Rangka Kesiapan CBT (Computer Based Test) Ujian Nasional di Sekolah (SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri) untuk 43 sekolah;

b) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah (US/M BD) SD/MI/SDLB untuk 155.000 Siswa;

c) Diselesaikannya Verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Produktif dan Pengamanan Penggandaan Soal Teori Kejuruan SMK untuk 600 Sekolah;

d) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik Non PNS di Sekolah Negeri bagi 9.578 orang;

e) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan Non PNS di sekolah Negeri bagi 6.183 orang;

f) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Penilik kepada 1000 Orang

g) Diselesaikannya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) bagi Siswa SMA menuju Tingkat Nasional untuk 60 siswa;

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan antara lain,

1. Masih ditemukan adanya kesulitan dalam penyaluran uang transport dan uang konsumsi kepada siswa karena tidak memiliki rekening di Bank DKI. Sebagai solusinya telah dilakukan koordinasi yang intens dengan Bank DKI.

10. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan unggulan, antara lain:

1) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

a) Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp 831.348.139.650,- untuk 3.487.096

peserta.

b) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar kuota dan *benefit* Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 85.000.000.000,- dengan realisasi Rp. 47.425.525.061,-.

c) Monitoring dan Evaluasi JPK.

d) Validasi Data Kepesertaan.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

a) Telah dilakukan proses rehab total 2 (dua) Puskesmas Kelurahan yakni Puskesmas Kelurahan Grogol Utara II dan Pulau Harapan; Rehab Total 8 (delapan) Puskesmas Kecamatan yaitu Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Koja, Kalideres, Tanah Abang, Taman Sari, Tanjung Priok, Cilincing dan Sawah Besar; Pembangunan Puskesmas Kecamatan sebanyak 1 (satu) Puskesmas yakni P uskesmas Kecamatan Pesanggrahan; dan Pembangunan Puskesmas Kelurahan sebanyak 2 (dua) Puskesmas, yakni Puskesmas Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Ciganjur, .

b) Telah dilakukan rehab total 1 (satu) Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu dan Pembangunan RSUD Kelas D Kecamatan Kebayoran Baru. Selain itu telah diselesaikan pula Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 4 RSU Kelas D di Kecamatan Taman Sari, Tanah Abang, Tanjung Priok dan Matraman, yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan, Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan, Pengadaan Modal Alat Medis seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kamar perawatan, kamar operasi pengadaan alat kamar operasi di 4 (empat) RSU Kelas D berupa *electro cauter*, lampu operasi, *major set surgery*, meja operasi, mesin anesthesi, *minor set surgery*, *patient monitor*, *ventilator* dan *suction*. pengadaan modal alat non medis seperti meubelair,

alat rumah tangga, alat listrik serta pengadaan bahan pakai habis medis dan non medis.

3) **Program Pembinaan Upaya Kesehatan**

a) Telah diselesaikan Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) melalui Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan UKBM, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Update UKBM, Seminar Dalam Rangka HALUN (Hari Lanjut Usia)

b) Telah diselesaikan Promosi Kesehatan meliputi Promosi Pelaksanaan Kegiatan Pameran Rakerkesnas, Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), Pelaksanaan Kegiatan Pameran HKN (Hari Kesehatan Nasional), Kegiatan Upaya Kesehatan Lanjut Usia meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan intelegensia bagi usia lanjut, pemeriksaan kesehatan lansia, upaya kesehatan usia reproduksi, peningkatan kesehatan anak balita dan anak sekolah, upaya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napza, peningkatan pelayanan kekerasan terhadap anak/ perempuan (KtA/P) di Puskesmas, monitoring evaluasi dan validasi data program ISPA diare, peningkatan wawasan dan pengetahuan petugas infeksi saluran pernafasan atas dan diare.

4) **Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan**

a) Telah diselesaikan pengendalian penyakit antara lain Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru, Penatalaksanaan Program Imunisasi, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Kesehatan Jiwa, Pengendalian Penyakit HIV-AIDS, Kampanye Aku Tahu Aku Bangga (ABAT), Penguatan Surveilans Campak, AFP dan PD3I dan Penyakit Lainnya, Pencegahan dan Penanggulangan DBD, Peningkatan Wawasan Petugas P2ML, Pengendalian Masalah Kesehatan dan KLB (Kejadian Luar Biasa) melalui surveilans penyakit potensial KLB

berbasis rumah sakit, pembinaan calon jamaah haji DKI Jakarta, seminar keswa NAPZA, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dan laboratorium, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui kegiatan investigasi rumor KLB/ potensial KLB/ KLB dan antisipasi wabah.

b) Telah diselesaikan pengendalian dan penyehatan lingkungan antara lain Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian Vektor, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Masyarakat, Sosialisasi Penegakan Peraturan dan Kebijakan terkait Rokok, Pembuatan NSPK Kesehatan Lingkungan, Pengolahan Data Kegiatan Ketok Pintu Layani Dengan Hati dan Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan Terintegrasi.

b. Permasalahan dan Solusi

Pada tahun 2016, permasalahan yang ditemukan antara lain masih rendahnya pengetahuan tentang HIV/ AIDs pada penduduk usia 15-24 tahun, yang saat ini baru mencapai 40,3 persen dari target 96 persen. Solusinya adalah telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi lintas sektor dengan Komisi Penanggulangan AIDS, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Departemen Agama, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang difasilitasi oleh Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.

B. Progrm Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan

1. URUSAN PENDIDIKAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan pendidikan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.11.706.966.309.417,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 9.965.902.644.030,- atau 85,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) **Program Pendidikan Anak Usia Dini**
   a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri sebanyak 1.322 siswa;
   b) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) siswa PAUD tingkat Provinsi untuk 1.500 siswa;
   c) Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi untuk 11 Gugus PAUD;
   d) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri sebanyak 8 sekolah;
2) **Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun**
   sudah dijelaskan pada program unggulan
3) **Program Pendidikan Non Formal dan Informal**
   a) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri untuk 200 orang
   b) Penggandaan Naskah Ujian Paket A, Surat Hasil Ujian (SHU) dan Ijazah Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah pada Program Paket A Setara SD Berstandar Daerah sebanyak 4.000 peserta
   c) Try Out Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA melibatkan 850 orang.
4) **Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus**
   a) *Assessment* Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Bagi Sekolah Penyelenggaran Pendidikan Inklusi sebanyak 200 Guru
   b) Pemusatan Latihan dan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Bagi Siswa PK/ LK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional untuk 9 siswa dan 9 Cabang Olahraga
   c) Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) PLB sebanyak 150 orang
   d) Penyusunan Model Pembelajaran Tuna Rungu dan Tuna

Grahita sebanyak 150 Guru

5) **Program Peningkatan Mutu Pendidikan**

sudah dijelaskan pada program unggulan

6) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan**

sudah dijelaskan pada program unggulan

7) **Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan**

a) Pelaksanaan akreditasi sekolah secara online sebanyak 1.100 sekolah

b) Pemindaian hasil ujian sekolah paket A sebanyak 2.850 peserta

c) Pemindaian hasil ujian sekolah SD, MI dan SDLB 165.000 peserta

d) Pengadaan raport SD, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 241.000 buku

e) Penyediaan sarana penunjang E-RKAS sebanyak 2.536 sekolah

f) Penyusunan Draft Regulasi Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 regulasi;

8) **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan**

Telah diselesaikan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor sebanyak 158 orang selama 13 bulan.

9) **Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat SKPD Urusan Pendidikan**

Telah diselesaikan Rakor Teknis Penyusunan Program Kerja Tahun 2017 yang melibatkan 250 orang.

10) **Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan**

Telah diselesaikan Pembuatan Sistem Pemantauan dan Pelaporan Cepat Kehadiran Peserta UN SMA, SMK, SMP dan USMBD Tahun Pelajaran 2016/2017, Pembuatan Sistem Pendukung Input Nilai Kelas 4, 5, 6 s/d Penyelenggaraan USMBD

Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dengan volume 3 paket kegiatan.

11) Program Percepatan Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan/ Pemeriksaan

Telah diselesaikan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Tingkat Provinsi yang melibatkan 31 UKPD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pendidikan, antara lain:

1) Persentase Angka Partisipasi Kasar untuk SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA/ SMK adalah sebagai berikut :
   a) SD/ MI : 104,55 persen
   b) SMP/ MTs : 108,81 persen
   c) SMA/ SMK/ MA : 91,36 persen
2) Persentase Angka Partisipasi Murni untuk SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ MA/ SMK adalah sebagai berikut :
   a) SD/ MI : 95,36 persen
   b) SMP/ MTs : 95,80 persen
   c) SMA/ SMK/ MA : 67,91 persen
3) Persentase Angka Putus Sekolah:
   a) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SD sebesar 0,02 persen
   b) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SMP sebesar 0,11 persen
   c) Semakin kecilnya persentase peserta didik putus sekolah tingkat SMA/ SMK sebesar 0,36 persen
4) Pelaksanaan Program KJP senilai Rp. 2.442.858.030.000,- untuk 692.002 peserta didik yang terdiri dari :
   a) Sekolah Negeri : 415.554 siswa 60.05 persen
   b) Sekolah Swasta : 276.448 siswa 39,95 persen
5) Anggaran Program BOP senilai Rp. 1.610.813.106.000,-
6) Rerata Nilai UN/ USBD tahun 2016 :
   a) SD : 70,11

b) SMP : 62,32

c) SMA : 61,57

d) SMK : 61,31

7) Penyelenggaraan lomba sebagai berikut :

a) Jenjang SD :

- Festival/ Lomba Literasi PKLK meraih 1 Emas (sinopsis)
- OSN SD meraih 2 Emas (Matematika dan IPA)
- O2SN meraih 3 Emas (Pencak Silat Putra dan Putri serta Karate Putri)
- Lomba Tata Kelola BOS meraih juara 1 Tingkat Nasional
- FIKSI meraih Juara 1 *Stand* Kreatif
- FLS2N PKLK meraih 3 Emas (Baca Puisi SDLB, Design Grafis SMALB, Pantomim SMPLB/ SMALB)

b) Jenjang SMA :

- OSN meraih 10 Emas (Matematika, Fisika, Kimia, Komputer, Biologi, Astronomi dan Geografi)
- O2SN meraih 1 Emas (Karate)
- FLS2N meriah 1 Emas (Tari Berpasangan dan Baca Puisi)
- Moscow Academic Competition meraih 1 Emas (Kimia)
- Kejuaraan Catur Internasional meriah Juara 1

c) Jenjang SMK :

- OSN meraih 9 Emas (*Restaurant Service, Mechatronics, Ladies Dressmaking, Secretary, Marketing, Fishery, Agronomy dan Jewellery*)
- O2SN meraih 1 Emas (Pencak Silat Tanding Putri)
- FLS2N meraih 3 Emas (Menyanyi Solo, Gitar Klasik dan Film Pendek)
- Lomba Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing Tingkat Nasional meraih 3 Emas (Bahasa Inggris, Bahasa Korea dan Bahasa Perancis)

8) Persentase peserta didik penerima BOP Sekolah Negeri sebesar 100 persen

9) Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu Jakarta Pintar sebesar 100 persen

10) Dipertahankannya persentase lembaga keterampilan non formal dan informal yang dibina sebesar 100 persen

11) Diselesaikannya kebijakan sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi di Provinsi DKI Jakarta diberlakukan seluruh sekolah negeri baik dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/ SMK dengan jumlah 2.120 sekolah yang terdiri dari :

    a) TK : 9 Sekolah
    b) SD : 1.643 Sekolah
    c) SMP : 289 Sekolah
    d) SMA : 116 Sekolah
    e) SMK : 63 Sekolah

12) Persentase kelulusan sekolah terdiri dari :

    a) Tingkat kelulusan SMP sebesar 99.98 persen
    b) Tingkat kelulusan SMA sebesar 100,00 persen
    c) Tingkat kelulusan SMK sebesar 99.99 persen

13) Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) terdiri dari :

    a) Rata-rata nilai UN tingkat SMP/ MTs adalah 6,23
    b) Rata-rata nilai UN tingkat SMA adalah 6,06
    c) Rata-rata nilai UN tingkat SMK adalah 6,37

14) Meningkatnya persentase jumlah sekolah ramah anak sebesar 100 persen pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar 99 persen pada tahun 2015.

15) Dipertahankannya target perbandingan penerimaan peserta didik baru (PPDB) antara lokal, umum, prestasi dan non DKI sebesar Lokal = 45 persen, Umum = 45 persen, Prestasi = 5 persen dan Luar DKI = 5 persen.

16) Meningkatnya persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan layak sebesar 68,21 persen pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar 51,81 persen pada tahun 2015.

17) Meningkatnya persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)

sebesar 100 persen pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar 99 persen pada tahun 2015.

2. URUSAN KESEHATAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan kesehatan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.8.203.114.926.688,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 6.840.555.866.799,- atau 83,39%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak

a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit

d) Review PWS KIA

e) Peningkatan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja

f) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Neonatal

g) Jampersal DAK

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Sudah dijelaskan pada program unggulan

5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

6) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman

a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Produk Industri

Rumah Tangga

b) Workshop pengadaan obat e-Katalog dan Tata kelola obat dan Perbekalan kesehatan terpadu

c) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian PBF, Industri Farmasi, Obat Tradisional dan Kosmetik

d) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Kefarmasian

7) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

a) Emergency Character Building

b) Forum Komunikasi Pegawai PPKP

c) Manajemen Puskesmas

d) Pelatihan Manajemen *Rescue* dan Evakuasi Khusus

e) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Non PNS

f) Peningkatan Kapasitas Bagi Awam Khusus Tentang Bantuan Hidup Dasar

g) Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

h) Peningkatan Kemampuan Penanganan Kedaruratan

i) Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Mahasiswa

j) Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja Tenaga Medis dan Non Medis

k) Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS

l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai

m) Peningkatan Wawasan Tenaga Kesehatan Dalam Penanganan Kasus Spesialistik

n) Penyediaan Tenaga Honorarium Non PNS

o) Pertemuan Workshop Keperawatan

p) Praktek Keperawatan Anak II, Maternitas II dan Keperawatan Medikal Bedah (KMB) I

q) Praktek Keperawatan Dasar

r) Praktek Keperawatan Jiwa

s) Praktek Keperawatan Medikal Bedah (KMB) IV, KGD dan INC

t) Praktek MTBS dan Keperawatan Komunitas

8) **Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana**

a) Pelaksanaan Kegiatan Pusat Pengendalian Dukungan Kesehatan (Pusdaldukkes)

b) Pelayanan Kesehatan Lapangan Even Nasional dan International

c) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

d) Forum Komunikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesehatan, antara lain:

1) Meningkatnya peserta yang disediakan dana Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah untuk 3.487.096 peserta dari 2.871.565 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi DKI Jakarta

2) Terselesaikannya cakupan masyarakat miskin dan rentan yang ber-KTP DKI Jakarta yang terdaftar dan mendapat layanan kesehatan di PPK Tk. I (Puskesmas) sebesar 99,6% sampai dengan November 2016 dari sebesar 100% pada tahun 2015,

3) Meningkatnya persentase Kelurahan Siaga Aktif sebanyak 80% pada tahun 2016 dari 78% pada tahun 2015

4) Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 52,66/100.000 kelahiran pada tahun 2016 dari sebesar 56,54/100.000 kelahiran pada tahun 2015

5) Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 4,1/1000 pada tahun 2016 dari sebesar 4,61/1000 pada tahun 2015 per Kelahiran Hidup

6) Terselenggaranya Jumlah pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan sebanyak 27 pasar pada tahun 2016 dan sebanyak 34 pasar pada tahun 2015,

7) Tersedianya jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan fasilitas layanan kesehatan sebanyak 15 rusun pada tahun 2016 dan 41 rusun pada tahun 2015,

8) Meningkatnya Jumlah Puskesmas rawat inap selain rumah bersalin yang telah ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Kelas D di Kecamatan sebanyak 19 RSU Kelas D pada tahun 2016 dari sebanyak 15 Puskesmas pada tahun 2015

9) Tahun 2016 terjadi peningkatan jumlah tempat tidur kelas tiga di RSUD sebanyak 2.744 unit pada tahun 2016 dari 2.566 unit pada tahun 2015

10) Tingkat angka kesakitan akibat penyakit DBD sebesar 198,8/100.000 pasien per penduduk pada tahun 2016 dan 49,44/100.000 pasien per penduduk pada tahun 2015

11) Tingkat Persentase kasus baru TB paru BTA positif sebesar 77% pada tahun 2016 dan sebesar 80,81% pada tahun 2015

12) Meningkatnya persentase cakupan akses layanan kesehatan pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) sebesar 88% pada tahun 2016 dari sebesar 68,2% pada tahun 2015

13) Dipertahankannya persentase cakupan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 100%

14) Dipertahankannya jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan penyakit tidak menular (PTM) sebanyak 44 Puskesmas

15) Tingkat persentase obat generik yang digunakan oleh Puskesmas sebesar 91,14% pada tahun 2016 dan sebesar 91,82% pada tahun 2015,

16) Tingkat persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan Kesehatan Pemerintah sebesar 96% pada tahun 2016 dan sebesar 98,4% pada tahun 2015

17) Jumlah pengujian produk makanan produksi rumah tangga yang beredar di pasaran sebesar 15 item pada tahun 2016 dan sebesar 32 item pada tahun 2015

18) Meningkatnya jumlah SDM Kesehatan non PNS yang kompeten sebanyak 1480 orang pada tahun 2016 dari sebanyak 790 orang pada tahun 2015.

19) Dipertahankannya response time penanganan kesehatan dalam penanggulangan bencana 15 menit,

3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan pekerjaan umum, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp10.566.127.384.067,- dengan total penyerapan sebesar Rp7.997.765.483.830,- atau 75.69%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman

a) Penertiban dan Pengosongan Rumah/ Bangunan
b) Penyelesaian Perkara Perumahan di PTUN dan PN
c) Penyelesaian Sengketa Penghunian Tanpa Hak
d) Pendampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha
e) Penyiapan dan Relokasi Warga Yang Terkena Program Penataan Kota

2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat

a) Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta Utara

b) Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa Bebek

c) Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot

d) Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda

4) **Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun**

a) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster A

b) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster B

c) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster C

d) Perbaikan Rusunawa Penjaringan

e) Perbaikan Rusunawa Sukapura

f) Perbaikan Rusunawa Jatirawasari

g) Perbaikan Rusunawa Tambora

h) Perbaikan Rusunawa Komarudin

i) Perbaikan Rusunawa Muara Baru

j) Perbaikan Rusunawa Pinus Elok

k) Perbaikan Rusunawa Tipar Cakung

l) Perbaikan Rusunawa Cakung Barat

m) Perbaikan Rusunawa Semper

n) Perbaikan Rusunawa Pegadungan

5) Program Pembangunan Gedung Pemda

a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta

b) Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

c) Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat

e) Pembangunan Gedung Blok F dan *Ground Water Treatment* (GWT) Balaikota Provinsi DKI Jakarta

f) Pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan Pondok Karya Pembangunan (PKP)

g) Pembangunan Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia Jakarta Pusat

h) Rehab Total Wisma Atlet Senopati/ Kopassus

6) Program Pemeliharaan Gedung Pemda

a) Rehab Masjid dan Gedung LVRI

b) Penyelesaian Rehab Rutan Pondok Bambu

7) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

a) Pelaksanaan Pameran Perumahan 2016

b) Updating harga satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara, rumah negara dan harga satuan per meter untuk pagar dan pedoman pelaksanaan penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

1) Telah dilaksanakannya kegiatan penertiban dan pengosongan rumah di tiga lokasi yaitu Jl. Kebon Jeruk VI No.5 Jakarta Barat, Jl. Abdul Muis No.72E Jakarta Pusat dan Jl.Pintu Air Raya No.22 dan 22 B Jakarta Pusat.

2) Telah diselesaikannya 3 perkara perumahan di PTUN dan PN.

3) Telah diselesaikannya sengketa penghunian tanpa hak di 3 lokasi.

4) Telah dilaksanakannya pendampingan kegiatan kerjasama dengan dunia usaha di 7 lokasi rusunawa yaitu Rusunawa Daan Mogot, Rusun Jatinegara Barat, Rusunawa Pinus Elok, Rusun Pulo Gebang, Rusun Tipar Cakung, Rusun Rawa Bebek dan Rusun Cakung Barat.

5) Telah dilaksanakannya penyiapan dan relokasi warga yang terkena program penataan kota dari 4 lokasi wilayah penataan yaitu wilayah Kalijodo Jakarta Utara, wilayah Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, wilayah Pulomas Jakarta Timur dan wilayah Bukit Duri Jakarta Selatan. Selain itu telah dilakukan pula kegiatan sosialisasi pemberdayaan warga di 13 lokasi rusunawa yaitu : Rusunawa Marunda, Rusunawa Komarudin, Rusunawa

Rawa Bebek, Rusunawa Tambora, Rusunawa Cakung Barat, Rusunawa Pinus Elok, Rusunawa Pulo Gebang, Rusunawa Jatinegara Kaum, Rusunawa Daan Mogot, Rusunawa Muara Baru, Rusunawa Jatinegara Barat, Rusunawa Tipar Cakung dan Rusunawa Cipinang Besar Selatan

6) Telah diselesaikan pembangunan rumah susun yang dibiayai oleh kewajiban pengembang sebanyak 4 blok/ 400 unit di Rusun Rawa Bebek.
7) Telah dilaksanakannya pameran perumahan 2016.
8) Telah diselesaikannya pengadaan kursi *tribune* penonton, perlengkapan olahraga GOR Pondok Karya Pembangunan.
9) Telah diselesaikannya pengadaan meubelair Gedung Dinas Teknis Jatibaru.
10) Telah diselesaikannya rehab dan penataan halaman parkir di Lingkungan Kompleks Dinas Teknis Jatibaru.
11) Telah diselesaikannya penataan ruang Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.
12) Telah diselesaikannya penyusunan dokumen lingkungan rumah susun di 10 lokasi yaitu Rusun BLK Pasar Rebo, Rusun Daan Mogot, Rusun Lokbin Tegal Alur, Rusun Nagrak, Rusun Pengadegan, Rusun Penggilingan, Rusun Penjaringan, Rusun Pulo Gebang, Rusun Rorotan IV dan Rusun Cipinang Besar Utara.
13) Telah diselesaikannya kajian manajemen rekayasa lalu lintas di lokasi Rusun BLK Pasar Rebo, Rusun Pengadegan, Rusun Rorotan IV, Rusun Cipinang Besar Utara, Rusun Bekasi Timur, Rusun Boker, Rusun Penggilingan dan Pulo Gebang.
14) Telah diselesaikannya perencanaan gedung kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara.
15) Telah diselesaikannya kajian manajemen lalu lintas Masjid Raya Jakarta.
16) Telah diselesaikannya kajian pengelolaan rumah susun fungsi campuran.

17) Telah dilaksanakannya penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).

18) Telah dilaksanakannya updating satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara, rumah negara dan satuan per meter untuk pagar serta pedoman pelaksanaan penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung.

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk Urusan Perumahan Rakyat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.790.092.511.178,- dengan total penyerapan sebesar Rp1.155.591.097.763,- atau 64.55 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman

a) Penertiban dan Pengosongan Rumah/ Bangunan

b) Penyelesaian Perkara Perumahan di PTUN dan PN

c) Penyelesaian Sengketa Penghunian Tanpa Hak

d) Pendampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha

e) Penyiapan dan Relokasi Warga Yang Terkena Program Penataan Kota

2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Sudah dijelaskan pada Program Unggulan

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat

e) Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta Utara

f) Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa Bebek

g) Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot

h) Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda

4) **Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun**

1) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster A

2) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster B
3) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster C
4) Perbaikan Rusunawa Penjaringan
5) Perbaikan Rusunawa Sukapura
6) Perbaikan Rusunawa Jatirawasari
7) Perbaikan Rusunawa Tambora
8) Perbaikan Rusunawa Komarudin
9) Perbaikan Rusunawa Muara Baru
10) Perbaikan Rusunawa Pinus Elok
11) Perbaikan Rusunawa Tipar Cakung
12) Perbaikan Rusunawa Cakung Barat
13) Perbaikan Rusunawa Semper
14) Perbaikan Rusunawa Pegadungan

5) Program Pembangunan Gedung Pemda

a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta
b) Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
c) Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat
e) Pembangunan Gedung Blok F dan *Ground Water Treatment* (GWT) Balaikota Provinsi DKI Jakarta
f) Pembangunan Gedung Asrama Siswa di Lingkungan Pondok Karya Pembangunan (PKP)
g) Pembangunan Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia Jakarta Pusat
h) Rehab Total Wisma Atlet Senopati/ Kopassus

6) Program Pemeliharaan Gedung Pemda

a) Rehab Masjid dan Gedung LVRI
b) Penyelesaian Rehab Rutan Pondok Bambu

7) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda

a) Pelaksanaan Pameran Perumahan 2016

b) Updating harga satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara, rumah negara dan harga satuan per meter untuk pagar dan pedoman pelaksanaan penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perumahan Rakyat, antara lain :

1) Telah dilaksanakannya kegiatan penertiban dan pengosongan rumah di tiga lokasi yaitu Jl. Kebon Jeruk VI No.5 Jakarta Barat, Jl. Abdul Muis No.72E Jakarta Pusat dan Jl.Pintu Air Raya No.22 dan 22 B Jakarta Pusat.
2) Telah diselesaikannya 3 perkara perumahan di PTUN dan PN.
3) Telah diselesaikannya sengketa penghunian tanpa hak di 3 lokasi.
4) Telah dilaksanakannya pendampingan kegiatan kerjasama dengan dunia usaha di 7 lokasi rusunawa yaitu Rusunawa Daan Mogot, Rusun Jatinegara Barat, Rusunawa Pinus Elok, Rusun Pulo Gebang, Rusun Tipar Cakung, Rusun Rawa Bebek dan Rusun Cakung Barat.
5) Telah dilaksanakannya penyiapan dan relokasi warga yang terkena program penataan kota dari 4 lokasi wilayah penataan yaitu wilayah Kalijodo Jakarta Utara, wilayah Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara, wilayah Pulomas Jakarta Timur dan wilayah Bukit Duri Jakarta Selatan. Selain itu telah dilakukan pula kegiatan sosialisasi pemberdayaan warga di 13 lokasi rusunawa yaitu : Rusunawa Marunda, Rusunawa Komarudin, Rusunawa Rawa Bebek, Rusunawa Tambora, Rusunawa Cakung Barat, Rusunawa Pinus Elok, Rusunawa Pulo Gebang, Rusunawa Jatinegara Kaum, Rusunawa Daan Mogot, Rusunawa Muara Baru, Rusunawa Jatinegara Barat, Rusunawa Tipar Cakung dan Rusunawa Cipinang Besar Selatan
6) Telah diselesaikan pembangunan rumah susun yang dibiayai oleh kewajiban pengembang sebanyak 4 blok/ 400 unit di Rusun Rawa

Bebek.

7) Telah dilaksanakannya pameran perumahan 2016.
8) Telah diselesaikannya pengadaan kursi *tribune* penonton, perlengkapan olahraga GOR Pondok Karya Pembangunan.
9) Telah diselesaikannya pengadaan meubelair Gedung Dinas Teknis Jatibaru.
10) Telah diselesaikannya rehab dan penataan halaman parkir di Lingkungan Kompleks Dinas Teknis Jatibaru.
11) Telah diselesaikannya penataan ruang Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.
12) Telah diselesaikannya penyusunan dokumen lingkungan rumah susun di 10 lokasi yaitu Rusun BLK Pasar Rebo, Rusun Daan Mogot, Rusun Lokbin Tegal Alur, Rusun Nagrak, Rusun Pengadegan, Rusun Penggilingan, Rusun Penjaringan, Rusun Pulo Gebang, Rusun Rorotan IV dan Rusun Cipinang Besar Utara.
13) Telah diselesaikannya kajian manajemen rekayasa lalu lintas di lokasi Rusun BLK Pasar Rebo, Rusun Pengadegan, Rusun Rorotan IV, Rusun Cipinang Besar Utara, Rusun Bekasi Timur, Rusun Boker, Rusun Penggilingan dan Pulo Gebang.
14) Telah diselesaikannya perencanaan gedung kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara.
15) Telah diselesaikannya kajian manajemen lalu lintas Masjid Raya Jakarta.
16) Telah diselesaikannya kajian pengelolaan rumah susun fungsi campuran.
17) Telah dilaksanakannya penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
18) Telah dilaksanakannya updating satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara, rumah negara dan satuan per meter untuk pagar serta pedoman pelaksanaan penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan penataan ruang, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp253.962.243.436,- dengan total penyerapan sebesar Rp.235.230.956.262,- atau 92,62%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Tata Ruang

a) Analisis Evaluasi Pola Ruang

b) Pengayaan Data Peta Operasional

c) Penyusunan Panduan Rancang Kota/ UDGL Kawasan Titik TOD MRT Lebak Bulus

2) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

a) Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan

b) Pembuatan Papan Segel

3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang

a) Pengembangan dan Pemeliharaan Jakarta *City Planning Gallery*

4) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

- Belanja Modal Pengadaan Komputer *Mainframe*/ Server
- Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan
- Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur
- Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Selatan

5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

a) Pemutakhiran Peta Dasar Pulau Pemukiman

b) Pemeriksaan Lapangan atas Permohonan Rekomendasi Teknis

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penataan Ruang, antara lain :

1) Program Perencanaan Tata Ruang

Pada program ini telah diselesaikan kegiatan Analisis Pola Ruang yang dilakukan pada seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun hasil yang didapat berupa data perijinan pemanfaatan ruang (KRK, IMB dan RTLB), dan seluruh data ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam evaluasi RDTR PZ tahun selanjutnya. Selain itu, telah diselesaikan pula kegiatan Pengayaan Data Peta Operasional pada Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan hasil yang didapat berupa peta operasional yang sudah ter-*update* dengan perijinan yang pernah dikeluarkan sebelum RDTR PZ ditetapkan seperti KRK, SIPPT dan Lembar Rencana Kota (LRK) yang bermanfaat sebagai input bahan Evaluasi RDTR dan PZ. Di samping itu, dari kegiatan Penyusunan Panduan Rancang Kota/ UDGL Kawasan Titik TOD MRT Lebak Bulus juga dihasilkan Draft Rapergub Panduan Rancang Kota/ UDGL Kawasan Titik TOD MRT Lebak Bulus yang akan dipergunakan sebagai acuan penataan kawasan tersebut setelah terbangunnya jalur MRT dan sebagai bahan Evaluasi RDTR dan PZ.

2) **Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan**

Dari program ini telah diselesaikan kegiatan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan dengan hasil jumlah bangunan yang dibongkar pada tahun 2016 sebanyak 1.178 bangunan. Dengan adanya kegiatan ini, maka diharapkan ketaatan masyarakat dalam melakukan pembangunan dan pemanfaatan ruang akan meningkat. Kegiatan Pembuatan Papan Segel sebagai penunjang kegiatan Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan. Pembuatan papan segel dilakukan untuk menertibkan bangunan-bangunan yang melanggar ijin, baik itu tanpa ijin maupun tidak sesuai ijin.

3) **Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang**

Dari program ini telah diselesaikan kegiatan Pengembangan dan

Pemeliharaan Jakarta *City Planning Gallery* yaitu pemelihaaran maket dan panel sehingga penyediaan informasi dapat berjalan dengan baik. Hal ini ditujukan dalam rangka memenuhi kebutuhan warga Kota Jakarta pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya akan informasi mengenai rencana kota. Galeri ini berisi informasi rencana kota, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang, yang disajikan dalam bentuk maket, panel-panel informasi dan *multimedia*.

4) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Dari program ini telah diselesaikan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Komputer *Mainframe*/ Server dan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan sebagai penunjang perencanaan tata ruang dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu didapatkan hasil data jumlah kelurahan yang terdata melalui kegiatan Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Jumlah kelurahan yang sudah terdata sampai dengan tahun 2015 sebanyak 207 kelurahan sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 12 kelurahan sehingga total keseluruhan kelurahan yang sudah terdata sampai dengan tahun 2016 sebanyak 219 Kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pertanahan.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan perencanaan pembangunan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp119.859.814.658,- dengan total penyerapan sebesar Rp93.264.406.526,- atau 77.81%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

a) Implementasi kebijakan pembangunan nasional bidang Perekonomian

b) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Perekonomian

c) Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian

d) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Massal

2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD dalam Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat

c) Koordinasi dan Pengendalian Implementasi Kebijakan Nasional Bidang Kesejahteraan Rakyat

d) Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan Daerah

3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan

b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan

c) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pemerintahan

4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana dan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Diklat Internship Intergrated Urban Water Management (Sister City Jakarta-Rotterdam)

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

a) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2017

b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun 2016

c) Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016

d) Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

e) Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022
f) Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah
g) Pengembangan e-Musrenbang
h) Pengembangan Sistem e-Monev
i) Penyusunan Evaluasi Penetapan Kinerja
j) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)
k) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Keuangan
l) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan
m) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
n) Pembahasan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI
o) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2015

6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

a) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup
c) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang daerah (BKPRD)
d) Evaluasi Pelaksanaan RTRW Tahun 2012-2015 dan Penyempurnaan Metode Peninjauan Kembali RTRW Wilayah DKI Jakarta 2030

7) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Perencanaan Pembangunan

a) Pengelolaan Data Terbuka
b) Pengelolaan Sistem Database Nasional dan Simpul Jaringan Data Spasial Provinsi DKI Jakarta

c) Pengelolaan Website dan Media Informasi Bappeda
d) Pengelolaan Perpustakaan Bappeda
e) Publikasi Data dan Informasi Pembangunan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan, antara lain:

1) Dipertahankannya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian sebesar 85 persen.
2) Dipertahankannya persentase pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pembangunan bidang perekonomian sebesar 100 persen.
3) Dipertahankannya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan rakyat sebesar 85 persen.
4) Dipertahankannya persentase pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi pembangunan bidang kesejahteraan rakyat sebesar 100 persen.
5) Dipertahankannya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan pemerintahan sebesar 85 persen.
6) Dipertahankannya persentase perlaksanaan *monitoring* dan evaluasi pembangunan bidang pemerintahan sebesar 100 persen.
7) Dipertahankannya persentase kompetensi SDM perencana dan organisasi perencana sebesar 75 persen.
8) Dipertahankannya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan keuangan sebesar 85 persen.
9) Dipertahankannya persentase perlaksanaan *monitoring* dan evaluasi pembangunan bidang keuangan sebesar 100 persen.
10) Dipertahankannya persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen rencana pembangunan sebesar 100 persen.
11) Dipertahankannya persentanse ketepatan waktu penyampaian APBD sebesar 100 persen.
12) Dipertahankannya persentase kualitas perencanaan dan pengendalian perencanaan sebesar 100 persen.

13) Dipertahankannya persentase sistem informasi perencanaan pembangunan sebesar 100 persen.
14) Dipertahankannya persentase implementasi rencana pembangunan sebesar 100 persen.
15) Tersusunnya RKPD Tahun 2016 dengan turut melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
16) Meningkatnya usulan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan Tahun 2016 yang terakomodir sebesar 44 persen dari target yang ditetapkan sebesar 42 persen.
17) Dipertahankannya pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan prasarana sarana kota dan lingkungan hidup sebesar 85 persen.
18) Dipertahankannya persentase perlaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan bidang prasarana sarana kota dan lingkungan hidup sebesar 100 persen.

7. URUSAN PERHUBUNGAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk Urusan Perhubungan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp1.091.212.313.752,- dengan total penyerapan sebesar Rp903.525.217.762,- atau 82,80 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan

Sudah dijelaskan pada program unggulan

2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan

a) Perbaikan, Penggantian, dan Pemasangan Rambu pada Kawasan dengan Pembatasan Lalu Lintas
b) Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
c) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d) Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Tahun 2016 serta Angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017

3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan

a) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

b) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2016

4) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Rel

Sudah dijelaskan pada program unggulan

5) Program Pembangunan Transportasi Perairan

a) Pengadaan Mesin Outboard Kapal Milik UP APK

b) Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

c) Pemeliharan Total Dermaga Utama Pulau Kelapa RW 05

d) Pembangunan Dermaga dan Kolam Labuh Timur Pulau Pramuka

e) Peningkatan Dermaga Timur di Pulau Untung Jawa

f) Peningkatan Pelabuhan Pulau Harapan

g) Pengadaan Kapal Angkutan Sekolah

h) Penelitian Kelayakan Kontruksi Dermaga

i) Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Bagi Pengguna Fasiltias Pelabuhan

j) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi

6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a) Pemarkaan Marka Jalan

b) Pembangunan Cermin Lalu Lintas

c) Pembangunan Deliniator

d) Pembangunan *Guard Rail*

e) Pembangunan Rambu Diameter 60

f) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar

g) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Tiang Type F

h) Pembangunan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)

i) Pembangunan Rambu Standar

j) Pembangunan Road Stood

k) Pembangunan RPPJ

l) Pembangunan Sapras Lalu Lintas

m) Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas

n) Pembangunan Separator

o) Pembangunan Type F (Cremona)

p) Pemeliharaan Beton Pemisah (Median Jalan)

q) Pemeliharaan Cemin Lalu Lintas

r) Pemeliharaan dan Perawatan Halte

s) Pemeliharaan dan Perbaikan Pagar Pengaman

t) Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

u) Pemeliharaan Rambu Standar

v) Pemeliharaan RPPJ

w) Pemeliharaan Rutin Pembangunan Rambu Lalu Lintas

x) Pemeliharaan Terminal Bus

y) Pemeliharaan Type F

z) Penanganan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas

aa) Penataan Kawasan SimpangTak Sebidang

bb) Pengadaan *Traffic Cone*

cc) Pengecatan Pagar Pengaman

dd) Peningkatan Halte Bus dan Halte *Go Green*

ee) Peningkatan Halte *Go Green* Wilayah Jakarta Selatan

ff) Penyediaan Bahan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (JPO dan Halte)

gg) Penyediaan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (Cermin Lalu Lintas)

hh) Penyediaan Panel Rambu Lalu Lintas

ii) Penyediaan Rambu Sekolah dan Rambu Portable

jj) Penyediaan/ Pemasangan Cermin Lalu Lintas

7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a) Perbaikan/ Perawatan Lift JPO/TPO

b) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 1

c) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 2

d) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 3

e) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 4

f) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 7

g) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 9

h) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 10

i) Perbaikan/ Perawatan Selasar Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta

j) Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Kereta Api Wilayah DKI Jakarta

k) Pengadaan MCB

l) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas untuk Keperluan *Emergency*

m) Pengecatan Marka *Yellow Box*

n) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta

o) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 1

p) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 2

q) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 3

r) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 4

s) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 7

t) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 9

u) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 10

v) Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas

w) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Timur

x) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Pusat

y) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Barat

z) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Selatan

aa) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Utara

bb) Perbaikan/ Perawatan Halte Bus Reguler Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta

cc) Pengadaan Cermin Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI

dd) Pengadaan *Checkered Plate* Untuk Perbaikan JPO

ee) Pengadaan Alumunium *Composite Panel*

ff) Sewa Tempat Penyimpanan Material Perlengkapan Jalan

gg) Pengadaan Cat Untuk Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas

hh) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Lapangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

ii) Peningkatan JPO Setiabudi Utara, Jakarta Selatan

jj) Pengadaan *Polycarbonate*

8) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah

a) Pelaksanaan Tugas Dewan Transportasi Kota Jakarta

b) Rekrutmen Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta

c) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan

d) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perhubungan, antara lain :

1) Telah diselesaikan kegiatan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdiri dari beberapa jenis pelanggaran sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	BAP/ Tilang	39.548
2	Operasi Cabut Pentil (OCP) Kendaraan Roda 2 dan 4	75.066
3	Penderekan	20.817
4	Jaring/ Angkut (Parkir liar untuk roda 2)	3.356
5	Stop Operasi/ Stop Operasi Polisi	11.497
6	BAP Polisi	31.358
Jumlah		**181.642**

2) Telah diselesaikan kegiatan Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor di tingkat provinsi maupun di 5 (lima) wilayah kota administrasi. Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Wilayah	Lokasi
1	Provinsi	Jl. Jend. Sudirman-Jl. MH. Thamrin (Patung Pemuda Membangun s.d Bundaran Patung Kuda/ Patung Arjuna)
2	Jakarta Pusat	Jl. Suryo Pranoto (Persimpangan Jl. Harmoni s.d Persimpangan RSUD Tarakan)
3	Jakarta Utara	Jl. Boulevard Raya (Bundaran La Piazza-Jl. Perintis Kemerdekaan)
4	Jakarta Timur	Jl. Pemuda (Persimpangan Arion s.d Persimpangan Jl.Pemuda-Jl. Bekasi Raya)
5	Jakarta Selatan	Jl. Sisingamangaraja (Tugu Selamat Datang s.d Jl. Trunojoyo-Jl. Kyai Maja (CSW))
6	Jakarta Barat	Kawasan Kota Tua Tamansari (Jl. Kali Besar Utara-Jl. Kali Besar Timur-Jl. Kali Besar Barat-Jl. Kopi-Jl. Kali Besar Timur 2-sebagian Jl. Kali Besar Timur 3-Jl. Kali Besar Timur 4-Jl. Kali Besar Timur 5-Jl. Pos Kota)

3) Telah diselesaikan pengendalian lalu lintas pada pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggota Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta antara lain:
   a) Demonstrasi Guru Honorer Seluruh Indonesia
   b) Hari Raya Tahun Baru Imlek 2567 – Tahun 2016 Masehi
   c) Upacara Bersama 3 (tiga) Pilar TNI, POLRI dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 17 Februari 2016

d) Hari Raya Paskah – Tahun 2016 Masehi
e) Piala Bhayangkara 2016
f) Hari Libur Nasional tanggal 5-8 Mei 2016
g) Operasi Kepolisian Terpusat Patuh Jaya – 2016
h) Pengendalian Lalu Lintas di Sekitar Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Tahun 2016
i) Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas pada acara Milo Jakarta Internasional 10K Tahun 2016
j) Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas Upacara HUT RI Ke-71 Tahun 2016 di Istana Negara Jakarta Pusat
k) Peserta Upacara HUT RI Ke-71 Tahun 2016
l) Apel Gelar Pasukan Pengamanan Idul Adha 1437 H Tahun 2016 dan Libur Bersama
m) Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA Tahun 2016
n) *The 6th Tafisa World Sport For All Games* Tahun 2016
o) Upacara Hari Kesaktian Pancasila
p) Upacara Hari Kebangkitan Nasional
q) Penertiban Reklame di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)
r) Unjuk Rasa Bela Al-Qur'an 411
s) Pemanduan Rombongan VIP, VVIP, dan Atlet
t) Upacara Hari KORPRI
u) Aksi Super Damai Bela Islam III
v) Maulid Nabi Muhammad SAW
w) Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-68 Tahun 2016
x) Upacara Hari Ibu Ke-88
y) Libur Hari Raya Natal
z) Kunjungan Plt. Gubernur pada Malam Natal 2016
aa) *Car Free Night* (*CFN*)

4) Telah dilaksanakan kegiatan pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2016. Pemenang kegiatan

tersebut kemudian akan maju menjadi perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke tingkat nasional.

5) Telah diselesaikan kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik, antara lain:
   a) Perbaikan/ Perawatan JPO dan Selasarnya
   b) Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Kereta Api Sebidang berupa:
      (1) Rambu hati-hati perlintasan
      (2) Yellow box
      (3) *Speed trap*; dan
      (4) Garis stop

      Adapun lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
      (1) Jalan Penjernihan-Karet
      (2) Jalan Latuharhari-Madiun
      (3) Jalan Latuharhari-Teuku Cik Ditiro
      (4) Jalan Gelora-Tentara Pelajar
      (5) Jalan Pasar Minggu-TB Simatupang
      (6) Jalan Lenteng Agung-Tanjung Barat
      (7) Pelintasan Jalan Percetakan Negara
      (8) Perlintasan Jalan Garuda
      (9) Perlintasan Jalan Angkasa
   c) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta
   d) Pengecatan Marka Jalan
   e) Perbaikan, Penggantian, dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas
   f) Perbaikan/ Perawatan Halte Bus Reguler
   g) Pengadaan Cermin Lalu Lintas
6) Telah diselesaikan pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang telah terbangun saat ini dengan melaksanakan penggantian terhadap komponen-komponen tertentu yang mengalami kerusakan.

7) Telah diselesaikan Pembangunan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di 11 (sebelas) lokasi sebagai berikut:
   a) *Traffic light Fly Over* Cakung, Jakarta Timur
   b) *Traffic light* depan gerbang Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur
   c) *Pelican Crossing* Jl. Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan
   d) *Pelican Crossing* Depan Kemenkeu-Hotel Borobudur, Jakarta Pusat
   e) *Pelican Crossing* Balai Samudra-MOI Kelapa Gading, Jakarta Utara
   f) *Pelican Crossing* Kejaksaan Negeri Jakbar-Kantor Walikota Jakarta Barat
   g) *Warning Light* SMP 8 Jl. Pegangsaan Barat-Jl. P. Diponegoro, Jakarta Pusat
   h) *Warning Light* Depan SD Islam Tunas Mandiri-Lenteng Agung, Jakarta Selatan
   i) *Warning Light* Depan SMP 255 Buaran, Jakarta Timur
   j) *Warning Light* Depan St. KA Pasar Minggu-Rawa Jati, Jakarta Selatan
   k) *Pelican Crossing* SD 03-RS Jakarta Eye Centre Jl. Cik Di Tiro, Jakarta Pusat
8) Telah diselesaikan kegiatan pengintegrasian Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) dengan perlintasan kereta api di Tanjung Barat. Dengan adanya sistem ini, maka ketika kereta api akan melintas, secara otomatis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) akan memberikan isyarat berhenti kepada kendaraan yang akan melintas.
9) Telah diselesaikan kegiatan pemeliharaan terhadap 3 (tiga) unit *Variable Message Sign* (*VMS*) milik Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalu Lintas (UP SPLL) yang mengalami kerusakan.
10) Telah diselesaikan kegiatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada 3 (tiga) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor yakni :

a) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng
b) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung
c) Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing

11) Telah diselesaikan Penambahan Lajur Uji Kendaraan sebanyak 2 (dua) lajur di lokasi Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng, sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
12) Telah diselesaikan pembangunan pelayanan pengujian drive thru di Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung dan telah diresmikan pengoperasiannya.
13) Telah diselesaikan kegiatan Pengadaan Alat Uji Portable Dan Headlight Tester Otomatis oleh Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing untuk meningkatkan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.
14) Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan pengoperasian pelayanan pengujian antara lain kegiatan Revitalisasi Gedung Fasilitas Pengujian dengan 4 (empat) lajur uji, Pengadaan Alat Uji, Pengadaan Perlengkapan Kerja, Buku Uji, Plat Uji, dan Sticker Uji, dan lain-lain pada Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke
15) Telah diselesaikan kegiatan pengadaan 8 (delapan) mesin outboard untuk 2 (dua) kapal milik Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan. Pengadaan mesin ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan perairan dari dan menuju Kepulauan Seribu.
16) Telah diselesaikan kegiatan pengadaan jasa konsultansi oleh Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik dengan hasil berupa dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Jalan Berbayar Elektronik dan Dokumen Rencana Strategis Bisnis/ Rencana Bisnis Anggaran Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
17) Telah diselesaikan pengelolaan parkir di Taman Ismail Marzuki,

PD Pasar Jaya, beberapa RSUD milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan beberapa gedung pemerintah daerah yang baru diserahkan pengelolaannya kepada Unit Pengelola Perparkiran. Selain itu juga telah dilaksanakan upgrade system gate parkir IRTI Monas dan Terminal Parkir Elektronik (TPE). Selain itu telah dilaksanakan pula kegiatan Pengadaan Terminal Parkir Elektronik (TPE) sebanyak 201 (dua ratus satu) unit Terminal Parkir Elektronik (TPE)

8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan lingkungan hidup, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp2.398.307.815.371,- dengan total penyerapan sebesar Rp1.472.537.326.892,- atau 61.40%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

a) Pemantauan Kualitas Air Sungai
b) Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
c) Kajian Akademis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Udara
d) Pemantauan Kualitas Air Tanah
e) Pemantauan Kualitas Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta
f) Pemantauan Kualitas Air Situ/ Waduk
g) Penilaian Dokumen Lingkungan
h) Pembinaan Penatalaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sesuai PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan untuk Komisi Penilai AMDAL
i) Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup

2) **Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam**

a) Transplantasi terumbu karang melalui pelaksanaan konservasi terumbu karang seluas 1 Ha di APL P. Harapan dan P. Kelapa masing-masing 375 unit substrad (1500 tranplanstasi)

b) Taman miniatur kolam ikan melalui pembangunan kolam taman miniatur seluas 3.900 m² dengan jumlah ikan sebanyak 2.500 ekor

3) **Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

a) Penilaian Status Ketaatan Lingkungan (SKL) dan Status Pencemaran Lingkungan (SPL)

b) Pameran Lingkungan Hidup dan Apresiasi Lingkungan Hidup

c) Pembinaan dan Penilaian Adipura

d) Pembinaan dan Penilaian Kalpataru, Saka Kalpataru dan Adiwiyata

4) **Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan**

a) Pemeliharaan Hutan Kota melalui penyediaan Pegawai Harian Lepas (PHL) Pemeliharaan Hutan Kota sebanyak 40 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan pengadaan sebanyak 40 paket perlengkapan kerja PHL.

b) Pemeliharaan Hutan Mangrove melalui penyediaan PHL sebanyak 10 orang (dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) serta pengadaan barang sebanyak 10 paket perlengkapan kerja PHL.

c) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Barat melalui Pemeliharaan Hutan Kota, Sentra Pemasaran dan Promosi Ikan Hias (SPPIH) Slipi, Pos Jaga Kehutanan Cengkareng, Pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 4 unit, Floor Cleaner sebanyak 50 galon, Gunting Rumput

sebanyak 10 buah, Paranet sebanyak 10 roll, Tangga Alumunium sebanyak 2 buah, Herbisida sebanyak 20 liter, Mesin Potong Rumput sebanyak 4 unit, Gunting Potong Benalu sebanyak 6 buah, Cangkul sebanyak 20 buah, Golok sebanyak 10 buah, serta Pengecatan *Water Proofing* di SPPIH Slipi

d) Pembebasan Lahan untuk Perluasan Sentra Flora Semanan seluas 358 m^2

e) Penghijauan Lingkungan melalui pelaksanaan penghijauan di pemukiman dan bantaran Kali dengan penanaman sebanyak 2.000 pohon, Pengadaan Rak sebanyak 50 buah, Anjir Bambu sebanyak 2.500 batang, Pupuk Kompos sebanyak 1.000 pack serta Benih Cabe Merah, Caisim, Kangkung dan Media Tanam sebanyak 1.500 pack

f) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Selatan melalui pemeliharaan sebanyak 5 lokasi hutan kota di Wilayah Jakarta Selatan

g) Pembinaan Gang Hijau melalui kegiatan menghijaukan lingkungan/ gang di 10 kecamatan

h) Kegiatan Pertanian Lintas Sektoral melalui penyediaan 38 vertikultur dan 25 vertiminaponik untuk meningkatkan ruang hijau di lingkungan pemukiman/ RPTRA

i) Penyelenggaraan pertanian perkotaan di Wilayah Jakarta Timur berupa pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan teknologi pertanian untuk gang hijau sebanyak 25 lokasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian di lingkungan rumah tinggal/ masyarakat berupa vertimina ponik sebanyak 10 unit, pemberian sarana produksi pertanian berupa rak vertikultur kepada instansi pemerintah/ swasta/ sekolah sebanyak 24 buah,

5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

a) Inventarisasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim)

6) Program Konservasi Flora dan Fauna

a) Rehabilitasi ekosistem pesisir berupa peningkatan luasan penanaman mangrove 2,6 Ha atau sekitar 30 persen sebagai rehabilitasi ekosistem pesisir (paru-paru Muara Angke)

b) Pengamanan Hutan Kota berupa patroli hutan kota sebanyak 12x20 orang dan pengadaan mobil patroli 1 buah.

c) Tenaga Pengamanan Hutan Kota dan Kawasan Hutan berupa PHL pengamanan 50 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan pengadaan perlengkapan keamanan 50 paket

7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Kelautan

a) Expo *Coral Day* dan *Jakarta Blue* berupa penanaman 1.000 pohon mangrove dan bersih-bersih pantai di Pulau Tidung, serta pelaksanaan kegiatan workshop PRL dan Jakarta *Coral Initiative* dengan 570 orang peserta.

b) Identifikasi dan Pembibitan Sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kegiatan pembibitan mangrove, pengadaan 2 roll paranet, 12.525 batang pohon mangrove, 28 zak pupuk kandang, 30 buah bambu, 24.440 buah bibit mangrove (Propagul), 10 botol pupuk cair organik. Pengadaan yang berkaitan dengan transplatasi terumbu karang : 24 roll tali tambang (plastik), 3 lusin sarung tangan kain, 7 buah gunting stek, 80 pack kabel ties, 50 buah pelampung, rak transplantasi terumbu karang sebanyak 59 unit @ ukurannya 2,5x2,5 m dan 4.150 bibit terumbu karang, 30 buah jangkar kodok (uk. 20kg), dan 3 orang petugas teknis konservasi (honor 13 bulan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)

c) *Surveilance* Hama dan Penyakit di Lingkungan Budidaya Laut berupa pelaksanaan *surveilance* dan pengadaan 5 lusin

sarung tangan kain, 2 unit pompa udara lp 100, 1 set *aquarium* uk. 80x60x40 cm, 3 jenis obat-obatan, 1 unit ultra violet *sterilizer* pengujian & kalibrasi. Diperolehnya sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan semula mendapatkan kelas "Cukup" menjadi "Baik" dengan nomor sertifikasi 1029.3006.A2.B1-Form CPIB16

8) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup

a) Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (AC)
b) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
c) Penyediaan Makan dan Minum Rapat
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPLHD
e) Pemeliharaan Taman Kantor BPLHD
f) Penyediaan Cetakan BPLHD
g) Penyewaan Mesin Fotocopy
h) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK)
i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja BPLHD
j) Pemeliharaan Sarana Apung
k) Penyediaan Jasa TALI dan IPAL BPLHD
l) Pemeliharaan Gedung BPLHD
m) Pemeliharaan Sarana Telepon, Air, Listrik dan Sarana Pemadam Kebakaran BPLHD
n) Pemeliharaan Sarana Teknologi dan Informasi BPLHD
o) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
p) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
q) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura Jakarta

9) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman

Sudah dijelaskan pada program unggulan.

10) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

a) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Taman Bumi Perkemahan Ragunan seluas 80.057,7 m^2

b) Pelaksanaan Patroli Penertiban Taman, Jalur Hijau, Sarana Keindahan kota dan TPU di Provinsi DKI Jakarta 5 wilayah

c) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Barat seluas 15.067,39 m^2

d) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Selatan seluas 57.245 m^2

e) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat seluas 69.967 m^2

f) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Timur seluas 149.489 m^2

g) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan seluas 47.985 m^2

h) Pemeliharaan Taman RTH Gg. Batas dan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan seluas 1.125 m^2

i) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Utara seluas 5.369,3 m^2

j) Pemeliharaan Taman Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kel. Cipinang dan Taman SETIA Kec. Makassar, Jakarta Timur seluas 2.240,36 m^2

k) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Sadar, Jakarta Selatan seluas 4.598 m^2

l) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Jangkrik, Jakarta Selatan seluas 8.034 m^2

m) Pemeliharaan Taman Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur seluas 140.000 m^2

n) Pemeliharaan Taman Jl. Mangga XIV, Jakarta Barat seluas 3.009 m^2

o) Pemeliharaan Taman GOR Ragunan, Jakarta Selatan seluas 181.318,2 m^2

p) Pemeliharaan Taman GOR Jl. Logistik No. 1 Jakarta Utara seluas 51.000 m^2

q) Pemeliharaan Taman GOR Jl. Kelapa Puan Raya No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara seluas 7.000 m^2

r) Pemeliharaan Taman GOR Jl. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara seluas 58.000 m^2

s) Pemeliharaan Taman GOR Jl. Alur Laut No. 1, Jakarta Utara seluas 51.000 m^2

t) Pemeliharaan Taman Gg. 100 dan Gg. Rukun Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 9.259 m^2

u) Pemeliharaan Taman Jl. Kamp. Pedaeangan, Cakung, Jakarta Timur seluas 9.596 m^2

v) Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Jabatan Gubemur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan *Guest House* Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 5.641,45 m^2

w) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung, Jakarta Timur seluas 5.638 m^2

x) Pemeliharaan Taman Kompleks Dinas Teknis Jatibaru Jl. Jatibaru I dan Taman Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta seluas 8.092 m^2

y) Pemeliharaan Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara seluas 135.200 m^2

z) Pemeliharaan Taman Pagelarang, Jakarta Timur seluas 6.119 m^2

aa) Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat seluas 1.500 m^2

bb) Pemeliharaan Taman Kampus PKP, Jakarta Timur seluas 85.477 m^2

cc) Pemeliharaan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Barat seluas 10.610 m^2

dd) Pemeliharaan Taman Semanggi seluas 108.430,6 m^2

ee) Pemeliharaan Taman Salix, Jakarta Timur seluas 27.409 m^2

ff) Pemeliharaan Taman Cempaka, Jakarta Timur seluas 70.873 m^2

gg) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Barat seluas 27.435 m^2

hh) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Selatan seluas 90.627 m^2

ii) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Timur seluas 67.264 m^2

jj) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Utara seluas 61.107 m^2

kk) Pemeliharaan/ Perbaikan Rutin Pemangkasan/ Penopingan dan Penebangan Pohon, Pohon Mati dan Pohon Tumbang sebanyak 1 paket pekerjaan.

11) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota

a) Pemeliharaan Air Mancur, Ornamen Kota, Jam Kota dan Lampu Taman Serta Sarana Penyiraman

b) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman Pada Kerombong, *Green Wall* dan *Green Column*.

12) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman

Sudah dijelaskan pada program unggulan.

13) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

a) Pengadan Kantong Jenazah

b) Pengadaan Peti Jenazah

c) Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Jenazah

d) Pengadaan Tikar dan Ramuan

e) Pengadaan Kain Kafan

f) Upah Petugas Pelayanan Angkutan dan Pemulasaraan Jenazah Orang Terlantar dan Tidak Mampu

g) Pengadaan Peralatan Mesin Potong Pohon

h) Pengadaan Peralatan Pertamanan dan Pemakaman

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Lingkungan Hidup, antara lain :

1) Meningkatnya pemantauan kualitas sumber air untuk ditetapkan dan diinformasikan status mutu airnya sebanyak 90 titik pantau pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 80 titik pantau pada tahun 2015 di 5 wilayah kota
2) Dipertahankannya tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti diatas 75 kasus
3) Meningkatnya pengawasan kegiatan usaha yang memenuhi baku mutu air limbah sebanyak 1.325 kegiatan usaha pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 581 kegiatan usaha pada tahun 2015
4) Meningkatnya penyelesaian penegakan hukum lingkungan hidup yang tertangani sebanyak 1.048 kasus yang terdiri dari pengawasan Penaatan Sanksi Administratif sebanyak 122 kegiatan/ usaha, jumlah Sanksi Administratif 188 kegiatan/ usaha dan jumlah Surat Penaatan 26 kegiatan/ usaha dan penanganan 712 Pengelola Kawasan Dilarang Merokok (KDM) pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 466 kasus yang terdiri dari 125 kasus Penanganan Sanksi Administrasi, 17 kasus pidana lingkungan dan 324 lokasi KDM pada tahun 2015
5) Meningkatnya titik pantau kualitas air tanah sebanyak 267 titik, pemantauan kualitas air laut/ muara teluk sebanyak 45 titik dan pemantauan kualitas situ/ waduk sebanyak 40 situ/ waduk pada tahun 2016 dari sebelumnya pemantauan hanya dilakukan terhadap kualitas air tanah sebanyak 200 titik pada tahun 2015.
6) Meningkatnya pengawasan emisi sumber tidak bergerak (cerobong) yang memenuhi baku mutu sebanyak 470 kegiatan usaha pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 340 kegiatan usaha pada tahun 2015.
7) Meningkatnya pelaksanaan pemantauan kualitas udara pada pelaksanaan HBKB (Hari Bebas Kendaraan Bermotor) sebanyak 96 kali pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 78 kali pada

tahun 2015

8) Dipertahankannya pengendalian pencemaran limbah B3 diatas 170 kegiatan usaha
9) Meningkatnya penerbitan dokumen rekomendasi lingkungan (AMDAL) sebanyak 159 rekomendasi pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 120 dokumen pada tahun 2015
10) Meningkatnya pengawasan implementasi dokumen lingkungan pada tahap konstruksi dan operasi sebanyak 1.237 dokumen pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 1.143 dokumen pada tahun 2015.
11) Dipertahankannya peran serta masyarakat, dunia pendidikan dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 3 kelompok (5 Kota Administrasi Peserta Adipura, Sekolah Peserta Adiwiyata dan Peserta Kalpataru)
12) Meningkatnya pelaksanaan peran serta dunia usaha dalam ketaatan pengelolaan lingkungan melalui program Peningkatan Perusahaan (PROPER) sebanyak 300 kegiatan usaha pada tahun 2016 dari sebanyak 104 kegiatan usaha pada tahun 2015.
13) Terlaksananya peningkatan pengadaan sarana laboratorium lingkungan dengan kondisi pengadaan 4 peralatan laboratorium, 164 jenis reagen dan 100 persen tertanganinya IPAL dan Limbah B3 Laboratorium BPLHD
14) Terlaksananya Pengamanan Taman di 5 Wilayah Kota Administrasi (Jakarta Barat, Timur, Pusat, Selatan dan Utara)
15) Terlaksananya Patroli Penertiban Taman dan Makam di Provinsi DKI Jakarta dan Pelaksanaan Penertiban TPU di lokasi :
    a) Penertiban terpadu bangunan liar di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan pada Bulan Maret 2016
    b) Penertiban terpadu biaya makam tinggi TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Bulan April 2016.
    c) Penertiban terpadu biaya makam tinggi TPU Kawi-Kawi, Jakarta Pusat pada Bulan April 2016.
    d) Penertiban terpadu bangunan liar di TPU Penggilingan,

Jakarta Timur pada Bulan Mei 2016.

16) Terlaksananya Penanganan Segera Penertiban dan Pengamanan :
    a) Pembongkaran pagar di Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat pada Bulan Juni 2016,
    b) Penertiban Terpadu Bangunan Liar di Tpu Kober Jatinegara, Jakarta Timur pada Bulan Agustus 2016,
    c) Pengosongan lahan parkir di RTH Jl. Tipar Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada akhir Bulan September 2016.
17) Terlaksananya Penanganan Segera Pertamanan dan Pemakaman berupa
    a) Terselesaikannya pembayaran 36 klaim asuransi akibat bencana pohon tumbang
    b) Pembuatan Dekorasi Umum untuk Acara Gubernur, Acara Kepala Negara, Hari Raya Nasional, Apel Karyawan, Acara Dharma Wanita di 4 lokasi sebanyak 135 kegiatan
    c) Penopingan/ Pemangkasan/ Perawatan Pohon dan Penanganan Pohon Tumbang sebanyak 4.524 pohon
    d) Perbaikan dan Peningkatan Kerombong, Green Wall dan Green Column sebanyak 4 jenis
    e) Perbaikan dan Peningkatan Ornamen Kota, Air Mancur, Sarana Penyiraman, Jam Kota dan Lampu Taman sebanyak 5 jenis
    f) Perbaikan/ Penggantian Tanaman dan Sarana Kelengkapan Jalur Hijau Kota di 8 lokasi
    g) Perbaikan/ Penggantian Tanaman dan Sarana Kelengkapan Taman Kota di 19 lokasi
    h) Penopingan Pohon Bidang Taman di 23 lokasi
    i) Penanganan Segera Taman Kota di 28 lokasi
18) Terselesaikannya Pembuatan Sertifikasi Tanah Aset Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta dengan lokasi pensertifikatan aset tanah sebagai berikut :
    a) 3 Bidang Tanah RTH di Jl. Kampung Baru Nomor SHM 00182, 08239, 08333

b) 5 Bidang Tanah RTH Jl. Mangga XIV Nomor SHM 06987, 06988, 06989, 06990, 06991

c) 3 Bidang Tanah TPU Tegal Alur Nomor SHM 02616, 02617, 02618

19) Terlaksananya Pelayanan Pemakaman yang terdiri dari :

a) Pelayanan Angkutan dan Perawatan Jenazah Terlantar/ Tunawan dari TKP ke RSCM, Panti, Rumah dan RSUD ke TPU sebanyak 3.699 pelayanan.

b) Penyediaan Konsumsi Piket Pelayanan Pemulsaraan dan Angkutan Jenazah Terlantar sebanyak 6.708 boks makan dan 4.918 boks snack.

c) Penyediaan Upah/ Jasa Petugas Pelayanan Angkutan dan Perawatan Jenazah Terlantar kepada 48 orang petugas

d) Penyediaan Upah/ Jasa Operasional Pengemudi dan Pembantu Pengemudi Kendaraan Jenazah Ke Luar Kota sejauh 5.989 km

20) Terlaksananya Pemeliharaan Air Mancur dan Ornamen Kota, Jam Kota dan Lampu Taman, Sarana Penyiraman dan Air Mancur yang terdiri dari :

a) Pemeliharaan patung dan ornament sebanyak 26 buah

b) Pemeliharaan jam kota di 19 lokasi sebanyak 18 unit

c) Pemeliharaan lampu taman di 5 wilayah kota di 418 lokasi sebanyak 4.786 unit tiang

d) Pemeliharaan sarana penyiraman di 29 lokasi sebanyak 8.744 unit

e) Pemeliharaan air mancur di 28 lokasi sebanyak 35 air mancur

21) Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman pada Kerombong, *Green Wall* dan *Green Column* yang terdiri dari :

a) Pemeliharaan kerombong sebanyak 17 unit

b) Pemeliharaan *green column* sebanyak 25 unit

c) Pemeliharaan *green wall* sebanyak 5 unit

d) Pemeliharaan pot tanaman di 7 lokasi sebanyak 121 pot

22) Terlaksananya jumlah RTH yang merupakan hasil partisipasi masyarakat yang terdiri dari :
    a) Pembangunan Taman Aspirasi di kawasan sekitar Monas Sisi Barat Laut, Kota Administrasi Jakarta Pusat
    b) Revitalisasi Taman Puspita Indah
    c) Penataan Jalur Hijau Jl. Pramukasari I Kota Administrasi Jakarta Pusat
    d) Penataan dan Pengadaan Tanaman Hias di Area Bundaran Hotel Indonesia Kota Adm.Jakarta Pusat
    e) Pemberian Hibah Pohon Instan Tree
    f) Pemberian Hibah Tong Sampah (Stainless)
    g) Pemberian Hibah Mesin Potong Rumput
    h) Perbaikan Lerengan di Areal Landmark Kelurahan Setiabudi Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan
    i) Penataan dan Pemeliharaan Taman Mataram Timur (Merah) sebagai Taman Literasi Keuangan di Kel. Selong Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan
    j) Penataan Taman Empang Grogol, Kel. Grogol-Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat ("Tree for life")
    k) Renovasi Lapangan Olahraga di Taman Panglima Polim
    l) Pemberian Hibah/ Sumbangan 30 buah bangku taman
23) Terlaksananya pembebasan tanah untuk RTH taman dan makam seluas 18,03 Ha.

9. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan kependudukan dan catatan sipil, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.292.296.295.322,- dengan total penyerapan sebesar Rp.268.007.197.449,- atau 91.69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) **Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan**
   a) Perekaman Register Akta Berbasis Teknologi Informasi (T.I)
2) **Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
   a) Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi
   b) Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir)
   c) Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA)
   d) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil
   e) Pengadaan Pencetakan Booklet, Leaflet Kependudukan
   f) Pemeliharaan Software dan Database Data Center
   g) Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   h) Pengadaan Hardware Penunjang SIAK dan Integrasi Sektoral
   i) Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loket PTSP
   j) Pengadaan Backup Perangkat KTP Elektronik
   k) Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation
   l) Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus, Sistem Operasi dan Database Kependudukan
   m) Monitoring teknis Pelayanan Aplikasi SIAK, KTP-el, dan e-Akta
   n) ATS Aplikasi Perekaman Sidik jari (Aplikasi KTP-el)
   o) Penyediaan Operator Teknis Penunjang Pelayanan
   p) Pemeliharaan Komputer Tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Rumah Bersalin, dan RSUD
   q) Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, kelurahan, Puskesmas Rumah Bersalin dan RSUD
3) **Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

a) Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di Provinsi DKI Jakarta
b) Penyusunan Data Statistik Vital Dan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil
c) Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Media Website
d) Penyusunan/Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan
e) Penyusunan Buku Info Data Penduduk dan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
f) Pemutakhiran Data Penduduk
g) Supervisi Implementasi Statistik
h) Pemantauan Pelaksanaan DAK2 dan DP4
i) Penjilidan Register Akta Catatan Sipil
j) Penyediaan Operator Pengecekan dan Penata Arsip Register Akta Catatan Sipil

4) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

a) Bina kependudukan (Biduk) Orang Asing
b) Penanganan Advokasi Kasus Adminduk pada Lembaga Hukum dan Penyelesaian Kasus pelayanan Adminduk
c) Penerbitan NIK dan Perekaman KTP-el bagi Penghuni panti/Rumah Singgah

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a) Pemeliharaan dan Penataan Register Akta Pencatatan Sipil
b) Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor
c) Pemeliharaan Gedung
d) Pemeliharaan Gedung Arsip Meruya UPT. UPDAK
e) Pengadaan Barang Cetakan Formulir Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
f) Pengadaan Rak Penyimpanan Register Akta Catatan Sipil
g) Pengarsipan dan Perawatan Register Akta Catatan Sipil

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain:

1) Terlaksananya pemanfaatan 1 sub aplikasi SIAK yang digunakan untuk kegiatan perekaman register akta berbasis TI, dengan jumlah register akta beserta persyaratan sebanyak 450.746 buah.
2) Terlaksananya penerbitan Kartu Keluarga (KK) sebesar 97,55 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 96,26 persen.
3) Terlaksananya penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebesar 98,67 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 98,52 persen.
4) Terlaksananya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebesar 93,20 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 89,24 persen.
5) Terlaksananya penerbitan Kutipan Akta Kematian sebesar 82,98 persen. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 17,07 persen.
6) Terlaksananya pemanfaatan database penduduk bagi instansi vertikal maupun horizontal sebanyak 22 instansi, yaitu :
   a) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
   b) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
   c) Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman
   d) Sekretaris Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta
   e) Kanwil Agama Provinsi DKI Jakarta
   f) Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
   g) Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
   h) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
   i) Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
   j) Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
   k) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
   l) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
   m) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
   n) Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DK Jakarta

o) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
p) Badan Pemberdayaan Masyarakat Peremepuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
q) Walikota Jakarta Pusat
r) Walikota Jakarta Utara
s) Walikota Jakarta Barat
t) Walikota Jakarta Selatan
u) Walikota Jakarta Timur
v) Bupati Kepulauan Seribu

7) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan sebesar 91,00 persen pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar 84,00 persen pada tahun 2015.
8) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan sejumlah 91 persen dibandingkan realisasi tahun 2015 sebesar 84,00 persen.
9) Terlaksananya pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dan *stakeholders* di bidang administrasi kependudukan sejumlah 99,23 persen. Jumlah ini meningkat sedikit dari tahun 2015 sebesar 99,20 persen.
10) Terlaksananya pembinaan administrasi kependudukan bagi masyarakat rentan administrasi kependudukan (adminduk) di 19 lokasi binaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dengan hasil perekaman KTP-el sebanyak 2.479 buah.
11) Menurunnya persentase keterlambatan pengurusan KTP sebesar 1,7 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 8,92 persen.
12) Menurunnya persentase keterlambatan pengurusan Akta Kelahiran sebesar 0,03 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 19 persen.
13) Menurunnya persentase keterlambatan pengurusan Akta Kematian sebesar 12,17 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 20.91 persen.

14) Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor sarana teknologi informasi berupa toner, tinta printer, *film image*, *printer cleaning* dan lainnya sebanyak 28 jenis dan belanja sewa mesin fotokopi sebanyak 2 unit selama 12 bulan
15) Terlaksananya penyediaan barang cetakan khusus (*security printing* dan formulir) sebanyak 12 jenis dalam bentuk Blanko Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Pindah Orang Asing pemegang ITAS, Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Sementara Orang Asing (SKSKPS), Surat Keterangan Keterlambatan, dan Buku Register.
16) Terlaksananya pelayanan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) dengan didukung oleh pengadaan blanko KIA dengan spesifikasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 sebanyak 31.746 buah dan pengadaan printer, toner, dan fargo film.
17) Terlaksananya pengadaan pencetakan booklet, leaflet kependudukan dan pencatatan sipil sebanyak 1.000 buku dan untuk penjilidan *hard cover* administrasi tender sebanyak 8 buku.
18) Terlaksananya penyajian data dalam bentuk buku hasil registrasi pendaftaran penduduk sementara orang asing pemegang ITAS dan ITAP di Provinsi DKI Jakarta,
19) Terlaksananya pengadaan pakaian kerja lapang, belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/ lapangan dan belanja cetakan umum.
20) Terlaksananya penyusunan data statistik vital dan penyajian data hasil registrasi penduduk dan pencatatan sipil dalam bentuk buku Laporan Statistik Vital Triwulan dan Tahunan sebanyak 300 buku serta buku Laporan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil sebanyak 300 buku
21) Terlaksananya Penyusunan/ Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan sebanyak 160 buku dan Buku Tematik sebanyak 180 buku @ 60 buku per tema buku tematik.

22) Terlaksananya Penyusunan Buku Info Data Penduduk dan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan hasil tersedianya buku Layanan Infomasi Kependudukan sebanyak 200 buku dan buku Saku Data Kependudukan sebanyak 350 buku.

23) Terlaksananya Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan hasil pengadaan berupa suku cadang untuk komputer dan printer.

24) Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Hardware Penunjang SIAK dan Integrasi Sektoral, dengan hasil sebagai berikut : *Minicloud, Mobile Server* dan *Server*

25) Terlaksananya Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loket PTSP, dengan hasil berupa :
    - *Personnal computer* sebanyak 18 unit
    - *Printer* KTP-el sebanyak 201 unit
    - *Card reader* KTP-el sebanyak 202 unit
    - Pengadaan peralatan jaringan komputer

26) Terlaksananya Pengadaan Backup Perangkat Pencetakan KTP Elektronik dengan hasil sebagai berikut :
    - Pengadaan Komputer/ PC sebanyak 15 unit
    - Pengadaan *Printer* (Epson LQ 2190) sebanyak 22 unit
    - Pengadaan *Printer* KTP-el sebanyak 24 unit
    - Pengadaan *Scanner*
    - *Finger Printer Scanner* sebanyak 16 unit
    - *Irish Scanner* KTP-el sebanyak 15 unit
    - Pengadaan Kelengkapan Komputer
    - *Card Reader* KTP-el sebanyak 25 unit
    - *Signature Pad* sebanyak 15 unit
    - Pengadaan Kamera (Kamera Digital) sebanyak 16 unit

27) Terlaksananya Kegiatan Sewa Jaringan dan DRC (*Disaster Recovery Center*) *Co-location*

28) Terlaksananya Sewa Licensi Perangkat Lunak *Anti Virus*, Sistem Operasi dan Database Kependudukan

29) Terlaksananya Monitoring Teknis Operasional SIAK, KTP-el dan e-AKTA hasil dari kegiatan ini adalah :
   - Terlaksananya operasional layanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kelurahan, Kecamatan, dan Rumah Bersalin Puskesmas Kecamatan.
   - Kepuasan masyarakat dengan layanan kependudukan dan pencatatan sipil yang diterima.
30) Terlaksananya ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el), dengan hasil untuk menjamin keberlangsungan operasional pelayanan KTP-el agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dalam melayani warga masyarakat yang membutuhkan dokumen kependudukan berupa KTP-el termasuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lokasi perekaman.
31) Terlaksananya penyediaan Operator Teknis Penunjang Pelayanan
32) Terlaksananya pemeliharaan *Server Data Centre*
33) Terlaksananya pemeliharaan Komputer Tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas Rumah Bersalin dan RSUD.
34) Terlaksananya perekaman Register Akta Berbasis Teknologi Informasi sebanyak 450.746 register
35) Terlaksananya penjilidan Register Akta Pencatatan Sipil sebanyak 1.800 buku
36) Terlaksananya penyediaan Operator Pengecekan dan Penata Arsip Register Akta Catatan Sipil dengan total 5 operator.
37) Terlaksananya pengadaan Cetakan Umum sebanyak 188 rim dan 10 buah sarana pelayanan UPT. UPDAK, serta tersedianya belanja modal berupa : surat pernyataan penambahan marga, surat pembaharuan, kop surat, kartu penerbitan dokumen dan buku cetakan.
38) Terlaksananya pengadaan sebanyak 38 rak besi sarana penyimpanan arsip register akta catatan sipil
39) Terlaksananya penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Gedung Arsip Meruya UPT. UPDAK dengan hasil tersedianya jasa kebersihan kantor selama 12 bulan

40) Terlaksannya penyediaan Jasa Keamanan Kantor Gedung Arsip Meruya UPT. UPDAK dengan hasil tersedianya jasa keamanan kantor selama 12 bulan

41) Terlaksananya pemeliharaan Gedung Arsip Meruya UPT UPDAK dengan hasil terpeliharaanya gedung penyimpanan arsip serta belanja modal berupa penggantian *closet* dan pengecatan gedung

42) Terlaksananya pengadaan Sarana Kebutuhan Dapur selama 12 bulan dengan hasil tersedianya belanja modal kebutuhan pegawai, sarana kebutuhan rapat dan sarana kebutuhan rapat penerima tamu

43) Terlaksananya pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dengan hasil tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan

10. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.15.425.277.010,- dengan total penyerapan sebesar Rp.12.720.843.105,- atau 82.47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

a) Penyusunan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan

2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

a) TOT dan Pemberdayaan Lembaga Perempuan

3) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

a) Penguatan Modelling Kesejahteraan Perempuan

b) Pemetaan dan Penguatan Kota Layak Anak (KLA)

c) Pendampingan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan

4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

a) Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, antara lain:

1) Meningkatnya indikator persentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) sebesar 76,92% pada tahun 2016 dari sebesar 70,15% pada tahun 2015.
2) Dipertahankannya jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif sebanyak 67 lembaga.
3) Dipertahankannya indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%.
4) Meningkatnya Jumlah Kelurahan Layak Anak sebanyak 76 Kelurahan pada tahun 2016 dari sebanyak 73 Kelurahan pada tahun 2015.
5) Meningkatnya jumlah stakeholder yang telah mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengarus Utamaan Gender sebanyak 387 stakeholder pada tahun 2016 dari 310 stakeholder pada tahun 2015.

11. URUSAN KELUARGA BERENCANA (KB) DAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.21.019.456.523,- dengan total penyerapan sebesar Rp.18.704.188.696,- atau 88.99%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Keluarga Berencana

a) Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD, dan Rumah Sakit yang Telah Ditentukan.
b) Penguatan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Provinsi DKI Jakarta.
c) Peningkatan Mutu, Jaminan, dan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan.
d) Akselerasi Penggarapan KB di Wilayah Padat Penduduk Perkotaan.
e) Peningkatan Peran serta Mitra Kerja dalam Penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus

2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan

a) Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Remaja (GenRe)

3) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi

a) Penguatan Kemitraan Program Kependudukan dalam Kesatuan Gerak PKK.
b) Promosi dan Advokasi Program KB.
c) Peningkatan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi Tk.Provinsi DKI Jakarta.

4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Penguatan Pelestarian Kepesertaan KB Aktif melalui Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, antara lain :

1) Dipertahankannya *Total Fertility Rate* (TFR) sebesar 2,2.
2) Meningkatnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Baru sebanyak 518.547 PUS pada tahun 2016 dari sebanyak 423.874 PUS pada tahun 2015.
3) Tahun 2016 cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif, kegiatan dan anggaran diakomodir oleh APBN. Menurunnya cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif dari 1.108.841 peserta tahun 2014 menjadi 1.082.195 peserta tahun 2015. Belum ada data tahun 2016

4) Tahun 2016 cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB, kegiatan dan anggaran diakomodir oleh APBN. Meningkatnya cakupan Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB dari 11,64% pada tahun 2014 menjadi 12,06% pada tahun 2015. Belum ada data tahun 2016
5) Meningkatnya Persentase Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun sebesar 0,37% pada tahun 2016 dari 1,07% pada tahun 2015.
6) Meningkatnya rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) / Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB) sebanyak 1 orang per RW pada tahun 2016 dari sebanyak 2 (Dua) orang Petugas Penyuluh Keluarga Berencana per Kelurahan yang diakomodir oleh APBN.
7) Meningkatnya persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE sebesar 87 % pada tahun 2016 dari 80% pada tahun 2015.
8) Meningkatnya Persentase Masyarakat Yang Memahami Program KB dan Kependudukan sebesar 72% pada tahun 2016 dari 60% pada tahun 2015.
9) Meningkatnya cakupan anggota Bina Keluarga yang ber-KB sebesar 79,27% pada tahun 2016 dari sebesar 78,68% pada tahun 2015.

12. URUSAN SOSIAL

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan sosial, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp518.840.690.765,- dengan total penyerapan sebesar Rp458.387.707.942,- atau 88.35%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

a) Penjangkauan dan Rujukan PMKS Jalanan
b) Pengendalian PMKS Jalanan di titik rawan PMKS Jakarta

c) Penyediaan Makanan dan Minuman WBS di panti sosial
d) Pelayanan dan Rehabilitasi WBS di panti sosial
e) Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

a) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana panti sosial

3) Program Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

a) Peningkatan Peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial
b) Peningkatan Peran serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial

4) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Penyelenggaraan Dapur Umum dan Penyediaan *Buffer Stock* Bencana
b) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
c) Pengembangan Kampung Siaga Bencana
d) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan
e) Pelayanan Sosial Orang Terlantar

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial, antara lain :

1) Dipertahankannya Response Time penanggulangan bencana selama kurang dari 3 jam dari 62 Kejadian Bencana yang ditangani pada tahun 2016.
2) Meningkatnya persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial sebanyak 17,4 persen pada tahun 2016 dari sebanyak 15,4 persen pada tahun 2015 (dari populasi PMKS 38.732 orang)
3) Menurunnya titik rawan PMKS di DKI Jakarta melalui Pengendalian PMKS jalanan di titik rawan PMKS Jakarta sebanyak 0 titik rawan khusus ring-1/ zona-1 pada tahun 2016

dari 13 titik rawan pada tahun 2015 sesuai Instruksi Gubernur No. 53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Terkait Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

4) Meningkatnya jumlah gedung panti sosial yang layak sebanyak 22 panti sosial (45 lokasi) pada tahun 2016 dari sebanyak 22 panti sosial (40 lokasi) pada tahun 2015.
5) Terpilihnya lembaga kesejahteraan sosial berprestasi sebanyak 15 lembaga pada tahun 2016 .
6) Terpilihnya tenaga kesejahteraan sosial berprestasi sebanyak 10 orang pada tahun 2016
7) Dipertahankannya persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan sosial sebanyak 100 persen
8) Dipertahankannya jumlah Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan yang mengalami peningkatan kesejahteraan sosial sebanyak 199 orang

13. URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp314.550.059.090,- dengan total penyerapan sebesar Rp280.448.878.012,- atau 89.16%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

sudah dijelaskan pada program unggulan

2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja

a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

b) Pembinaan, Pengawasan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

c) Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan

d) Pelatihan Keterampilan Kerja & Pemagangan bagi Pencari Kerja

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a) Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja

b) Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium

4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja

a) Pengadaaan Peralatan Pelatihan PPKD

b) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK)

5) Program peningkatan sarana, prasarana ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

a) Pendaftaran dan Seleksi Akhir Calon Transmigran.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, antara lain :

1) Terlaksananya pelatihan Satuan Pengamanan dan pengemudi SIM A sebanyak 505 orang.
2) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Balai Latihan Kerja-Luar Negeri (BLK-LN) milik swasta sebanyak 25 lembaga berupa pembinaan tentang perijinan, kelembagaan, dan sertifikasi.
3) Meningkatnya Lembaga Pelatihan ter-Akreditasi dari Pembinaan Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja-Swasta (LPK-S) sebanyak 50 Lembaga pada tahun 2016 dari sebanyak 25 lembaga pada tahun 2015.
4) Meningkatnya peserta pelatihan kerajinan tangan di Kota Administrasi Jakarta Pusat sebanyak 60 orang pada tahun 2016 dari sebanyak 30 peserta pada tahun 2015
5) Meningkatnya peserta pelatihan kerajinan tangan sebanyak 60 orang pada tahun 2016 dan peserta pelatihan merangkai Mote dan Manik dengan teknik jahit dan batu yang dilaksanakan sebanyak

30 peserta di Kota Administrasi Jakarta Pusat.

6) Terlaksananya Pelatihan Teknik Negosiasi Hubungan Industrial bagi Pekerja/ Buruh, Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (SP/ SB), Pengusaha dan Organisasi Pengusaha sebanyak 200 peserta pada tahun 2016.
7) Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pramuwisma sebanyak 60 lembaga
8) Meningkatnya jumlah perusahaan yang dibina Management K3 sebanyak 310 perusahaan pada tahun 2016 dari sebanyak 100 perusahaan pada tahun 2015
9) Terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan dan Monitoring Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebanyak 100 perusahaan
10) Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja di 5 wilayah kota dengan membentuk Wira Usaha Baru (WUB) sebanyak 365 pencari kerja pada tahun 2016 dari sebanyak 305 pencari kerja pada tahun 2015
11) Meningkatnya peserta pelatihan keterampilan kerja bagi pencari kerja sebanyak 505 orang, terdiri dari: Calon Pengemudi SIM A dan Calon Petugas Satuan Pengamanan (Satpam) pada tahun 2016 dari sebanyak 95 orang pada tahun 2015
12) Terlaksananya Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja berkebutuhan khusus / Penyandang Disabilitas Bidang Batik sebanyak 100 orang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
13) Meningkatnya kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium sebanyak 122 jenis alat pada tahun 2016 dari sebanyak 51 jenis alat pada tahun 2015.
14) Terselesaikannya Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja pada tahun 2016.
15) Terlaksanannya Pengadaaan Peralatan Pelatihan PPKD dan Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) di PPKD Jakarta Selatan sebanyak 3 unit pada tahun 2016.
16) Terselesaikannya Pengadaan Peralatan Pelatihan Kejuruan Teknik

Sepeda Motor dan Pengadaan Peralatan Pelatihan Kejuruan Tata Boga di Pusat Pelatihan Kerja (PPKD) Jakarta Pusat.

14. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dialokasikan APBD sebesar Rp194.063.738.567,- dengan total penyerapan sebesar Rp159.128.622.610,- atau 82,00 %.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

a) Akta Pendirian Koperasi bagi Rusun sebanyak 18 Koperasi
b) Diklat Dasar-dasar Perkoperasian sebanyak 150 orang peserta
c) Bimtek Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebanyak 100 orang peserta
d) Diklat Kompetensi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi sebanyak 100 orang peserta
e) Pendampingan Koperasi dan UKM sebanyak 25 orang peserta

2) Program Pemberdayaan UMKM

a) Partisipasi pada acara HUT Jakarta sebanyak 4 UKM
b) Pengawasan UKM dan PKL sebanyak 2.100 PKL
c) Gelar produk UKM pada event Inacraft yang diikuti oleh 5 UKM
d) Partisipasi Pameran Produk Unggulan KUMK di Wilayah Jakarta Pusat yang diikuti oleh 2 UKM
e) Bimtek Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM yang diikuti oleh 150 orang
f) Bimtek Desain Kemasan dan Display Produk bagi UMKM yang diikuti oleh 50 orang

g) Diklat Peluang Bisnis di Pusat Perbelanjaan bagi UKM yang diikuti oleh 150 orang

h) Diklat Pemasaran bagi Koperasi dan UKM Berbasis IT yang diikuti oleh 204 orang

i) Diklat Manajemen Retail bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diikuti oleh 100 orang

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

Sudah dijelaskan dalam program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, antara lain :

1) Peningkatan jumlah koperasi aktif sebanyak 206 koperasi dari 6.016 koperasi pada tahun 2015 menjadi 6.622 koperasi pada tahun 2016
2) Peningkatan jumlah volume usaha koperasi sebesar Rp. 4,5 trilyun, dari Rp. 18,1 trilyun pada tahun 2015 menjadi Rp 22,6 trilyun pada tahun 2016
3) Peningkatan jumlah koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan koperasi PKL yang berfungsi sebanyak 3 koperasi, dari 161 koperasi pada tahun 2015 menjadi 164 koperasi pada tahun 2016
4) Peningkatan jumlah koperasi baru meningkat sebanyak 205 koperasi, dari 8.024 koperasi pada tahun 2015 menjadi 8.229 koperasi pada tahun 2016.
5) Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi 160 orang pengelola koperasi, serta bimbingan teknis bagi 450 orang pengelola UKM.

15. URUSAN PENANAMAN MODAL

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan penanaman modal, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp29.420.920.434,- dengan total penyerapan sebesar Rp25.662.931.889,- atau 87.23%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a) Penyelenggaraan *business meeting*

b) Partisipasi promosi investasi dalam dan luar negeri

c) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi System Database

2) Program Peningkatan Kinerja BUMD

a) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD

b) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD

c) Pengukuran penilaian kinerja KPI pengurus BUMD

d) Pengembangan sistem informasi BUMD

e) Rekrutmen Calon Pengurus BUMD

f) Penyelenggaraan Business Forum BUMD

3) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

4) Program Peningkatan Investasi

Sudah dijelaskan pada program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Penanaman Modal, antara lain :

1) Berdasarkan publikasi BKPM Republik Indonesia, jumlah proyek (PMDN/ PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 7.214 dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejumlah 4.779 dengan rincian 4.463 proyek PMDN dan 316 proyek PMA.

2) Realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal dari PMA dan PMDN berjumlah Rp. 58.092.455.000.000,-. Secara lebih rinci dapat disampaikan bahwa untuk nilai investasi yang berasal dari PMA berjumlah Rp.45.875.565.000.000,- sementara untuk nilai investasi yang berasal dari PMDN berjumlah

Rp.12.216.890.000.000,-.

3) Jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perijinannya dari 1.825 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 1.676 perusahaan pada tahun 2016.

4) Terlaksananya keikutsertaan dalam 8 event penyelenggaraan pameran promosi dalam negeri diantaranya sebagai berikut :
   - Batam *Craft, Tourism, and Investment* (CTI) 2016,
   - 12th *Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) Exhibition and Strategic Partnership Forum 2016*,
   - Pekan Inovasi Sumut ke-4 Tahun 2016,
   - Makasar *Investment, Agriculture, Tourism, Trade and Export Commodity Expo* 2016,
   - Nusantara Expo dan Forum & PPBI 2016 dan
   - *Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition* (IIICE) 2016.

5) Terlaksananya penyelenggaraan pembinaan bagi para pelaku usaha diantaranya sosialisasi penyusunan LKPM sebanyak 3 kali penyelenggaraan, sosialisasi kebijakan penanaman modal sebanyak 2 kali penyelenggaraan serta Peningkatan kerjasama kemitraan UMKM dengan perusahaan PMA/ PMDN skala besar sebanyak 2 kali.

6) Jumlah setoran PAD yang berasal dari BUMD adalah sebesar Rp.302.539.413.542,-. Pada tahun 2016 beberapa BUMD mendapatkan penugasan dari Pemerintah DKI Jakarta diantaranya dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana Asian Games dan stabilisasi harga pangan melalui Operasi Pasar sehingga kemampuan BUMD dalam meningkatkan keuntungan menjadi terbatas.

7) Terlaksananya dua kegiatan business forum BUMD dengan mengangkat tema “Sinergi BUMD dalam Pemanfaatan Lahan dan Optimalisasi Investasi” dan “Sinergi BUMD dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN”. Peserta dalam forum tersebut terdiri dari unsur Komisaris, Badan Pengawas dan

Direksi BUMD serta SKPD yang terkait. Kegiatan ini diisi oleh paparan narasumber Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Dr. Suparjo Sujadi, SH, MH dan Haryadin Mahardika, PhD.

8) Terlaksananya pembuatan rancangan sistem informasi BUMD yang bertujuan menyajikan data kinerja BUMD secara *real time* dan akurat. Selain itu pada tahun 2016 telah tersusun *Key Performance Index* (KPI) untuk seluruh BUMD sebagai Perusahaan, Komisaris dan Dewan Pengawas serta para Direksi.

9) Terlaksananya proses seleksi calon Komisaris, Badan Pengawas dan Direksi BUMD untuk memenuhi kebutuhan posisi pengurus BUMD yang terdiri dari Komisaris, Dewan Pengawas dan Direksi. Total calon yang dilakukan *assessment* sejumlah 36 orang dengan hasil **12 orang** dinyatakan lulus seleksi dan diangkat menjadi pengurus sementara 10 orang dinyatakan lulus namun masuk ke dalam bank data sementara 14 orang dinyatakan tidak lulus.

16. URUSAN KEBUDAYAAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan kebudayaan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp476.137.445.181,- dengan total penyerapan sebesar Rp377.669.360.828,- atau 79.32%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

a) Jumlah Penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan sebanyak 13 terdiri dari : Audisi Gita Bahana Nusantara, Lomba Karya Cipta Betawi, Apresiasi dan Kompetisi Seni Budaya bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta (berjenjeng), Lomba Seni Nuansa Islami, Duta Seni Pelajar ke XVII, Pengenalan Sadar Wisata bagi Pelajar, Pembinaan Seni bagi Perempuan, Pembinaan Seni anak dan Remaja

(KLA), Apresiasi dan kompetisi Seni bagi Pelajar dan TK,SD,SMP,SMA, Festival Teater Jakarta Timur, Konservasi patung/Monumen, Konservasi Koleksi Museum, Studi Konservasi Cagar Budaya.

2) **Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan**

Sudah dijelaskan pada program unggulan

3) **Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan**

a) Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan sebanyak 1.890 pelaku seni dengan jumlah 6 pelatihan di Balai Latihan Kesenian (BLK) pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta

Jenis Pelatihan terdiri dari : Pelatihan Kesenian bagi Guru TK, Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Pelatihan Seni Musik, Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Tari dan Pelatihan Seni Taeter.

4) **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan**

Sudah dijelaskan pada program unggulan

5) **Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan**

Sudah dijelaskan pada program unggulan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kebudayaan, antara lain :

1) Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan Kepulauan Seribu menjadi 21 pusat kebudayaan.
2) Meningkatnya jumlah pelaku seni budaya yang mendapat pelatihan di Balai Latihan Kesenian 5 wilayah tahun 2016 sebanyak 1.890 pelaku seni dan 6 jenis pelatihan dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 1.210 pelaku seni yang terlatih.
3) Meningkatnya jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan pada tahun 2016 sebanyak 12 bangunan dibandingkan pada tahun 2015 sebanyak 4 bangunan.
4) Penyelenggaraan / keikutsertaan event promosi kebudayaan

tingkat nasional di Jakarta sebanyak 20 event.

17. URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan pemuda dan olahraga, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp675.766.900.443,- dengan total penyerapan sebesar Rp407.656.134.804,- atau 60.32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

a) Pelatihan Kewirausahaan dan Seleksi Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Kepemimpinan dan Bela Negara, serta Mitra KAMTIBMAS DKI Jakarta

b) Latihan Gabungan, Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta.

c) Training Center (TC), Pengukuhan PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta

d) Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Kreasi PBB Provinsi DKI Jakarta

e) Orientasi dan Pembinaan Kepaskibrakaan Provinsi DKI Jakarta

f) Lomba Institusi PMR Teladan.

g) Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor, peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional

h) Jakarta Youth Festival

i) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta

j) Panca Lomba PMR dan Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta

k) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen Pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2016

l) Perkemahan Pramuka Ramadhan dan Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran

m) Perkemahan Besar Pramuka Penggalang dan Permainan Besar Pramuka Siaga

n) Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta

o) Perkemahan Pramuka Luar Biasa

p) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)

q) Seleksi Kontingen Pramuka Provinsi DKI Jakarta untuk Jambore Nasional Tahun 2016

r) Lomba Gudep Tergiat

2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi

a) Invitas olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

b) Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

c) Liga Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.

d) Pengiriman Kontingen Mahasiswa DKI Jakarta menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa

e) Turnamen Bowling, Squash dan Tenis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2016

f) Pekan Olahraga dan Liga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

g) Pelatihan Pembina Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

h) Pembinaan Olahraga Prestasi melalui Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

i) Permakanan Atlet PPLP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

j) Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

k) Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

l) Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II/2016 di Provinsi DKI Jakarta

m) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/K Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

n) Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

o) Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepaktakraw dan Tenis Meja Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

p) Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

q) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

r) Pelaksanaan dan Penyelenggaraan POPWIL II/2016 di Provinsi DKI Jakarta

s) Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga Aquatic (Renang Indah dan Loncat Indah) Tahun 2016

t) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju Asia Junior Sports Exchange Games Tahun 2016

u) Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta menuju Beijing Cup Football Tournament Tahun 2016

v) Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri (Gulat, Judo, Karate, Kempo, Pencak Silat dan Taekwondo) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

w) Invitasi Cabang Olahraga Senam Tahun 2016

x) Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun dan 15 Tahun Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016

y) Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun menuju Tokyo International Youth Football Tahun 2016

z) Pemantauan kontingen PON tahun 2016

aa) Penghargaan bagi Atlet Berprestasi

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

a) Rehabilitasi Lapangan Tenis Kel. Pondok Kelapa Kec. Duren Sawit

b) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan.

c) Pengadaan Perlengkapan kontingen POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016

d) Pengadaan peralatan olahraga dan perlengkapan pertandingan dalam rangka POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016.

e) Pengadaan Peralatan Olahraga PON XIX/ 2016 di Jawa Barat

4) Program Pengembangan Olahraga

a) POR Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta

b) Seleksi dan Pengiriman Kontingen PEPARNAS DKI Jakarta Tahun 2016

c) Pelatihan olahraga disabilitas Provinsi DKI Jakarta

d) Penghargaan Bagi Atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta

e) Persiapan dan pelaksanaan TAFISA GAMES 2016

f) Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta

g) POR Organisasi Wanita DKI Jakarta

h) Festival Pencak Silat Betawi

i) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta

j) Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang Provinsi DKI Jakarta

k) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta

l) Kejuaraan Cabang Olah Raga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta

m) Pekan Paralympik Provinsi DKI Jakarta 2016

n) Kejuaraan Renang Berkebutuhan Khusus Provinsi DKI Jakarta.

o) Penghargaan bagi atlet dan official berprestasi berkebutuhan khusus tahun 2016

p) Seleksi Dan Pengiriman POSPENAS 2016

q) Pemantauan kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS) dan POSPENAS asal DKI Jakarta tahun 2016

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemuda dan olahraga, antara lain:

1) Pengiriman 4 orang Paskibraka Provinsi DKI Jakarta untuk mengikuti seleksi calon Paskibraka Nasional, dan selanjutnya terpilih 2 orang Paskibraka untuk ditugaskan ke tingkat Nasional sebagai Tim Paskibraka pengibaran bendera hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2016 atas nama Nilam Sukma Pawening (bertugas sebagai pembawa baki bendera merah putih di pagi hari) dan Amarik Fakhri Marliansyah (bertugas sebagai pengibar bendera merah putih di sore hari).
2) Keikutsertaan Paduan Suara binaan Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta *Youth Choir* pada Kejuaraan Paduan Suara Lanna di Bangkok Thailand dengan meraih medali emas .
3) Rehabilitasi lapangan tenis Kelurahan Pondok Kelapa Duren Sawit.
4) Pengadaan perlengkapan kotingen POPWIL (sebanyak 6 item barang), POSPENAS (sebanyak 6 item barang), dan PEPARNAS (sebanyak 6 item barang).
5) Pengadaan peralatan olahraga dan perlengkapan pertandingan dalam rangka POPWIL (sebanyak 43 item barang), POSPENAS (sebanyak 49 item barang), dan PEPARNAS (sebanyak 34 item barang).
6) Pengadaan peralatan olahraga permainan sebanyak 15 item barang peralatan olahraga untuk masyarakat provinsi DKI Jakarta didasarkan pada usulan dari masyarakat yang disampaikan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
7) Pengadaan peralatan olahraga PON XIX 2016 di Jawa Barat,

berupa :

a) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 130 item untuk 4 Cabang Olahraga (Baseball, Softball, Hockey dan Criket).
b) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 98 item untuk 5 Cabang Olahraga (Panahan, Bowling, Biliard, Golf, dan Bridge).
c) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 45 item untuk 4 Cabang Olahraga (Senam Artistik, Senam Ritmik, Aerobic, dan Atletik).
d) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 186 item untuk 10 Cabang Olahraga (Karate, Kempo, Tarung Derajat, Tinju, Wushu, Taekwondo, Judo, Anggar, Pencak Silat, dan Gulat).
e) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 48 item untuk 4 Cabang Olahraga (Aeromodeling, Paralayang, Gantole dan Panjat Tebing).
f) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 100 item untuk 6 Cabang Olahraga (Loncat Indah, Renang Indah, Selancar Angin, Polo Air, Selam dan Renang).
g) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 104 item untuk 11 Cabang Olahraga (Bulutangkis, Catur, Basket, Tenismeja, Squash, Tenis, Sepak Takraw, Futsal, Sepakbola, Voli Indoor, Voli Pasir).
h) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 27 item untuk 3 Cabang Olahraga (Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga).
i) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 15 item untuk 1 Cabang Olahraga (Sepatu Roda).
j) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 24 item untuk 1 Cabang Olahraga (Sport Dance).
k) Pengadaan Peralatan Olahraga sebanyak 42 item untuk 1 Cabang Olahraga (Terjun Payung).

8) Persiapan dan pelaksanaan the 6th World Sport For All Games (TAFISA Games 2016) di Jakarta yang diikuti oleh 108 negara. Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

menyelenggarakan 3 event pada the 6th World Sport For All Games (TAFISA Games 2016) yaitu :

a) *Student Special Day* yaitu suatu kegiatan yang khusus diikuti oleh anak-anak usia sekolah (pelajar) untuk mengikuti lomba Olahraga Tradisional (Balap Karung, Bola Gulir, Bola Keranjang, Rayap Guling, Lempar Bola, Roda Raksasa dan lain-lain), dengan jumlah peserta 1.700 orang pelajar dari beberapa sekolah yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

b) *Water and Beach Sport* Festival yaitu suatu kegiatan yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berolahraga di pantai, diikuti olah lebih dari 1.000 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, komunitas olahraga, pelajar dan mahasiswa baik dari Jakarta maupun luar Jakarta.

c) *World Walking Day* 2016 yaitu kegiatan yang menggalakan jalan kaki sebagai gerakan dunia sebagai suatu cara untuk melawan penyakit-penyakit yang disebabkan kurangnya melakukan aktifitas fisik, diikuti oleh lebih dari 10.000 orang yang terdiri dari unsur masyarakat, komunitas olahraga, pelajar dan mahasiswa dari Jakarta luar Jakarta dan mancanegara.

9) Pengiriman kontingen PEPARNAS DKI Jakarta pada PEPARNAS XV 2016 di Jawa Barat, memperoleh peringkat ke 11 dengan 15 emas, 5 perak, 15 perunggu.

10) Pengiriman kontingen POSPENAS DKI Jakarta pada POSPENAS VII 2016 di Banten, memperoleh peringkat ke 7 dengan 4 emas, 1 perak.

11) Prestasi olahraga yang diraih DKI Jakarta pada *single event* dan *multi event* antara lain :

a) Keikutsertaan pada Kejuaraan Bulutangkis (Disabilitas) Junior Sport Exchange di Tokyo Jepang dengan perolehan medali 1 medali emas, 1 medali perak.

b) Keikutsertaan pada Kejuaraan Nasional Judo antar PPLP/ PPLPD di Padang, Sumatera Barat dengan perolehan medali

9 medali emas, 1 medali perak, 3 medali perunggu.

c) Keikutsertaan pada Kejuaraan Nasional Atletik Remaja dan Junior dengan perolehan medali 4 medali emas, 5 medali perak, 3 medali perunggu.

d) Keikutsertaan pada Kejuaraan Nasional UGM Swimming Championship di Jogjakarta dengan perolehan medali 15 medali emas, 4 medali perak, 3 medali perunggu.

e) Keikutsertaan pada Kejuaraan Dayung antar PPLP/PPLPD di Riau dengan perolehan medali 3 medali emas, 3 medali perak.

f) Keikutsertaan pada Kejuaraan Nasional Panahan antar PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2 medali emas, 3 medali perak, 3 medali perunggu.

g) Keikutsertaan pada Kejuaraan Nasional Atletik antar PPLP/PPLPD dengan perolehan medali 2 medali emas, 3 medali perak, 7 medali perunggu

h) Keikutsertaan pada Kejuaraan Senam 13th Singapore Rhythmic Gymnastic Open Championship di Singapura dengan perolehan medali 1 medali perunggu.

i) Peringkat 3 pada PON XIX di Jawa Barat dengan perolehan 132 medali emas, 125 medali perak, 120 medali perunggu.

j) Keikutsertaan pada kegiatan multi cabang olahraga Pekan Olahraga Wilayah II dengan perolehan medali 15 medali emas, 13 medali perak, 4 medali perunggu.

k) Keikutsertaan pada Kejuaraan Bulutangkis Junior Sport Exchange di Tokyo Jepang dengan hasil peringkat 5 dari 19 negara.

l) Keikutsertaan pada Kejuaraan Atletik Asia Junior di Ho Chi Min, Vietnam dengan hasil peringkat 5 dari 45 negara.

m) Keikutsertaan pada Kejuaraan Atletik Sea Youth di Thamasat, Thailand dengan hasil peringkat 5 dari 11 negara.

12) Terlaksananya Milo Jakarta International 10K-2016 atas kerjasama antara Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Milo (PT

Nestle), dengan total peserta kurang lebih 15.000 peserta terdiri dari unsur masyarakat, TNI, Polri, Pelajar, Mahasiswa dari dalam dan luar negeri.

18. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp85.477.055.058,- dengan total penyerapan sebesar Rp71.803.110.760,- atau 84,00%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Dialog Interaktif Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas Etnis dan Ormas Keagamaan
b. Sarasehan Revitalisasi Nilai Nilai Pancasila di DKI Jakarta
c. Peningkatan Pemahaman 4 Konsensus Dasar Kebangsaan
d. Sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kepulauan Seribu
e. Sarasehan Membangun Semangat Cinta Tanah Air dan Bela Negara Sebagai Wujud Tegaknya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
f. Roadshow Peningkatan Kerukunan Umat Beragama
g. Sarasehan Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Tim Penggerak PKK
h. Sarasehan Peningkatan Peran Pemuda Dalam Bela Negara di Kepulauan Seribu
i. Dialog Interaktif Generasi Muda, Pelajar dan Mahasiswa Dalam Sukses 5 Tertib Jakarta
j. Peningkatan Kerukunan Menjelang Hari-Hari Besar Keagamaan

k. Forum Silaturahmi Pemerintah Daerah, Pemuka Agama dan Penghayat Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa
l. Membangun Toleransi Pendirian Rumah Ibadah
m. Forum Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya
n. Sarasehan Pemantapan Nilai-Nilai Budaya Lokal Terhadap Dominasi dan Pengaruh Budaya Asing
o. Monitoring Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta
p. Forum Dialog Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Jakarta
q. Peningkatan Kesadaran Bela Negara di provinsi DKI Jakarta

2) Program Pendidikan Politik Masyarakat

a) Implementasi Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat.
b) Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Politik bagi Masyarakat.
c) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik.
d) Monitoring Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
e) Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia.

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

a) Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif.
b) Dialog Interaktif Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat di DKI Jakarta.
c) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepulauan Seribu.
d) Pemantauan Situasi Wilayah Kepulauan Seribu.
e) Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta.
f) Pendataan Organisasi Masyarakat Asing yang Beraktivitas di DKI Jakarta.

g) Forum Dialog tentang Antisipasi Dampak Keberadaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Ormas Asing.

h) Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran Pelajar.

i) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

j) Sarasehan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan Gerakan Radikalisme di DKI Jakarta.

k) Sarasehan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda/ Karang Taruna.

l) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

m) Pemantauan IPOLEKSOSBUD.

n) Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini.

4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

a) Forum Silaturahmi Pimpinan Daerah Dengan Pengurus Organisasi Kemasyarakatan.

b) Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan.

c) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Rangka Kesetaraan Gender.

d) Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, antara lain:

1) Terlaksananya cakupan ormas etnis dan keagamaan serta sekolah yang memperoleh pengembangan wawasan kebangsaan sebanyak 50 Sekolah, 37 ormas etnis, dan 10 ormas keagamaan.

2) Meningkatnya Indeks Demokrasi di Provinsi DKI Jakarta sebesar 85,32 poin pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar 84,70 poin pada tahun 2015.

3) Menurunnya potensi konflik di kalangan masyarakat menjadir 10 konflik pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 13 konflik pada tahun 2015.

4) Jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang terdaftar dan

mandiri yaitu 5 dari 370 Ormas, dan 25 dari 638 LSM yang terdaftar.

5) Meningkatnya cakupan pemilih pemula yang memperoleh informasi penyelenggaraan Pemilu sebanyak 4400 orang pada tahun 2016 dari sebelumnya sebanyak 3700 orang pada tahun 2015.

6) Terfasilitasinya partai politik yang mendapatkan kuota kursi di legislatif sebanyak 9 partai.

19. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp15.811.022.606.012,- dengan total penyerapan sebesar Rp14.031.845.166.334,- atau 88.75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

a) Penyerasian, Penyelarasan dan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah sebanyak 10 Produk Hukum Daerah.

b) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur.

c) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan.

d) Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Pengendalian Penduduk dan Permukiman.

e) Penyusunan Ranpergub tentang Kawasan Bebas Sampah.

f) Penyusunan Ranpergub tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Kemitraan Usaha bagi Penyandang Disabilitas.

g) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar (secara elektronik).

h) Penyusunan Ranpergub tentang Penyediaan Fasilitas Park and Ride.

i) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Informasi Transportasi.

j) Penyusunan Pergub tentang Penetapan Skala Bencana.

2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

a) Strategi Penyediaan Buffer Stock Pangan di DKI Jakarta

b) Pemantauan Harga Pangan Strategis

c) Peningkatan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta

d) Identifikasi dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Transportasi

e) Evaluasi Perjanjian Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga

f) Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran Kegiatan Bidang Ekonomi

g) Pengendalian Inflasi Daerah

h) Monitoring Pembinaan Ketenagakerjaan di Jakarta

i) Evaluasi Penyelenggaraan Event Pariwisata di DKI Jakarta

j) Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah

k) Identifikasi Pelaksanaan Perijinan/ Non Perijinan Bidang Perekonomian pada PTSP di DKI Jakarta

l) Identifikasi Kemitraan Sektor Perpasaran dan Perdagangan

m) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertanian Perkotaan

3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah

a) Kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007

4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

a) Pengurusan perkara di Pengadilan

b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI

c) Penginformasian Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD)

d) Pertemuan Berkala dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta
e) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum
f) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum
g) Pembinaan Kelompok Kadarkum Bagi Organisasi Wanita dan Karung Taruna
h) Pengelolaan dan Updating Website Biro Hukum
i) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan
j) Rencana Aksi Nasional HAM
k) Pembuatan Leaflet, Banner dan Brosur Perundang-undangan

5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial

a) Pemantauan Pengendalian Penyakit Menular
b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok
c) Pembinaan Pelaksanaan Kabupaten/ Kota Sehat
d) Penguatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Lingkungan
e) Perumusan Kebijakan Surveillance Penyakit di Provinsi DKI Jakarta
f) Penyusunan Kebijakan di Bidang Sosial
g) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan
h) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI di Lapas Rutan dan Panti
i) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Rujukan di Provinsi DKI Jakarta
j) Pemantauan dan Pembinaan Program UKS Tingkat Provinsi
k) Apresiasi Kinerja Program UKS
l) Penyusunan Kebijakan Pangan Jajanan Anak Sekolah
m) Evaluasi Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

n) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I)

o) Survey dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

p) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat

q) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Program Raskin di Provinsi DKI Jakarta

r) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

s) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak

t) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kepesertaan ber-KB

u) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga

v) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program UKS Tingkat Nasional

w) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan

x) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak

y) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan

6) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri

a) Peningkatan Partisipasi Jakarta Pada Event dan Organisasi Internasional

b) Penyediaan Iuran Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta Pada Organisasi Internasional

c) Peningkatan Pelayanan Korps Diplomatik

d) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City

e) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bantuan Keuangan dan Hibah;

f) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Provinsi/ Kabupaten;

g) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten;

h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perkotaan;

i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Badan;

j) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Lembaga/ Badan;

k) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Perkotaan;

l) Penyediaan Iuran Keanggotaan Mitra Praja Utama (MPU);

m) Penyediaan Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

7) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual

a) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Kerukunan Antar Umat Beragama di Kalangan Pemuda

b) Penyusunan Bahan dan Evaluasi tentang Kepemudaan dan Pramuka

c) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Olahraga Masyarakat

d) Penyusunan Bahan Modul Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda

e) Penyediaan/ Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah (Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah)

f) Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah

g) Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Penunjang Petugas Haji Daerah TKHD dan TPHD

h) Penyewaan Pondokan/ Posko Petugas Haji Daerah di Tanah Suci

i) Pemantauan Keberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi) Petugas Haji Daerah

j) Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

k) Peningkatan Pemahaman Keagamaan Lembaga Mental Spiritual
l) Penyediaan Jasa Administrasi (Kontrak Individu)
m) Peningkatan Administrasi Perkantoran
n) Peninjauan Lapangan Pengusul Bantuan Hibah/ Sosial Kepada Lembaga Pemerintah, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya
o) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
p) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar
q) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan TK Negeri
r) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal
s) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Perpustakaan Khusus
t) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda
u) Penyusunan Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Sekolah
v) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan KJP dan BOP
w) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Ujian Nasional (UN)
x) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
y) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kearsipan
z) Pemantauan dan Evaluasi Minat Baca Masyarakat
aa) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpustakaan Masyarakat

8) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota

a) Peningkatan Strategi Pencapaian Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sesuai RPJMD
b) Pendalaman dan Analisa Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara
c) Peningkatan Strategi Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sanitasi Permukiman di Provinsi DKI Jakarta
d) Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di Provinsi DKI Jakarta
e) Peningkatan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Bangunan di Provinsi DKI Jakarta
f) Pengendalian Implementasi Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta
g) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD di bawah Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
h) Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum Para Pemegang SIPPT di Provinsi DKI Jakarta
i) Pengendalian Penyelesaian Sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Lahan (SP3L) di Provinsi DKI Jakarta
j) Pengendalian Pengembangan Sistem Prasarana Jalan
k) Sinkronisasi Sistem dan Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara
l) Pengendalian Sistem Prasarana Sumber Daya Air
m) Peningkatan Percepatan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi DKI Jakarta
n) Sinkronisasi Data dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Permukiman dan Pembangunan Fisik Rumah Susun Murah/ Sederhana
o) Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)

p) Monitoring dan Proses Administrasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

9) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah

a) Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah

b) Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Deputi dan Para Asisten Deputi Gubernur

c) Penyediaan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan

d) Pemeliharaan Lift (Mitsubishi) Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota

e) Pengadaan Spareparts/ Komponen Barang Pakai Habis, Pemeliharaan/ Perawatan Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas

f) Piket Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan Kompleks Balaikota

g) Pemeliharaan Berkala Pekerjaan Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas

h) Pengadaan Peralatan dan Bahan Layanan Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan

i) Pengadaan Peralatan dan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks Balaikota

j) Penyediaan Layanan Tenaga Operator/ Teknisi Pemeliharaan/ Perawatan Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas

k) Pemeliharaan/ Perawatan AC Central Chiller York Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota

10) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur

a) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan

b) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan Pemerintah Daerah Lingkup Staf dan Wilayah Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan

c) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan Pemerintah Daerah Lingkup Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan

d) Penyusunan Standarisasi Peralatan Kerja Teknis

e) Penataan Ruang Kerja UPT di Provinsi DKI Jakarta

11) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah

a) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b) Pencanangan dan Malam Resepsi HUT Kota Jakarta

c) Penatausahaan Acara Pimpinan Daerah

d) Pelaksanaan Acara Pimpinan Daerah

e) Pelaksanaan Upacara Bendera Tingkat Provinsi DKI Jakarta

f) Pengelolaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah

g) Penyusunan Naskah Sambutan, Makalah dan Kertas Kerja

h) Penyediaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kebutuhan Pimpinan Daerah

i) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah

j) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2015

12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

a) Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta

b) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinis DKI Jakarta

c) Pelaksanaan Reses DPRD

d) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainya

e) Penyelenggaraan Dukungan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/ Tim Ahli

f) DPRD Provinsi DKI Jakarta

g) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan

13) Program Koordinasi Perekonomian Kota/ Kabupaten

a) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2016

b) Koordinasi dan Monitoring Minimarket

c) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koperasi, Perdagangan dan Energi

d) Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Penetapan Lokasi

e) Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan HBKB Jakarta Timur

f) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bidang Pariwisata dan Ketenagakerjaan

g) Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Budaya Betawi

h) Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Sembilan Bahan Pokok

i) Peningkatan Produktivitas Dekranasda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

j) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat pada Kegiatan JKPI Tahun 2016

14) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten

a) Penyelenggaraan Dewan Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kep. Seribu

b) Partisipasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dalam APEKSI.

c) Pembangunan Kantor Lurah Pulau Kelapa.

d) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW.

e) Peningkatan Wawasan Bagi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Tokoh Masyarakat.

f) Tatap Muka Bupati Beserta Pimpinan SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK dan Lembaga Masyarakat Lainnya.

g) Partisipasi Pelaksanaan Rakernas APKASI 2016.

h) Inventarisasi dan Pendataan Pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan Pembakuan Nama Rupa Bumi (Toponimi).

i) Pemantauan, Pengendalian dan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kepulauan Seribu.

15) Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/ Kabupaten

a) Penanganan Perkara/ Gugatan Perdata dan TUN di Lembaga Peradilan

b) Penanganan Relaas

c) Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum

d) Kota Peduli HAM

e) Pembinaan Tim Lomba Kadarkum

f) Temu Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

16) Program Koordinasi Kesehjateraan Sosial Kota/Kabupaten

a) Monitoring dan Evaluasi Raskin

b) Monitoring dan Evaluasi Kota Sehat

c) Monitoring dan Evaluasi RPTRA

d) Pembinaan Pemberdayaan Perempuan

e) Silaturahmi Ramadhan Bupati Dengan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara

f) Pembinaan Penyelenggaraan Kelembagaan BKB PAUD

g) Pengembangan Wawasan Karang Taruna Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

17) Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten

a) Tasyakuran Atas Berdirinya Kota Jakarta dan Kemerdekaan RI Kota Adm. Jakarta Barat

b) Peningkatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tk. Kota Adm. Jakarta Barat

c) Pelaksanaan Safari Ramadhon dan Safari Natal

d) Peningkatan koordinasi dan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Tokoh Masyarakat Tingkat Kota

e) Sarasehan Dewan Pendidikan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri Se Kota Administrasi Jakarta Selatan

f) Buka Puasa dan Safari Ramadhan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Barat

g) Sarasehan Ulama, Ustadzah dan Umaro

h) Sarasehan Pembentukan Karakter Generasi Muda di Kota Administrasi Jakarta Timur

i) Penilaian Binaul Masjid

j) Pelaksanaan Safari Jumat Walikota Jakarta Utara

18) Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten

a) Rehab Tribun Markas Komando (MAKO) Kopassus

19) Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/ Kabupaten

a) Inventarisasi Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan, Pedestrian/ Trotoar dan Pemeliharaan Drainase, Waduk/ Situ, Inrit Penutup Saluran di Kota Administrasi Jakarta Timur

b) Inventarisasi Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus), Penataan Kampung Deret, Pemanfaatan Rumah Susun dan Penertiban Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Administrasi Jakarta Timur

c) Inventarisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Permasalahan Prasarana dan Sarana di Kota Administrasi Jakarta Timur

d) Rapat Koordinasi Permasalahan Pembangunan di Bidang Pertanahan/ Pengadaan Tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur

e) Rapat Koordinasi Keindahan Kota dan Kebersihan Kota di Kota Administrasi Jakarta Timur

20) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/ Kabupaten

a) Peringatan Upacara hari hari Besar
b) Sarana Penunjang Petugas Protokol
c) Penyediaan Cetakan Umum
d) Penyediaan Cetakan Khusus
e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
f) Pemeliharaan Sistem Informasi Penatausahaan pada Pusminko Administrasi Jakarta Pusat
g) Penyelenggaraan Keprotokolan
h) Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat
i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Timur

21) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan

a) Rehab Total Kantor Lurah Maphar
b) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
c) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Bukit Duri
d) Rehab Berat Kantor Lurah Kebon Melati Jakarta Pusat
e) Rehab Berat Kantor Lurah Kartini Jakarta Pusat
f) Rehab Total Kantor Lurah Pondok Kopi
g) Rehab Sedang Kantor Lurah Lubang Buaya
h) Rehab Sedang Kantor Lurah Cilangkap
i) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan
j) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara
k) Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara

l) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara

22) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI

a) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta

b) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta

c) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan

d) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta

e) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Al-Quran (STQ) bagi Apartur Provinsi DKI Jakarta

f) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur Korpri DKI Jakarta

g) Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta

h) Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Aparatur

i) Pembinaan Olah Raga bagi Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta

j) Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga dan Kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta

k) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta

l) Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta

m) Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta

n) Pengembangan Wawasan Keagamaan bagi Aparatur Provinsi DKI Jakarta

o) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta

23) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

a) Peningkatan Sikap dan Tindakan Anti Korupsi (termasuk sosialisasi gratifikasi)

b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

c) Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan

d) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016

e) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2015

f) Pembinaan SKPD/ UKPD serta Pengawasan Kinerja, Tugas Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

24) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Gubernur Berkaitan Dengan Pengelolaan Barang Daerah

b) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan/ Regulasi/ Instruksi Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah

25) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah

a) Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik/ Dikuasai Pemrov DKI

b) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

c) Penyelesaian Tanah Bermasalah

d) Penyusunan Harga Satuan Barang Kebutuhan SKPD/ UKPD Untuk Komponen E-Budgeting

e) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang SKPD/ UKPD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD/ UKPD

f) Pelaksanaan Pelelangan Titik Reklame Pada Sarana Dan Prasarana Kota Milik Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2016

g) Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah

26) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a) Penyusunan Draft APBD Penetapan Tahun 2017

b) Finalisasi Penyusunan APBD Penetapan Tahun 2017

c) Finalisasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016

d) Penyusunan Draft APBD Perubahan Tahun 2016

e) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 UNAUDITED

f) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 AUDITED

g) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016

h) Quality Assurance Integrasi Sistem dalam rangka Penerapan Akrual Basis

i) Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

j) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual

k) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

l) Reviu dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/ UKPD Berbasis Akrual

m) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf

n) Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan

27) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah

a) Peningkatan Pemahaman Pajak Daerah Melalui Berbagai Event dan Media.

b) Penyusunan Analisa dan Evaluasi Peraturan Perpajakan Daerah.

28) Program Pelayanan Pajak Daerah

a) Perbaikan 4 (empat) Gedung Samsat dan perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis.

b) Sewa gedung kantor untuk UPPD Ciracas.

c) Pengadaan Sarana Pemungutan Pajak Daerah antara lain: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB BBN-KB, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PKB BBN-KB, cetak PKB BBN-KB, Fiskal Antar Daerah dan kantong fiskal, DHKP, DPP-02, DPP-03, DPP-22, SPPT PBB Double, Cover Buku Induk (DHKP) dan Peneng Reklame.

d) Penertiban dan Pembongkaran Reklame di 42 UPPD Kecamatan.

e) Pelaksanaan Pelayanan Pajak di 3 (tiga) Gerai Samsat (Thamrin City, Mal Artha Gading dan Taman Palem), dan penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/ piutang di 5 wilayah samsat.

f) Pekan Panutan di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

g) Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 secara simbolis tingkat kota administrasi (5 wilayah kota adminstrasi).

h) Pendataan dan penertiban Pajak Reklame di 5 (lima) wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak.

29) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

a) Penyusunan Bezzeting dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b) Pengadaan CPNS Dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

c) Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD;

d) Seleksi Calon Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN);

e) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;

f) Digitalisasi Dokumen Data Pegawai Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016.

30) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

a) Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

b) Pemberian Penghargaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

c) Donor Darah dan Monitoring SKJ;

d) Pelayanan Pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

e) Kajian Kebijakan Kesejahteraan Pegawai.

31) Program Pendidikan dan Pelatihan

a) Diklat Manajemen Sekolah sebanyak 5 Angkatan

b) Diklat Manajemen BLUD sebanyak 6 Angkatan

c) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum sebanyak 3 Angkatan

d) Workshop Revolusi Mental sebanyak 5 Angkatan

e) Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana Diklat Pelayanan Prima sebanyak 3 Angkatan

f) Diklat Pelayanan Prima sebanyak 5 Angkatan

g) Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 7 Angkatan

h) Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Serta Estate Manajemen sebanyak 7 Angkatan

i) Diklat Reformasi Birokrasi sebanyak 3 Angkatan

j) Diklat Capacity Building sebanyak 5 Angkatan

k) Kerjasama Diklat Satu Pintu telah selesai diselenggarakan dengan realisasi koordinasi kediklatan dari SKPD/ UKPD sebanyak 400 orang

l) Pengiriman Kediklatan telah selesai diselenggarakan sebanyak 182 orang

m) Diklat Kepemimpinan TK. III sebanyak 3 Angkatan

n) Diklat Prajabatan Golongan III

o) Diklat Kepemimpinan TK. IV sebanyak 4 Angkatan

p) Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan sebanyak 8 Angkatan

q) Diklat Prajabatan Golongan II Reguler dan Golongan I, II dan III (K1/K2)

r) Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 3 Angkatan

s) Diklat PPNS

t) Diklat SPIP sebanyak 5 Angkatan

u) Diklat Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Angkatan

v) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 42 Angkatan

w) Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan sebanyak 10 Angkatan

x) Diklat Bendahara Penerimaan sebanyak 2 Angkatan

y) Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 7 Angkatan

z) Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi sebanyak 10 Angkatan

32) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat

a) Pengembangan E-Learning telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 modul e-learning.

b) Pengelolaan Web dan Pengembangan Aplikasi Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan dengan capaian 12 bulan

c) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 300 orang

d) Penyusunan Standar dan Data Sertifikasi Jabatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 standar kompetensi jabatan

e) Evaluasi Penyelenggaraan Pasca Kediklatan dan Reakreditasi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 204 angkatan dan 4 program diklat

f) Prosedur SMM ISO 9001:2008 dan Penyusunan SOP telah selesai dilaksanakan dengan capaian 22 prosedur

g) Training Needs Analysis telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 jenis Training Needs Analysis

h) Revitalisasi Badan Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4 dokumen.

i) Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 kurikulum

Penyusunan Modul Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 36 modul diklat

33) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI

a) Penetapan Dan Pelaksanaan Dokumen Kinerja SKPD/ UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

34) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI

a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai berupa keikutsertaan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan pendidikan *legislative drafting* dan *contract drafting*

b) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian 175 orang

c) Seleksi Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian 100 orang

d) Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

e) Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta;

f) Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS;

g) Peningkatan Pemahaman Pegawai Terhadap Peraturan Kepegawaian;

h) Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Pengisian Formulir LHKPN dan LP2P;

i) Penyelenggaraan Persiapan Administrasi Menjelang Purna Bakti PNS;

j) Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah Serta Serah Terima Jabatan Struktural;

k) Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

l) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai.

m) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan

n) Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/ Sertifikasi Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD)

o) Pengadaan/ Pengiriman Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Seminar

35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Supervisi/ Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);

b) Pembekalan dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/ Janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

c) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional.

36) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana

a) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Siswa SMU

b) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas

c) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Pengelola Gedung

d) Peningkatan Kapasitas Penilaian Kerusakan dan Kerugian

e) Penangganan Psikososial

f) Penyusunan Rencana Kontijensi di Provinsi DKI Jakarta

g) Pemantapan Manajemen Kedaruratan dan Logistik

h) Gladi dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas public

i) Peningkatan kapasitas (Capasity Building)Relawan Penanggulangan Bencana

j) Produktifitas Pelaksanaan Assesment

37) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana

a) Piket Siaga Bencana Daerah

b) Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta

c) Pengadaan Peralatan Monitoring Bencana

d) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana

e) Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

f) Evaluasi ISO 9001:2008 Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta

g) Review Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

h) Pembayaran Abodemen Dan Tagihan Telepon Call Center 164 BPBD Provinsi DKI Jakarta

i) Penyediaan Perawatan Server Penunjang Penanggulangan Bencana

j) Konversi Open Data Disaster Information Management System

k) Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat Call Center

38) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran

a) Pengelolaan dan Pengembangan Pendukung Edukasi Penanggulangan Kebakaran (Taman Mini)

b) Pemeriksaan Sewaktu-waktu Sarana Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

39) Program Penanggulangan Kebakaran

a) Gladi Gabungan Operasional Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Tinggi/ Menengah, Mall, dan Industri

b) Perawatan Perangkat Command Center (tak terprediksi)

c) Pengisian Ulang Apar Masyarakat

d) Pengisian Apar Kantor

e) Pengadaan Selang Pemadam 1,5

f) Pengadaan Pipa Cabang 2,5 dan 1,5

g) Pengadaan Pipa Pemancar 1,5

40) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

a) Perawatan/ Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena Tower

b) Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan

c) Penyediaan Prasarana Sarana Opersional Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

d) Pemeliharaan Prasarana Sarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Yang Ada di Masyarakat

e) Pemeliharaan Alat Operasional Penyelamat (Chain Saw Dan Rotary Saw)

f) Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Bengkel

g) Pemeliharaan dan Penggantian Kerusakan Hidran

h) Pengadaan Selang Penyalur Ukuran 1,5

i) Pengadaan Nozzle

j) Penyelesaian Rehab Total Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Kebon Jeruk

k) Rehab Berat Pos Pemadam Lubang Buaya

l) Rehab Berat Pos Pemadam Pondok Kopi

m) Pengadaan Alat Uji Helm Kebakaran

n) Pengadaan Sarana Pengujian Pompa Kebakaran

41) Program Penyelamatan

a) Perawatan Peralatan Operasional

b) Pelatihan SCUBA Diver Bersertifikat Untuk Seluruh Anggota Damkar

c) Diklat Medical First Responder (MFR)

d) Pemusatan Latihan Peserta Singapore Skill Competition

e) Diklat Inspektur Kebakaran Tk. I

f) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung

g) Diklat Operator Tk. I

h) Diklat *Fire Rescue*

42) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sudah dijelaskan pada program unggulan

43) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

a) Penyelenggaraan Pengamanan Jakarta Marathon 2016 (pengamanan sepanjang jalan Thamrin-Sudirman).

b) Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional (di 4 lokasi : Gereja Kathedral, Monas, Pura Pasar Baru dan Pura Kota).

c) Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada jalan Protokol dan Fasilitas Umum (563 Media Informasi).

d) Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2017 (3 kegiatan : Kegiatan HUT Kota Jakarta, Pengamanan Malam Tahun Baru dan Jakarta 10 K).

e) Penanganan Pengaduan Masyarakat (9 pengaduan yang terselesaikan).

f) Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Kegiatan Penertiban Tempat Usaha Hiburan Pada Hari-Hari Besar Keagamaan (1.548 tempat usaha).

g) Pengawasan Dan Penertiban Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (1 lokasi sepanjang Jl. Sudirman-Thamrin).

h) Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam (6 lokasi).

i) Penyelenggaraan Penertiban Daerah Rawan Ketertiban Umum (9 kali kegiatan).

j) Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sebanyak 4.140 botol miras).

k) Piket Asistensi dan Operator Radio (6 lokasi).

l) Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial Dan Gangguan Bencana (sebanyak 971 kejadian yang terdiri dari 462 kejadian unjuk rasa, 391 kejadian kebakaran dan 119 kejadian lainnya).

44) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan

a) Diklat Pembentukan Pol PP tingkat dasar (0)

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, antara lain:

1) Terlaksananya evaluasi 4 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Gubernur pada tahun 2016 terdiri dari :
   a) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pihak Ketiga.
   b) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jaringan Utilitas.
   c) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya.
   d) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Anak terhadap Kekerasan.
   e) Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2009 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berdasarkan Azas Timbal Balik bagi Perwakilan Negara Asing.
   f) Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2010 tentang Pemasangan Jaringan Utilitas pada Lokasi Strategis.
   g) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2102 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
   h) Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengususlan, Evaluasi, Penggangaran, Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2) Penyelesaian pengurusan 44 perkara di pengadilan, terdiri dari 37 perkara perdata dan 7 perkara TUN.
3) Terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan sebanyak 400 sengketa di Provinsi DKI Jakarta.

4) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna sebanyak 200 peserta.
5) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat dengan terbentuknya kelompok kadarkum bagi organisasi wanita dan karang taruna yang diikuti 100 peserta.
6) Terseleksaikannya 1 draft Penyempurnaan Naskah Akademis dan Draft RUU Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007.
7) Terselesaikannya Pengurusan 44 Perkara di Pengadilan, terdiri dari 37 perkara perdata dan 7 perkara Tata Usaha Negara.
8) Terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan aset di luar pengadilan sebanyak 400 sengketa di Provinsi DKI Jakarta.
9) Terlaksananya Pembinaan Kelompok Kadarkum bagi Organisasi Wanita dan Karang Taruna, 200 peserta.
10) Terselesaikannya Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat melalui pembentukan kelompok kadarkum bagi organisasi wanita dan karang taruna yang diikuti 100 peserta.
11) Pemantauan Pengendalian Penyakit Menular melalui penerbitan kebijakan sebagai berikut :
    a) Penyusunan Pergub No 15 tahun 2016 tentang Pengendalian Penyakit TB.
    b) Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Dukungan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional Polio Tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta.
12) Perumusan Kebijakan *Surveillance* Penyakit di Provinsi DKI Jakarta dengan menerbitkan :
    a) Keputusan Gubernur Nomor 648 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Demam Berdarah Dengue dan Chikungunya.
    b) Instruksi Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Keamanan Pangan Terpadu.
13) Penyusunan Kebijakan di Bidang Sosial melalui penerbitan :
    a) Keputusan Gubernur Nomor 1694 Tahun 2016 tentang Lokasi Pemakaman bagi Perintis Kemerdekaan dan

Penerima Tanda Kehormatan Daerah.

b) Peraturan Gubernur Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan, Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah.

14) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan terhadap penerapan Instruksi Gubernur No 126 Tahun 2016 tentang Pemberian Informasi Ketersediaan Ruang Rawat Inap pada Puskesmas Kecamatan dengan tujuan untuk memaksimalkan peran RSUD dalam mempublikasikan ketersedian Ruang Rawat Inap. Publikasi informasi tersebut terintegrasi dengan Jakarta *Smart City*.

15) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PBI di Lapas Rutan dan Panti menghasilkan data dan informasi tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan peserta PBI pada Rutan, Lapas dan Panti.

16) Terlaksananya Pemantauan dan Pembinaan Program UKS Tingkat Provinsi melalui Lomba Sekolah Sehat, yang menghasilkan 4 sekolah dengan predikat Juara I pada masing-masing tingkatan yang akan menjadi wakil tingkat Nasional tahun 2017.

    a) TK.Bhakti YKKP Jakarta Barat.
    b) SDN Pondok Labu 07 Jakarta Selatan.
    c) SMP/ MTs adalah SMPN 209 Jakarta Timur.
    d) SMA/ SMK/ MA adalah oleh SMAN 90 Jakarta Selatan.

17) Apresiasi Kinerja Program UKS terhadap sekolah yang mengikuti Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi Tahun 2016 dari seluruh Kategori TK/ RA, SD/ MI, SMP/ MTs, SMA/ SMK/ MA menghasilkan Pemenang Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur nomor 2348 Tahun 2016 Tentang Pemenang Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 yaitu :

a) Kategori Sekolah Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal.
   a) Juara Pertama TK.Bhakti YKKP Jakarta Barat
   b) Juara Kedua TK.Tarakanita Jakarta Utara
   c) Juara Ketiga TK. Santa Maria Jakarta Pusat
   d) Juara Harapan I KB-TK. ASISI Jakarta Selatan
   e) Juara Harapan II TK. Noah Jakarta Timur
b) Kategori Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah.
   a) Juara Pertama SDN Pondok Labu 07 Jakarta Selatan
   b) Juara Kedua SDN Marunda 02 Jakarta Utara
   c) Juara Ketiga SDN Semanan 04 Jakarta Barat
   d) Juara Harapan I SDN Pulau Tidung 01 Kepulauan Seribu
   e) Juara Harapan II SDN Cibubur 01 Jakarta Timur
   f) Juara Harapan III SDN Santa Theresia Jakarta Selatan
c) Kategori Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah.
   a) Juara Pertama SMPN 209 Jakarta Timur
   b) Juara Kedua SMPN 285 Kepulauan Seribu
   c) Juara Ketiga SMPN 273 Jakarta Pusat
   d) Juara Harapan I SMPN 166 Jakarta Selatan
   e) Juara Harapan II SMPN 170 Jakarta Utara
   f) Juara harapan III SMPN 225 Jakarta Barat
d) Kategori Sekolah Menengah Atas/ Kejuruan/ Madsrasah Aliyah.
   a) Juara Pertama SMAN 90 Jakarta Selatan
   b) Juara Kedua SMAN 21 Jakarta Timur
   c) Juara Ketiga SMKN 16 Jakarta Pusat
   d) Juara Harapan I SMAN 65 Jakarta Barat
   e) Juara Harapan II SMAN 80 Jakarta Utara
   f) Juara harapan III SMAN 69 Kepulauan Seribu

18) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan TKPK Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I) dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 147 tentang Percepatan Pelaksanaan Mekanisme Pendaftaran Mandiri.

19) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dengan menerbitkan :
    a) Instruksi Gubernur Nomor 65 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru.
    b) Keputusan Gubernur Nomor 2147 Tahun 2016 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penyelesaian Masalah Sosial di Kecamatan Johar Baru.
    c) Instruksi Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat XIII dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke- 44 Tahun 2016.
20) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Program Raskin di Provinsi DKI Jakarta dengan menerbitkan :
    a) Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
    b) Surat Keputusan Gubernur Nomor 2177 tentang Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Tingkat Provinsi Tahun Anggaran 2016.
21) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kepesertaan ber-KB telah dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner yang hasilnya menggambarkan Pelayanan KB termasuk sarana dan prasarana, kesertaan ber-KB dan masalah-masalah yang ada serta berbagai harapan baik dari petugas puskesmas, Penyuluh KB, PPKBRW maupaun akseptor dan calon akseptor.
22) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga menghasilkan data dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan kesertaan ber-KB dan penyelenggaraan pembinaan ketahanan keluarga.

23) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak menghasilkan kebijakan sebagai berikut :
    a) Instruksi Gubernur nomor 35 tahun 2016 tentang Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB.
    b) Peraturan Gubernur nomor 74 tahun 2016 tentang Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu perubahan atas pergub nomor 55 tahun 2011 tentang Pembentukan kelompo Kerja Gerakan Sayang Ibu.
24) Terdaftarnya Provinsi DKI Jakarta dalam keanggotaan 20 Organisasi Internasional dan berpartisipasi pada 56 Event Internasional.
25) Terlaksananya kerjasama dengan 7 kota aktif melaksanakan program *Sister City*, serta terlaksananya kunjungan *sister city* ke 6 kota dalam mendukung 9 isu strategis Pemerintah Daerah.
26) Terlaksananya fasilitasi penyusunan naskah kesepakatan bersama/ perjanjian kerja sama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga/ Badan sebanyak 784 KB/ PKS, 1 naskah KB dengan Kabupaten Bangka Barat, 5 SKB anggota FKD-MPU, 5 KB/ PKS antar Pemerintah Daerah Jabodetabekjur; (rincian KB/ PKS pada Bab VI).
27) Tersusunnya 10 Laporan Pelaksanaan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan 7 Laporan Pencairan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016.
28) Terlaksananya kegiatan monitoring implementasi PKS bidang transmigrasi ke Bengkulu, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.
29) Terlaksananya kegiatan monitoring 17 pelaksanaan Bantuan Hibah dan Bantuan Keuangan dan 5 kesepakatan dan PKS antar Pemerintah Daerah.
30) Terlaksananya monev terhadap 24 Perjanjian Kerja Sama dengan Lembaga Badan.

31) Terlaksananya kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai anggota MPU dan APPSI.
32) Tersusunnya 1 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015.
33) Tersedianya fasilitas penunjang operasional kantor (Makan minum Rapat, ATK, perawatan aset dan pengadaan 2 unit PC).
34) Tersusunnya sebanyak 28 kebijakan Bidang Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual (7 Pergub, 17 Kepgub, 4 Ingub).
35) Terlaksananya Pembinaan Mental Spiritual monitoring dan dukungan pelaksanaan MTQ ke-26, Provinsi DKI Jakarta meraih juara 2.
36) Terselesaikannya rekomendasi perijinan rumah ibadah sebanyak 7 rekomendasi.
37) Terlaksananya fasilitasi dalam bentuk obat-obatan dan posko petugas haji daerah kepada 5.735 Jamaah Haji, dengan dukungan petugas haji daerah sebanyak 40 orang (TPHD = 20 dan TKHD = 20) terbagi dalam 15 kloter.
38) Terlaksananya fasilitasi pengurusuan Jenazah Jamaah Haji DKI Jakarta yang wafat di Tanah Suci sebanyak 10 orang.
39) Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi di DKI Jakarta (revisi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi).
40) Terlaksananya koordinasi pembangunan Jalan Layang Khusus Busway Kapten Tendean - Blok M – Ciledug.
41) Terlaksananya koordinasi pembangunan 6 (enam) Ruas Jalan Tol Dalam Kota Jakarta.
42) Terlaksananya koordinasi pembangunan pedestrian Thamrin – Sudirman.
43) Terlaksananya koordinasi pembangunan jalan, jembatan dan jaringan utilitas.

44) Terlaksananya koordinasi pembangunan Terminal Terpadu Pulo Gebang.

45) Terlaksananya koordinasi dan monitoring terhadap pekerjaan persiapan pembangunan MRT Jakarta, dengan hasil sebagai berikut :

   a) Proses pembebasan lahan secara total telah dilakukan sebanyak 351 bidang dari 637 bidang yang harus dibebaskan. Untuk tahun 2016, telah dibebaskan lahan sebanyak 133 bidang.

   b) Pembangunan fisik, railway system dan pengadaan rolling stock secara keseluruhan mencapai 51,57 persen, dengan uraian sebagai berikut :

      - Konstruksi *Elevated* (Lebak Bulus – Senayan) depo dan jalur sebesar 48,04 persen.
      - Konstruksi *Underground* berjalan sesuai target, dengan penyelesaian rata-rata sebesar 81,53 persen
      - *Railway System* sebesar 38,30 persen; dan
      - Pengadaan *Rolling Stock* 5,07 persen

   c) Penempatan CT/ VT pada koridor konstruksi *Underground*

   d) Persiapan MRT Fase II

46) Telaksananya pembahasan, koordinasi dan monitoring Pembangunan LRT Jakarta.

47) Terlaksananya pembahasan, koordinasi dan monitoring pembangunan ketataairan yang mencakup waduk/ situ/ embung, Instalasi Pengolahan Air Sistem *Reverse Osmosis*, Proyek JUFMP/ JEDI, dan Pembangunan Tanggul NCICD.

48) Terlaksananya koordinasi peningkatan percepatan implementasi pengembangan Kawasan Strategis antara lain Kawasan Medan Merdeka, Kawasan Tanjung Priok, Kawasan Gelora Bung Karno/ Senayan, Kawasan ASEAN, serta Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

49) Terlaksananya sinkronisasi data dan kebijakan pembangunan kawasan permukiman dan pembangunan fisik rumah susun murah/ sederhana.
50) Terlaksananya koordinasi pendalaman substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para Pemegang SIPPT.
51) Terlaksananya koordinasi peningkatan efektifitas implementasi kebijakan pengendalian bangunan di Provinsi DKI Jakarta.
52) Terlaksananya koordinasi pengendalian implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi di Provinsi DKI Jakarta.
53) Terlaksananya koordinasi peningkatan strategi pencapaian target pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
54) Terlaksananya koordinasi pendalaman dan analisa implementasi kebijakan pengendalian pencemaran udara.
55) Terlaksananya koordinasi peningkatan strategi percepatan pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi permukiman.
56) Terlaksananya koordinasi peningkatan efektifitas kebijakan pengelolaan kebersihan.
57) Terlaksananya pengelolaan administrasi Tata Usaha bagi Sekda, Asisten Sekda, Deputi Gubernur dan Asisten Deputi Gubernur.
58) Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (KDM) pada SKPD/ UKPD di lingkungan Kompleks Balai Kota.
59) Terlaksananya koordinasi pengamanan dari unsur TNI/ Polri pada Aksi Unjuk Rasa di Balai Kota.
60) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung berupa pengadaan komponen dan peralatan mekanikal elekterikal.
61) Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung Blok G dan Blok H Balai Kota.
62) Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana rumah dinas Gubernur.
63) Terselenggaranya dukungan pelaksanaan wisata Balai Kota.
64) Tersusunnya Standarisasi Peralatan Teknis SKPD.

65) Tersusunnya Standar Pelayanan (SP) Kelurahan, Kecamatan, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota/ Kabupaten.
66) Tersusunnya Laporan Umum Tahunan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester 2 tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 sebagai tindak lanjut Permendagri 6 / 2007.
67) Terselenggaranya pendampingan penyusunan SOP pada 200 SMPN.
68) Tersusunnya Rapergub tentang Rapat Kedinasan dan 5 Rapergub tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Dewan Mesjid Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa, Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan, dan Unit Pengelola Kebersihan Badan Air.
69) Tersusunnya Perda No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut PP No. 18 Tahun 2016 dan Permendagri No. 97 Tahun 2016.
70) Tersusunnya Pergub tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) pada 38 SKPD dan 117 UPT sebagai tindak lanjut dari Perda No. 5 Tahun 2016.
71) Terlaksananya pelaksanaan aktifitas keprotokolan daerah.
72) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi DKI Jakarta.
73) Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah.
74) Terselesaikannya Peraturan Daerah pada Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta, yaitu :
    a) Perda Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keolahragaan
    b) Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kepemudaan
    c) Perda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang APBD 2016
    d) Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang APBD Perubahan 2016
    e) Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah

f) Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang APBD 2017

75) Terselesaikannya 3 kali reses DPRD.

76) Terfasilitasinya pelaksanaan Pansus DPRD sebanyak 5 pansus yaitu :

a) Panitia Khusus Mengenai Asset

b) Panitia Khusus Mengenai MOU Jakarta Shanghai

c) Panitia Khusus Mengenai Rencana Kerja Tahunan (RKT)

d) Panitia Khusus Mengenai Tahun Jamak

e) Panitia Khusus Mengenai Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) BPK

77) Terselesaikannya penataan Lokasi Usaha Sementara dengan hasil sebagai berikut :

a) Jakarta Barat 8 lokasi usaha sementara

b) Jakarta Utara 6 lokasi usaha sementara

c) Jakarta Selatan 87 lokasi usaha sementara

d) Jakarta Pusat 49 lokasi usaha sementara

e) Jakarta Timur 6 lokasi usaha sementara

f) Kepulauan Seribu 38 kios pedagang

78) Terlaksananya Sosialisasi Pergub 171/2016 tentang Pedoman RT dan RW, sebagai pengganti Pergub 168/2014 tentang Pedoman RT dan RW yang dilaksanakan di Kecamatan dan Kelurahan.

79) Tertanganinya Penanganan Perkara di lembaga Peradilan dengan hasil sebagai berikut :

a) Jakarta Barat sebanyak 16 perkara

b) Jakarta Selatan sebanyak 41 perkara

c) Jakarta Pusat sebanyak 4 perkara

d) Jakarta Timur sebanyak 22 perkara

e) Kepulauan Seribu sebanyak 2 perkara

80) Terselesaikannya pelayanan bantuan hukum bagi PNS dengan hasil sebagai berikut :

a) Jakarta Selatan sebanyak 21 perkara

b) Jakarta Pusat sebanyak 10 perkara

81) Terselenggaranya Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat di Jakarta Selatan sebanyak 60 peserta.
82) Terbentuknya Keluarga Sadar Hukum di Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
83) Terlaksananya koordinasi penyaluran beras untuk rakyat miskin (raskin) di enam wilayah kota/ kabupaten.
84) Terlaksananya koordinasi pembinaan tatanan Kota Sehat dan Sekolah Sehat di enam wilayah kota/ kabupaten.
85) Terlaksananya Pembentukan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) di enam wilayah kota/ kabupaten.
86) Terselenggarannya Lomba Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) dan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tk. Prov. DKI Jakarta.
87) Pengadaan 4 unit kapal transportasi oleh Kabupaten Kepulauan Seribu.
88) Terlaksanannya koordinasi dan monitoring kerja bakti di enam wilayah kota/ kabupaten.
89) Terlaksanannya koordinasi dan monitoring kewajiban pengembang pemegang SIPPT di enam wilayah kota/ kabupaten.
90) Terlaksananya koordinasi penyelesaian Berita Acara Penelitian Kewajiban Fasos Fasum Fisik terhadap para pengembang pemegang SIPPT di enam wilayah kota/ kabupaten.
91) Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor Pemerintah Daerah di enam wilayah kota/ kabupaten.
92) Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kantor Kelurahan Lubang Buaya dan Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur.
93) Terlaksananya Rehab Berat Gedung Kantor Kelurahan Kebon Melati dan Kelurahan Kwitang, Jakarta Pusat.
94) Terlaksananya Rehab Total Gedung Kantor dengan hasil sebagai berikut :
    a) Jakarta Pusat : Rumah Dinas Kel. Kwitang
    b) Jakarta Barat : Gedung Kantor Kel. Maphar

c) Jakarta Selatan : Gedung Kantor Kel. Pengadegan dan Kel. Bukit Duri

d) Jakarta Timur : Gedung Kantor Kel Pondok Kopi

e) Kab. Kep. Seribu : Gedung Kantor Kel. P. Kelapa

95) Terlaksananya Koordinasi Tugas dan Fungsi Pengawasan

Pra pemuktahiran data aparat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (TLHP APIP) dan pemuktahiran data aparat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (TLHP APIP) telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Pada tahun 2016 Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu dari enam provinsi yang telah berhasil menyelesaikan TLHP secara tuntas hingga mencapai 100 persen.

96) Terlaksananya Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Kas Akhir Tahun

a) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pengawasan kinerja/ reguler dengan target sesuai dengan data yang tercantum dalam PKPT sebanyak 20 objek pengawasan. Pengawasan kinerja/ reguler dilaksanakan untuk dapat menilai kinerja SKPD/UKPD secara komprehensif. Realisasi pengawasan sebanyak 19 objek pengawasan. sedangkan 1 objek pengawasan tidak dapat direalisasikan disebabkan pemeriksaan dari aparat pengawas eksternal yang jadwalnya berbenturan dengan jadwal PKPT. Berdasarkan surat perintah tugas reguler, LHP yang telah diterbitkan sebanyak 14 laporan, sedangkan 5 laporan masih dalam proses pengerjaan.

b) Pengawasan Kas Akhir Tahun Anggaran 2016 beserta *Stock Opname* di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara serentak oleh Inspektorat Provinsi beserta Inspektorat Wilayah dan pelaksanaannya sampai dengan

Bulan Januari 2017.

97) Terlaksananya Reviu dan Evaluasi Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a) Inspektorat Provinsi telah melakukan evaluasi pada 39 SKPD. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masih diperlukan penyelarasan dalam penyajian sasaran kinerja antara dokumen perencanaan yang satu dengan yang lainnya, serta peningkatan kualitas indikator kinerja.

b) Dari hasil evaluasi tersebut telah diperoleh data SKPD dengan nilai tertinggi hingga terendah sebagaimana tabel berikut :

NO	SKPD	NILAI (%)
1	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan	77,56
2	Bappeda	63,93
3	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	63,74
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	63,56
5	Kota Administrasi Jakarta Pusat	62,91
6	Dinas Kesehatan	62,62
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	62,16
8	Kota Administrasi Jakarta Timur	61,99
9	Dinas Pendidikan	61,99
10	Kota Administrasi Jakarta Selatan	61,97
11	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	61,92
12	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan	61,27
13	Dinas Perindustrian dan Energi	61,15
14	Kota Administrasi Jakarta Barat	60,81

NO	SKPD	NILAI (%)
15	Badan Kepegawaian Daerah	60,62
16	BPMPKB	59,95
17	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal	59,72
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59,66
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59,66
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59,56
21	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	59,53
22	SATPOL PP	59,49
23	Dinas Sosial	59,46
24	Dinas Pelayanan Pajak	59,38
25	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan	59,38
26	Dinas Penataan Kota	59,24
27	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	59,05
28	Kota Administrasi Jakarta Utara	58,88
29	Dinas Perhubungan dan Transportasi	58,76
30	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	58,55
31	BPTSP	58,39
32	Sekretariat Daerah	58,00
33	Sekretariat DPRD	57,02
34	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	56,81
35	Sekretariat Dewan KORPRI	55,65
36	Badan Pendidikan dan Pelatihan	55,69

NO	SKPD	NILAI (%)
37	Dinas Kebersihan	55,17
38	Dinas Tata Air	51,78
39	Dinas Bina Marga	46,32

98) Terlaksananya Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Tahun 2015 dan tahun sebelumnya sebagai berikut :
   a) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2015 dan tahun sebelumnya telah 100 persen selesai.
   b) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI tahun 2004 – 2016 (akumulasi dari tahun 2004 – 2016 merupakan temuan yang harus ditindaklanjuti dan Inspektorat harus memantau dari tahun 2004) adalah dari 7.488 rekomendasi yang sudah selesai sebanyak 5.244 atau sebesar 70,5 persen.
   c) Capaian indikator kinerja persentase atas tindak lanjut pengawasan/ pemeriksaan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 (tahun 2016 masih dalam proses pengawasan/ pemeriksaan yang dilakukan tindaklanjutnya mulai tahun 2017) yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 95 persen dari jumlah rekomendasi.

99) Terselesaikannya kebijakan pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut :
   a) Kebijakan pengelolaan keuangan daerah sejumlah 45 kebijakan.
   b) Kebijakan pengelolaan aset daerah sejumlah 32 kebijakan.

100) Terselesaikannya laporan jasa penasehat investasi atas rencana investasi dan/ atau divestasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

101) Terselesaikannya proses Berita Acara Serah Terima (BAST) untuk penerimaan aset berdasarkan kewajiban pemegang SIPPT sebanyak 34 BAST.

102) Telah diterbitkannya Berita Acara Penelitian Fisik (BAPF) sebanyak 36 (tiga puluh enam) dokumen dan diserahkan kepada 6 wilayah kota/ kabupaten administrasi

103) Terselesaikannya pengasuransian terhadap 1.054 aset gedung Pemerintah Daerah serta 1.169 Kendaran Dinas Operasional

104) Terselesaikannya sertifikasi kepemilikan lahan Pemerintah Daerah sebanyak 6 bidang.

105) Terselesaikannya penerimaan aset sebagai kewajiban pihak ketiga meliputi:

   a) Inventarisasi aset fasos fasum yang berasal dari pihak ketiga di 5 wilayah kota administrasi

   b) Penyelesaian BAST Aset berupa Hibah dari Pemerintah Pusat di 5 lokasi

106) Terbangunnya sistem informasi pendapatan daerah untuk mendukung SKPD/ UKPD dalam melaksanakan laporan keuangan berbasis akrual

107) Terselenggaranya informasi kepada masyarakat melalui leaflet, dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya Pengamanan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

108) Terlaksananya perjalanan dinas sebanyak 364 perjalanan dinas dalam negeri dan 74 perjalanan dinas luar negeri.

109) Terlaksananya penyampaian SPPT PBB-P2 secara simbolis di 6 wilayah kota/ kabupaten administrasi.

110) Terlaksananya sosialisasi 13 jenis pajak daerah melalui media dan berbagai *workshop* serta sosialisasi.

111) Terlaksananya pelayanan pada gerai-gerai pajak Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 wilayah kota yakni : Gerai Pajak Mal Thamrin City, Gerai Pajak Mal Artha Gading, Gerai Pajak Mal Taman Palem, Gerai Pajak Gandaria City dan Gerai Pajak Tamini Square.

112) Terlaksananya penertiban dan pembongkaran reklame di 42 kecamatan Provinsi DKI Jakarta.
113) Terlaksananya Pekan Panutan PBB di 6 wilayah kota/ kabupaten administrasi.
114) Terlaksananya pendataan dan penertiban reklame di wilayah Suku Dinas Pelayanan Pajak di 6 wilayah kota/ kabupaten administrasi.
115) Tersedianya sistem promosi dan mutasi pegawai secara terbuka.
116) Terlaksananya Digitalisasi Dokumen/ Map Data pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.000 dokumen/ map.
117) Terlaksananya Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
118) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pemberian TKD melalui penyusunan kajian terkait Aktivitas Tunjangan Kinerja Daerah.
119) Terselenggaranya Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana dengan tingkat kelulusan sebanyak 90 orang
120) Terselenggaranya Diklat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dengan tingkat kelulusan sebanyak 156 orang
121) Terselenggaranya Diklat Pelayanan Prima dengan tingkat kelulusan sebanyak 148 orang dan Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tingkat kelulusan sebanyak 210 orang
122) Terselenggaranya Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan tingkat kelulusan sebanyak 300 orang
123) Terselenggaranya Diklat Pengelolaan Barang Daerah dengan tingkat kelulusan sebanyak 206 orang
124) Terselenggaranya Diklat Teknis Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan serta Estate Management dengan tingkat kelulusan sebanyak 209 orang
125) Terselenggaranya Diklat Manajemen Sekolah dengan tingkat kelulusan sebanyak 150 orang

126) Terselenggaranya Workshop Revolusi Mental dengan tingkat kelulusan sebanyak 1500 orang
127) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat III dengan tingkat kelulusan sebanyak 83 orang
128) Terselenggaranya Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dengan tingkat kelulusan sebanyak 116 orang
129) Terselenggaranya Diklat PPNS dengan tingkat kelulusan sebanyak 65 orang
130) Terselenggaranya Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan tingkat kelulusan sebanyak 150 orang
131) Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III (K1/K2) dengan tingkat kelulusan sebanyak 1.188 orang
132) Terselenggaranya Diklat Prajabatan Golongan III dengan tingkat kelulusan sebanyak 865 orang
133) Terselenggaranya Sertifikasi Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV
134) Terlaksananya penetapan dan pelaksanaan Dokumen Kinerja 67 Kepala SKPD/ UKPD
135) Terlaksananya penegakan disiplin PNS/ CPNS dalam bentuk penjatuhan Hukuman Disiplin kepada 153 pegawai dan penyelesaian Ijin Perceraian bagi 70 pegawai
136) Terlaksananya Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk penetapan Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat PNS sebanyak 6.843 SK.
137) Terlaksananya Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (PI) dan Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan (PP) PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bentuk penerbitan Sertifikat Lulus ujian kepada 1.782 pegawai
138) Terbinanya 8 rumpun jabatan fungsional serta penerbitan Surat Keputusan (SK) alih fungsi dari Jabatan Fungsional Umum menjadi Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 1.515 SK.

139) Tersedianya data potret kompetensi sebanyak 6.598 pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 5 standar kompetensi Badan.

140) Terlaksananya proses identifikasi potensi diri dalam rangka peningkatan kompetensi jabatan dan kinerja melalui konseling kerja dan feedback terhadap 800 orang.

141) Terlaksananya ketepatan waktu penetapan Surat Keputusan (SK) dan pembayaran uang pensiun bagi 3.721 pegawai

142) Terlaksananya seleksi pegawai tugas belajar bagi 100 orang

143) Terlaksananya Diklat Pelatihan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor bagi 7 orang pegawai Inspektorat.

144) Terlaksananya Diklat Substantif bagi 193 pegawai Inspektorat, yang terbagi dalam :

a) Diklat Analisis Pemecahan Masalah (40 Jam)
b) Diklat The Art and Power of Communication John Robert Power (24 jam)
c) Workshop Pemahaman Standar Profesi Auditor (16 jam)
d) Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (8 Jam)
e) Diklat Reviu RKA SKPD (50 Jam)
f) Workshop Fraud and Corruption in Public Procurement (16 jam)
g) Diklat Capacity Building (24 Jam)
h) Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) bagi Pegawai di Lingkungan Balaikota Provinsi DKI Jakarta (24 Jam)
i) Diklat Pengelolaan Barang Daerah (80 Jam)
j) Bimbingan Teknis Aplikasi RUP Versi 2.0 (8 jam)
k) Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (APIP) (40 Jam)
l) Bimtek dan Dialog Interaktif Pertanahan (32 Jam)
m) Diklat Manajemen Pengawasan APIP (32 Jam)
n) Diklat Penilaian Angka Kredit (32 Jam)

o) Bimtek Sosialisasi Pedoman Reviu RPJMD dan Reviu Laporan Keuangan Berbasis Akrual bagi Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (P2UPD) dan Pejabat Fungsional Auditor (24 Jam)

p) Analisis Pemecahan Masalah (40 Jam)

q) SAP Berbasis Akrual (50 Jam)

r) Workshop Pemahaman Standar Profesi Auditor (16 jam)

s) Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (8 Jam)

t) Diklat Akuntansi berbasis Akrual (48 Jam)

145) Terselesaikannya Kajian Kawasan Evakuasi Bencana sebanyak 50 titik lokasi RPTRA sesuai dengan Pergub Nomor 145 Tahun 2015 tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan Bencana.

146) Terpenuhinya kuantitas Taruna Siaga Bencna (TAGANA) yang terdiri dari Kader Tk. Provinsi maupun 5 Wilayah Kota dan 1 Kabupaten

147) Terlaksananya peningkatan kapasitas (capacity building) relawan penanggulangan bencana sebanyak 50 orang

148) Terlaksananya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi penyandang disabilitas sebanyak 60 orang

149) Terlaksananya peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi pengelola gedung sebanyak 500 orang

150) Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada produktifitas pelaksanaan asessment di 19 lokasi bencana

151) Terlaksananya pelayanan pengendalian penanggulangan bencana belanja jasa petugas penunjang kegiatan sebanyak 24 orang dan belanja tenaga ahli 26 orang (Operasional Pusdalops) di Call Centre 112

152) Terlaksananya Piket Siaga Bencana Tingkat Provinsi selama 3 bulan didukung oleh 5 wilayah Kota dan 1 Kabupaten, MENWA dan TAGANA

153) Terlaksananya Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi di Provinsi DKI Jakarta (1 Dokumen)

154) Terlaksananya 40 Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana

155) Tersedianya 6 alat system peringatan dini Automatic Water Level Recording (AWLR) di 6 lokasi

156) Terlaksananya penyediaan 8 jenis buffer stock logistik penanggulangan bencana

157) Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sebanyak 68 kelompok.

158) Terlaksananya pemeriksaan 523 gedung dengan hasil 94 gedung memperoleh Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 239 gedung memperoleh Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK) dan lain-lain

No	Kategori	Total	Persentase
1	Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	94	17.97%
2	Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK)	239	45.70%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	41	7.84%
4	Pengawasan dalam Masa Konstruksi	25	4.78%
5	Pengawasan dalam Masa Pembinaan	96	18.36%
6	Rekomendasi Sistem	11	2.10%
7	Penegakan Perda	17	3.25%
	Total Gedung yang Diperiksa	**523**	**100.00%**

159) Terlaksananya Gladi Gabungan Operasional Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Gladi ini dititikberatkan pada pusat-pusat perbelanjaan yaitu Senayan City Mall Jakarta Pusat, The City Centre of Office Tower One Jakarta Pusat, Mall Grand

Indonesia Jakarta Pusat dan Summarecon Mall Kelapa Gading Jakarta Utara.

160) Tercatatnya jumlah total kejadian kebakaran di wilayah DKI Jakarta sebanyak 1.171 kejadian, yang mengalami penurunan sebesar 25 persen dari tahun sebelumnya yaitu 1.569 kejadian.

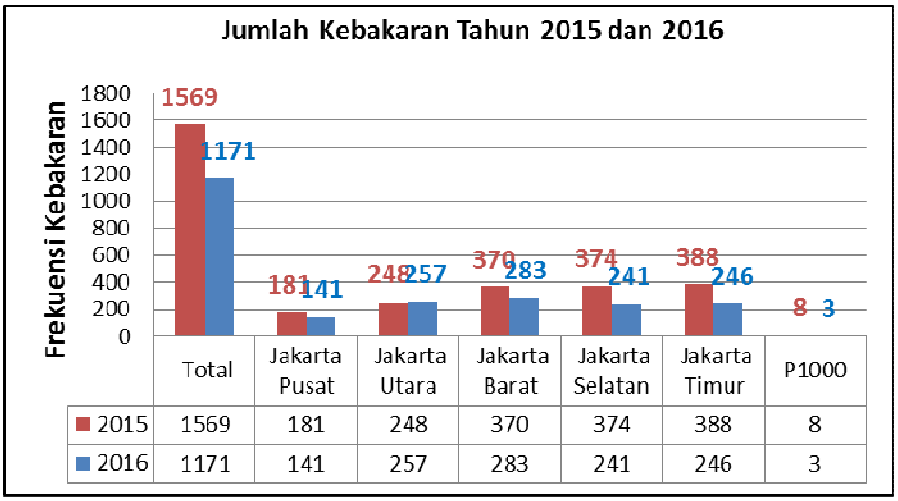

	Total	Jakarta Pusat	Jakarta Utara	Jakarta Barat	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	P1000
2015	1569	181	248	370	374	388	8
2016	1171	141	257	283	241	246	3

161) Jumlah kejadian kebakaran yang dapat diatasi sendiri oleh masyarakat pada tahun 2016 sebanyak 55 kejadian turun sebanyak 22% dari tahun sebelumnya sebanyak 67 kejadian. Berdasarkan waktu kejadian kebakaran, frekuensi tersering terjadi pada malam hari (pukul 18;00 – 23:59).

162) Tercapainya target Respond Time 15 menit sebesar 98 persen dari semua kejadian dapat ditangani, dengan rata-rata respon time sebesar 9 menit. Selain itu, tercapai pula jumlah kejadian kebakaran yang dapat dikuasai dalam waktu kurang dari 120 menit sebesar 92 persen dengan rata-rata waktu pemadaman sebesar 118 menit.

163) Terlaksananya pengadaan sarana pengujian pompa kebakaran UPT Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan sebanyak satu unit.

164) Terlaksananya pengadaan alat uji helm kebakaran sebanyak satu unit.

165) Terlaksananya pengadaan Forklift sebanyak 6 unit yang didistribusikan ke lima wilayah kota administrasi dan satu kantor Bidang Prasarana dan Sarana.

166) Terlaksananya pengadaan mobil derek sebanyak 3 unit yang didistribusikan ke Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan

167) Tercapainya jumlah mobil pompa dalam kondisi baik 87 persen dan jumlah hidran dalam kondisi baik sebesar 71 persen.

168) Terlaksananya lima jenis Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yaitu :

a) Diklat Medical First Responder (MFR) sebanyak 60 orang
b) Diklat Fire Rescue sebanyak 60 orang
c) Diklat Operator Tk. I sebanyak 60 orang
d) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) sebanyak 300 orang
e) Diklat Inspektur Kebakaran Tk. I sebanyak 30 peserta

169) Tercapainya persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi penyelamat sebesar 99 persen

170) Terlaksananya penyelamatan sebanyak 710 kejadian dengan frekuensi terbesar yaitu penanganan pohon tumbang sebanyak 296 kejadian yang kemudian disusul dengan pengendalian hewan, penyelamatan pada air (grafik 4.6). Kejadian Kebakaran paling besar terjadi di wilayah Jakarta Selatan yang kemudian disusul oleh Jakarta Timur dan Jakarta Utara Wilayah (Grafik 4.7).

171) Terlaksananya pengiriman 4 orang personil untuk mengikuti kompetisi Singapore Global Fire fighter Pramedics Challenge (SGPFC) yang diikuti 15 negara diantaranya Indonesia, Singapur, UK, Perancis, Malaysia, Arab Saudi, Australia, dll. Kategori yang dilombakan adalah Brave Heart Challenge, Rip it Off, dan Global Paramedic Challenge, dengan perolehan medali dari kategori Global Paramedic Challenge yaitu 1 medali perak oleh Novi Firdaus dan satu medali perunggu oleh Muhammad Kholid Badrudin di kategori yang sama.

172) Meningkatnya realisasi tingkat penyelesaian pengaduan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) sebesar 99 persen pada tahun 2016 meningkat dari sebelumnya pada tahun 2015 sebesar 70 persen.

173) Terlaksananya Pengamanan Jakarta Marathon di sepanjang Jl. Thamrin-Sudirman.

174) Terlaksananya Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional pada 4 lokasi.

175) Terlaksananya Pegawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada Jalan Protokol sebanyak 563 media Informasi.

176) Terlaksananya Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2017 sebanyak 3 kegiatan (HUT Kota Jakarta, Pengamanan Malam Tahun Baru dan Jakarta 10 K).

177) Terselesaikannya pengaduan masyarakat sebanyak 9 pengaduan masyarakat terkait Penyelesaian dan Penertiban Sengketa Tanah dan Bangunan.

178) Terlaksananya penanganan penertiban tempat usaha hiburan pada hari-hari besar keagamaan sebanyak 1.548 tempat usaha. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 2.325 tempat usaha. Hal ini mengindikasikan tingkat pelanggaran semakin menurun.

179) Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sepanjang Jl. Thamrin-Sudirman.

180) Terlaksananya Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam sebanyak 6 lokasi.

181) Terlaksananya Penyelenggaraan Penertiban Daerah Rawan Tramtibum sebanyak 9 kali kegiatan.

182) Terlaksananya pemusnahan hasil operasi minuman beralkohol sebanyak 4.140 botol minuman beralkohol. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak 13.000 botol minuman beralkohol. Hal ini mengindikasikan tingkat pelanggaran semakin menurun.

183) Terlaksananya Piket Asistensi dan Operator Radio pada 6 lokasi.

184) Meningkatnya Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial dan Gangguan Bencana sebanyak 971 kejadian pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 551 kejadian.

185) Terselesaikannya penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 11 kasus pengaduan masyarakat.

186) Proses serah terima barang hibah sebagai hasil peran serta masyarakat dalam pembangunan berupa :

a) Mesin dan instalasi Sea Water Reverse Orsmosis (SWRO) di Pulau Karya.

b) Sea Water Reverse Orsmosis (SWRO) di Pulau Untung Jawa.

c) Penyediaan 100 rumah ikan di Pulau Panggang.

d) Penyediaan alat pemotong kerupuk bagi industri rumah tangga dan pencacah plastik di Pulau Pramuka dan Pulau Panggang.

e) Pembangunan Sentra UMKM di Pulau Pramuka.

f) Pembangunan lokasi pendederan ikan kerapu di Pulau Tidung Besar.

20. URUSAN KETAHANAN PANGAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan Ketahanan Pangan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp52.554.334.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp45.032.959.244,- atau 85.69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/ Pemasaran

a) Penyelenggaraan Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) berupa terlaksananya pasar murah menjelang hari besar keagamaan nasional.

b) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan berupa tersedianya laporan pasokan pangan DKI Jakarta sebanyak 3 laporan.

c) Peningkatan Sarana Materi Penyuluhan dan Penyusunan Program berupa terlaksananya peningkatan sarana dan materi penyuluhan di 6 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

d) Peningkatan Demonstrasi Plot Pertanian Terpadu dan Penyusunan Program Penyuluhan.

e) Peningkatan Sarana dan Penyusunan Program Penyuluhan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

a) Monitoring dan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu berupa termonitornya keamanan pangan terpadu di pasar swalayan dan pasar tradisional di 149 pasar pada 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta

b) Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling sebanyak 6 buah.

c) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium.

d) Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/ Akreditasi ISO/ SNI sesuai Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO SNI 17025:2008, 17025:2008

3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan

a) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 49 alat uji.

b) Penerapan Sistem Mutu SNI 17020, SNI 17025 dan SNI 17065 Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 14 parameter.

c) *Survailance* Komite Akreditasi Nasional (KAN) 17020 dan 17025 Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 2 sistem mutu.

d) Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 28 alat.

e) Pengadaan Media dan Kemikalia Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 225 jenis

f) Pengadaan Sarana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 58 jenis

4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hewan (kesmavet)

a) Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Daging pada Hari Besar Keagamaan di 5 wilayah kota administrasi.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Ketahanan Pangan, antara lain :

1) Dipertahankannya jumlah ketersediaan pangan yaitu:

a) Persentase pasokan beras sebesar 100 persen (Ketersediaan beras per hari 3.185 ton, sedangkan kebutuhan beras per hari 2.712 ton).

b) Persentase pasokan daging sebesar 100 persen (Ketersediaan daging sapi per hari 242 ton, sedangkan kebutuhan daging sapi per hari 165 ton).

c) Persentase pasokan ikan sebesar 100 persen (Ketersediaan ikan per hari 3.326 ton, sedangkan kebutuhan ikan per hari 1.013 ton).

d) Persentase pasokan ayam sebesar 100 persen (Ketersediaan ayam per hari 2.290 ton, sedangkan kebutuhan ayam per hari 933 ton).

e) Persentase pasokan telor dan susu sebesar 100 persen (Ketersediaan telur per hari 1.593 ton, sedangkan kebutuhan telur per hari 268 ton dan ketersediaan susu per hari 593 ton, sedangkan kebutuhan susu per hari 165 ton).

f) Persentase pasokan sayur mayur sebesar 100 persen (Ketersediaan sayur mayur per hari 1.698 ton, sedangkan kebutuhan sayur mayur per hari 1.687 ton).

g) Persentase pasokan buah-buahan sebesar 100 persen (Ketersediaan buah-buahan per hari 1.534 ton, sedangkan kebutuhan buah-buahan per hari 1.177 ton).

2) Dipertahankannya persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya lebih dari sebesar 90 persen baik/ aman.
3) Dipertahankannya jumlah sertifikat hasil uji tanaman pangan dan hortikultura yang dikeluarkan lebih dari 1.900 sertifikat.
4) Meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji perikanan yang dikeluarkan sebanyak 29.052 sertifikat pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 10.991 sertifikat pada tahun 2015.
5) Meningkatnya persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang berbahaya sebesar 99,88 persen baik/ aman pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebesar 93 persen baik/ aman pada tahun 2015.
6) Meningkatnya jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan sebanyak 29.052 sertifikat pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 15.768 sertifikat pada tahun 2015
7) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan terpadu pada 149 pasar tradisional yang dilaksanakan sebanyak 9 kali dalam setahun.
8) Meningkatnya penjualan daging subsidi sebanyak 101.999 kg daging sapi dan 54.865 ekor ayam pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 30.000 kg daging sapi dan 14.500 ekor ayam pada tahun 2015.
9) Terlaksananya pengadaan mobil laboratorium keliling sebanyak 6 buah mobil.
10) Terselesaikannya penerbitan 50 sertifikat kesehatan hewan, 78 rekomendasi impor daging/ rekomendasi teknis kesmavet, 136 sertifikat nomor kontrol veteriner dan 16 rekomendasi instalasi karantina produk hewan.
11) Terlaksananya pengawasan kesehatan hewan ternak potong di RPH/ RPHU pada saat hari besar keagamaan.

    Terlaksananya pengawasan pemotongan hewan ternak potong di

RPH/ RPHU pada saat hari besar keagamaan.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp309.967.843.791,- dengan total penyerapan sebesar Rp278.829.807.281 atau 89.95%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

a) Pekan Inovasi/ Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional/ Kemitraan/ Event Lainnya.

b) Penyusunan Juklak/ Juknis & Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan TTG.

c) Peningkatan Sanitasi Masyarakat Melalui Program Sanimas IDB.

d) TOT Kewirausahaan Berbasis TTG dan Pembuatan Profil TTG.

e) Pengembangan dan Pemanfaatan TTG bagi Usaha Produktif Masyarakat, Posyantek dan Wartek.

f) Pengembangan Model dan Kepesertaan Kegiatan Hasil Kreasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan.

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

a) Pengembangan Konsep Pemberdayaan Berbasis Masyarakat di Kawasan Kumuh Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hidup.

b) Percepatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemisikinan dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan Pemberdayaan Berbasis Komunitas.

c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Melalui Peran Lembaga Kemasyarakatan.
d) Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
e) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kader Poktan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
f) Pendampingan Kader dan Poktan Dalam Pengembangan Penggerakan Pemberdayaan Keluarga.
g) Penguatan Kelembagaan dan Penyebaran Informasi PKK.
h) Pertemuan Kader dan Pengurus Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :

1) Meningkatnya Jenis TTG yang dikembangkan dan dimasyarakatkan sebanyak 15 jenis pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 13 jenis pada tahun 2015.
2) Meningkatnya Persentase Masyarakat Pengguna TTG Yang Mandiri sebesar 70 persen pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebesar 65 persen pada tahun 2015.
3) Meningkatnya Cakupan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan yang Aktif Terlibat dalam Penggerakan Kegiatan Gotong Royong sebanyak 2.672 anggota pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 1.473 orang pada tahun 2015.

22. URUSAN STATISTIK

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan statistik, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp.345.215.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp.235.541.600,- atau 68.23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Program Statistik Daerah

Penyelenggaraan HackJak 2016.

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Statistik, antara lain:

Telah diselenggarakan rangkaian acara HackJak yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempromosikan data terbuka milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (*data.jakarta.go.id*) yang dikompetisikan ke dalam tiga kategori, yakni kategori penulisan, pembuatan video dan pembuatan infografis. HackJak menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan partsipasi masyarakat dan lembaga masyarakat sipil (*civil society organization*/ CSO) dalam usaha keterbukaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

23. URUSAN KEARSIPAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan kearsipan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp3.476.720.125,- dengan penyerapan sebesar Rp1.930.181.210,- atau 55.52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) **Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah**
   a) Pengolahan Arsip/Dokumen
   b) Pengadaan Sistem Pengamanan Gedung Depo Arsip Terpadu (Security Building)
   c) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip/Dokumen
   d) Pengadaan Scanner untuk Digitalisasi Arsip
   e) Perekaman Peristiwa/Fenomena di Provinsi DKI Jakarta
2) **Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah**
   a) Alih Media Arsip Konvensional Menjadi Digital
3) **Program Peningkatan Pelayanan Arsip**

a) Pengadaan Cetakan Map dan Boks Arsip

b) Penataan Arsip pada Depo Arsip

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan kearsipan, antara lain:

1) Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan sebanyak 174.466 boks pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 161.230 boks pada tahun 2015.
2) Meningkatnya jumlah peristiwa/ tokoh/ pengkisah yang diliput/ diwawancara sebanyak 1.200 pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 1.198 pada tahun 2015.
3) Tersedianya jumlah gedung/ depo arsip yang ada sebanyak 6 depo.
4) Tersedianya jumlah ruang dan media simpan arsip yang memenuhi standar sebanyak 609 ruang dan media terdiri dari 31 ruang dan 578 media simpan arsip.
5) Meningkatnya cakupan pelayanan kearsipan bagi lembaga/ instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat sebanyak 4.878 SKPD/ UKPD pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 2.413 SKPD/ UKPD pada tahun 2015.

24. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan komunikasi dan informatika, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp265.603.030.390,- dengan total penyerapan sebesar Rp227.131.576.031,- atau 85,52%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

a) Penataan Konektifitas Jaringan CCTV

b) *Tuning* Aplikasi Interkoneksi

c) Pemeliharaan *Mainframe*

d) Pemeliharaan *Dumb Terminal* dan Suku Cadangnya

e) Pemeliharaan Server

f) Pemeliharaan RCU, *Multiplexer* dan Suku Cadangnya

g) Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD

h) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Asset

i) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Absensi

j) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian

k) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Kinerja

l) Penataan dan Pengembangan Aplikasi PTSP

2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

a) Respon Opini Publik

b) Pengelolaan Data Informasi dan Pengembangan Portal Open Data Jakarta

c) Pengelolaan dan Pengembangan Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta www.beritajakarta.com

d) Pengelolaan dan Pengembangan Portal Resmi Jakarta

e) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Jakarta Smart City

f) Dokumentasi dan Penyiapan Materi Kehumasan

g) Pengembangan Infrastruktur TIK Aplikasi Jakarta Smart City

h) Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Melalui Media Tercetak dan Media Luar Ruang

i) Manajemen Komunikasi Jejaring Kehumasan

j) Penelitian dan Pengembangan Jakarta *Smart City*

k) Partisipasi Jakarta *Smart City* Pada Pameran

l) Pengelolaan Kliping Digital Berita Media Cetak

m) Pengelolaan *Wall Display Monitoring* Berita TV

n) Monitoring dan Analis Berita di Media Online dan Media Sosial *Server Real Time*

3) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

a) Sewa *Link* Jaringan Komunikasi WAN dan *Bandwidth*

Internet

b) Pengelolaan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data

c) Penataan Jaringan LAN

d) Pemeliharaan Perangkat Jaringan

e) Sewa *Backup Bandwidth* Internet

f) Pengelolaan Data Center

g) *Tuning Relation Database Management System* (RDBMS)

h) Annual Fee (ATS) Oracle

i) Pengadaan Lisensi Oracle Enterprise

j) Lisensi Email Lotus Note

k) Sewa Perangkat Lunak *Mainframe* dan Dukungan Pemeliharaan

l) Pengadaan Perangkat *Teleconference Sametime*

m) Penyediaan Fasilitas DRC

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

a) Pemeliharan PABX

b) Pengadaan Suku Cadang HT dan RIG Radio *Trunking*

c) Pemeliharaan Radio *Trunking*

d) Sewa Lokasi BTS *Trunking*

5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik

a) Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) serta Pelaksanaan e-Procurement Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya

b) Pengembangan Infrastruktur LPSE

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain:

1) Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi pada pelayanan publik seluruh SKPD berupa integrasi sistem informasi perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan pengelolaan pembangunan.

2) Meningkatnya kualitas layanan data dan informasi publik melalui

penyediaan sarana informasi kepada masyarakat berupa media cetak, media elektronik, media luar ruang, website dan media sosial.

3) Meningkatnya jumlah titik jaringan wifi dengan kecepatan up to 10 Mbps yang terbangun sebanyak 266 titik pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 216 titik pada tahun 2015.
4) Terpeliharanya titik lokasi jaringan komunikasi (*Fiber Optic*) yang terhubung dan berfungsi sebanyak 432 titik.
5) Berfungsinya *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* (DRC).
6) Meningkatnya jumlah pengguna sistem pengadaan barang/ jasa secara elektronik yang terlatih sebanyak 1.250 orang pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 970 orang pada tahun 2015.
7) Berfungsinya aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbasis teknologi informasi.
8) Terlaksananya penataan dan pengembangan Aplikasi e-Absensi dan e-TKD, Aplikasi PTSP, Aplikasi SIPKD serta Sistem E-Kinerja Pendukung Kebijakan Remunerasi.
9) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang Jakarta *Smart City*
10) Penyebarluasan informasi melalui media cetak dan media online sebanyak 26.957 berita.
11) Tersedianya data dan informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui website “www.jakarta.go.id” dan www.beritajakarta.com.
12) Tersedianya saluran aspirasi atau keluhan warga Jakarta melalui beberapa media (*channel*) seperti media cetak, elektronik serta media jejaring sosial.
13) Meningkatnya jumlah aspirasi yang masuk sebanyak 537.667 pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 13.148 pada tahun 2015.
14) Meningkatnya jumlah respon terhadap aspirasi yang masuk sebanyak 81 persen pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 55 persen pada tahun 2015.
15) Terlaksananya pengadaan barang dan jasa secara elektronik

dengan sistem nasional.

25. URUSAN PERPUSTAKAAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan perpustakaan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp119.457.163.086,- dengan total penyerapan sebesar Rp110.004.022.773,- atau 92.09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1) Program pengembangan Budaya Baca

a) Hari Anak Jakarta Membaca
b) Pemilihan Abang dan None Buku
c) Layanan *Story Telling* Kota Layak Anak (KLA)/ Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
d) Wajib Kunjung Perpustakaan

2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

a) Belanja Surat Kabar/ Majalah
b) Pengadaan Buku Digital
c) Pengelolaan Layanan Perpustakaan Keliling
d) Layanan Akses Internet Bebas (WiFi/ Hotspot Area) untuk Pemustaka

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

a) Pengadaan Tablet untuk Pemanfaatan Koleksi iJakarta
b) Pengadaan Supplies Bahan Pustaka
c) Pengadaan Buku untuk RPTRA

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Perpustakaan, antara lain:

1) Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 4.192.005 orang pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 3.006.311 orang pada tahun 2015. Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan ini terdiri dari 1.035.452 pengunjung perpustakaan konvensional dan 150.242 pengunjung

(downloader) iJakarta.

2) Meningkatnya jumlah perpustakaan berbasis masyarakat (TBM) yang dibina sebanyak 391 TBM/ Perpustakaan Masyarakat pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 254 TBM/ Perpustakaan Masyarakat pada tahun 2015.
3) Tersedianya lokasi titik layanan perpustakaan keliling sebanyak 305 titik layanan.
4) Tersedianya jumlah perpustakaan berstandar nasional sebanyak 6 perpustakaan.
5) Tersedianya perpustakaan kecamatan dan kelurahan yang berfungsi optimal sebanyak 16 perpustakaan.
6) Tersedianya koleksi perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sebanyak 835.941 eksemplar atau 396.679 judul.
7) Meningkatnya jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pembinaan perpustakaan (pelatihan/ bimbingan teknis/ *workshop*) sebanyak 2.762 peserta sampai dengan tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 2.380 peserta pada tahun 2015.

26. URUSAN PERTANIAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan pertanian, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp49.880.349.896,- dengan total penyerapan sebesar Rp38.697.200.288,- atau 77.58%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

a) Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

a) Promosi Bidang Peternakan kepada Anak Sekolah Dasar berupa pemberian konsumsi protein hewani murid SD di 6 sekolah sebanyak 3.100 paket

b) Pengadaan Pakan Ternak Sapi Perah, Ternak Kambing, Ternak Unggas Pangan, Unggas Kesayangan, Ternak Harapan dan Ternak Itik selama 12 bulan

3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis

a) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza (AI) berupa sweeping unggas pangan di 5 wilayah kota administrasi.

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura

a) Pembinaan Saka Taruna Bumi yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2016 di SMA/K Lamaholot Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat dan diikuti oleh 75 orang siswa (pramuka penegak) se-Jakarta Barat

b) Pengembangan Pertanian Perkotaan berupa 150 gang hijau yang tersebar di 6 wilayah kota/ kabupaten administrasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pertanian, antara lain :

1) Dipertahankannya jumlah promosi dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura, hasil perikanan dan produk hewan diatas 10 kali.
2) Terselenggaranya pemasaran bunga, tanaman hias dan tanaman produktif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3) Dipertahankannya omset pemasaran Daun Pelengkap, Bunga Potong, Bunga Rampai, Bibit Tanaman Anggrek, Tanaman Hias, Bibit Tanaman Buah diatas Rp. 85 miliar per tahun.
4) Teratasinya penyebaran zoonosis berupa 6 kasus Avian Influenza dan 1 kasus Brucellosis.
5) Dipertahankannya jumlah kasus penyakit anthrax sebanyak 0 kasus.
6) Terlaksananya pemantauan kesehatan daging hewan yang beredar di pasar.
7) Dipertahankannya jumlah produksi tanaman pangan dan

hortikultura terdiri dari padi diatas 6 ribu ton, buah-buahan diatas 150 ribu bibit dan tanaman hias diatas 9 ribu bibit.

8) Meningkatnya produksi tanaman holtikultura ramah lingkungan berupa sayuran sebanyak 24.619 ton, meningkat dari sebelumnya sebanyak 15.315 ton pada tahun 2015.

9) Dipertahankannya produksi tanaman holtikultura ramah lingkungan berupa buah-buahan diatas 9 ribu ton.

27. URUSAN KEHUTANAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan kehutananpada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp296.612.417,- dengan total penyerapan sebesar Rp288.182.700,- atau 97.16%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan

1) Pengadaan Alat Ukur dan Pengujian Hasil Hutan
2) Pemeliharaan Mesin Pengawet Kayu
3) Pemeliharaan Mesin Pengolah Kayu
4) Pengadaan Perkakas Bengkel Perkayuan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kehutanan, antara lain :

1) Dipertahankannya Jakarta bebas dari pelanggaran peredaran hasil hutan.
2) Dipertahankannya pelayanan jasa perkayuan diatas 1,2 ribu m3
3) Terlaksananya patroli hutan kota sebanyak 12 kali.

28. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan energi dan sumber daya mineral, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp1.458.429.027.115,- dengan total penyerapan sebesar Rp1.234.871.559.332,- atau 84.67%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) **Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral**
   a) Perbaikan/ Penggantian (*Service* Besar) Genset di Pulau Sebira
   b) Penyediaan dan Pendistribusian BBM Untuk Pulau Sabira
2) **Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota**
   a) Pengadaan Pencahayaan Kota Wilayah Jakarta
   b) Pembayaran Rekening PJU
3) **Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan**
   a) Pembangunan Stasiun Pemantau Penurunan Tanah Dengan Sistem Ekstensometer

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain :

1) Terlaksananya pemasangan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Jalan Protokol, kolektor, lingkungan dan gang/ MHT sebanyak 89.417 titik dengan teknologi lampu PJU LED *Smart System*.
2) Terlaksananya normalisasi jaringan PJU untuk meterisasi sebanyak 493 kWh meter.
3) Terlaksananya Pembangunan Stasiun Pemantau Penurunan Tanah dengan sistem Ekstensometer pada 1 lokasi dengan 3 titik pengeboran dengan kedalaman 300 meter (1 titik) dan 150 meter (2 titik)
4) Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan jaringan pipa gas bawah tanah melalui jalur pipa gas Pulogebang-Kampung Melayu sepanjang 12 km oleh Pertagas.
5) Beroperasinya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas sebanyak 31 unit berupa SPBG *Online*, *Mobile Refueling Unit* (MRU) dan

SPBG *Eco-Station*.

6) Terlaksananya koordinasi pembangunan dan pengembangan pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero), antara lain:
   a) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 (2×800 MW) sebagai penambahan kapasitas PLTGU Muara Tawar
   b) Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 2 Priok (1×800 MW) sebagai Penambahan kapasitas PLTGU Muara Karang (1×500 MW) dan penambahan PLTU Lontar (1×315 MW)
   c) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)/ Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Duri Kosambi-Kembangan-Petukangan
   d) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Duri Kosambi-Muara Tawar
   e) Perluasan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Kembangan
   f) Gardu Induk Gas *Insulated Switchgear* (GIS) 150 kV Daan Mogot
   g) Gardu Induk Gas *Insulated Switchgear* (GIS) 150 kV Semanggi Timur
   h) Gardu Induk Gas *Insulated Switchgear* (GIS) 150 kV Semanggi Barat
   i) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Kembangan-Kembangan II (GIS)
   j) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Danayasa-Senayan
   k) Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV Cawang Lama
7) Terlaksananya keberfungsian pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 108,7 KWP berupa PJU Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di 5 walikota, 7 pulau Kep. Seribu, bantaran Banjir Kanal Timur (BKT), PLTS terpusat dan

Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Pulau Karya.

29. URUSAN PARIWISATA

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan pariwisata, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp74.668.171.210,- dengan total penyerapan sebesar Rp40.571.462.818 atau 54.34%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata**
   a) Pelaksanaan Kegiatan The 15th Council of Promotion for Tourism in Asia (CPTA) Meeting and Exhibition (Tuan Rumah)
   b) Penyediaan jasa registrasi keanggotaan organisasi kepariwisataan nasional/ internasional
2. **Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**
   a) Pemilihan Abang dan None Jakarta
   b) Pemberdayaan Abang dan None Jakarta
   c) Pergelaran Kesenian Terpilih
   d) Festival Teater Anak
   e) Pagelaran Seni di Ruang Publik pada Association for International Sport for All (TAFISA) Games
3. **Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata**
   a) Tournament Golf Indonesia Master
   b) Penyelenggaraan *Familiarization Trip*
4. **Program Peningkatan Industri Kepariwisataan**
   a) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Utara
   b) Monitoring Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Malam Tahun Baru
   c) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta

Barat

d) Pengawasan Industri Pariwisata Jakarta Timur

5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

a) Pembangunan Mushola Graha Wisata TMII

b) Pemeliharaan Gedung Graha Wisata TMII

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pariwisata, antara lain :

1) Terlaksananya pelatihan untuk SDM Profesi Kepariwisataan sebanyak 570 peserta yakni : Pelatihan Bahasa Inggris bagi Kepemanduan Museum, Pelatihan Tenaga Kerja bidang Pramuwisata Muda 1&2, bidang Waiter/ Waiters, bidang Travel Consultant, bidang Juru Masak, bidang Security Hotel dan Cafe, bidang Life Guard, bidang Room Attendant, bidang Receptionist, bidang MICE 1&2, bidang Taksi 1&2, bidang Pramuwisata Madya, bidang Porter Bandara, bidang Head Waiter, bidang Bell Boy, bidang Bartender, bidang Tour Leader, bidang Peramu Kopi (Barista) Hotel dan Cafe, bidang Spa

2) Meningkatnya jumlah kemitraan dengan lembaga kepariwisataan Nasional dan Internasional sebanyak 3 lembaga/ Organisasi Kepariwisataan Nasional/ Internasional terdiri dari : Keanggotaan International Congrees and Convention Association (ICCA), Tourism Promotion Organization (TPO) dan International Association of Golf Tour Operator (IAGTO).

3) Terselenggaranya 34 event pariwisata unggulan Nasional dan Internasional yakni : Pemilihan Abang dan None Jakarta, Pergelaran Kesenian Terpilih, Festival Teater Anak, Pegelaran Seni di Ruang Publik pada Association for Internasional Sport For All (Tafisa) Games, Penyelenggaraan Atraksi Kesenian Rutin Anjungan Provinsi DKI Jakarta, Pergelaran Atraksi Kesenian Rutin Anjungan Provinsi DKI Jakarta, Pergelaran Atraksi Kesenian Rutin Sangkrini Jaya Raya, Festival Penyanyi Keroncong, Penyelenggaraan Kuliner dan Bazar Ibu-Ibu PKK Se-Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Festival Penyanyi Gambang Kromong,

Penyelenggaraan Parade Teater, Penyelenggaraan Parade Tari Nusantara, Penyelenggaraan Parade Musik Tradisi, Penyelenggaraan Parade Lagu Daerah, Penyelenggaraan Kirap Karnaval Keprajuritan Nusantara, Festival Pencak Silat, Atraksi Pekan HUT TMII, Atraksi Pekan Liburan Sekolah, Atraksi Pekan Lebaran/ Idul Fitri, Atraksi Pekan Desember, Penyelenggaraan Event Pawai adat DKI Jakarta, Festival Nasyid, Marawis, Qasidah dan Hadroh Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Festival Seni Teater dan Seni Sastra Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pegelaran Kesenian Instansi, Wajib Kunjung Museum dan Perkampungan Budaya Betawi bagi Pelajar, Gelar Potensi Budaya Jakarta Utara, Wajib Kunjung ke 12 Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara, Festival Muharam Pemberdayaan Kelompok Sadar Wisata Jakarta Barat, Pangawasan dan Evaluasi Cagar Budaya, Apresiasi dan Kompetisi Seni bagi Pelajar tingklat Kecamatan dan Kota di Jakarta Barat, Peningkatan Potensi Seni Budaya Lokal (Marawis, Rebana, Qasidah dan Hadroh) bagi Penghuni Rumah Susun, Perwujudan Sapta Pesona dan Sadar Wisata di Kalanagan Industri Pariwisata Jakarta Utara, Festival Teater, Apresiasi Seni bagi Pelajar tingkat Kota Jakarta Utara tahun 2016, Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

4) Meningkatnya jumlah event pariwisata unggulan Nasional dan Internasional sebanyak 34 event.
5) Meningkatnya jumlah kunjungan wisman sebanyak 2.512.005 wisman pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 2.377.226 wisman pada tahun 2015.
6) Dipertahankannya jumlah kunjungan wisnus diatas 27 juta wisnus.
7) Meningkatnya jumlah kapasitas dan fasilitasi MICE pada 3 (tiga) lokasi yakni Jakarta Convention Center (JCC), Ciputra World Jakarta dan Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran.
8) Terselenggaranya event unggulan pariwisata yakni :

Familiarization Trip, Pemilihan Abang dan None Jakarta, Pergelaran Kesenian Terpilih, Pergelaran Seni di Ruang Publik pada Association for International Sport for All (TAFISA) Games

30. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan kelautan dan perikanan, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp445.902.826.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp359.185.390.435,- atau 80.55%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Peningkatan dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Berkelanjutan

a) Penyelesaian Pematangan Tanah Untuk Lahan dan Sarana Prasarana Unit Pengolah Ikan (UPI) Muara Angke

b) Pembangunan Tanggul Sisi Timur, Barat dan Utara Muara Angke

c) Penyelesaian Pengembangan Sarana Prasarana Dermaga Tipe T Muara Angke

d) Penyelesaian Pembangunan Instalasi Air untuk Wilayah UPI dan Pasar Grosir di Muara Angke.

e) Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan

f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berupa pengadaan benih ikan kerapu macan sebanyak 9.296 ekor berikut sarana prasarana penunjang untuk pembenihan tersebut.

2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

a) Pengawasan Sumberdaya Kelautan

b) Pengawasan Sumber Daya Perikanan

c) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

3) **Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

a) Safari Kampanye GEMARIKAN

b) Pengawasan Mutu di Unit Pengolah Ikan (UPI)

c) Rehab Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan di Muara Angke

d) Peningkatan Pembangunan Kios Ikan Hias Taman Anggrek Ragunan

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain :

1) Meningkatnya jumlah produksi perikanan berupa ikan hasil tangkap sebesar 4.978.139 ton pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebesar 213.615 ton pada tahun 2015, dan ikan hasil budidaya sebesar 21.624.385 ton pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebesar 7.959,32 ton pada tahun 2015.
2) Dipertahankannya jumlah produksi perikanan berupa ikan hias diatas 22 juta ekor.
3) Meningkatnya jumlah benih/ bibit yang dihasilkan dalam mendukung kegiatan produksi perikanan sebanyak 163.166.154 ekor pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 6.124.125 ekor pada tahun 2015.
4) Meningkatnya penyelesaian penanganan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya perikanan sebanyak 32 pelangaran pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak sebanyak 26 pelangaran pada tahun 2015.
5) Dipertahankannya volume ekspor hasil perikanan diatas 85 ribu ton.
6) Dipertahankannya volume produk olahan hasil perikanan diatas 280 ribu ton.

31. URUSAN PERDAGANGAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan perdagangan, pada tahun 2016 dialokasikan APBDP sebesar Rp3.927.046.476,- dengan total penyerapan sebesar Rp2.864.781.632,- atau 72.95%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

a) Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016 .
b) Pengawasan Barang Beredar di Jakarta Pusat.
c) Pameran Inacraft 2016.

2) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

a) Partisipasi UKM Pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2016
b) Pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang beredar di Pasar
c) Pengawasan minuman berakhohol di Provinsi DKI Jakarta
d) Pengawasan SNI

3) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian

a) Pengawasan Kemetrologian
b) Penyediaan Media Uji Kemetrologian (Kerosine Non Subsidi)
c) Peningkatan Standarisasi Kemetrologian
d) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perdagangan, antara lain :

1) Terlaksananya partisipasi pada Pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016 dengan mengikutsertakan sebanyak 18 UKM dalam kegiatan ini.
2) Terlaksananya pengawasan barang beredar di Jakarta Pusat sebanyak 3 kali.
3) Terlaksananya pameran Inacraft 2016 dengan mengikutsertakan sebanyak 4 UKM dalam kegiatan ini.
4) Terlaksananya pengawasan barang dan/ atau jasa yang berada di

130 lokasi mencakup, swalayan, minimarket, outlet-outlet di mall, toko kelontong, pengecer minuman beralkohol dan pasar tradisional yang tersebar di lima wilayah Provinsi DKI Jakarta

5) Terlaksananya pengawasan minuman berakohol di 62 cafe/ restoran di Provinsi DKI Jakarta
6) Terlaksananya pengawasan kemetrologian di 959 lokasi, mencakup swalayan, minimarket, apotik, perusahaan ekspedisi, pasar, SPBU, SPBE, apartemen dan perusahaan yang menggunakan jembatan timbang.
7) Tersedianya media uji kemetrologian (kerosine non subsidi) sebanyak 10.000 liter kerosine.
8) Terlaksananya peningkatan standarisasi kemetrologian terhadap 7 instalasi.
9) Terlaksananya pelaksanaan sidang tera ulang pasar di 118 pasar.
10) Terlaksananya penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk ekspor sebanyak 261.393 SKA.
11) Dipertahankannya ekspor produk DKI Jakarta diatas 10 juta US$
12) Terlaksananya pemahaman kemetrologian bagi masyarakat sebanyak 102.302 orang

32. URUSAN PERINDUSTRIAN

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi

Untuk urusan perindustrian, pada tahun 2016 dialokasikan APBD sebesar Rp16.868.212.232,- dengan total penyerapan sebesar Rp12.760.438.218,- atau 75.65%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut :

1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

a) Penyelenggaraan IKM Expo
b) Pengendalian dan Pengawasan Industri

2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

a) Penataan dan Pengembangan Sentra IKM

b) Penumbuhan dan Pengembangan IKM DKI Jakarta

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

a) Pengadaan alat laboratorium

b) Pengadaan Alat Uji Laboratorium UIKT

Adapun hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan perindustrian, antara lain :

1) Terlaksananya pembinaan terhadap 25 industri perbengkelan yang berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan.
2) Meningkatnya jumlah peralatan pengujian produk industri yang memenuhi standar sebanyak 256 unit pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 151 unit pada tahun 2015.
3) Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan terhadap sentra industri dan kelompok usaha industri di Sentra Ciracas, Rusun Komarudin, Rusun Pesakih dan Rawa Bebek
4) Meningkatnya jumlah produk industri yang memenuhi standar sebanyak 6.090 produk pada tahun 2016, meningkat dari sebelumnya sebanyak 3.729 produk pada tahun 2015.

BAB III

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka pada Tahun 2012 Pemerintah DKI Jakarta telah menganut anggaran defisit.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 yang ditargetkan sebesar Rp57.161.248.465.732,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 tercatat sebesar Rp53.784.706.312.513,00 atau 94,09%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak dapat diserap sebesar Rp3.376.542.153.219,00 atau 5,91%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp44.209.238.168.583,00,

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp9.575.468.143.930,00 atau 21,66%

3.1.2 Belanja Daerah Dan Transfer

Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp57.365.040.315.366,00. Realisasi Belanja Daerah Dan Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp47.128.810.245.854,00 atau 82,16%. Dengan demikian dari anggaran belanja daerah dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.236.230.069.512,00 atau 17,84%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat Rp43.031.322.947.557,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Dan Transfer Tahun Anggaran 2016 naik sebesar Rp4.097.487.298.297,00. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Belanja Daerah Dan Transfer Tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja dan transfer mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 mengalami surplus. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp53.784.706.312.513,00 sedangkan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp47.128.810.245.854,00 sehingga kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2016 mengalami surplus sebesar Rp6.655.896.066.659,00.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2015 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 sebesar Rp4.933.519.451.750,00 dan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat sebesar Rp335.756.625.269,00 serta terdapat Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman di Tahun 2016 sebesar Rp338.475.881.319,00. Sehingga total realisasi Pembiayaan dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.607.751.958.338,00 atau 97,55%. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.557.358.688.274,00 atau 82,19% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.544.998.000.000,00. Dengan demikian realisasi Pembiayaan Netto Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.050.393.270.064,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan Dana Cadangan terealisasi pada tahun 2016 sebesar Rp 81.575.989.831,00 yang diperoleh dari jasa giro atas pengelolaan Dana Cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

   Target yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada anggaran tahun 2016 sebesar Rp 5.544.998.000.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.475.782.698.443,00 atau 80,72 %.

3. Pembayaran Pokok Utang

   Target dan realisasi yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang pada anggaran tahun 2016 tercatat nihil. Dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.084.644.411,00.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Pendapatan yang tidak mencapai target di Tahun Anggaran 2016	Rp	3.376.542.153.219,00
2. Sisa anggaran belanja dan transfer yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016	Rp	10.236.230.069.512,00
3. Pembiayaan yang melebihi target	Rp	846.601.420.430,00

Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2016 tercatat sebesar Rp7.706.289.336.723,00.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut di atas dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD dalam tabel 3.1.

TABEL 3.1
RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2016	Realisasi 2016	Δ%	Realisasi 2015
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	**PENDAPATAN**	**57.161.248.465.732,00**	**53.784.706.312.513,00**	**94,09**	**44.209.238.168.583,00**
1.1	Pendapatan Asli Daerah	38.501.784.839.738,00	36.888.017.587.716,00	95,81	33.686.176.815.708,00
1.2	Pendapatan Transfer	15.990.368.025.994,00	15.271.661.452.714,00	95,51	8.642.378.398.086,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.669.095.600.000,00	1.625.027.272.083,00	60,88	1.880.682.954.789,00
2	**BELANJA & TRANSFER**	**57.365.040.315.366,00**	**47.128.810.245.854,00**	**82,16**	**43.031.322.947.557,00**
2.1	Belanja Operasi	44.414.721.806.354,00	37.952.281.887.604,00	85,45	32.415.276.659.037,00
2.2	Belanja Modal	12.626.147.305.899,00	8.965.470.014.533,00	71,01	10.244.016.709.208,00
2.3	Belanja Tak Terduga	108.411.688.403,00	744.309.687,00	0,69	877.074.802,00
2.4	Transfer - Bantuan Keuangan	215.759.514.710,00	210.314.034.030,00	97.48	371.152.504.510,00
Surplus/Defisit		**(203.791.849.634,00)**	**6.655.896.066.659,00**		**1.177.915.221.026,00**
3	**PEMBIAYAAN**	**203.791.849.634**	**1.050.393.270.064,00**		**3.755.604.230.724,00**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	5.748.789.849.634,00	5.607.751.958.338,00	97,55	9.209.781.909.639,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	5.544.998.000.000,00	4.557.358.688.274,00	82,19	5.454.177.678.915,00
4	**SiLPA**		**7.706.289.336.723,00**		**4.933.519.451.750,00**

BAB IV

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan etitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang merupakan revisi dari Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional (LO);
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 740 SKPD/UKPD. Selanjutnya, sejumlah 740 Laporan Keuangan SKPD digabung menjadi 53 entitas akuntansi penggabung. Laporan Keuangan SKPD entitas akuntansi penggabung merupakan gabungan dari laporan keuangan UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas. Khusus untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas juga menggabungkan Laporan Keuangan BLUD Puskesmas. Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1767 Tahun 2016 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD dengan SKPD lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. SKPD menyusun laporan keuangan

dengan menggabungkan seluruh laporan keuangan UKPD yang secara organisatoris berada dibawahnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara

intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

4.3.1 Pendapatan

4.3.1.1 Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pengakuan Pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan kas yang telah diterima pada RKUD.
2. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
3. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah.
5. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima. Pendapatan-LRA yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadi pendapatan-LRA.

Pendapatan-LRA dikelompokan atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
b. Pendapatan Transfer,
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan (transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana alokasi umum dan Dana alokasi khusus. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek yang mencakup bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas objek dana alokasi umum.Jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup Hibah berasal dari pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, Dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam, Dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, danBantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

4.3.1.2 Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisai, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD/SKRD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan dan sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemprov DKI Jakarta timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat:

1. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
2. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
3. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
2. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka:
   i. Terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.
   ii. Ada pemberi hibah mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat dana hibah/barang tersebut diterima.

Selain disajikan di Laporan Operasional, pendapatan hibah juga tetap harus disajikan di Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan basis kas, hal tersebut karena Laporan Realisasi Anggaran merupakan *statutary report*. Untuk pendapatan hibah langsung yang diterima SKPD dan telah memenuhi kriteria pengakuan Pendapatan-LO, maka pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima oleh SKPD penerima.

Pengeluaran hibah selain disajikan di Laporan Realisasi Anggaran sebagai belanja hibah, juga disajikan sebagai beban hibah di Laporan Operasional. Beban hibah adalah beban pemerintah daerah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Pengakuan beban pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

a. Dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
b. Dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak. Sedangkan pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima, dan jika data tersebut tidak dapat diperoleh, maka dicatat berdasarkan nilai wajar.

Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk barang/jasa dinilai dengan mata uang rupiah pada saat serah terima barang/jasa untuk dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dalam bentuk surat berharga dinilai dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang disepakati pada saat serah terima oleh Pemberi Hibah dan Pemerintah untuk dicatat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari RKUD, Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan atau UP/GU/TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran (SPJ) tersebut disahkan oleh PA/KPA, dan Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum dan kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi ***seluruh kriteria*** sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan

d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 300.000 300.000 300.000 ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi ***seluruh kriteria huruf a, b dan c*** sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
   3) bertambah volume, dan/atau
   4) bertambah kapasitas produktivitas.

b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	**Tanah**	1
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
3	**Gedung dan Bangunan**, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 300.000 300.000 300.000 ekstra komtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	1

Aset tetap yang mengalami overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studio dan Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

Alat Keamanan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam Renovasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3

		>75% s.d.100%	4
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi /Overhaul	*>0% s.d. 25%*	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang "pecah belah" seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukkannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

4.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat :

a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan,berlalunya waktu. Contoh adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.
b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah) dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak

lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal badan layanan umum, beban diakui sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO : beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, Beban transfer : Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah, Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah, Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa, Beban Transfer Bantuan, Beban Transfer Dana Otonomi Khusus, Defisit Non Operasional, Beban Luar Biasa.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015,dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk hutan, sumber daya alam yang dapat diperbaharui *(regenerative natural resources)*, kandungan pertambangan, eksplorasi, penggalian mineral, minyak dan gas alam.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
d. Persediaan dicatat sebesar:
    1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
    2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
    3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
   1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
   2) berupa kas dan setara kas.

   Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain investasi dalam saham yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi dalam deposito yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak daerah, piutang retribusi, Piutang Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan piutang lain-lain yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
   1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
   2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah;
   3) Uang tunai di bendahara umum daerah.
e. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
   1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
      a) Aset berupa piutang di neraca agar terjaga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
      b) Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dirumuskan dengan sikap penuh hati-hati agar

kebijakan ini mampu menghasilkan nilai yang diharapkan dapat ditagih atas piutang yang ada per tanggal neraca.

c) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Kualitas Piutang

a) Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.

b) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

c) Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian atas piutang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

(1) Menilai kualitas piutang;

(2) Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang

yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

d) Penilaian kualitas piutang dilakukan berdasarkan umur Piutang pada tanggal laporan keuangan

e) Kualitas Piutang ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
   (1) Kualitas lancar;
   (2) Kualitas kurang lancar;
   (3) kualitas diragukan; dan
   (4) kualitas macet.

f) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
   (1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
   (2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.
   (3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.
   (4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

g) Penggolongan kualitas piutang retribusi daerah dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut: .
   (1) Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
   (2) Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
   (3) Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
   (4) Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

h) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.

i) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 2 tahun.

(3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 2 sampai dengan 5 tahun.

(4) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun.

j) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
a	Lancar	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
b	Kurang Lancar	10 %	10 %		10 %
c	Diragukan	50 %	50 %		50 %
d	Macet	100 %			

k) Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang, dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak

dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

l) Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

(2) Rincian per jenis saldonya menurut

(3) Penjelasan atas penyelesaian piutang, misalnya informasi mengenai piutang TP/TGR yang masih dalam proses penyelesaian baik secara damai maupun pengadilan; dan

(4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

(5) Informasi lainnya yang dianggap penting.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan dapat terdiri dari:

a. Barang konsumsi;
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
j. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaanya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada pada pengurus barang/penyimpan barang SKPD/UKPD dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD/RSUK/Puskesmas. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan

nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

4.3.5.2 Investasi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang dan merupakan kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok aset nonlancar. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah, antara lain berupa:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo oleh pemerintah daerah;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Tidak Tertagih dilakukan dengan penetapan umur investasi Non Permanen Dana Bergulir *(aging schedule)*:

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun ditetapkan sebesar 5%;
- Umur Investasi Dana Bergulir 1-2 tahun ditetapkan sebesar 10%;
- Umur Investasi Dana Bergulir 2-5 tahun ditetapkan sebesar 50%; dan
- Umur Investasi Dana Bergulir lebih dari 5 tahun ditetapkan sebesar 100%,

d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan

dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Milik Swasta.

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

c. Metode Penilaian Investasi

1) Investasi Non Permanen

Metode penilaian Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya, yaitu nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Atas nilai Investasi Non Permanen tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyisihan Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) tak tertagih, sehingga nilai yang tercatat di neraca merupakan nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value).*

2) Investasi Permanen

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan dua metode yaitu:

a) Metode Biaya *(cost method)*

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi berupa penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional, dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di dalam Neraca.

b) Metode Ekuitas *(equity method)*

Dengan menggunakan metode ekuitas, nilai investasi dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah/dikurang dengan beberapa hal sebagai berikut:

- Laba/rugi Perusahaan

  Pada akhir tahun ketika BUMD dan PT Patungan mengumumkan laba/rugi usaha, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertambah/berkurang sebesar nilai laba/rugi dikalikan persentase kepemilikan. Jika perusahaan mengalami laba, maka kenaikan nilai investasi tersebut diakui sebagai pendapatan dalam Laporan Operasional. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan mengalami kerugian, maka penurunan nilai investasi tersebut diakui sebagai beban dalam Laporan Operasional.

  Atas peristiwa ini tidak mempengaruhi pencatatan pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- Penerimaan Dividen

  Pada saat BUMD dan PT Patungan mengumumkan pembagian dividen, maka nilai investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkurang sebesar nilai dividen yang diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kecuali pembagian dividen dalam bentuk saham.

  Sama halnya dengan metode biaya, pada metode ekuitas penerimaan dividen diakui sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di dalam

Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Penggunaan kedua metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya *(cost method)*;
2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas *(equity method)*; dan
3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah daerah pada perusahaan tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (cash dividend), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.

4.3.5.3 Aset Tetap

a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b. Aset tetap terdiri dari:

1) Tanah;
2) Peralatan dan mesin;
3) Gedung dan Bangunan;
4) Jalan, irigasi dan jaringan;
5) Aset tetap lainnya; dan
6) Konstruksi dalam pengerjaan.

c. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
3) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

4) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

4.3.5.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan

a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

   1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
   2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
   3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
   4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

   1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan dapat memberikan manfaat/jasa sesaui dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

   a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
   c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
   d. Uang muka kerja yang diberikan;
   e. Uang Jaminan/Retensi;
   f. KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

4.3.5.5 Penyusutan Aset

a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan

jasa (*service potensial*) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method). Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak dan tanaman.

b. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	**Tanah**	Tidak Disusutkan
2	**Peralatan dan Mesin**, terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
3	**Gedung dan Bangunan**, yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**, terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	**Aset Tetap Lainnya**, yang terdiri atas:	
5.1	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	10
5.2	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	 Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.3	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**	Tidak Disusutkan

c. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek *(which ever is shorter)* antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

d. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

e. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset *Idle)* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

f. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa : Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan Aset

Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.5.6 Amortisasi Aset

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
2. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
3. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
4. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
5. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

4.3.5.7 Aset Lainnya

a. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tidak berwujud, tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset lain-lain.
b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran. Antar lain tagihan penjualan rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.
c. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terdiri atas 2 (dua) yaitu Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

   Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

   Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
d. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha

yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan (KSP).

e. Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

f. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain.

g. Kewajiban Penyerahan Fasos-Fasum.

   Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Fasos-Fasum selanjutnya disebut PPK-Fasos-fasum merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Surat Ijin Penguasaan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang diterbitkan. SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum merupakan dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas kewajiban pemegang SIPPT menyerahkan fasos-fasum pada Pemprov DKI Jakarta. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraf 91, aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi.

Piutang Fasos-Fasum dan Pendapatan Fasos Fasum - LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dan tingkat kemungkinan ketertagihan kewajiban fasos-fasum dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam dokumen yang sah. Sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi paragraph 88, apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan

Apabila tidak terdapat dokumen yang sah yang menyatakan nilai kewajiban fasos-fasum yang harus diserahkan oleh pemegang SIPPT dan/atau nilai fasos-fasum tidak dapat diukur atau diestimasi secara andal, dokumen SIPPT dan PPK-Fasos-Fasum dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ektra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuangan dapat disajikan informasi antara lain:

a. Jumlah kewajiban pengembang yang telah dipenuhi (jumlah BAST) dan sisa kewajiban pengembang yang belum dipenuhi (jumlah SIPPT);
b. Kewajiban pengembang yang belum dipenuhi dapat disajikan informasi dalam CaLK antara lain jumlah SIPPT dan informasi lainnya

Sesuai kerangka konseptual akuntansi paragraph 95, pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya, asset fasos-fasum yang telah diterima dari kewajiban pengembang dicatat sebagai asset tetap/asset berkenaan dan sekaligus diakui sebagai pendapatan LO berkenaan pada saat berita acara serah terima (BAST)

Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari fasos fasum dinilai berdasarkan berita acara serah terima (BAST), jika tidak ada nilai dalam BAST, fasom fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh dengan mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur Fasos Fasum. Aset Fasos Fasum selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Dalam rangka pencatatan secara ekstra komtabel atas pemenuhan kewajiban fasos fasum, informasi yang dicatat sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai jumlah kewajiban SIPPT yang belum diserahkan.

Perolehan aset tetap sebagai pemenuhan kewajiban fasos fasum diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain yang sah - LO dan dilaporkan dalam Laporan Operasional. Pendapatan Fasos Fasum dalam bentuk uang dicatat ke dalam akun Lain-lain PAD yang sah.

h. Konversi Kewajiban SP3L dalam Bentuk Penyetoran Dana.

Sanksi SP3L untuk membangun/menyediakan Rumah Susun Murah (RSM) yang dikonversi dalam bentuk penyetoran dana kepada pemprov DKI Jakarta diakui sebagai Pendapatan Sanksi SP3L – LO dan Piutang Sanksi SP3L senilai jumlah yang tercantum dalam dokumen Surat Ijin Prinsip (SIP) dan/atau Surat Perintah Setor (SPS).

Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang menjadi bagian dari Lain-lain PAD

yang sah dan diakui saat Sanksi tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Piutang atas Sanksi SP3L yang dikonversi dalam bentuk uang berkurang saat diterimanya pembayaran. Pendapatan Sanksi SP3L – LO, Piutang Sanksi SP3L, dan Pendapatan LRA atas Sanksi SP3L dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntasi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

i. Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Kompensasi Pelampauan KDB/KLB selanjutnya disebut PPK-KDB/KLB merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan kompensasi pelampauan KDB/KLB yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB) diakui sebagai Pendapatan Lain-lain yang sah – LO dan Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Luas Bangunan (KLB) senilai jumlah yang tercantum dalam Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK-KDB/KLB).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan menambah Aset senilai jumlah

yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pemenuhan kewajiban dari Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang Kompensasi Pelampauan Koefisien Dasar Bangunan (KDB)/Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Pendapatan Lain-lain yang sah.

Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban kompensasi pelampauan KDB/KLB selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

Pendapatan Kompensasi Pelampauan KDB/KLB – LO, Piutang Kompensasi KDB/KLB, dan pencatatan asset dari penyerahan kewajiban kompensasi pelampauan KDB/KLB dicatat dalam laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntasi yang memiliki pengendalian atas transaksi berkenaan.

j. Pemenuhan Kewajiban Lainnya

Perjanjian Pemenuhan Kewajiban Lainnya, selanjutnya disebut PPK-Lainnya merupakan perjanjian Pemprov DKI Jakarta dengan pihak ketiga untuk menyerahkan uang dan/atau aset kepada Pemertintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada nilai hasil perhitungan berdasarkan formula penghitungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Perjanjian pemenuhan kewajiban lainnya (PPK-Lainnya), seperti kewajiban konstribusi reklamasi dan tambahan kewajiban kontribusi reklamanasi dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pengendalian atas pemenuhan kewajiban lainnya pada pemprov DKI Jakarta.

Aset dalam bentuk piutang diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi dari entitas lain telah terpenuhi dan nilai klaim tersebut dapat diukur dan diestimasi, piutang atas pemenuhan kewajiban lainnya dan pendapatan lainnya LO diakui dan dicatat dalam Neraca apabila nilai dapat diukur atau diestimasi dengan andal yaitu berdasarkan nilai yang tertera dalam PPK-Lainnya dan/atau dokumen lainnya yang sah. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka cukup diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. dokumen PPK-Lainnya atau dokumen lainnya yang sah dijadikan sebagai dokumen pencatatan secara ektra komptabel dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk Aset dicatat dan diakui sebagai pengurang Piutang dan menambah Aset senilai jumlah yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Pengakuan aset tetap akibat dari pemenuhan kewajiban lainnya berdasarkan adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Pemenuhan kewajiban lainnya dalam bentuk uang dicatat dan diakui sebagai pengurang piutang dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban lainnya selain tanah, disusutkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Aset Tetap.

4.3.5.8 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa

yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.
c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dengan berita acara.
e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

4.3.7 Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, Pendapatan diterima dimuka, Utang Belanja seperti utang telepon, air, dan listrik (TAL), Utang Jangka Pendek Lainnya seperti utang kepada pihak ketiga, utang jaminan.

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola

Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.
5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.

7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

4.3.7 Ekuitas

a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
b. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
   1) Ekuitas awal
   2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
   3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
      a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
      b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
   4) Ekuitas akhir.

4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2016 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment"* atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan *"auditable"* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini *(auditable).*

BAB V

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2016

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1767 Tahun 2016 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp57.161.248.465.732,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 Rp53.784.706.312.513,00 atau 94,09% dari target.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp36.888.017.587.716,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp15.271.661.452.714,00, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.625.027.272.083,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2016 Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2016			Tahun Anggaran 2015
		Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Pendapatan Asli Daerah	38.501.784.839.738	36.888.017.587.716	95,81	33.686.176.815.708
2	Pendapatan Transfer	15.990.368.025.994	15.271.661.452.714	95,51	8.642.378.398.086
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	2.669.095.600.000	1.625.027.272.083	60,88	1.880.682.954.789
Jumlah		**57.161.248.465.732**	**53.784.706.312.513**	**94,09**	**44.209.238.168.583**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp31.613.197.634.662,00 atau 95,51% dari target yang ditetapkan sebesar Rp33.100.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.536.271.036.156,00 atau

8,72% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp29.076.926.598.506,00.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 digambarkan pada tabel 5.2.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2016			Tahun Anggaran 2015
		Target	Realisasi	%	Realisasi
1	2	3	4	5(4:3)	8
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7,050,000,000,000	7.143.530.355.999	101,33	6.090.200.500.774
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4,800,000,000,000	5.003.996.134.800	104,25	4.685.403.450.610
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1,050,000,000,000	1.094.901.392.986	104,28	1.232.836.931.554
4	Pajak Air Tanah	100,000,000,000	112.417.511.698	112,42	105.115.871.134
5	Pajak Hotel	1,600,000,000,000	1.499.798.259.793	93,74	1.276.285.658.514
6	Pajak Restoran	2,600.000,000,000	2.453.440.079.189	94,36	2.290.255.418.530
7	Pajak Hiburan	700,000,000,000	769.535.965.131	109,93	608.799.682.079
8	Pajak Reklame	1,150,000,000,000	899.975.503.275	78,26	714.967.327.356
9	Pajak Penerangan Jalan	775,000,000,000	714.835.029.419	92,24	729.884.587.778
10	Pajak Parkir	500,000,000,000	465.990.849.020	93,20	450.941.851.356
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5,150,000,000,000	3.913.363.242.875	75,99	3.609.336.161.480
12	Pajak Rokok	525,000,000,000	531.269.133.932	101,19	475.058.548.175
13	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	7,100,000,000,000	7.010.144.176.545	98,73	6.807.840.609.166
	JUMLAH	**33.100.000.000.000**	**31.613.197.634.662**	**95,51**	**29.076.926.598.506**

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut:

1. **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

   PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di

semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

a. Kereta api;
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara; dan
c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Pribadi yaitu:
    a. Kepemilikan pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
    b. Kepemilikan kedua dan seterusnya tarif ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.143.530.355.999,00 atau 101,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.050.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.053.329.855.225,00 atau 17,30% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.090.200.500.774,00. Meskipun berhasil melampaui target, namun dalam pemungutannya masih terkendala beberapa hal, antara lain:

a) Tingginya potensi pengajuan restitusi dan kompensasi terkait perubahan status angkutan berbasis on-line dari orang pribadi menjadi badan;
b) Banyaknya pemberitahuan Belum Daftar Ulang (BDU) tidak sampai karena WP tidak ditemukan; dan
c) Sistem pemblokiran tidak dapat diakses tanpa melakukan pembatalan SKPD terlebih dahulu.
d) UP-PKB dan BBN-KB tidak mempunyai akses ke system PKB dan BBN-KB untuk merubah urutan kendaraan dalam rangka penetapan pajak progresif.
e) Pelayanan pembayaran PKB via ATM masih belum sesuai harapan
f) Sistem e-Samsat masih terkendala online dengan bank DKI

Upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, antara lain:

a) Perubahan Peraturan Daerah yang mengatur terkait dengan pemungutan PKB khususnya masalah tarif progresif (Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor);
b) Pemutakhiran Data KBM Atas Kendaraan Baru, Bekas dan Perpanjangan Melalui Sistem;
c) Pendataan Atas KBM Yang Belum Daftar Ulang dan himbauan kepada Wajib Pajak untuk segera mendaftarkan KBMnya;
d) Pendataan Atas Kendaraan Yang Memiliki Potensi Seperti Kendaraan Alat Berat khususnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
e) Peningkatan pelayanan PKB melalui percepatan pelayanan di kantor Samsat dan kendaraan Samsat Keliling maupun Gerai Samsat dan pelayanan PKB di UPPD Kecamatan;
f) Pencairan Tunggakan PKB yang belum daftar ulang (BDU) melibatkan Unit Pelayanan Pajak daerah (UPPD); dan
g) *Sunset Policy Programe,* penghapusan sanksi administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015 dan 2885 Tahun 2015).

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp5.003.996.134.800,00 atau 104,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.800.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp318.592.684.190,00 atau 6,80% jika dibandingkan dengan realisasi BBN-KB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.685.403.450.610,00. Meskipun berhasil melampaui target, namun dalam pemungutannya masih terkendala beberapa hal, antara lain:

a) Masih adanya pemilik KBm yang meminjam KTP pemilik lama; dan
b) Adanya mutasi kendaraan bermotor yang tidak dilaporkan oleh WP.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan, untuk memaksimalkan pencapaian rencana penerimaan BBNKB, antara lain :

a) Pendataan kendaraan bermotor (Kbm) atas kendaraan baru dan mutasi Kbm antar daerah;
b) Peningkatan pelayanan BBN-KB melalui percepatan pelayanan di kantor Samsat dan kendaraan Samsat Keliling maupun Gerai Samsat mal dan pelayanan PKB di UPPD Kecamatan; dan
c) Penghapusan sanksi administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015).

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.094.901.392.986,00. atau 104,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.050.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp137.935.538.568,00 atau 11,19% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.232.836.931.554,00. Meskipun berhasil melampaui target, namun dalam pemungutannya masih terkendala beberapa hal, antara lain:

a) Mekanisme pemungutan PBB-KB yang hanya satu kali dikenakan terhadap bahan bakar, meskipun terhadap bahan bakar terjadi lebih dari satu kali transaksi (Perda 10 Tahun 2010);
b) Menurunnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang mempengaruhi penurunan transaksi bahan bakar;
c) Beralihnya moda transportasi masyarakat dari kendaraan pribadi ke jasa transportasi *online*;
d) Pemungutan PBB-KB yang didasarkan pada asas pemanfaatan dan bukan berdasarkan lokasi transaksi penjualan atau titik serah; dan
e) Harga bahan bakar berfluktuasi mengikuti harga minyak dunia.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target penerimaan PBB-KB, antara lain:

a) Pendataan WP PBB-KB baru sebagai upaya ekstensifikasi pajak;
b) Intensifikasi pajak dengan menyampaikan himbauan penyampaian data *delivery order (DO)* pada setiap pelaporan; dan
c) Merevisi ketentuan pengenaan tarif, khususnya pada sektor industri.

4. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

a) jenis sumber air;
b) lokasi sumber air;
c) tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d) volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e) kualitas air; dan
f) tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.

Realisasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp112.417.511.698,00 atau 112,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp7.301.640.564,00 atau 6,95% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp105.115.871.134,00. Meskipun berhasil melampaui target, namun dalam pemungutannya masih terkendala beberapa hal, antara lain:

a) WP hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan saja jika air PAM mati.
b) WP membatasi penggunaan air tanah karena buruknya kualitas air tanah terutama di daerah dekat pesisir / pantai.
c) Banyak meteran yang rusak dan terlambat mendapat penggantian dari PU Dinas Tata Air.
d) Pengadaan meteran tergantung kepada PU Dinas Tata Air.
e) Sulit mendata objek pajak.

Berikut upaya-upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkanpencapaian target penerimaan PAT, antara lain:

a) Pendataan sumur air tanah dan dewatering serta menganalisa penggunaan debit air bekerjasama dengan Dinas PU Tata Air dan PT. AETRA;
b) Melakukan penagihan pasif dan penagihan melalui PPNS.
c) Melakukan pendataan dewatering

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, objek pajaknya termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, sertarumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah:

a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.499.798.259.793,00 atau 93,74% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp223.512.601.279,00 atau 17,51% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.276.285.658.514,00.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan disebabkan antara lain oleh:
a) Pesatnya pertumbuhan hotel baru di daerah penyangga (Bogor, Bekasi, Tangerang);
b) Kurang optimalnya penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Parkir dari jenis rumah kos dan guest house;
c) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan;
d) Bertambahnya hotel baru tidak berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat hunian;
e) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri;

f) Adanya pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan pajak dan angsuran pajak;
g) Masih adanya wajib pajak tidak patuh.

Upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian rencana penerimaan Pajak Hotel, Restoran dan Parkir adalah berupa:

a) Penyampaian surat himbauan setoran masa dan Surat himbauan pembetulan SPTPD;
b) Penagihan pasif;
c) Penyampaian surat himbauan jumlah minimal setoran masa berdasarkan analisa perhitungan potensi pajak;
d) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
e) Memberikan stimulus kepada WP dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar;
f) Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS);
g) Perbaikan pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui internet/e-banking);
h) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
i) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD/UKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
j) Penempelan stiker penunggak pajak;
k) Penagihan pajak oleh PPNS; dan
l) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP.

6. Pajak Restoran

Pajak Retoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada restoran. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.453.440.079.189,00 atau 94,36% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.600.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp163.184.660.659,00 atau 7,13% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.290.255.418.530,00.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan disebabkan antara lain oleh :

a) Turunnya daya beli masyarakat;
b) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan;
c) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri;
d) Masih adanya wajib pajak tidak patuh;
e) Pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan dan angsuran pajak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian rencana penerimaan Pajak Restoran, antara lain:

a) Penagihan pasif;
b) Penyampaian surat himbauan setoran masa minimal berdasarkan analisa perhitungan potensi;
c) Penyampaian surat himbauan setoran masa;
d) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
e) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;

f) Memberikan stimulus kepada WP dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar;
g) Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS);
h) Perbaikan pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui e-mail dan e-banking;
i) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
j) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
k) Penempelan stiker penunggak pajak;
l) Penagihan menggunakan PPNS;
m) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah:

a) tontonan film;
b) pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
c) kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
d) pameran;
e) diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
f) sirkus, akrobat, dan sulap;
g) permainan bilyar, golf, dan boling;
h) pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
i) panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran *(fitness center)*; dan
j) pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan tersebut dapat dikecualikan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus untuk hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp769.535.965.131,00 atau 109,93% dari target yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp160.736.283.052,00 atau 26,40% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp608.799.682.079,00.

Meskipun berhasil melampaui target, namun dalam pemungutannya masih terkendala oleh beberapa hal, antara lain:

a) Turunnya daya beli masyarakat.
b) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan
c) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri
d) Masih adanya wajib pajak tidak patuh.
e) Pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan dan angsuran pajak.

Upaya-upaya yang telah dilakukan, terkait dengan pencapaian rencana penerimaan Pajak Hiburan, diantaranya:

a) Penyampaian surat himbauan setoran masa minimal berdasarkan analisa perhitungan potensi.

b) Penagihan pasif.
c) Penyampaian surat himbauan setoran masa.
d) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD.
e) Sosialisasi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
f) Memberikan stimulus kepada WP dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar.
g) Pengawasan melalui online system (CMS BRI dan e-POS).
h) Perbaikan pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui e-mail / e-banking .
i) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan.
j) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan.
k) Penempelan stiker penunggak pajak.
l) Penagihan melalui PPNS.
m) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame meliputi:

a) Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
b) Reklame kain;
c) Reklame melekat, stiker;
d) Reklame selebaran;
e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
f) Reklame udara;

g) Reklame apung;
h) Reklame suara;
i) Reklame film/slide; dan
j) Reklame peragaan.

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah; dan
e) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp899.975.503.275,00 atau 78,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.150.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp185.008.175.919,00 atau 25,88% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp714.967.327.356,00.

Tidak tercapainya rencana penerimaan Pajak Reklame terkendala beberapa hal, antara lain:

a) Belum adanya kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendorong reklame jenis papan atau *billboard* beralih ke jenis LED(hight cost);
b) Penurunan belanja iklan disebabkan perlambatan ekonomi;
c) Penurunan potensi karena adanya media luar ruang yang terkena imbas proyek pengembangan sarana transportasi masal (MRT);
d) Pemberlakuan Pergub Nomor 244 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame;
e) Adanya penggolongan reklame produk dan non produk.

Upaya-upaya yang telah dilakukan terkait dengan pencapaian rencana penerimaan Pajak Reklame, antara lain:

a) Percepatan penerbitan SKPD berdasarkan penerbitan perizinan;
b) Pembukaan gerai pajak di pusat perbelanjaan;
c) Penertiban reklame liar;
d) Pendataan wajib pajak reklame oleh UPPD;
e) Menghimbau WP agar bersedia membayar SKPD sebelum jatuh tempo;
f) Menerbitkan SKPD sebelum izin diterbitkan dengan meminta pernyataan tertulis dari wajib pajak bahwa reklame sedang dalam proses perizinan dan bersedia dibongkar jika izin ditolak.

9. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak Penerangan Jalan meliputi seluruh pembangkit listrik.

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah:

a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik yang ditetapkan dalam hal:

a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah Daerah yang bersangkutan.

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen). Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu

koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp714.835.029.419,00 atau 92,24% dari target yang ditetapkan sebesar Rp775.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.049.558.359,00 atau 2,06% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp729.884.587.778,00.

Analisa yang dapat disimpulkan terkait dengan penerimaan Pajak Penerangan Jalan, yaitu:

a) PPJ merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat, khususnya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).
b) WP PPJ hanya PT. PLN (Persero) Disjaya & Tangerang, sehingga relative mudah dalam proses pemungutan PPJ, dengan tetap mempertimbangkan asas timbal balik dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
c) Terdapat kenaikan TDL di Tahun 2016± 15% seiring dengan diberlakukannya *tariff adjustment* setiap bulan sesuai dengan Permen ESDM 31 Tahun 2014 yang menyesuaikan TDL dengan perubahan nilai tukar rupiah, harga bahan bakar dan inflasi bulanan.
d) Sistematika yang berlaku “turun naiknya biaya perlu diimbangi oleh naik turunnya pendapatan PLN”.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah:

a) penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

b) penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c) penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d) penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir, tarifnya paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp465.990.849.020,00 atau 93,20% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp15.048.997.664,00 atau 3,34% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp450.941.851.356,00.

Tidak tercapainya rencana penerimaan Pajak Parkir dimaksud, terkendala oleh berbagai hal, antara lain:

a) Adanya perubahan dasar pengenaan pajak, dimana tarif parkir sudah termasuk pajak dan asuransi (sebelumnya excluded tax menjadi included tax);
b) Masih adanya wajib pajak tidak patuh;
c) Adanya pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan dan angsuran pajak; dan
d) Tidak stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai rencana penerimaan Pajak Parkir, antara lain:

a) Penagihan pasif;
b) Penyampaian surat himbauan setoran masa;

c) Penyampaian surat himbauan setoran masa minimal berdasarkan analisa perhitungan potensi;
d) Penyampaian surat himbauan pembetulan SPTPD;
e) Sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan WP;
f) Memberikan stimulus kepada WP dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan bayar;
g) Pengawasan pajak melalui online system (CMS BRI dan e-POS);
h) Perbaikan pelayanan (menambah tempat pelayanan, jam pelayanan, bank persepsi dan pelayanan melalui e-mail dan e-banking;
i) Intensifikasi pajak melalui pemeriksaan;
j) Pendataan wajib pajak melibatkan SKPD terkait, kecamatan dan kelurahan;
k) Penempelan stiker penunggak pajak;
l) Penagihan menggunakan PPNS; dan
m) Pertukaran informasi perpajakan dengan DJP.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari:

a) perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;

b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c) badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
d) orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak, dengan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara pelaporan dan sanksi.

Realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.913.363.242.875,00 atau 75,99% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.150.000.000.000,00 Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp304.027.081.395,00 atau 8,42% jika dibandingkan dengan realisasi BPHTB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.609.336.161.480,00.

Tidak tercapainya realisasi penerimaan BPHTB di Tahun 2016, disebabkan beberapa kendala, yaitu:

a) Pemberlakuan Peraturan Gubernur atas pembebasan BPHTB terhadap transaksi dengan NJOP sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-
b) Belum adanya perubahan Peraturan Daerah tentang pengenaan BPHTB terhadap PPJB;
c) Pertumbuhan makro ekonomi tidak sebagaimana yang diharapkan;
d) Harga properti meningkat sementara daya beli masyarakat menurun;
e) Adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda pembelian property dan memprioritaskan pembelian kepada barang-barang primer.

Upaya-upaya pencapaian rencana penerimaan BPHTB di Tahun 2016, antara lain :

a) Percepatan proses validasi BPHTB dengan menerapkan *one day service;*
b) Penelitian dan perhitungan serta verifikasi atas bukti pembayaran BPHTB;
c) Sosialisasi BPHTB kepada masyarakat dan PPAT

12. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Adapun peraturan mengenai pengelolaan Pajak Rokok di Provinsi DKI Jakarta dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Rokok.

Realisasi Pajak Rokok Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp531.269.133.932,00 atau 101,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp525.000.000.000,00.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp56.210.585.757,00 atau 11,83% jika dibandingkan dengan realisasi Pajak Rokok Tahun 2015 sebesar Rp475.058.548.175,00.

Analisa yang dapat disimpulkan terkait dengan penerimaan Pajak Rokok, antara lain :

a) Pajak Rokok merupakan jenis pajak yang secara langsung terkait dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk menarik cukai dari produksi rokok di Indonesia;
b) Secara umum mekanisme pemungutan Pajak Rokok dilakukan dan disetorkan oleh Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan, berdasarkan komposisi jumlah penduduk provinsi;
c) Penerimaan Pajak Rokok selama tiga tahun terakhir menunjukkan trend positif; dan
d) Upaya yang dilakukan dalam pemungutan Pajak Rokok adalah melakukan monitoring dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Dirjen Perimbangan Keuangan).

13. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

a) digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f) digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp7.010.144.176.545,00 atau 98,73% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000.000,00. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp202.303.567.379,00 atau 2,97% jika dibandingkan dengan realisasi PBB-P2 Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.807.840.609.166,00.

Beberapa kendala yang menyebabkan tidak tercapainya rencana penerimaan, antara lain:

a) Adanya kebijakan terkait dengan penghapusan PBB-P2 dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 1 Milyar (Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Rumah, Rumah Susun Sederhana Sewa dan Rumah Susun Sederhana Milik dengan Nilai Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 1.000.000.000.000,-)
b) Penurunan ketetapan dan penyampaian SPPT PBB, yang disebabkan oleh :
    1) Pemecahan NOP / pemecahan bangunan *strata tittle* (Apartemen / Rusun);
    2) Adanya pengurangan, keringanan, penghapusan, pembebasan, keberatan pajak dan angsuran pajak Pembetulan SPPT;
    3) Pembatan SPPT (telah menjadi fasos/fasum);
    4) Menurunnya kemampuan ekonomis masyarakat;
    5) Masih adanya masyarakat yang belum mematuhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
    6) Masih terdapatnya basis data objek pajak PBB-P2 yang bermasalah dalam pemungutannya, disebabkan oleh :
        - Tanah sengketa;

- Penetapan ganda (*double object*);
- SPPT tidak dapat disampaikan karena objek dan subjek tidak dapat ditemukan

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan, dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 Tahun 2016, antara lain:

a) Penghapusan sanksi administrasi sebesar 50% untuk tunggakan s.d Tahun 2009 dan 25% untuk tunggakan Tahun 2010 - 2012;
b) Pelaksanaan pelayanan malam hari dan sabtu minggu;
c) Pembukaan gerai pembayaran PBB-P2 di mal;
d) Pemungutan PBB-P2 dengan cara jemput bola;
e) Inventarisasi tanah dan bangunan terhutang PBB-P2 yang tidak diketahui statusnya;
f) Melakukan pemasangan stiker atau plang penunggak pajak;
g) Pendataan objek pajak baru;
h) Pengawasan objek PBB-P2 yang berubah bentuk/ukuran;
i) *Cleansing data;*
j) Penilaian masal dan individual.

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 menetapkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dengan sistem satu pintu di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

a) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
b) Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
c) Meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Peraturan Daerah ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdampak pada peralihan pungutan Pendapatan Asli Daerah terutama Retribusi Daerah dari SKPD Pemungut lama ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Target Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 semula ditargetkan Rp800.000.000.000,00 setelah perubahan target tersebut turun sebesar Rp 150.825.000.000,00 atau 18,85 % menjadi sebesar Rp649.175.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp675.475.066.072,00 atau 104,05%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah telah melebihi target sebesar Rp26.300.066.072,00 atau 4,05%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp459.459.498.063,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp216.015.568.009,00 atau 47,02%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;

b) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
c) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
d) Peningkatan pengawasan di lapangan; dan
e) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tergambar pada tabel 5.3.

Tabel 5.3
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
I	Retribusi Jasa Umum	100.000.000.000	86.539.552.416	86,54	90.398.166.389
II	Retribusi Jasa Usaha	149.525.000.000	218.742.129.859	146,29	93.304.141.810
III	Retribusi Perizinan Tertentu	399.650.000.000	370.193.383.797	92,63	275.757.189.864
Jumlah		**649.175.000.000**	**675.475.066.072**	**104,05**	**459.459.498.063**

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2016 semula ditetapkan sebesar Rp300.350.000.000,00 turun menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 atau 66,71% pada perubahan anggaran Tahun 2016. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp86.539.552.416,00 atau 86,54%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak mencapai target sebesar Rp13.460.447.584,00 atau 13,46%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat Rp90.398.166.389,00 terlihat penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2016 turun sebesar Rp3.858.613.973,00 atau 4,27%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2016 pada tabel 5.4.

Tabel 5.4

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	49.792.400.000	38.290.058.150	76,90	38.469.556.040
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	600.000.000	687.108.898	114,52	1.850.574.618
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	4.214.000.000	4.889.186.650	116,02	4.179.939.400
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	97.600.000	106.635.000	109,26	131.300.000
5	Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil	-	-	~	-
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.740.500.000	856.340.998	49,20	802.822.604
7	Retribusi Pengujian Kapal Perikanan	-	-	~	20.539.632
8	Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan	-	-	~	228.912.486
9	Retribusi Pemanfaatan Air Bersih	-	-	~	-
10	Retribusi Persampahan/Kebersihan	20.827.000.000	23.107.054.103	110,95	29.271.917.576
11	Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman	16.500.000.000	12.713.984.297	77,05	11.906.216.400
12	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	718.610	~	3.536.387.633
13	Retribusi Pemakaian Tempat Usaha	6.228.500.000	5.888.465.710	94,54	-
Jumlah		**100.000.000.000**	**86.539.552.416**	**86.54**	**90.398.166.389**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk kendaraan bermotor di air. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Besarnya nilai retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya operasional dan pemeliharaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp49.792.400.000,00 Realisasinya mencapai Rp38.290.058.150,00 atau 76,90% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target sebesar Rp11.502.341.850,00 atau 23,10%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp38.469.556.040,00, maka penerimaan tahun 2016 turun sebesar Rp179.497.890,00 atau 0,47%.

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi ini, utamanya disebabkan oleh penurunan volume pengujian terhadap kendaraan mobil barang, bus dan kendaraan khusus dan

mobil berpenumpang umum. Penurunan tersebut terjadi karena banyak kendaraan yang dimutasi ke daerah sehingga kendaraan-kendaraan tersebut tidak melakukan pengujian.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem *Drive Thru* dalam pengujian kendaraan bermotor dengan cepat dan mudah.
2) Peningkatan koordinasi dengan Kepolisian.
3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya penertiban terhadap kendaraan umum.
4) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp687.108.898,00 atau 114,52% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta melampaui target sebesar Rp87.108.898,00 atau 14,52%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.850.574.618,00, maka penerimaan tahun 2016 turun sebesar Rp1.163.465.720,00 atau 62,87%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besarnya retribusi pelayanan tera ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp4.214.000.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2016 mencapai Rp4.889.186.650,00 atau 116,02% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang melampaui target sebesar Rp675.186.650,00 atau 16,02%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.179.939.400,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp709.247.250,00 atau 16,97%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pendapatan retribusi ini antara lain:

1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada pengrajin di sekitar lokasi.
2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi (SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan).
3) Melaksanakan pelayanan *one day service* SIUP di pusat perbelanjaan dan perkantoran.

d. Retribusi Pelayanan Pendidikan (Ketenagakerjaan)

Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp97.600.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2016 mencapai Rp106.635.000,00 atau 109,26% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pendidikan telah melampaui target sebesar Rp9.035.000,00 atau 9,26%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Pendidikan Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp131.300.000,00, maka penerimaan tahun 2016 turun sebesar Rp24.665.000,00 atau 18,79%.

Realisasi tersebut diantaranya merupakan Retribusi penyelenggaraan pelatihan hygiene, kesehatan dan keselamatan kerja (Hyperkes) bagi Dokter perusahaan, dengan tarif Rp.1.000.000,00/paket/orang, yang dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

e. Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Retribusi Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil Tahun Anggaran 2016 tidak ditargetkan lagi karena sesuai program pemerintah bahwa seluruh retribusi yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah tidak dipungut biaya. Hal ini mengacu kepada Undang Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanpasal Pasal 79A "Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya".

f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan kebakaran. Retribusi ini diukur berdasarkan gambar rencana yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe peralatan pencegahan pemadam kebakaran. Jumlah retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya operasional/pemeliharaan dan memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp1.740.500.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp856.340.998,00 atau 49,20% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini belum mencapai target sebesar Rp884.159.002,00 atau 50,80%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp802.822.604,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp53.518.394,00 atau 6,67%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini antara lain, retribusi yang menjadi kewajiban permohonan

rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran tidak terlalu signifikan jumlahnya.

g. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan dikelola oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pengujian Kapal Perikanan yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2016 dan tidak terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.

Adapun realisasi Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2015 jumlahnya tercatat sebesar Rp20.539.632,00.

h. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan merupakan retribusi pelayanan pertanian dan kehutanan yang diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan volume hasil hutan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2016 dan tidak

terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016.

Adapun realisasi Retribusi Pengujian Kapal Perikanan Tahun Anggaran 2015 jumlahnya tercatat sebesar Rp228.912.486,00.

i. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan dan energi yang diukur berdasarkan risiko, volume, dan kualitas air dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1 Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan dan pengurangan kode rekening retribusi daerah, salah satunya Retribusi Pemanfaatan Air Bersih yang tidak dikenakan retribusi sehingga tidak ditargetkan lagi pada Tahun Anggaran 2016.

Tidak ada realisasi Retribusi Pemanfaatan Air Bersih pada Tahun Anggaran 2015.

j. Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi

pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp20.827.000.000,00

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp23.107.054.103,00 atau 110,95% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp2.280.054.103,00 atau 10,95%.

Realisasi Retribusi ini diperoleh antara lain dari, pengangkutan sampah industri, pengangkutan sampah pedagang kaki lima dan penyediaan tempat pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp29.271.917.576,00, maka penerimaan tahun 2016 turun sebesar Rp6.164.863.473,00 atau 21,06%.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk peningkatan penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan antara lain:

1) Peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi;
2) Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang intensif oleh masing-masing Kepala Seksi Dinas

Kebersihan Kecamatan secara rutin kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat;

3) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank.
4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;
5) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam pemungutan retribusi sampah.

k. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman merupakan retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp16.500.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp12.713.984.297,00 atau 77,05% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp3.786.015.703,00 atau 22,95%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp11.906.216.400,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp807.767.897,00 atau 6,78%.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakatdengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank;
2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat bekerjasama dengan yayasan yang bergerak di bidang pemakaman, dengan tujuan untuk menumbuhkembangkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya seperti perpanjangan sewa tanah makam agar dapat dilakukan tepat pada waktunya.

I. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan ini pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang diantaranya diperoleh dari Retribusi Rawat Jalan Kesehatan, dan Retribusi Kamar Gawat Darurat di RSUD Kepulauan Seribu dan Rumah Sakit Umum Kecamatan yang baru dibentuk.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2016 tidak targetkan namun terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp718.610,00.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.536.387.633,00, maka penerimaan tahun 2016 turun sebesar Rp3..535.669.023,00 atau 99,98%.

Penurunan realisasi retribusi pelayanan kesehatan ini disebabkan karena sejak periode Juli 2015 mekanisme pemungutan retribusi pelayanan kesehatan dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

m. Retribusi Pemakaian Tempat Usaha

Retribusi Pemakaian Tempat Usaha Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp6.228.500.000,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2016 mencapai Rp5.888.465.710,00 atau 94,54% dari target yang ditetapkan dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Tempat Usaha tidak mencapai target sebesar Rp340.034.290,00 atau 5,46%.

Adapun Retribusi Pemakaian Tempat usaha tahun 2015 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp149.525.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp218.742.129.859,00 atau 146,29%, dengan demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target sebesar Rp69.217.129.859,00 atau 46.29%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp93.304.141.810,00 terlihat realisasi retribusi

ini ditahun 2016 naik sebesar Rp125.437.988.049,00 atau 134,44%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2016 disajikan lebih rinci pada tabel 5.5.

Tabel 5.5
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha
Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	111.628.410.000	178.528.836.153	159,93	62.103.035.128
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	-	-	~	4.305.481.626
3	Retribusi Tempat Rekreasi	-	-	~	589.011.500
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	19.900.000.000	23.265.715.267	116,91	16.477.759.483
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	630.890.000	1.033.316.160	163,79	512.468.225
6	Retribusi Potong Hewan	979.200.000	950.160.021	97,03	360.195.982
7	Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah	-	-	~	-
8	Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan	-	-	~	-
9	Retribusi Penyedotan Kakus	-	-	~	1.334.897.275
10	Retribusi Jasa Terminal	7.650.000.000	7.788.932.558	101,82	6.738.370.591
11	Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan Perkapalan	2.000.000.000	959.088.200	47,95	495.288.000
12	Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan	2.200.000.000	1.610.439.500	73,20	387.634.000
13	Retribusi Pemakaian Tempat Usaha	4.536.500.000	4.605.642.000	101,52	-
	Jumlah	**149.525.000.000**	**218.742.129.859**	**146,29**	**93.304.141.810**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan

tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp111.628.410.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp178.528.836.153,00 atau 159,93% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp66.900.426.153,00 atau 59,93%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp62.103.035.128,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp116.425.801.025,00 atau 187,47%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target penerimaan antara lain:

1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut retribusi;
2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan alat berat dan penunjangnya;

3) Optimalisasi jasa layanan penggunaan alat berat dan atau penunjangnya;
4) Optimalisasi koordinasi dengan unit satuan kerja terkait; dan
5) Promosi kawasan monas sebagai lokasi *shooting* ke berbagai *production house*.

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan Ikan diukur berdasarkan persentase volume dan harga transaksi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Di Provinsi DKI Jakarta terdapat 2 (dua) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang melakukan aktifitas pelelangan yaitu TPI Muara Baru yang dikerjasamakan dengan Koperasi Mina Baruna dan Koperasi Mina Muara Makmur serta TPI Muara Angke yang dikerjasamakan dengan Koperasi Mina Jaya. Sedangkan TPI Kali Baru, TPI Cilincing, dan TPI Kamal Muara tidak melakukan aktifitas lelang karena sedimentasi pantai yang tinggi sehingga tidak memungkinkan bagi kapal nelayan untuk melakukan kegiatan bongkar.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2016 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi.

Adapun realisasi retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp4.305.481.626,00.

c. Retribusi Tempat Rekreasi

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya pembinaan. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis pemakaian, jenis pertunjukan, jenis kendaraan dan jumlah orang. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi diperoleh dari tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman, Taman Marga Satwa Ragunan dan pertunjukan Planetarium dan Observatorium.

Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2016 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi.

Adapun realisasi retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp589.011.500,00.

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi olah raga serta berusaha untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olah raga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olah raga dan jenis organisasi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp19.900.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp23.265.715.267,00 atau 116,91% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.365.715.267,00 atau 16,91%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari pemakaian kolam renang, gedung olah raga dan stadion olah raga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp16.477.759.483,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp6.787.955.784,00 atau 41,19%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target penerimaan retribusi ini, antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan sistem pembayaran retribusi melalui bank; dan
2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut retribusi melalui monitoring pembayaran retribusi.

e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, volume dan harga

pedoman. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp630.890.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp1.033.316.160,00 atau 163,79% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp402.426.160,00 atau 63,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp512.468.225,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp520.847.935,00 atau 101,64%.

f. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak Potong dan Retribusi Pemakaian Fasilitas Penampungan dan Fasilitas Pemotongan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 6 (enam) rumah Potong Hewan terdiri dari 3 (tiga) Rumah Potong Unggas (berlokasi di Rawa Kepiting, Petukangan Utara, dan Kalideres) dan 3 (tiga) Rumah Potong Hewan yang berlokasi di Kapuk (Rumah Potong Babi), di Cakung dan Pulogadung (Rumah Potong Sapi, Kambing, dan Kerbau).

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2016, ditargetkan sebesar Rp979.200.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp950.160.021,00 atau 97,03% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp29.039.979,00 atau 2,97%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp360.195.982,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp589.964.039,00 atau 163,79%.

Hambatan pencapaian retribusi ini diantaranya:

1) Faktor lokasi rumah potong hewan yang rendah dan rawan banjir setiap awal tahun sehingga mengganggu kegiatan rumah potong hewan;
2) Menurunnya penerimaan jumlah unggas dan ternak dari daerah; dan
3) Menurunnya daya beli masyarakat.

Adapun strategi yang dapat dilakukan agar target retribusi rumah potong hewan tercapai adalah memperlancar distribusi pemasukan unggas dan ternak dari daerah ke Provinsi DKI Jakarta.

g. Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah

Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik Daerah diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi fasilitas tempat, dan waktu pemakaian.

Target Penerimaan Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 dialihkan ke rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sehingga tidak ada target penerimaan dari Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah.

Rincian kode rekening yang dialihkan ke rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	Kode Rekening	
	Lama	Baru
Pemakaian penginapan Graha Wisata TMII	4.1.2.02.09.002	4.1.2.02.01.130
Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan	4.1.2.02.09.003	4.1.2.02.01.131
Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata TMII	4.1.2.02.09.005	4.1.2.02.01.132
Pemakaian tempat ruang pertemuan Graha Wisata Ragunan	4.1.2.02.09.006	4.1.2.02.01.133

h. Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah dengan memperhatikan biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan, biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga pasar. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kebersihan.

Pada Tahun Anggaran 2016 tidak ada target penerimaan untuk Retribusi Penyedotan Kakus dan tidak ada realisasi karena sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2014 tentang masa transisi Pengalihan Pengelolaan Air Limbah Domestik dari Dinas Kebersihan kepada PD. PAL Jaya.

Adapun realisasi retribusi Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2015 tercatat sebesar Rp1.334.897.275,00.

i. Retribusi Jasa Terminal

Retribusi Jasa Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp7.650.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp7.788.932.558,00 atau 101,82% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp138.932.558,00 atau sebesar 1,82%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp6.738.370.591,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp1.050.561.967,00 atau 15,59%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal antara lain:

1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;
2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;
3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di terminal; dan
4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

j. Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan Perkapalan

Retribusi Jasa Kepelabuhanan, Kenavigasian, dan Perkapalan adalah retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun Anggaran 2016 ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp959.088.200,00 atau 47,95% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp1.040.911.800,00 atau 52,05%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp495.288.000,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp463.800.200,00 atau 93,64%.

Kenaikan realisasi retribusi ini disebabkan meningkatnya kuantitas kapal yang berlabuh dan menggunakan fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dikelola, dan atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

k. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan

Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Tahun Anggaran 2016, ditargetkan sebesar Rp2.200.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp1.610.439.500,00 atau 73,20% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp589.560.500,00 atau sebesar 26,80%. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Penyeberangan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp387.634.000,00, maka penerimaan tahun 2016 naik sebesar Rp1.222.805.500,00 atau 315,45%.

l. Retribusi Pemakaian Tempat Usaha

Retribusi Pemakaian Tempat Usaha Tahun Anggaran 2016, ditargetkan sebesar Rp4.536.500.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp4.605.642.000,00 atau 101,52% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp69.142.000,00 atau sebesar 1,52%.

Adapun Retribusi Pemakaian Tempat usaha tahun 2015 tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasi.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau

badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp399.650.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp370.193.383.797,00 atau 92,63%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp29.456.616.203,00 atau 7,37%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp275.757.189.864,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2016 naik sebesar Rp94.436.193.933,00 atau 34,25 %.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2016 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Retribusi Izin Trayek	1.650.000.000	766.812.000	46,47	994.577.000
2	Retribusi Izin Usaha Angkutan dan Izin Operasi Angkutan	-	-	~	43.817.780
3	Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian	-	-	~	1.270.831
4	Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	-	-	~	3.750.000
5	Izin Gangguan Undang-Undang Gangguan	26.500.000.000	32.276.410.694	121,80	25.372.894.127
6	Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	~	-
7	Retribusi Perizinan Bidang Peternakan	-	-	~	-
8	Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga	-	-	~	45.779.000
9	Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman	-	-	~	-
10	Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan	-	-	~	-
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	309.500.000.000	287.585.722.675	92,92	246.407.800.126
12	Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap	-	-	~	-
13	Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan	-	-	~	-
14	Retribusi Perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Badan Jalan	-	-	~	250.000
15	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing	60.000.000.000	47.824.438.428	79,71	1.397.076.000
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.000.000.000	1.740.000.000	87,00	1.489.975.000
	Jumlah	**399.650.000.000**	**370.193.383.797**	**92,63**	**275.757.189.864**

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2016 antara lain:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan,

jumlah kendaraan, dan jangka waktu. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp1.650.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp766.812.000,00 atau 46,47%, dengan demikian tidak mencapai target sebesar Rp883.188.000,00 atau 53,53%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp994.577.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2016 sebesar Rp227.765.000,00 atau 22,90%.

b. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan merupakan retribusi pelayanan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp26.500.000.000,00 dalam anggaran perubahan.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp32.276.410.694,00 atau 121,80%, dengan demikian melampaui target sebesar Rp5.776.410.694,00 atau 21,80%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp25.372.894.127,00,

terlihat mengalami peningkatan di tahun 2016 sebesar Rp6.903.516.567,00 atau 27,21%.

c. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan kelompok bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp309.500.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp287.585.722.675,00 atau 92,92%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp21.914.277.325,00 atau 7,08%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp246.407.800.126,00, retribusi ini di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp41.177.922.549,00 atau 16,71%.

d. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap merupakan retribusi atas pelayanan penerangan jalan umum dan sarana jaringan utilitas yang diukur berdasarkan lokasi, jenis, ketinggian dan waktu dengan memperhatikan biaya transportasi, biaya survei, biaya pengawasan dan pengendalian serta pembinaan.

Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan Bangunan Pelengkap tidak ditargetkan dan tidak terdapat realisasinya di Tahun Anggaran 2016.

e. Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp60.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp47.824.438.428,00 atau 79,71%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak memenuhi target sebesar Rp12.175.561.572,00 atau 20,29%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp1.397.076.000,00, retribusi ini di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp46.427.362.428,00 atau 3.323,18%.

f. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol pada Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp1.740.000.000,00 atau 87,00%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp260.000.000,00 atau 13,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp1.489.975.000,00, realisasi retribusi ini di tahun 2016

mengalami kenaikan sebesar Rp250.025.000,00 atau 16,78%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016, ditetapkan sebesar Rp324.739.130.552,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp303.204.423.956,00 atau 93,37%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut tidak mencapai target sebesar Rp21.534.706.596,00 atau 6,63%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp527.280.486.037,00, terlihat pendapatan di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp224.076.062.081,00 atau 42,50%.

Rekapitulasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2016 digambarkan pada tabel 5.7.

Tabel 5.7

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5(4:3)	6
1	Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah	101.667.020.405	78.857.018.405	77,56	82.309.399.188
2	Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga	222.240.847.130	223.197.381.431	100,43	444.066.056.849
3	Badan Pengelola	831.263.017	1.150.024.120	138,35	905.030.000
Jumlah		324.739.130.552	303.204.423.956	**93,37**	**527.280.486.037**

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2016, ditargetkan sebesar Rp101.667.020.405,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp78.857.018.405,00 atau 77,56%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2015 yang jumlahnya sebesar Rp82.309.399.188,00 maka terlihat pendapatan di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp3.452.380.783,00 atau 4,19%.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan pada tabel 5.8.

Tabel 5.8

Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PDAM Jaya	22.810.000.000	-	-	22.810.000.000
2	PD Dharma Jaya	-	-	-	-
3	PD Pasar Jaya	33.457.932.232	33.457.930.232	99,99	30.578.225.355
4	PD Pembangunan Sarana Jaya	31.732.962.062	31.732.962.062	100	17.431.388.498
5	PD PAL Jaya	13.666.126.111	13.666.126.111	100	11.489.785.335
Jumlah		101.667.020.405	78.857.018.405	77,56	82.309.399.188

2. Pendapatan dari Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2016, ditargetkan sebesar Rp222.240.847.130,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 Rp223.197.381.431,00 atau 100,43%, dengan demikian

penyertaan modal sudah melampaui target sebesar Rp956.534.301,00 atau 0,43%.

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp444.066.056.849,00, terlihat pendapatan di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp220.868.675.418,00 atau 49,74%.

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2016 dapat di lihat pada tabel 5.9.

Tabel 5.9
Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah
Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)
Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT. Pembangunan Jaya	24.800.000.000	24.800.000.000	100	19.600.000.000
2	PT. Food Station Cipinang	3.011.984.000	3.007.195.324	99,84	5.577.520.286
3	PT. J.I.E.P	4.613.538.245	4.613.538.245	100	6.385.101.177
4	PT. Delta Jakarta, Tbk	25.220.760.075	25.224.084.000	100,01	25.224.084.000
5	PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	79.580.000.000	79.487.999.931	99,88	74.879.999.935
6	PT. Ratax Armada	-	-	-	-
7	PT. Kawasan Berikat Nusantara	3.035.587.208	3.035.587.209	100	10.626.074.894
8	PT. Asuransi Bangun Askrida	4.367.545.167	4.367.544.287	100	3.852.236.557
9	PT. Jakarta Propertindo	7.351.856.970	7.351.856.970	100	33.000.000.000
10	PT. Bank DKI Jakarta	69.522.075.465	69.522.075.465	100	263.121.040.000
11	PT. Jakarta Tourinsindo	500.000.000	500.000.000	100	1.800.000.000
12	PT. Jakarta International Expo	-	1.050.000.000	~	-
13	PT. Penjamin Kredit Daerah Jakarta	237.500.000	237.500.000	100	
Jumlah		222.240.847.130	223.197.381.431	100,43	**444.066.056.849**

3. Pendapatan dari Badan Pengelola (BP)

Realisasi Badan Pengelola Tahun Anggaran 2015 merupakan bagi hasil laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari BP THR Lokasari, ditargetkan sebesar Rp831.263.017,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp1.150.024.120,00 atau 138,35%, dengan demikian terlihat realisasi penerimaan sudah mencapai target sebesar Rp318.761.103,00 atau 38,35%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp905.030.000,00, terlihat realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2016 naik sebesar Rp244.994.120,00 atau 27,07%.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp4.427.870.709.186,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp4.296.140.463.026,00 atau 97,02%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak mencapai target sebesar Rp131.730.246.159,00 atau 2,98%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp3.622.510.233.102,00 terlihat pendapatan di tahun 2016 naik sebesar Rp673.630.229.924,00 atau 18,60%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016 digambarkan pada tabel 5.10

Tabel 5.10

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	80.450.000.000	14.807.187.252	18,41	92.038.176.671
2	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	420.000.000.000	727.979.780.548	173,33	237.668.902.983
3	Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah	30.010.000.000	36.337.195.866	121,08	47.518.696.753
4	Hasil Lelang Titik Reklame	25.000.000.000	608.045.323	2,43	16.328.700.000
5	Klaim Asuransi Aset	2.000.000.000	431.910.000	21,60	781.745.729
6	Jasa Giro	200.700.000.000	128.006.216.143	63,78	157.796.050.966
7	Pendapatan Bunga	600.000.000.000	682.397.872.598	113,73	1.020.372.682.026
8	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	115.000.000.000	103.024.117.496	89,59	116.361.201.326
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	18.700.000.000	9.247.553.526	49,45	6.892.175.576
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	5.800.000.000	4.965.870.867	85,62	5.977.671.406
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	2.167.747.563.039	1.950.448.104.605	89,98	1.456.518.285.286
12	Hasil Tagih Eks BPPN	-	674.012.416	-	2.385.568.532
13	Nilai Strategis Reklame	67.000.000.000	25.382.499.202	37,88	21.126.917.628
14	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	5.811.854.000	3.568.611.093	61,40	8.200.318.794
15	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	9.000.000.000	9.544.700.955	106,05	9.044.126.408
16	Pendapatan Lain-lain	-	149.319.153.210	-	101.769.275.861
17	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	10.076.000.000	5.122.002.707	50,83	10.256.322.383
18	Pendapatan Sanksi Pajak	597.875.292.147	371.994.436.565	62,22	250.018.154.621
19	Pendapatan Denda Retribusi	72.000.000.000	70.499.416.057	97,92	60.654.992.957
20	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	700.000.000	1.781.776.597	254,54	800.267.196
Jumlah		**4.427.870.709.186**	**4.296.140.463.026**	**97,02**	**3.622.510.233.102**

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2016 antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp80.450.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp14.807.187.252,00 atau 18,41%, dengan demikian realisasi penerimaan ini tidak mencapai target sebesar Rp65.642.812.748,00 atau 81,59%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp92.038.176.671,00, Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan di Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan sebesar Rp77.230.989.419,00 atau 83,91%.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2016 diperoleh dari upaya antara lain:

a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi pelepasan hak atas tanah jalan;
b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta inventaris kantor yang tidak terpakai;
c. Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2016 digambarkan pada tabel 5.11.

Tabel 5.11

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan

Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	5	6 (5:4)	7
1	Pelepasan Hak Atas Tanah	50.000.000.000	-	-	78.863.677.000
2	Penjualan Brandgang	7.000.000.000	-	-	-
3	Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor tidak terpakai	50.000.000	333.248.664	666,50	-
4	Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai	200.000.000	-	-	-
5	Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya	8.000.000.000	6.692.905.476	83,66	7.617.870.887
6	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	200.000.000	-	-	-
7	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	15.000.000.000	7.781.033.112	51,87	5.556.628.784
Jumlah		**80.450.000.000**	**14.807.187.252**	**18,41**	**92.038.176.671**

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2016 merupakan hasil penerimaan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp420.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 yang diperoleh dari Rekomendasi HGB/HPL dan Kompensasi Rumah Susun, Susun Sederhana atau Murah mencapai Rp727.979.780.548,00 atau 173,33%. Dengan demikian realisasi penerimaannya melebihi target sebesar Rp307.979.780.548,00 atau 73,33%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp237.668.902.983,00. Penerimaan di tahun 2016

mengalami peningkatan sebesar Rp490.310.877.565,00 atau 206,30%.

3. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp30.010.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp36.337.195.866,00 atau 121,08%.

Realisasi penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp36.337.195.866,00 diantaranya yaitu:

a. Hasil Sewa Tanah sebesar Rp23.134.094.589,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp13.191.001.277,00 yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;
c. Hasil Sewa Rumah sebesar Rp12.100.000,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi sewa tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2015 sebesar Rp47.518.696.753,00. Realisasi di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp11.181.500.887,00 atau 23,53%.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp25.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp608.045.323,00 atau 2,43% merupakan Hasil lelang titik reklame atas aset Pemda. Dengan demikian realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tidak dapat mencapai target sebesar Rp24.391.954.677,00 atau 97,57% karena disebabkan oleh belum adanya kegiatan lelang mengingat kebijakan penyelenggaraan reklame di Provinsi DKI Jakarta sedang dilakukan revisi terutama pembatasan ukuran

luas bidang reklame dan pengurangan jumlah lokasi penyelenggaraan reklame.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp16.328.700.000,00, maka realisasi di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp15.720.654.677,00 atau 96,28%.

5. Klaim Asuransi Aset

Klaim Asuransi Aset merupakan pendapatan yang diterima atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kerusakan dan klaimnya ditanggung oleh perusahaan asuransi.

Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp431.910.000,00 atau 21,60%.

Apabila realisasi Klaim Asuransi Aset tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi yang sama ditahun 2015 sebesar Rp781.745.729,00. Realisasi di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp349.835.729,00 atau 44,75%.

6. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp200.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp128.006.216.143,00 atau 63,78%, dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai target sebesar Rp72.693.783.857,00 atau 36,22%.

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp128.006.216.143,00 terdiri dari:

1) Jasa Giro Kas Daerah sebesar Rp116.643.882.177,00;
2) Jasa Giro Pemegang Kas pada rekening SKPD disebesar Rp10.899.613.395,00;
3) Jasa Giro Kas Non Anggaran sebesar Rp462.720.571,00.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp157.796.050.966,00, terlihat realisasi di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp29.789.834.823,00 atau 18,88%.

7. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito Tahun Anggaran 2016 ditargetkan Rp600.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp682.397.872.598,00 atau 113,73%, dengan demikian realisasi Pendapatan Bunga Deposito melebihi target sebesar Rp82.397.872.598,00 atau 13,73%. Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga Deposito tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp1.020.372.682.026,00,00, terlihat realisasi di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp337.974.809.428,00 atau 33,12%.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana Cadangan Daerah Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp81.575.989.831,00 tersebut dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah Pokok Dana Cadangan Daerah).

8. Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2016 ditargetkan Rp115.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp103.024.117.496,00 atau 89,59%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai target sebesar Rp11.975.882.504,00 atau 10,41%.

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh dari:

a. Pengembalian Kerugian Uang Daerah sebesar Rp114.534.000,00;
b. Pengembalian Kerugian Barang Daerah sebesar Rp48.700.000,00;
c. Pengembalian Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar Rp102.860.883.496,00 terdiri atas:
    1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat sebesar Rp14.576.855.879,00;
    2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen Kemendagri sebesar Rp52.452.480,00; dan
    3) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK sebesar Rp88.231.575.138,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp116.361.201.326,00, maka di Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp13.337.083.830,00 atau 11,46%.

9. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan Rp18.700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.247.553.526,00 atau 49,45%, realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tidak mencapai target sebesar Rp9.452.446.474,00 atau 50,55%.

Realisasi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan tersebut diperoleh dari:

a. Hasil Eksekusi atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp8.105.738.816,00;
b. Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Reklame sebesar Rp1.101.879.515,00;

c. Hasil Eksekusi atas Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas (SJU) sebesar Rp39.935.195.

Jaminan tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp6.892.175.576,00, maka di Tahun 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp2.355.377.950,00 atau 34,17%.

10. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan Rp5.800.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.965.870.867,00 atau 85,62%.

Realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan sebesar Rp4.965.870.867,00 tersebut diperoleh dari:

a. Cicilan Uang Muka Rumah Susun sebesar Rp74.818.350,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
b. Sewa Beli Rumah Susun sebesar Rp4.705.796.638,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta; dan
c. Sewa Pemakaian Lantai Dasar Rumah Susun Sewa Beli sebesar Rp185.255.879,00 yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Apabila realisasi Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp5.977.671.406,00 maka di Tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp1.011.800.539,00 atau 16,93%.

11. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan

keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp2.167.747.563.039,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.950.448.104.605,00 atau 89,98%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2016 tidak mencapai target sebesar Rp217.299.458.434,00 atau 10,02%.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan realisasi BLUD Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp1.456.518.285.286,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2016 naik sebesar Rp493.929.819.319,00 atau 33,91%.

Realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 tersaji pada tabel 5.12 berikut ini.

Tabel 5.12

Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	U r a i a n	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Pendapatan dari BLUD Kesehatan Masyarakat	585.419.003.111	492.833.123.194	84,18	292.743.737.717
2	Pendapatan dari BLUD RSUD	1.428.730.746.545	1.346.789.753.110	94,26	1.079.001.212.256
3	Pendapatan dari BLUD Perhubungan	72.769.954.900	67.664.800.306	92,98	36.179.858.785
4	Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Kawasan dan Rekreasi	30.000.000.000	25.161.403.529	83,87	22.401.437.477
5	Pendapatan dari BLUD Sarana Pendidikan	2.770.600.000	2.210.611.373	79,79	3.138.325.628
6	Pendapatan dari BLUD Pengembangan Ekonomi Masyarakat	3.300.000.000	3.049.850.598	92,42	6.456.478.975
7	Pendapatan dari BLUD Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	18.450.000.000	12.738.562.495	69,04	10.503.862.152
8	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah I	7.415.100.000	-	-	2.186.528.195
9	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah II	8.014.766.283	-	-	1.880.849.625
10	Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Rumah Susun Wilayah I	10.877.392.200	-	-	2.025.994.476
Jumlah		**2.167.747.563.039**	**1.950.448.104.605**	**89,98**	**1.456.518.285.286**

Pada realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah belum termasuk komponen Pendapatan Operasional BLUD yang belum disahkan melalui mekanisme SP2D Nihil. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dicatat sebesar Belanja Operasional Layanan Umum yang telah disahkan melalui SP2D Nihil/ pengesahan. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang belum disahkan tersebut, tecatat sebagai Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah-LO.

12. Hasil Tagih Eks BPPN

Hasil Tagih timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Februari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang

menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit eks BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta.

Hasil Tagih Tahun Anggaran 2016 tidak ditargetkan. Namun, terdapat realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp674.012.416,00.

Apabila realisasi Hasil Tagih Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp2.385.568.532,00 terlihat realisasi di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp1.711.556.116,00 atau 71,75%.

13. Nilai Strategis Reklame

Pendapatan Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp67.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp25.382.499.202,00 atau 37,88%, dengan demikian realisasi Nilai Strategis Reklame di tahun 2016 tidak mencapai target sebesar Rp41.617.500.798,00 atau 62,12%.

Nilai Strategis Reklame tersebut diperoleh dari:

a. Nilai Strategis Reklame di Persil Swasta sebesar Rp5.511.198.751,00;
b. Nilai Strategis Reklame di Aset Pemda sebesar Rp177.766.601,00; dan
c. Nilai Strategis Reklame di Non Aset Pemda sebesar Rp19.693.533.850,00

Apabila realisasi Nilai Strategis Reklame tersebut dibandingkan dengan realisasi Nilai Strategis Reklame Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp21.126.917.628,00, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2016 terjadi kenaikan sebesar Rp4.255.581.574,00 atau 20,14%.

14. Hasil Kerjasama Aset Daerah

Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp5.811.854.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.568.611.093,00 atau 61,40%, dengan demikian realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah di tahun 2016 tidak mencapai target sebesar Rp2.243.242.907,00 atau 38,60%.

Penerimaan ini merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Apabila realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah tersebut dibandingkan dengan realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp8.200.318.794, terlihat realisasi Tahun Anggaran 2016 turun sebesar Rp4.631.707.701,00 atau 56,48%.

Sumber realisasi Hasil Kerjasama Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, sebagaimana pada tabel 5.13.

Tabel 5.13

Realisasi Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah (BOT/BTO)

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PT Langgeng Ayom Lestari	250.000.000	-	-	250.000.000
2	PT Hotel Cikini Realty	-	-	-	1.350.000.000
3	PT Duta Pertiwi	252.000.000	252.000.000	100,00	252.000.000
4	PT Gerak Maju Abadi	57.225.000	-	-	-
5	PT Bakrie Investindo	150.000.000	150.000.000	100,00	150.000.000
6	PT Dharma Alumas Sakti	183.181.000	366.362.042	200,00	183.181.021
7	PT Jaya Real Propertindo	145.000.000	-	-	-
8	PT Rointa Eka Jaya	14.400.000	-	-	-
9	PT Pasifik Bangun Mas	116.600.000	-	-	-
10	PT Duta Masa Nusa	500.000.000	-	-	-
11	PT Perwita Margasakti	82.000.000	82.000.000	100,00	82.000.000
12	PT Wahana Cipta Sejahtera	-	-	-	500.000.000
13	PT AGB Tuna	121.850.000	-	-	-

No	U r a i a n	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
14	PT Pasifik Prima Buana Mas	179.868.000	-	-	-
15	PT Pesona Marga Mandiri	296.450.000	592.900.000	200,00	-
16	PT Metropolitan Kencana Tbk.	810.000.000	810.000.000	100,00	771.000.000
17	PT Gama Investa Lestari	60.000.000	60.000.000	100,00	60.000.000
18	PT Fajar Setia Mandiri	185.000.000	100.000.000	54,05	270.000.000
19	Yayasan Patmos	88.578.000	88.578.050	100,00	80.525.500
20	Yayasan Katholik Mardi Luhur	36.602.500	-	-	-
21	Yayasan Tiara Kasih	22.500.000	22.500.000	100,00	22.500.000
22	Yayasan Tunas Muda	36.602.500	50.000.000	136,60	50.000.000
23	Yayasan Pelatihan E dan P	85.594.000	85.593.501	100,00	77.812.273
24	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	133.403.000	259.677.500	194,66	-
25	PT Grand Indonesia	505.000.000	505.000.000	100,00	366.500.000
26	Yayasan Bina Tugasku	1.500.000.000	-	-	3.599.800.000
27	PT Jaya Real Property	-	144.000.000	-	135.000.000
Jumlah		**5.811.854.000**	**3.568.611.093**	**61,40**	**8.200.318.794**

15. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp9.000.000.000,00 dan sampai dengan 31 Desember 2016 terealisasi sebesar Rp9.544.700.955,00 atau 106,05%. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah merupakan Penerimaan Komisi atas Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar kerja (Premi) merupakan pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

16. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Lain-Lain terealisasi sebesar Rp149.319.153.210,00 pada Tahun Anggaran 2016. Penerimaan ini merupakan penerimaan daerah yang tidak terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

17. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan Rp10.076.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.122.002.707,00 atau 50,83%, dengan demikian realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tidak mencapai target sebesar Rp4.953.997.293,00 atau 49,17%.

Apabila realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp10.256.322.383,00, terlihat realisasi di tahun 2016 terjadi penurunan sebesar Rp5.134.319.676,00 atau 50,06%.

Sumber Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016, sebagaimana pada tabel 5.14.

Tabel 5.14

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Bidang Pendidikan	50.000.000	520.301.309	1.040,60	8.306.740
2	Bidang Kesehatan	10.000.000	226.331.641	2.263,32	60.879.482
3	Bidang Pekerjaan Umum	10.000.000.000	4.237.666.861	42,38	10.032.953.067
4	Bidang Perumahan Rakyat	-	721.890	-	-
5	Bidang Penataan Ruang	15.000.000	1.074.172	7,16	33.142.292
6	Bidang Perencanaan Pembangunan	1.000.000	13.285.020	1.328,50	115.327.159
7	Bidang Perhubungan	-	66.954.566	-	5.713.643
8	Bidang Lingkungan Hidup	-	55.029.576	-	-
9	Bidang Pertanahan	-	637.672		
JUMLAH		**10.076.000.000**	**5.122.002.707**	**50,83**	**10.256.322.383**

18. Pendapatan Sanksi Pajak

Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp597.875.292.147,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp371.994.436.565,00 atau 62,22%, dengan demikian realisasi penerimaannya tidak mencapai target sebesar Rp225.880.855.582,00 atau 37,78%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp250.018.154.621,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2016 naik cukup signifikan sebesar Rp121.976.281.944,00 atau 48,79%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Sanksi Pajak Tahun Anggaran 2016 tersebut terdiri atas:

a. Pendapatan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp166.596.061.828,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp71.239.541.348,00;
   2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp95.356.520.480,00.
b. Pendapatan Sanksi Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.434.551.354,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.434.551.354,00;
   2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tidak terdapat realisasi.
c. Pendapatan Sanksi Pajak Pajak Air Tanah sebesar Rp1.767.722.549,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Air Tanah sebesar Rp1.578.649.201,00;

2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Air Tanah sebesar Rp189.073.348,00.

d. Pendapatan Sanksi Pajak Hotel sebesar Rp2.838.609.577,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hotel sebesar Rp2.022.939.048,00;
   2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hotel sebesar Rp179.381.184,00;
   3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hotel sebesar Rp636.289.345,00.

e. Pendapatan Sanksi Pajak Restoran sebesar Rp9.154.700.191,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Restoran sebesar Rp7.738.249.239,00;
   2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Restoran sebesar Rp929.702.461,00;
   3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Restoran sebesar Rp486.748.491,00.

f. Pendapatan Sanksi Pajak Hiburan sebesar Rp5.342.387.341,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Hiburan sebesar Rp4.983.621.074,00;
   2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Hiburan sebesar Rp172.567.608,00;
   3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Hiburan sebesar Rp186.198.659,00.

g. Pendapatan Sanksi Pajak Reklame sebesar Rp50.461.271.556,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Reklame sebesar Rp8.325.718.775,00;
   2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Reklame sebesar Rp42.135.552.781,00.

h. Pendapatan Sanksi Pajak Parkir sebesar Rp724.078.045,00 yang terdiri atas perolehan:

1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Parkir sebesar Rp638.215.928,00;
2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Parkir sebesar Rp38.157.361,00;
3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Parkir sebesar Rp45.624.897,00;

i. Pendapatan Sanksi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.079.859,00 yang merupakan Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

j. Pendapatan Sanksi Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.451.894.440,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp60.859.604,00;
   2) Pendapatan Sanksi Denda Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp59.502.003,00;
   3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.331.532.833,00;

k. Pendapatan Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp130.223.159.684.00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Pendapatan Sanksi Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp114.970.172.310,00; dan
   2) Pendapatan Sanksi Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp15.215.536.203,00.
   3) Pendapatan Sanksi Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp37.451.171,00.

19. Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp72.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp70.499.416.057,00 atau

97,92%, dengan demikian realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp1.500.583.943,00 atau 2,08%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2016 tersebut terdiri atas perolehan:

a. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.604.213.365,00;
b. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp5.369.045,00;
c. Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp68.889.833.647,00.

Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Retribusi Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp60.654.992.957,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2016 naik sebesar Rp9.844.423.100,00 atau 16,23%.

20. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp700.000.000. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp1.781.776.597,00 atau 254,54%, dengan demikian realisasi penerimaannya mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp1.081.776.597,00 atau 154,54%.

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 tersebut terdiri atas:

a. Denda Keterlambatan Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp481.987.537,00 yang terdiri atas perolehan:
    1) Denda Keterlambatan Sewa Tanah sebesar Rp88.571.510,00;
    2) Denda Keterlambatan Sewa Gedung sebesar Rp393.416.027,00.

b. Denda Keterlambatan Hasil Kerja Sama Aset Daerah sebesar Rp1.299.789.060,00 yang terdiri atas perolehan:
   1) Denda Keterlambatan Pembangunan sebesar Rp259.867.956,00;
   2) Denda Keterlambatan Pembayaran Kontribusi sebesar Rp1.039.921.104,00.

Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp800.267.196,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 2016 naik sebesar Rp981.509.401,00 atau 122,65%.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 semula ditargetkan sebesar Rp15.990.368.025.994,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp15.271.661.452.714,00 atau 95,51%.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 disajikan pada Tabel 5.15.

Tabel 5.15

Rekapitulasi Realisasi Pendapatan Transfer

Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Target	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	**15.990.368.025.994**	**15.271.661.452.714**	**95,51**	**5.887.267.644.697**
1.1	**Bagi Hasil Pajak**	**12.302.767.116.994**	**12.304.612.421.602**	**100,01**	**5.751.741.852.400**
a	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	100.041.325.000	106.847.462.006	106,80	135.610.649.500
b	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21)	12.202.725.791.994	12.197.764.959.596	99,95	5.616.131.202.900
1.2	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**43.142.663.000**	**83.970.656.912**	**194,63**	**135.525.792.297**
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	0	0	-	0
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	0	18.892.981	-	94.308.708
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	0	0	-	22.963.374
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.089.194.000	381.306.800	35,01	1.016.606.397
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	20.330.981.000	10.294.871.800	50,64	130.479.280.618
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	21.722.488.000	73.275.585.331	337,33	3.912.633.200
1.3	**Dana Alokasi Umum**	0	0	~	0
1.4	**Dana Alokasi Khusus**	**3.644.458.246.000**	**2.883.078.374.200**	**79,11**	**0**
2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	0	0	~	2.755.110.753.389
2.1	**Dana Penyesuaian**	0	0	**~**	2.755.110.753.389
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**2.669.095.600.000**	**1.625.027.272.083**	**60,88**	**1.880.682.954.789**
3.1	**Pendapatan Hibah**	2.669.095.600.000	1.625.027.272.083	60,88	1.880.682.954.789

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer Tahun 2016 sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp12.302.767.116.994,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp12.304.612.421.602,00 atau 100,01%, dengan demikian tahun 2016 penerimaan Bagi Hasil Pajak melampaui target sebesar Rp1.845.304.608,00 atau 0,01%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2015 yang tercatat Rp5.751.741.852.400,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak tahun 2016 naik sebesar Rp6.552.870.569.202,00 atau 113,93%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bagunan

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp100.041.325.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai sebesar Rp106.847.462.006,00 atau 106,80%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Dana Bagi Hasil PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp99.656.626.608,00;
2) Dana Bagi Hasil Biaya Pemungutan PBB Migas Bagian Daerah sebesar Rp3.659.848.750,00;
3) Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan ke daerah sebesar Rp3.530.986.648,00;

Dengan demikian realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi melebihi target sebesar Rp6.806.137.006,00 atau 6,80%.

Apabila realisasi Bagi Hasil PBB tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp135.610.649.500,00, penerimaan bagi hasil PBB tahun 2016 turun sebesar Rp28.763.187.494,00 atau 21,21%.

b. Pajak Penghasilan (PPh)

Penerimaan Bagi Hasil PPh Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp12.202.725.791.994,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp12.197.764.959.596,00 atau 99,96%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp11.496.454.286.048,00;
2) Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 sebesar Rp701.310.673.548,00;

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh sampai dengan akhir 31 Desember 2016 tidak mencapai target sebesar Rp4.960.832.398,00 atau 0,04%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp5.616.131.202.900,00, realisasi bagi hasil PPh tahun 2016 naik sebesar Rp6.581.633.756.696,00 atau 117,19%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target realisasi penerimaan PPh Bagi Hasil antara lain:

1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan intensifikasi dan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi (*Canvassing*) dengan Kanwil DJP untuk peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

3) Pelaksanaan penjaringan objek pajakpada kawasan tertentu, seperti mal, pusat pertokoan, pusat bisnis dan perdagangan.

4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepadamasyarakat dan aparat (khususnya para Bendaharawan Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp 43.142.663.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp83.970.656.912,00 atau 194,63%, dengan rincian sebagai berikut:

a. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan Rp0,00.

b. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Rp18.892.981,00.

c. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi sebesar Rp0,00.

d. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp381.306.800,00;

e. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp10.294.871.800,00;

f. Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp73.275.585.331,00;

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sampai dengan akhir 31 Desember 2016 melampaui target sebesar Rp40.827.993.912,00 atau 94,63%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp135.525.792.297,00,

realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2016 turun sebesar Rp51.555.135.385,00 atau 38,04%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya yang intensif, seperti:

a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta tidak terlambat diterima.

b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan produksi *lifting* migas dan dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.

c. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi perhitungan produksi *lifting* dan penerimaan bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta.

d. Melakukan pemantauan dan monitoring di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas.

e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam rangka perhitungan *lifting* produksi dari dana bagi hasil SDA yang akan diberikan ke daerah.

f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Umum

Pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan dana alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

4. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp3.644.458.246.000,00. Realisasi sampai dengan

akhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp2.883.078.374.200,00 atau 79,11%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.500.859.950.000,00.
2. Dana Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1.326.157.009.200,00.
3. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp8.736.415.000,00
4. Dana bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sebesar Rp42.660.000.000,00
5. Dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Rp3.915.000.000,00
6. Dana peningkatan Pengelolaan Koperasi UMKM Rp750.000.000,00

Dengan demikian realisasi Dana Alokasi Khusus sampai dengan akhir 31 Desember 2016 tidak mencapai target sebesar Rp761.379.871.800,00 atau 20,89%.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 905/501/SJ Tanggal 17 Februari 2016 penganggarannya Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dialihkan kejenis pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sehingga realisasi Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00 sedangkan Realisasi Per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp 2.755.110.753.389,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp2.669.095.600.000,00. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah sampai dengan akhir 31 Desember

2016 tercatat sebesar Rp1.625.027.272.083,00 atau 60,88%. Jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp11.097.600.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT berdasarkan Surat Perintah Pembukuan dan Pengesahan (SP3) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan sebesar Rp1.613.929.672.083,00. Penerimaaan hibah dari Pemerintah Pusat tersebut berasal dari pemberian pinjaman *Japan International Cooperation Agency (JICA)* kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen *Loan Agreement* Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008.

Sedangkan pada Tahun Anggaran 2015 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah tercatat sebesar Rp1.880.682.954.789 00, jumlah tersebut merupakan hibah dari PT Jasa Raharja sebesar Rp10.589.130.000,00 dan penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat untuk Proyek Pekerjaan Pembangunan MRT Rp1.870.093.824.789,00

5.1.2 Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah dan Transfer adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah.

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

5.1.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp57.365.040.315.366,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2016 sebesar Rp47.128.810.245.854,00 atau 82,16%, sehingga sisa anggaran di tahun 2016 yang tidak terealisasi yaitu sebesar Rp10.236.230.069.512,00 atau 17,84%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp43.031.322.947.557,00 terlihat terjadi peningkatan realisasi di tahun 2016 sebesar Rp4.097.487.298.297,00 atau 9,52%.

Rincian realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun Anggaran 2016 tergambar pada tabel 5.16.

Tabel 5.16

Realisasi Belanja Daerah dan Transfer

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6 (5:4)	7
	JENIS BELANJA				
I	**Belanja Operasi**	**44.414.721.806.354**	**37.952.281.887.604**	**85,45**	**32.415.276.659.037**
1	Belanja Pegawai	21.484.497.759.347	19.359.807.013.530	90,11	17.312.344.016.739
2	Belanja Barang dan Jasa	16.812.849.152.875	13.062.670.779.326	77,69	10.633.820.105.891
3	Belanja Bunga	30.000.000.000	11.739.277.402	39,13	5.478.639.527
4	Belanja Subsidi	1.335.426.275.800	903.898.736.862	67,69	659.081.781.344
5	Belanja Hibah	2.248.455.193.332	2.161.217.950.484	96,12	1.717.428.915.536
6	Belanja Bantuan Sosial	2.503.493.425.000	2.452.948.130.000	97,98	2.087.123.200.000
II	**Belanja Modal**	**12.626.147.305.899**	**8.965.470.014.533**	**71,01**	**10.244.016.709.208**
1	Belanja Tanah	3.032.948.358.774	1.970.939.912.239	64,98	3.451.775.763.772
2	Belanja Peralatan dan Mesin	2.288.861.798.125	1.780.464.137.977	77,79	2.002.190.574.946
3	Belanja Gedung dan Bangunan	2.649.835.256.840	1.687.059.996.551	63,67	2.063.978.323.661
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.351.189.733.684	3.287.656.766.815	75,56	2.685.243.694.385
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	303.312.158.476	239.349.200.951	78,91	40.828.352.444
III	**Belanja Tak Terduga**	**108.411.688.403**	**744.309.687**	**0,69**	**877.074.802**
1	Belanja Tak Terduga	108.411.688.403	744.309.687	0,69	877.074.802
IV	**Transfer**	**215.759.514.710**	**210.314.034.030**	**97,48**	**371.152.504.510**
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	213.601.848.300	208.527.191.300	97,62	371.152.504.510
2	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.157.666.410	1.786.842.730	82,81	0
Jumlah (I,II, III, dan IV)		**57.365.040.315.366**	**47.128.810.245.854**	**82,16**	**43.031.322.947.557**

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan

menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja Modal, Belanja Tak Terduga.

Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada Semester I Tahun 2016 diakui sebagai Belanja Hibah pada PPKD, pada Semester II Tahun 2016 dialihkan penganggaran dan pembayarannya sebagai Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan. Pada Semester II Tahun 2016, belanja langsung BOS untuk sekolah negeri terealisasi pada jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal BOS. Sedangkan dana BOS untuk sekolah swasta tetap dianggarkan dan dibayarkan dengan rekening belanja hibah pada PPKD.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2016, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 dianggarkan Rp44.414.721.806.354,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp37.952.723.467.980,00 atau 85,45%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp6.461.998.338.374,00 atau 14,55%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp21.484.497.759.347,00 . Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.359.807.013.530,00 atau 90,11%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp2.124.690.745.817,00 atau 9,89%.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp19.359.807.013.530,00 di antaranya berasal dari realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp15.782.789.572.477,00, Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap sebesar Rp1.544.185.166.443,00 dan Biaya Pegawai BOS/Honorarium Pengelolaan Dana BOS sebesar Rp13.303.337.500,00 pada Dinas Pendidikan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan peme

rintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp16.812.849.152.875,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp13.062.670.779.326,00 atau 77,69%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.750.178.373.549,00 atau 22,31%. Dari

jumlah belanja barang dan jasa tersebut, diantaranya terdapat belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp890.522.767.738,00 dan belanja yang dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud sebesar Rp572.627.000,00.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran SKPD/UKPD, diantaranya adalah:

1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp1.041.917.394.016,00 diantaranya adalah Belanja Listrik sebesar Rp410.447.178.740,00 dan Belanja Perlengkapan Penerangan Jalan Umum sebesar Rp625.849.790.000,00.
2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan sebesar Rp758.077.829.938,00 diantaranya adalah Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan) sebesar Rp598.070.322.335,00 dan Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp129.052.035.875,00 dan belanja jasa konsultasi pengawasan (supervision) sebesar Rp7.913.238.653,00.
3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sudin Pendidikan di lima wilayah kota dan kabupaten administrasi pada Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) sebesar Rp1.224.397.805.982,00 dan Belanja Barang dan Jasa Lainnya sebesar Rp83.422.627.915,00.
4) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD Rumah Sakit Tarakan sebesar Rp304.184.939.262,00 diantaranya adalah Belanja Operasional BLUD sebesar Rp265.000.000.000,00 dan Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan) sebesar Rp8.356.898.934,00.
5) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD Rumah Sakit Koja sebesar Rp356.847.929.640,00 diantaranya adalah Belanja Operasional BLUD sebesar

Rp264.999.986.083,00 dan Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor sebesar Rp63.702.281.777,00.

6) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD Rumah Sakit Cengkareng sebesar Rp295.361.814.131,00 diantaranya adalah Belanja Operasional BLUD sebesar Rp259.999.866.057,00 dan Belanja Bahan dan Pangan sebesar Rp10.326.279.922,00.

Pada akun Belanja Barang dan Jasa terdapat komponen Belanja Operasional BLUD yang mencatat seluruh pengeluaran operasional di BLUD yang sudah disahkan maupun yang belum disahkan.

Belanja yang Belum Disahkan merupakan belanja operasional BLUD yang pada akhir Bulan Desember 2016 belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah. Saldo Belanja yang Belum Disahkan per 31 Desember 2016 sebesar Rp12.636.761.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Belanja Belum Disahkan per 31 Desember 2016
1	RSUD Pasar Minggu	10.323.043.392
2	Rumah Sakit Umum Kec. Mampang Prapatan	826.685.113
3	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	574.131.560
4	BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - Jakut	195.415.482
5	Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan	176.826.761
6	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel	155.613.081
7	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar	125.842.297
8	BLUD Lainnya dibawah 100 juta rupiah	259.204.302
	Jumlah	**12.636.761.988**

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp30.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp11.739.277.402,00 atau 39,13% yang merupakan pembayaran bunga utang pinjaman kepada pemerintah, dengan demikian sisa anggaran yang tidak direalisasikan sebesar Rp18.260.722.598,00 atau 60,87%.

d. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp1.335.426.275.800,00. Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp903.898.736.862,00 atau 67,69% yang digunakan untuk Belanja Subsidi Kepada PT Trans Jakarta sebesar Rp898.456.636.862,00 dan BUMD PD Dharma Jaya Rp5.442.100.000,00. Adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp431.527.538.938,00 atau 32,31%.

e. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian Belanja Hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.248.455.193.332,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar

Rp2.161.217.950.484,00 atau 96,12%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp87.237.242.848,00 atau 3,88%.

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.161.217.950.484,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi Swasta/ Organisasi Masyarakat	1.155.963.683.332	1.120.243.705.484	96,91
2	Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	13.754.210.000	11.228.495.000	81,64
3	Belanja Hibah Dana BOS	1.036.077.300.000	995.765.350.000	96,11
4	Belanja Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	42.660.000.000	33.980.400.000	79,65
	Jumlah	**2.248.455.193.332**	**2.161.217.950.484**	**96,12**

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.503.493.425.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.452.948.130.000,00 atau 97,98%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp50.545.295.000,00 atau 2,02%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin) melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) sebesar Rp2.442.858.030.000,00.

Atas Realisasi Belanja Bansos KJP senilai Rp2.442.858.030.000,00, masih terdapat sisa KJP yang belum tersalurkan sebesar Rp265.074.120.000,00 per 31 Desember 2016 pada rekening SS di Bank DKI Provinsi DKI Jakarta nomor 10116760161. Posisi per 12 April 2017 masih terdapat sisa yang belum disalurkan sebesar Rp2.104.680.000,00.

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/ Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri sebesar Rp5.346.000.000,00;
3. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp4.744.100.000,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp12.626.147.305.899,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp8.965.470.014.533,00 atau 71,01%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.660.677.291.366,00 atau 28,99%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp3.032.948.358.774,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.970.939.912.239,00 atau 64.98% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.062.008.446.535 atau 35,02%.

Realisasi belanja tanah tersebut di antaranya terdapat pada 3 SKPD, yaitu:

1) Dinas Tata Air

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Tata Air Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp929.544.853.500,00 dan terealisasi sebesar Rp880.714.023.168,00 atau 94,75%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

a) Pembebasan Tanah untuk Waduk, Situ dan Embung di Provinsi DKI Jakarta dianggarkan Rp638.824.853.500,00 dan terealisasi Rp636.932.282.757,00 atau 99,85%.
b) Pembebasan Tanah untuk Kali/Saluran di Provinsi DKI Jakarta dianggarkan Rp290.720.000.000,00 dan terealisasi Rp242.842.128.911,00 atau 83,53%.

Realisasi Belanja Modal tanah di Dinas Tata Air per 31 Desember 2016 termasuk pengadaan tanah yang masih dalam proses konsinyasi (penitipan di pengadilan) sebesar Rp121.291.041.862,00.

2) Dinas Bina Marga

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Bina Marga Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp752.841.955.500,00 dan terealisasi sebesar Rp413.770.239.600,00 atau 54,96%. Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai berikut:

a) Pengadaan tanah Jalan dan Jembatan dianggarkan Rp502.841.962.500,00 dan terealisasi Rp198.448.079.921,00 atau 39,47%.
b) Pengadaan Tanah untuk MRT (Koridor) Jl. Lebak Bulus - Bunderan Senayan dianggarkan Rp249.999.993.000,00 dan terealisasi Rp215.322.159.679,00 atau 86,13%.

   Atas realisasi pengadaan tanah untuk MRT tersebut terdapat pengadaan tanah yang masih dalam proses konsinyasi (titip di pengadilan) sebesar Rp54.101.438.83,00.

3) Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Tahun Anggaran 2016 dianggarkan

sebesar Rp1.200.000.000.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp576.870.086.358,00 atau 48,07%. Belanja modal tersebut digunakan untuk Pembebasan Lahan untuk Ruang Terbuka Hijau di Provinsi DKI Jakarta.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.288.861.798.125,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.780.464.137.977,00 atau 77,79% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp275.093.038.167,00 atau 12,02 %.

Hampir seluruh SKPD menganggarkan belanja untuk peralatan dan mesin, adapun jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat dianggarkan sebesar Rp770.754.845.406,00. Realisasinya adalah sebesar Rp630.583.296.828,00 atau 81,81%, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat diantaranya adalah sebagai berikut:

   a) Pengadaan Kendaraan Dump Truck pada Dinas Tata Air dianggarkan sebesar Rp124.443.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 116.024.947.099,00 atau 93,24%;

   b) Pengadaan Mesin Giling pada Dinas Bina Marga, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp6.597.659.200,00 dan terealisasi sebesar Rp4.035.880.000,00 atau 61,17%;

   c) Pengadaan Eskavator pada Dinas Tata Air dianggarkan sebesar Rp159.350.627.850,00 dan terealisasi sebesar Rp127.903.462.500,00 atau 80,27%;

2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor dianggarkan sebesar Rp348.418.619.767,00. Realisasinya adalah sebesar Rp273.533.613.447,00 atau 78.51%. Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Kendaraan Truck Compactor + Truck Arm Roll + Gerobak Motor pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp242.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp182.014.357.000,00 atau 75%;

b) Pengadaan Mobil Operasional Pemeliharaan PJU pada Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp4.114.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.090.000.000,00 atau 99,42%;

c) Pengadaan Peralatan Pertamanan dan Pemakaman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman dianggarkan sebesar Rp13.417.587.645,00 dan terealisasi sebesar Rp13.247.100.000,00 atau 98,73%;

3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp18.277.237.250,00. Realisasinya adalah sebesar Rp12.387.218.280,00 atau 67,77%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Container Sampah pada Sudin Kebersihan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp 4.964.176.250,00 dan terealisasi sebesar Rp 3.223.000.000,00 atau 64,93%;

b) Pengadaan Container 10m3 dan 6m3 pada Sudin Kebersihan Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp2.911.644.175,00 dan terealisasi sebesar Rp1.892.660.000,00 atau 65%;

c) Pengadaan Container 10m3 dan 6m3 pada Sudin Kebersihan Jakarta Pusat dianggarkan sebesar Rp1.985.670.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.289.200.000,00 atau 64,93%;

4) Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan di Air Bermotor dianggarkan sebesar Rp31.960.584.779,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp28.432.612.000,00 atau 88.96%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut :

a) Pengadaan Kapal (Speed Boat) Dinas Aparatur pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp15.235.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp13.051.162.000,00 atau 85,67%;
b) Pengadaan Kapal (Speed Boat) Angkutan Sekolah pada Sudin Perhubungan dan Transportasi Kepulauan Seribu dianggarkan sebesar Rp11.055.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp10.260.508.500,00 atau 92,81%;

5) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor dianggarkan sebesar Rp6.103.570.000,00. Realisasinya adalah sebesar Rp5.050.072.500,00 atau 82,74%.

   Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

   a) Pengadaan perahu karet kapasitas 6 orang beserta kelengkapannya pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dianggarkan sebesar Rp4.900.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.549.050.000,00 atau 92,83%;
   b) Pengadaan Perahu Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dianggarkan sebesar Rp1.016.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp475.200.000,00 atau 46,75%;

6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel dianggarkan sebesar Rp1.949.601.356,00. Realisasinya adalah sebesar Rp1.264.230.173,00 atau 64,85%.

   Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Gergaji Mesin pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dianggarkan sebesar Rp381.150.000,00 dan terealisasi sebesar Rp316.800.000,00 atau 83,12%;
b) Pengadaan Kompressor Angin pada Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp165.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp151.800.000,00 atau 92%;
c) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja TPST Bantar Gebang (Mesin Las) pada Unit Pengelola Sampah Terpadu dianggarkan sebesar Rp112.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp110.165.000,00 atau 98,19%;

7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar Rp14.089.514.403,00. Realisasinya adalah sebesar Rp11.290.046.096,00 atau 80,13%.

   Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan di antaranya adalah sebagai berikut :

   a) Pengadaan Alat Pengolahan Kebersihan pada Dinas Kebersihan dianggarkan sebesar Rp8.712.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.154.771.232,00 atau 93,6%;
   b) Pengadaan Mesin Potong Rumput + Chainsaw pada Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp1.662.371.765,00 dan terealisasi sebesar Rp720.656.750,00 atau 43,35%;

8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor dianggarkan sebesar Rp6.549.405.795,00. Realisasinya adalah sebesar Rp4.753.730.223,00 atau 72,58%.

   Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Mesin Absensi pada Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air dianggarkan sebesar Rp594.594.000,00 dan terealisasi sebesar Rp576.180.000,00 atau 96,90%;
b) Pengadaan Papan Elektronik Display pada BLUD Puskesmas Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp616.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp477.283.680,00 atau 77,43%;
c) Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan pada Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I dianggarkan sebesar Rp329.395.000,00 dan terealisasi sebesar Rp196.680.000,00 atau 59,71%.

9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor dianggarkan sebesar Rp118.767.686.964,00. Realisasinya adalah sebesar Rp77.393.316.378,00 atau 65,16%

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Alat Pendingin Rehab Berat Gedung Blok B pada BLUD Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp35.875.073.300,00 dan terealisasi sebesar Rp18.567.127.280,00 atau 51,75%;
b) Pengadaan Alat Pendingin pada BLUD RS Budhi Asih dianggarkan sebesar Rp14.353.226.800,00 dan terealisasi sebesar Rp13.410.742.906,00 atau 93,43%;
c) Pengadaan Alat Pendingin Pengembangan Gedung pada BLUD Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp7.363.443.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.955.853.000,00 atau 94,46%.

10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp170.446.830.435,00. Realisasinya adalah sebesar Rp145.046.774.753,00 atau 85,10%

Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loket PTSP pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan dianggarkan sebesar Rp10.833.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp9.246.000.000,00 atau 85,34%;
b) Pengembangan Infrastruktur TIK Aplikasi Jakarta Smart City pada Dinas Komunikasi, Infromatika dan Kehumasan dianggarkan sebesar Rp28.065.375.580,00 dan terealisasi sebesar Rp26.649.907.972,00 atau 94,96%;
c) Pengadaan Software Penunjang Integrasi Database Pajak Daerah pada Dinas Pelayanan Pajak dianggarkan sebesar Rp12.839.499.310,00 dan terealisasi sebesar Rp10.403.800.000,00 atau 81,03%;

11) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dianggarkan sebesar Rp53.841.057.081,00. Realisasinya adalah sebesar Rp29.888.425.582,00 atau 55,51%

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Mebeulair Gedung UPPD pada Dinas Pelayanan Pajak dianggarkan sebesar Rp971.657.500,00 dan terealisasi sebesar Rp782.385.002,00 atau 80,52%;
b) Pengadaan Sarana Penunjang pada BLUD RSUD Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp3.799.362.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.266.677.443,00 atau 59,66%;
c) Pengadaan Sarana Penunjang pada BLUD Rumah Sakit Tarakan dianggarkan sebesar Rp3.153.976.953,00 dan terealisasi sebesar Rp1.849.962.140,00 atau 58,65%.

12) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur dianggarkan sebesar Rp3.194.409.732,00. Realisasinya adalah sebesar Rp2.140.897.436,00 atau 67,02%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Penyediaan Makan Pasien dan Karyawan pada BLUD RS Budhi Asih Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp699.555.884,00 dan terealisasi sebesar Rp449.075.000,00 atau 64,19%;

b) Peningkatan Kemandirian Warga Binaan Sosial pada PSBR Taruna Jaya dianggarkan sebesar Rp297.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp197.252.000,00 atau 66,41%;

c) Pengadaan Sarana Kerumahtanggaan pada Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan dianggarkan sebesar Rp247.544.000,00 dan terealisasi sebesar Rp218.845.000,00 atau 71,43%.

13) Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp4.442.502.081,00. Realisasinya adalah sebesar Rp3.590.566.941,00 atau 80,82%.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Vertical Blind pada Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM dianggarkan sebesar Rp72.864.000,00 dan terealisasi sebesar Rp69.877.500,00 atau 95,90%;

b) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSU Adhyaksa pada BLUD Rumah Sakit Pasar Rebo dianggarkan sebesar Rp196.732.800,00 dan terealisasi sebesar Rp195.426.000 atau 99,34%;

14) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio dianggarkan sebesar Rp20.445.228.049,00. Realisasinya adalah sebesar Rp13.145.867.777,00 atau 64,30%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Penataan Tata Pamer Museum Sejarah Jakarta pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta dianggarkan sebesar Rp2.379.086.600,00 dan terealisasi sebesar Rp1.584.935.000,00 atau 66,62%;
b) Penyempurnaan Fungsi Gedung pada RSUD Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp325.611.000,00 dan terealisasi sebesar Rp322.400.000,00 atau 99,01%;
c) Pengelolaan perangkat Command Center pada Dinas Tata Air dianggarkan sebesar Rp978.766.350,00 dan terealisasi sebesar Rp829.301.450,00 atau 84,73%.

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi dianggarkan sebesar Rp19.988.625.345,00. Realisasinya adalah sebesar Rp16.287.656.098,00 atau 81,48%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan Sistem Informasi Pajak Daerah Terkonsolidasi pada Dinas Pelayanan Pajak dianggarkan sebesar Rp11.066.269.548,00 dan terealisasi sebesar Rp9.800.890.000,00 atau 88,57%;
b) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi Pelayanan Publik pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp1.527.108.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.360.490.500,00 atau 89,09%;
c) Pemeliharaan Radio Trunking pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan dianggarkan sebesar Rp814.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp750.915.000,00 atau 92,25%.

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp21.206.549.778,00. Realisasinya adalah sebesar Rp8.697.187.028,00 atau 41,01%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pembangunan Lajur Mekanis PKB Ujung Menteng pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng dianggarkan sebesar Rp5.146.680.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.103.000.000,00 atau 79,72%;
b) Penyediaan Jasa dan peralatan pendukung penelitian teknis pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dianggarkan sebesar Rp2.478.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.877.920.000,00 atau 75,78%;
c) Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor dan Penunjangnya pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Pulogadung dianggarkan sebesar Rp1.989.251.550,00 dan terealisasi sebesar Rp888.800.000,00 atau 44,68%.

17) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran dianggarkan sebesar Rp643.486.864.530,00. Realisasinya adalah sebesar Rp489.641.885.772,00 atau 76,09%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Alat Medis pada BLUD Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp118.244.196.917,00 dan terealisasi sebesar Rp102.469.807.091,00 atau 86,66%;
b) Pengadaan Alat-Alat Kedokteran pada RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp109.380.881.870,00 dan terealisasi sebesar Rp82.737.067.344,00 atau 75,64%;

c) Pengadaan Alat Medis pada BLUD Rumah Sakit Pasar Rebo Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp73.168.743.753,00 dan terealisasi sebesar Rp57.096.064.011,00 atau 78%.

18) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp34.770.708.874,00. Realisasinya adalah sebesar Rp27.244.585.615,00 atau 78,35%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Peralatan Laboratorium pada Pusat Konservasi Cagar Budaya dianggarkan sebesar Rp71.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp70.785.000,00 atau 99%;
b) Pengadaan Alat-Alat Penunjang Medis pada BLUD Rumah Sakit Budhi Asih Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp2.783.154.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.655.922.000,00 atau 95,43%;
c) Pengadaan Alat-Alat Laboratorium pada RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan dianggarkan sebesar Rp3.254.180.600,00 dan terealisasi sebesar Rp2.246.764.586,00 atau 69,04%;

19) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar Rp167.956.500,00. Realisasinya adalah sebesar Rp92.155.050,00 atau 54,87%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Pengadaan Bahan/Alat Keamanan pada BLUD Rumah Sakit Koja Jakarta Utara dianggarkan sebesar Rp42.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp24.200.000,00 atau 56,41%;

b) Pengadaan Detektor Logam pada Unit Pengelola Graha Wisata dianggarkan sebesar Rp21.450.000,00 dan terealisasi sebesar Rp18.750.000,00 atau 87,41%;

c) Penyediaan Jasa Pengamanan Perkampungan Budaya Betawi pada Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi dianggarkan sebesar Rp17.160.000,00 dan terealisasi sebesar Rp15.400.000,00 atau 89,74%;

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut terdapat belanja sebesar Rp16.110.452.385,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp1.995.904.990,00,00 sehingga tidak menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp2.649.835.256.840,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.687.059.996.550,00 atau 63,67% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp962.775.260.290,00 atau 36,33%.

Realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut diantaranya:

1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Menganggarkan sebesar Rp1.055.033.490.154,00 dengan realisasi sebesar Rp659.870.395.880,00 atau 62,54%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

a) Pembangunan Rumah Susun KS Tubun Jakarta Barat dianggarkan sebesar Rp156.133.683.061,00 dan realisasinya sebesar Rp143.159.261.050,00 atau 91,69%;

b) Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan Rawa Buaya dianggarkan sebesar Rp86.999.986.399,00 dan realisasinya sebesar Rp78.672.375.242,00 atau 90,43%;

c) Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek Jakarta Timur dianggarkan sebesar Rp118.073.214.671,00 dan realisasinya sebesar Rp66.690.230.093,00 atau 56,48%.

2) Dinas Pendidikan

Menganggarkan sebesar Rp466.662.576.639,00 dengan realisasi sebesar Rp421.674.210.903,00 atau 90,36%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

a) Rehabilitasi Total Gedung SMPN 30 dianggarkan sebesar Rp21.704.028.802,00 dan realisasinya sebesar Rp21.141.364.000,00 atau 97,41%.

b) Rehabilitasi Total Gedung SDN Joglo 01/02/03/04 dianggarkan sebesar Rp25.078.314.755,00 dan realisasinya sebesar Rp23.624.726.000,00 atau 94,20%.

c) Rehabilitasi Total Gedung SMPN 244 dianggarkan sebesar Rp23.491.235.278,00 dan realisasinya sebesar Rp21.135.636.225,00 atau 89,97%.

3) Dinas Kesehatan

a) Design and Build Gedung AGD Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp136.212.657.434,00 dan realisasinya sebesar Rp94.556.691.225,00 atau 69,42%;

b) Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu dianggarkan sebesar Rp46.097.524.612,00 dan realisasinya sebesar Rp25.503.600.000,00 atau 55,33%;

c) Pembangunan RSUD Kelas D Kecamatan Kebayoran Baru dianggarkan sebesar Rp46.097.524.612,00 dan realisasinya sebesar Rp19.127.700.000,00 atau 41,49%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan tersebut terdapat belanja sebesar Rp11.955.725.352,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana

diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan terdapat belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp6.335.041.770,00,00 yang diserahkan ke pihak lain diluar SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun dicatat sebagai beban dalam Laporan Operasional.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp4.351.189.733.684,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.287.656.766.815,00 atau 75,56% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp1.063.532.966.869,00 atau 24,44%. Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di antaranya:

1) Dinas Bina Marga

   Menganggarkan sebesar Rp1.879.894.140.413,00 dengan realisasi sebesar Rp1.648.256.159.869,00 atau 87,68%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

   a) Pembangunan Jalan Layang Kapten Tendean -Blok M – Cileduk dianggarkan sebesar Rp1.389.612.318.425,00 dan realisasinya sebesar Rp1.208.838.491.088,00 atau 86,99%;
   b) Pembangunan/Peningkatan Jalan-jalan strategis di Prov.DKI Jakarta dianggarkan sebesar Rp255.373.239.814,00 dan realisasinya sebesar Rp239.179.469.750,00 atau 93,66%;
   c) Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas Bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp34.999.834.147,00 dan realisasinya sebesar Rp25.142.698.900,00 atau 71,84%.

2) Dinas Tata Air

Menganggarkan sebesar Rp1.240.504.632.157,00 dengan realisasi sebesar Rp728.032.393.454,00 atau 58,69%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

a) Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Sentiong-Sunter Drain dianggarkan sebesar Rp291.825.756.535,00 dan realisasinya sebesar Rp257.823.612.693,00 atau 88,35%;

b) Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP) Dredging and Embankment of Grogol-Sekretaris Drain dianggarkan sebesar 224.657.665.619 dan realisasinya sebesar 191.578.356.381 atau 85,28%;

c) Normalisasi Sungai/Kali/Waduk di Provinsi DKI Jakarta Aliran Barat dianggarkan sebesar 107.795.056.968 dan realisasinya sebesar 73.891.679.500 atau 68,55%.

3) Sudin Perhubungan Kepulauan Seribu, Pengadaan Konstruksi Bangunan Pantai dianggarkan sebesar Rp22.408.140.547,00 dan realisasinya sebesar Rp18.968.013.108,00 atau 84,65%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut terdapat belanja sebesar Rp129.657.200,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan serta terdapat Uang Muka Kerja sebesar Rp108.270.807.500,00,00 pada Dinas Bina Marga yang tidak menambah nilai aset jalan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp303.312.158.476,00. Realisasi sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp239.349.200.951,00 atau 78,91% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp63.962.957.525,00 atau 21,09%.

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut diantaranya:

1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

   Pengadaan kursi tribune penonton, perlengkapan olahraga GOR Pondok Karya Pembangunan dianggarkan sebesar Rp3.978.152.598,00 dengan realisasi sebesar Rp2.050.316.000,00 atau 51,54%.

2) Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta

   Menganggarkan sebesar Rp903.705.000,00 dengan realisasi sebesar Rp855.850.505,00 atau 94,70%. Adapun rincian penyerapan terbesar terdapat pada:

   a) Pengadaan Koleksi Benda-Benda Bersejarah di Taman Arkeologi Onrust dianggarkan sebesar Rp704.000.000,00 dan realisasinya sebesar Rp684.640.000,00 atau 97,25%;

   b) Pengadaan kelengkapan Perpustakaan (Buku Umum) Museum Kebaharian dianggarkan sebesar 199.705.000 dan realisasinya sebesar 171.210.505 atau 85,73%;

3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

   Pengadaan Buku Digital dianggarkan sebesar Rp995.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp722.889.200,00 atau 72,62%.

Dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp239.349.200.951,00 terdapat senilai Rp262.089.728.273,00 yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak menambah nilai Aset Tetap, namun dicatat sebagai beban barang dalam Laporan Operasional

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp108.411.688.403,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp744.309.687,00 atau 0,69% dan sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp107.667.378.716,00 atau 99,31%.

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2016, dapat digambarkan pada Tabel 5.17 berikut ini.

Tabel 5.17

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi Tahun 2015
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
I	**URUSAN WAJIB**	**55.315.068.069.942,00**	**45.439.571.230.431,00**	**82,15**	**41.382.797.246.958,00**
1.	Pendidikan	11.706.966.309.417,00	9.965.902.644.030,00	85,13	9.134.991.256.929,00
2.	Kesehatan	8.203.114.926.688,00	6.840.555.866.799,00	83,39	5.145.232.729.626,00
3.	Pekerjaan Umum	10.566.127.384.067,00	7.997.765.483.830,00	75,69	7.196.616.920.547,00
4.	Perumahan	1.790.092.511.178,00	1.155.591.097.763,00	64,55	1.992.172.927.387,00
5.	Penataan Ruang	253.962.243.436,00	235.230.956.262,00	92,62	220.728.243.828,00
6.	Perencanaan Pembangunan	119.859.814.658,00	93.264.406.526,00	77,81	90.366.356.992,00
7.	Perhubungan	1.091.212.313.752,00	903.525.217.762,00	82,80	681.665.734.908,00
8.	Lingkungan Hidup	2.398.307.815.371,00	1.472.537.326.892,00	61,40	2.037.197.080.011,00
9.	Pertanahan	-	-	-	-
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil	292.296.295.322,00	268.007.197.449,00	91,69	213.991.877.428,00
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.425.277.010,00	12.720.843.105,00	82,47	5.647.154.844,00
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	21.019.456.523,00	18.704.188.696,00	88,35	28.931.434.245,00
13.	Sosial	518.840.690.765,00	458.387.707.942,00	94,24	532.894.379.003,00
14.	Ketenagakerjaan	314.550.059.090,00	280.448.878.012,00	89,16	282.845.990.445,00
15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	194.063.738.567,00	159.128.622.610,00	82,00	184.686.374.579,00
16.	Penanaman Modal	29.420.920.434,00	25.662.931.889,00	87,23	26.148.493.992,00
17.	Kebudayaan	476.137.445.181,00	377.669.360.828,00	79,32	463.956.539.402,00
18.	Pemuda dan Olahraga	675.766.900.443,00	407.656.134.804,00	60,32	301.248.535.311,00
19.	Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri	85.477.055.058,00	71.803.110.760,00	84,00	62.356.897.364,00
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Kepegawaian	15.811.022.606.012,00	14.031.845.166.334,00	88,75	12.176.590.679.477,00
21.	Ketahanan Pangan	52.554.334.078,00	45.032.959.244,00	85,69	32.829.720.952,00
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	309.967.843.791,00	278.829.807.281,00	89,95	239.092.977.906,00
23.	Statistik	345.215.500,00	235.541.600,00	68,23	136.351.388,00
24.	Kearsipan	3.476.720.125,00	1.930.181.210,00	55,52	5.772.370.417,00
25.	Komunikasi dan Informatika	265.603.030.390,00	227.131.576.031,00	85,52	215.356.028.450,00
26.	Perpustakaan	119.457.163.086,00	110.004.022.773,00	92,09	111.340.191.527,00
II	**URUSAN PILIHAN**	**2.049.972.245.424,00**	**1.689.239.015.423,00**	**82,40**	**1.648.525.700.599,00**

No	Urusan Pemerintah Daerah	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi Tahun 2015
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1.	Pertanian	49.880.349.896,00	38.697.200.288,00	77,58	38.911.412.531,00
2.	Kehutanan	296.612.417,00	288.182.700,00	97,16	13.778.261.672,00
3.	Energi dan Sumberdaya Mineral	1.458.429.027.115,00	1.234.871.559.332,00	84,67	1.072.917.015.791,00
4.	Pariwisata	74.668.171.210,00	40.571.462.818,00	54,34	161.345.940.484,00
5.	Kelautan dan Perikanan	445.902.826.078,00	359.185.390.435,00	80,55	337.215.171.488,00
6.	Perdagangan	3.927.046.476,00	2.864.781.632,00	72,95	10.537.312.815,00
7.	Industri	16.868.212.232,00	12.760.438.218,00	75,65	13.820.585.818,00
	Jumlah (I dan II)	**57.365.040.315.366,00**	**47.128.810.245.854,00**	**82,16**	**43.031.322.947.557,00**

I. Belanja Daerah Urusan Wajib

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.706.966.309.417,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 9.965.902.644.030,00 atau 85,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp719.176.296.168,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp648.663.923.500,00 atau 90,20%.

2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun

Untuk Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.149.665.857.285,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.705.089.065.071,00 atau 79,32%.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp593.959.241.062,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp434.156.582.918,00 atau 73,10%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64.672.349.869,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp47.441.889.373,00 atau 73,36%.

5) Program Pendidikan Anak Usia Dini

Untuk Program Pendidikan Anak Usia Dini, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.784.022.425,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.949.291.138,00 atau 72,96%.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.203.114.926.688,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 6.840.555.866.799,00 atau 83,39%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD

Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.032.611.193.229,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.854.706.820.072,00 atau 91,25%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.324.477.691.570,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp876.509.674.795,00 atau 66,18%.

3) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

Untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp950.633.007.595,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp878.843.054.711,00 atau 92,45%.

4) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan

Untuk Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp962.308.305.301,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp828.932.318.433 atau 86,14%.

5) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp588.789.931.758,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp398.810.519.475,00 atau 67,73%.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.566.127.384.067,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.997.765.483.830,00 atau 75,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan

   Untuk Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.485.732.642.981,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.094.526.868.693,00 atau 84,26%.

2) Program Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana

   Untuk Program Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.682.065.809.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.294.163.262.768,00 atau 76,94%.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum

   Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.293.899.459.328,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.017.120.403.302,00 atau 78,61%.

4) Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

   Untuk Program Rehabilitasi atau Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.165.937.881.295,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp991.285.934.165,00 atau 85,02%.

5) Program Pengembangan Sistem Drainase

   Untuk Program Pengembangan Sistem Drainase, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.083.240.909.536,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp839.978.389.851,00 atau 77,54%.

4. Urusan Perumahan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perumahan, pada Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.790.092.511.178,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.155.591.097.763,00 atau 64,55%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan Perumahan Rakyat, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp869.949.943.397,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp559.178.448.336,00 atau 64,28%.

2) Program Pembangunan Gedung Pemda

Untuk Program Pemeliharaan Gedung Pemda, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp267.011.936.525,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp160.682.145.949,00 atau 60,18%.

3) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun

Untuk Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp172.675.462.781,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp120.427.461.175,00 atau 69,74%.

4) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan Kampung, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp202.529.676.968,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp116.853.656.012,00 atau 57,70%.

5) Program Pemeliharaan Gedung Pemda

Untuk Program Pemeliharaan Gedung Pemda, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp64.159.653.766,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp48.307.961.559,00 atau 75,29%.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp253.962.243.436,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp235.230.956.262,00 atau 92,62%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan

Untuk Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.296.431.673,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.293.695.760,00 atau 82,27%.

2) Program Peningkatan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.152.177.864,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.002.085.508,00 atau 80,72%.

3) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang

Untuk Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.028.615.295,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.692.665.800,00 atau 88,91%.

4) Program Perencanaan Tata Ruang

Untuk Program Perencanaan Tata Ruang, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.983.257.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.680.162.000,00 atau 84,72%.

5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

Untuk Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp414.227.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp345.207.500,00 atau 83,34%.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp199.859.814.658,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp93.264.406.526,00 atau 77,81%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.844.433.513,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.381.413.822,00 atau 64,01%.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan

Untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.767.811.800,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp2.991.709.984,00 atau 62,75%.

3) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp857.158.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp475.093.200,00 atau 55,43%.

4) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.241.316.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp986.133.000,00 atau 79,44%.

5) Program Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Pembangunan Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.106.762.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp879.218.660,00 atau 79,44%.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.091.212.313.752,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp903.525.217.762,00 atau 82,80%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Sinkronasi Kebijakan Daerah

Untuk Program Sinkronasi Kebijakan Daerah, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp6.773.511.302,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.655.227.247,00 atau 68,73%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp202.731.197.805,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp150.905.053.735,00 atau 74,44%.

3) Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan

Untuk Program Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp114.998.941.706,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp89.614.124.458,00 atau 77,93%.

4) Program Pembangunan Angkutan Massal berbasis rel

Untuk Program Pembangunan Angkutan Massal berbasis rel, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp57.678.301.314,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.911.317.113,00 atau 65,73%.

5) Program Pembangunan Transportasi Perairan

Untuk Program Pembangunan Transportasi Perairan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp46.219.156.327,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp37.687.924.205,00 atau 81,54%.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.398.307.815.317,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 1.472.537.326.892 atau 61,40%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman

   Untuk Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.200.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp576.870.086.358,00 atau 48,07%.

2) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman

   Untuk Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp323.761.428.854,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp217.500.494.707,00 atau 67,18%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

   Untuk Program Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp110.411.015.110,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp77.308.168.131,00 atau 70,02%.

4) Program Konservasi Flora dan Fauna

   Untuk Program Konservasi Flora dan Fauna, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp57.401.879.588,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp46.579.526.433,00 atau 81,15%.

5) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman

   Untuk Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp39.393.877.798,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp30.111.791.184,00 atau 76,44%.

9. Urusan Pertanahan

Tidak terdapat alokasi dan realisasi Urusan Pertanahan pada tahun 2016.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 292.296.295.322 serta telah direalisasikan sebesar Rp268.007.197.449 atau 91,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp63.122.801.717,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp56.909.323.857,00 atau 90,16%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12.198.023.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.235.379.108,00 atau 75,71%.

3) Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan

Untuk Program Pengembangan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Administrasi Kependudukan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.865.443.265,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp1.510.460.608,00 atau 80,97%.

4) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data kependudukan dan Pencatatan Sipil

Untuk Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data kependudukan dan Pencatatan Sipil, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.136.187.575,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp914.279.865,00 atau 80,47%.

5) Program Pembinanaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Untuk Program Pembinanaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp442.227.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp322.432.800,00 atau 72,91%.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.425.277.010,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp12.720.843.105,00 atau 82,47%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan

Untuk Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.365.381.953,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp9.351.923.012,00 atau 82,28%.

2) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Untuk Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.261.108.026,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.752.179.554,00 atau 77,49%.

3) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak

Untuk Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.690.237.031,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.516.300.539,00 atau 89,71%.

4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp108.550.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp100.440.000,00 atau 92,53%.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.019.456.523,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.704.188.696,00 atau 88,99%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Keluarga Berencana

Untuk Program Keluarga Berencana, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp11.261.214.163,00

dan telah direalisasikan sebesar Rp11.008.974.533,00 atau 97,76%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.673.448.282,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.825.120.661,00 atau 81,85%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.273.533.740,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.316.989.152,00 atau 57,93%.

4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Untuk Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp894.470.980,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp841.008.000,00 atau 94,02%.

5) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Untuk Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp936.473.475,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp839.038.150,00 atau 89,60%.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp518.840.690.765,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp458.387.707.942,00 atau 88,35%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial

Untuk Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.103.723.410,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp13.999.316.360,00 atau 81,85%.

2) Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Untuk Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp176.783.257.940,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp150.564.860.195,00 atau 85,17%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp41.059.981.544,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp31.347.041.809,00 atau 76,34%.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp21.849.530.740,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.661.350.808,00 atau 85,41%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.329.267.186,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.176.925.970,00 atau 65,39%.

14. Urusan Ketenagakerjaan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp314.550.059.090,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp280.448.878.012,00 atau 89,16%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp43.224.954.835,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp33.528.302.115,00 atau 77,57%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.524.682.778,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.885.906.809,00 atau 83,85%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Untuk Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.751.540.898,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.485.500.748,00 atau 90,33%

4) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.944.027.588,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.804.389.536,00 atau 92,82%.

5) Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja

Untuk Program Penguatan sistem dan fasilitas pendukung pusat pelatihan kerja, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.362.888.603,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.180.144.930,00 atau 86,59%.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp194.063.738.567,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp159.128.622.610,00 atau 82,00%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.869.965.580,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp29.330.068.893,00 atau 86,60%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran Rp10.559.394.593,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.278.694.669,00 atau 31,05%.

3) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Untuk Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp880.243.250,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp811.240.172,00 atau 92,16%.

4) Program Pemberdayaan UMKM

Untuk Program Pemberdayaan UMKM, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.856.539.001,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.292.698.970,00 atau 69,63%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp279.786.740,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp169.655.324,00 atau 60,64%.

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp29.420.920.434,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp25.662.931.889,00 atau 87,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.129.829.715,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.299.903.920,00 atau 73,48%.

2) Program Peningkatan Kinerja BUMD

Untuk Program Peningkatan Kinerja BUMD, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.424.134.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.553.376.900,00 atau 64,08%.

3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Untuk Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp765.628.952,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp649.830.000,00 atau 84,88%.

4) Program Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal

Untuk Program Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp144.480.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp138.180.000,00 atau 95,64%.

5) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp68.550.495,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp35.792.947,00 atau 52,21%.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp476.137.445.181,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp377.669.360.828,00 atau 79,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp136.514.394.542,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp109.501.876.970,00 atau 80,21%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran

sebesar Rp112.014.224.209,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp70.414.801.278,00 atau 62,86%

3) Program Pengembangan Promosi dan informasi Kebudayaan

Untuk Program Pengembangan Promosi dan informasi Kebudayaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.353.944.715,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.300.301.282,00 atau 65,51%.

4) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan

Untuk Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.082.064.730,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp480.943.000,00 atau 44,45%.

5) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan

Untuk Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.009.887.661,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.270.388.362,00 atau 75,19%.

18. Urusan Pemuda dan Olahraga

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp675.766.900.443,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp407.656.134.804,00 atau 60,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Olahraga

Untuk Program Pengembangan Olahraga, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp30.942.693.468,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.602.223.984,00 atau 63,35%.

2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi

Untuk Program Pembinaan Olahraga Prestasi, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp324.572.190.364,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp152.965.062.893,00 atau 47,13%.

3) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp88.081.521.924,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp67.716.803.984,00 atau 76,88%.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp104.968.687.824,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.093.185.615,00 atau 51,53%.

5) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Untuk Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp20.572.946.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.738.635.654,00 atau 76,50%.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar

Rp85.477.055.058,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp71.803.110.760,00atau 84,00%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Untuk Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.888.232.779,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.164.863.680,00 atau 81,40%.

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.106.539.165,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.152.585.005,00 atau 84,38%.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.977.292.570,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.959.036.970,00 atau 59,45%.

4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan

Untuk Program Penguatan Hubungan Kelembagaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.646.867.300,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.109.180.300,00 atau 79,69%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.438.436.714,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.632.461.750,00 atau 66,95%.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegewaian dan Persandian pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.811.022.606.012,00 dan serta telah direalisasikan sebesar Rp14.031.845.166.334,00 atau 88,75%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Kelurahan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.713.253.690.924,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.464.819.592.004,00 atau 85,50%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp864.741.439.085,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp647.224.507.199,00 atau 74,85%.

3) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Untuk Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.984.003.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.336.636.500,00 atau 67,37%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp159.091.023.525,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp76.955.696.213,00 atau 48,37%.

5) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Untuk Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp83.739.270.708,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp66.495.202.259,00 atau 79,41%.

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp52.554.334.078,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp45.032.959.244,00 atau 85,69%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet)

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hewan (kesmavet), pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.764.063.197,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp15.158.549.606,00 atau 80,79%.

2) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp16.639.869.455,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.741.950.515,00 atau 88,59%.

3) Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran

Untuk Program Pengamanan ketersediaan pangan, pengendalian akses, harga, promosi, dan distribusi/ pemasaran, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.234.029.585,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.506.603.550,00 atau 91,17%.

4) Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan

Untuk Program Peningkatan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil perikanan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp7.055.872.372,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp6.230.018.773,00 atau 88,30%.

5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.395.375.091,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.171.655.882,00 atau 83,97%.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp309.967.843.791,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp278.829.807.281,00 atau 89,95%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp23.819.298.206,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.237.061.803,00 atau 76,56%.

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.379.044.613,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.242.599.163,00 atau 74,05%.

3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.552.850.600,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.291.369.624,00 atau 83,16%.

4) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp87.068.858,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp54.135.558,00 atau 62,18%.

23. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp345.215.500,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp235.541.600,00 atau 68,23%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah Program Statistik daerah. Untuk Program Statistik daerah, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp345.215.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp235.541.600,00 atau 68,23%.

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.476.720.125,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp1.930.181.210,00 atau 55,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pelayanan Arsip

Untuk Program Peningkatan Arsip, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.723.360.750,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.297.117.250,00 atau 47,63%.

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Untuk Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp622.937.145,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp539.014.735,00 atau 86,53%.

3) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah

Untuk Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp94.013.920,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp65.363.100,00 atau 69,52%.

4) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp36.408.310,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp28.686.125,00 atau 78,79%.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp265.603.030.390,00 serta telah direalisasikan sebesar Rp227.131.576.031,00 atau 85,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp65.348.143.306,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp55.673.264.227,00 atau 85,19%.

2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik

Untuk Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp54.354.117.437,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp46.435.357.546,00 atau 85,43%.

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.450.347.390,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp17.979.814.685,00 atau 80,09%.

4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi

Untuk Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp8.090.797.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp7.277.988.402,00 atau 89,95%.

5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

Untuk Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.846.034.270,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.043.699.986,00 atau 73,67%.

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2016 dan Realisasi:

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp119.457.163.086,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp110.004.022.773,00 atau 92,09%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.917.311.455,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp19.868.327.883,00 atau 86,70%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.624.126.738,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.142.762.498,00 atau 81,66%.

3) Program Pengembangan Budaya Baca

Untuk Program Pengembangan Budaya Baca, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.678.346.468,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.049.203.333,00 atau 76,51%.

4) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.409.593.661,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.861.081.645,00 atau 77,24%.

5) Program Pengengembangan Data/Informasi SKPD

Untuk Program Pengengembangan Data/Informasi SKPD, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp752.564.256,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp476.301.400,00 atau 63,29%.

II. Belanja Daerah Urusan Pilihan

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Urusan Pertanian

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pertanian pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.880.349.896,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp 38.697.200.288 atau 77,58%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

   Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp22.772.422.476,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp18.519.276.131,00 atau 81,32%.

2) Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura

   Untuk Program Peningkatan dan pengembangan teknologi budidaya tanaman pangan dan hortikultura, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp15.566.798.957,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.294.386.092,00 atau 78,98%.

3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis

   Untuk Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.335.519.488,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.475.112.965,00 atau 70,64%.

4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan

   Untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.326.963.488,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.951.476.707,00 atau 83,86%.

2. Urusan Kehutanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kehutanan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp296.612.417,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp288.182.700,00 atau 97,16%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalahProgram Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Untuk Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran Rp296.612.417,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp288.182.700,00 atau 97,16%.

3. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.458.429.027.115,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.234.871.559.332,00 atau 84,67%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota

Untuk Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.288.814.231.258,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.092.103.796.847,00 atau 84,74%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp28.271.153.074,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.766.367.625,00 atau 80,53%.

3) Program Pengelolaan Kendaraan Dinas

Untuk Program Pengelolaan Kendaraan Dinas, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp31.296.666.213,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp22.649.646.715,00 atau 72,37%.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.782.299.768,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.605.195.200,00 atau 45,05%.

5) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan

Untuk Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.135.934.187,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.863.308.100,00 atau 75,22%.

4. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp74.668.171.210,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp40.571.462.818,00 atau 54,34%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, pada tahun 2016 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp24.622.022.430,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.031.337.028,00 atau 48,86%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp14.288.230.463,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp10.222.582.175,00 atau 71,55%.

3) Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.904.008.676,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp8.955.201.225,00 atau 52,98%.

4) Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata

Untuk Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp13.879.847.228,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.926.803.436,00 atau 42,70%.

5) Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.836.529.133,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp3.158.392.624,00 atau 82,32%.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp445.902.826.078,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp359.185.390.435,00 atau 80,55%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap

   Untuk Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp80.884.533.552,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp63.182.865.712,00 atau 78,11%.

2) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

   Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp32.621.976.208,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp26.472.652.944,00 atau 81,15%.

3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

   Untuk Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp18.260.974.441,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp14.851.088.147,00 atau 81,33%.

6. Urusan Perdagangan

a. Program dan Kegiatan:

   Untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.927.046.476,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.864.781.632,00 atau 72,95%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

   Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian

   Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp2.843.975.236,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.195.544.697,00 atau 77,20%.

2) Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan

Untuk Program Perlindungan Konsumen, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp503.657.240,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp210.723.935,00 atau 41,84%.

3) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri

Untuk Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp579.414.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp458.513.000,00 atau 79,13%.

7. Urusan Industri

a. Program dan Kegiatan:

Untuk Urusan Industri pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.868.212.232,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp12.760.438.218,00 atau 75,65%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara lain:

1) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor

Untuk Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.986.374.948,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.662.889.225,00 atau 81,06%.

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.528.318.257,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp4.755.646.973,00 atau 72,85%.

3) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri

Untuk Program Peningkatan Kualitas Produk Industri, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.575.727.877,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.682.488.670,00 atau 65,32%.

4) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri

Untuk Program Pengembangan dan Pengendalian Industri, pada tahun 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp777.791.150,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp659.413.350,00 atau 84,78%.

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016, disajikan pada Tabel 5.18.

Tabel 5.18

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015

(dalam rupiah)

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
BELANJA TIDAK LANGSUNG		**26.360.699.524.649,00**	**23.768.629.446.037,00**	**90,17**	**20.707.205.012.883,00**
I	**BELANJA PEGAWAI**	**19.919.153.427.404,00**	**18.027.767.007.572,00**	**90,50**	**15.866.062.897.164,00**
	1.Gaji dan Tunjangan	16.995.741.284.404,00	15.837.994.524.977,00	93,19	13.688.201.281.121,00
	2.Tambahan Penghasilan PNS	40.936.814,00	37.798.792.770,00	636,68	3.137.056.600,00
	3.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	65.833.362.000,00	63.471.007.170,00	96,41	62.701.582.000,00
	4.Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	485.488.087.000,00	472.834.779.806,00	97,39	477.938.093.998,00
	5.Biaya Kematian Pegawai	27.829.500.000,00	22.653.770.270,00	81,40	35.262.981.460,00
	6.Biaya Guru NIP 15	38.436.000.000,00	37.895.575.000,00	98,59	38.174.300.000,00
	7.Belanja Penghasilan Lainnya	2.001.642.280.000,00	1.305.652.282.579,00	65,23	1.295.723.824.322,00
	8.Tunjangan Transport Pejabat (Pengganti KDO Pejabat)	263.246.100.000,00	249.466.275.000,00	94,77	264.923.777.663,00
II	**BELANJA BUNGA**	**30.000.000.000,00**	**11.739.277.402,00**	**39,13**	**5.478.639.527,00**
	Bunga Utang Pinjaman	30.000.000.000,00	11.739.277.402,00	39,13	5.478.639.527,00
III	**BELANJA SUBSIDI**	**1.335.426.275.800,00**	**903.898.736.862,00**	**67,69**	**659.081.781.344,00**
	Belanja Subsidi Kepada Perusahaan/Lembaga	1.335.426.275.800,00	903.898.736.862,00	67,69	659.081.781.344,00
IV	**BELANJA HIBAH**	**2.248.455.193.332,00**	**2.161.217.950.484,00**	**96,12**	**1.717.428.915.536,00**
	1.Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta	1.155.963.683.332,00	1.120.243.705.484,00	96,91	670.888.815.536,00
	2.Belanja Hibah Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	13.754.210.000,00	11.228.495.000,00	81,64	69.225.000.000,00
	3.Belanja Hibah Dana BOS	1.036.077.300.000,00	995.765.350.000,00	96,11	977.315.100.000,00
	4.Belanja Hibah Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	42.660.000.000,00	33.980.400.000,00	79,65	-
V	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**	**2.503.493.425.000,00**	**2.452.948.130.000,00**	**97,98**	**2.087.123.200.000,00**
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	5.476.950.000,00	4.744.100.000,00	86,62	7.501.750.000,00
	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	2.484.516.475.000,00	2.442.858.030.000,00	98,32	2.079.621.450.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	13.500.000.000,00	5.346.000.000,00	39,60	-
VI	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA**	**215.759.514.710,00**	**210.314.034.030,00**	**97,48**	**371.152.504.510,00**
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	213.601.848.300,00	208.527.191.300,00	97,62	369.674.163.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	2.157.666.410,00	1.786.842.730,00	82,81	1.478.341.510,00
VII	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**108.411.688.403,00**	**744.309.687,00**	**0,69**	**877.074.802,00**
	Belanja Tidak Terduga	108.411.688.403,00	744.309.687,00	0,69	877.074.802,00
BELANJA LANGSUNG		**31.004.340.790.717,00**	**23.360.180.799.817,00**	**75,34**	**22.324.117.934.674,00**
I	**BELANJA PEGAWAI**	**1.565.344.331.943,00**	**1.332.040.005.958,00**	**85,10**	**1.446.281.119.575,00**
	1. Honorarium Non PNS	1.544.185.166.443,00	1.318.296.945.830,00	85,37	1.434.285.246.117,00
	2. Uang Lembur	787.680.000,00	-	-	-
	3. Biaya Pegawai BOS/Honorarium	13.303.337.500,00	9.677.557.128,00	72,75	-

No	Kelompok/Jenis	Tahun Anggaran 2016		%	Realisasi 2015
		Anggaran	Realisasi		
1	2	4	5	6(5:4)	7
	Pengelolaan Dana BOS				
	4. Uang Perjalanan Kegiatan dalam Kota	7.068.148.000,00	4.065.503.000,00	57,52	11.995.873.458,00
II	**BELANJA BARANG DAN JASA**	**16.812.849.152.875,00**	**13.062.670.779.327,00**	**77,69**	**10.633.820.105.891,00**
III	**BELANJA MODAL**	**12.626.147.305.899,00**	**8.965.470.014.533,00**	**71,01**	**10.244.016.709.208,00**
Jumlah		**57.365.040.315.366,00**	**47.128.810.245.854,00**	**82,16**	**43.031.322.947.557,00**

5.1.3 Transfer

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer / Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer / Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan yang dalam Laporan Keuangan Tahun 2015 disajikan dalam kelompok Belanja Operasi dan Transfer, pada Laporan Keuangan Tahun 2016 disajikan dalam bentuk Transfer.

Transfer / Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer / Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2016 dianggarkan sebesar Rp215.759.514.710,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp210.314.034.030,00 atau 97,48%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp5.445.480.680,00 atau 2,59%.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp210.314.034.030,00 berasal dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp208.527.191.300,00 dan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.786.842.730,00.

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp208.527.191.300,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Pemerintah Kabupaten Bogor	2.900.000.000,00
2.	Pemerintah Kota Tangerang	15.196.848.300,00
3.	Pemerintah Kabupaten Cianjur	6.450.000.000,00
4.	Pemerintah Kota Bekasi	183.980.343.000,00
Jumlah		**208.527.191.300,00**

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp1.786.842.730,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	DPW Partai Nasional Demokrat Sekretariat : Gedung Djakarta Theater Lt. 1 unit B2, Jl M.H. Thamrin No 9. Jakarta 10350	84.507.970,00
2.	DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jl. Pal Putih No. 193 A Jakarta Pusat 10450	106.665.190,00
3.	DPW Partai Keadilan Sejahtera Jl. Kwitang Raya No. 14 Jakarta Pusat 10420	174.004.000,00
4.	DPD Partai Hati Nurani Rakyat Jl. Pegambiran No. 2 Jati Rawamangun, Jakarta Timur 13220	146.372.870,00
5.	DPD Partai Demokrat Jl. Pemuda No. 712 Rawamangun, Jakarta 13220	147.980.890,00
6.	DPD Partai Gerakan Indonesia Raya Jl. Bendungan Hilir Raya No. 118 Jakarta Pusat 10220	242.913.520,00
7.	DPD Partai Golkar Jl. Pegangsaan Barat No. 4, Jakarta 10310	308.501.220,00
8.	DPW Partai Amanat Nasional Rumah PAN Jl. Tebet Timur Dalam II No. 8 Jakarta Selatan	70.841.440,00
9.	DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jl. Tebet Raya No. 46 Jakarta Selatan 12820	505.055.630,00
Jumlah		**1.786.842.730,00**

5.1.4 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.607.751.958.338,00. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 yang telah diaudit oleh BPK-RI sebesar Rp4.933.519.451.750,00, Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp335.756.625.269,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp338.475.881.319,00.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015 tercatat sebesar Rp4.557.358.688.274,00 terdiri dari:

a.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp	81.575.989.831,00
b.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp	4.475.782.698.443,00
	Jumlah	**Rp**	**4.557.358.688.274,00**

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp81.575.989.831,00 bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari pencairan APBD Tahun Anggaran 2016, melainkan pendapatan bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.475.782.698.443,00 merupakan penyertaan modal kepada:

1) PD Dharma Jaya sebesar Rp72.853.026.360,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2731 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2016. Adapun penyertaan modal kepada PD Dharma Jaya tahun 2016 diberikan dalam rangka pembibitan dan penggemukan sapi perluasan tempat pemotongan ayam dan untuk unit usaha eksisting.

2) PD Pasar Jaya sebesar Rp170.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2679 Tahun 2016 tentang Pencairan

Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2016. Adapun penyertaan modal kepada PD Dharma Jaya tahun 2016 diberikan dalam rangka pembangunan pasar rakyat, pengembangan usaha distribusi dan retail argo serta sistem manajemen.

3) PD Pal Jaya sebesar Rp140.000.000.000, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2660 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Pal Jaya Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pengembangan cakupan layanan serta pelayanan pengelolaan air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4) PT Food Station Tjipinang sebesar Rp300.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2734 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Pal Jaya Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembelian persediaan beras dan sertifikasi atas lahan.

5) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp1.000.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2732 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembangunan prasarana kereta api ringan/Light Rail Transit, infrastruktur olah raga Velodrome dan infrastruktur olah raga Equestrian.

6) PT Bank DKI sebesar Rp500.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2659 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank DKI Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka memperkuat modal PT Bank DKI untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR), ekspansi kredit, pengembangan jaringan layanan, penyempurnaan teknologi informatika (*core banking system)* dan pertumbuhan *un-organic.*

7) PT Mass Rapid Transit Jakarta sebesar Rp1.762.929.672.083,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2730 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan hibah sebesar Rp.1.613.929.672.083,00

8) PT Transportasi Jakarta sebesar Rp330.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2719 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka penyediaan fasilitas kerja, sarana dan cadangan likuiditas.

9) PT Penjamin kredit Daerah sebesar Rp200.000.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2733 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Penjamin kredit Daerah Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka melakukan usaha penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), memudahkan dan membantu akses permodalan bagi UMKMK.

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Nilai Saldo Anggaran (SAL) Lebih per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp7.706.289.336.723,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

SAL per 31 Desember 2015		4.933.519.451.750,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan		(4.933.519.451.750,00)
Subtotal		0,00
Pendapatan	53.784.706.312.513,00	
Belanja	(47.128.810.245.854,00)	
Surplus	6.655.896.066.659,00	
Penerimaan Pembiayaan	5.607.751.958.338,00	
Pengeluaran Pembiayaan	(4.557.358.688.274,00)	
Pembiayaan Netto	1.050.393.270.064,00	
SiLPA Tahun 2016		7.706.289.336.723,00
Subtotal		7.706.289.336.723,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00
Lain-lain		0,00
SAL per 31 Desember 2016		7.706.289.336.723,00

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.723.737.512.402,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2016 sebesar Rp7.706.289.336.723,00, dimana SiLPA tahun 2016 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi

pendapatan - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2016 sebesar Rp1.017.448.175.679,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK, Kas Transitoris, dan Pendapatan yang Belum Dilakukan Pengesahan di BUD. Selain itu, terdapat pengurang SiLPA dikarenakan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.5.11.g.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo Kas	8.723.737.512.402	
SILPA	7.706.289.336.723	
Selisih		**1.017.448.175.679**
Rincian Selisih SILPA		
Utang PFK		1.600.892.901
Potongan Pajak dan Jamsostek	1.771.000	
Pajak di SKPD yang belum disetor	414.974.370	
Pajak di BLUD yang belum disetor	1.086.455.531	
Potongan Non Pajak yang belum disetor	97.692.000	
Uang Jaminan		2.283.500
Kas Transitoris	2.283.500	
Pendapatan Belum Disahkan		1.016.312.779.197
Jasa Giro di SKPD yang belum disetor	2.377.506	
Kas Tunai - BLUD	1.320.020.275	
Kas di Bank - BLUD	1.013.150.761.377	
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.608.907.385	
Pendapatan yang Belum Disetor	230.712.654	
Kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara		(467.779.919)
Total		**1.017.448.175.679**

5.3 Laporan Operasional

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan darisiklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunanLaporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

5.3.1 Kegiatan Operasional

Kelompok kegiatan operasional terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode Tahun 2016, nilai Surplus dari Kegiatan Operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp21.863.977.061.253,00 Adapun nilai surplus tersebut dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO yang tercatat sebesar Rp65.201.703.739.643,00 dikurang dengan jumlah Beban-LO yang tercatat sebesar Rp43.337.726.678.390,00.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO kelompok kegiatan operasional sebagai berikut:

5.3.1.1 Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp65.201.703.739.643,00 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO (PAD) sebesar Rp47.134.104.847.359,00, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp16.325.457.995.170,00, sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.742.140.897.114,00

Untuk lebih jelasnya Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2016 dapat digambarkan pada Tabel 5.19 berikut ini.

Tabel 5.19
Rekapitulasi Pendapatan-LO Daerah
Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan LO	
		TA 2016	TA 2015
1.	Pendapatan Asli Daerah	47.134.104.847.359,00	39.646.968.750.711,00
2.	Pendapatan Transfer	16.325.457.995.170,00	11.327.202.422.389,00
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.742.140.897.114,00	1.910.504.881.067,00
Jumlah		**65.201.703.739.643,00**	**55.639.786.807.556,00**

5.3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp47.134.104.847.359,00. Secara garis besar gambaran Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada Tabel 5.20 dibawah ini.

Tabel 5.20

Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2016	Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2015
1	2	3	4
1.	Pajak Daerah-LO	31.802.399.896.090,00	30.021.691.108.000,00
2.	Retribusi Daerah-LO	677.424.218.710,00	414.943.915.696,00
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	2.317.418.705.808,00	15.363.325.157,00
4.	Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO	12.336.862.026.751,00	9.194.970.401.858,00
Jumlah		**47.134.104.847.359,00**	**39.646.968.750.711,00**

Bila dibandingkan Pendapatan Asli Daerah - LO tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp39.646.968.750.711,00 terjadi kenaikan sebesar Rp7.487.136.096.648,00 atau 18,88%. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO disampaikan berikut ini.

1. Pajak Daerah-LO

Penerimaan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp31.802.399.896.090,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp30.021.691.108.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.780.708.788.090,00 atau 5,93%. Pendapatan Pajak Daerah-LO tersebut merupakan pendapatan berdasarkan Setoran Masa (untuk Pajak *Self Assesment*) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang terbit tahun 2016 dikurangi dengan keputusan pengurangan atau keberatan. Lebih rinci mengenai Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 digambarkan pada Tabel 5.21.

Tabel 5.21

Rekapitulasi Penerimaan Pajak Daerah -LO

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Asli Daerah-LO Per 31 Desember Tahun 2016
1	2	3
1	Pajak Kendaraan Bermotor	7.013.717.903.721
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.001.566.183.446
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.094.899.313.127
4	Pajak Air Tanah	113.404.703.392
5	Pajak Hotel	1.512.313.453.051
6	Pajak Restoran	2.450.421.412.791
7	Pajak Hiburan	749.129.648.078
8	Pajak Reklame	652.927.466.080
9	Pajak Penerangan Jalan	714.835.029.419
10	Pajak Parkir	467.802.603.349
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3.915.267.762.981
12	Pajak Rokok	531.269.133.932
13	Pajak Bumi dan Bangunan	7.584.845.282.723
Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO		**31.802.399.896.090**

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan Bermotor yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp7.013.717.903.721,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.119.703.400.553,00 terjadi kenaikan sebesar Rp894.014.503.168,00 atau 14,61%. Rincian atas Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PKB - LO
1	2	3
1	NOTICE BAYAR	6.450.147.518.331,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	563.570.385.390,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH PENDAPATAN PKB-LO	**7.013.717.903.721,00**

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-LO

Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp5.001.566.183.446,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.685.403.800.610,00 terjadi kenaikan sebesar Rp316.162.382.836,00 atau 6,75%. Rincian atas Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN BBN-KB - LO
1	2	3
1	NOTICE BAYAR	5.001.561.583.446,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	4.600.000,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH PENDAPATAN BBN KB-LO	**5.001.566.183.446,00**

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)-LO

Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp.1.094.899.313.127,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.233.223.096.785,00 terjadi penurunan sebesar Rp138.323.783.658,00 atau 11,22%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PBB-KB - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK BAHAN BAKAR KB	1.094.899.313.127,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	-
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH PENDAPATAN PBB KB-LO	**1.094.899.313.127,00**

d) Pajak Air Tanah-LO

Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Air Tanah yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp.113.404.703.392,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp112.414.587.931,00 terjadi kenaikan sebesar Rp990.115.461,00 atau 0,88%. Rincian atas Pendapatan Pajak Air Tanah-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH - LO
1	2	3
1	SKPD TERBIT TAHUN 2016	113.404.703.392,00
2	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH PENDAPATAN PAT-LO	**113.404.703.392,00**

e) Pajak Hotel-LO

Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hotel yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp1.512.313.453.051,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp1.416.196.265.048,00 terjadi kenaikan sebesar Rp96.117.188.003,00 atau 6,79%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hotel-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK HOTEL - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK PAJAK HOTEL	1.497.021.075.417,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	16.920.983.181,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	(1.627.088.167,00)
4	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	(1.517.380,00)
	JUMLAH PENDAPATAN PAJAK HOTEL-LO	**1.512.313.453.051,00**

f) Pajak Restoran-LO

Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Restoran yang diterbitkan

selama tahun 2016 sebesar Rp2.450.421.412.791,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp2.145.282.232.463,00 terjadi kenaikan sebesar Rp305.139.180.328,00 atau 14,22%. Rincian atas Pendapatan Pajak Restoran-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK RESTORAN - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK RESTORAN	2.416.258.617.446,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	35.052.939.471,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	(851.882.648,00)
4	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	(38.261.478)
	JUMLAH PENDAPATAN PAJAK RESTORAN-LO	**2.450.421.412.791,00**

g) Pajak Hiburan-LO

Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hiburan yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp749.129.648.078,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp644.536.884.741,00 terjadi kenaikan sebesar Rp104.592.763.337,00 atau 16,23%. Rincian atas Pendapatan Pajak Hiburan-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK HIBURAN - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK HIBURAN	700.284.217.602,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	53.158.688.824,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	(4.313.258.348,00)
	JUMLAH PENDAPATAN PAJAK HIBURAN-LO	**749.129.648.078,00**

h) Pajak Reklame-LO

Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Reklame yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp652.927.466.080,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp747.983.489.791,00 terjadi

penurunan sebesar Rp95.056.023.711,00 atau 12,71%. Rincian atas Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK REKLAME - LO
1	2	3
1	SKPD TERBIT TAHUN 2016	937.009.523.509,00
2	PENGURANGAN/KEBERATAN	(1.052.147.565,00)
3	PENDAPATAN PAJAK REKLAME DITERIMA DIMUKA	(283.029.909.864,00)
	JUMLAH PENDAPATAN PAJAK REKLAME-LO	**652.927.466.080,00**

i) Pajak Penerangan Jalan-LO

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Penerangan Jalan yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp714.835.029.419,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp729.884.587.778,00 terjadi penurunan sebesar Rp15.049.558.359,00 atau 2,06%. Rincian atas Pendapatan Pajak Penerangan Jalan-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PPJ - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK PENERANGAN JALAN	714.835.029.419,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	-
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH PENDAPATAN PPJ-LO	**714.835.029.419,00**

j) Pajak Parkir-LO

Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Parkir yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp467.802.603.349,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp465.894.287.473,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.908.315.876 atau 0,41%. Rincian atas Pendapatan Pajak Parkir-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK PARKIR - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK PARKIR	461.573.057.539,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	6.282.117.982,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	(52.572.172,00)
	JUMLAH PENDAPATAN PAJAK PARKIR-LO	**467.802.603.349,00**

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO

Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp3.915.267.762.981,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp3.629.512.760.796,00 terjadi kenaikan sebesar Rp285.755.002.185,00 atau 7,87%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN BPHTB - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA BPHTB	3.913.186.944.998,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	2.080.817.983,00
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH PENDAPATAN BPHTB-LO	**3.915.267.762.981,00**

l) Pajak Rokok-LO

Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Rokok yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp531.269.133.932,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp475.058.548.175,00 terjadi kenaikan sebesar Rp56.210.585.757,00 atau 11,83%. Rincian atas Pendapatan Pajak Rokok-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PAJAK ROKOK - LO
1	2	3
1	SETORAN MASA PAJAK ROKOK	531.269.133.932,00
2	SKPD TERBIT TAHUN 2016	-
3	PENGURANGAN/KEBERATAN	-
	JUMLAH PENDAPATAN PAJAK ROKOK-LO	**531.269.133.932,00**

m) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-LO

Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Pajak (SPPT) Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang diterbitkan selama tahun 2016 sebesar Rp7.584.845.282.723,00. Apabila dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp7.616.597.165.856,00 terjadi penurunan sebesar Rp31.751.883.133,00 atau 0,42%. Rincian atas Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	URAIAN	TOTAL PENERIMAAN PBB P2 - LO
1	2	3
1	SPPT TERBIT TAHUN 2016	8.048.435.431.841,00
2	PENGURANGAN/KEBERATAN	(434.539.484.994,00)
3	PENDAPATAN PBB P2 DITERIMA DIMUKA	(29.050.664.124,00)
	JUMLAH PENDAPATAN PBB P2-LO	**7.584.845.282.723,00**

2. Retribusi Daerah-LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah - LO sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp677.424.218.710,00, bila dibandingkan dengan

realisasi tahun 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp414.943.915.696,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah - LO tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp262.480.303.014,00 atau 63,26%.

Berikut disajikan rincian data Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tergambar pada Tabel 5.22.

Tabel 5.22

Rekapitulasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2016	Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2015
1	2	3	4
1	Retribusi Jasa Umum-LO	82.761.175.014,00	52.843.225.346,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	220.864.966.670,00	83.304.088.486,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	373.798.077.026,00	278.796.601.864,00
Jumlah		**677.424.218.710,00**	**414.943.915.696,00**

Kenaikan Retribusi Daerah – LO sebesar 63,26% selaras dengan kenaikan Retribusi Daerah – LRA sebesar 47,02%. Kenaikan tersebut disebabkan karena optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah melalui upaya yang intensif seperti:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan prima;
2) Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
3) Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi Daerah;
4) Peningkatan pengawasan di lapangan;
5) Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan kerja terkait.

Nilai Retribusi Daerah – LO diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodesasi tahun anggaran 2016. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah retribusi LO, dapat juga dilakukan

rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi retribusi daerah – LRA tahun 2016 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA 2016	675.475.066.072,00
2	Piutang Retribusi 2016	59.231.344.954,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	14.203.442.632,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2016	64.888.000,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	296.840.822,00
	Penambahan 2016	**749.271.582.480,00**
6	Pendapatan Belum Disetor 2015	0,00
7	Piutang Retribusi 2015	31.195.082.860,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	17.779.280.429,00
9	Koreksi Kurang Lainnya	22.873.000.481,00
	Pengurangan 2016	**71.847.363.770,00**
Jumlah		**677.424.218.710,00**

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian pendapatan per jenis pelayanan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp82.761.175.014,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp52.843.225.346,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp29.917.949.668,00 atau 56,62%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO Tahun Anggaran 2016 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodesasi tahun anggaran 2016. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Umum - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Umum – LRA tahun 2016 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO TA 2016
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA 2016	86.539.552.416,00
2	Piutang Retribusi Jasa Umum 2016	1.018.105.981,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	14.203.442.632,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2016	28.938.000,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	0,00
	Penambahan 2016	**101.790.039.029,00**
6	Pendapatan Belum Disetor 2015	0,00
7	Piutang Retribusi Jasa Umum 2015	1.249.583.586,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	17.779.280.429,00
9	Koreksi Kurang Lainnya	0,00
	Pengurangan 2016	**19.028.864.015,00**
Jumlah		**82.761.175.014,00**

b. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp220.864.966.670,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp83.304.088.486,00 terlihat pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp137.560.878.184,00 atau 165,13%.

Nilai pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO Tahun Anggaran 2016 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodesasi tahun anggaran 2016. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Jasa Usaha - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Jasa Usaha – LRA tahun 2016 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO TA 2016
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA 2016	218.742.129.859,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2016	32.753.071.092,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2016	35.950.000,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	0,00
	Penambahan 2016	**251.531.150.951,00**
6	Pendapatan Belum Disetor 2015	0,00
7	Piutang Retribusi Jasa Usaha 2015	7.793.183.800,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00

9	Koreksi Kurang Lainnya	22.873.000.481,00
	Pengurangan 2016	**30.666.184.281,00**
Jumlah		**220.864.966.670,00**

c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Tahun Anggaran 2016 mencapai Rp373.798.077.026,00, bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp278.796.601.864,00 terlihat pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp95.001.475.162,00 atau 34,08%.

Nilai pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO Tahun Anggaran 2016 diperoleh berdasarkan jumlah ketetapan retribusi yang ditetapkan atau untuk periodesasi tahun anggaran 2016. Untuk memastikan dan menambah keyakinan penyajian kesesuaian jumlah Retribusi Perizinan Tertentu - LO, dapat juga dilakukan rekonsiliasi dengan memperhitungkan komponen penambahan yang berasal dari realisasi Retribusi Perizinan Tertentu – LRA tahun 2016 ditambah dengan realisasi pendapatan retribusi diterima dimuka tahun sebelumnya, piutang retribusi tahun berjalan, pendapatan retribusi yang belum disetor di tahun berjalan, dan koreksi tambah lainnya, serta memperhitungkan komponen pengurangan yang berasal dari pendapatan retribusi diterima dimuka tahun berjalan, piutang retribusi tahun sebelumnya, pendapatan retribusi yang belum disetor tahun sebelumnya dan koreksi kurang lainnya. Rekonsiliasi tersebut adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Total Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu –LO TA 2016
1	2	3
1	Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA 2016	370.193.383.797,00
2	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2016	25.460.167.881,00

3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2016	0,00
5	Koreksi Tambah Lainnya	296.840.822,00
	Penambahan 2016	**395.950.392.500,00**
6	Pendapatan Belum Disetor 2015	0,00
7	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 2015	22.152.315.474,00
8	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
9	Koreksi Kurang Lainnya	0,00
	Pengurangan 2016	**22.152.315.474,00**
Jumlah		**373.798.077.026,00**

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.317.418.705.808,00. Nilai tersebut merupakan penerimaan dividen atas investasi dengan metode biaya dan pendapatan kenaikan nilai investasi dengan metode ekuitas.

Pencatatan investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) metode, yaitu metode biaya dan metode ekuitas. Dengan menggunakan metode biaya, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca.

Sedangkan pencatatan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (penerimaan dividen) tidak diakui sebagai pendapatan di dalam Laporan Operasional (LO), namun mempengaruhi pencatatan nilai investasi di Neraca. Tetapi kenaikan nilai investasi yang diperoleh dari bagian laba perusahaan diakui sebagai pendapatan LO.

Rekapitulasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan–LO Tahun Anggaran 2016 digambarkan pada Tabel 5.23.

Tabel 5.23

Rekapitulasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	2	3
1	PT Kawasan Berikat Nusantara	3.035.587.209
2	PT Asuransi Bangun Askrida	4.367.544.287
3	PT. Jakarta International Expo	1.050.000.000
4	BP THR Lokasari	665.010.414
5	Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi	2.308.300.563.898
Jumlah		**2.317.418.705.808**

a. PT Kawasan Berikat Nusantara

Penerimaan dividen dari PT Kawasan Berikat Nusantara tahun 2016 sebesar Rp3.035.587.209,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 29 Juni 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Kawasan Berikat Nusantara atas tahun buku 2016 adalah sebesar Rp3.035.587.209,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 29 Juli 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

b. PT Asuransi Bangun Askrida

Penerimaan dividen dari PT Asuransi Bangun Askrida tahun 2016 sebesar Rp4.367.544.287,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 12 Mei 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Asuransi Bangun Askrida atas tahun buku 2015 adalah sebesar Rp4.367.544.287,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 7 Juni 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

c. PT. Jakarta International Expo

Penerimaan dividen dari PT. Jakarta International Expo tahun 2016 sebesar Rp1.050.000.000,00 sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 29 November 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT. Jakarta International Expo atas tahun buku 2015 adalah sebesar Rp1.050.000.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 30 Des 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3.

d. BP THR Lokasari

Penerimaan dividen dari BP THR Lokasari tahun 2016 sebesar Rp665.010.414,00 sesuai dengan hasil Keputusan Gubernur Nomor 2439 tahun 2016 tanggal 26 Oktober 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari BP THR Lokasari atas tahun buku 2015 adalah sebesar Rp665.010.414,00 dan telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 27 Desember 2016.

Selama tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima setoran dividen dari BP THR Lokasari sebesar Rp1.150.024.120,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.3. Setoran tersebut termasuk pembayaran piutang dividen tahun 2015 sebesar Rp485.014.572,00 dimana piutang tersebut dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp.866,00 sehingga deviden dari BP THR Lokasari tahun 2016 sebesar Rp665.010.414,00.

e. Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi

Pendapatan Kenaikan Nilai Investasi sebesar Rp2.308.300.563.898, merupakan pendapatan atas laba BUMD dan PT Patungan tahun 2016 yang menggunakan metode ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahan Daerah	Laba Tahun 2015	Komponen Ekuitas Lainnya Tahun 2015	Jumlah	% Kepemilikan	Bagian Laba Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7 = 5 x 6
1	PD Dharma Jaya	587.415.037		587.415.037	100%	587.415.037
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	105.095.890.606		105.095.890.606	100%	105.095.890.606
3	PD Pasar Jaya	52.956.979.173	108.167.340.000	161.124.319.173	100%	161.124.319.173
4	PD PAL Jaya	31.566.002.268	10.494.131.944	42.060.134.212	100%	42.060.134.212
5	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	396.558.147.574	160.300.755.651	556.858.903.225	38,80%	216.061.969.060
6	PT Food Station Tjipinang	8.835.176.902	16.352.944.110	25.188.121.012	74,67%	18.807.130.356
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	37.048.133.513		37.048.133.513	50,00%	18.524.066.757
8	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	91.353.627.741		91.353.627.741	72,00%	65.774.611.999
9	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	77.272.817.688	173.310.825	77.446.128.513	99,98%	77.434.063.805
10	PT Bank DKI Jakarta	803.287.677.461	276.679.664.566	1.079.967.342.027	99,98%	1.079.692.622.195
11	PT Mass Rapid Transit Jakarta		831.418.575	831.418.575	99,99%	831.204.709
12	PT Transportasi Jakarta	128.701.602.302		128.701.602.302	99,36%	127.871.804.737
13	PT Penjamin Kredit Daerah	2.009.752.258	27.775.704	2.037.527.962	95,00%	1.935.651.564
	JUMLAH	**1.735.273.222.523**	**573.027.341.375**	**2.308.300.563.898**		**1.915.800.884.208**

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO

Kelompok pendapatan Lain-lain PAD – LO merupakan komponen pendapatan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Lain-Lain PAD – LO Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp12.336.862.026.751,00. Rincian pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2016, digambarkan pada Tabel 5.24.

Tabel 5.24

Rekapitulasi Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Tahun Anggaran 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2016	Total Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO 2015
1	2	3	4
1	Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	-	25.389.660.635,00
2	Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah	30.290.006.689,00	34.005.400.486,00
3	Hasil Lelang Titik Reklame	6.333.445.323,00	3.158.662.500,00
4	Klaim Asuransi Aset	431.910.000,00	781.745.729,00
5	Jasa Giro	127.988.193.156,00	157.815.291.081,00
6	Pendapatan Bunga	680.101.696.581,00	1.000.799.490.719,00
7	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	103.020.117.496,00	116.355.201.326,00
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	9.247.553.526,00	6.892.175.576,00
9	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	6.156.569.448.316,00	2.807.826.112.307,00
10	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	2.710.421.172,00	778.976.597,00
11	Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah	2.020.459.534.537,00	1.750.488.742.877,00
12	Nilai Strategis Reklame	372.450.377.339,00	21.126.917.628,00
13	Hasil Kerja Sama Aset Daerah	91.183.581.435,00	6.091.172.816,00
14	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	9.511.478.072,00	9.265.017.041,00
15	Pendapatan Lain-lain	149.319.153.210,00	2.139.704.394.641,00
16	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.122.002.707,00	10.256.322.383,00
17	Pendapatan Sanksi Pajak	376.753.974.175,00	250.902.948.171,00
18	Pendapatan Denda Retribusi	1.608.464.580,00	60.711.496.432,00
19	Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	4.557.241.243,00	1.015.267.136,00
20	Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB	1.782.223.893.618,00	579.326.163.428,00
21	Surat Persetujuan Perinsip Pembebasan Lahan	406.979.533.576,00	212.279.242.349,00
Jumlah		**12.336.862.026.751**	**9.194.970.401.858,00**

Bila dibandingkan Pendapatan Lain-lain PAD - LO tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp9.194.970.401.858,00 terjadi kenaikan sebesar Rp3.141.891.624.893,00 atau 34.17%. Penjelasan lebih lanjut

Pendapatan Lain-lain PAD-LO Tahun Anggaran 2016, antara lain sebagai berikut:

a. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LO merupakan pendapatan atas Rekomendasi HGB/HPL yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kompensasi rumah susun.

Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp0,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp25.389.660.635,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp25.389.660.635,00 atau 100%.

b. Sewa / Hasil Sewa Aset Daerah – LO

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah - LO merupakan pendapatan atas hasil sewa asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa tanah dan/atau bangunan dan rumah panggung.

Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp30.290.006.689,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp34.005.400.486,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp3.715.393.797,00 atau 10,93%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah – LRA dikurangi atas Piutang Tahun 2015 dan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2016 sebesar Rp40.476.085.858,00 serta penambahan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2015 dan Piutang Tahun

2016 sebesar Rp34.440.996.681,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO
1	2	3
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**36.325.095.866,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	11.565.733.135,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	22.875.263.546,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**34.440.996.681,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	14.536.718.693,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	25.939.367.165,00
7	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**40.476.085.858,00**
Jumlah (1+4-7)		**30.290.006.689,00**

c. Hasil Lelang Titik Reklame – LO

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO diakui berdasarkan nilai Surat Perintah Setor atas hasil lelang titik reklame.

Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp6.333.445.323,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp3.158.662.500,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.174.782.823,00 atau 100,51%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Hasil Lelang Titik Reklame – LRA dikurangi atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2016 dan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp12.429.628.295,00 serta penambahan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2015 dan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp18.155.028.295,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Hasil Lelang Titik Reklame-LO
1	2	3
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**608.045.323,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	2.871.178.295,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	15.283.850.000,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**18.155.028.295,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	2.871.178.295,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	9.558.450.000,00
7	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**12.429.628.295,00**
Jumlah (1+4-7)		**6.333.445.323,00**

d. Klaim Asuransi Aset – LO

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO diakui berdasarkan nilai klaim asuransi asset yang menjadi hak pemerintah daerah.

Pendapatan dari Klaim Asuransi Aset-LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp431.910.000,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp781.745.729,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp349.835.729,00 atau 44,75%.

e. Jasa Giro – LO

Pendapatan Jasa Giro – LO diakui berdasarkan nilai pendapatan jasa giro atas penempatan dana dalam bentuk giro pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2016.

Pendapatan dari Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp127.988.193.156,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp157.815.291.081,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp29.827.097.925,00 atau 18,90%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Jasa Giro – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Jasa Giro – LRA

dikurangi atas Pendapatan Belum Disetor Tahun 2015 sebesar Rp20.400.493,00 serta penambahan atas Pendapatan Belum Disetor Tahun 2016 sebesar Rp2.377.506,00.

f. Pendapatan Bunga – LO

Pendapatan Bunga - LO diakui berdasarkan nilai pendapatan penempatan dana dalam pada rekening bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tahun 2016 dan pengakuan bunga akrual berdasarkan jatuh tempo deposito.

Pendapatan Bunga - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp680.101.696.581,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp1.000.799.490.719,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp320.697.794.138,00 atau 32,04%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Bunga – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Bunga – LRA dikurangi atas Piutang Tahun 2015 sebesar Rp22.941.265.220,00 serta penambahan atas Piutang Tahun 2016 sebesar Rp20.645.089.203,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Bunga-LO
1	2	3
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**682.397.872.598,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	20.645.089.203,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**20.645.089.203,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	15.524.585.793,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	1.027.397.250,00
7	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka	6.389.282.177,00
8	**Pengurangan 2016 (8=5+6+7)**	**22.941.265.220,00**
Jumlah (1+4-8)		**680.101.696.581,00**

g. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) – LO

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO diakui berdasarkan penetapan tuntutan ganti rugi dan Surat Tagih yang ditetapkan Majlis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi pada tahun 2016.

Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 103.020.117.496,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp116.355.201.326,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp13.335.083.830,00 atau 11,46%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Tuntutan Ganti Rugi – LRA dikurangi atas Piutang Tahun 2015 sebesar Rp17.103.762.096,00 serta penambahan atas Piutang Tahun 2016 sebesar Rp17.099.762.096,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Tuntutan Ganti Rugi-LO
1	**2**	**3**
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**103.024.117.496,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	17.099.762.096,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**17.099.762.096,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	17.103.762.096,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
7	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**17.103.762.096,00**
Jumlah (1+4-7)		**103.020.117.496,00**

h. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO merupakan pendapatan hasil eksekusi atas jaminan pembongkaran reklame.

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan – LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.247.553.526,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp6.892.175.576,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.355.377.950,00 atau 34,17%.

i. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO berasal dari Berita Acara Serah Terima (BAST) atas penerimaan dalam bentuk aset.

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp6.156.569.448.316,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp2.807.826.112.307,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.348.743.336.009,00 atau 119,26%.

Mutasi tambah aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum pada tahun 2016 berasal dari penerimaan Fasilitas Sosial sebesar Rp6.156.568.955.287,00 berupa penerimaan Kas dari BP3W Sunter dan Fasilitas Umum sebanyak 36 BAST yang terdiri dari 35 BAST yang berasal dari kewajiban pihak ketiga dan 1 BAST yang berasal dari Hibah CSR, sebesar Rp493.000,00 berupa selisih nilai aset fasos fasum yang ditransfer ke SKPD (sesuai BAST) dengan SK Penggunaan, dan sebesar Rp29,00 atas koreksi saldo awal asset Fasos Fasum.

j. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.710.421.172,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp778.976.597,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.931.444.575,00 atau 247,95%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan

dari Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan – LRA dikurangi atas Piutang Tahun 2015 sebesar Rp50.949.015.300,00 serta penambahan atas Piutang Tahun 2016 dan Pendapatan Belum Disetor per 31 Desember 2016 sebesar Rp48.680.731.835,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan-LO
1	2	3
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**4.978.704.637,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	48.524.770.867,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	Pendapatan Belum Disetor 2016	155.960.968,00
5	**Penambahan 2016 (5=2+3+4)**	**48.680.731.835,00**
6	Piutang Per 31 Desember 2015	50.949.015.300,00
7	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
8	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**50.949.015.300,00**
Jumlah (1+4-7)		**2.710.421.172,00**

k. Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) – LO

Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2.020.459.534.537,00, jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp1.750.488.742.877,00, Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) - LO di Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp269.970.791.660,00 atau 15,42%.

Pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD, yaitu RSUD Budhi Asih, RSUD Cengkareng, dan RSUD Koja menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor

117 Tahun 2012. Sedangkan pengakuan awal Pendapatan LO kepada BPJS di tiga RSUD/RSKD lainnya, yaitu RSUD Pasar Rebo, RSUD Tarakan, dan RSKD Duren Sawit menggunakan tarif INA CBG's. Pendapatan LO Tahun 2016 pada tiga RSUD yang menggunakan tarif sesuai dengan Pergub, pada akhir periode telah dilakukan penyesuaian dengan tarif INA CBG's

I. Nilai Strategis Reklame – LO

Nilai Strategis Reklame – LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp372.450.377.339,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp21.126.917.628,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp351.323.459.711,00 atau 1662,92%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Nilai Strategis Reklame – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Nilai Strategis Reklame – LRA dikurangi atas Piutang Tahun 2015 sebesar Rp56.503.475,00 serta penambahan atas Piutang Tahun 2016 sebesar Rp1.071.754.779,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Nilai Strategis Reklame-LO
1	**2**	**3**
1	**Pendapatan -LRA 2016**	371.435.126.035,00
2	Piutang Per 31 Des 2016	1.071.754.779,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**1.071.754.779,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	56.503.475,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
7	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**56.503.475,00**
Jumlah (1+4-7)		**372.450.377.339,00**

m. Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO merupakan hasil kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BOT) dan Bangun Serah Guna (BTO).

Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp91.183.581.435,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp6.091.172.816,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp85.092.408.619,00 atau 1396,98%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Hasil Kerjasama Aset Daerah – LRA dikurangi atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2016 dan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp11.123.786.340,00 serta penambahan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2015 dan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp98.738.756.682,00.

n. Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO diakui berdasarkan penetapan pendapatan atas Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2016.

Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp9.511.478.072,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp9.265.017.041,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp246.461.031,00 atau 2,66%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah – LO Tahun Anggaran

2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah – LRA dikurangi atas dan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp1.013.415.790,00 serta penambahan atas Piutang Tahun 2016 sebesar Rp980.192.907,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah-LO
1	2	3
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**9.544.700.955,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	980.192.907,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**980.192.907,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	1.013.415.790,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
7	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**1.013.415.790,00**
Jumlah (1+4-7)		**9.511.478.072,00**

o. Pendapatan Lain-lain-LO

Pendapatan Lain-lain - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp149.319.153.210,00 jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp2.139.704.394.641,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp1.990.385.241.431,00 atau 93,02%.

p. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO adalah sama dengan nilai Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA karena tidak ada piutang dan pendapatan diterima dimuka atas pendapatan tersebut.

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp5.122.002.707,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp10.256.322.383,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp5.134.319.676,00 atau 50,06%.

q. Pendapatan Sanksi Pajak – LO

Pendapatan Sanksi Pajak - LO merupakan pendapatan sanksi pajak sesuai dengan ketetapan (SKPD, SKPDKB, STP).

Pendapatan Sanksi Pajak - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp376.753.974.175,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp250.902.948.171,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp125.851.026.004,00 atau 50,16%.

r. Pendapatan Denda Retribusi – LO

Pendapatan Denda Retribusi - LO merupakan pendapatan sanksi retribusi sesuai dengan ketetapan SKRD.

Pendapatan Denda Retribusi - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.608.464.580,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp60.711.496.432,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp59.103.031.852,00 atau 97,35%.

s. Pendapatan Denda Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Denda Lain-Lain PAD - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp4.557.241.243,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp1.015.267.136,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp3.541.974.107,00 atau 348,87%.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Denda Lain-Lain PAD – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari

Pendapatan Denda Lain-Lain PAD – LRA dikurangi atas dan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp100.749.956.231,00 serta penambahan atas Piutang Tahun 2016 sebesar Rp104.433.452.127,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Pendapatan Denda Lain-lain PAD-LO
1	2	3
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**873.745.347,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	104.433.452.127,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	0,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**104.433.452.127,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	100.749.956.231,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
7	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**100.749.956.231,00**
Jumlah (1+4-7)		**4.557.241.243,00**

t. Pendapatan Kompensasi Pelampauan KLB – LO

Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO adalah pendapatan atas kompensasi kelebihan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang dibayarkan oleh pihak ketiga dalam bentuk penyediaan fasilitas publik.

Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.782.223.893.618,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp579.326.163.428,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp1.202.897.730.190,00 atau 207,64%. Nilai Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO tersebut berasal dari PT. Mitra Panca Persada.

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai

KLB – LRA dikurangi atas dan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp579.326.163.429,00 serta penambahan atas Piutang Tahun 2016 sebesar Rp2.361.550.057.047,00. Dengan rincian Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB – LO Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut:

NO.	NAMA PENGEMBANG/ YAYASAN/PERSEORANGAN	PERJANJIAN NOMOR PENGEMBANG	KEWAJIBAN	BESARAN NILAI KOMPENSASI	ALAMAT
1	Mulia Karya Gemilang, PT	01/PPK-MKG/V-2016	a.Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot b.RPTRA seluas ± 2.158 M2 di Rusun Daan Mogot	213.044.850.221,00	Jl. Jend.Gatot Subroto No.40 / Jl. Adbdul Rochim RT 005 Rw 01, Kel Kuningan Barat, Kec Mampang Prapatan, Kota Adm Jakarta Selatan
2	Sampoerna Land, PT	SSS/Pemprov.DKI/PJT.002/0616	a.Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot b.Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU c.Penataan dan pengembangan Kota Tua	723.112.978.629,00	Jl Prof Dr.Satrio / Jl. Jend Sudirman Kav 45-46, Kel Karet Semanggi, Kec Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan
3	Singa Propertindo Haryono, PT	001/KLB/SPH/X/2016	a. Interior Jakarta Creative Hub Gedung Jakarta UKM (Smes'co) b. Tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara	20.489.644.000,00	Jalan Kapten Tendean Nomor 20C, RT 001/RW 003, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
4	Putragaya Wahana, PT	014/PGW/XI/2016	a.Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang b.Rehab Eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Eks Gedung UPT Dana Bergulir Dinas KUMKMP	264.376.872.000,00	Jalan M.H. Thamrin / Jlalan Batu Raja, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat
5	Kepland Investama, PT	175/AGR/KI/2016	a.Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot b.Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut) c.Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke	551.410.069.808,00	Jl Jenderal Sudirman Kab 22-23, Kel Karet, Kec Setiabudi, Kota Adm Jakarta Selatan
6	Mitra Pertala Perkasa, PT	038/MPP/XII/2016	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang	9.789.478.960,00	Jl Profesor Dr. Satrio Kaveling 18A-18-25-27A, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
	JUMLAH			**1.782.223.893.618,00**	

u. Pendapatan Konversi Sanksi Surat Persetujuan Perinsip Pembebasan Lahan (SP3L) - LO

Pendapatan Konversi Sanksi Surat Persetujuan Perinsip Pembebasan Lahan (SP3L) - LO Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp406.979.533.576,00, jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar 212.279.242.349,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp194.700.291.227,00 atau 91,72%.

Pendapatan sanksi SP3L dicatat berdasarkan jumlah Ijin Prinsip (SIP) konversi penyediaan RSM dengan penyetoran dana kepada Pemprov DKI Jakarta. SIP yang telah terbit Tahun 2016 diantaranya sebagai berikut

No	Nama Pengembang	Nomor	Jumlah
1	PT Jakarta Setiabudi Internasional	2322/-1.711.534	69.973.389.900,00
2	PT Sarananeka Indah Pancar	4560/-1.711.533	55.628.757.389,00
3	PT Bahanasemesta Citranusantara	3031/-1.796.3	43.586.190.480,00
4	PT Kepland Investama	4828/-1.711.534	31.855.871.520,00
5	PT Prima Bangun Investama	2629/-1.796.3	27.483.112.500,00
6	PT Kembangan Permai	2597/-1.796.3	22.094.222.940,00
7	PT Prima Jaya Teguh Persada	4543/-1.711.533	16.979.484.957,00
8	PT Mustika Candraguna	189/-1.711.534	15.884.913.780,00
9	PT Wiratara Prima	4846/-1.711.534	13.624.298.100,00
10	PT Gandaria Prima	4802/-1.711.534	13.394.452.571,00
11	SPS SP3L dibawah 10 miliar		96.474.839.439,00
	Jumlah		**406.979.533.576,00**

Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga - LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Hasil Penerimaan Pihak Ketiga – LRA dikurangi atas Piutang Tahun 2015 sebesar Rp96.340.158.460,00 serta penambahan atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2015 dan Piutang Tahun 2016 sebesar Rp51.594.289.364,00 , dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Total Sewa/Hasil Sewa Aset Daerah-LO
1	**2**	**3**
1	**Pendapatan -LRA 2016**	**451.725.402.672,00**
2	Piutang Per 31 Des 2016	44.603.324.164,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka 2015	6.990.965.200,00
4	**Penambahan 2016 (4=2+3)**	**51.594.289.364,00**
5	Piutang Per 31 Desember 2015	96.340,158.460,00
6	Pendapatan Diterima Dimuka 2016	0,00
7	**Pengurangan 2016 (7=5+6)**	**96.340.158.460,00**
Jumlah (1+4-7)		**406.979.533.576,00**

Rincian lebih lanjut atas data piutang pendapatan SP3L Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut

No	Nama Pengembang	Nomor	Jumlah
Piutang 2016			
1	PT Citra Mas Pentama	4247/-1.711.534	32.777.831.064,00
2	Henny Susanto	2582/-1.796.3	2.172.543.100,00
3	PT Pardika Wisthi Sarana	4802/-1.711.534	9.652.950.000,00
	Jumlah Piutang 2016		**44.603.324.164,00**
Pendapatan Diterima Dimuka 2015			
1	YPPM	2317/-1.711.534	5.990.965.200,00
2	PT Graha Rayhan Tri Putra	2582/-1.796.3	1.000.000.000,00
			6.990.965.200,00
Nilai Piutang 2015			
1	PT Sadini Arianda	3951/-1.711.534	5.967.296.632,00
2	PT Aneka Sakti Bakti (PT Asaba)	4237/-1.711.534	3.233.022.291,00
3	PT Djarum	4236/-1.711.534	12.112.067.100,00
4	PT Duta Regency Karunia	4234/-1.711.534	6.774.030.108,00
5	PT Sintesis Kreasi Bersama	4232/-1.711.534	9.347.977.133,00
6	PT Wahana Karya Cemerlang	4235/-1.711.534	550.777.500,00
7	PT Zaman Bangun Perwita	4051/-1.711.534	6.844.304.880,00
8	PT Sahid Inti Dinamika q.q. Ny. Yuliah Sukamdani	4155/-1.711.534	901.236.577,00
9	PT Citra Mas Pentama	4247/-1.711.534	32.777.831.064,00
10	PT Trimex Sarana Trisula	4195/-1.711.534	17.831.615.175,00
			96.340.158.460,00

1.3.1.1.1 Pendapatan Transfer LO

Pendapatan Transfer LO Tahun 2016 disajikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2016 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran.

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp16.325.457.995.170,00. Jika dibandingan dengan Tahun Anggaran 2015 yang tercatat sebesar Rp14.082.313.175.778,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.243.144.819.392,00 atau 15,93%. Apabila dilakukan rekonsiliasi untuk lebih meyakini kewajaran nilai Pendapatan LO maka Pendapatan Transfer - LO Tahun Anggaran 2016 dapat diperhitungkan dari Pendapatan Transfer–LRA dikurangi atas Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2016 dan Piutang Tahun 2015 serta penambahan atas Pendapatan

Diterima Dimuka Tahun 2015 dan Piutang Tahun 2016, rincian dapat digambarkan lebih lanjut sebagai berikut:

No	Uraian	Pendapatan LRA Tahun 2016	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2015	Piutang per 31 Des 2015	Dampak Koreksi Piutang/ Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2015	Piutang Per 31 Des 2016	Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Des 2016	Nilai Pendapatan LO Per 31 Desember 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4-5-6+7-8
1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	**15.271.661.452.714**	**19.339.416.959**	**5.459.274.194.651**	**3.121.721.001**	**6.496.853.041.149**	**-**	**16.325.457.995.170**
1.1	**Bagi Hasil Pajak**	**12.304.612.421.602**	**121.721.000**	**5.385.395.888.600**	**121.721.000**	**6.468.079.406.682**	**-**	**13.387.295.939.684**
a	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	106.847.462.006	121.721.000	37.376.168.500	121.721.000	63.807.448.867	-	**133.278.742.373**
b	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh pasal 25 dan pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh pasal 21)	12.197.764.959.596	-	5.348.019.720.100	-	6.404.271.957.815	-	**13.254.017.197.311**
1.2	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	**83.970.656.912**	**19.217.695.959**	**73.878.306.051**	**3.000.000.001**	**28.773.634.467**	**-**	**55.083.681.286**
a	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	881.400	-	-	-	-	-	**881.400**
b	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	8.604.614	1.279.833	30.528.000	-	5.748.409	-	**(14.895.144)**
c	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi	9.406.967	-	-	-	7.819.551	-	**17.226.518**
d	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	381.306.800	228.670.655	-	-	44.188.011	-	**654.165.466**
e	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	10.294.871.800	18.987.745.471	-	3.000.000.001	4.066.196.200	-	**30.348.813.470**
f	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	73.275.585.331	-	73.847.778.051	-	24.649.682.296	-	**24.077.489.576**
1.3	**Dana Alokasi Umum**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1.4	**Dana Alokasi Khusus**	**2.883.078.374.200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.883.078.374.200**

Dana Perimbangan yang belum diterima per 31 Desember 2016 sebesar Rp6.496.853.041.149,00, hal ini tertuang dalam penjelasan pada akun Piutang Dana Transfer.

1.3.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp1.742.140.897.114,00, merupakan pendapatan hibah dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan MRT sebesar Rp1.613.929.672.083,00;
2. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi PT Jasa Raharja sebesar Rp11.097.600.000,00;

3. Donasi/Hibah Aset Tetap dari Luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp17.154.669.835,00, dengan rincian pada Lampiran I;
4. Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI sebesar Rp99.958.955.196,00, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Penerima	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	38.149.820.938
2.	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan Jakbar	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	108.069.814
3.	Sudin Kesehatan Jakarta Pusat	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	1.873.324.349
4.	Sudin Kesehatan Jakarta Barat	Kementerian Kesehatan	Obat-obatan dan vaksin	19.080.332.045
5.	Badan pemberdayaan Masyarakat dan KB	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Alat kontrasepsi	26.535.971.105
6	Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil	Kementerian Dalam Negeri	Blanko e-KTP	13.077.650.956
7	BLUD RS Cengkareng	Kementerian Kesehatan	Obat dan alat kesehatan	1.133.785.989
	Jumlah Hibah Persediaan			**99.958.955.196**

Pendapatan tersebut tidak termasuk pendapatan hibah dalam bentuk jasa dan perolehan aset yang tidak memenuhi batas kapitalisasi sebagai aset tetap sebagai berikut:

a) CSR dalam bentuk Jasa

Pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani 6 PKS CSR dalam bentuk jasa sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal PKS	Bentuk CSR	Perusahaan	Jangka Waktu
1.	15 Tahun 2016 101/MKT-ID/V/2016 Tgl 25 Mei 2016	Pengecatan Ulang Museum di Kawasan Kota Tua dan Jembatan Kota Intan	PT ICI Paints Indonesia	2 Tahun
2.	26 Tahun 2016 Tgl 27 Oktober 2016	Revitalisasi Infrastruktur Sosial Air Mancur Bundaran Hotel Indonesia (HI)	PT Bank Cental Asia, Tbk PT Plaza Indonesia Realty Tbk PT Wisma Nusantara International PT Grand Indonesia PT Indofood Sukses Makmur Tbk PT Astra International Tbk PT Drei Indonesia	12 Bulan
3.	1709 Tahun 2016 001/VI/16/CA/MOU Tgl 31 Maret 2016	Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Program Kesehatan Gizi Balita di Provinsi DKI Jakarta	Yayasan Amway Peduli	3 Tahun
4.	8 Tahun 2016 725/PEMPROV-DKI/V/2016	Dukungan Staf untuk Penajaman Awal Dokumen	PT Deloitte Konsultan Indonesia	11 s.d 18 Mei 2016

	Tgl 17 Mei 2016	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan Plafon AnggaranSementara		
5.	9 Tahun 2016 736/PEMPROV-DKI/VII/2016 Tgl 1 Juli 2016	Dukungan Staf untuk Penajaman Awal Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan Plafon AnggaranSementara (KUS-PPAS) TA 2017	PT Deloitte Konsultan Indonesia	11 Mei s.d 1 Juli 2016
6.	21 Tahun 2016 062/Legal/RAQ/16 15 Agustus 2016	Penyelenggaraan Lomba Lari Jalan Raya Milo Jakarta International 10K 2016	PT Nestle Indonesia	15 s.d 31 Agustus 2016

b. CSR dalam bentuk Tanaman

Pada Tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima CSR dalam bentuk penanaman pohon sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal BAST	Bentuk CSR	Perusahaan	Lokasi			
				No.	Alamat	Jumlah	SKPD
1.	No.- 4 Mei 2016	Tiga Ribu Pohon Bambu Jenis: Bambu Apel, Bambu Tali, Bambu HJitam, Bambu Haur Hijau, Bambu Krisik Gantar	PT Riau Andalan Pulp dan Paper	1.	Hutan Kota Pondok Rangon Jl. Asri II Munjul, Jaktim	100 Pohon 100 Pohon	Dinas KPKP
				2.	Hutan Kota Setu Jl. Perdagangan Setu, Jakarta Timur	250 Pohon 250 Pohon	Dinas KPKP
				3.	Hutan Kota Ciracas Jl. Centex, Ciracas Jaktim	250 Pohon 250 Pohon	Dinas KPKP
				4.	Hutan Kota Kelapa Tiga (Joe) Jl. Joe Jagakarsa Jaksel	250 Pohon 250 Pohon	Dinas KPKP
				5.	RTH Jalan Aselih Kelurahan Cimpedak Kecamatan Jagakarsa, Jaksel	350 Pohon 100 Pohon	Dinas Pertamanan dan Pemakaman
				6.	RTH Jalan Lebak Bulus III, Kel Pondok Labu Kec Cilandak Jaksel	250 Pohon	Dinas Pertamanan dan Pemakaman
				7.	RTH Bambu Wulung Kel Bambu Apus Kec Cipayung Jaktim	350 Pohon 200 Pohon	Dinas Pertamanan dan Pemakaman

5.3.1.2 Beban Daerah

Beban Daerah Tahun Anggaran 2016 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Berdasarkan PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan atas jenis beban. Adapun klasifikasi beban dalam LO terdiri dari 3 kelompok besar yaitu: Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Luar Biasa. Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

Rekapitulasi Beban Tahun Anggaran 2016 dan 2015 digambarkan pada Tabel 5.25

Tabel 5.25

Rekapitulasi Beban Daerah

Tahun Anggaran 2016 dan 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total Beban 2016	Total Beban 2015
Beban Operasi		**43.127.412.644.360,00**	**37.295.277.890.315,00**
1	Beban Pegawai	19.422.081.375.665,00	17.451.577.953.165,00
2	Beban Persediaan	2.365.636.175.652,00	2.537.304.538.469,00
3	Beban Barang	2.305.331.198.302,00	2.010.889.393.803,00
4	Beban Jasa	5.795.398.601.634,00	3.786.735.915.447,00
5	Beban Pemeliharaan	1.967.747.589.654,00	1.335.308.308.102,00
6	Beban Perjalanan Dinas	29.300.979.507,00	50.471.093.060,00
7	Beban Bunga	11.739.277.402,00	5.294.660.335,00
8	Beban Subsidi	903.898.736.862,00	659.081.781.344,00
9	Beban Hibah	2.161.217.950.484,00	1.717.428.915.536,00
10	Beban Bantuan Sosial	2.452.948.130.000,00	2.087.123.200.000,00
11	Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.872.299.699.970,00	4.651.850.075.752,00
12	Beban Penyisihan Piutang	644.082.869.416,00	437.667.615.684,00
13	Beban Lain-lain	195.730.059.812,00	564.544.439.618,00
Beban Transfer		**210.314.034.030,00**	**371.152.504.510,00**
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	208.527.191.300,00	369.674.163.000,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.786.842.730,00	1.478.341.510,00
Jumlah Beban		**43.337.726.678.390,00**	**37.666.430.394.825,00**

5.3.1.2.1 Beban Operasi

Beban operasi tahun 2016 dicatat berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji pegawai, tagihan pihak ketiga, nota perjanjian hibah, dan dokumen keputusan pemberian bantuan sosial.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya antara lain utang tahun anggaran 2016 dan tahun 2015, belanja dibayar dimuka tahun 2016 dan 2015, koreksi lebih/kurang catat utang tahun 2015, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke beban operasi serta kapitalisasi belanja ke aset tetap.

Beban operasi tahun 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp43.127.412.644.360,00 dan Rp37.295.277.890.315,00 terdiri dari:

1. **Beban Pegawai**

   Beban Pegawai Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp19.422.081.375.665,00 dan Rp17.451.577.953.165,00. Beban Pegawai diantaranya terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai. Beban Pegawai 2016 tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.268.238.223.755,00, Dinas Kesehatan sebesar Rp1.537.149.489.169,00, Satpol PP sebesar Rp759.797.755.462,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp694.172.282.544,00, dan Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp557.325.726.377,00

   Beban pegawai Tahun Anggaran 2016 tersebut termasuk kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah tahun anggaran 2016 yang belum dibayarkan sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tentang utang pegawai.

2. **Beban Persediaan**

   Beban Persediaan Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp2.365.636.175.652,00 dan Rp2.537.304.538.469,00. Beban persediaan merupakan pemakaian atas barang persediaan habis pakai selama tahun 2016.

Nilai Beban persediaan tahun anggaran 2016 diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian persediaan di seluruh SKPD ditambah pembelian atau perolehan persediaan dan dikurangi dengan saldo akhir persediaan per 31 Desember 2016.

Untuk memastikan penyajian nilai beban maka nilai beban dapat direkonsiliasi dengan akun lainnya yaitu berdasarkan nilai utang pihak ketiga tahun 2016 dan 2015, reklasifikasi belanja modal dan aset tetap ke persediaan, reklasifikasi belanja non persediaan ke persediaan, dan lebih/kurang catat persediaan awal.

Beban Persediaan Tahun Anggaran 2016 tersebut di antaranya terdapat pada BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp138.026.268.844,00, BLUD RS Koja sebesar Rp119.542.617.322,00, BLUD RS Cengkareng sebesar Rp 109.436.058.120,00, BLUD RS Tarakan sebesar 104.871.917.165,00, Sudin Pendidikan II - JAKTIM sebesar Rp76.604.997.145,00.

3. Beban Barang

Beban Barang Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp2.305.331.198.302,00 dan Rp2.010.889.393.803,00. Beban barang merupakan belanja atas barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap. Beban Barang tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp366.101.156.262,00, Dinas Olahraga sebesar Rp155.223.328.883,00, BLUD RS Koja sebesar Rp150.875.092.796,00 BLUD RS Tarakan sebesar Rp150.196.387.130,00 BLUD RS Cengkareng sebesar Rp138.237.207.150,00

Beban barang tahun anggaran 2016 dan 2015 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Beban barang non-BLUD	1.142.744.551.512	849.574.993.330
2	Beban barang BLUD	1.162.586.646.790	1.161.314.400.473
Total		2.305.331.198.302	2.010.889.393.803

Dalam beban barang non-BLUD tersebut termasuk barang ekstrakomtabel pada beberapa SKPD diantaranya berupa tanaman hias pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana senilai Rp32.499.000,00.

4. Beban Jasa

Beban Jasa Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp5.795.398.601.634,00 dan Rp3.786.735.915.447,00. Beban jasa diantaranya terdiri dari beban jasa kantor, beban jasa konsultansi, dan beban sewa. Beban Jasa tersebut di antaranya terdapat pada Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebesar Rp876.630.963.077,00, Dinas Pendidikan sebesar Rp612.530.716.841,00, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp413.994.876.236,00, Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp227.721.517.807,00, dan Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp171.238.077.533,00.

5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp1.967.747.589.654,00 dan Rp1.335.308.308.102,00. Beban pemeliharaan terdiri dari beban perawatan kendaraan bermotor dan beban pemeliharaan. Beban pemeliharan tersebut di antaranya terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp350.049.636.635,00, Sudin Bina Marga Jakarta Timur sebesar Rp169.882.142.990,00, Sudin Bina Marga Jakarta Selatan sebesar Rp164.774.521.203,00, Sudin Pendidikan I Jakarta Timur sebesar Rp79.756.318.284,00 dan Sudin Pendidikan II JAKTIM sebesar Rp76.061.559.666,00.

6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp29.300.979.507,00 dan Rp50.471.093.060,00. Beban perjalanan dinas terdiri dari beban perjalanan dinas dan beban pemulangan pegawai. Beban Perjalanan Dinas tersebut di antaranya terdapat pada Biro Administrasi Keuangan dan Aset

Sekda sebesar Rp10.160.061.908,00, Sekretariat DPRD sebesar Rp6.290.396.196,00, Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar Rp4.757.579.233,00, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual sebesar Rp2.617.081.840,00 dan Inspektorat sebesar Rp1.007.060.000,00.

7. Beban Bunga

Beban Bunga Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp11.739.277.402,00 dan Rp5.294.660.335,00 terdapat di PPKD, beban bunga merupakan beban sesuai dengan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

8. Beban Subsidi

Beban Subsidi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp903.898.736.862,00 dan Rp659.081.781.344,00 terdapat pada PPKD. Beban subsidi diberikan kepada BUMD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	PT Transjakarta	898.456.636.862	659.081.781.344
2	PD Dharma Jaya	5.442.100.000	0,00
Total		903.898.736.862	659.081.781.344

9. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan oganisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp2.161.217.950.484,00 dan Rp1.717.428.915.536,00. Beban Hibah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

No.	Uraian	Tahun 2016
1	Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta/Organisasi Masyarakat	1.120.243.705.484
2	Kelompok/Anggota Masyarakat	11.228.495.000
3	Hibah Dana BOS ke SD/SDLB	305.825.200.000
4	Hibah Dana BOS ke	174.690.200.000

No.	Uraian	Tahun 2016
	SMP/SMPLB/SMPT/SATAP	
5	Hibah Dana BOS ke SMA	98.810.600.000
6	Hibah Dana BOS ke SMK	137.428.550.000
7	Hibah Dana BOS ke SD/SDLB Swasta	62.391.200.000
8	Hibah Dana BOS ke SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Swasta	62.750.500.000
9	Hibah Dana BOS ke SMA Swasta	39.687.550.000
10	Hibah Dana BOS ke SMK Swasta	114.181.550.000
11	Hibah BOP Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	33.980.400.000
Total		**2.161.217.950.484**

Pada Semester I Tahun 2016 belanja hibah dana BOS dianggarkan dan dibayarkan oleh PPKD, sedangkan pada Semester II Tahun 2016 dialihkan penganggaran dan pembayarannya sebagai Belanja Langsung oleh Dinas Pendidikan untuk sekolah negeri. Untuk sekolah swasta tetap dianggarkan dan dibayarkan dengan belanja hibah oleh PPKD.

Terkait mekanisme penyaluran Dana BOS pada setiap sekolah dimulai dari pembuatan Nota Pencairan Dana (NPD) berdasarkan data Dapodik sebagai dasar pengajuan Surat Permohonan Tambah Uang Persediaan (SP-TUP). Setelah disetujui oleh BPKAD, Dinas Pendidikan membuat SPP dan SPM TUP untuk kemudian diterbitkan SP2D BOS dan dana dicairkan ke rekening masing-masing sekolah melalui Cash Management System Bank DKI. Adapun, jika terdapat pengembalian sisa Dana BOS, Bank DKI akan melakukan penarikan saldo di rekening BOS masing-masing sekolah.

10. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp2.452.948.130.000,00 dan Rp2.087.123.200.000,00 terdapat di PPKD. Beban Bantuan Sosial

adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat.

Beban bantuan sosial terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	4.744.100.000	7.501.750.000
2	Bantuan Sosial kepada Individu/Siswa (Biaya Personal Siswa Miskin)	2.442.858.030.000	2.079.621.450.000
3	Bantuan Sosial Kepada Individu/Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri	5.346.000.000	0,00
Total		**2.452.948.130.000**	**2.087.123.200.000**

11. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp4.872.299.699.970,00 dan Rp4.651.850.075.752,00 yang terdiri dari ;

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Beban Penyusutan	4.832.984.989.909	4.620.402.001.322
2	Beban Amortisasi	39.314.710.061	31.448.074.430
Total		4.872.299.699.970	4.651.850.075.752

a. Beban Penyusutan

Beban Penyusutan tahun anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp4.832.984.989.909,00, dan Rp4.620.402.001.322,00 terdiri dari :

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Peralatan dan Mesin	1.969.476.232.294	1.780.394.167.395
2	Gedung dan Bangunan	977.710.754.960	1.101.613.213.508
3	Jaringan, Irigasi, dan Jaringan	1.851.974.705.363	1.738.385.232.819
4	Aset Tetap Lainnya	33.823.297.292	9.387.600
Total		4.832.984.989.909	4.620.402.001.322

Beban penyusutan tersebut di antaranya terdapat di Dinas Bina Marga sebesar Rp738.172.627.575,00, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp273.864.788.420,00, Dinas Tata Air sebesar Rp269.443.901.471,00, Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp208.337.958.678,00, Dinas Perumahan Dan Gedung Pemda sebesar Rp188.577.317.013,00, dan PPKD sebesar Rp142.710.709.375,00.

b. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp39.314.710.061,00 dan Rp 31.448.074.430,00 yang merupakan amortisasi atas aset tidak berwujud antara lain *Oracle Database, Analytics Software*, hak paten, dan sistem informasi perencanaan. Beban amortisasi diantaranya terdapat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp10.343.448.711,00, Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp6.203.189.394, Dinas Perindustrian Dan Energi

Rp4.770.473.690,00, Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Rp4.167.609.497,00.

12. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp644.082.869.416,00 dan Rp437.667.615.684,00. Beban Penyisihan Piutang tersebut diantaranya terdapat di Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp596.512.271.045,00, PPKD sebesar Rp26.959.480.177, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Rp9.134.136.089,00, BLUD RS Koja sebesar Rp3.903.372.916,00, dan BLUD RS Cengkareng sebesar Rp905.538.696,00.

13. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp195.730.059.812,00 dan Rp Rp564.544.439.618,00, dimana beban sebesar Rp195.718.059.812,00 yang terdapat di PPKD yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Beban penurunan nilai investasi	Rp131.371.447.723	Rp442.696.593.866
2	Beban penyisihan dana bergulir	Rp764.147.805	0,00
3	Beban Kerugian Penghapusan Aset Tetap SKPD (SK sebelum tahun berjalan)	Rp63.582.188.541	Rp73.394.356.029
4	Beban Adiminstrasi Bank Setoran Penjualan Gedung dan Bangunan, pembulatan, dan koreksi piutang deviden BP THR Lokasari	Rp275.743	Rp28
	Total	Rp195.718.059.812	Rp564.544.439.618

Salah satu diantara Beban Lain-lain berupa Beban Penurunan Nilai Investasi sebesar Rp131.371.447.723,00 yang merupakan beban atas pengumuman rugi BUMD dan PT Patungan tahun 2016 dengan metode pencatatan ekuitas, dan kejadian lain yang

mengurangi ekuitas dalam laporan keuangan *investee*, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	Rugi Tahun 2016	Pengakuan Pendapatan atas Kejadian selain Pengumuman Rugi	Jumlah
1	**2**	**3**	**4**	**6 = 4 + 5**
1	PD Dharma Jaya		42.169.321	42.169.321
2	PD Pembangunan Sarana Jaya (konsol)		36.112.524.645	36.112.524.645
3	PD Pasar Jaya		20.831.467.434	20.831.467.434
4	PD PAL Jaya		16.228.479.467	16.228.479.467
5	PT Pembangunan Jaya (konsol)		2.132.814.198	2.132.814.198
6	PT Food Station Tjipinang	-	1.023.090.657	1.023.090.657
7	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	-	783.818	783.818
8	PT Bank DKI Jakarta		3.230.898	3.230.898
9	PT Jakarta Tourisindo	16.408.997.317	26.800.350	16.435.797.667
10	PT Transportasi Jakarta	-	2.127.659.574	2.127.659.574
11	PT Mass Rapid Transit Jakarta	36.408.860.369		36.408.860.369
12	PT Penjamin Kredit Daerah	-	24.569.675	24.569.675
	Jumlah	**52.817.857.686**	**78.553.590.037**	**131.371.447.723**

5.3.1.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Belanja Transfer.

Beban Transfer Tahun Anggaran 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp210.314.034.030,00 dan Rp371.152.504.510,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	208.527.191.300	369.674.163.000

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
2	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.786.842.730	1.478.341.510
Total		**210.314.034.030**	**371.152.504.510**

Adapun Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp208.527.191.300,00 diberikan kepada:

No.	Uraian	Realisasi (Rp) 2016	Realisasi (Rp) 2015
1.	Pemerintah Kabupaten Bogor Jl. Raya Tegar Beriman Cibinong, Kab. Bogor	2.900.000.000	66.482.715.000
2.	Pemerintah Kota Bogor, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 1, Kota Bogor	0,00	4.500.000.000
3.	Pemerintah Kota Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi	183.980.343.000	98.148.000.000
4.	Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Jalan Siliwangi No.1, Pamulang Tangerang Selatan	0,00	73.992.200.000
5.	Pemerintah Kota Tangerang Gedung Pusat Pemerintahan Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Kota Tangerang	15.196.848.300	100.000.000.000
6.	Pemerintah Kabupaten Tangerang, Jl. H. Somawinata No.1 Tigaraksa-Tangerang	0,00	17.151.248.000
7.	Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jalan Siti Jenab nomor 1 Kabupaten Cianjur	6.450.000.000	9.400.000.000
Jumlah		**208.527.191.300**	**369.674.163.000**

5.3.2 Kegiatan Non Operasional

5.3.2.1 Surplus Non Operasional

Surplus Non Operasional tahun 2016 merupakan surplus yang diperoleh dari aktivitas penjualan aset non lancar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin dan Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan.

1. Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin

Atas penjualan kendaraan dinas operasional dan inventaris kantor tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami surplus dan defisit. Untuk penjualan dengan posisi surplus, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta menerima kas sebesar Rp7.693.683.112,00. Adapun harga perolehan kendaraan dinas operasional dan inventaris kantor yang mengalami surplus tersebut adalah sebesar Rp23.409.963.550,00, dengan total akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp23.390.463.550,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp19.500.000,00.

Jika dibandingkan dengan nilai bukunya, maka nilai penjualan kendaraan dinas operasional dan inventaris kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 mengalami Surplus sebesar Rp7.674.183.112,00, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	SK Penghapusan	Penerimaan Kas (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31-Des-15 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31-Des-15 (Rp)	Surplus Penjualan Aset (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = 5 - 6**	**8 = 4 - 7**
1.	Kendaraan Dinas Operasional	Kep Gub Nomor 1342/2016	6.288.760.083	19.124.321.750	19.104.821.750	19.500.000	6.269.260.083
2.	Kendaraan Dinas Operasional	Kep Gub Nomor 2511/2016	1.409.987.929	4.285.641.800	4.285.641.800	-	1.409.987.929
3.	Koreksi		(5.064.900)	-	-	-	(5.064.900)
	Jumlah		**7.693.683.112**	**23.409.963.550**	**23.390.463.550**	**19.500.000**	**7.674.183.112**

2. Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan

Atas penjualan gedung dan bangunan tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami surplus dan defisit. Untuk penjualan dengan posisi surplus, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas sebesar Rp4.156.756.332,00. Adapun harga perolehan gedung dan bangunan yang mengalami surplus tersebut adalah sebesar Rp37.957.880.089,00, dengan total akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar

Rp37.862.107.867,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp95.772.222,00.

Jika dibandingkan dengan nilai bukunya, maka nilai penjualan gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 mengalami Surplus sebesar Rp4.060.984.110,00, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	SK Penghapusan	Penerimaan Kas (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31-Des-15 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31-Des-15 (Rp)	Surplus Penjualan Aset (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = 5 - 6**	**8 = 4 - 7**
1.	Gedung dan Bangunan	Kep Gub Nomor 260/2017	4.156.756.332	37.957.880.089	37.862.107.867	95.772.222	4.060.984.110
	Jumlah		**4.156.756.332**	**37.957.880.089**	**37.862.107.867**	**95.772.222**	**4.060.984.110**

5.3.2.2 Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional tahun 2016 merupakan defisit yang diperoleh dari aktivitas penjualan aset non lancar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin dan Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan.

1. Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin

Atas penjualan kendaraan dinas operasional dan inventaris kantor tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami surplus dan defisit. Untuk penjualan dengan posisi defisit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas sebesar Rp420.693.664,00. Adapun harga perolehan kendaraan dinas operasional dan inventaris kantor yang mengalami defisit tersebut adalah sebesar Rp1.588.748.934,00, dengan total akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp614.365.736,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp974.383.198,00.

Jika dibandingkan dengan nilai bukunya, maka nilai penjualan kendaraan dinas operasional dan inventaris kantor Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 mengalami Defisit sebesar Rp553.689.534,00, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

No.	Nama SKPD	SK Penghapusan	Penerimaan Kas	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31-Des-15 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31-Des-15 (Rp)	Defisit Penjualan Aset (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7 = 5 - 6**	**8 = 4 - 7**
1.	Kendaraan Dinas Operasional	Kep Gub Nomor 1342/2016	15.315.000	25.000.000	-	25.000.000	(9.685.000)
2.	Kendaraan Dinas Operasional	Kep Gub Nomor 2511/2016	72.100.000	137.000.000	-	137.000.000	(64.900.000)
3.	Inventaris Kantor	-	333.278.664	1.426.748.934	614.365.736	812.383.198	(479.104.534)
	Jumlah		**420.693.664**	**1.588.748.934**	**614.365.736**	**974.383.198**	**(553.689.534)**

2. Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan

Atas penjualan gedung dan bangunan tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami surplus dan defisit. Untuk penjualan dengan posisi defisit, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas sebesar Rp2.068.660.464,00. Adapun harga perolehan gedung dan bangunan yang mengalami defisit tersebut adalah sebesar Rp102.437.223.904,00, dengan total akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp31.108.623.334,00, sehingga nilai buku per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp71.328.600.570,00.

Jika dibandingkan dengan nilai bukunya, maka nilai penjualan gedung dan bangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 mengalami Defisit sebesar Rp69.259.940.106,00, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

No.	Uraian	SK Penghapusan	Penerimaan Kas (Rp)	Harga Perolehan Aset (Rp)	Akum. Penyusutan Aset s.d 31-Des-15 (Rp)	Nilai Buku Aset per 31-Des-15 (Rp)	Defisit Penjualan Aset (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
1.	Gedung dan Bangunan	Kep Gub Nomor 260/2017	2.068.660.464	102.437.223.904	31.108.623.334	71.328.600.570	(69.259.940.106)
	Jumlah		**2.068.660.464**	**102.437.223.904**	**31.108.623.334**	**71.328.600.570**	**(69.259.940.106)**

5.3.3 Pos Luar Biasa

Beban Luar Biasa pada tahun 2016 dan 2015 masing masing sebesar Rp1.538.053.806,00 dan Rp1.582.441.003,00. Adapun Beban Luar Biasa terdiri dari realisasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana dijelaskan dalam Laporan Realisasi Anggaran 2016 sebesar Rp744.309.687,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.2.1.1.3, ditambah kenaikan Utang Restitusi Pajak di tahun 2016 sebesar Rp 793.744.119,00.

Restitusi Pajak merupakan pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Kenaikan Utang Restitusi Pajak tahun 2016 tersebut merupakan Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.449.110.320,00 dikurangi dengan saldo Utang Restitusi Pajak per 31 Desember 2015 sebesar Rp705.366.201,00.

Adapun utang sebesar Rp1.449.110.320,00 tersebut tercatat pada Neraca Dinas Pelayanan Pajak, sedangkan pengakuan bebannya berada di Laporan OperasionalPPKD.

5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir, dimana Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas per 31 Desember

2016 berasal dari Saldo Ekuitas Awal ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 di Neraca sebesar Rp441.491.839.269.867,00 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas pada neraca awal per 1 Januari 2016 yang disusun berdasarkan basis akrual adalah Rp420.104.811.786.307,00.

2. Koreksi Ekuitas

Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp417.333.061.469,00, yang terdiri dari:

a. Koreksi Penambahan Ekuitas

Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2016 adalah sebesar Rp2.771.191.181.891,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp123.451.664.142,00 terdiri dari:
   a. Kurang catat Piutang Tahun 2015 sebesar Rp116.632.780.040,00;
   b. Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp38.062.195,00;
   c. Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Bunga Deposito sebesar Rp6.780.821.907,00
2) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp21.452.028.936,00 merupakan kurang catat persediaan awal.
3) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal nilai investasi permanen sebesar Rp80.996.166.299,00.
4) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp673.560.055.167,00 terdiri dari:

a. Kurang Catat Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp666.826.280.009,00;
b. Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk Aset Tetap dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp188.200.000,00;
c. Koreksi kurang catat nilai Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp6.545.575.158,00;

5) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.651.231.213.549,00 terdiri dari:
   a. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya yang Diserahkan ke Pihak Lain di Luar SKPD sebesar Rp1.195.169.894,00;
   b. Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Tahun 2015 sebesar Rp1.616.482.327.078,00;
   c. Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2016 karena Temuan sebesar Rp3.350.381.370,00;
   d. Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp120.511.000,00;
   e. Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp22.867.375.700,00;
   f. Koreksi Penyajian Saldo Awal Akum. Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp3.962.484.108,00;
   g. Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya yang lebih catat sebesar Rp2.005.534.000,00;
   h. Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum yang Double Catat dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.247.430.399,00.

6) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal kewajiban sebesar Rp3.974.234.164,00 terdiri dari:
   a) Koreksi Utang Tahun 2015 sebesar Rp852.513.163,00;

b) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp3.121.721.001,00.

7) Koreksi penambahan lainnya sebesar Rp216.525.819.634,00 terdiri dari:

a. Pembatalan Penyisihan atas Piutang yang Telah Terbayar sebesar Rp626.367.185,00;

b. Pembatalan Kesepakatan Pengadaan Transjakarta sebesar Rp131.039.134.160,00;

c. Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual sebesar Rp422.090.000,00;

d. Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya) sebesar Rp37.062.310,00

e. Penerimaan Kas dari Penjualan Aset Tetap dengan SK Penghapusan sebelum tahun berjalan sebesar Rp467.668.555,00;

f. Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya (sebelum tahun 2016) sebesar Rp7.319.821.537,00;

g. Selisih Transfer Aset Tetap di SKPD (tahun 2016) sebesar Rp76.356.259.072,00;

h. Selisih Transfer Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (tahun 2016) sebesar Rp257.416.815,00.

c. Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.188.524.243.360,00 dengan rincian sebagai berikut

1) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp7.769.704.576,00 terdiri dari:

a) Lebih Catat Piutang Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp380.621.953,00;

b) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp4.711.503,00;

c) Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2015 sebesar Rp6.990.965.200,00;

d) Eliminasi Penyisihan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp1.866.190,00;

e) Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan sebesar Rp9.279.458,00;

f) Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Bunga Deposito sebesar Rp382.260.272,00.

2) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp4.611.307.752,00 merupakan lebih catat persediaan awal.

3) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen Rp77.309.253,00.

4) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp802.899.998.669,00 terdiri dari:

a) Lebih Catat Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp501.326.286.546,00;

b) Penyerahan Aset Tetap Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Selain Belanja Modal 2016) sebesar Rp13.986.232.059,00;

c) Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan sebesar Rp12.384.724.773,00;

d) Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp120.511.000,00;

e) Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Aset Kemitraaan dengan Pihak Ketiga (dobel catat dengan SKPD) sebesar Rp27.893.082.000,00;

f) Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya (dobel catat dengan SKPD) sebesar Rp243.254.093.457,00;

g) Koreksi Aset Fasos Fasum yang dobel catat dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp3.183.689.600,00;

h) Koreksi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp751.379.234,00.

5) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.948.833.887.386,00 terdiri dari:

a) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Tahun 2015 sebesar Rp960.150.095.356,00;

b) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp 5.005.446.540,00;
c) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp1.919.773.038,00;
d) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah (BOT) sebesar Rp772.512.000,00;
e) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BTO) sebesar Rp47.141.179.800,00;
f) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum sebesar Rp933.844.880.652,00.

6) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal kewajiban sebesar Rp11.448.024.654,00 merupakan koreksi kurang catat utang dan Penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD sebesar Rp3.594.184.164,00.
7) Koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp412.884.011.070,00 terdiri dari:
   a) Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp20.339.342,00
   b) Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD sebesar Rp89.142.333.769,00;
   c) Koreksi Kurang Catat Pendapatan Pajak – LO sebesar Rp323.718.623.959,00;
   d) Koreksi Kas Konsinyasi sebesar Rp2.714.000,00.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang disajikan di LPE menyajikan nilai koreksi ekuitas sebagai dampak dari perubahan kebijakan. Pada tahun 2016, tidak terdapat koreksi ekuitas atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Sedangkan pada tahun 2016, Koreksi atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang disajikan di LPE menyajikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 sebagai dampak dari penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada tahun 2015. Adapun nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp25.946.813.122.084,00, yang terdiri dari:

a. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp24.737.392.389.270,00,
b. Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Fasos Fasum sebesar Rp1.100.232.508.224,00.
c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dijual sebesar Rp41.835.372.724,00.
d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp67.352.851.866,00.

4. Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp21.804.360.545.029,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	65.201.703.739.643,00	
Beban	(43.337.726.678.390,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		21.863.977.061.253,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		(58.078.462.418,00)
Beban Luar Biasa		(1.538.053.806,00)
Surplus – LO		**21.804.360.545.029,00**

5.5 Neraca

5.5.1 Aset

5.5.1.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.5.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (*liquid*), merupakan medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*), rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (*cash equivalent*) adalah investasi yang sifatnya sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp7.684.222.409.201,00 dan Rp4.447.646.232.438,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Kas Daerah	7.684.218.354.701	4.118.062.593.224
2	Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD	1.771.000	324.469.034.806
3	Kas Transitoris	2.283.500	5.114.604.408
Jumlah		**7.684.222.409.201**	**4.447.646.232.438**

Dalam rangka pengelolaan kas, selain menyimpan dana dalam bentuk tabungan giro, selama tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendepositokan dana ke 3 (tiga) Bank, yaitu Bank DKI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Adapun rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp7.684.218.354.701,00 dan Rp4.118.062.593.224,00 tersaji pada tabel 5.26.

Tabel 5.26

Kas di Bank

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Rekening Bank	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0)	354.612.547.782	243.339.078.977
2	Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9)	120.934.368.370	11.918.441.408
3	Bank Mandiri (Rek. 119-00-0107716-1)	0	55.184.404
4	Bank Mandiri (Rek. 104-00-9700002-5)	0	2.548.419.336
5	Bank Mandiri (Rek. 104-00-9800029-7)	0	1.479.541.889
7	Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4)	7.343.038.967	0
8	Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9)	1.925.157.112	7.297.602.011
9	Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2)	21.849.472.653	30.162.712.172
10	Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9)	112.942.002.365	19.240.873.922
11	Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2)	11.274.221.314	30.707.741.643
12	Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3)	10.868.881.334	3.430.454.929
13	Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5)	89.502.085.676	3.494.801.851
14	Bank DKI (Rek. 200-02-02828-2)	0	5.424.770.554
15	Bank DKI (Rek. 200-02-02829-1)	0	14.702.320.308
16	Bank DKI (Rek. 108-16-12680-9)	0	12.509.601.822
17	Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9)	960.060.723.319	64.471.114.553
18	Bank DKI (Rek. 108-02-61605-1)	0	58.210.190.548
19	Bank DKI (Rek. 140-02-01605-8)	15.252.424.059	18.755.593.720
20	Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9)	16.171.029.446	0

No	Rekening Bank	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
21	BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5)	748.887.709.571	269.335.538.660
22	BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7)	191.390.010.080	406.869.853.316
23	BRI (Rek. 00000019-01-001271-30-8)	8.270.606.574	173.703.587.732
24	BTN (Rek. 00014-01-30-001756-6)	507.934.076.079	0
25	BNI (Rek. 8920644)	0	264.649.480
26	BNI (Rek. 8920688)	0	140.519.988
27	Deposito Bank DKI (101450)	0	200.000.000.000
28	Deposito Bank DKI (150692)	150.000.000.000	150.000.000.000
29	Deposito Bank DKI (101495)	150.000.000.000	150.000.000.000
30	Deposito Bank DKI (15264)	200.000.000.000	0
31	Deposito Bank DKI (15265)	200.000.000.000	0
32	Deposito Bank DKI (101507)	150.000.000.000	150.000.000.000
33	Deposito Bank DKI (101672)	200.000.000.000	0
34	Deposito Bank DKI (101676)	200.000.000.000	0
35	Deposito Bank DKI (70228-560-877)	500.000.000.000	0
36	Deposito Bank DKI (Syariah Cab W. Hasyim)	500.000.000.000	0
37	Deposito Bank BRI (0019-01-011142-40-0)	0	400.000.000.000
38	Deposito Bank BRI (0019-01-011441-40-6)	220.000.000.000	220.000.000.000
39	Deposito Bank BRI (0019-01-011682-40-0)	0	180.000.000.000
40	Deposito Bank BRI (0019-01-012995-40-8)	0	200.000.000.000
41	Deposito Bank BRI (0019-01-012994-40-2)	0	300.000.000.000
42	Deposito Bank BRI (0019-01-013133-40-7)	0	200.000.000.000
43	Deposito Bank BRI (0019-01-014805-405)	200.000.000.000	0
44	Deposito Bank BRI (0019-01-014806-401)	300.000.000.000	0
45	Deposito Bank BRI (0019-01-015023-404)	500.000.000.000	0
46	Deposito Bank BRI (0019-01-015203-402)	400.000.000.000	0
47	Deposito Bank Mandiri (103-02-0498971-5)	0	100.000.000.000
48	Deposito Bank Mandiri (103-02-0499348-5)	100.000.000.000	100.000.000.000
49	Deposito Bank Mandiri (103-02-0500880-4)	0	55.000.000.000
50	Deposito Bank Mandiri (103-02-0503758-9)	135.000.000.000	135.000.000.000
51	Deposito Bank Mandiri (103-02-0513092-1)	100.000.000.000	100.000.000.000
52	Deposito Bank Mandiri (103-02-0517986-6)	100.000.000.000	100.000.000.000
53	Deposito Bank Mandiri (103-02-0520106-0)	200.000.000.000	0
	Total Saldo Kas di Kas Daerah	**7.684.218.354.701**	**4.118.062.593.224**

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2016 sebesar Rp7.684.218.354.701,00 tersebut tidak termasuk giro yang belum dicairkan oleh pihak ketiga (*outstanding check*) sebesar Rp35.788.221.674,00 dengan rincian sebagai berikut:

. Nama Bank	No. Rekening	Penanggungjawab Rekening	Total *Outstanding Check*
Bank DKI	303-02-51605-9	KPKD Kota Administrasi Jakarta Barat	702.156.613,00
Bank DKI	139-02-01605-4	Bidang Perbendaharaan Provinsi	5.825.961.352,00
Bank DKI	111-02-11605-9	KPKD Kota Administrasi Jakarta Pusat	29.258.973.335,00
Bank DKI	140-02-01605-8	KPKD Kabupaten Kepulauan Seribu	1.130.374,00
TOTAL			**35.788.221.674,00**

Sejak tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengelola Kas Non Anggaran berupa penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Kas Transitoris ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, Pasal 4, menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan Pengelola Kas Non Anggaran dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala SKPD/UKPD Pelaksana selaku pemungut Kas Non Anggaran.

Saldo Kas Transitoris per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.283.500,00 dan Rp5.114.604.408,00 merupakan penerimaan uang jaminan bongkar reklame dan BP3W Sunter Jakarta Utara. Adapun mutasi saldo Kas Transitoris dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Kas Non Anggaran Tahun 2015			
	Saldo Awal per 31 Desember 2014	**Rp**	**5.114.604.408,00**
	Hasil Eksekusi atas Jaminan Pembongkaran Bangunan Reklame Tahun 2016	Rp	(5.455.585.958,00)
	Penerimaan Jaminan Tahun 2016	Rp	343.265.050,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2015	**Rp**	**2.283.500,00**

Saldo Kas Transitoris tersebut belum termasuk Titipan Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan

dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing tercatat sebesar Rp6.259.239.973,00 dan Rp6.095.042.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat kemerdekaan. Hal ini untuk menjaga ketertiban umum di bidang perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemakaian suatu perumahan hanya sah, apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala Kantor Urusan Perumahan setempat menurut bentuk yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”. Selanjutnya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing tercatat sebesar Rp862.254.860,00 dan Rp902.254.860,00. Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah tersebut.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP dan Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Jatibaru dengan Nomor Rekening 110-02-07691-1 atas nama Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan per

31 Desember 2016 dan 2015 masing–masing sebesar Rp1.097.830.296,00 dan Rp1.205.764.787,00 disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari dengan Nomor Rekening 104-03-00268-2 atas nama Panitia Lelang Hasil Hutan Temuan.

5.5.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp22.118.245.979,00 dan Rp816.807.645.256,00. Saldo kas per 31 Desember 2016 diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan akumulasi sisa uang persediaan sebesar Rp21.603.202.103,00, Jasa Giro di SKPD yang belum disetor sebesar Rp2.377.506,00, Pajak di SKPD yang Belum Disetor ke kas Negara sebesar Rp414.974.370,00, Uang Titipan sebesar Rp0,00, dan Potongan Non Pajak yang Belum DIsetor sebesar Rp97.692.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2016 tidak termasuk kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp467.779.919,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.720.054,00 dan BLUD Puskesmas Grogol Petamburan sebesar Rp242.649.213,00, serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00, sebagaimana dijelaskan pada CaLK Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada lampiran 2.

5.5.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp230.712.654,00 dan Rp0,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2016 merupakan Jasa Giro di Unit Pengelola

Rumah Susun Wilayah I, II, III sebesar Rp155.960.968,00 dan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta Perdagangan sebesar Rp74.751.686,00 yang terdapat pada Rekening Bank SKPD dan belum disetorkan ke Rekening BUD sampai dengan akhir periode.

5.5.1.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.017.166.144.568,00 dan Rp1.017.491.155.074,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Kas Tunai	1.320.020.275,00	2.521.825.239,00
2	Kas di Bank	1.013.150.761.377,00	1.012.718.896.555,00
3	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	1.086.455.531,00	871.302.184,00
4	Uang Muka Pasien RSUD/RSKD	1.608.907.385,00	1.366.064.096,00
5	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	0,00	13.067.000,00
	Jumlah	**1.017.166.144.568,00**	**1.017.491.155.074,00**

Rincian Saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 pada unit sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	233.554.122.644,00	228.043.016.335,00
2	Unit Pengelola Perparkiran	20.447.126.679,00	32.899.488.649,00
3	BLUD dibawah koordinasi Dinas Kesehatan	562.103.663.187,00	455.504.352.706,00
4	BLUD RS Koja	29.320.866.882,00	25.842.400.560,00
5	BLUD RS Tarakan	2.924.562.737,00	23.969.715.236,00
6	BLUD RS Cengkareng	78.945.583.421,00	72.323.685.526,00
7	BLUD RS Pasar Rebo	28.746.536.734,00	27.323.257.674,00
8	BLUD RS Budhi Asih	12.016.502.428,00	14.739.269.346,00
9	BLUD RS Duren Sawit	9.299.189.022,00	16.467.659.696,00
10	KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAGUNAN	38.552.222.682,00	30.469.960.892,00

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
11	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	1.255.768.152,00	766.014.685,00
12	Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	0,00	26.129.714.462,00
13	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I	0,00	22.586.940.667,00
14	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II	0,00	12.216.008.640,00
15	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III	0,00	26.062.237.607,00
16	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	0,00	2.147.432.393,00
	Jumlah	**1.017.166.144.568,00**	**1.017.491.155.074,00**

Pada Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dan Dinas Olahraga dan Pemuda tidak ada saldo pada tahun 2016 karena sudah dibubarkan, sedangkan untuk Unit Pengelola Rumah Susun tidak ada saldo pada tahun 2016 karena pada tahun 2016 dikelola oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

Rincian dan Penjelasan Kas dan Setara Kas BLUD tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Saldo Kas Tunai per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.320.020.275,00 dan Rp2.521.825.239,00.

Saldo Kas di Bank per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.013.150.761.377,00 dan Rp1.012.718.896.555,00. Kas Tunai dan Kas di Bank karena pengelolaannya bersifat khusus, maka pada akhir Bulan Desember 2016 tidak disetorkan ke kas daerah sehingga dapat digunakan kembali dalam kegiatan operasional pada bulan berikutnya. Semua kas di bank tersebut berbentuk Giro, kecuali pada Unit Pengelola Perparkiran yang berbentuk deposito. Pada Tahun 2015 UPT Perparkiran memiliki deposito Bank BNI

sebesar Rp20.000.000.000,00. Pada tahun 2016 deposito tersebut dicairkan sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk belanja investasi berupa mesin Terminal Parking Electronics (TPE), sedangkan deposito sebesar Rp10.000.000.000,00 diperpanjang otomatis dengan No. Seri PAB 0691260 dengan jangka waktu satu bulan.

Kas Tunai dan Kas di Bank tersebut termasuk kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway yang tercatat di Dinas Perhubungan. Saldo kas per 31 Desember 2014 pada laporan keuangan ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway adalah sebesar Rp240.778.262.880,00. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Laporan Keuangan setelah Audit tahun 2014.

Dengan dialihkannya status BLUD Pengelola Transjakarta Busway menjadi PT Trans Jakarta per 1 Januari 2015, telah dilakukan penutupan buku BLUD Pengelola Transjakarta Busway Per 31 Desember 2014 dengan saldo kas pada Neraca Penutup per 31 Desember 2014 (*unaudited*) sebesar Rp223.588.141.994,00, sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp17.190.120.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Neraca per 31 Desember 2014	Neraca Penutup 31 Desember 2014 *(unaudited)*	Kenaikan /(Penurunan)
1.	Kas di bank	240.778.262.880	221.524.684.555	(19.253.578.325)
2.	Kas Tunai	-	1.277.635.079	1.277.635.079
3.	Kas Transito BLUD	-	785.822.360	785.822.360
Jumlah		**240.778.262.880**	**223.588.141.994**	**(17.190.120.886)**

Perbedaan saldo sebesar Rp19.253.578.325,00 pada Kas di Bank disebabkan adanya (*outstanding check*) yang masih disajikan sebagai Kas di Bank pada laporan keuangan per 31 Desember 2014, belum diperhitungkan sebagai pengurang kas dalam laporan keuangan Tahun 2014.

Perbedaan saldo sebesar Rp1.277.635.079,00 merupakan nilai kas di bendahara pengeluaran yang belum tercatat pada akun kas tunai.

Sedangkan perbedaan saldo sebesar Rp785.822.360,00 adalah belanja yang telah dibayarkan namun belum dilakukan pengesahan atas belanja BLUD (kas transito BLUD).

Berdasarkan hasil konfirmasi bank yang dilakukan pada akhir bulan Mei 2016 menunjukkan bahwa saldo kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway di Bank per 31 Desember 2015 jumlahnya sebesar Rp228.043.016.335,00, sehingga atas perbedaan saldo Kas di Bank dilakukan koreksi pada laporan keuangan tahun 2015. Jumlah tersebut belum termasuk dana yang ada di Bank Mega senilai Rp1.081.198.236,00 karena masih menunggu jawaban konfirmasi bank untuk memastikan kebenaran jumlahnya.

Saldo kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp233.554.122.644,02. Terdapat penambahan saldo kas ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2016 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2015 sebesar Rp5.511.106.309,02, penambahan tersebut disebabkan adanya koreksi atas saldo rekening Bank Mega dan penambahan jasa giro.

Untuk memastikan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway, akan dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Penutup ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditetapkan.

b. Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar

Rp1.086.455.531,00 dan Rp871.302.184,00, merupakan potongan pajak yang berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan ke kas negara sampai dengan akhir masa pelaporan.

c. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.608.907.385,00 dan Rp1.366.064.096,00. Saldo Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	BLUD RS Koja	1.025.489.633,00	464.940.539,00
2	BLUD RS Tarakan	61.033.840,00	31.642.520,00
3	BLUD RS Cengkareng	356.558.541,00	446.896.946,00
4	BLUD RS Pasar Rebo	57.140.271,00	195.848.991,00
5	BLUD RS Budhi Asih	105.185.100,00	225.435.100,00
6	BLUD RS Duren Sawit	3.500.000,00	-
7	BLUD RSUD Pasar Minggu - Jaksel	-	1.300.000,00
	Jumlah	**1.608.907.385,00**	**1.366.064.096,00**

d. Potongan Non Pajak yang Belom Disetor

Potongan Non Pajak yang Belom Disetor adalah potongan Iuran Jamsostek pegawai yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2015 dan sudah disetor pada tahun 2016 yang ada di BLUD RSUD Cengkareng.

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji pada lampiran 3.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2016 tidak termasuk jumlah kas di rekening penampungan di Bank BRI

sebagai pelaksanaan program Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang baru dapat dicairkan setelah jumlah klaim diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2016 juga tidak termasuk Belanja yang Belum Disahkan. Belanja yang Belum Disahkan tersebut diantaranya terdiri dari Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD, Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah Pengembangan Ekonomi Masyarakat, dan Belanja pada Badan Layanan Umum Daerah lainnya.

Pada BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung terdapat saldo atas belanja operasional BLUD yang belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 yaitu sebesar Rp16.881.743.513,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013 tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun Anggaran	Jumlah Pengeluaran	Jumlah Belanja Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja yang Tidak Didukung Bukti yang Cukup	Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung
2010	7.279.996.932,66	5.259.241.278,66	768.529.772,00	1.252.225.882,00
2011	4.672.272.382,51	2.796.186.961,51	1.579.736.874,00	296.348.547,00
1 Jan-31 Maret 2012	4.557.849.577,00	3.018.294.331,00	1.539.555.246,00	0,00
Jumlah	**16.510.118.892,17**	**11.073.722.571,17**	**3.887.821.892,00**	**1.548.574.429,00**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai saat ini masih melakukan upaya penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.723.737.512.402,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah SiLPA tahun 2016 sebesar Rp7.706.289.336.723, dimana SiLPA tahun 2016 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2016 sebesar Rp1.017.448.175.679,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK, Kas Transitoris, dan Pendapatan yang Belum Dilakukan Pengesahan di BUD. Selain itu, terdapat pengurang SiLPA dikarenakan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.5.11.g.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo Kas		8.723.737.512.402,00
SiLPA		7.706.289.336.723,00
Selisih		**1.017.448.175.679,00**
Rincian Selisih SiLPA		
Utang PFK		1.600.892.901,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	1.771.000,00	
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	414.974.370,00	
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	1.086.455.531,00	
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	97.692.000,00	
Uang Jaminan		2.283.500,00
Kas Transitoris		
Pendapatan Belum Disahkan		1.016.312.779.197,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	2.377.506,00	
Kas Tunai - BLUD	1.320.020.275,00	
Kas di Bank - BLUD	1.013.150.761.377,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.608.907.385,00	
Pendapatan yang Belum Disetor	230.712.654,00	
Kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara		(467.779.919,00)
Total		**1.017.448.175.679,00**

5.5.1.1.5 Piutang

5.5.1.1.5.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp6.615.787.893.791,00 dan Rp6.310.691.128.624,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	79.063.988.854	50.386.958.545
2.	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	242.507.010	238.627.010
3.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.030.050.322	4.095.221.225
4.	Piutang Pajak Air Tanah	80.602.138.853	83.087.525.295
5.	Piutang Pajak Hotel	15.391.169.367	17.476.631.388
6.	Piutang Pajak Restoran	112.566.232.430	129.880.233.572
7.	Piutang Pajak Hiburan	52.809.224.249	67.165.075.129
8.	Piutang Pajak Reklame	233.791.725.093	210.655.068.042
9.	Piutang Pajak Parkir	5.265.394.798	2.794.391.418
10.	Piutang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan	19.595.436.532	17.841.**149.**604
11.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	6.012.430.026.283	5.727.070.247.396
Jumlah		**6.615.787.893.791**	**6.310.691.128.624**

Piutang pajak sebesar Rp6.615.787.893.791,00 adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Suku Dinas Pelayanan Pajak, Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi dan 43 UPPD dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**6.310.691.128.624**
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2016 (atas piutang 2015)	Rp	(716.272.240.409)
	Keputusan Keberatan/Pengurangan	Rp	(87.037.667.820)
	Kompensasi	Rp	(758.579.859)
	Koreksi	Rp	(274.238.934.848)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**5.232.383.705.688**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	**9.816.443.129.534**
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari – Desember 2016)	Rp	(7.987.881.862.077)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2016)	Rp	(442.461.700.363)
	Kompensasi	Rp	(2.695.378.991)
	Saldo Piutang Tahun Berjalan 2016	Rp	**1.383.404.188.103**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**6.615.787.893.791**

Dari mutasi piutang diatas dapat dijelaskan bahwa pembayaran piutang untuk jenis pajak O*fficial Assessment* meliputi seluruh penerimaan dari wajib pajak yang sudah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang jumlahnya sama dengan jumlah penerimaan yang diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan mutasi piutang pajak yang bersifat *Self Assessment,* penerimaan pembayaran pajak sebagai pengurang piutang sebesar jumlah penerimaan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), tidak memperhitungkan penerimaan setoran massa pajak.

Gambaran mutasi piutang per jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar

Rp79.063.988.854,00 dan Rp50.386.958.545,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**50.386.958.545**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(7.235.161.100)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2014	Rp	-
	Koreksi	Rp	(8.106.579.241)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**35.045.218.204**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	558.466.554.390
	Penerimaan Pembayaran (Januari -Desember 2016)	Rp	(514.447.783.740)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari -Desember 2016)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	**44.018.770.650**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**79.063.988.854**

Penyajian piutang PKB senilai Rp79.063.988.854,00 merupakan piutang PKB yang berasal Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) wilayah kota administrasi, Piutang PKB tersebut dicatat berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan. Hal ini telah sesuai dengan *treatment* akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengenai piutang pajak, dimana dalam SAP tersebut dijelaskan bahwa piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Piutang PKB tersebut tidak disajikan berdasarkan akumulasi sejak diterbitkan SKP dari tahun 2008 s.d 2016. Mekanisme piutang tersebut tidak termasuk tunggakan pajak Kendaraan Bermotor atas Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU). Hal ini mengacu kepada mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, bahwa SKP dapat diterbitkan apabila

Wajib Pajak terlebih dahulu melakukan pendaftaran (registrasi) dan identifikasi kendaraan bermotor pada Pihak Kepolisian.

Walaupun tidak diakui sebagai piutang, karena belum ada penetapan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melakukan pengendalian atas kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhutang dalam sistem informasi PKB. Sistem tersebut memelihara informasi atau data setiap tunggakan kendaraan, sehingga pada saat Wajib Pajak melakukan pendaftaran (registrasi) dan identifikasi, maka akan secara otomatis sistem akan memanggil sejarah atau histori tunggakan yang dimiliki Wajib Pajak tersebut atau tersaji secara akumulasi. Hal tersebut merupakan bentuk pengendalian (*control*) terhadap piutang PKB.

Wajib Pajak yang belum melakukan pendaftaran (registrasi) dan identifikasi atas kendaraan bermotornya akan diklasifikasikan sebagai Wajib Pajak Pajak Kendaraan Bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU). Jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 (5 tahun) sebanyak 2.918.926 Kbm dengan potensi penerimaan PKB sebesar Rp2.840.922.512.800,00. Potensi penerimaan PKB tersebut dihitung dengan menggunakan Nilai Jual Kendaran Bermotor pada saat jatuh tempo dan dihitung secara akumulasi. Berikut disajikan perhitungan potensi penerimaan pajak daerah yang berasal dari BDU di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2012 s.d 2016 sebagai berikut :

Rekapitulasi Kendaraan Bermotor BDU dan Potensi Penerimaannya Berdasarkan Jenis Kendaraan dan NJKB Tahun Terhutang

Tahun 2012 – 2016

NO	Jenis Kendaraan	2012		2013		2014		2015		2016		Grand Total	
		Jumlah KBm	Potensi PKB	Jumlah KBm	Potensi PKB	Jumlah KBm	Potensi PKB	Jumlah KBm	Potensi PKB	Jumlah KBm	Potensi PKB	Jumlah KBm	Potensi PKB
1	Alat Alat Berat	1,451	12,513,575,200.00	2,310	16,351,732,900.00	2,988	14,317,825,800.00	3,792	12,379,002,100.00	7,212	13,135,594,700.00	17,753	68,697,730,700.00
2	Bestel Wagon,Box,Delvan	1,714	17,634,968,300.00	2,930	30,978,155,400.00	3,789	28,687,550,300.00	4,496	19,668,449,000.00	11,792	34,750,004,400.00	24,721	131,719,127,400.00
3	Dum Truck,Truck Tangki	1,476	17,549,673,900.00	1,971	19,465,439,500.00	2,516	18,068,312,400.00	3,074	15,137,219,200.00	5,957	16,766,147,200.00	14,994	86,986,792,200.00
4	Jeep Segala Merk	2,266	23,827,580,000.00	3,003	35,718,732,800.00	4,149	40,684,070,000.00	6,915	45,086,530,000.00	18,220	92,156,805,000.00	34,553	237,473,717,800.00
5	Kendaraan Bermotor Roda 3	78	8,052,400.00	376	93,475,000.00	1,092	83,901,000.00	2,227	45,950,300.00	3,401	170,851,700.00	7,174	402,230,400.00
6	Minibus,Microbus,Bus,Combi	11,891	83,018,707,800.00	17,401	125,372,033,800.00	27,708	154,231,184,100.00	51,238	183,816,186,500.00	139,649	349,163,397,200.00	247,887	895,601,509,400.00
7	Otolet/Opelet,Microlet	136	129,929,500.00	185	156,148,000.00	214	110,429,000.00	348	106,731,500.00	1,509	252,630,000.00	2,392	755,868,000.00
8	Pickup,Lighttruck,Truck	4,547	22,929,551,800.00	5,889	28,563,705,700.00	7,484	27,429,781,700.00	10,085	24,274,747,300.00	19,643	30,278,862,700.00	47,648	133,476,649,200.00
9	Sedan Dan Sejenisnya	8,964	56,169,964,500.00	11,554	76,945,460,500.00	14,065	78,926,560,500.00	20,040	80,332,967,500.00	36,228	127,923,320,500.00	90,851	420,298,273,500.00
10	Sepeda Motor	307,967	188,120,441,100.00	342,401	198,302,939,600.00	401,402	175,525,156,500.00	509,227	140,295,003,300.00	869,956	163,267,073,700.00	2,430,953	865,510,614,200.00
11	Grand Total	340,490	421,902,444,500	388,020	531,947,823,200	465,407	538,064,771,300	611,442	521,142,786,700	1,113,567	827,864,687,100	2,918,926	2,840,922,512,800.00

Sumber : Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta

Mutasi Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Piutang Bea Balik Nama Kendaran Bermotor per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp242.507.010,00 dan Rp238.627.010,00 dan dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**238.627.010**
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**238.627.010**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	4.600.000
	Penerimaan Pembayaran (Januari -Desember 2016)	Rp	(720.000)
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	**3.880.000**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**242.507.010**

Mutasi Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.030.050.322,00 dan Rp4.095.221.225,00 dan dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**4.095.221.225**
	Koreksi	Rp	(65.170.903)

	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**4.030.050.322**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	-
	Penerimaan Pembayaran (Januari -Desember 2016)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	**-**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**4.030.050.322**

Mutasi Piutang Pajak Air Tanah (PAT)

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp80.602.138.853,00 dan Rp83.087.525.295,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**83.087.525.295**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(8.967.167.396)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	(334.183.739)
	Kompensasi	Rp	(507.997.001)
	Koreksi	Rp	(4.744.444.890)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**68.533.732.269**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	115.172.425.941
	Penerimaan Pembayaran (Januari –Desember 2016)	Rp	(103.104.019.357)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2016)	Rp	-
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	**12.068.406.584**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**80.602.138.853**

Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp15.391.169.367,00 dan Rp17.476.631.388,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**17.476.631.388**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(3.721.503.163)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	-
	Koreksi	Rp	(33.443.130)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**13.721.685.095**

b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	16.920.983.181
	Penerimaan Pembayaran (Januari -Desember 2016)	Rp	(13.599.144.273)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari –Desember 2016)	Rp	(1.652.354.636)
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	**1.669.484.272**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**15.391.169.367**

Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp112.566.232.430,00 dan Rp129.880.233.572,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**129.880.233.572**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(21.789.560.889)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	(384.717.877)
	Koreksi	Rp	(4.909.234.878)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**102.796.719.928**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	34.498.432.203
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2016)	Rp	(23.877.037.053)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari – Desember 2016)	Rp	(851.882.648)
	Saldo Piutang Tahun 2016	Rp	**9.769.512.502**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**112.566.232.430**

Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp52.809.224.249,00 dan Rp67.165.075.129,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**67.165.075.129**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(19.230.185.840)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	(890.312.958)
	Koreksi	Rp	(3.748.943.820)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**43.295.632.511**

b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	53.158.688.824
	Penerimaan Pembayaran (Januari -Desember 2016)	Rp	(39.331.838.738)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari -Desember 2016)	Rp	(4.313.258.348)
	Saldo PiutangTahun 2016	Rp	**9.513.591.738**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**52.809.224.249**

Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing Rp233.791.725.093,00 dan Rp210.655.068.042,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**210.655.068.042**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 20160 atas Piutang 2015	Rp	(66.742.594.722)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	(40.477.837)
	Kompensasi	Rp	(232.214.601)
	Koreksi	Rp	(18.637.797.068)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**125.001.983.814**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	987.470.795.065
	Penerimaan Pembayaran (Januari –Desember 2016)	Rp	(876.068.977.985)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2016)	Rp	(1.052.147.565)
	Kompensasi	Rp	(1.559.928.236)
	Saldo PiutangTahun 2016	Rp	**108.789.741.279**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**233.791.725.093**

Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp5.265.394.798,00 dan Rp2.794.391.418,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**2.794.391.418**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(208.976.706)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	(319.673.713)
	Koreksi	Rp	(322.221.613)

	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**1.943.519.386**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	6.282.117.982
	Penerimaan Pembayaran (Januari -Desember 2016)	Rp	(2.907.670.398)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2016)	Rp	(52.572.172)
	Saldo PiutangTahun 2016	Rp	**3.321.875.412**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**5.265.394.798**

Mutasi Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan

Piutang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp19.595.436.532,00 dan Rp17.841.149.604,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**17.841.149.604**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(194.460.975)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	-
	Koreksi	Rp	(4.901.962)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**17.641.786.667**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	2.080.817.983
	Penerimaan Pembayaran (Januari – Desember 2016)	Rp	(127.168.118)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari –Desember 2016)	Rp	-
	Saldo PiutangTahun 2016	Rp	**1.953.649.865**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**19.595.436.532**

Mutasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Pada tahun 2013 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Piutang PBB P2 merupakan hasil pelimpahan wewenang untuk pengelolaan PBB P2 dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010

tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan Berita sesuai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala UPPD sesuai kewenangan wilayahnya.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp6.012.430.026.283,00 dan Rp5.727.070.247.396,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

a.	Mutasi Piutang Tahun 2015		
	Piutang per 31 Desember 2015	Rp	**5.727.070.247.396**
	Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2016 atas Piutang 2015	Rp	(588.182.629.618)
	Keputusan Keberatan atas Piutang 2015	Rp	(85.068.301.696)
	Kompensasi	Rp	(18.368.257)
	Koreksi	Rp	(233.666.197.343)
	Saldo Piutang Tahun 2015	**Rp**	**4.820.134.750.482**
b.	Mutasi Piutang Pajak Tahun 2016		
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	Rp	8.042.387.713.965
	Penerimaan Pembayaran (Januari -Desember 2016)	Rp	(6.414.417.502.415)
	Pengurang Piutang dengan Kompensasi	Rp	(1.135.450.755)
	Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari-Desember 2016)	Rp	(434.539.484.994)
	Saldo PiutangTahun 2016	Rp	**1.192.295.275.801**
c.	**Piutang per 31 Desember 2016 (a+b)**	**Rp**	**6.012.430.026.283**

Dalam rangka penerapan pelaporan akuntansi berbasis akrual dan sebagai upaya untuk meminimalisir piutang PBB-P2 yang tidak tertagih karena ketidakakuratan penerbitan SPPT PBB-P2 khususnya terhadap Piutang PBB-P2 hasil pelimpahan Direktorat Jendral Pajak yang dilimpahkan per 1 Januari 2013, pada tanggal 28 Agustus 2015 Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarakan Instruksi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Provinsi DKI Jakarta.

Pelaksanaan Instruksi Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Objek PBB-P2 Provinsi DKI

Jakarta dilakukan oleh Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) selaku unit yang mengelola PBB-P2 yang berkoordinasi dengan Bidang-bidang dilingkungan Dinas Pelayanan Pajak dalam rangka menunjang pelaksanaan instruksi tersebut.

Sebagaimana isi dalam instruksi tersebut, setiap UPPD diminta untuk :

a. melakukan pemutakhiran melalui penelitia lapangan terhadap minimal 300 objek PBB-P2 yang telah memiliki hutang PBB-P2 sejak 9 (sembilan) tahun secara berturut-turut;
b. mengelompokan dan mengkategorikan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) sesuai dengan kode kategori yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 33 Tahun 2015 tentang Kode Kategori Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu sebagai berikut :

Kode Kategori	Uraian
1	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dan secara nyata ada dan ditemukan lokasinya
2	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar namun secara nyata tidak dapat ditemukan lokasinya di lapangan
3	Objek PBB-P2 yang telah memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-PB2 nya diterbitkan pada tahun pajak yang sama (satu objek pajak memiliki NOP ganda)
4	Objek PBB-P2 yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA, dll
5	Objek PBB-P2 yang secara nyata telah menjadi sarana prasarana utilitas/yang telah dibebaskan dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah
6	Objek PBB-P2 yang bermasalah/disengketakan kepemilikannya oleh beberapa pihak

Hasil pelaksanaan instruksi sebagaimana dimaksud angka 4 belum mempengaruhi penyajian Laporan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2016, dan hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut.

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PAJAK	KRITERIA PIUTANG				JUMLAH
		LANCAR	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET	
1	HOTEL	1,669,484,272	1,017,482,955	1,847,858,628	10,856,343,512	15,391,169,367
2	RESTORAN	9,769,512,502	20,144,589,664	11,819,662,849	70,832,467,416	112,566,232,430
3	HIBURAN	9,513,591,738	14,392,052,903	4,611,236,275	24,292,343,333	52,809,224,249
4	PARKIR	3,321,875,412	4,138,080	117,131,514	1,822,249,792	5,265,394,798
5	REKLAME	108,789,741,279	24,702,356,333	77,508,209,536	22,791,417,946	233,791,725,093
6	PBB-KB	-	354,125,351	3,675,924,971	-	4,030,050,322
7	PPJ	-	-	-	-	-
8	PAJAK ROKOK	-	-	-	-	-
9	BPHTB	1,953,649,865	-	-	17,641,786,667	19,595,436,532
10	PBB-P2	1,192,295,275,801	1,083,196,334,230	1,634,848,134,501	2,136,000,568,679	6,012,430,026,283
11	P A T	12,068,406,584	10,412,218,814	26,087,215,632	32,034,297,823	80,602,138,853
12	BBN-KB	3,880,000	-	-	238,627,010	242,507,010
13	PKB	44,018,770,650	18,555,267,454	10,616,492,075	5,873,458,675	79,063,988,854
	TOTAL PENYISIHAN	**1,383,404,188,103**	**1,172,778,565,783**	**1,771,131,865,981**	**2,322,383,560,852**	**6,615,787,893,791**
	%	0.50%	10.00%	50.00%	100.00%	
	PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	**6,917,020,941**	**117,277,856,578**	**885,565,932,990**	**2,322,383,560,852**	**3,332,144,371,361**

Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih

Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp3.283.643.522.430,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp6.615.787.893.791,00 dikurangi dengan penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp3.332.144.371.361,00.

Piutang pajak sebesar Rp6.615.787.893.791,00 adalah hasil gabungan antara Dinas, Suku Dinas dan UPPD di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dikurangi dengan penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar Rp3.332.144.371.361,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Klasifikasi umur piutang (*aging*) pajak berdasarkan jenis pajak per 31 Desember 2016 tersebut adalah sebagai berikut:

RINCIAN MUTASI PIUTANG PER 31 DESEMBER 2016			
a.	Piutang Awal Per 31 Desember 2015	Rp.	6,310,691,128,624.00
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(716,272,240,409.00)
	Pengurangan/Keberatan	Rp.	(87,037,667,820.00)
	Kompensasi	Rp.	(758,579,859.00)
	Koreksi	Rp.	(274,238,934,848.00)
	Sisa Piutang Awal	**Rp.**	**5,232,383,705,688.00**
b.	Piutang Pajak Tahun Berjalan	Rp.	9,816,443,129,534.00
	Penerimaan Pembayaran	Rp.	(7,987,881,862,077.00)
	Pengurangan/Keberatan	Rp.	(442,461,700,363.00)
	Kompensasi	Rp.	(2,695,378,991.00)
	Sisa Piutang Tahun Berjalan	**Rp.**	**1,383,404,188,103.00**
	Piutang Per 31 Desember 2016 (a+b)	**Rp.**	**6,615,787,893,791.00**
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	**Rp.**	**3,332,144,371,361.00**
	Piutang Yang Masih Dapat Direalisasikan Per 31 Desember 2016	**Rp.**	**3,283,643,522,430.00**

5.5.1.1.5.2 Piutang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan obyeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp59.231.344.954,00 dan Rp31.195.082.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	1.018.105.981	1.249.583.586
2	Piutang Retibusi Jasa Usaha	32.753.071.092	7.793.183.800
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	25.460.167.881	22.152.315.474
	Jumlah	**59.231.344.954**	**31.195.082.860**

1) Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.018.105.981,00 di antaranya piutang di SKPD Dinas Penataan Kota sebesar Rp970.743.336,00 dengan jumlah terbesar yaitu piutang atas Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota dan Pengukuran Situasi Tanah.

2) Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp32.753.071.092,00 antara lain terdapat di SKPD Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp26.201.744.842,00 yaitu piutang atas Pemakaian Lantai Dasar Rusun Sewa Beli, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.909.385.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata TMII dengan rincian piutang pemakaian penginapan periode 2007-2008 sebesar Rp4.041.985.000,00 dan piutang pemakaian penginapan periode 2012 sebesar Rp867.400.000,00, Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil dan Mikro serta Perdagangan sebesar Rp809.990.000,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Pemakaian Tempat Usaha Dilokasi Sementara Usaha Mikro, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp402.425.450,00 dengan bagian terbesar berasal dari Retribusi Penyediaan Sarana Penempatan Jaringan Utilitas dan terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp385.665.000,00 yaitu piutang atas Retribusi Jasa pemakaian fasilitas ketenagakerjaan milik Pemerintah Daerah.

3) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp25.460.167.881,00 terdapat di SKPD Dinas Penataan Kota dengan retribusi sebesar Rp18.894.799.191,00 yaitu Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan dan Retribusi Pengawasan Pembangunan dan terdapat di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp6.565.368.690,00 yaitu piutang atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Retribusi pengawasan Pembangunan, Retribusi Perpanjangan Izin

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing, dan Retribusi Izin Undang-undang Gangguan.

Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih

Nilai Piutang Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) masing-masing sebesar Rp29.936.416.918,00 dan Rp8.677.068.395,00, jumlah tersebut setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tak tertagih.

Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp29.294.928.036,00 dan Rp22.518.014.465,00. Nilai Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih dihitung dengan terlebih dahulu mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet, kemudian disisihkan sesuai dengan kualitasnya.

Tabel 5.27
Penyisihan Piutang Retribusi Tak Tertagih
Per 31 Desember 2016

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	890.347.719,00	792.491.386,00
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	7.605.944.850,00	4.490.104.994,00
3	Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	20.798.635.467,00	17.235.418.085,00
	Jumlah	**29.294.928.036,00**	**22.518.014.465,00**

5.5.1.1.5.3 Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp370.867.306.668,00 dan Rp356.383.764.220,00. Rincian saldo Piutang BLUD per

31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.28
Saldo Piutang BLUD
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	1.733.616.250	1.062.215.500
2	Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	2.625.000	4.980.000
3	Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
4	Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
5	Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	28.057.402.997	28.104.300.997
6	Piutang BLUD RSUD dan RSKD	339.908.012.956	302.837.407.777
7	Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Daruratdan Laboratorium Kesehatan Daerah	328.590.000	664.800.000
8	Piutang Jaminan Kesehatan Daerah	0	0
8	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	0	11.361.478.169
9	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	0	1.230.225.416
10	Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	0	10.281.296.896
11	Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	21.819.501	21.819.501
	Jumlah	**370.867.306.668**	**356.383.764.220**

1) Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Saldo Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.733.616.250,00 dan Rp1.062.215.500,00, di ntaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

2) **Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta**

Saldo Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta dengan nilai per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp2.625.000,00 dan Rp4.980.000,00, diantaranya adalah piutang biaya pendidikan keperawatan.

3) **Piutang BLUD Pengelola Perparkiran**

Saldo Piutang BLUD Pengelola Perparkiran per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp721.254.452,00 dan Rp721.254.452,00 diantaranya adalah piutang operator penyedia jasa parkir.

4) **Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda**

Saldo Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp93.985.512,00 dan Rp93.985.512,00. Saldo tersebut merupakan saldo piutang sewa *tenant* di BLUD UPT Stadion Lebak Bulus. Pada tahun 2015 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus dilikuidasi, selama proses pemeriksaan oleh Inspektorat pencatatan piutang disajikan sebagai piutang di Dinas Olah Raga dan Pemuda.

5) **Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung**

Saldo Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp28.057.402.997,00 dan Rp28.104.300.997,00. Piutang tersebut merupakan saldo piutang UPK PPUMKMP Pulogadung. Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar sebagai berikut:

Tabel 5.29

Rincian Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Piutang Sewa SKH	2.634.684.000	2.681.582.000
2	Piutang Sewa Barak Kerja	-	-
3	Piutang Sewa Ruang Pamer	-	-
4	Piutang PHU dari KSO (Tanah 1,5 Ha)	-	-
5	Piutang PHU dari KSO (Tanah 0,394 Ha)	-	-
6	Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO Jatinegara Baru	23.726.018.000	23.726.018.000
7	Piutang Kavling Siap Bangun	11.596.540	11.596.540
8	Piutang Sarana Kerja dan Hunian	1.440.000	1.440.000
9	Piutang PBB Pengusaha	25.712.109	25.712.109
10	Piutang Pra Operasional Business Center	1.274.052.348	1.274.052.348
11	Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah	80.000.000	80.000.000
12	Piutang Karyawan	303.900.000	303.900.000
	Jumlah	**28.057.402.997**	**28. 104.300.997**

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

6) Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp339.908.012.956,00 dan Rp302.837.407.777,00, diantaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

Rincian saldo Piutang BLUD RSUD dan RSKD per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30

Piutang BLUD RSUD dan RSKD

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	BLUD RS Koja	65.024.874.705	61.694.670.689
2	BLUD RS Tarakan	61.476.123.852	92.925.883.371
3	BLUD RS Cengkareng	53.058.107.651	56.522.214.613
4	BLUD RS Pasar Rebo	61.175.831.143	50.204.168.245
5	BLUD RS Budhi Asih	41.624.941.505	32.860.899.017
6	BLUD RS Duren Sawit	10.555.594.707	4.243.949.730
7	RSUD Kep. Seribu	32.700.000	0
8	RSUD Pasar Minggu	29.166.418.013	0
9	BLUD RSUK 5 wilayah kota administrasi	17.793.421.380	4.385.622.112
	Jumlah	**339.908.012.956**	**302.837.407.777**

Piutang BLUD RSUD dan RSKD sebagian besar merupakan piutang kepada BPJS. Piutang tagihan kepada BPJS di RSUD dan RSKD adalah nilai tagihan pelayanan kesehatan berdasarkan tarif INA CBG's yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014. Piutang pelayanan kesehatan RSUD dan RSKD kepada BPJS per 31 Desember 2016 terdiri dari jumlah klaim yang diajukan oleh RSUD/RSKD ke BPJS dikurangi klaim yang telah dinyatakan tidak layak bayar oleh BPJS dan klaim tersebut belum dibayarkan oleh BPJS per 31 Desember 2016, ditambah dengan klaim yang diajukan oleh RSUD/RSKD namun belum diverifikasi atau masih dalam proses verifikasi oleh BPJS. Jumlah piutang kepada BPJS di RSUD dan RSKD per 31 Desember 2016 dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Piutang Kepada BPJS Per 31 Desember 2016 (Rp)
1	BLUD RS Koja	66.106.635.142
2	BLUD RS Tarakan	61.368.742.788
3	BLUD RS Cengkareng	48.022.673.839

No	Uraian	Piutang Kepada BPJS Per 31 Desember 2016 (Rp)
4	BLUD RS Pasar Rebo	53.437.441.698
5	BLUD RS Budhi Asih	41.624.941.505
6	BLUD RS Duren Sawit	6.040.260.087
	Jumlah	**276.600.695.059**

7) Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

Saldo Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp328.590.000,00 dan Rp664.800.000,00, di antaranya adalah piutang pelayanan kesehatan kepada BPJS.

8) Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun

Saldo Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp22.873.000.481,00. Pada Tahun 2016 saldo Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun sebesar Rp26.201.744.842,00 dialihkan pengelolaan dan pencatatannya ke piutang Retribusi Jasa Usaha di Dinas Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda. Piutang ini merupakan piutang sewa rumah susun yang awalnya tercatat di Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I sebesar Rp11.715.670.811,00, Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II sebesar Rp1.736.083.142,00, dan Unit Pengelola Rumah Susun III sebesar Rp12.749.990.889,00.

9) Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway

Saldo Piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway per 31 Desember 2014 sebesar Rp21.819.501,00 adalah piutang atas kehilangan sebagian hasil penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007. Pada Tahun 2015 BLUD

Pengelola Transjakarta Busway beralih menjadi Perseroan Terbatas maka piutangnya dialihkan pengelolaannya ke Dinas Perhubungan dan Transportasi dan tidak ada mutasi tambah maupun kurang di Tahun 2016 untuk piutang BLUD Pengelola Transjakarta Busway.

Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih

Nilai Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dan 2015 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value)* masing-masing sebesar Rp327.013.300.840,00 dan Rp316.381.409.651,00. Nilai tersebut merupakan nilai piutang setelah dikurangi penyisihan piutang.

Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp43.854.005.828,00 dan Rp40.002.354.569,00. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Rincian Penyisihan Piutang BLUD Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Penyisihan Piutang BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	8.623.157	7.759.203
2	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Akademi Keperawatan Jayakarta	13.125	112.175
3	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Perparkiran	721.254.452	721.254.452
4	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Stadion Olahraga dan Pemuda (Dinas Olah Raga dan Pemuda)	93.985.512	93.985.512
5	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	26.546.746.972	26.797.727.992

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
6	Penyisihan Piutang BLUD RSUD dan RSKD	16.447.952.912	10.752.836.240
7	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah	35.320.600	127.500.000
8	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah I	0	1.084.995.293
9	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah II	0	35.175.269
10	Penyisihan Piutang BLUD Pengelola Rumah Susun Wilayah III	0	380.899.335
11	Penyisihan Piutang BLUD Jaminan Kesehatan Daerah	0	0
10	Penyisihan Piutang ex. BLUD Pengelola Transjakarta Busway (Dinas Perhubungan)	109.098	109.098
	Jumlah	**43.854.005.828**	**40.002.354.569**

5.5.1.1.5.4 Piutang Dana Transfer

Piutang Dana Transfer Tahun Anggaran 2016 berasal dari saldo Dana Bagi Hasil Pajak TA 2014,2015 dan 2016 untuk Provinsi DKI Jakarta yang belum diterima dari Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Direktorat Dana Perimbangan.

Jumlah alokasi bagi hasil Triwulan IV TA 2016 diatur dalam:

1. Peraturan Presiden RI No 66 Tahun 2016 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
2. PMK Nomor 259/PMK.07/2015 Tentang Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Nomor per-4/PK/2016 Tentang Tata Cara Pemotongan Atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2016;
4. PMK Nomor 162/PMK.07/2016 Tentang Rincian Kurang Bayar dan Lebih bayar Dana Bagi Hasil Menurut

Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Dialokasikan Dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

5. PMK Nomor 208/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.
6. Surat Direktur Dana Perimbangan Nomor S.12/PK.2/2016 tentang Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Provinsi DKI Jakarta Tanggal 14 Januari 2016.

Selanjutnya, pagu Triwulan IV 2016 yang ditunda penyalurannya tersebut, akan diperhitungkan sebagai kurang bayar dana bagi hasil pajak yang akan diusulkan untuk dapat dianggarkan dalam APBN/APBN Perubahan Tahun 2017 dan disalurkan ke daerah.

Piutang Dana Perimbangan per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing – masing sebesar Rp6.496.853.041.149,00, dan Rp5.459.274.194.651,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	PBB Migas	61.229.509.543	36.170.485.500
2	Biaya Pemungutan PBB	2.040.983.477	1.205.683.000
3	PBB Pemerintah Pusat dikembalikan	536.955.847	-
4	PPh Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Pasal 25 dan Pasal 29	876.279.643.424	374.463.240.550
5	PPh Pasal 21	5.527.992.314.391	4.973.556.479.550
6	SDA Hutan	5.748.409	30.528.000
7	Dana Reboisasi	7.819.551	-
8	Pungutan Hasil Perikanan	44.188.011	-
9	Pertambangan Minyak Bumi	4.066.196.200	-
10	SDA Pertambangan Gas Bumi	24.649.682.296	73.847.778.051
Jumlah		**6.496.853.041.149**	**5.459.274.194.651**

5.5.1.1.5.5 Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp17.099.762.096,00 dan Rp17.103.762.096,00.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis Pertimbangan TP/TGR. Jumlah tersebut tidak termasuk tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses penghapusan dan informasi kerugian daerah, yang belum diakui sebagai piutang.

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penuntutan tercatat sebesar Rp11.563.606.646,00, untuk kasus pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00 dan informasi kerugian daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 561 kasus sebesar Rp147.190.288.587,00 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp122.905.374.226,00, sehingga sisa potensi kerugian menjadi sebesar Rp24.284.914.361,00.

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 657 kasus sebesar Rp19.970.111.022,00 dan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp17.123.050.478,00, sehingga sisa kerugian menjadi sebesar Rp2.847.060.544,00.

Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih

Nilai Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp11.903.435.359,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.099.762.096,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih sebesar Rp5.196.326.737,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Penggolongan Kualitas Piutang				Jumlah Piutang (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Badan Peradilan	-	-	-	900.648.727	900.648.727
2	Kasus Kehilangan Mobil	-	72.410.425	115.100.000	493.534.514	681.044.939
3	Kasus Kehilangan Motor	-	-	10.600.000	12.755.625	23.355.625
4	Kasus Ketekoran Kas	10.777.084.641	-	1.702.051.701	1.304.399.600	13.783.535.942
5	Kasus Lain Lain	-	-	9.200.000	-	9.200.000
6	Kasus Biro Perlengkapan (P3D)	-		-	88.695.279	88.695.279
7	Kasus walikotamadya Jakarta Selatan	-	-	393.181.816		393.181.816
8	Wisma Jaya raya	-	-	-	1.220.099.767	1.220.099.767
	Jumlah Piutang TGR (I)	**10.777.084.641**	**72.410.425**	**2.230.133.517**	**4.020.133.513**	**17.099.762.096**
	Persentase Penyisihan (II)	**0,50%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Jumlah Penyisihan Piutang TGR Tak Tertagih (I x II)	**53.885.423**	**7.241.043**	**1.115.066.759**	**4.020.133.513**	**5.196.326.737**
	Sisa Piutang	**10.723.199.218**	**65.169.383**	**1.115.066.759**	**-**	**11.903.435.359**

5.5.1.1.5.6 Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sama, yaitu sebesar Rp971.534.331,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan.

Penyisihan Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

Nilai Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp966.676.659,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp971.534.331,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Tak Tertagih sebesar Rp4.857.672,00. Adapun Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan seluruhnya tergolong dalam kualitas piutang lancar, sehingga menggunakan persentase penyisihan sebesar 5%.

5.5.1.1.5.7 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp17.111.434.243,00 dan Rp20.501.789.384,00 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Piutang Sewa Aset Daerah	11.565.733.135,00	14.536.718.693,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	2.674.522.813,00	3.093.892.396,00
3	Piutang Titik Reklame	2.871.178.295,00	2.871.178.295,00
	Jumlah	**17.111.434.243,00**	**20.501.789.384,00**

Piutang sewa aset daerah merupakan hak tagih pemerintah atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa.

Piutang kerjasama pemanfaatan aset merupakan hak tagih pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Build, Operate, Transfer (BOT) atau Build, Transfer, Operate (BTO). Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima kas atas hasil kerjasama aset dalam bentuk BOT/BTO sebesar Rp3.568.611.093,00 sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.1.1.4.15, yang sudah diperhitungkan dalam penyajian piutang.

Piutang Titik Reklame merupakan hak tagih pemerintah atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik Pemerintah Daerah.

Mutasi Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset tersaji pada lampiran 5.

Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih

Sejak tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp9.315.697.061,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp17.111.434.243,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih sebesar Rp7.795.737.182,00. Nilai Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Sewa Aset Daerah	1.882.045.000,00	2.218.546.859,00	0	7.465.141.276,00	11.565.733.135,00
2	Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)	1.920.812.396,00	753.710.417,00	0	0	2.674.522.813,00
3	Piutang Titik Reklame	2.871.178.295,00	0	0	0	2.871.178.295,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	**6.674.035.691,00**	**2.972.257.276,00**	**0**	**7.465.141.276,00**	**17.111.434.243,00**
	Persentase Penyisihan (II)	**0,50%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	33.370.178,00	297.225.728,00	0	7.465.141.276,00	7.795.737.182,00
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	**6.640.665.513,00**	**2.675.031.548,00**	**0**	**0**	**9.315.697.061,00**

5.5.1.1.5.8 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp104.433.452.127,00 dan Rp100.749.956.231,00. Saldo tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Rincian saldo Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – Sewa	17.903.740.121,00	13.888.569.863,00
2	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – BOT/BTO	86.529.712.006,00	86.861.386.368,00
	JUMLAH	**104.433.452.127,00**	**100.749.956.231,00**

Mutasi Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset tersaji dalam lampiran 5.

Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Tak Tertagih

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan penyisihan piutang tak tertagih atas Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset sebagaimana diatur dalam Lampiran 1.16 Peraturan Gubernur Nomor 204 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp84.081.932.609,00, yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp104.433.452.127,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Tak Tertagih sebesar Rp20.351.519.518,00. Nilai Penyisihan Piutang Denda Kerjasama/Pemanfaatan Sewa Aset Tak Tertagih dihitung dengan mengklasifikasikan piutang ke dalam empat kelompok

kualitas piutang, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kualitas Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar (Rp)	Kurang Lancar (Rp)	Diragukan (Rp)	Macet (Rp)	
1	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Daerah - Sewa	28.246.793,00	6.863.429.161,00	-	11.012.064.167,00	17.903.740.121,00
2	Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset - BOT/BTO	0	86.529.712.006,00	0	0	86.529.712.006,00
	Jumlah Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset (I)	**28.246.793,00**	**93.393.141.167,00**	**0**	**11.012.064.167,00**	**104.433.452.127,00**
	Persentase Penyisihan (II)	**0,50%**	**10%**	**50%**	**100%**	
	Jumlah Penyisihan Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset Tak Tertagih (I x II)	141.234,00	9.339.314.117,00	0	11.012.064.167,00	20.351.519.518,00
	Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (NRV)	**28.105.559,00**	**84.053.827.050,00**	**0**	**0**	**84.081.932.609,00**

5.5.1.1.5.9 Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp43.440.001.183,00 dan Rp44.114.013.599,00. Selama tahun 2016 terdapat penerimaan dari PT Bank DKI atas hasil tagih Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN sebesar Rp674.012.416,00, sehingga nilai Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp43.440.001.183,00.

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai sebesar Rp205.509.066.572,00 sesuai dengan akta hibah sisa aset Nomor 68 tanggal 16 Pebruari 2004 dan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal 18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan kredit ex BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta. Sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp163.185.297.701,00 telah dipergunakan untuk menambah modal PT Bank DKI Jakarta dari total hasil tagihan eks BPPN sampai dengan Tahun 2016 sebesar Rp163.859.310.117,00.

5.5.1.1.5.10 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp3.844.678.244,00 dan Rp3.674.517.300,00.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah di 4 (empat) rekening bank pada Tahun Anggaran 2016 dan 2015 dapat dilihat pada tabel 5.31 dan 5.32 berikut.

Tabel 5.31
Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00625-0	14-Dec-15	2.201.350.358
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	24-Dec-15	70.013.204
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	13-Dec-15	1.137.843.071
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00680-2	16-Dec-15	435.471.611
Jumlah						**3.844.678.244**

Tabel 5.32
Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan
Per 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2016	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Bunga Akrual Des (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00625-0	14-Dec-15	2.042.348.649
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	25-Dec-15	55.676.748
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-15	1.172.474.112
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00680-2	16-Dec-15	404.017.791
Jumlah						**3.674.517.300**

Atas saldo Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito

per 31 Desember 2016, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2016 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

5.5.1.1.5.11 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.572.168.307.848,00 dan Rp731.164.994.198,00 yang terdiri dari:

No.	JENIS PIUTANG LAINNYA	31-Des-16 (Rp)	31-Des-15 (Rp)
1.	Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan	0	485.014.572
2.	Piutang Bunga Deposito	16.800.410.959	11.850.068.493
3.	Piutang Sanksi Pajak	127.794.691.906	127.794.691.906
4.	Piutang Denda Retribusi	4.647.072.546	4.601.240.773
5.	Piutang Tunjangan	4.419.140.000	4.419.140.000
6.	Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga	467.779.919	1.675.259.235
7.	Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi	971.106.907	1.013.415.790
8.	Piutang Sanksi SP3L	44.603.324.164	0
9.	Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB	2.361.550.057.047	579.326.163.429
10.	Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	10.020.000.000	0
11.	Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga	864.550.000	0
12.	Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame	30.174.400	0
Jumlah		**2.572.168.307.848**	**731.164.994.198,00**

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah sebagai berikut:

a. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan

Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2015 sebesar Rp485.014.572,00 merupakan piutang dividen BP THR atas bagi hasil laba tahun buku 2014 milik

BP THR Lokasari, yang pada tanggal 21 Januari 2016 sudah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp485.013.706,00 dan dilakukan koreksi atas pencatatan piutang sebesar Rp.866,00. Sehingga Tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki piutang dividen. Rincian realisasi bagian laba BUMD dan PT Patungan selama tahun 2016 dapat dilihat pada CaLK nomor 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

b. Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp16.800.410.959,00 dan Rp11.850.068.493,00. Rincian Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.800.410.959,00 dapat dilihat pada tabel 5.33 berikut.

Tabel 5.33
Perhitungan Piutang Bunga Deposito
Per 31 Desember 2016

No	Nama Bank	No Rekening	Jatuh Tempo	Jangka Waktu Akrual		Suku Bunga	Nilai Deposito (Rp)	Piutang Bunga (Rp)
1	Bank DKI	150692	4-Dec-16	27	hari	7,50%	150.000.000.000,00	801.369.863,00
2	Bank DKI	101495	25-Dec-16	6	hari	7,50%	150.000.000.000,00	123.287.671,00
3	Bank DKI	101507	4-Dec-16	27	hari	7,50%	150.000.000.000,00	801.369.863,00
4	Bank DKI	101672	11-Dec-16	20	hari	7,50%	200.000.000.000,00	739.726.027,00
5	Bank DKI	101676	18-Dec-16	13	hari	7,50%	200.000.000.000,00	493.150.685,00
6	Bank DKI	70228-560-877	10-Dec-16	21	hari	7,50%	500.000.000.000,00	1.849.315.068,00
7	Bank DKI	10125118760	16-Nov-16	15	hari	7,50%	200.000.000.000,00	616.438.356,00
8	Bank DKI	10125118778	16-Nov-16	15	hari	7,50%	200.000.000.000,00	616.438.356,00
9	Bank BRI	0019-01-011441-406	07-Des-16	24	hari	7,25%	220.000.000.000,00	976.438.356,00
10	Bank BRI	0019-01-014806-401	04-Des-16	27	hari	7,25%	300.000.000.000,00	1.497.945.205,00
11	Bank BRI	0019-01-014805-405	04-Des-16	27	hari	7,25%	200.000.000.000,00	998.630.137,00
12	Bank BRI	0019-01-015023-404	10-Des-16	21	hari	7,25%	500.000.000.000,00	1.941.780.822,00
13	Bank BRI	0019-01-015203-402	02-Des-16	29	hari	7,25%	400.000.000.000,00	2.145.205.479,00
14	Bank Mandiri	103-02-0499348-5	04-Des-16	27	hari	7,25%	100.000.000.000,00	499.315.068,00
15	Bank Mandiri	103-02-0503758-9	11-Des-16	20	hari	7,25%	135.000.000.000,00	499.315.068,00
16	Bank Mandiri	103-02-0513092-1	01-Des-16	30	hari	7,25%	100.000.000.000,00	554.794.521,00
17	Bank Mandiri	103-02-0517986-6	02-Des-16	29	hari	7,25%	100.000.000.000,00	536.301.370,00
18	Bank Mandiri	103-02-0520106-0	01-Des-16	30	hari	7,25%	200.000.000.000,00	1.109.589.041,00
		JUMLAH					**4.505.000.000.000,00**	**16.800.410.959,00**

Atas saldo Piutang Bunga Deposito tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih karena nilai piutang tersebut merupakan perhitungan akrual atas bunga deposito per 31 Desember 2016, dimana seluruhnya telah diterima di Januari 2017 sesuai dengan tanggal jatuh tempo bunga deposito, sehingga tidak perlu dilakukan penyisihan piutang tak tertagih.

c. Piutang Sanksi Pajak

Piutang Sanksi Pajak per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sama yaitu sebesar Rp127.794.691.906,00. Dinas Pelayanan Pajak sedang melakukan inventarisasi kembali piutang sanksi pajak, sehingga belum ada perubahan atas saldo piutang sanksi pajak per 31 Desember 2015. Dinas Pelayanan Pajak belum mengelompokkan klasifikasi umur piutang (aging) sanksi pajak dan melakukan pencadangan

piutang sanksi pajak tak tertagih. Piutang sanksi pajak per 31 Desember 2016 berdasarkan jenis pajak dan unit

pemungutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	UNIT PEMUNGUT	JENIS PIUTANG SANKSI PAJAK												
		PBB-P2	REKLAME	RESTORAN	PAT	HIBURAN	HOTEL	PKB	BPHTB	PARKIR	PBB-KB	BBN-KB	PPJ	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	109	11	12	13	14	15 (3 + ...+ 14)
1	Dinas Pelayanan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300.118.331	-	18.191.136.978	19.491.255.309
2	Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT)	-	-	-	-	-	-	14.381.377.425	-	-	-	34.001.250	-	14.415.378.675
3	Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat I	194.553.502	48.928.412	323.412.836	-	32.591.119	30.179.967	-	-	1.578.374	-	-	-	631.244.210
4	Suku Dinas Pelayanan Pajak Barat II	24.832.370.915	1.387.903.489	210.828.756	475.127.326	122.840.990	57.251.763	-	-	18.128.519	-	-	-	27.104.451.758
5	Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat I	3.210.674.671	22.564.613	4.848.113.030	159.747.000	161.016.797	1.276.061.519	-	2.678.262.524	19.994.870	-	-	-	12.376.435.024
6	Suku Dinas Pelayanan Pajak Pusat II	-	-	671.095.660	-	652.338.626	1.010.093.141	-	-	579.491.409	-	-	-	2.913.018.835
7	Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan I	-	67.635.780	221.347.864	-	22.726.408	40.247.755	-	519.610.597	-	-	-	-	871.568.404
8	Suku Dinas Pelayanan Pajak Selatan II	-	59.130	211.777.253	2.335.353	1.324.459.087	16.287.553	-	-	34.547.034	-	-	-	1.589.465.410
9	Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur I	43.799.092.245	494.577.164	1.236.654	1.270.422.416	211.433.507	2.092.811	-	-	-	-	-	-	45.778.854.797
10	Suku Dinas Pelayanan Pajak Timur II	-	92.254.345	742.247.166	65.189.391	12.538.861	349.161.060	-	364.618.076	13.328.362	-	-	-	1.639.337.261
11	Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara I	-	31.251.636	483.516.282	-	51.931.694	5.937.271	-	-	4.244.052	-	-	-	576.880.935
12	Suku Dinas Pelayanan Pajak Utara II	-	91.543.966	172.940.167	67.732.914	31.050.590	5.937.271	-	34.382.361	3.214.020	-	-	-	406.801.289
JUMLAH		72.036.691.332	2.236.718.535	7.886.515.667	2.040.554.400	2.622.927.680	2.793.250.111	14.381.377.425	3.596.873.558	674.526.640	1.300.118.331	34.001.250	18.191.136.978	127.794.691.906

d. Piutang Denda Retribusi

Piutang Denda Retribusi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp4.647.072.546,00 dan Rp4.601.240.773,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha	-	-
2	Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu	4.647.072.546	4.601.240.773
	Jumlah	**4.647.072.546**	**4.601.240.773**

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp4.647.072.546,00 terdapat di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp3.825.044.081,00, di Dinas Penataan Kota sebesar Rp635.912.086, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp9.086.000,00, dan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp177.030.379,00.

e. Piutang Tunjangan

Piutang Tunjangan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang Tunjangan berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 tidak ada penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Penyisihan Piutang Tunjangan Tak Tertagih

Nilai Piutang Tunjangan per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (Net Realizable Value) adalah sebesar Rp0,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp4.419.140.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp4.419.140.000,00.

f. Piutang Tagihan Listrik dan Air

Piutang Tagihan Listrik dan Air per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

g. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp467.779.919,00 dan Rp1.675.259.235,00.

Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 sebesar Rp467.779.919,00 terdiri dari kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara yang dilakukan oleh BUD sebesar Rp1.720.054,00 dan BLUD Puskesmas Grogol Petamburan sebesar Rp 242.649.213,00, serta kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga di Dinas Olahraga dan Pemuda sebesar Rp223.410.652,00. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga tersebut belum

termasuk kelebihan pembayaran belanja barang persediaan di Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp3.165.956.514,00 yang masih dalam proses penetapan. Dari jumlah kelebihan pembayaran tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebesar Rp832.424.561,00

Sedangkan Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 sebesar Rp1.675.259.235,00 merupakan kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara atas transaksi belanja yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Selatan, Dinas Pariwisata, dan Kantor Kepegawaian Jakarta Timur. Seluruhnya telah dikompensasi oleh KPPN dan tercatat sebagai Pendapatan Lain-lain dalam Laporan Realisasi Anggaran.

h. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi

Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp971.106.907,00 dan Rp1.013.415.790,00. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi merupakan piutang atas pendapatan Bagi Hasil Premi Asuransi antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan PT Bumiputeramuda 1967 yang tertuang dalam perjanjian Nomor 070/PKS/BPM/VII/2012.

i. Piutang Sanksi SP3L

Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp44.603.324.164,00.

Piutang Sanksi SP3L adalah piutang atas sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Lahan (SP3L) untuk membangun rumah susun sederhana yang dikonversi dalam bentuk uang sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1934 Tahun 2002 tentang ketentuan perhitungan nilai kewajiban penyediaan bangunan rumah susun sederhana/murah yang dikonversi dengan dana oleh para pengembang pemegang Surat Izin Penunjukkan

Penggunaan Tanah (SIPPT). Adapun pencatatan Piutang sanksi SP3L diakui pada saat nilai piutang dapat diukur dan diestimasi secara andal, yaitu berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Konversi kewajiban SP3L.

Saldo piutang per 31 Desember 2016 sebesar Rp44.603.324.164,00 merupakan akumulasi dari saldo piutang per 31 Desember 2015 sebesar Rp96.340.158.460,00 dimana sebelumnya tidak tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2015 sehingga diperlakukan sebagai koreksi ekuitas di tahun 2016, ditambah dengan penetapan Tahun 2016 sebesar Rp406.071.502.326,00 dan dikurangi dengan penerimaan pembayaran selama Tahun 2016 sebesar Rp450.817.371.422,00 dan kompensasi atas pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2015 sebesar Rp6.990.965.200,00 dimana sebelumnya juga tidak tercatat dalam Neraca per 31 Desember 2015 sehingga diperlakukan sebagai koreksi ekuitas di tahun 2016.

Adapun nilai Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2016 sebesar Rp44.603.324.164,00 tercatat pada Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Persetujuan Prinsip		31 Desember 2016 (Rp)
		Tanggal	Nomor	
1	PT Citra Mas Pentama	18 Desember 2015	4247/-1.711.534	32.777.831.064,00
2	Henny Susanto	02 Agustus 2016	2582/-1.796.3	2.172.543.100,00
3	PT Pardika Wisthi Sarana	06 Desember 2016	4802/-1.711.534	9.652.950.000,00
Jumlah				**44.603.324.164,00**

Pada tahun 2017, atas nama pengembang PT Pardhika Wisti Sarana dengan nilai kewajiban sebesar Rp9.652.950.000,00 telah diterbitkan Pembatalan Ijin Prinsip sesuai dengan SK Gubernur Nomor 109/-1.796.3 tanggal 08 Februari 2017. Adapun pembatalan tersebut

dikarenakan PT Pardhika Wisti Sarana tidak melakukan pelunasan sampai batas waktu yang ditetapkan, sehingga perhitungan nilai konversi kewajiban sebesar Rp9.652.950.000,00 menjadi tidak berlaku karena ditetapkan menggunakan NJOP tahun 2016.

Penyisihan Piutang SP3L Tak Tertagih

Nilai Piutang Sanksi SP3L per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp44.380.307.543,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp44.603.324.164,00

dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp223.016.621,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Pengembang	Nilai Piutang 2016	Penyisihan Piutang					Piutang Netto
			Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Jumlah	
1	PT Citra Mas Pentama	32.777.831.064	163.889.155	0	0	0	163.889.155	32.613.941.909
2	Henny Susanto	2.172.543.100	10.862.716	0	0	0	10.862.716	2.161.680.385
3	PT Pardika Wisthi Sarana	9.652.950.000	48.264.750	0	0	0	48.264.750	9.604.685.250
Jumlah		**44.603.324.164**	**223.016.621**	**0**	**0**	**0**	**223.016.621**	**44.380.307.543**

Potensi penerimaan atas sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), yaitu :

a. Sanksi SP3L adalah sanksi yang dikenakan kepada pihak ketiga yang membebaskan lahan lebih dari 5.000m^2 atau kurang dari 5.000m^2 namun berada di jalan protokol sebelum SP3L terbit, maka dikenakan sanksi SP3L, ketentuan ini diatur dalam SK Gubernur Nomor 640 Tahun 1992, kecuali yang terdapat dalam SK Gubernur Nomor 134 Tahun 2011 tentang Pengecualian Pengenaan Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan.

b. Bentuk kewajiban dari sanksi SP3L adalah :

1) Membiayai dan membangun sampai siap huni Rumah Susun Murah (RSM) beserta. Fasilitasnya seluas 20% dari areal manfaat secara komersial yang lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lingkungan yang lokasi, jenis, dan kriteria/rinciannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3) Membiayai dan membangun sampai siap pakai bangunan sarana dan atau prasarana lainnya berdasarkan skala prioritas kebutuhan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI jakarta.

c. Kewajiban membangun RSM tersebut dapat dikonversi dalam bentuk satuan nilai uang sebagaimana diatur dalam SK Gub Nomor 1934 tahun 2002.

d. Perhitungan nilai konversi dilakukan oleh Tim Perhitungan Nilai Konversi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1185 Tahun 2011. Tim telah melakukan proses konversi kewajiban dan sampai dengan posisi 31 Desember 2016, telah terbit Ijin Konversi sebanyak 138 Surat Persetujuan, dengan 3 pembatalan izin prinsip, dan yang telah menyelesaikan pembayaran sebanyak 132 Surat Persetujuan.

e. Pada Tahun 2016 telah diterima ke Kas Daerah atas 30 Pemegang SIPPT senilai Rp870.307.990.256,00.

j. Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefesien Lantai Bangunan)

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.361.550.057.047,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Kewajiban
1	Mitra Panca Persada, PT	579.326.163.429	Pembangunan Fly Over Kawasan Semanggi
2	Mulia Karya Gemilang, PT	213.044.850.222	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot
			RPTRA seluas ± 2.158 M2 di Rusun Daan Mogot
3	Sampoerna Land, PT	723.112.978.629	Rumah Susun 3 Tower di Daan Mogot
			Rehab Gedung Kantor Sekretariat KPU
			Penataan dan pengembangan Kota Tua
4	Singa Propertindo Haryono, PT	20.489.644.000	Interior Jakarta Creative Hub Gedung Jakarta UKM (Smes'co)
			Tata pamer dan pembangunan pintu masuk baru di sisi Jalan Pintu Besar Utara
5	Putragaya Wahana, PT	264.376.872.000	Rumah Susun 3 Tower di Pulo Gebang
			Rehab Eks Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Eks Gedung UPT Dana Bergulir Dinas KUMKMP
6	Kepland Investama, PT	551.410.069.808	Rumah Susun 2 Tower di Daan Mogot
			Peningkatan jalan dan jalur pejalan kaki Sudirman Thamrin (medan Merdeka-Kali Krukut)
			Pembangunan Resto Apung di Kawasan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Muara Angke
7	Mitra Pertala Perkasa, PT	9.789.478.960	Pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kawasan Terminal Terpadu Pulo Gebang
	JUMLAH	**2.361.550.057.048**	

Sedangkan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2015 sebesar Rp579.326.163.429,00, merupakan piutang atas PT. Mitra Panca Persada dalam bentuk penyediaan fasilitas

publik berupa pembangunan *fly over* di kawasan semanggi. Merupakan akun tambahan/baru pada LKPD audited yang dicatat di Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB adalah bentuk disinsentif yang dikenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pemilik lahan yang ingin meningkatkan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) pada daerah yang mendapat Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) Bonus (kode a) yang sejalan dengan tata ruang. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi Terhadap Pelampauan Nilai KLB.

Penyisihan Piutang Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefesien Lantai Bangunan) Tak Tertagih

Nilai Piutang Pendapatan Kompensasi Pelampauan Nilai KLB (Koefisien Lantai Bangunan) per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp2.349.742.306.762,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp2.361.550.057.047,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp11.807.750.285,00.

k. Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Pada Tahun 2013 Dinas Perhubungan melakukan pengadaan bus single Trans Jakarta dengan melakukan pembayaran UMK kepada PT Putera Adi Karyajaya dan PT Adi Tehnik Equipindo sebesar Rp12.188.880.000,00 dan Rp12.763.580.000,00. Atas pengadaan bus tersebut dilakukan pembatalan kontrak, yang mengakibatkan kewajiban pengembalian pembayaran UMK oleh kedua

perusahaan tersebut yang pembayarannya secara angsuran selama lebih dari 3 tahun.

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.

Bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta sebesar Rp10.020.000.000,00 merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V.

l. Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp864.550.000,00 dan Rp0,00. Piutang Denda Penerimaan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp864.550.000,00 terdapat di SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari denda atas Rekomendasi HGB dan HPL.

Penyisihan Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Nilai Piutang Denda Hasil Penerimaan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp864.117.725,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp864.550.000,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp432.275,00.

m. Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame

Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp30.174.400,00 dan Rp0,00. Piutang Denda Izin

Penyelenggaraan Reklame sebesar Rp30.174.400,00 terdapat di SKPD Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berasal dari denda atas Nilai Strategis Reklame di Persil Swasta.

Penyisihan Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame

Nilai Piutang Denda Izin Penyelenggaraan Reklame per 31 Desember 2016 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp30.159.313,00 yaitu berasal dari Nilai Bruto sebesar Rp30.174.400,00 dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp15.087,00.

5.5.1.1.6 Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp233.889.610.831,00 dan Rp158.298.034.978,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Belanja Dibayar di Muka – Asuransi Dibayar di Muka	17.833.452.767,00	21.994.670.871,00
2	Belanja Dibayar di Muka – Sewa Dibayar di Muka	0,00	2.561.430.200,00
3	Belanja Dibayar di Muka – BBM Dibayar di Muka	472.376.749,00	0,00
4	Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di SKPD	215.157.481.660,00	133.414.843.537,00
5	Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di BLUD	426.299.655,00	327.090.370,00
Jumlah		**233.889.610.831,00**	**158.298.034.978,00**

Belanja Dibayar di Muka – Asuransi Dibayar di Muka sebesar Rp17.833.452.767,00 terdiri dari asuransi gedung dan kendaraan yang dikelola oleh BPKD sebesar Rp17.030.197.882,00, asuransi akibat bencana (tumbangnya

pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp516.666.666,00, dan asuransi kendaraan parkir di Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan sebesar Rp286.588.219,00.

Belanja Dibayar di Muka – BBM Dibayar di Muka sebesar Rp472.376.749,00 merupakan saldo deposit BBM yang sampai dengan 31 Desember 2016 masih ada di PT. Pertamina dan belum dikembalikan ke rekening masing-masing SKPD.

Uang Muka Kerja di SKPD sebesar Rp215.157.481.660,00, terdapat pada SKPD, berikut:

1. Dinas Bina Marga sebesar Rp108.270.807.500,00, untuk kegiatan Pembangunan Simpang Tak Sebidang Cipinang Lontar, Pembangunan Simpang Tak Sebidang Bintaro Permai – Rel Kereta Api, Pembangunan *Fly Over* Pancoran, Pembangunan *Underpass* Kartini, Pembangunan *Underpass* Mampang – Kuningan, Pembangunan *Underpass* Matraman – Salemba .
2. Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp106.886.674.160,00 merupakan uang muka kerja pada 8 (delapan) paket kegiatan pengadaan Bus Transjakarta Tahun anggaran 2013, Uang muka tersebut merupakan hasil reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Barang	Paket	Penyedia Barang	Uang Muka
1	Articulated Bus	Paket II	PT Putriasi Utama Sari	7.735.200.000,00
2	Articulated Bus	Paket III	PT Saptaguna Dayaprima	20.879.100.000,00
3	Single Bus	Paket I	PT Industri Kereta Api	13.752.000.000,00
4	Single Bus	Paket IV	PT Ifani Dewi	11.988.900.000,00
5	Bus Sedang	Paket I	PT Saptaguna Dayaprima	11.281.795.800,00
6	Bus Sedang	Paket II	PT Putera Adi Karyajaya	11.251.710.360,00
7	Bus Sedang	Paket IV	PT Ifani Dewi	18.755.000.000,00
8	Bus Sedang	Paket V	PT Adi Tehnik Equipindo	11.242.968.000,00
	Jumlah			**106.886.674.160,00**

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya hukum melalui Permohonan Pendapat Hukum kepada

Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Surat Permohonan No.914/-075.51 tanggal 16 Februari 2015 yang pada dasarnya menanyakan tentang prosedur dan mekanisme pemutusan kontrak terhadap 6 paket pengadaan bermasalah tersebut dimana Pemprov DKI sudah melakukan penyetoran UMK dan telah di jawab oleh Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor B-103/G/Gp.1/04/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal Pendapat Hukum dimana disebutkan bahwa pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama, semua hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak ada seperti sedia kala sebelum adanya perikatan kontrak dan UMK 20% harus di kembalikan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Uang Muka Kerja di BLUD sebesar Rp426.299.655,00 terdapat di BLUD RS Tarakan sebesar Rp70.414.330,00 untuk pembayaran Diklat Dokter, dan di BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp355.885.325,00.

Selain nilai piutang yang telah diuraikan sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI masih memiliki potensi penerimaan aset sebagai pemenuhan kewajiban dari pihak ketiga sebagai berikut:

1) Potensi penerimaan aset atas pemenuhan kewajiban yang bersumber dari penerbitan Surat Izin Penunjukkan dan Penggunaan Tanah (SIPPT). SIPPT diterbitkan sejak Tahun 1971 yang diberikan kepada Badan dan/atau Perusahaan Real Estate dan/atau perusahaan properti dan atau Developer dan/atau yayasan dan/atau Perorangan untuk membangun perumahan, perkantoran, perdagangan dan/atau kegiatan fisik lainnya dan atau permohonan hak atas tanah dalam wilayah DKI Jakarta.

   Terdapat 3 kelompok jenis SIPPT terkait dengan pemenuhan kewajibannya

a. SIPPT yang tidak mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum
b. SIPPT mencantumkan kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum
c. SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk menyediakan aset fasos fasum

Jumlah SIPPT yang terbit dari Tahun 1971 sampai dengan 2016 adalah sebanyak 3052. Dari jumlah tersebut telah diterima aset fasos fasum sebanyak 499 BAST. Sehingga masih tersisa sebanyak 2.553 SIPPT.

Sejak Tahun 2009 sampai dengan 2016 pemberian SIPPT harus dilengkapi dengan Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) antara pemegang SIPPT dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam PPK tersebut diatur bentuk kewajiban yang harus diserahkan, waktu penyerahan dan jumlah luasan kewajiban yang harus diserahkan, tanpa menyebutkan nilai dalam satuan rupiah tertentu.

Sampai dengan tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerima kewajiban dari pemegang SIPPT dan dicatat sebagai penerimaan fasos fasum dalam laporan operasional dan asetnya dicatat sebagai aset fasos fasum dalam kelompok aset lainnya untuk fasos fasum yang belum diserahkan sebagai aset tupoksi di SKPD sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan nomor 5.5.1.5.5

Dengan diterimanya aset fasos fasum tersebut masih terdapat potensi penerimaan aset dari para pemegang SIPPT yang belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan per 31 Desember 2016.

Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan pemenuhan kewajiban aset fasos fasum, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset dalam rangka pengelolaan aset fasos fasum melalui:

a. Kegiatan rekonsiliasi secara periodik atas pemenuhan aset fasos dan fasum, dilakukan dengan membandingkan data jumlah SIPPT yang diterbitkan dengan jumlah kewajiban yang sudah diserahkan.
b. Melakukan penagihan kepada Pengembang/pemilik SIPPT yang belum melakukan kewajibannya
c. Melakukan identifikasi dan updating atas database Kewajiban fasos fasum
d. Pengembangan Sistem Informasi terintegrasi yang dimulai dari penerbitan SIPPT sampai dengan pencatatan penerimaan aset fasos fasum.

Dari jumlah SIPPT yang masih tersisa sebanyak 2.553 tersebut terdapat 1.434 SIPPT yang mewajibkan untuk menyerahkan fasos fasum sebagaimana tercantum dalam temuan SPI BPK RI sebagai berikut:

Wilayah	Jumlah SIPPT	Total Luas Kewajiban	Luas Kwajiban Berdasarkan Peruntukkannya				
			MJL	PHT	PHU	SPD	LAIN-LAIN
Jakarta Pusat	172	492.221	352.730	10.490	20.490	13.814	94.697
Jakarta Utara	253	4.721.067	2.922.605	200.537	401.005	96.174	1.100.746
Jakarta Barat	285	5.750.051	3.823.636	459.527	280.171	192.492	994.225
Jakarta Selatan	452	2.208.518	1.473.253	212.837	123.243	63.660	335.525
Jakarta Timur	256	3.647.801	2.231.213	309.933	301.913	74.844	729.898
Kepulauan Seribu	16	792.639	-	-	792.139	-	500
Jumlah	1.434	17.612.297	10.803.437	1.193.324	1.918.961	440.984	3.255.591

Atas kewajiban SIPPT yang belum diserahkan ke Pemrpov DKI Jakarta tersebut belum diakui dan dicatat di neraca, karena belum memenuhi kualfikasi untuk dicatat sebagai aset karena belm terdapat nilai yang pasti. Nilai aset baru diketahui secara pasti pada saat BAST sesuai dengan hasil appraisal yang dituangkan dalam BAST, serta tingkat ketertagihannya yang belum pasti.

Potensi nilai pendapatan fasos fasum secara pasti baru dapat ditentukan pada saat berita acara serah terima fasos

fasum ditandatangani yaitu sebesar nilai wajar yang tercantum dalam BAST. Pada saat penerbitan SIPPT maupun PPK, nilai fasos fasum belum dapat dikukur dan diestimasi secara handal, sehingga target mungkin jumlahnya dapat berbeda dengan nilai pada saat serah terima.

5.5.1.1.7 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp823.482.567.774,00 dan Rp750.543.243.114,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (*stock opname*) per 31 Desember 2016 dengan menggunakan harga pembelian/harga perolehan. Khusus persediaan obat-obatan pada BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2016 merupakan akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada Neraca SKPD, diantaranya adalah:

a. Persediaan pada Dinas Perumahan Gedung dan Pemda sebesar Rp90.241.778.940,00, diantaranya bangunan – bangunan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga antara lain Pembangunan Mess dan GOR TNI AU di Halim sebesar Rp26.130.817.650,00, dan Rehap Total Wisma Atlet Senopati Kopassus sebesar Rp20.076.196.000,00.
b. Persediaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB sebesar Rp34.574.569.814,00, diantaranya merupakan persediaan berupa Alat Kontrasepsi

c. Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp31.894.704.644,00 diantaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum.
d. Persediaan pada Dinas Pelayanan Pajak sebesar Rp24.670.842.965,00 diantaranya berupa Cetakan Umum dan Khusus Blanko Pajak.
e. Persediaan pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp24.436.304.921,00 diantaranya merupakan persediaan suku cadang mobil.
f. Persediaan pada Sudin Perindustrian dan Energi-Jakut sebesar Rp21.502.079.657,00 diantaranya merupakan persediaan Lampu Penerangan Jalan Umum.
g. Persediaan pada BLUD RS Pasar Rebo sebesar Rp20.817.226.479,00 diantaranya merupakan persediaan obat-obatan.
h. Persediaan pada BLUD RS Cengkareng sebesar Rp20.544.099.480,00 diantaranya merupakan persediaan obat-obatan.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6.

Nilai persediaan tersebut termasuk hibah dari pihak luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya adalah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp.26.535.971.105,00 yang merupakan hibah dari BKKBN berupa alat kontrasepsi, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.38.149.820.938,00 yang merupakan hibah dari Kementrian Kesehatan RI berupa vaksinasi, dan pada Sudin Kesehatan – Jakbar sebesar Rp.19.080.332.045 yang merupakan hibah dari Kementrian Kesehatan RI berupa vaksinasi dan obat-obatan.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2016 tidak termasuk persediaan yang sudah usang atau rusak. Diantaranya suku cadang mobil yang sudah tidak dapat digunakan, pamlfet yang informasinya sudah tidak relevan, dan alat kontrasepsi yang sudah kadaluarsa. Persediaan yang telah

usang tersebut diantaranya terdapat pada SKPD sebagai berikut :

a. Dinas Perhubungan dan Transportasi sebesar Rp271.260.880,00;
b. Dinas Kebersihan sebesar Rp553.168.081,00;
c. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat sebesar Rp168.482.699,00;
d. Dinas Perindustrian dan Energi sebesar Rp50.896.000,00;
e. Sudin Perindsutrian dan Energi – Jakbar sebesar Rp276.032.460,00;
f. Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp55.495.650;
g. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp 1.574.401.217,00;
h. Kantor Keluarga Berencana – Jakbar sebesar Rp142.324.700,00;
i. Kantor Keluarga Berencana – Jakpus sebesar Rp3.297.969,00;
j. Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp9.491.681.875,00;
k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp10.514.000,00.

Atas persediaan yang sudah rusak atau usang tersebut diakui sebagai beban persediaan – LO pada tahun 2016. Namun sebagai pengedalian tetap di catat dalam catatan secara extra comptable.

5.5.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp28.608.880.033.985,00 dan Rp22.508.090.659.786,00.

5.5.1.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan,

diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 5.34

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2013)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	0
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	0	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	**NilaiInvestasi Dana Bergulir (I+II+III)**	**436.351.583.078**	**460.836.008.159**	**897.187.591.237**
V	Saldo Kas dan Bank	983.012.914	337.364.599.167	338.347.612.081
VI	Dana di Pemanfaat	427.710.732.633	123.471.408.992	551.182.141.625
VII	**Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)**	**428.693.745.547**	**460.836.008.159**	**889.529.753.706**
VIII	**Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)**	**7.657.837.531**	**0**	**7.657.837.531**

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan 2016.

Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana dari masyarakat penerima manfaat (menunggak), penyalahgunaan dana, dan dana yang belum dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui koordinasi BPMPKB.

Saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp897.187.591.237,00. Mutasi kurang sebesar Rp338.475.881.320 merupakan penyetoran saldo kas di rekening UPT Dana Bergulir ke Kas Daerah atas hasil pembubaran UPT Dana Bergulir dan terdapat koreksi atas saldo investasi sebesar Rp77.309.256 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan, sehingga saldo Investasi Non Permanen – Dana Bergulir per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp558.634.400.664,00.

Adapun rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) disajikan pada tabel 5.35 sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)
Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d 2007)	UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2016)	TOTAL
1	2	3	4	5 = 3+4
I	Dana Awal	560.895.943.615	324.977.125.000	885.873.068.615
II	Dana yang sudah dialihkan ke UPDB	(124.544.360.537)	124.544.360.537	-
III	Pendapatan Jasa Pemanfaatan	-	11.314.522.622	11.314.522.622
IV	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	-	(338.475.881.320)	(338.475.881.320)
V	Koreksi Investasi Dana Bergulir	-	(77.309.253)	(77.309.253)
VI	**Nilai Investasi Dana Bergulir (I+II+III+IV+V)**	**436.351.583.078**	**122.282.817.586**	**558.634.400.664**
VII	Saldo Kas dan Bank	983.012.914	171.492.141	1.154.505.055
VIII	Dana di Pemanfaat	427.710.732.633	122.111.325.445	549.822.058.078
IX	**Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (VII+VIII)**	**428.693.745.547**	**122.282.817.586**	**550.976.563.133**
X	**Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (VI-IX)**	**7.657.837.531**	**-**	**7.657.837.531**

Investasi Non Permanen di Bina Ekonomi PPMK

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh BPMPKB secara keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003 sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (sekarang BPMPKB) Provinsi/Kotamadya/Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan Kelurahan).

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB per 31 Desember 2015 sebesar Rp436.351.583.078,00, yaitu dana awal sebesar Rp560.895.943.615,00 dikurangi dana yang sudah dialihkan ke UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.34. Pengalihan dana dari Bina Ekonomi PPMK ke rekening UPT Dana Bergulir tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK.

Selama tahun 2016, tidak terdapat terdapat penambahan hasil penarikan dana di pemanfaat yang dikelola Bina Ekonomi PPMK, sehingga saldo kas dan bank di Bina Ekonomi PPMK tidak berbeda dengan tahun yang lalu, yaitu sebesar Rp983.012.914,00, dan sisa dana di pemanfaat Bina Ekonomi PPMK per 31 Desember 2016 tetap sebesar Rp435.368.570.164,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.35.

Selain itu, dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat selisih sebesar Rp7.657.837.531,00 yang belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian dana PPMK, sebagaimana tersaji pada tabel 5.36.

Tabel 5.36

Rincian Dana di Pemanfaat - Bina Ekonomi PPMK BPMPKB

Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	
1	Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia	Rp	4.387.726.959
2	Dana di Pemanfaat – Bangkrut	Rp	43.102.284.762
3	Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat	Rp	8.415.019.717
4	Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan	Rp	331.596.449.381
5	Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola	Rp	13.698.243.589
6	Data TidakLengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya	Rp	26.511.008.225
7	Saldo Belum Terjelaskan	Rp	7.657.837.531
Jumlah		**Rp**	**435.368.570.164**

Investasi Non Permanen di UPT Dana Bergulir

Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir periode 2008 sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp460.836.008.159,00, terdiri dari dana awal sebesar Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan alokasi 30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp11.314.522.622,00, sebagaimana tersaji pada tabel 5.34. Dari nilai investasi sebesar Rp460.836.008.159,00 tersebut, tercatat sebesar Rp123.471.408.992,00 berada di pemanfaat, dan sisanya sebesar Rp337.364.599.167,00 merupakan saldo kas dan bank di UPT Dana Bergulir.

Mutasi Investasi pada UPT Dana Bergulir selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2015 (Audited)	Mutasi Tahun 2016			Saldo Akhir 31 Des 2016
			Pengembalian dari KJK	Penyetoran Pokok Dana Bergulir ke Kas Daerah	Koreksi	
1	Saldo Kas dan Bank	337.364.599.167	1.360.083.550	(338.475.881.320)	(77.309.256)	171.492.141
2	Dana di Pemanfaat	123.471.408.992	(1.360.083.550)	-	3	122.111.325.445
	JUMLAH	**460.836.008.159**	**-**	**(338.475.881.320)**	**(77.309.253)**	**122.282.817.586**

Pada tahun 2016, terdapat pengembalian pokok dari KJK sebesar Rp1.360.083.550,00, sehingga saldo kas dan bank di UPT Dana Bergulir menjadi sebesar Rp338.724.682.717,00. Dari saldo kas dan bank tersebut, UPT Dana Bergulir melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp338.475.881.320,40. Adapun penyetoran tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015 perihal Pembubaran Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Promosi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Unit Pengelola Rumah Potong Hewan, sebagaimana telah

diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nomor 246 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 215 Tahun 2015.

Selain itu, terdapat koreksi atas saldo investasi sebesar Rp77.309.253,00 yang disebabkan karena kesalahan pencatatan, sehingga saldo kas dan bank di UPT Dana Bergulir per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp171.492.141.00, dan dana di pemanfaat (piutang) per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp122.111.325.445,00.

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp488.089.215.864,00 dan Rp487.325.068.059,00, sehingga nilai bersih (*netto*) Dana Bergulir per 31 Desember 2016 dan 2015 menjadi sebesar Rp70.545.184.800,00 dan Rp409.862.523.178,00. Adapun daftar umur Piutang Dana Bergulir dan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih berdasarkan dana yang masih ada di pemanfaat disajikan dalam tabel 5.37.

Tabel 5.37

Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 2016

No	Uraian	0-1 Tahun	1-2 Tahun	2-5 Tahun	> 5 Tahun	Akumulasi Penyisihan per 31 Desember 2016
		5%	10%	50%	100%	
I	Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir	10.068.649.243	20.944.130.746	81.045.312.154	10.053.233.302	122.111.325.445
II	Penyisihan	50.343.246	2.094.413.075	40.522.656.077	10.053.233.302	52.720.645.700
III	Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK	-	-	-	435.368.570.164	435.368.570.164
IV	Penyisihan	-	-	-	435.368.570.164	435.368.570.164
V	**Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih**	**50.343.246**	**2.094.413.075**	**40.522.656.077**	**445.421.803.466**	**488.089.215.864**

5.5.1.2.2 Investasi Permanen

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah.

Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang disetorkan oleh pemerintah kedalam penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp28.538.334.849.185,00 dan Rp22.098.228.136.608,00 dan dengan ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 7.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu:

1. Metode biaya

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2. Metode ekuitas

   Dengan menggunakan metode ekuitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berikut ringkasan penjelasan investasi permanen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp28.197.073.672.185,00 dan Rp21.756.966.959.608,00. Dengan rincian dalam tabel 5.38 sebagai berikut:

Tabel 5.38

Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No.	Nama	% Kepemilikan	31 Desember 2016 Nilai Investasi (Rp)	31 Desember 2015 Nilai Investasi (Rp)
1	2	4	5	6
Perusahaan Daerah (BUMD)				
1.	PDAM Jaya	100%	0	0
2.	PD Dharma Jaya	100%	139.523.362.521,00	70.432.916.065,00
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	100%	1.000.941.271.594,00	1.046.058.060.401,00
4.	PD Pasar Jaya	100%	984.483.922.648,00	509.599.788.856,00
5.	PD PAL Jaya	100%	670.336.481.735,00	516.175.438.571,00
	Jumlah		**2.795.285.038.498,00**	**2.142.266.203.893,00**
PT Patungan				
1.	PT Pembangunan Jaya	38,80%	2.500.120.563.894,00	1.942.067.255.754,00
2.	PT Food Station Tjipinang	99,90%	370.392.324.341,00	49.234.489.310,00
3.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	50,00%	181.076.447.872,00	161.799.741.564,00
4.	PT Delta Djakarta, Tbk.	26,25%	197.026.003.306,00	222.250.087.306,00
5.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk.	72,00%	1.222.911.168.728,00	1.211.045.540.918,00
6.	PT Jakarta Propertindo	99,99%	5.345.411.626.398,00	4.322.661.011.016,00
7.	PT Ratax Armada	28,00%	0	0
8.	PT Bank DKI Jakarta	99,98%	7.394.775.810.291,00	5.884.333.774.627,00
9.	PT Jakarta Tourisindo	99,35%	467.364.638.555,00	484.300.436.222,00
10.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	99,99%	5.486.645.869.800,00	3.759.293.639.511,00
11.	PT Transportasi Jakarta	99,36%	1.938.497.114.623,00	1.481.923.171.895,00
12.	PT Penjamin Kredit Daerah	98,33%	297.567.065.879,00	95.791.607.592,00
	Jumlah		**25.401.788.633.687,00**	**19.614.700.755.715,00**
	Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas		**28.197.073.672.185,00**	**21.756.966.959.608,00**

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan mutasi pencatatan Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai berikut:

1) PDAM Jaya

   Investasi pada PDAM disajikan sebesar nol rupiah karena PDAM memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PDAM Audited tahun 2016 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp945.832.099.159,00.

PDAM Jaya tahun 2016 tidak menyetorkan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2) PD Dharma Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp70.432.916.065,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp906.534.697.880,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi kurang sebesar Rp4.307.825.620,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2015 pada Laporan Keuangan PD Dharma Jaya Audited 2015;
b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp72.853.026.360,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Dharma Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2731 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Dharma Jaya Tahun Anggaran 2016. Adapun penyertaan modal kepada PD Dharma Jaya tahun 2016 diberikan dalam rangka pembibitan dan penggemukan sapi perluasan tempat pemotongan ayam dan untuk unit usaha eksisting.
c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp587.415.037,00 yang merupakan bagian laba PD Dharma Jaya Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2016. Bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp42.169.321,00 merupakan penyesuaian nilai saldo laba ditahan dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Dharma Jaya per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp139.523.362.521,00.

3) PD Pembangunan Sarana Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp1.046.058.060.401,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp491.341.482.738,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi kurang sebesar Rp82.367.192.706,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2015 pada Laporan Keuangan PD Pembangunan Sarana Jaya Audited 2015;
b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp 105.095.890.606,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp31.732.962.062,00 merupakan penyetoran dividen PD Pembangunan Sarana Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1268 tahun 2016 tanggal 02 September 2016, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp36.112.524.645,00 untuk mengakui beban lain lain

yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pembangunan Sarana Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016, yaitu kewajiban imbalan kerja, koreksii saldo laba, jasa produksi dan dana social dan dana pensiun 2016.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pembangunan Sarana Jaya per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp1.000.941.271.594,00.

4) PD Pasar Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp509.599.788.856,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp468.308.484.077,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Terdapat mutasi tambah sebesar Rp198.049.212.285,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2015 pada Laporan Keuangan PD Pasar Jaya Audited 2015;
b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp 170.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD Pasar Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2679 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada PD Pasar Jaya Tahun Anggaran 2016. Adapun penyertaan modal kepada PD Pasar Jaya tahun 2016 diberikan dalam rangka pembangunan pasar rakyat, pengembangan usaha distribusi dan retail argo serta sistem manajemen;

c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp52.956.979.173,00 yang merupakan pengumuman laba PD Pasar Jaya Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp108.167.340.000,00 untuk mengakui adanya penambah ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016, yaitu tambahan modal disetor dari *tax amnesty;*
e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp20.831.467.434,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD Pasar Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016, yaitu pembayaran cadangan DHT, jasa produksi dan pembinaan lingkungan dan sosial;
f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp33.457.930.232,00 yang merupakan penyetoran dividen PD Pasar Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1540 tahun 2016 tanggal 24 Juni 2016, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD Pasar Jaya per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp984.483.922.648,00.

5) PD PAL Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp516.175.438.571,00. Mutasi tambah

nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp170.389.522.631,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp 1.995.514.530,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2015 pada Laporan Keuangan PD PAL Jaya Audited 2015;
b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp140.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PD PAL Jaya sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2660 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PD Pal Jaya Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pengembangan cakupan layanan serta pelayanan pengelolaan air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp31.566.002.268,00 yang merupakan bagian laba PD PAL Jaya Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2016. Bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
d. terdapat mutasi tambah sebesar Rp10.494.131.944,00 untuk mengakui pendapatan lain lain yang timbul karena adanya penambah ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2016, yaitu berupa bunga deposito dan jasa giro cadangan umum serta pembentukan dana cadangan umum;
e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp 13.666.126.111,00 yang merupakan penyetoran dividen PD PAL Jaya kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan

Keputusan Gubernur Nomor 2023 tahun 2016 tanggal 2 September 2016, dan telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

f. terdapat mutasi kurang sebesar Rp16.228.479.466,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PD PAL Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2016, yaitu berupa pembayaran jasa produksi dan pembentukan dana pensiun, pendidikan dan sosial serta pembayaran dana cadangan umum.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PD PAL Jaya per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp670.336.481.735,00.

6) PT Pembangunan Jaya

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp1.942.067.255.754,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp558.053.308.140,00 yang terdiri dari:

a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp28.127.219.113,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2015 pada Laporan Keuangan PD Pembangunan Jaya Audited 2015;
b. Mutasi tambah sebesar Rp396.558.147.574,00 yang merupakan pengumuman laba 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
c. Mutasi tambah sebesar Rp160.300.755.651 yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT

Pembangunan Jaya berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016;

d. Mutasi kurang sebesar Rp24.800.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya yang telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

e. Mutasi kurang sebesar Rp2.132.814.198,00 yang merupakan selisih perhitungan deviden dengan pembayarannya.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp2.500.120.563.894,00.

7) PT Food Station Tjipinang

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp49.234.489.310,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp321.157.835.031,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp300.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Food Station Tjipinang sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2734 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Food Station Tjipinang Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembelian persediaan beras dan sertifikasi atas lahan;

b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp 8.835.176.903,00 yang merupakan bagian laba PT Food Station Tjipinang Tahun 2016 berdasarkan

Laporan Keuangan Unaudited 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98%. Bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp16.352.944.110,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;

d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp3.007.195.324,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Food Station Tjipinang kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 17 Juni 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Food Station Tjipinang atas tahun buku 2015 adalah sebesar Rp3.007.195.324,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 3 Oktober 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp1.023.090.658,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Food Station Tjipinang berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2016, yaitu berupa tantiem pengurus, bonus karyawan, dan pajak dividen.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Food Station Tjipinang per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp370.392.324.341,00.

8) PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp161.799.741.564,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp19.276.706.308,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp13.157.888.960,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2015 setelah disajikan kembali pada Laporan Keuangan PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Audited 2015;

b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp37.048.133.513,00 yang merupakan pengumuman laba PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 50,00%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan Pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp4.613.538.245,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 29 Juni 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) atas

tahun buku 2015 adalah sebesar Rp4.613.538.245,00 . Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 21 Juli 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp181.076.447.872,00.

9) PT Delta Djakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp222.250.087.306,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp25.224.084.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Delta Djakarta yang telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1. Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Konsolidasi PT Delta Djakarta Tahun 2016.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Delta Djakarta per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp197.026.003.306,00.

10) PT Pembangunan Jaya Ancol

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp1.211.045.540.918,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp11.865.627.810,00 yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp91.353.627.741,00 yang merupakan pengumuman laba PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016;

b. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp79.487.999.931,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Pembangunan Jaya Ancol yang telah diterima Kas Daerah sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1. Tidak terdapat mutasi lain karena sampai dengan disusunnya laporan keuangan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mendapatkan Laporan keuangan Konsolidasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tahun 2016.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Pembangunan Jaya Ancol per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp1.222.911.168.728,00.

11) PT Jakarta Propertindo

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp4.322.661.011.016,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp1.022.750.615.382,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp47.342.872.343,00 merupakan penyesuaian pencatatan investasi sesuai dengan nilai ekuitas per 31 Desember 2015 pada Laporan Keuangan PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi) Unaudited 2016;

b. terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2732 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Jakarta Propertindo Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka pembangunan prasarana kereta api ringan/Light Rail Transit, infrastruktur olah raga Velodrome dan infrastruktur olah raga Equestrian;
c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp77.272.817.689,00 yang merupakan bagian laba dari PT Jakarta Propertindo 2016 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Unaudited 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,99%. bagian laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp172.527.007,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp7.351.856.970,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Propertindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 20 Juni 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Propertindo atas tahun buku 2015 adalah sebesar Rp7.351.856.970,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada

tanggal 4 Oktober 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Propertindo per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp5.345.411.626.398,00.

12) PT Bank DKI Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp5.884.333.774.627,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp1.510.442.035.664,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp500.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Bank DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2659 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bank DKI Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka memperkuat modal PT Bank DKI untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR), ekspansi kredit, pengembangan jaringan layanan, penyempurnaan teknologi informatika (*core banking system)* dan pertumbuhan *un-organic*;
b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp803.287.677.461,13 yang merupakan pengumuman laba PT Bank DKI 2016 berdasarkan Laporan Keuangan (Konsolidasi) Unaudited 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,98%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai

Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp276.623.558.999,80 untuk mengakui Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Bank DKI yang merupakan pegukuran kembali kewajiban imbalan pasti dan kenaikan dari revaluasi aset tetap yang dikalikan persentase kepemilikan;
d. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp56.105.566,62 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;
e. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp 69.522.075.465,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Bank DKI Jakarta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris nomor 22 tanggal 18 Maret 2016. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 11 April 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Bank DKI Jakarta per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp6.314.811.699.162,03,00.

13) PT Jakarta Tourisindo

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp484.300.436.22,00. Mutasi kurang nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp16.935.797.667,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan penyetoran dividen PT Jakarta Tourisindo kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 11 April 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Jakarta Tourisindo atas tahun buku 2015 adalah sebesar Rp500.000.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 15 Juni 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;
b. terdapat mutasi kurang sebesar Rp16.408.997.317,00 yang merupakan pengumuman rugi PT Jakarta Tourisindo Jakarta Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited tahun 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,35%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;
c. terdapat mutasi kurang sebesar Rp26.821.433,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Jakarta Tourisindo Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited 2016, yaitu berupa biaya *Corporate Social Responsibility* (CSR).
d. terdapat mutasi kurang minus sebesar Rp21.082,00 yang merupakan pembulatan pembagian dividen.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp467.364.638.555,00.

14) PT Mass Rapid Transit Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp3.759.293.639.511,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp1.727.352.230.289,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp1.762.929.672.083,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2730 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun Anggaran 2016 dan Keputusan Gubernur Nomor 716 Tahun 2017 tentang Penetapan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Mass Rapid Transit Jakarta Yang Bersumber Dari Penerusan Dana Hibah Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan untuk pemenuhan biaya modal kerja operasional;

b. Mutasi tambah nilai investasi sebesar Rp690.976.767,00 untuk mengakui Pendapatan pengelolaan hasil kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional yang timbul karena adanya penambah ekuitas PT Mass Rapid Transit Jakarta 2016 yang merupakan pengukuran kembali liabilities imbalan kerja;

c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp140.441.808,00 merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan;

d. terdapat mutasi kurang sebesar Rp36.408.860.369,00 yang merupakan pengumuman rugi PT PT Mass Rapid Transit Jakarta Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited tahun 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,99%. Pengumuman rugi ini juga diakui sebagai Beban Lain-lain dalam Laporan Operasional;

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Mass Rapid Transit Jakarta per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp5.486.645.869.800,00.

15) PT Transportasi Jakarta

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp1.481.923.171.895,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2015 sebesar Rp456.573.942.728,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp330.000.000.000,00 yang merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transportasi Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2719 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Transportasi Jakarta Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka penyediaan fasilitas kerja, sarana dan cadangan likuiditas;
b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp128.701.602.302,00 yang merupakan pengumuman laba PT Transportasi Jakarta Tahun

2016 berdasarkan Laporan Keuangan Audited tahun 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 99,36%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;

c. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp2.127.659.574,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi per 31 Desember 2016 sesuai dengan nilai ekuitas PT Transportasi Jakarta yang tercantum dalam Laporan Keuangan Audited tahun 2016.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Transportasi Jakarta per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp1.938.497.114.623,00. Nilai investasi pada PT Transportasi Jakarta tersebut belum termasuk aset eks UP Transjakarta yang masih dalam proses inbreng dan dicatat pada Laporan Keuangan Dinas Perhubungan.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Transjakarta, saat ini tengah dilakukan penilaian kembali atas aset eks UP Trans Jakarta oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu bis Trans Jakarta, halte Trans Jakarta, dan aset lainnya berupa tanah, bangunan, kendaraan dinas operasional dan perlengkapan/ inventaris kantor. Adapun tujuan dari penilaian kembali aset adalah untuk menjamin keterandalan nilai aset yang akan dijadikan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT Transportasi Jakarta.

16) PT Penjamin Kredit Daerah

Pada Neraca per 31 Desember 2015, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Audited Tahun 2015, yaitu sebesar Rp95.791.607.592,00. Mutasi tambah nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp201.775.458.287,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. terdapat mutasi tambah sebesar Rp200.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Penjamin Kredit Daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2733 Tahun 2016 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada PT Penjamin kredit Daerah Tahun Anggaran 2016. Adapun Penyertaan Modal tersebut diberikan dalam rangka melakukan usaha penjaminan kredit bagi Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), memudahkan dan membantu akses permodalan bagi UMKMK;
b. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp2.009.752.257,00 yang merupakan pengumuman laba PT Penjamin Kredit Daerah Tahun 2016 berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited tahun 2016, dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 98,33%. Pengumuman laba ini juga diakui sebagai Pendapatan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dalam Laporan Operasional;
c. terdapat mutasi tambah atas saldo investasi sebesar Rp27.775.704,00 yang merupakan penyesuaian nilai investasi karena perubahan persentase kepemilikan dari 95% menjadi 98,33%;
d. terdapat mutasi kurang atas saldo investasi sebesar Rp237.500.000,00 yang merupakan penyetoran

dividen PT Penjamin Kredit Daerah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penyetoran dividen ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam akta notaris tanggal 29 April 2016, yang menyatakan bahwa bagian laba (dividen) yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari PT Penjamin Kredit Daerah atas tahun buku 2015 adalah sebesar Rp237.500.000,00. Adapun dividen tersebut telah diterima di Kas Daerah pada tanggal 25 Juli 2016, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.1;

e. terdapat mutasi kurang sebesar Rp24.569.675,00 untuk mengakui beban lain lain yang timbul karena adanya pengurang ekuitas PT Penjamin Kredit Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Audited 2016, yaitu berupa aset keuangan tersedia untuk dijual.

Dengan demikian, nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal pada PT Penjamin Kredit Daerah per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp297.567.065.879,00.

17) PT Ratax Armada

Investasi pada PT Ratax Armada disajikan sebesar nol rupiah karena PT Ratax Armada memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan PT Ratax Armada Unaudited tahun 2014 menyajikan ekuitas negatif sebesar Rp2.054.694.000. Pada saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian rencana divestasi PT Ratax Armada hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kerugian yang semakin besar akibat penurunan nilai saham PT Ratax Armada.

Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan 20% sampai 50% yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%), PT Pembangunan Jaya (konsolidasi) (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk (26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris.
b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi.
c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee.
d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sama, yaitu sebesar Rp341.261.177.000,00, dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.39.

Tabel 5.39
Penyertaan Modal dengan Metode Biaya
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Nama	Persentase Kepemilikan	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	PT Kawasan Berikat Nusantara	26,85%	209.692.695.000,00	209.692.695.000,00
2.	PT Cemani Toka	27,42%	27.059.360.000,00	27.059.360.000,00
3.	PT Pakuan International	1,94%	1.345.900.000,00	1.345.900.000,00
4.	PT Grahasahari Suryajaya	8,08%	3.951.000.000,00	3.951.000.000,00
5.	PT Asuransi Bangun Askrida	5,99%	8.680.000.000,00	8.680.000.000,00
6.	PT Jakarta International Expo	13,14%	39.375.000.000,00	39.375.000.000,00
7.	PT Rumah Sakit Haji Jakarta	51,00%	51.157.222.000,00	51.157.222.000,00
	Jumlah PMP dengan Metode Biaya		**341.261.177.000,00**	**341.261.177.000,00**

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan Investasi yang menggunakan metode biaya:

1) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada PT Cemani Toka (27,42%) dan PT Kawasan Berikat Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.

2) Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas saham PT RS Haji Jakarta sebesar 51% sesuai dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 73 tanggal 14 Desember 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT RS Haji Jakarta.

   Penilaian penyertaan pada PT RS Haji Jakarta menggunakan metode biaya. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan masih dalam sengketa.
   Sengketa tersebut terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan pergantian Direksi PT Rumah Sakit Haji Jakarta antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang 51% saham dan Kementerian Agama RI/Badan Pengelola Dana Abadi Umat selaku pemegang 42% saham. Sisa Kepemilikan 7% saham pada PT RS Haji Jakarta oleh Kopkar RS Haji Jakarta (Kopkar Usaha Pratama) selaku pemegang 6% saham dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (a.n Drs. H. Mubarok) selaku pemegang 1% saham. Sejak adanya sengketa di PT RS Haji Jakarta maka RS Haji Jakarta untuk sementara dikelola oleh Kementerian Kesehatan RI dengan menunjuk dr. Mulya A. Hasjmy, dkk berdasarkan Surat Tugas Nomor 334/Menkes/IV/2008 tanggal 4 April 2008 dan secara *de facto* PT RS Haji Jakarta dalam keadaan tidak aktif.

Status kepemilikan PT RS Haji Jakarta saat ini masih dalam upaya penyelesaian permasalahan Badan Hukum dan Kelembagaan PT RS Haji Jakarta. Pada tanggal 12 Mei 2013, melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan:

a) Mahkamah Agung RI Nomor 1177/K/Pdt/2011 Tanggal 23 Agustus 2011;
b) Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 450/Pdt/2009/PTDKI Tanggal 13 Agustus 2010;
c) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/PDT.G/2008/PN.JKT.PST tanggal 10 Maret 2009.

Namun sampai saat ini belum ada putusan atas Penijauan Kembali tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kesepakatan dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menghibahkan seluruh saham RS Haji Jakarta milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (51%) dengan nilai buku Rp51.157.222.000,00 kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dijadikan Teaching Hospital UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan pengajuan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Gubernur Nomor 44/-1.822.4 tanggal 17 Januari 2014. Adapun pengajuan permohonan tersebut telah dijawab oleh Ketua DPRD melalui surat nomor 35/-1.822.4 pada tanggal 14 Januari 2016 yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta pada prinsipnya dapat menyetujui untuk menghibahkan saham sebesar 51% milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di RS Haji Jakarta kepada Kementerian Agama RI dengan didahului Rapat Umum Pemegang saham (RUPS).

Konsekuensi dari rencana hibah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mencabut Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas Putusan Nomor 1177 K/Pdt/2011 Tanggal 23 Agustus 2011, dengan amar putusannya antara lain menyatakan RUPS-LB yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Maret 2008 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga RUPS PT RS Haji Jakarta dapat segera dilaksanakan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan pencabutan PK tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2016.

Pada tanggal 22 April 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersurat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI melalui surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2201/-1.718.11 yang pada intinya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta sedang memproses pencabutan PK atas putusan 117 K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus 2011,
b. BPBUMD dan PM Provinsi DKI Jakarta segera melaksanakan RUPS-LB dengan agenda tunggal penyerahan hibah saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementerian Agama RI,
c. BPKAD memproses Berita Acara penyerahan hibah saham PT RS Haji Jakarta dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Kementrian Agama RI.

Penandatanganan Keputusan RUPS Sirkuler tersebut akan dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

5.5.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Tanah	295.047.301.522.144,00	284.068.689.312.488,00
2	Peralatan dan Mesin	20.694.146.032.418,00	18.986.813.894.851,00
3	Gedung dan Bangunan	25.196.220.526.094,00	24.169.792.568.590,00
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	35.571.427.457.658,00	32.306.882.017.848,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.364.063.565.649,00	1.422.710.645.797,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.626.604.247.917,00	2.629.578.816.582,00
	Jumlah	**382.499.763.351.880,00**	**363.584.467.256.156,00**

Daftar mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 tersaji pada lampiran 7.

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2016 dijelaskan sebagai berikut:

1. Tanah

   Penambahan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp11.264.520.380.185,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2016	Rp	1.970.939.912.239,00
2.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	13.982.761.206,00
3.	Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap	Rp	93.847.811.020,00
4.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	401.281.100,00
5.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	8.983.642.175.440,00
6.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	639.759.208,00
7.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	105.654.792.972,00
8.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	95.411.887.000,00
	Jumlah	**Rp**	**11.264.520.380.185,00**

a. Penambahan aset tetap Tanah dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp1.970.939.912.239,00, diantaranya terdapat pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp880.714.023.168,00 berupa pengadaan Tanah Waduk dan saluran kali serta Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp576.870.086.358,00 berupa pengadaan tanah taman dan tanah makam.

b. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap, terdapat pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.982.761.206,00 berupa pematangan lahan. Pengadaan aset tercatat pada pengadaan gedung dan bangunan.

c. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap, terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp93.847.811.020,00 yang berasal dari pengakhiran kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi dengan PT Godang Tua Jaya pada tanggal 19 Juli 2016.

d. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan), terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp401,281,100.00 yang berupa pematangan tanah dan turap Rusun Penggilingan, Rusun Nagrak dan Rusun Rawa Bebek.

e. Penambahan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap, terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BPKAD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 8.983.642.175.440,00 berupa Tanah yang diserahkan ke Bina Marga, Tanah Waduk Perumahan Pantai Indah Kapuk, Tanah Penyempurna Hijau Jalan Kemang VI, Tanah Penyempurnaan Hijau Jalan Jl.Kuningan Barat, dan Tanah Penyempurna HIjau Umum Pantai Indah Kapuk.

f. Penambahan aset tetap Tanah dari Kapitalisasi dari Beban Jasa, terdapat pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp639.759.208,00 berupa perencanaan dan pengawasan pematangan lahan.

g. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp51.737.175.000,00 dan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp31.250.256.000,00 berupa Tanah Kantor Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke.

h. Penambahan aset tetap Tanah dari Koreksi Kurang Catat Barang, diantaranya terdapat pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp46.049.535.000,00 berupa Tanah Gedung Eks Kodim

0505 JT/Pusat Kebudayaan Betawi dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BPKAD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp41.943.102.000,00.

Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp285,908,170,529.00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Aset Tetap	Rp	509.236.000,00
2.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp.	903.000.000,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	Rp	41.496.613.000,00
3.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP	Rp	37.854.300,00
4.	Reklasifikasi ke Kas Dikonsinyasikan	Rp	54.113.438.831,00
5.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	12.387.244.398,00
6.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	176.460.784.000,00
	Jumlah	**Rp**	**285.908.170.529,00**

a. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap, terdapat pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp509.236.000,00 berupa gedung tua diatas lahan yang dibeli Dinas Pertamanan. Nilai perolehan Gedung tersebut masuk sebagai nilai perolehan lahan.

b. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat, terdapat pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp903.000.000,00 berupa gedung tua diatas lahan yang dibeli Dinas Pertamanan. Nilai perolehan Gedung tersebut masuk sebagai nilai perolehan lahan.

c. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak ketiga Lainnya, terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp41.496.613.000,00 berupa aset tetap tanah bangunan kantor yang berlokasi di Jalan Taman Jatibaru Nomor 1, digunakan oleh Bareskrim sebesar Rp20.481.230.000,00 dan aset tetap tanah bangunan pendidikan sebesar Rp21.015.383.000,00 yang dikerjasamakan dengan Yayasan Suhargo Gondokusumo.

d. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP, diantaranya terdapat pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30.726.300,00 berupa Biaya Perencanaan Pengadaan Tanah TPU Semper Jakarta Utara dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.128.000,00 berupa Biaya Pelayanan Pemetaan dan Pengukuran atas Pengadaan Tanah MRT koridor Jl.Lebak Bulus - Bunderan Senayan.

e. Pengurangan aset tetap Tanah dari Reklasifikasi ke Kas Dikonsinyasikan, terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp54.113.438.831,00 berupa pembayaran konsinyasi/penitipan uang ganti rugi pengadaan tanah MRT koridor Jl. Lebak Bulus – Bunderan Senayan.

f. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan Kota Adm. Jakarta Timur sebesar Rp6.885.249.398,00 berupa Tanah yang selanjutnya diserahkan ke RSUD Duren Sawit dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.752.033.000,00 berupa pencatatan ganda tanah yang tercatat di Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Adm. Jakarta Timur dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

g. Pengurangan aset tetap Tanah dari Koreksi Lebih Catat Barang, diantaranya terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp174.108.000.000,00 berupa Gedung Eks Walikota Jakarta Selatan yang tercatat di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (double catat) dan BLUD Puskesmas Kecamatan Palmerah Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp1.466.640.000,00 berupa double catat antara lain Tanah Puskesmas Kelurahan Slipi 1 (milik Pelni) dan Tanah Puskesmas Kelurahan Palmerah 1 (milik Sekolah Dasar).

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2016	Rp	1.782.276.537.977,00
2.	Donasi/Hibah dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	6.293.535.191,00
3.	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Rp	114.255.510.128,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	6.993.494.185.00
5.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp	466.712.495,00
6.	Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainya Menjadi Aset Tetap	Rp	14.286.481.000,00
7.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	23.846.125.315,00
8	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	1.749.821.500,00
9.	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	6.135.293.780.00
10.	Kapitalisasi dari Beban Barang	Rp	1.545.172.445,00
11.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	190.190.000,00
12.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	6.443.589.311.00
13.	Transfer masuk sebelum Tahun 2015	Rp	188.200.000,00
14.	Transfer masuk Tahun 2015	Rp	12.370.544.088.00
15.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	44.562.720,241.00
16.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	10.953.502,198.00
	Jumlah	Rp	**2.032.557.729.854,00**

2. Peralatan dan Mesin

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.032.557.729.854,00 yang terdiri :

a. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2016, diantaranya terdapat pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp390.563.311.602,00 antara lain berupa alat-

alat berat seperti *Refuse Compactor, Excavator, Road Sweeper besar*, Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp253.830.517.349,00 antara lain berupa alat-alat berat seperti *Dump truck, excavator,* BLUD RS Koja sebesar Rp160.067.724.014,00, RSUD Pasar Minggu sebesar Rp96.115.869.117,00 antara lain berupa *varian trilogy stereotactic system, ct scan stimulator* dan *Iba dosimetry* dan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp92.269.164.510,00 berupa *buldozer* , *Ekscavator long arm* dan *wheelloader*.

b. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta, diantaranya terdapat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.058.838.000,00 antara lain berupa perahu karet dan tenda pengungsi, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.058.838.000,00 antara lain berupa Mobil Perlindungan dan alat - alat kantor, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebesar Rp1.092.300.525,00 berupa Mesin SWRO/BWRO dari PT Panorama Pulau Seribu.

c. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Pengadaan dari Dana Operasional BLUD, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp27.289.206.425,00 antara lain berupa Mesin Terminal Parkir Elektronik, RSUD Pasar Minggu sebesar Rp4.698.922.511,00 antara lain berupa alat-alat kedokteran, dan penambahan alat-alat kedokteran seluruh BLUD Puskesmas Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp62.321.459.613,00.

d. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.107.539.890,00 berupa *lighting equipment*, Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp767.720.300,00 antara lain berupa alat-alat kantor, Kecamatan Cilandak Kota Adm. Jakarta Selatan sebesar Rp646.592.252,00 antara lain berupa alat-alat kantor.

e. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp112.000.000,00 berupa Kendaraan Dinas Operasional, Rumah Sakit Umum Kecamatan Pesanggrahan sebesar Rp86.586.692,00 antara lain berupa alat-alat kedokteran ,Kelurahan Kramat Kota Adm. Jakarta Pusat Rp49.672.000,00 berupa lemari besi dan laptop.

f. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap, terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.286.481.000,00 yang berasal dari pengakhiran kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi dengan PT Godang Tua Jaya pada tanggal 19 Juli 2016.

g. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi ke-5 Bidang Aset Tetap dari Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dikerjakan, terdapat pada Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp23.846.125.315,00 berupa Kapal Motor Catamaran.

h. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap, terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.749.821.500,00 berupa Dump truck, lift penumpang di Gedung City Tower dan lift kaca dua lantai di Jl. MH Thmarin No. 10.

i. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi Beban Persediaan, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.135.172.800,00 berupa Meubelair yang diserahkan ke BAZIS, Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp423.555.143,00 berupa perkakas bengkel, PSTW Budi Mulia 4 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp229.207.000,00 antara lain berupa alat-alat rumah tangga, PSBKW Harapan Mulya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp209.159.500,00 antara lain berupa alat-alat rumah tangga, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah sebesar Rp163.807.600,00, Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air sebesar Rp163.497.180,00 berupa perkakas khusus dan katrol.

j. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi Beban Barang, diantaranya terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp902.806.045,00 berupa Kendaraan Operasional.

k. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi Beban Jasa, Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah Kepulauan Seribu sebesar Rp170.940.000,00 berupa papan nama aset dan BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar Rp19.250.000,00 berupa mesin penghisap debu dan mesin steam.

l. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Kapitalisasi Beban Pemeliharaan, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.262.207.800,00 berupa *self loader* dan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.449.699.202,00 antara lain berupa alat-alat kantor dan alat perkakas.

m. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer masuk sebelum Tahun 2015, terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp188.200.000,00 berupa kurang catat Kendaraan Dinas Operasional Kantor yang diperoleh dari Pusat Penyimpanan Barang Milik Daerah pada tahun 2015.

n. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer masuk Tahun 2015, diantaranya terdapat pada Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp10.485.356.615,00 antara lain berupa alat-alat penyelamatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.481.990.723,00 Kendaraan Operasional.

o. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp37.199.143.923,00 antara lain berupa kendaraan dinas operasional dan BLUD Puskesmas Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp2.695.550.398,00 antara lain berupa alat-alat kedokteran.

p. Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi Kurang Catat Barang, diantaranya terdapat pada

Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.595.090.600,00 antara lain berupa alat-alat kantor, kendaraan dinas operasinal dan *lighting equipment*, dan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp960.208.403,00 antara lain berupa alat-alat kantor dan alat perkakas kerja.

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp325.225.592.287,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	28,576,031,525.00
2.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2016	Rp	1.995.904.990,00
3.	Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD dari Aset Tetap Selain Belanja Modal Tahun 2016	Rp	1.221.037.211,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	6.545.991.633,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	199.284.571.645,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	18.718.807.074,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerja Sama Pihak Ketiga Lainnya	Rp	5,269,722,971.00
8.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang	Rp	17,955,441,694.00
9.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Rp	9.570.000,00
10.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pemeliharaan	Rp	44.736.989,00
11.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan	Rp	6,410,743,383.00
12.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang	Rp	16,110,452,385.00
13.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2016) menjadi Persediaan	Rp	1.687.930.232,00
14	Transfer keluar sebelum Tahun 2015	Rp	120.511.000,00
15.	Koreksi Belanja Modal Tahun 2016 atas Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya	Rp	1.812.400.000,00

16.	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Rp	3,133,045,121.00
17.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	2,254,460,485.00
18.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	14.035.423.948,00
19.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp	18.810.000,00
20.	Koreks Lain-Lain	Rp	20,000,001.00
	Jumlah	**Rp**	**325.225.592.287,00**

a. Pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin karena Penghapusan, diantaranya terdapat pada Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp23.313.013.550,00 berupa Kendaraan Dinas Operasional dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.769.280.125,00 berupa kardek besi metal dan alat bantu pemadam kebakaran.

b. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD, dari Belanja Modal Tahun 2016, diantaranya terdapat pada Kelurahan Pegadungan Kota Adminstrasi Jakarta Barat sebesar Rp299.138.400,00 berupa gerobak sampah, meja kerja dan kursi kerja, Kelurahan Duri Kepa Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp200.249.000,00 berupa gerobak sampah, alat ukur bayi, papan tulis dan lemari arsip, Kelurahan Cipedak Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp153.676.050,00 berupa meja dan kursi kerja, Kelurahan Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp118.250.000,00 berupa gerobak sampah dan Kelurahan Kebon Pala Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp105.019.200,00 berupa gerobak sampah.

c. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Diserahkan ke pihak lain di luar SKPD, Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2016), diantaranya terdapat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan

Penyelamatan Kota Adminstrasi Jakarta Selatan sebesar Rp855.784.011,00 berupa motor pompa apung dan Kelurahan Kedaung Kali Angke Kota Adminstrasi Jakarta Barat sebesar Rp191.400.000,00 berupa gerobak sampah.

d. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.832.258.100,00 berupa mesin pengukur penurunan muka tanah, direklasifikasi ke Jaringan, Irigasi dan Jalan. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.090.771.232,00 berupa alat pengolah dan pemusnah sampah ramah lingkungan direklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan

e. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat, diantaranya terdapat pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp77.452.488.330,00 berupa kendaraan dinas operasional dan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp35.823.776.310,00 berupa kendaraan dinas operasional.

f. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud, diantaranya terdapat pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.108.814.775 berupa *oracle*, software antivirus, lisensi dan aplikasi serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.974.557.200,00 antara lain berupa *oracle database* dan *adobe*.

g. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak

Ketiga Lainnya, terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah BPKAD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.269.722.971,00 berupa kendaraan operasional.

h. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang, diantaranya terdapat pada RSUD Pasar Minggu sebesar Rp4.974.720.084,00 antara lain berupa alat-alat kantor dan alat-alat kedokteran, BLUD RS Koja sebesar Rp2.883.641.116,00 berupa kursi roda dan alat-alat kedokteran dan BLUD RS Tarakan sebesar Rp2.278.892.351,00 antara lain alat-alat kedokteran.

i. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa, terdapat pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.570.000,00 berupa jaringan internet.

j. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pemeliharaan, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Museum Prasasti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp40.556.989,00 antara lain jaringan internet dan pemeliharaan AC split dan Kecamatan Tanjung Priok Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp4.180.000,00 berupa partisi/penyekat ruangan.

k. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan, diantaranya terdapat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.692.222.720,00 antara lain berupa *Email Lotus IBM Ceo Communication user lissence and*

Sw Subscription & Support 12 months, IOC Lisence dan *google map API Premier*, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp779.747.500,00 antara lain berupa partisi, software, antivirus dan alat-alat kantor.

l. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang, diantaranya terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.626.623.156,00 berupa alat-alat kantor dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota administrasi Jakarta Barat sebesar Rp3.699.547.743,00 berupa alat penyelamatan, alat-alat kantor, alat komunikasi dan perkakas.

m. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal selain Tahun 2016) menjadi Persediaan, diantaranya terdapat pada Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas sebesar Rp922.182.064,00 antara lain berupa alat-alat kedokteran, dan BLUD Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp294.666.850,00 antara lain berupa alat-alat kantor, perkakas dan alat kedokteran.

n. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Transfer keluar sebelum Tahun 2015, terdapat pada Kelurahan Kebon Kosong Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp120.511.000,00 antara lain berupa Kendaraan operasional yang telah dicatat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

o. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Belanja Modal Tahun 2016 atas Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya, terdapat pada Suku

Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp1.731.000.000,00 antara lain berupa kelebihan pembayaran pompa mobile yang telah dikembalikan ke Perbendaharaan dan Kas Daerah serta Kelurahan Cempaka Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp81.400.000,00.

p. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2016 atas Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya, terdapat pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.101.062.121,00 dan PSBG Belaian Kasih sebesar Rp31.983.000,00 antara lain berupa Freezer, Mesin Absensi, *Vertical Blind* dan *Handy Talkie* yang tidak sesuai dengan spesifikasi di DPA sehingga dikembalikan ke Perbendaharaan dan Kas Daerah.

q. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp899.100.000,00 antara lain berupa Alat-alat kantor yang dikoreksi karena lebih catat nilai sejak tahun 2008 dan Pusat Penyimpanan Barang Daerah sebesar Rp738.891.250,00 berupa kendaraan dinas operasional.

r. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lebih Catat Barang, diantaranya terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.865.035.275,00 antara lain berupa peralatan kantor dan kendaraan dinas operasional dan Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.485.988.455,00 antara lain berupa kendaraan dinas operasional.

s. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah

Diakui, terdapat pada Biro Umum Sekda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.810.000,00 berupa Televisi untuk Informasi.

t. Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin karena Koreksi Lain-lain, sebesar Rp20.000.001,00.

3. Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.455.303.101.891,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2016	Rp.	1.689.187.594.795,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp.	1.918.806.629 ,00
3.	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Rp.	6.029.647.608,00
4.	Hutang Pihak Ke-3	Rp.	2.421.083.949,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp.	41.526.208.931 ,00
6.	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	Rp.	748.965.000,00
7.	Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap	Rp.	3.370.502.830,00
8.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp.	141.677.150.622 ,00
9.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp.	264.887.925.063,00
10	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp.	3.872.842.820 ,00
11.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp.	26.199.424.768,00
12.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp.	101.008.299.798,00
13.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp.	103.353.075.598 ,00
14.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp.	69.101.573.480,00
	Jumlah	**Rp.**	**2.455.303.101.891,00**

a. Penambahan

aset tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2016, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp659.870.395.880,00 antara lain berupa Pembangunan Rusun KS. Tubun Jakarta Barat,

Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.421.674.210.903,00 antara lain berupa Rehab Total Gedung SMPN 30, Rehab Total Gedung SDN Joglo.

b. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta, diantaranya terdapat pada PSBR Taruna Jaya Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.024.632.000,00 berupa Gedung Furniture dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp496.100.000,00 antara lain berupa Kolam dan Pagar Rumah Jaga UPR Ciganjur

c. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Pengadaan dari Dana Operasional BLUD, diantaranya terdapat pada Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp1.921.482.309,00 antara lain berupa Rehab Fasilitas Umum dan Khusus dan Rehab Kandang Gajah Selatan, BLUD Puskemas Kecamatan Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Sebesar Rp1.090.904.100,00 antara lain berupa Gedung PKL Dukuh dan Rumas Sakit Umum Kecamatan Pesanggrahan sebesar Rp670.865.268,00 antara lain berupa Pemeliharaan Gedung Kantor.

d. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Hutang Pihak Ke-3, terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.421.083.949,00 yang antara lain berupa Perbaikan Rumah Susun Muara Baru (Fisik) dan Perbaikan Rumah Susun Semper (Fisik).

e. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada

PSBN Cahaya Bathin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.835.199.000,00 berupa Bangunan Gedung WBS Lantai 1 & 2, PSBG Belaian Kasih Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.295.718.000,00 berupa gedung kantor dan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp5.204.978.000,00 berupa Bangunan Gudang Terbuka Permanen.

f. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp748.965.000,00 berupa gedung.

g. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap yang terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.370.502.830,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen yang berasal dari pengakhiran kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi dengan PT Godang Tua Jaya pada tanggal 19 Juli 2016.

h. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan), diantaranya terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp38.991.543.704,00 berupa Gedung Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Makasar, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp32.519.989.459,00 antara lain berupa Rehab Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rehab Gedung KPUD Jakarta Utara, dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp24.711.078.500,00 antara lain berupa

Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pesanggrahan, Pembangunan Gedung Kantor Lurah Rawajati.

i. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp264.887.925.063,00 antara lain berupa Bangunan Rumah Susun.

j. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan, yang terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.833.951.000,00 berupa gedung LVRI, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp38.891.820,00 yang berupa Perencanaan, Pengawasan dan bahan baku bangunan.

k. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Jasa, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp16.493.932.860,00 antara lain berupa Rehab Bangunan Gedung, Penyusunan Dokumen dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp6.607.566.900,00.

l. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp83.081.542.630,00 antara lain berupa Perbaikan Rusun Marunda dan Rusun Muara Baru dan UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng sebesar Rp4.743.740.851,00 berupa Pemeliharaan Gedung Kantor.

m. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp83.865.125.772,00 antara lain berupa bangunan gedung pendidikan, Bangunan Rumah Jabatan dan Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda - Jakarta Barat sebesar Rp6.109.567.198,00 antara lain berupa Bangunan Gedung.

n. Penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Catat Barang, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.367.573.114,00 berupa Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.594.600.000,00 yang berupa Gedung Ex. Kodim 0505 JT/Pusat Kebudayaan Betawi 2543 m2 dari BPKAD dan PPKD sebesar Rp47.624.899.496,00 berupa bangunan gedung kantor permanen dan bangunan gudang Dinas Pendidikan.

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.428.875.144.387,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp.	134.885.804.983,00
2.	Diserahkan ke Pihak Lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2016	Rp.	6.335.041.770,00
3.	Diserahkan ke Pihak Lain di luar SKPD dari Aset Tetap (selain Belanja Modal Tahun 2016)	Rp.	12.726.825.748,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp.	20.228.473.669,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp.	15.014.366.420,00
6	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	Rp.	42.485.702.000,00
7.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang	Rp.	2.748.712.899,00
8.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pemeliharaan	Rp.	1.349.616.411,00

9.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan	Rp.	221.007.276,00
10.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang	Rp.	11.955.725.352,00
11.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2016) menjadi Persediaan	Rp.	3.088.383.787,00
12.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP	Rp.	990.678.887.067,00
13.	Koreksi Belanja Modal Tahun 2016 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp.	2.127.598.244,00
14.	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2016 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp.	159.359.766,00
15.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp.	121.914.473.146,00
16.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp.	42.787.046.000,00
17.	Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	Rp.	20.154.124.259,00
18.	Koreksi Lain-Lain	Rp	13.995.590,00
	Jumlah	**Rp.**	**1.428.875.144.387,00**

a. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Penghapusan, diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp28.162.392.400,00 berupa Bangunan Gedung Sekolah-Sekolah, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp21.665.145.799,00 berupa Gedung dan Bangunan, Gelanggang Olahraga Rawamangun sebesar Rp9.480.149.883,00 antara lain berupa Bangunan Olahraga Balap Sepeda Velodrome dan Wisma Atlet/Gedung Tembak di Jl. Pemuda dan Biro Umum Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.366.862.586,00 berupa Bangunan Blok F Balaikota Provinsi DKI Jakarta.

b. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan ke Pihak Lain di luar SKPD dari Belanja Modal Tahun 2016, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp3.217.292.932,00 antara lain berupa Pembangunan Sarana Olahraga, Rehab Lapangan Olahraga dan Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar

Rp1.715.858.390,00 berupa Pembangunan Lapangan Olahraga

c. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Diserahkan ke Pihak Lain di luar SKPD dari Aset Tetap (selain Belanja Modal Tahun 2016), terdapat pada Suku Dinas Pendidikan I Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp12.726.825.748,00 antara lain berupa Rehab Berat Sekolah dan Rehab Berat Rumah Dinas Jaga

d. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp14.818.959.000,00 berupa Pematangan Lahan dan Pembangunan Sarana Prasarana Dermaga dan Kantor Pengelola Kawasan Monas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp868.108.347,00 antara lain berupa Tugu Peringatan Lainnya dan Sumur Pantek di Taman

e. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat, diantaranya terdapat pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.6.644.080.000,00 berupa Bangunan Kantor, Gudang, Bengkel, Gedung garasi dan lainnya dan BLUD Rumah Sakit Duren Sawit sebesar Rp4.193.672.409,00 berupa Gedung dan Bangunan.

f. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya, diantaranya terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp42.485.702.000,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Sekolah Permanen.

g. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban

Barang, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp990.635.117,00 antara lain berupa Pembangunan cermin lalu lintas, Pembangunan RPPJ, Pembangunan Type F (Cremona) dan Pemeliharaan halte, dan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp429.590.000,00 yang berupa pembangunan rambu-rambu dan cermin lalu lintas untuk di wilayah Jakarta Pusat.

h. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pemeliharaan, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp574.111.320,00 antara lain berupa pemeliharaan gedung kantor, pemasangan lantai granit, pengecatan tembok dan Unit Pengelola Museum Prasasti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp267.152.147,00 antara lain berupa Pengecatan bidang kayu dan tembok, perakitan panel, dan pemasangan dinding keramik.

i. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Museum Kebaharian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.110.571.331,00 berupa penanaman Tanaman Mangrove di Pulau Onrust dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp.86.620.500,00 berupa Cermin lalu lintas.

j. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar

Rp11.915.115.352,00 berupa Rambu-rambu dan Cermin lalu lintas dan Kelurahan Kembangan Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp.38.610.000,00 berupa tenda Awning

k. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2016) menjadi Persediaan, yang terdapat pada Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Barat sebesar Rp3.088.383.787,00 berupa Plakat.

l. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp649.447.199.409,00 antara lain berupa Pembangunan Rumah Susun KS.Tubun Jakarta Barat, Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek Jakarta Timur dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp228.962.886.494,00 antara lain berupa Rehabilitasi Total Puskesmas dan Pembangunan Puskesmas.

m. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Belanja Modal Tahun 2016 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya), diantaranya terdapat pada BLUD Rumah Sakit Tarakan sebesar Rp.2.084.825.190,00 berupa Gedung dan Bangunan dan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp.42.773.054,00 berupa Gedung dan Bangunan.

n. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2016, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp136.973.717,00 berupa Pembangunan Gedung Kantor UPPD Mampang Prapatan, Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta

Utara sebesar Rp22.386.049,00 berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok.

o. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp80.350.330.634,00 antara lain berupa Rehabilitasi Total Gedung Sekolah dan Sudin Pendidikan II Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp24.233.905.951,00 berupa Gedung Sekolah dan Rehabilitasi Rumah Dinas Jaga Sekolah.

p. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Koreksi Lebih Catat Barang, yang terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp42.178.646.000,00 berupa Bangunan Gedung Eks. Kantor Walikota Jakarta Selatan dan Kelurahan Tanah Sereal Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp608.400.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen.

q. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp19.929.615.062,00 antara lain berupa Pembangunan Masjid raya Jakarta dan Pembangunan Gedung Kantor UPPD Ciracas dan Unit Pengelola Rumah Susun III sebesar Rp224.509.197,00 berupa Pengadaan konstruksi gedung.

r. Pengurangan aset tetap Gedung dan Bangunan karena koreksi Lain-Lain sebesar Rp13.995.590,00.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.706.413.042.580,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2016	Rp	3.294.463.844.694,00
2.	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Rp	1.796.597.243,00
3.	Penambahan dari Hutang Pihak Ke-3	Rp	1.746.444.730,00
4.	Penambahan dari Uang Muka	Rp	45.560.843.171,00
5.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	5.498.338.202,00
6.	Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap	Rp	14.037.455.960,00
7.	Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	152.966.332.859,00
8.	Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	Rp	145.650.684.331,00
9.	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	623.390.840.000,00
10.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	2.522.071.571,00
11.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	118.575.184.037,00
12.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	4.955.296.035 ,00
13.	Koreksi Kurang Catat Barang	Rp	295.249.109.747,00
	Jumlah	**Rp**	**4.706.413.042.580,00**

a. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2016, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.648.256.159.869,00 antara lain berupa Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok M-Cileduk, Pembangunan/ Peningkatan Jalan-jalan strategis di Provinsi DKI Jakarta dan Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan dan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 729.742.631.439,00 antara lain berupa Pengadaan JEDI, Kontruksi Saluran Air dan Pengadaan Kontruksi Bangunan Pantai.

b. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Pengadaan Dana Operasional BLUD, diantaranya terdapat pada BLUD Puskesmas Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp451.000.000,00 berupa pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), BLUD Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp392.213.728,00 berupa pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)/ TDU dan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan sebesar Rp336.921.015,00 antara lain berupa Lanjutan Rehab Peturasan Jalan Taman Margasatwa Utara (TMR) dan Lanjutan Rehab Pintu Air.

c. Penambahan aset tetap Jalan, Irigrasi dan Jaringan dari Penambahan Hutang Pihak Ke-3 terdapat pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.746.444.730,00 berupa Perbaikan pagar Taman sisi Utara dan Selatan.

d. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Penambahan dari Uang Muka terdapat pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp45.560.843.171,00 berupa Pembangunan Tanggul Penahan Banjir (JEDI).

e. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.753.058.100,00 berupa Dua Sumur berikut Mesin Pengukur Penurunan Muka Tanah (Ekstensometer) dan Satu Sumur berikut Mesin Pengukur Air Tanah (Piezometer) dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp836.197.794,00 berupa Pembangunan Sarpras Dermaga Tipe T.

f. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp 14.037.455.960,00 antara lain berupa Bak Equalisasi, Clean Water dan Sumur Artesis yang berasal dari pengakhiran kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi dengan PT Godang Tua Jaya pada tanggal 19 Juli 2016.

g. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan), diantaranya terdapat pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp142.741.806.609,00 antara lain berupa Pembangunan Tanggul Penahan Banjir (JEDI-1) di Waduk Melati Jakarta Pusat dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.528.607.000,00 antara lain berupa Pembangunan Jembatan Boulevard Timur-Jl.Pegangsaan Dua.

h. Penambahan aset tetap Jalan, Irigrasi dan Jaringan dari Reklasifikasi Aset Fasos Fasum menjadi Aset tetap, terdapat pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp145.650.684.331,00 yang antara lain berupa Konstruksi Saluran Box Culvent / Koker Hotel Sultan, Konstruksi Marga Jalan (Pekerjaan Jalan dan Bahu Jalan serta Pekerjaan Saluran Pelengkapan Jalan) dan Konstruksi Jalan Khusus Komplek.

i. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi dari Beban Persediaan, terdapat pada Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp623.390.840.000,00 yang antara lain berupa Armatur

Lengkap LED untuk Jalan Arteri (Max 40 dan 90 Watt) LED dengan Smart Sistem (Merk Phillip).

j. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi Beban Jasa, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp1.449.152.856,00 antara lain berupa Konsultan Pengawasan Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan di Kec.Penjaringan, Kec.Kelapa Gading dan Kec.Tanjung Priok dan Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp661.693.715,00 antara lain berupa Pengawasan (Supervision) Kegiatan Fisik Zona 1 dan Zona 2.

k. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kapitalisasi Beban Pemeliharaan, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp55.042.284.781,00 antara lain berupa Pemeliharaan Berkala Berat Jalan di Wilayah Kec. Cilincing, Kec.Tanjung Priok dan Kec.Penjaringan dan Suku Dinas Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp50.625.745.116,00 antara lain berupa Pemeliharaan Berkala Berat Jalan di Wilayah Kecamatan Kebon Jeruk dan Kecamatan Tambora.

l. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.904.622.105,00 berupa Selisih Pencatatan dengan Kartu Inventaris Barang KIB D dan Unit Pengelola Sampah Terpadu sebesar Rp909.720.000,00 antara lain berupa Drainase dan Jalan Operasional.

m. Penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Koreksi Kurang Catat Barang, terdapat pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta sebesar

Rp295.249.109.747,00 antara lain berupa Pembuatan Mekanikal Screen (Trash Rack) di Kawasan Kali Baru Timur, Intel Waduk Setiabudi Timur dan HEK Pasar Induk, Saringan Sampah ME-H Kali Sentiong dan Saringan Sampah Otomatis ME-H Kaliangke Pesing.

Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.441.867.602.770,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	48.550.564.438,00
2.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	6.155.263.627,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	168.754.493,00
4.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang	Rp	119.868.989,00
5.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pemeliharaan	Rp	55.610.438.671,00
6.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan	Rp	545.721,00
7.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang	Rp	129.657.200,00
8.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Pemeliharaan	Rp	33.052.000,00
9.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2016) menjadi Persediaan	Rp	23.683.000,00
10.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP	Rp	1.212.374.601.533,00
11.	Koreksi Belanja Modal Tahun 2016 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	Rp	6.807.077.879,00
12.	Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Rp	3.606.713.720,00
13.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	16.560.000,00
14.	Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka	Rp	108.270.807.500,00
15.	Koreksi Pengurangan Lain-lain	Rp	13.999,00
	Jumlah	**Rp**	**1.441.867.602.770,00**

a. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigrasi dan Jaringan karena Penghapusan terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp48.550.564.438,00

berupa Penghapusan Jembatan Besi Kalibata Jakarta Selatan.

b. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp5.204.978.000,00 antara lain berupa Bangunan Gedung Terbuka Permanen dan Kantor Pengelola Kawasan Monas sebesar Rp195.250.000,00 yang merupakan Panel Capasitor Bank.

c. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Timur sebesar Rp99.644.493,00 berupa PLTS Kapasitas Kecil (Lampu Penerangan Tenaga Surya) dan Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp69.110.000,00 berupa Jaringan Instalasi Listrik.

d. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang, diantaranya terdapat pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sebesar Rp72.600.000,00 yang merupakan Tiang Lampu Antik Besi Relief Alumunium Cabang 2 dan MCB Main Sircuit 300A dan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp25.818.989,00 berupa Atap Canopy JPO dengan Bahan Plat Aluminium Composite.

e. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pemeliharaan, diantaranya terdapat pada Suku

Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp55.371.108.710,00 antara lain berupa Perbaikan Jalan Lingkungan/Orang/Saluran Kec.Grogol Petamburan, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kalideres dan Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta sebesar Rp176.392.975,00 berupa Lampu Penerangan Kantor.

f. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan, terdapat pada UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing sebesar Rp545.721,00 yang berupa Kran Air ½".

g. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang, diantaranya terdapat pada Kelurahan Kapuk Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp49.852.000,00 berupa Instalasi Listrik dan Jaringan dan Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp28.243.800,00 berupa Jalan Khusus Komplek.

h. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Pemeliharaan, terdapat pada Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp33.052.000,00 berupa Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah dan Pengadaan Konstruksi Saluran Air.

i. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2016) menjadi Persediaan, diantaranya terdapat pada Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp19.602.000,00 berupa Lampu Sorot Armatur Lengkap

dan Badan Pembinaan BUMD dan Penanaman Modal sebesar Rp4.081.000,00 berupa Saklar Ganda dan Saklar Tunggal.

j. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.211.698.983.889,00 antara lain berupa Pembangunan Jalan Layang Kapt.Tendean-Blok M-Cileduk (Paket Trunojoyo), Pembangunan Jalan Layang Kapt.Tendean-Blok M-Cileduk (Paket SeskoAL) dan Pembangunan Jalan Layang Kapt.Tendean-Blok M-Cileduk (Paket Kebayoran Lama) dan Kantor Pengelola Taman Marga Satwa Ragunan sebesar Rp519.681.864,00 berupa Rehab Turap Kali Serua.

k. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal Tahun 2016 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya), diantaranya terdapat pada Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp5.072.408.182,00 antara lain berupa Pembangunan Turap Saluran Dengan Sheet Pile Gendong Cakung Drain, Peningkatan Turap Saluran dengan Dengan Sheet Pile Saluran Penghubung Karang Kendal dan Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.710.237.985,00 berupa Pengadaan Kontruksi Bangunan Rumah Pompa.

l. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal sebelum Tahun 2016, terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.067.302.968,00 antara lain berupa Peningkatan Jalan Suprapto dan Kapitaliasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Dinas Tata Air

Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp427.881.088,00 berupa saluran Drainasi

m. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Lebih Catat Nilai, terdapat pada Kelurahan Pekojan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp16.560.000,00 berupa Biaya Tenaga Kerja.

n. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka, terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp108.270.807.500,00 antara lain berupa Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan, Pembangunan FO Pancoran dan Pembangunan Underpass Matraman-Salemba.

o. Pengurangan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena Koreksi Pengurangan Lain-lain sebesar Rp 13.999,00

5. Aset Tetap Lainnya

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp251.267.916.514,00 yang terdiri dari:

1.	Belanja Modal Tahun Anggaran 2016	Rp	239.353.947.451,00
2.	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	Rp	10.665.964.731,00
3.	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Rp	301.262.700,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	880.375.532,00
5.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	66.366.100,00
	Jumlah	**Rp**	**251.267.916.514,00**

a. Penambahan aset tetap Lainnya dari Belanja Modal Tahun Anggaran 2016, diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp233.504.590.461,00, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.050.316.000,00 berupa pengadaan kursi

tribun penonton di Gelanggang Olahraga Remaja PKP dan Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta sebesar Rp855.850.505,00 berupa Patung dan perlengkapan Perpustakaan Museum Kebaharian dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp722.889.200,00 berupa *E-book*.

b. Penambahan aset tetap Lainnya dari Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta, diantaranya terdapat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp10.665.964.701,00 berupa RPTRA sebanyak 10 lokasi, penghijauan taman dan Buku Perpustakaan yang merupakan hibah dari LPMJ dan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp30,00 berupa 30 Hewan yang berasal dari sumbangan masyarakat, tangkapan liar dan hibah dari PPS Tegal alur.

c. Penambahan aset tetap Lainnya dari Pengadaan dari Dana Operasional BLUD, diantaranya terdapat pada Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp241.917.500,00 berupa Pengadaan Satwa untuk 11 jenis Hewan dan BLUD Puskesmas Kecamatan Palmerah Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp57.499.200,00 berupa Alat Kedokteran Ishihara.

d. Penambahan aset tetap Lainnya dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp246.950.000,00 berupa Tugu Peringatan Patung Kartini di Kawasan Monas dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp222.222.000,00 berupa Buku mengenai Updating Harga Satuan Per Meter Persegi Bangunan Gedung, Rumah Negara dan Pagar.

e. Penambahan aset tetap Lainnya dari Koreksi Kurang Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp36.471.000,00 berupa belanja modal rehabilitasi kantor PSBI Bangun Daya 1 dan Kelurahan Sukapura Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp29.895.100,00 berupa Taman Kantor.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp309.914.996.662,00 yang terdiri dari:

1.	Penghapusan	Rp	117.041.000,00
2.	Diserahkan ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Belanja Modal Tahun 2016	Rp	48.216.592,00
3.	Diserahkan ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2016)	Rp	38.369.100,00
4.	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	Rp	35.442.213.127,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	Rp	114.796.392,00
6.	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	Rp	857.859.200,00
7.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang	Rp	233.315.599.981,00
8.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan	Rp	134.376.420,00
9.	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang	Rp	10.013.873.412,00
10.	Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2016) menjadi Persediaan	Rp	29.669.980.187,00
11.	Koreksi Belanja Modal TA 2016 (Temuan, Klaim Bank garansi, dan koreksi lainnya	Rp	4.746.500,00
12	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	49.793.651,00
13.	Koreksi Lebih Catat Barang	Rp	108.131.100,00
	Jumlah	**Rp**	**309.914.996.662,00**

a. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Penghapusan, diantaranya terdapat pada Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 117.041.000,00 berupa 119 jenis Hewan yang mati antara lain Biawak Komodo, Angsa Hitam dan Itik Benjut.

b. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Diserahkan ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Belanja Modal Tahun 2016, diantaranya terdapat pada Kelurahan Pegangsaan Dua Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp16.170.000,00 berupa buku-buku umum yang diserahkan ke masyarakat dan Kelurahan Kramat Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp13.995.592,00 berupa *Vertical Gordyn* yang diserahkan ke RW setempat.

c. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Diserahkan ke Pihak Lain di Luar SKPD Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2016), diantaranya terdapat pada Kelurahan Serdang Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp38.369.100,00 berupa Alat Musik yang diserahkan ke masyarakat.

d. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Antar Aset Tetap, diantaranya terdapat pada PSBN Cahaya Bathin Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp8.835.199.000,00 berupa Bangunan Gedung WBS lantai 1 dan 2 dan PSBG Belaian Kasih Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp7.295.718.000,00 berupa Bangunan Gedung Kantor PSBG Belaian Kasih dan PSBL Harapan Sentosa 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3.439.256.300,00 berupa ruang galeri, ruang aula, ruang pelatihan, asrama putra, rumah dinas, asrama putri workshop, halaman dan menara air.

e. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat, diantaranya terdapat pada Kelurahan Petojo Utara Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp82.266.392,00 berupa Alat-alat Kantor seperti Laptop, CPU, Monitor dan Kelurahan Kuningan Barat Kota Administrasi Jakarta Selatan

sebesar Rp26.730.000,00 berupa Meja Tennis dan Keyboard.

f. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud, diantaranya terdapat pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp722.889.200,00 berupa reklasifikasi E-Book dan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp134.970.000,00 berupa Software Anti Virus, Ms.Office dan SQL.

g. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang, diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp233.304.621.981,00 berupa Dana BOS, Kelurahan Sukabumi Selatan Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp5.225.000,00 berupa Conblock dan PSBI Bangun Daya 2 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.758.600,00 berupa Tanaman Anggrek Bulan dan Anggrek Douglas Kecil.

h. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan, diantaranya terdapat pada Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp83.239.530,00 berupa Tanaman dan Tanaman Hortikultura dan Kelurahan Sunter Agung Kota Administrasi Jakarta Utara sebesar Rp35.640.000,00 berupa Al-Quran.

i. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang, diantaranya terdapat pada SATPOL PP Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.231.337.455,00 berupa Peralatan Rescue dan Suku Dinas Perhubungan Kota

Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp385.375.594,00 berupa alat-alat lalu lintas seperti Separator, Pagar pemisah jalan dan Pagar Penunjang Keselamatan Selasar serta TPO.

j. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Tahun 2016) menjadi Persediaan, diantaranya terdapat pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp29.562.951.943,00 berupa Pohon-pohon seperti Pohon Spathodea, Kamboja Bali, Yang Liu, dan Mahoni dan Kecamatan Senen Kota Administrasi Jakarta Pusat sebesar Rp97.148.244,00 berupa Tanaman.

k. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena koreksi Belanja Modal tahun 2016 (Temuan, Klaim Bank garansi, dan koreksi lainnya) terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp4.746.500,00.

l. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Lebih Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Kelurahan Pela Mampang Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp49.788.651,00 berupa Partisi/Penyekat Ruangan dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.000,00 berupa Buku Hukum Perdata.

m. Pengurangan Aset Tetap Lainnya karena Koreksi Lebih Catat Barang, diantaranya terdapat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp108.131.100,00 berupa bantal yang ada di JIC sebanyak 302 buah.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.452.764.183.215,00 yang terdiri dari:

1.	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Rp	1.639.653.552,00
2.	Hutang Pihak Ke-3	Rp	626.332.400,00
3.	Penambahan dari Uang Muka	Rp	87.854.000.366,00
4.	Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP	Rp	2.203.091.342.900,00
5.	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Rp	13.332.328.282,00
6.	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Rp	4.302.863.304,00
7.	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	63.702.281.777,00
8.	Koreksi Kurang Catat Nilai	Rp	78.215.380.634,00
	Jumlah	**Rp**	**2.452.764.183.215,00**

a. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Pengadaan dari Dana Operasional BLUD, terdapat pada Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp1.639.653.552,00 antara lain berupa rehab pagar keliling Taman Margasatwa Ragunan.

b. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Hutang Pihak Ke-3, terdapat pada Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp626.332.400,00 antara lain berupa konstruksi Puskesmas Kelurahan Rawa Barat Kota Adm. Jakarta Selatan dan konstruksi Puskesmas Kelurahan Pondok Labu Kota Adm. Jakarta Selatan.

c. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Penambahan dari Uang Muka, terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp87.854.000.366,00 antara lain berupa pembangunan jalan layang paket Kebayoran Lama, Paket Tendean,

paket Trunojoyo, Paket Taman Puring dan Paket Adam malik.

d. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP, diantaranya terdapat pada Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp1.211.706.111.889,00 antara lain berupa pembangunan jalan layang busway Tendean-Blok M-Ciledug, Pembangunan simpang tidak sebidang dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp649.447.199.409,00 antara lain berupa pembangunan rumah susun, pembangunan kantor Dinas Pemadam Kebakaran, pembangunan masjid raya Jakarta, pembangunan blok F dan GWT Balaikota Provinsi DKI Jakarta dan penyelesaian rehab total.

e. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kapitalisasi Beban Persediaan, terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp13.332.328.282,00 antara lain berupa pembangunan Gedung Koni

f. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kapitalisasi Beban Jasa, diantaranya terdapat pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.968.258.320,00, antara lain berupa management konstruksi, pembangunan puskesmas Kecamatan dan BLUD RS Koja sebesar Rp1.125.470.484,00.

g. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan, terdapat pada BLUD RS Koja sebesar Rp63.702.281.777,00 antara lain berupa belanja pemeliharaan gedung kantor Blok B, Blok C dan Blok E.

h. Penambahan aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Koreksi Kurang Catat Nilai, terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp78.215.380.634,00 antara lain berupa rehab total sekolah.

Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp455.738.751.880,00 yang terdiri dari:

1.	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Rp	226.215.000,00
2.	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Rp	318.890.889.896,00
3.	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Rp	5.485.606.166.00
4.	Koreksi Lebih Catat Nilai	Rp	131.136.040.818,00
	Jumlah	**Rp**	**455.738.751.880,00**

a. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi Belanja Tahun 2016 ke Beban Jasa, diantaranya terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta Rp226.215.000,00 diantaranya berupa Kajian Bantuan Perbaikan Rumah di Pemukiman Kumuh.

b. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan), diantaranya terdapat pada Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp142.741.806.609,00, berupa pembangunan *Jakarta Urgent Flood Mitigation Project Dragging and Embankment of Ciliwung – Gunung Sahari Draine & Waduk Melati Sub –Projects ICB Package* dan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp24.711.078.500,00 merupakan pembangunan gedung parkir Walikota Jakarta Timur,

Rehab total kantor Camat Ciracas, rehab total gedung kantor camat makasar.

c. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Atas Temuan Belanja Modal Sebelum Tahun 2016, terdapat pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp5.446.946.961,00 berupa pembangunan rumah su sun Cakung Barat, pembangunan rumah susun untuk lokasi binaan, pembangunan kantor dinas pemadam kebakaran, pembangunan masjid raya Jakarta, pembangunan rusun KS Tubun, pembangunan rumah susun Jl. Raya bekasi dan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp38.659.205,00 berupa kelebihan pembayaran kegiatan pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT Segmen Raya Bekasi – Cipinang dan segmen Marunda – Raya Bekasi.

d. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan karena Koreksi Lebih Catat Nilai, diantaranya terdapat pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp50.446.587.523,00, antara lain berupa pembangunan Gedung Sekolah SDN Balimester 06, SMPN 252, SMPN 186, SDN Rawabadak Selatan 11/12, SMPN 125, SMPN 282, SMPN 197 dan SMPN 112 serta BLUD RS Duren Sawit Jakarta sebesar Rp477.732.810,00 disebabkan karena batal dilaksanakan dan anggaran sudah dikembalikan ke Perbendaharaan dan Kas Daerah pada tahun 2015. Disamping itu pengurangan karena koreksi ini diantaranya juga terdapat pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp79.941.926.000,00 yang terdiri dari Rp49.896.000,00 merupakan koreksi atas biaya appraisal pembebasan tanah Tahun 2014 yang batal dilaksanakan dan Rp79.892.030.000,00 yang merupakan reklas Uang

Muka Kerja (UMK) atas pengadaan bus transjakarta tahun anggaran 2013.

Nilai UMK pengadaan Busway Tahun 2013 sebesar Rp79.892.030.000,00 tersebut merupakan koreksi reklas ke dalam tiga akun aset, masing-masing sebesar Rp55.739.570.000,00 direklas ke UMK di SKPD, sebesar Rp10.020.000.000,00 direklas ke akun piutang bagian lancar tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta 2013, dan sebesar Rp14.132.460.000,00 direklas ke akun tuntutan pengembalian UMK. Reklas ke dalam akun piutang dan aset lainnya tersebut dillakukan berdasarkan klasifikasi sifat ketertagihan dan tanggal jatuh tempo pelunasan.

Pembayaran uang muka sebesar Rp79.892.030.000,00 yang sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI kepada pihak ketiga untuk pengadaan Busway Transjakarta tahun 2013, yang semula tercatat sebagai KDP dan kemudian direklas menjadi UMK dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.40

UMK Pengadaan Busway Tahun 2013 Yang Diakui Sebagai KDP

Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Bus	Nama Perusahaan	Nama Paket	Jumlah Unit	Nilai Kontrak	Nilai Uang Muka
1	Articulated Bus = AB	PT. Puterisasi Utama Sari	Paket 2	12	40.536.000.000	7.735.200.000
2	Articulated Bus = AB	PT. Saptaguna Daya Prima	Paket 3	30	108.745.500.000	20.879.100.000
3	Singgle Bus = SB	PT. Industri Kereta Api Persero	Paket 1	36	71.280.000.000	13.752.000.000

No	Jenis Bus	Nama Perusahaan	Nama Paket	Jumlah Unit	Nilai Kontrak	Nilai Uang Muka
4	Singgle Bus = SB	PT. Putera Adi Karyajaya	Paket 3	36	68.824.400.000	12.525.645.000
5	Singgle Bus = SB	PT. Ifani Dewi	Paket 4	35	71.280.000.000	11.988.900.000
6	Singgle Bus = SB	PT. Adi Teknik Equipindo	Paket 5	35	65.972.900.000	13.011.185.000
			JUMLAH		**426.638.800.000**	**79.892.030.000**

Nilai aset tetap per 31 Desember 2016 tersebut sudah termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap.

Selain aset tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki sebanyak 34 sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 8.409.321,00m^2, dengan rincian sebagaimana disajikan dalam lampiran 18.

HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang yang

mewakili Negara. Pemegang hak pengelolaan adalah instansi pemerintah, jawatan atau badan milik Negara.

Lahan dengan bersertifikasi HPL tersebut di antaranya digunakan sebagai aset fasilitas umum, untuk pembangunan gedung pemerintah, dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2016 tersebut termasuk aset ex. UP Transjakarta Busway yang saat ini masih dicatat sebagai aset Dinas Perhubungan karena masih menunggu penyelesaian proses penilaian dan penerbitan Peraturan Daerah inbreng kepada PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan BUMD PT Transjakarta akan menginbrengkan/menyerahkan aset BLUD Transjakarta sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Transjakarta, setelah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Independen.

Untuk masa transisi telah diterbitkan Pergub Nomor 99 Tahun 2014 tentang Transisi Pengalihan Pengelolaan Transjakarta dari Unit Pengelola Transjakarta Busway ke Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta (Transjakarta) dan Keputusan Gubernur Nomor 1006 Tahun 2015 tentang Pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta dengan ketentuan Menetapkan pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh PT Transjakarta, berupa lahan depo, halte dan sarana pendukung, bangunan gedung kantor, sarana penunjang dan invetaris kantor, kendaraan dinas operasional dan bus. Pemanfaatan barang milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud berlaku sampai dengan penyerahan Barang Milik Daerah sebagai penyertaan modal (inbreng). PT Transjakarta dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau

mengubah peruntukannya tanpa seizin tertulis Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tentang Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2008, telah melakukan proses sertifikasi tanah.

Dalam tahun 2015 telah menerima 2 Sertifikat Hak Pakai yaitu Jalan Tb Simatupang RT.009/02 seluas 2979m^2 dan Jalan Palmerah Barat No. 3 RT 001/002 seluas 4.571 m$^{2.}$.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya penyelesaian atas aset tanah yang bermasalah pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi dan peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung diantaranya:

1. 16 bidang tanah seluas 503.824 m^2 masih dalam proses di tingkat pengadilan negeri;
2. 10 bidang tanah seluas 339.427 m^2 dalam proses di tingkat pengadilan tinggi;
3. 11 bidang tanah seluas 563.220,99 m^2 dalam proses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung;
4. 9 bidang tanah seluas 165.257,72 m^2 dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung di antaranya merupakan sengketa tanah di Meruya Selatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570 K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863 K/Pdt/1999 Tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak PT Portanigra.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan

Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No.161/PDT/G/ 1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 guna dilakukan pengosongan atas tanah seluas ± 78 ha milik PT Portanigra yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan.

Upaya hukum atas perkara tersebut adalah sebagai berikut :

1. Upaya hukum Perlawanan (*derden verzet)* atas penetapan eksekusi

   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap *(in kracht van gewijsde)* yang menguatkan putusan pengadilan tinggi bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum.

2. Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara Kepemilikan Tanah

   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m^2 yang terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di dalam Komplek Perumahan kavling DKI seluas 248.162 m^2, di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m^2 dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m^2.

Putusan tersebut juga menyatakan menghukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi materiil sebesar Rp291.422.000.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT Portanigra secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam gugatan perlawanan.

Selanjutnya, telah dilakukan penyerahan memori Peninjauan Kembali nomor 132/Pdt.G/2008/PN.JKT.BAR. Jo. No.2971 K/Pdt/2010 tanggal 5 Juli 2013 dan sudah dilakukan persidangan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 20 Juni 2013 dengan novum (bukti baru) berupa :

1. Surat Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010
2. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara perdata nomor 1284 K/PDT/2009. Jo. No. 168/Pdt.G/2007/ PN.Jkt.Bar tanggal 14 Juli 2010.

Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap Peninjauan Kembali tersebut. Sambil menunggu putusan Mahkamah Agung terhadap peninjauan kembali tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 69 Tahun 2013 Tanggal 27 Juni 2013 tentang

Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.

Selain pemasalahan tersebut di atas, saat Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun, terdapat gugatan tuntutan perdata dari Pihak Ketiga atas pencatatan Aset Tetap Tanah yang tercatat pada Laporan Keuangan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKPKP) Tahun 2015.

Tuntutan Perdata tersebut dari TOETI NZ SOEKARNO dkk yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2016 dengan Nomor Gugatan 258/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST.

Materi gugatan penggugat yaitu atas indikasi perbuatan melawan hukum oleh DKPKP yang mencatat Aset Tanah Penggugat seluas 46.913 m² dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) DKPKP, dengan tuntutan antara lain; 1) pencatatan Tanah dalam KIB A DKPKP melanggar hukum; 2) kerugian materil karena adanya penahanan penundaan pembayaran senilai Rp.200.000.000.000,00; 3) *Lost Opportunity* senilai Rp.500.000.000,00; dan 4) kerugian immateril Rp.800.000.000,00

Dalam Laporan Keuangan DKPKP per 31 Desember 2015 tercatat Aset Tanah senilai Rp2.955.165.380.885,00 yang terdiri dari 142 bidang tanah seluas 2.742.827,31 m², di antaranya seluas 101.395 m² digunakan sebagai kebun pembibitan di Kecamatan Cengkareng Barat, termasuk di dalamnya lahan seluas 46.913 m² yang digugat.

Adapun tuntutan keperdataan tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya mutasi penambahan Aset Tetap Tanah yang bersumber dari pembelian Dinas Perumahan dan Gedung Pemda (DPGP) seluas 46.913 m² yang terdiri dari 3 Sertifikat

yaitu SHM Nomor 13069/Cengkareng Barat seluas 34.503 m², SHM Nomor 13293/Cengkareng Barat seluas 9.359 m² dan SHM Nomor 13430/Cengkareng Barat seluas 3.061 m².

Atas tuntutan/gugatan keperdataan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum dan mengambil tindakan hukum lainnya yang diperlukan dalam upaya pemulihan hak-hak dan pengamanan Aset Pemprov DKI Jakarta.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima aset Gedung dan Bangunan dari dua pengembang sebagai penyerahan aset yang merupakan sebagian dari jenis/bentuk Tambahan Kontribusi Reklamasi kepada Pemprov DKI Jakarta yaitu:

1. PT Muara Wisesa Samudera Pulau G, berupa Bangunan Rusunawa Daan Mogot senilai Rp89.655.700.000,00 dan;

2. PT Jaladri Kartika Pakci Pulau I, berupa Pembangunan Rusunawa Muara Baru senilai Rp90.539.800.000,00.

Serah terima yang telah dilakukan antara Pemprov DKI dengan Pengembang dilakukan berdasarkan Persetujuan Prinsip Pemenuhan sebagian kewajiban tambahan kontribusi reklamasi Pantai Utara.

Berdasarkan Persetujuan Prinsip bahwa penyerahan aset yang dilakukan oleh dua Pengembang yaitu PT MWS Pulau G dan PT JKP Pulau I pada Tahun 2015 merupakan sebagian dari Tambahan Kontribusi Reklamasi diluar Kontribusi sebesar 5% (lima persen), sedangkan kewajiban Tambahan Kontribusi Reklamasi secara keseluruhan akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur secara tersendiri. Sampai dengan saat ini, Pemprov. DKI Jakarta masih dalam proses komunikasi dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk

penetapan perda yang diantaranya mengatur mengenai besaran persentase kewajiban tambahan kontribusi, sehingga belum dapat memastikan nilai kewajiban tambahan kontribusi yang harus dibebankan kepada pengembang.

Selain itu, saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan peningkatan akuntabilitas penatausahaan aset tetap sebagaimana diatur dalam Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 187 Tahun 2015 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2016. Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan pertama kali yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) per 31 Desember 2016. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Tetap pertama kali memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset tetap sampai dengan Tahun 2015, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2016. Nilai Buku Aset tetap per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2016		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	295.047.301.522.144,00	-	295.047.301.522.144
Peralatan dan Mesin	20.694.146.032.418,00	(10.928.876.502.095)	9.765.269.530.323
Gedung dan Bangunan	25.196.220.526.094,00	(8.736.621.964.078)	16.459.598.562.016
Jalan, Irigasi dan Jaringan	35.571.427.457.658,00	(13.049.792.501.421)	22.521.634.956.237
Aset Tetap Lainnya	1.364.063.565.649,00	(162.976.903.418)	1.201.086.662.231
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.626.604.247.917,00	-	4.626.604.247.917
Jumlah	**382.499.763.351.880,00**	**(32.878.267.871.012)**	**349.621.495.480.868**

5.5.1.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp1.046.215.749.016,00. Selama tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan nilai Dana Cadangan sebesar Rp81.575.989.831,00 yang berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana

Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp1.127.791.738.847,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah per 31 Desember 2016 tersaji dalam tabel 5.41 sebagai berikut.

Tabel 5.41

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah

Per 31 Desember 2015 dan 2016

(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Suku Bunga J.Tempo Jan 2015	Jangka Waktu	No Rekening	Jatuh Tempo	Saldo Awal 31 Des 2015	Bunga Jatuh Tempo Jan-Jun 2016	Saldo Dana Cadangan 31 Desember 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8
1	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00625-0	14-Dec-16	584.672.358.260	45.518.136.342	630.190.494.602
2	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00666-7	25-Dec-16	45.160.029.000	3.515.817.742	48.675.846.742
3	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00679-9	11-Dec-16	285.302.033.931	22.337.018.578	307.639.052.509
4	Bank DKI Cab. Abdul Muis	7,50%	1 Bulan	139-25-00680-2	16-Dec-16	131.081.327.825	10.205.017.169	141.286.344.994
Jumlah						**1.046.215.749.016**	**81.575.989.831**	**1.127.791.738.847**

5.5.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp40.995.690.680.082,00 dan Rp45.653.550.146.654,00 dengan rincian dalam tabel 5.42 sebagai berikut:

Tabel 5.42

Aset Lainnya

Per 31 Desember 2016 dan 2015

ASET LAINNYA		31 Desember 2016	31 Desember 2015
1.	Tagihan Penjualan Angsuran	48.524.770.867,00	50.949.015.300,00
2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
3.	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	6.385.119.814.778,00	6.554.369.249.425,00
4.	Aset Tidak Berwujud	220.728.943.724,00	200.362.096.132,00
5.	Akumulas Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(148.473.981.973,00)	(102.917.195.195,00)
6.	Aset Lain-Lain	36.863.408.468.608,00	40.223.272.327.802,00
7.	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(400.512.727.332,00)	(278.165.572.423,00)
8.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.973.104.608.590,00)	(994.319.774.387,00)
Jumlah Aset Lainnya		**40.995.690.680.082,00**	**45.653.550.146.654,00**

5.5.1.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan yang dimiliki Pemprov DKI kepada penghuni rusun yang melakukan pembelian unit rusun secara angsuran.

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. Saldo Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2016 sebesar Rp 48.524.770.867,00 dan 2015 sebesar Rp 50.949.015.300,00. Terdapat mutasi penurunan Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp2.424.244.433,00, hal ini terjadi akibat adanya pembayaran angsuran cicilan rumah susun sewa beli.

Tabel 5.43

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran

Per 31 Desember 2016

No	Nama Rusun	Jumlah Unit	Nilai Tagihan
1	Tambora III	98	1.859.901.462
2	Bendungan Hilir II	614	752.387.766
3	Jatibunder	40	246.606.570
4	Tanah Tinggi	428	1.798.312.223
5	Karet Tengsin I	152	1.222.689.016
6	Petamburan	600	14.690.234.672
7	Karet Tengsin II	308	21.354.838.973
8	Tebet Barat I	320	14.482.535
9	Tebet Barat II	120	735.890.260
10	Bidara Cina	688	5.849.427.390
Total		**3.368**	**48.524.770.867**

5.5.1.5.2 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2016 dan 2015 sebesar Rp0,00. Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2016 disajikan nihil karena sudah diklasifikasikan kembali sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi di kelompok Aset Lancar.

5.5.1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp6.385.119.814.778,00 dan Rp6.554.369.249.425,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)	3.024.998.547.572,00	3.050.991.629.572,00
2	Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)	1.122.210.704.808,00	1.122.210.704.808,00
3	Kerjasama Operasi (KSO)	268.354.876.000,00	268.354.876.000,00
4	Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	1.969.555.686.398,00	2.112.812.039.045,00
	Jumlah	**6.385.119.814.778,00**	**6.554.369.249.425,00**

Nilai aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan akumulasi aset kemitraan pihak ketiga berdasarkan hasil dari sensus aset kerjasama yang dilaksanakan pada tahun 2009 dan penerimaan aset tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Seluruh Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT, BTO dan KSO dicatat dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sebagaimana disajikan dalam lampiran 10.

Penambahan aset kemitraan dengan pihak ketiga periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 dicatat sebesar nilai perolehan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) serta Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk aset yang dikerjasamakan atau diserahterimakan.

Nilai aset kerjasama hasil sensus tahun 2009 berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008 tentang tatacara penilaian dan penetapan nilai barang daerah dalam rangka Sensus Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Penilaian tanah yang diperoleh sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) Tahun 2007 tanah tersebut atau tanah disekitarnya dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-686/WPJ.04/2006 tanggal 26 Desember 2006 sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan; sedangkan untuk Penilaian tanah yang pengadaanya

dilakukan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan nilai bukti-bukti perolehan;

b. Penilaian kendaraan bermotor untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dilakukan berdasarkan nilai NJKB Tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, sedangkan untuk penilaian kendaraan berdasarkan bukti pembelian/perolehan;

c. Penilaian Gedung dan Bangunan untuk perolehan sebelum Tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m^2 sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti perolehan; dan

d. Penilaian Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk perolehan sebelum tahun 2008 dinilai berdasarkan pada perhitungan Tabel Biaya Konstruksi Bangunan per m^2 sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2008, sedangkan untuk pengadaan Tahun 2008 dan setelahnya berdasarkan bukti-bukti perolehan.

Atas kerjasama sebagian aset tanah dan bangunan yang merupakan bagian dari aset tanah dan bangunan yang dikelola oleh SKPD seperti pemanfaatan ruang untuk ATM, pemanfaatan ruang melalui pinjam pakai kepada organisasi masyarakat antara lain Korpri, Dharma Wanita, Bawaslu, Kadin, dan Koperasi Karyawan, dinilai sebesar Rp 0,00 karena sudah dicatat sebagai satu kesatuan aset di SKPD Pengguna Barang.

Mutasi Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 turun sebesar Rp169.249.434.647,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Koreksi nilai Aset Bangun Guna Serah (BOT), Bangun Serah Guna (BTO), dan Kerjasama Operasi (KSO)

Pada Tahun 2016 dilakukan penyesuaian nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk BOT, BTO dan KSO, berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi BAST dari pihak ketiga atas aset yang dikerjasamakan dalam bentuk BOT,BTO dan KSO. Penyesuaian nilai aset BOT,BTO dan KSO sebagai berikut:

1) Aset Kerjasama dengan PT Gerak Maju Abadi, dilakukan koreksi penambahan nilai sebesar Rp1.900.000.000,00 akibat Adanya kurang catat atas saldo audited 2015 untuk bangunannya.
2) Aset Kerjasama dengan PT AGB Tuna dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp 22.806.000.000,00 dikarenakan adanya *double* pencatatan dengan KIB Dinas Kelautan; dan
3) Aset Kerjasama dengan PT AGB Tuna dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp 5.087.082.000,00 dikarenakan adanya *double* pencatatan dengan KIB Dinas Kelautan.

b. Penambahan PKS Baru Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya

Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa umum dan pinjam pakai, diantaranya merupakan kerjasama pemanfaatan atas aset yang diperoleh dari fasos-fasum. Berikut rincian penambahan PKS:

1) Aset Kerjasama dengan PT Lingkar Seni Indonesia, dilakukan koreksi penambahan nilai sebesar Rp3.562.770.000,00 akibat Adanya kurang catat atas saldo audited 2015 untuk tanah dan bangunannya serta double pencatatan dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena yang dikerjasamakan keseluruhan

tanah dan bangunan Ex imigrasi maka pencatatan dilakukan oleh PPKD;

2) Aset Kerjasama dengan Bareskrim Polri terdapat koreksi penambahan nilai sebesar Rp35.370.839.284,00 yang terdiri dari Rp35.050.932.000,00 akibat adanya kurang catat atas nilai tanah dan gedung atas pencatatan dengan Dinas Bina Marga dan Rp319.907.284,00 akibat adanya kurang catat atas nilai gedung atas pencatatan dengan Dinas Tata air;
3) Aset Kerjasama dengan Yayasan Diannanda, dilakukan koreksi penambahan nilai sebesar Rp2.982.805.158,00, merupakan Fasos Fasum berdasarkan BAST No. 792 tahun 1996;
4) PT Swadaya Niaga Jaya (smesco) dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari fasos fasum dari PT Jakarta Realty Tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp105.175.590.000,00, dengan nilai tanah sebesar Rp52.617.390.000,00 dan nilai bangunan sebesar Rp52.558.200.000,00;
5) Yayasan Tanimbar Lestari dalam bentuk sewa umum atas sebidang tanah dan bangunan yang berasal dari Fasos Fasum, sebesar Rp.1.509.000.000,00 BAST: 791 tahun 1996 tanggal 08 Mei 1996 ;
6) Yayasan Safa Marwah dalam bentuk Tanah fasos fasum dari Yayasan Dawah Qaryah Thayyibah BAST: Non/YayasanDawahQaryahThayyibah/200499/3 Tanggal 20 April 1999, dan Bangunan fasos fasum dari Yayasan Safa Marwah BAST: Non/ YayasanSafaMarwah/270406/50 tanggal 27 April 2006 sebesar Rp3.238.112.000,00;
7) Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam bentuk sewa umum atas bangunan yang berasal dari Fasos Fasum, dengan nilai bangunan sebesar Rp2.817.713.120,00

dari PT Media Indra Buana Tanggal 30 Desember 2008, 07 Januari 2009 dan 18 April 2011;

8) Yayasan Suhargo Gondokusumo dalam bentuk sewa umum atas tanah dan bangunan yang berasal dari PT Satwika Tgl 17 November 2015 senilai 48.931.383,00;
9) Aset kerjasama dengan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Timur koreksi penambahan sebesar Rp4.095.086.630,00 , adanya transfer nilai gedung dari KIB BPKAD ke PPKD;
10) Komandan Detasemen Polisi Militer Jaya 2 dalam bentuk Pinjam Pakai, berupa 1 unit Kendaraan Dinas Operasional dengan sebesar Rp331.320.000,00;
11) Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dalam bentuk pinjam pakai, berupa 11 unit kendaraan Operasional dengan nilai sebesar Rp3.753.445.710,00;
12) Kejaksaan Tinggi Daerah DKI Jakarta dalam bentuk pinjam pakai, berupa 1 unit kendaraan Operasional dengan nilaisebesar Rp429.660.000,00;
13) Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam bentuk pinjam pakai, berupa 3 unit kendaraan Operasional dengan nilai sebesar Rp755.297.261,00.

c. Pengurangan Aset kerjasama Pihak Ketiga Lainnya karena koreksi nilai yang disebabkan double pencatatan, yaitu sebagai berikut:

1) Aset Kerjasama dengan PT Prima Indo Bahari dilakukan koreksi pengurangan sebesar Rp8.137.500.000,00 dikarenakan adanya *double* pencatatan dengan KIB Dinas Kelautan, karena aset-aset yang dikerjasamakan hanya sebagian sehingga pencatatan tetap dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna barang;
2) Aset Kerjasama dengan Kop Taman Margasatwa Ragunan adanya koreksi pengurangan sebesar Rp12.493.000.000,00 akibat *double* pencatatan dengan

KIB Taman Margasatwa Ragunan karena aset yang dikerjasamakan hanya sebagian sehingga pencatatantetap dilakukan oleh SKPD lama;

3) Aset Kerjasama dengan PT Harco Jaya Abadi koreksi pengurangan sebesar Rp83.659.700.000,00 adanya *double* pencatatan dengan KIB Taman Margasatwa Ragunan atas Bangunan terbuka, Danau Buatan dan Tanah Jalan di Areal Taman Margasatwa Ragunan dikarenakan, aset-aset yang dikerjasamakan hanya sebagian sehingga pencatatan tetap dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna barang;

4) Aset kerjasama dengan Yayasan Nurmala Hikmah koreksi pengurangan bangunan senilai Rp173.264.000,00 karena bangunan sudah dilelang tahun 2016 sesuai dengan SK Penghapusan Bangunan No. 260/2017;

5) Aset Kerjasama dengan CV Satu Nafas koreksi pengurangan sebesar Rp124.000.000.000,00 adanya *double* pencatatan atas sebagian aset Taman Margasatwa Ragunan yang dikerjasamakan dan dikoreksi karena pencatatan tetap dilakukan oleh SKPD sebagai pengguna barang;

6) Aset kerjasama dengan Pengadilan Negeri/Niaga/Tipikor dan hubungan Industrial Jakarta Pusat koreksi pengurangan sebesar Rp330.210.000,00, karena sudah tercatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

d. Transfer Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya ke SKPD

Selain penambahan perjanjian kerjasama baru, terdapat mutasi kurang atas aset kemitraan dengan pihak ketiga senilai Rp1.120.450.000,00 yang disebabkan oleh berakhirnya masa perjanjian dalam bentuk pinjam pakai kendaraan dinas operasional. Adapun kendaraan tersebut

telah dikembalikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum ke Pusat Penyimpanan Barang Daerah.

Pada tahun 2016, dilakukan pengakhiran kerjasama pengelolaan dan pengoperasian TPS Bantar Gebang antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya, dengan nilai aset sebesar Rp125.542.250.810,00 yang tercatat di neraca Dinas Kebersihan pada akun Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya.

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada tahun 2015, termasuk Aset Tetap yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga). Mekanisme perhitungan penyusutan dilakukan sesuai dengan Instruksi Gubernur ProvinsiDKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali.

Penyusutan yang dilakukan pada Aset Tetap berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi dan/atau berpedoman kepada Peraturan Gubernur No. 132 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan.

Penyusutan atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sampai dengan Tahun 2015, dan beban penyusutan sebagai beban tahun 2016.

Nilai Buku untuk Aset BOT, BOT dan per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut :

Jenis Aset BOT dan BTO	31 Desember 2016		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	3.896.435.692.000,00	0,00	3.896.435.692.000,00
Gedung dan Bangunan (BOT)	62.438.462.572,00	61.764.162.572,00	674.300.000,00
Gedung dan Bangunan (BTO)	237.616.779.808,00	143.240.511.633,00	94.376.268.175,00
Jumlah	**4.196.490.934.380,00**	**205.004.674.205,00**	**3.991.486.260.175,00**

Nilai Buku Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat disajikan sebagai berikut::

Jenis Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Lainnya	31 Desember 2016		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	1.543.848.480.299,00	0,00	1.543.848.480.299,00
Peralatan dan Mesin	16.222.237.597,00	12.757.887.257,00	3.464.350.340,00
Gedung dan Bangunan	409.461.058.502,00	182.726.255.870,00	226.734.802.632,00
Aset Tetap Lainnya	23.910.000,00	23.910.000,00	0,00
Jumlah	**1.969.555.686.398,00**	**195.508.053.127,00**	**1.774.047.633.271,00**

5.5.1.5.4 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp220.728.943.724,00 dan Rp200.362.096.132,00.

Aset Tidak Berwujud di antaranya terdiri dari aplikasi sistem informasi yang dibangun untuk menunjang kegiatan operasional dan kegiatan pelayanan masyarakat, serta buku digital yang digunakan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah.

5.5.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tahun 2015. Mekanisme perhitungan amortisasi dilakukan sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi pertama kali dilakukan pada Aset Tidak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Nilai yang dapat diamortisasi pertama kali merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun 2015. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penetapan masa manfaat aset tidak berwujud pada amortisasi pertama kali adalah 5 (lima) tahun kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud, amortisasi dilakukan selama masa manfaat tercantum dalam dokumen perolehan aset.

Nilai Buku Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2016 dapat disajikan sebagai berikut:

No.	SKPD	31-Des-16		
		Harga Perolehan	Akumulasi Amortisasi	Nilai Buku
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.757.393.554	(31.855.246.415)	19.902.147.139
2	Dinas Pelayanan Pajak	31.015.946.972	(15.269.650.179)	15.746.296.793
3	Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah	24.660.322.446	(21.093.492.898)	3.566.829.548
4	Dinas Perindustrian Dan Energi	23.852.368.450	(16.618.511.630)	7.233.856.820
5	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Kehumasan	21.982.546.926	(11.782.855.396)	10.199.691.530
6	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	13.676.635.349	(12.433.119.363)	1.243.515.986
7	Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	13.671.302.700	(8.490.742.700)	5.180.560.000
8	Kota Administrasi Jakarta Utara	8.798.701.766	(8.798.701.766)	0
9	Dinas Penataan Kota	6.849.758.090	(5.360.557.010)	1.489.201.080
10	Dinas Pendidikan	5.664.384.700	(3.398.630.820)	2.265.753.880
11	SKPD Dengn Nilai Aset Tidak Berwujud < Rp5 Miliar	18.799.582.771	(13.372.473.796)	5.427.108.975
	Jumlah	**220.728.943.724**	**(148.473.981.973)**	**72.254.961.751**

5.5.1.5.6 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp36.863.408.468.608,00 dan Rp40.223.272.327.802,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel 5.44.

Tabel 5.44
Aset Lain-lain
Per 31 Desember 2016 dan 2015

ASET LAIN-LAIN	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1. Aset Rusak Berat	907.176.584.877,00	709.243.641.668,00
2. Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	(195.436.651.830,00)	0,00
3. Aset Belum Validasi	14.517.766.519.533,00	14.517.766.519.533,00
4. Aset yang belum ditetapkan statusnya	135.809.000,00	135.809.000,00
5. Aset Lain-Lain – BLUD	3.548.392.265,00	3.548.392.265,00
6. Kas Dikonsinyasikan	185.568.748.693,00	131.470.023.862,00
7. Aset Fasos Fasum	21.417.935.080.907,00	24.840.502.577.896,00
8. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya	108.531.052,00	108.531.052,00
9. Aset BP THR Lokasari	12.472.994.111,00	13.224.373.345,00
10. Aset Tetap yang belum ditetapkan statusnya	0,00	7.272.459.181,00
11. Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta	14.132.460.000,00	0,00
Jumlah	**36.863.408.468.608,00**	**40.223.272.327.802,00**

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

a. Aset Rusak Berat

Aset Rusak Berat adalah barang-barang kondisi rusak berat yang akan/diusulkan oleh SKPD untuk dihapus/diperbaiki kembali. Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp907.176.584.877,00 dan

Rp709.243.641.668,00. Penambahan Aset Rusak Berat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan selama Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp220.954.314.577,00 dengan rincian sebagai berikut:

   Penambahan Aset Rusak Berat selama Tahun Anggaran 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Penambahan Aset Rusak Berat reklasifikasi aset tetap jadi rusak berat Rp215.485.488.950,00.

   b. Penambahan Aset Rusak atas transfer masuk dari SKPD lain Rp 4.978.905.327,00

   c. Penambahan Aset Rusak Berat karena Kurang catat nilai Rp136.444.000,00.

   d. Penambahan Aset Rusak Berat karena Kurang catat barang Rp353.476.300,00.

2. Pengurangan Aset Rusak Berat selama Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp23.021.371.368,00 dengan rincian sebagai berikut:

   Pengurangan Aset Rusak Berat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

   a. Pengurangan Aset Rusak Berat karena penghapusan sebesar Rp16.653.088.546,00.

   b. Pengurangan Aset Rusak Berat karena transfer keluar ke SKPD lain Rp4.978.905.327,00

   c. Pengurangan Aset Rusak Berat karena reklasifikasi menjadi aset tetap Rp466.712.495,00.

   d. Pengurangan Aset Rusak Berat sebesar Rp138.800.000,00 merupakan hasil koreksi lebih catat nilai.

e. Pengurangan Aset Rusak Berat sebesar Rp34.900.000,00 merupakan hasil koreksi lebih catat barang.

f. Pengurangan Aset Rusak Berat karena koreksi lain lain Rp748.965.000

b. Aset Belum Validasi

Saldo Aset Belum Validasi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp14.517.766.519.533,00 dan Rp14.517.766.519.533,00.

Aset Belum Validasi merupakan aset sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan yang belum selesai dilakukan sensus aset.

c. Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Saldo Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp135.809.000,00. Aset tersebut terdapat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Sudin Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Utara diantaranya merupakan aset atas kehilangan kendaraan dinas operasional yang belum ditetapkan dalam keputusan majelis TGR.

d. Aset Lain-lain BLUD

Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sama, masing-masing sebesar Rp3.548.392.265,00. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

1) HAKKI Batik Betawi	Rp 240.230.000,00
2) Pengamanan Aset	Rp 1.106.500.000,00
3) Master Plan dan Sisdur	Rp 2.201.662.265,00
Jumlah	**Rp 3.548.392.265,00**

e. Kas Dikonsinyasikan

Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2016 dan 2015 yaitu sebesar Rp185.568.748.693,00 dan Rp131.470.023.862,00. Kas dikonsinyasikan sebesar Rp185.568.748.693,00 terdapat pada Dinas Bina Marga sebesar Rp59.845.438.831,00, Dinas Tata Air sebesar Rp121.291.041.862,00 dan UPT Terminal Terpadu Pulo Gebang sebesar Rp4.432.268.000,00. Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur atas kas dikonsinyasikan oleh Dinas Bina Marga sebesar Rp59.845.438.831,00 belum diserahkan ke para pihak. Dalam proses pengadaan tanah di Dinas Bina Marga, terdapat biaya administrasi pengurusan ganti kerugian tanah sebesar Rp13.242.000,00 yang akan dikapitalisasikan ke Aset tetap tanah apabila Dinas Bina Marga telah menerima bukti kepemilikan tanah tersebut dan uang konsinyasi telah diserahkan ke para pihak.

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pengadilan Tinggi Jakarta Selatan dan Jakarta Timur atas kas dikonsinyasikan oleh Dinas Dinas Tata Air sebesar Rp 121.291.041.862,00. Ganti kerugian tanah yang dititipkan tersebut telah diserahkan ke para pihak sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp55.954.610.300,00 sehingga kas yang dikonsinyasikan pada dua pengadilan tersebut tersisa sebesar Rp65.336.431.562,00. Namun bukti kepemilikan tanah tersebut belum diserahkan oleh Pengadilan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga transaksi tersebut belum dicatat sebagai penambah aset tetap tanah di Neraca. Dalam proses pengadaan tanah di Dinas Tata Air, terdapat biaya administrasi pengurusan ganti kerugian tanah sebesar Rp1.472.000,00 yang akan dikapitalisasikan ke Aset tetap tanah apabila Dinas Tata Air telah menerima bukti kepemilikan tanah tersebut dan uang konsinyasi telah diserahkan ke para pihak.

Kas dikonsinyasikan di Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang senilai Rp4.432.268.000 merupakan saldo Audited 2015. Nilai tersebut merupakan titipan uang pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk pembebasan lahan yang bermasalah.

f. Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum)

Aset Fasos Fasum adalah aset yang diperoleh dari pihak ketiga pemegang SIPPT sebagai bentuk pemenuhan kewajiban untuk kepentingan umum yang masih tercatat di PPKD belum didistribusikan ke masing-masing SKPD.

Saldo aset fasos fasum per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp21.417.935.080.907,00 dan Rp24.840.502.577.896,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2015
1	Tanah	18.837.431.524.750	22.070.630.631.970
2	Peralatan dan Mesin	74.141.255.984	75.966.102.484
3	Gedung dan Bangunan	482.932.219.848	738.285.448.580
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.007.968.126.824	1.940.134.531.361
5	Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	15.485.863.501
Total		21.417.935.080.907	24.840.502.577.896

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT. Mutasi penambahan dan pengurangan aset fasos fasum pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
Tanah	5.895.917.816.000	9.129.116.923.220
Peralatan dan Mesin	-	1.824.846.500
Gedung dan Bangunan	104.977.426.300	360.330.655.032
Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.673.713.016	87.840.117.552
Aset Tetap Lainnya	-	23.910.000
Total	**6.156.568.955.316**	**9.579.136.452.304**

Mutasi tambah aset fasos fasum pada tahun 2016 berasal dari:

a. Koreksi atas pencatatan saldo awal sebesar Rp.29,00 yang diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah-LO dan

b. Penerimaan aset fasos fasum sebanyak 36 BAST yang terdiri dari 35 BAST yang berasal dari kewajiban pihak ketiga dan 1 BAST yang berasal dari Hibah CSR, dengan total nilai aset senilai Rp6.156.568.955.287,00. Rincian penerimaan aset fasos fasum pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
KEWAJIBAN PIHAK KETIGA				
1	PT Mandara Permai	Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Umum Blok II - Z,Z.4A, Z.5A	424.586.445.000,00
		Tanah	Tanah Waduk Blok V - D.6	905.110.260.000,00
2	PT Greenland Rajawali Utama	Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	22.901.420.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	58.695.815.000,00

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
3	PT Bintang Rajawali Perkasa	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	30.323.055.000,00
4	PDGP St. Gabriel / Victorius	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.742.875.000,00
5	PT Sinar Grahamas Lestari	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	2.029.680.000,00
6	Yayasan Memajukan Ilm dan Kebudayaan (YMIK)	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	163.965.000,00
7	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI	Gedung dan Bangunan	1 Twin Block Rusunawa (102 unit)	68.863.087.780,00
8	Perum Perumnas	Tanah	Tanah Taman (Pht)	9.785.625.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	39.672.075.000,00
9	PT Yakin Gloria	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	559.612.440.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Jalan	10.254.900.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Saluran	4.485.300.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Duiker	380.800.000,00
10	PT Jakarta Realty	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	360.820.962.000,00
11	PT Citratama Inti Persada	Tanah	Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi (PTT)	51.620.004.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	151.431.147.000,00
12	PT Putra Sinar Permaja	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	354.522.710.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	14.658.250.000,00
13	PT Kembangan Permai Development	Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	93.432.650.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	819.914.035.000,00

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	82.279.255.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	160.652.440.000,00
		Tanah	Tanah Suka Pelayanan Umum (SPU)	3.470.550.000,00
		Tanah	Tanah Suka Rekreasi Olahraga (SRO)	17.978.810.000,00
		Tanah	Tanah Suka Sosial Budaya (SSB)	4.416.445.000,00
		Tanah	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI)	4.824.745.000,00
		Tanah	Tanah Suka Sosial Kesehatan (SSK)	3.470.550.000,00
14	PT Bangun Tjipta Sarana	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.194.190.000,00
15	PT Gading Selaras	Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	804.870.000,00
		Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	256.095.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	28.316.790.000,00
16	PT Danayasa Arthatama	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Saluran Box Culvert / Koker Hotel Sultan	57.810.566.780,00
17	PT Mitra Sindo Sukses	Tanah	Tanah Suka Pendidikan (Spd)	149.693.925.000,00
		Tanah	Tanah Suka Rekreasi Olahraga (SRO)	99.797.871.000,00
		Tanah	Tanah Suka Pelayanan Umum (SPU)	48.766.506.000,00
		Tanah	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI)	71.559.171.000,00
		Tanah	Tanah Suka Parkir (Spk)	9.946.938.000,00
		Tanah	Tanah Suka Sosial Kesehatan (SSK)	48.155.628.000,00

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	32.151.777.000,00
18	PT Multi Artha Griya	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.642.650.000,00
19	PT Duta Faras	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	931.725.000,00
20	PT Puri Matahari	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	16.820.880.000,00
21	PT Kalma Propertindo Jaya	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.776.250.000,00
22	PT Matahari Putra Prima	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	8.495.625.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2.881.125.000,00
23	PT Harmas Jalesveva	Tanah	Tanah Rencana Jalan (MJL)	53.303.890.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Jalan (MJL)	8.183.554.000,00
24	PT Wika Realty	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Marga Jalan (Mjl) Hotmix	1.047.000.000,00
25	PT Satwika Permai	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl) Perum Taman Surya 5	53.826.416.000,00
		Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt) Perum Taman Surya 5	3.749.543.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) Perum Taman Surya 5	4.102.819.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Marga Jalan (Mjl) - Perkerasan Jalan Perum Taman Surya 5	20.807.126.424,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saluran Air Uk. 100 x 100 cm Perum Taman Surya 5	2.293.360.412,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Kansteen Perum Taman Surya 5	676.074.901,00
26	PT Satwika Permai	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl) Perum Taman Surya 3	25.329.201.000,00
		Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt) Perum Taman Surya 3	1.614.976.000,00

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht) Perum Taman Surya 3	6.806.298.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Marga Jalan (MJL) - Perkerasan Jalan Perum Taman Surya 3	7.289.290.450,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saluran Air Uk. 80 x 80 cm Perum Taman Surya 3	1.013.154.784,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saluran Air Uk. 100 x 100 cm Perum Taman Surya 3	1.679.505.912,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Kansteen Perum Taman Surya 3	397.537.560,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Trotoar Perum Taman Surya 3	1.136.448.791,00
27	PT Cakra Bina Lestari	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	246.538.125.000,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Konstruksi Marga Jalan (Mjl) - Perkerasan Jalan	26.370.129.676,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saluran Tepi Jalan Uk. 60 x 80 cm	3.164.138.040,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tutup Saluran	295.811.087,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Kansteen	1.902.918.400,00
		Jalan, Irigasi dan Jaringan	Saluran Tengah Jalan	5.489.710.770,00
28	PT Metropolitan Land	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	307.181.130.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	99.610.839.000,00
		Tanah	Tanah Suka Pelayanan Umum (SPU)	3.361.650.000,00
		Tanah	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI)	13.644.615.000,00
29	PT Kencana Unggul Sukses	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	49.006.125.000,00
		Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	11.098.500.000,00

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS ASET	RINCIAN OBJEK ASET	NILAI ASET
30	PT Perusahaan Gas Negara	Tanah	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	44.529.435.000,00
		Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	3.717.285.000,00
		Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	162.988.650.000,00
31	PT Cipta Indah Megah	Tanah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	18.160.625.000,00
32	Satrya Kuangga	Tanah	Tanah Prasarana Jalan	906.300.000,00
33	DPD REI DKI Jakarta	Gedung dan Bangunan	Bangunan Rumah Susun Murah / Sederhana (2 Blok)	35.156.387.000,00
34	PT Alfindo Mercu Estate	Tanah	Tanah Marga Jalan	43.264.515.000,00
		Tanah	Tanah Marga Drainase dan Tata Air	31.868.655.000,00
35	PT. Media Indra Buana	Gedung dan Bangunan	Bangunan Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu Ukuran 3 x 4	371.933.600,00
		Gedung dan Bangunan	Bangunan Pos Penjagaan Polisi Lalu Lintas Terpadu Ukuran 2 x 3	586.017.920,00
	Total dari Kewajiban Pihak Ketiga			**6.155.572.570.287**
1	PT Pertamina EP	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Bangunan Sumur Resapan	996.385.000,00
	Total dari Hibah CSR			**996.385.000**
	TOTAL KESELURUHAN			**6.156.568.955.287**

Rekapitulasi mutasi tambah tersebut berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah
Tanah	5.895.917.816.000,00
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	104.977.426.300,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.673.712.987,00
Aset Tetap Lainnya	-
Total	**6.156.568.955.287,00**

Mutasi tambah sebesar Rp6.156.568.955.287,00 diantaranya terdapat penambahan aset Tanah Penyempurna Hijau Umum Jalan Perumahan Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara yang merupakan kewajiban PT Mandara Permai sebesar Rp1.329.696.705,00.

Atas aset fasos fasum tersebut, pada tahun 2016 telah didistribusikan ke SKPD Pengguna dan dikerjasamakan dengan pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

a. Aset fasos fasum yang telah terbit SK Penggunaannya, sehingga dicatat sebagai aset tetap di SKPD yaitu:

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
1	2355 Tahun 2016	Kepala Dinas Pendidikan	PT. Permata Medialand	Tanah Suka Pendidikan (Spd) *	14.054.985.000
1	2355 Tahun 2016	Kepala Dinas Pendidikan	PT. Mandara Permai	Tanah Suka Taman Kanak-Kanak (STK) Jalan Pantai Indah Utara I / Jaian Mayang Permai 6 Blok II.F.6B	6.631.200.000
1	2355 Tahun 2016	Kepala Dinas Pendidikan	PT. Mandara Permai	Tanah Suka Taman Kanak-Kanak (STK) dan 2 Blok II.B.3B Jalan Pinisi Indah 1	7.989.675.000
1	2355 Tahun 2016	Kepala Dinas Pendidikan	PT. Mandara Permai	Tanah Suka Taman Kanak-Kanak (STK) Jalan Tamaran Indah Blok II. J.2A	9.794.835.000
1	2355 Tahun 2016	Kepala Dinas Pendidikan	PT. Mandara Permai	Tanah Suka Taman Kanak-Kanak (STK) Jalan Camar Elok 6 dan 7 Blok IV. I.6A	4.075.425.000
1	2355 Tahun 2016	Kepala Dinas Pendidikan	PT. Candrasa Pranaguna	Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak	5.502.538.249
2	2354 Tahun 2016	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PT Kembangan Permai Development	Tanah Suka Sosial Budaya (SSB)	4.416.445.000
3	2493 Tahun 2016	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	PT. Permata Medialand	Tanah Sarana Sosial Budaya (Ssb)	2.396.800.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
4	2494 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	Franky Winata	Tanah Marga Drainase dan Tata Air	290.850.000
4	2494 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	Franky Winata	Tanah Marga Drainase dan Tata Air	1.184.175.000
4	2494 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk	Tanah Saluran	689.040.000
4	2494 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. Permata Medialand	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	12.665.590.000
4	2494 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk	Bangunan Saluran dan Duiker	2.998.674.331
5	2358 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Alfindo Mercu Estate	Tanah Marga Drainase dan Tata Air **	31.868.655.000
6	2142 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Mandara Permai	Tanah Waduk Blok V - D.6	905.110.260.000
7	2138 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Pertamina EP	Bangunan Sumur Resapan	597.831.000
7	2138 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Pertamina EP	Bangunan Sumur Resapan	99.638.500
7	2138 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Pertamina EP	Bangunan Sumur Resapan	139.493.900
7	2138 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Pertamina EP	Bangunan Sumur Resapan	99.638.500
7	2138 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Pertamina EP	Bangunan Sumur Resapan	59.783.100

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
8	2224 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO	Tanah Suka (SUK)	714.615.000
9	1689 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. SIMPRUK ARTERI REALTY	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	34.041.630.000
9	1689 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. ALMARON PERKASA	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	77.652.750.000
9	1689 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. United Tractors.Tbk	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	12.755.505.000
9	1689 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	22.129.860.000
9	1689 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia dan PT. Alam Jaya Perkasa	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (MDT)	49.006.245.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Greenland Rajawali Utama	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	22.901.420.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Gading Selaras	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	256.095.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	8.499.445.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	18.638.895.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	6.736.950.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	4.722.670.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	1.095.605.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	10.840.365.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	6.110.890.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	8.295.295.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	12.024.435.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Drainase dan Tata Air (Mdt)	16.468.100.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Danayasa Arthatama	Konstruksi Saluran Box Culvert / Koker Hotel Sultan	57.810.566.780
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Yakin Gloria	Konstruksi Saluran	479.700.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Yakin Gloria	Konstruksi Duiker	246.600.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Yakin Gloria	Konstruksi Saluran	4.005.600.000
10	2414 Tahun 2016	Kepala Dinas Tata Air	PT Yakin Gloria	Konstruksi Duiker	134.200.000
11	2058 Tahun 2016	Lurah Kramat Jati	PT. Prasto Propertindo	Tanah	64.153.125.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
12	2353 Tahun 2016	Walikota Jakarta Barat	PT Kembangan Permai Development	Tanah Suka Sosial Ibadah (SSI)	4.824.745.000
13	2356 Tahun 2016	Lurah Kapuk Muara	PT. Mandara Permai	Tanah Balai Warga Jalan Pantai Indah Utara 3 Blok I. U.5A	34.735.515.000
13	2356 Tahun 2016	Lurah Kapuk Muara	PT. Mandara Permai	Tanah Balai Warga Jalan Pantai Camar Elok 6 dan 7 Blok IV.1.8	14.238.660.000
13	2356 Tahun 2016	Lurah Kapuk Muara	PT. Mandara Permai	Tanah Balai Warga Jalan Pinisi Indah 5 dan 6 Blok II.A.7	4.784.595.000
13	2356 Tahun 2016	Lurah Kapuk Muara	PT. Mandara Permai	Tanah Balai Warga Jalan Manyar Permai 10 Blok IV. V.9A	4.830.645.000
13	2356 Tahun 2016	Lurah Kapuk Muara	PT. Mandara Permai	Tanah Balai Warga Jalan Pinisi Permai 6 Blok II.I.9B	4.015.560.000
14	1690 Tahun 2016	Lurah Kalideres	PT. Lahan Adya Bumi	Bangunan Sosial Budaya / Balai Warga Blok E-4	1.742.662.887
15	386 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT Kencana Graha Mandiri	1 (satu) Unit Tangga JPO Tosari, sisi The City Tower	1.001.400.000
15	386 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT Kencana Graha Mandiri	1 (Satu) Unit Lift Penumpang	540.490.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. LESTARI KIRANA PERSADA	Tanah Marga Jalan (MJL)	8.386.875.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Binakarya Jaya Abadi	Tanah Marga Jalan (MJL)	847.080.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. PROSPERO REALTY	Tanah Marga Jalan (MJL)	2.716.455.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. LINTAS CIPTA DEVELOPMENT	Tanah Marga Jalan (Mjl)	22.935.040.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. SIMPRUK ARTERI REALTY	Tanah Marga Jalan (MJL)	71.394.300.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. ALMARON PERKASA	Tanah Marga Jalan (Mjl)	306.972.750.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. BANGUN KUNINGAN INDAH	Tanah Marga Jalan (Mjl)	29.322.360.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Chitaland Perkasa	Tanah Marga Jalan (MJL)	79.680.105.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. CEMPAKA SURYA KENCANA	Tanah Marga Jalan (MJL)	124.515.545.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. RASUNA SETIABUDI RAYA	Tanah Marga Jalan (MJL)	33.553.520.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. JAKARTA LAND	Tanah Marga jalan (Mjl)	101.237.640.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. WIKA REALTY	Tanah Marga Jalan (MJL)	16.865.820.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. BINAKARYA AGUNG PROPERTINDO	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.224.280.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Aruna Kirana Q.Q. PT. Madara Swarna	Tanah Marga Jalan (MJL)	118.390.350.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. United Tractors.Tbk	Tanah Marga Jalan (MJL)	136.259.025.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. COLORAMA JAYA TRADING CO. LTD	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.367.475.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA	Tanah Marga Jalan (Mjl)	73.881.885.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO	Tanah Marga Jalan (MJL)	16.848.810.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. GUDANG GARAM	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6.346.160.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. NITRASANATA DHARMA	Tanah Marga Jalan (MJL)	2.953.125.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. MARS MULTI MANDIRI	Tanah Marga Jalan (MJL)	6.975.185.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT.PYRAMYD REALTY INDONESIA	Tanah Marga Jalan (Mjl)	15.924.090.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	KSO PT. Pelaksana Jaya Mulia dan PT. Alam Jaya Perkasa	Tanah Marga Jalan (MJL)	50.452.995.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. DAKSAWIRA PERDANA	Tanah Marga Jalan (Mjl)	15.860.250.000
16	1687 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. MANDIRI CIPTA GEMILANG	Tanah Marga Jalan (Mjl)	68.008.375.000
17	2219 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kencana Graha Mandiri	Kontruksi Marga Jalan dan Pedestrian dengan lebar bervariasi ± 2,4 M sepanjangn ± 120 M	1.078.200.000
18	2287 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Alfindo Mercu Estate	Tanah Marga Jalan **	43.264.515.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
19	2055 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Foton Mobilindo	Kendaraan Dump Truck Pengangkut Endapan Lumpur dan Sampah Merk : Foton Daimler, Nomor Chassis : LVBV7PEC4CH002209, Nomor Mesin : 1512A000286	795.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Franky Winata	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.150.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Franky Winata	Tanah Marga Jalan (Mjl)	10.017.705.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Franky Winata	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.645.380.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Alty Investindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	84.213.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Binakarya Graha Tama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.255.296.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Central Perdana Propertindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	694.830.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Central Perdana Propertindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	286.995.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Central Perdana Propertindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.314.135.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Central Perdana Propertindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	649.515.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Central Perdana Propertindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	422.940.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Central Perdana Propertindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	513.570.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Central Perdana Propertindo	Tanah Marga Jalan (Mjl)	8.552.355.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	97.807.500.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	934.875.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.079.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	344.250.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.490.750.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.558.250.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	516.375.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.180.250.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	891.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.902.500.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.080.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.377.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	7.101.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.855.250.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.727.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.927.125.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.083.375.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.393.875.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.801.250.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	199.125.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	76.258.125.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	624.375.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	5.325.750.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.404.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.120.500.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	324.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	293.625.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	51.640.875.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	799.875.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	4.792.500.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	934.875.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.835.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	2.500.875.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	371.250.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	864.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	8.565.750.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.147.500.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	509.625.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	283.500.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	462.375.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	270.000.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	506.250.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	145.125.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	310.500.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	320.625.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	374.625.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	472.500.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	118.125.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	3.682.125.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	1.299.375.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Copylas Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl) dan Saluran	327.375.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Daya Adicipta Sandika	Tanah Marga Jalan (Mjl)	26.881.220.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Delta Pinang Mas	Tanah Marga Jalan (Mjl)	7.088.430.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Dipo Property	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6.645.555.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Duta Anggada	Tanah Marga Jalan (MJL)	20.481.900.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Duta Anggada	Tanah Marga Jalan (Mjl)	24.585.456.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	958.054.380.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	48.605.295.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.763.800.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.892.355.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6.900.300.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.830.210.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.944.630.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	439.110.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	993.225.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Giri Selo Indah	Konstruksi Marga Jalan (Pekerjaan Jalan dan Bahu Jalan serta Pekerjaan Saluran Pelengkap Jalan)	39.865.419.165
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. GLD Property	Tanah Marga Jalan (Mjl)	29.426.340.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Karyadeka Graha Lestari	Tanah Marga Jalan (MJL) Sisi Jalan TB. Simatupang	7.080.885.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Karyadeka Graha Lestari	Tanah Marga Jalan (MJL) Sisi Jalan Pangeran Antasari	8.748.225.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Karyadeka Graha Lestari	Tanah Marga Jalan (MJL) Sisi Jalan Pangeran Antasari	7.153.650.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Kepland Investama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	64.068.585.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Menjangan Sakti	Tanah Marga Jalan (Mjl)	797.685.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk	Tanah Marga Jalan (Mjl)	73.444.800.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk	Bangunan Marga Jalan (Mjl)	5.319.279.180
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Sinar Pamaronda	Tanah Marga Jalan (Mjl)	5.166.810.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT. Spekta Properti Indonesia	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.562.112.000
20	2269 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Yayasan Dakwah dan Pendidikan Islam Qaryah Thayyibah	Tanah Marga Jalan (Mjl)	45.981.334.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Jakarta Realty	Tanah Marga Jalan (Mjl)	360.820.962.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Bangun Tjipta Sarana	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.194.190.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Greenland Rajawali Utama	Tanah Marga Jalan (Mjl)	58.695.815.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Bintang Rajawali Perkasa	Tanah Marga Jalan (Mjl)	30.323.055.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Yayasan Memajukan Ilm dan Kebudayaan (YMIK)	Tanah Marga Jalan (Mjl)	163.965.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Citratama Inti Persada	Tanah Marga Jalan (Mjl)	151.431.147.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Putra Sinar Permaja	Tanah Marga Jalan (Mjl)	354.522.710.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Gading Selaras	Tanah Marga Jalan (Mjl)	24.097.320.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Gading Selaras	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.219.470.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	15.780.795.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	7.567.160.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	592.035.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	26.328.545.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	353.860.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	741.745.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.088.800.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.797.525.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	639.670.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.599.175.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6.042.840.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.204.485.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.925.815.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6.628.070.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	45.089.930.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	103.762.640.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	7.682.845.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	35.780.690.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	4.110.220.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	25.668.460.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	496.057.280.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	19.986.285.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Kembangan Permai Development	Tanah Marga Jalan (Mjl)	6.485.165.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Perum Perumnas	Tanah Marga Jalan (Mjl)	30.310.110.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Perum Perumnas	Tanah Marga Jalan (Mjl)	1.496.625.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Perum Perumnas	Tanah Marga Jalan (Mjl)	2.247.240.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	Perum Perumnas	Tanah Marga Jalan (Mjl)	5.618.100.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Yakin Gloria	Tanah Marga Jalan (Mjl)	559.612.440.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PDGP St. Gabriel / Victorius	Tanah Marga Jalan (Mjl)	3.742.875.000
21	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Sinar Grahamas Lestari	Tanah Marga Jalan (Mjl)	2.029.680.000
-1	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Yakin Gloria	Konstruksi Jalan Provinsi	2.073.900.000
-1	2140 Tahun 2016	Kepala Dinas Bina Marga	PT Yakin Gloria	Konstruksi Jalan Khusus Komplek	8.181.000.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
22	2357 Tahun 2016	Kepala Dinas Kesehatan	PT. Permata Medialand	Tanah Sarana Sosial Kesehatan (Ssk)	2.921.100.000
22	2357 Tahun 2016	Kepala Dinas Kesehatan	PT. Mandara Permai	Tanah Suka Sarana Kesehatan (SSK) Jalan Pantai Indah Selatan 2 Blok IV. V.9B	6.078.600.000
23	2220 Tahun 2016	Kepala Dinas Kesehatan	PT Kembangan Permai Development	Tanah Suka Sosial Kesehatan (SSK)	3.470.550.000
24	1761 Tahun 2016	Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda	PT. Lahan Adya Bumi	Bangunan Lapangan Basket, Blok B-3	899.436.800
25	2271 Tahun 2016	Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda	PT Kembangan Permai Development	Tanah Suka Rekreasi Olahraga (SRO)	17.978.810.000
26	2289 Tahun 2016	Walikota Jakarta Utara	PT. Mandara Permai	Tanah Suka Sarana Ibadah (SSI) Jalan Pantai Indah Selatan 2 Blok IV. V. 9C	19.492.965.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. RASUNA SETIABUDI RAYA	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	4.065.138.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. BANGUN KUNINGAN INDAH	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	1.013.805.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. ALMARON PERKASA	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	117.379.500.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Chitaland Perkasa	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	11.882.700.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. CEMPAKA SURYA KENCANA	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	502.957.140.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. LESTARI KIRANA PERSADA	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU)	826.875.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	7.564.854.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. BINAKARYA BANGUN PROPERTINDO	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU)	4.537.302.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	29.261.500.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. DAKSAWIRA PERDANA	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	3.081.420.000
27	1577 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. MANDIRI CIPTA GEMILANG	Tanah Penyempurnaan Hijau Taman (PHT)	36.548.335.000
28	2060 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Colorama Jaya Trading CO LTD	Tanah taman blok T1	665.660.000
28	2060 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Colorama Jaya Trading CO LTD	Tanah taman blok T2	878.190.000
28	2060 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Colorama Jaya Trading CO LTD	Tanah taman blok T3	1.530.216.000
28	2060 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Colorama Jaya Trading CO LTD	Tanah kompensasi blok P5	1.604.000.000
29	2061 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Summarecon Agung	Tanah	61.418.000.000
30	2268 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kencana Graha Mandiri	Penataan Taman	225.422.460
30	2268 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. LINTAS CIPTA DEVELOPMENT	Tanah Suka (SUK)	3.688.320.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
30	2268 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. MULIA KARYA GEMILANG	Tanah Pengganti	79.853.485.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	6.798.195.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	5.988.400.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	9.268.410.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	7.152.055.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2.783.245.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2.783.245.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	4.845.160.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	2.048.305.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	5.389.560.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	5.566.490.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1.204.485.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1.204.485.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1.299.755.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1.197.680.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	7.798.530.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	8.438.200.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	959.505.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1.279.340.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	6.274.210.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	299.420.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	4.375.615.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	15.338.470.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	1.449.465.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	585.230.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	2.742.415.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	326.640.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	2.572.290.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	292.615.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	9.663.100.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	571.620.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	6.811.805.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	4.225.905.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	3.776.775.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	326.640.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	306.225.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	163.320.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	3.429.720.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	11.384.765.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	3.409.305.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	12.800.205.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Gading Selaras	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	804.870.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Mandara Permai	Tanah Penyempurna Hijau Umum Blok II - Z.4A	7.386.345.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Mandara Permai	Tanah Penyempurna Hijau Umum Blok II - Z.5A	7.643.130.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Mandara Permai	Tanah Penyempurna Hijau Umum Blok II - Z	409.556.970.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Perum Perumnas	Tanah Taman (Pht)	787.455.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Perum Perumnas	Tanah Taman (Pht)	5.862.165.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Perum Perumnas	Tanah Taman (Pht)	3.136.005.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Putra Sinar Permaja	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT)	14.658.250.000
31	2270 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Citratama Inti Persada	Tanah Penyempurna Tegangan Tinggi (PTT)	51.620.004.000
32	2141 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT Kembangan Permai Development	Tanah Suka Pelayanan Umum (SPU)	3.470.550.000
33	2288 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. OLEOS KIRANA UTAMA	Tanah Pengganti	3.891.101.440
33	2288 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. OLEOS KIRANA	Tanah Pengganti	870.400.000
33	2288 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. OLEOS KIRANA UTAMA	Pemagaran Pagar BRC dan Penanaman Lahan Fasos Fasum (PHU)	317.587.400
33	2288 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. OLEOS KIRANA	Pagar BRC	54.909.529
33	2288 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. OLEOS KIRANA	Tiang kolom Beton	
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Franky Winata	Tanah Penyempurnah Hijau Taman	162.045.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	Franky Winata	Tanah Penyempurnah Hijau Taman	5.081.565.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Spekta Properti Indonesia	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	12.100.736.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	2.310.000.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Pembangunan Jaya Ancol. Tbk	Tanah Penyempurna Hijau Taman (Pht)	1.441.440.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Grogol Indah	Tanah Pengganti Jl. Warakas I Gang 26 RT. 008 RT. 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	1.374.156.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Grogol Indah	Tanah Pengganti Jl. Warakas I Gang 26 RT. 008 RT. 08 Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara	5.989.116.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 1 Blok A	23.063.730.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 2 Blok B	10.036.800.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 3 Blok C	8.562.645.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 4 Blok C2	19.247.655.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 4 Blok C2	261.375.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 5 Blok D4	8.081.715.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 5 Blok D4	1.735.530.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 6 (Median)	29.901.300.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 7 (Bunderan)	23.701.485.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 8 (Median)	25.447.470.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Tanah PHT 9 (Median)	1.819.170.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Tanah PHT 9 (Median)	20.930.910.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Tanah PHT 9 (Median)	5.321.595.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 10A Blok H	12.012.795.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 10B Blok H	2.080.545.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 11 Blok B1/1	11.552.775.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 12 Blok B1/23	2.519.655.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 13 Blok C1/15	3.157.410.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 14 Blok E3	1.369.605.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 15A Blok E1	3.356.055.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Tanah Taman PHT 15B Blok E1	6.544.830.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Grogol Indah	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU) ****	26.842.935.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Grogol Indah	Tanah Penyempurna Hijau Umum (PHU) ****	2.701.020.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Mandara Permai	Tanah Penyempurna Hijau Taman (PHT), Jalan Pinisi Indah 1 dan 2 Blok II.B.3A	5.516.790.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Duta Anggada	Tanah SUKA	14.882.495.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Alty Investindo	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	21.336.750.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Permata Medialand	Tanah Penyempurna Hujau Taman (Pht)	8.699.635.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Permata Medialand	Tanah Penyempurna Hijau Umum (Phu)	6.527.535.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Delta Pinang Mas	Tanah Penyempurna Hijau Umum	9.303.045.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Duta Anggada	Tanah Taman	3.457.440.000
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 1 Blok A	319.484.550
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 2 Blok B	93.144.150

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 3 Blok C	134.966.700
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 4 Blok C2	206.467.250
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 5 Blok D4	69.243.900
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 6 (median)	185.450.100
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 7 (bunderan)	269.317.950
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 8 (median)	169.067.250
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 9 (median)	136.849.900
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 10A Blok H	89.508.650
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 10B Blok H	19.834.650
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 11 Blok B1/1	82.631.450
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 12 Blok B/23	21.082.050
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 13 Blok C1/15	25.413.850

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 14 Blok E3	9.625.550
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 15A Blok E1	26.282.300
34	2415 Tahun 2016	Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman	PT. Giri Selo Indah	Bangunan Gedung PHT 15B Blok E1	49.307.500
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Bangunan Rumah Susun Tower 9 (100 Unit)	19.296.000.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Bangunan Rumah Susun Tower 10 (100 Unit)	19.296.000.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Bangunan Rumah Susun Tower 11 (100 Unit)	19.296.000.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Bangunan Rumah Susun Tower 12 (100 Unit)	19.296.000.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Bangunan Gardu PLN	117.300.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Taman	292.900.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Pagar Halaman	441.500.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Bangunan Rumah Susun Blok A	19.242.000.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Bangunan Rumah Susun Blok B	19.242.000.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Bangunan Rumah Susun Blok C	19.242.000.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Bangunan Rumah Susun Blok D	19.242.000.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Bangunan Gardu PLN 1	38.500.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Bangunan Gardu PLN 2	32.100.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Rumah Pompa	61.300.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Taman	419.300.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Pagar	338.500.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. MUARA WISESA SAMUDRA	Jalan Lingkungan	4.310.300.000
35	2057 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	PT. JALADRI KARTIKA PAKCI	Perkerasan Halaman/jalan lingkungan	4.767.000.000
36	2143 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI	1 Twin Block Rusunawa (102 unit)	13.316.023.356
36	2143 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI	1 Twin Block Rusunawa (102 unit)	15.906.242.356

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
36	2143 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI	1 Twin Block Rusunawa (102 unit)	13.286.035.356
36	2143 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI	1 Twin Block Rusunawa (102 unit)	13.079.141.356
36	2143 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) RI	1 Twin Block Rusunawa (102 unit)	13.275.645.356
37	452 Tahun 2016	Kepala Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Utara	PT. Grogol Indah	Tanah Pengamanan Tegangan Tinggi (PTT)	5.902.120.000
38	2533 Tahun 2016	Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda	PT. Mandara Permai	Tanah Sarana Olahraga (SRO) Jalan Pinisi Indah 2 dan 3 Blok II. B.7	11.807.220.000
39	2514 Tahun 2016	Lurah Kapuk Muara	PT. Mandara Permai	Tanah Suka Pelayanan Umum (Pos Keamanan) Jalan Pinisi Indah 2 Blok II. B.7	267.090.000
39	2514 Tahun 2016	Lurah Kapuk Muara	PT. Mandara Permai	Tanah Sarana Pelayanan Umum (SPU) Jalan Katamaran Permai 3-5 Blokk II.M.3A	6.382.530.000
40	2513 Tahun 2016	Walikota Jakarta Barat	PT. Permata Medialand	Tanah Sarana Sosial Ibadah (Ssi)	6.123.075.000
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Super Progres	Tanah Prasarana Lingkungan	22.507.635.000
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Wisma Kartika	Tangga JPO Tosari Di Sisi Gedung UOB	516.692.000

NO	NO. SK PENGGUNAAN	NAMA SKPD	NAMA PIHAK KETIGA	PERUNTUKAN ASET	NILAI
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Wisma Kartika	Lift Kaca Dua Lantai Berikut Biaya Pemasangan Instalasi Di Sisi Gedung UOB	414.331.500
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Ratna Kalimaja Persada	Bangunan JPO di Jalan Mangga Dua Raya	563.462.026
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	Kwarnas Gerakan Pramuka	Bangunan JPO	1.090.232.171
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Neonlite	Banguna JPO di Jl. Jend. Sudirman Dukuh Atas (Depan Gedung Arthaloka)	972.801.936
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Bandaraya Wiramedia	JPO	941.842.496
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Buana Sakti	Bangunan JPO West Ramp Barat	7.240.000.000
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Rapi Graha Utama	JPO	1.591.185.000
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Jaya Adhimedia	Bangunan JPO	467.644.247
41	2532 Tahun 2016	Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi	PT. Super Progres	Bangunan Prasarana Lingkungan	9.154.730.000
42	2273 Tahun 2016	Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	Direktur Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum	Rusunawa 2 Twin Block (150 Unit)	24.827.610.457
Total					***9.412.380.964.584***

b. Aset fasos fasum yang telah dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga dicatat sebagai aset kerjasama yaitu:

NO	NAMA PIHAK KETIGA	TGL PKS	JENIS ASET	NILAI RUPIAH
1	PT. Gerak Maju Abadi	21/07/1997	Gedung dan Bangunan	1.900.000.000,00
			Tanah	349.000.000,00
2	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	30/11/2000	Gedung dan Bangunan	1.608.689.600,00
3	PT. Wahana Cipta Sejahtera	13/07/2006	Gedung dan Bangunan	1.226.000.000,00
4	Kepolisian Daerah Metro Jaya	21/08/2015	Gedung dan Bangunan	2.817.713.120,00
5	PT Swadaya Niaga Jaya	15/10/2015	Tanah	52.617.390.000,00
			Gedung dan Bangunan	52.558.200.000,00
6	Yayasan Thanimbar	26/04/2016	Tanah	1.509.000.000,00
7	Yayasan Safa Marwah	30/05/2016	Tanah Mesjid	1.225.588.000,00
			Aset Tetap Lainnya	2.012.524.000,00
8	Yayasan Suhargo Gondokusumo	30/09/2016	Tanah	21.015.383.000
			Gedung dan Bangunan	27.916.000.000
	TOTAL			**166.755.487.720,00**

Rekapitulasi mutasi kurang tersebut berdasarkan jenis aset adalah sebagai berikut:

Jenis Aset	Jumlah
Tanah	9.129.116.923.220
Peralatan dan Mesin	1.824.846.500
Gedung dan Bangunan	360.330.655.032
Jalan, Irigasi dan Jaringan	87.840.117.552
Aset Tetap Lainnya	23.910.000
Total	**9.579.136.452.304**

Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perhitungan penyusutan aset fasos fasum berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Penyusutan aset fasos fasum sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp1.872.201.485.995,00 dan beban penyusutan tahun 2016 sebesar Rp100.997.751.394,00.

Harga Perolehan aset fasos fasum per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 dapat disajikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2016			31 Desember 2015 (setelah koreksi)
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Harga Perolehan
Tanah	18.837.431.524.750	-	18.837.431.524.750	22.070.630.631.970
Peralatan dan Mesin	74.141.255.984	(31.875.994.403)	42.265.261.581	75.966.102.484
Gedung dan Bangunan	482.932.219.848	(349.123.440.095)	133.808.779.753	738.285.448.580
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.007.968.126.824	(1.576.643.220.591)	431.324.906.233	1.940.134.531.389
Aset Tetap Lainnya	15.461.953.501	(15.461.953.501)	0	15.485.863.501
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
Jumlah	**21.417.935.080.907**	**1.973.104.608.590**	**19.444.830.472.317**	**24.840.502.577.924**

Berdasarkan hasil rekonsiliasi data Dinas Penataan Kota dengan data Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, dan BPTSP, jumlah Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang telah diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1971 sampai dengan 31 Desember 2016 sebanyak 3052 SIPPT. Atas SIPPT tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mencatat sebagai piutang fasos fasum dalam neraca karena nilai kewajiban pengembang untuk menyerahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum dapat diukur dan diestimasi dengan andal serta belum dapat dipastikan waktu penyerahan aset fasos fasum oleh pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pencatatan kewajiban pengembang dilakukan secara ekstrakomptabel.

Aset Fasos Fasum diakui sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat penguasaan atas aset berpindah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan nilainya dapat diukur secara andal yaitu berdasarkan BAST yang terlebih dahulu dilakukan penilaian oleh Appraisal Independent.

Dari SIPPT sebanyak 3052 tersebut sampai dengan 31 Desember 2016 telah diserahkan aset fasos fasum kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 499 BAST.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya peningkatan pengelolaan kewajiban pemegang SIPPT untuk menyerahkan fasos fasum melalui inventarisasi seluruh dokumen SIPPT, PPK dan BAST fasos fasum, dan mengembangkan sistem informasi fasos fasum sebagai media pengendalian kewajiban fasos fasum. Selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan upaya penagihan kewajiban yang salah satunya diwujudkan dengan penerapan kebijakan penyerahan fasos fasum sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

g. Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan Statusnya merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp108.531.052,00 yang merupakan saldo kas operasional BLUD yang sampai saat ini belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

h. Aset di BP THR Lokasari

Aset di BP THR Lokasari merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola oleh BP THR Lokasari. Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2016 dan

31 Desember 2015 adalah sebesar Rp12.472.994.110 dan sebesar Rp13.224.373.345,00, dapat dirinci sebagai berikut:

a.	Saldo Ekuitas per 31 Desember 2015		Rp13.224.373.345,00
b.	Penambahan:		
	Laba tahun 2016		Rp2.147.005.920,00
c.	Pengurangan:		
	- Koreksi Saldo Laba	(Rp1.407.237.979,00)	
	- Koreksi Saldo awal	(Rp368.942.102,00)	
	- Setoran PAD	(Rp665.010.414,00)	
	- Jasa Produksi	(Rp332.505.207,00)	
	- CSR	(Rp124.689.452,00)	
	Total Pengurangan		(Rp2.898.385.152,00)
	Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016		**Rp12.472.994.111,00**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 247 Tahun 2016, BP THR Lokasari telah dibubarkan. Untuk selanjutnya pengelolaan atas BP THR Lokasari akan diambil alih oleh BUMD yang belum dapat diputuskan dikarenakan sampai laporan keuangan ini dibuat, aset masih dalam proses penilaian oleh Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI.

i. Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta

Kewajiban pengembalian pembayaran UMK berdasarkan jatuh temponya dicatat sebagai Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta untuk yang jatuh tempolebih dari 1 tahun.

Tuntutan pengembalian UMK pengadaan Transjakarta sebesar Tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp14.132.460.000,00 merupakan piutang atas pembatalan kontrak pengadaan single bus transjakarta Paket III dan Paket V

5.5.2 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar Rp1.485.383.731.060,00 dan Rp956.577.417.224,00, rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.45.

Tabel 5.45

Kewajiban

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Jenis Kewajiban	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	948.325.136.957,00	758.869.632.554,00
2.	Kewajiban Jangka Panjang	537.058.594.103,00	197.707.784.670,00
JUMLAH		**1.485.383.731.060,00**	**956.577.417.224,00**

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp948.325.136.957,00 dan Rp758.869.632.554,00. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 5.46 berikut ini:

Tabel 5.46

Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Utang PFK di PPKD	99.463.000,00	324.469.034.806,00
2.	Utang PFK di SKPD	1.743.501.101,00	4.132.085.856,00
3.	Pendapatan Diterima Di Muka	499.741.678.825,00	82.396.090.395,00
4.	Utang Belanja Pegawai	219.693.929.428,00	157.429.357.293,00
5.	Belanja yang masih harus dibayar – TAL	436.324.908,00	747.924.806,00
6.	Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD	78.487.796.446,00	63.239.308.201,00
7.	Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	2.403.252.865,00	4.686.258.162,00
8.	Utang Belanja BLUD	71.157.554.989,00	65.304.595.501,00
9.	Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD	73.060.241.575,00	50.645.006.925,00
10.	Utang Jangka Pendek Lainnya	1.501.393.820,00	5.819.970.609
	Jumlah	**948.325.136.957,00**	**758.869.632.554,00**

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Pendek.

5.5.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2016, namun sampai dengan akhir periode 31 Desember 2016 belum disetor ke Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang PFK di PPKD per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp99.463.000,00 dan Rp324.469.034.806,00. Dengan rincian di Tabel 5.47

Tabel 5.47

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No.	Uraian	31 Desember 2015 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Utang PPh Pusat	231.000,00	151.781.498.238,00
2.	Utang PPN Pusat	1.540.000,00	170.919.080.474,00
3.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	97.692.000,00	0,00
4.	Utang Jamsostek	0,00	776.296.094,00
5.	Utang Asuransi	0,00	992.160.000,00
	Jumlah	**99.463.000,00**	**324.469.034.806,00**

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah Pemotongan Pajak yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 belum disetor ke Kas Negara.

Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2016 dan 2015, masing-masing sebesar Rp1.743.501.101,00 dan Rp4.132.085.856,00 dengan rincian pada Tabel 5.48.

Tabel 5.48

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Jenis Utang PFK di SKPD	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	789.968.185,00	1.801.024.215,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	103.124.729,00	255.199.602,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	65.088.457,00	240.140.838,00
4.	Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)	1.127.314,00	95.040,00
5.	Utang Pemotongan PPN	784.192.416,00	1.822.559.161,00
6.	Utang PFK Lainnya	-	13.067.000,00
	Jumlah	**1.743.501.101,00**	**4.132.085.856,00**

Utang PFK di SKPD tiga terbesar terdapat pada BLUD RS Pasar Rebo Rp279.720.724,00, PPKD Rp 242.071.200,00 dan Unit Pengelola Perparkiran Rp213.632.346,00 dengan rincian pada Tabel 5.49.

Tabel 5.49

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar

Per 31 Desember 2016

No.	Jenis Pajak	BLUD RS Pasar Rebo (Rp)	PPKD (Rp)	Unit Pengelola Perparkiran (Rp)
1.	Utang Pemotongan PPh Pasal 21	273.140.024,00	242.071.200,00	0,00
2.	Utang Pemotongan PPh Pasal 22	(2.726.110,00)	0,00	10.942.403,00
3.	Utang Pemotongan PPh Pasal 23	5.563.358,00	0,00	21.623.432,00
5.	Utang Pemotongan PPN	3.743.452,00	0,00	181.066.511,00
	Jumlah	**279.720.724,00**	**242.071.200,00**	**213.632.346,00**

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam lampiran 11.

5.5.2.1.2 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka adalah pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelum diberikannya pelayanan.

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp499.741.678.825,00 dan Rp82.396.090.395,00. Perbandingan tersebut dapat digambarkan dengan tabel 5.50.

Tabel 5.50

Pendapatan Diterima di Muka

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1	Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	0	19.339.416.959
2	Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda Oleh Pihak III	25.939.367.165	22.875.263.546
3	Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO	8.029.893.944	8.336.729.911
4	Pendapatan Diterima di Muka Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemda	9.558.450.000	15.283.850.000
5	Pendapatan Diterima di Muka BLUD	1.751.595.885	1.555.283.283
6	Pendapatan Pajak Diterima di Muka	435.655.694.152	802.104.064
7	Pendapatan Retribusi Diterima di Muka	17.779.280.429	14.203.442.632
8	Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito	1.027.397.250	0
	Total	**499.741.678.825**	**82.396.090.395**

a. Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp19.339.416.959,00. Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 merupakan lebih bayar Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak yang diatur dalam PMK Nomor 259/PMK.07/2015 dan pada Tahun 2016 telah dikompensasi/dipotong berdasarkan Per-4/PK/2016 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2016 dan terdapat koreksi kesalahan catat sesuai dengan PMK Nomor 259/PMK.07/2015, sehingga pada tahun 2016 Pendapatan Diterima di Muka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp00,00, dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Pendapatan Diterima Dimuka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 31 Desember 2015 (AUDITED)	Kompensasi ke Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi Tahun 2016	Kompensasi ke Dana Bagi Hasil SDA Perikanan Tahun 2016	Kompensasi ke Dana Bagi Hasil PBB Migas Tahun 2016	Koreksi Kesalahan Catat sesuai dengan PMK 259/PMK.07/2015	Pendapatan Diterima Dimuka Dana Bagi Hasil Pajak/ Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 31 Desember 2016
Dana Bagi Hasil Pajak – PBB Migas	121.721.000,00	-	-	-	121.721.000,00	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Pertambangan Minyak Bumi	18.987.745.471,00	5.777.335.000,00 192.578.000,00	-	9.694.676.810,00 323.155.660,00	3.000.000.001,00	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Hutan	1.279.833,00	-	-	492.480,00 787.353,00	-	-
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – SDA Hasil Perikanan	228.670.655,00	-	108.944.800,00		-	-
Total	19.339.416.959,00	5.969.913.000,00	108.944.800,00	10.138.838.158,00	3.121.721.001,00	-

b. Pendapatan diterima di muka atas sewa aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp25.939.367.165,00 seperti tersaji pada lampiran 12

c. Pendapatan diterima dimuka atas kontribusi BOT/BTO sebesar Rp8.029.893.944,00 seperti tersaji pada lampiran 13

d. Pendapatan diterima dimuka hasil lelang titik reklame atas aset Pemda sebesar Rp9.558.450.000,00 seperti tersaji pada lampiran 14

e. Pendapatan Diterima di Muka BLUD sebesar Rp1.751.595.885,00 merupakan Uang Muka Pasien RSUD, yang dapat dirinci sebagai berikut:

No.	SKPD	Jumlah
1	BLUD RS Koja	1.025.489.633
2	BLUD RS Tarakan	61.033.840
3	BLUD RS Cengkareng	356.558.541
4	BLUD RS Pasar Rebo	57.140.271
5	BLUD RS Budhi Asih	105.185.100
6	BLUD RS Duren Sawit	3.500.000
7	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	142.688.500
	Total	**1.751.595.885**

f. Pendapatan Pajak Diterima di Muka sebesar Rp435.655.694.152,00, merupakan pajak yang diterima oleh Dinas Pelayanan Pajak yaitu terdiri dari:
   1) Pendapatan Reklame yang telah dibayar namun belum tayang sebesar Rp.283.029.909.864,00;
   2) Kelebihan penerimaan PBB-P2 atas SPPT yang terbit sebesar Rp.152.586.005.430,00;
   3) Kelebihan penerimaan pajak Hotel BI Executive selama Tahun 2016 sebesar Rp.1.517.380,00; dan
   4) Kelebihan penerimaan pajak restoran sebesar Rp.38.261.478,00.

g. Pendapatan Retribusi Diterima di Muka sebesar Rp17.779.280.429,00, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	1.332.260.889
2	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.447.019.540
	Total	**17.779.280.429**

h. Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito sebesar Rp1.027.397.250,00.

5.5.2.1.3 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing Rp445.239.100.211,00 dan Rp342.052.450.888,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51

Rincian Saldo Utang Belanja

Per 31 Desember 2016 dan 2015

Rekening	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
Utang Belanja Pegawai	219.693.929.428,00	157.429.357.293,00
Utang Belanja TALI	436.324.908,00	747.924.806,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD	78.487.796.446,00	63.239.308.201,00
Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS	2.403.252.865,00	4.686.258.162,00
Utang Belanja BLUD	71.157.554.989,00	65.304.595.501,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD	73.060.241.575,00	50.645.006.925,00
Jumlah	**445.239.100.211,00**	**342.052.450.888,00**

a. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp219.693.929.428,00 dan Rp157.429.357.293,00. Utang Belanja Pegawai yang belum terbayarkan karena adanya kekurangan pembayaran perhitungan TKD yang baru dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Daerah. Berikut sepuluh SKPD dengan hutang TKD tahun 2016 yang terbesar :

1) Dinas Pendidikan Rp93.704.272.175,00;
2) Dinas Kesehatan Rp36.349.402.814,00;
3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp6.645.771.383,00;
4) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Rp6.589.157.357,00;
5) Biro Administrasi Keuangan dan Aset Daerah Rp6.128.402.650,00;
6) Satuan Polisi Pamong Praja Rp5.823.605.987,00;
7) Dinas Perhubungan dan Transportasi Rp5.255.975.376,00;
8) Kota Administrasi Jakarta Pusat Rp5.048.951.007,00;
9) Kota Administrasi Jakarta Selatan Rp4.007.808.800,00;
10) Kota Administrasi Jakarta Barat Rp3.530.499.941,00.

Rincian lebih lanjut Utang Belanja Pegawai disajikan dalam lampiran 15.

b. Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Telepon, Air, Listrik, dan Internet (TALI) per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp436.324.908,00 dan Rp747.924.806,00. Berikut sepuluh SKPD dengan Utang Belanja TALI tahun 2016 yang terbesar :

1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Perdagangan Rp91.040.419,00;
2) Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan – Jaktim Rp73.083.724,00;

3) Kelurahan Pasar Baru – Jakpus Rp36.099.522,00;
4) Kecamatan Tanah Abang – Jakpus Rp22.818.474,00;
5) Sudin Kebersihan – Jaktim Rp22.237.046,00;
6) Kelurahan Gandaria Utara – Jaksel Rp18.394.988,00;
7) Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres Rp18.350.000,00;
8) UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng Rp18.074.933,00;
9) Dinas Bina Marga Rp15.947.951,00; dan
10) Kelurahan Sukapura – Jakut Rp15.778.437,00.

c. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 63.239.308.201,00 dan selama Tahun 2016 terjadi penambahan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD sebesar Rp45.286.650.833,00 sehingga jumlahnya menjadi sebesar Rp108.525.959.034,00. Dari jumlah tersebut, utang yang sudah dibayarkan pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp29.368.775.428,00.

Terdapat juga koreksi pengurangan utang sebesar Rp 669.387.160,00 yang diantaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut ini :

1) Dinas Pekerjaan Umum (Dinas Bina Marga) sebesar Rp111.538.092,00 yang disebabkan karena pemeriksaan Inspektorat.
2) Biro Umum sebesar Rp297.482.068,00 yang disebabkan karena terdapat kesalahan perhitungan pajak dan pengembalian barang kepada pihak ketiga.
3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp260.125.000,00 yang disebabkan adanya kesepakatan dengan pihak ketiga dan honor tenaga ahli yang tidak jadi ditagihkan.

Nilai Saldo Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp78.487.796.446,00 atau naik sebesar

Rp15.248.488.245,00 dari Saldo Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD Tahun 2015.

Saldo Utang Kepada Pihak ketiga di SKPD per 31 Desember 2016 di antaranya terdapat pada SKPD-SKPD berikut:

1) Utang kepada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Koja sebesar Rp 20.721.542.097,00 yang diantaranya terdiri atas :
   a) pembangunan Rehab Berat Gedung Blok B RSUD Koja sebesar Rp 17.787.712.094,00
   b) Pembangunan Rehab Ringan Gedung Blok C RSUD Koja sebesar Rp2.685.607.032,00

   Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

2) Utang kepada Pihak Ketiga di Dinas Tata Air sebesar Rp 16.763.447.703,00 yang di antaranya terdiri atas kegiatan :
   a) Pelaksanaan pengerukan situ Kodamar sebesar Rp 1.617.103.500,00
   b) Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal sebesar Rp 1.367.292.000,00
   c) Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong sebesar Rp 1.366.470.000,00
   d) Pelaksanaan pengerukan Kali Semongol sebesar Rp 1.192.524.125,00
   e) Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara sebesar Rp 4.145.043.375,00
   f) Pelaksanaan pengerukan Kali Duri sebesar Rp 1.105.677.750,00

   Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

3) Utang Kepada Pihak Ketiga di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat sebesar Rp 13.615.158.570,00, yang di antaranya terdiri atas kegiatan :

a) Normalisasi Saluran Kecamatan Cengkareng sebesar Rp 5.383.810.312,00,
b) Normalisasi Saluran Kecamatan Grogol Petamburan sebesar Rp 4.742.559.440,00
c) Pembangunan Sheet Pile Kali Duri (Tahap II) sebesar Rp 1.790.808.000,00.

Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

4) Utang Kepada Pihak Ketiga di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat sebesar Rp6.488.905.438,00, yang diantaranya terdiri atas kegiatan :
   a) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4) sebesar Rp 2.001.723.660,00
   b) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Johar baru dan cempaka putih (Jl. Tendean, johar baru4, johar baru utara 2/6, Galur Selatan, Rawa Tengah, Galur Jaya, Rawa Selatan1, Bacang, Sayuti, Pramuka Jayasari, Rawasari Barat 8/9, Cempaka putih timur 17, cempaka warna, cempaka Putih 2A/2B/2C/ 2D/2J/2H, Mardani3, Cempaka1) sebesar Rp 1.519.630.788,00
   c) Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33) sebesar Rp 1.378.824.875,00

   Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

5) Utang Kepada Pihak Ketiga di Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan sebesar Rp 6.060.048.500,00 yang

diantaranya utang atas kegiatan Penyelesaian Revitalisasi TB. Klender sebesar Rp 5.843.970.000,00.

Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

6) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 4.897.590.027,00, yang diantaranya terdiri atas kegiatan :
   a) Biaya Maintenance Fee sebesar Rp 1.370.199.558,00
   b) Sewa Gudang & Mobiltas darat Jakut & Jabar sebesar Rp 1.190.950.000,00.

   Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

7) Utang kepada Pihak Ketiga di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar Rp2.566.939.737,00 yang diantaranya terdiri atas kegiatan :
   a) Pembangunan Perbaikan Rumah Susun Marunda Cluster A (Fisik) sebesar Rp 371.415.738,00
   b) Perbaikan Rumah Susun Muara Baru (Fisik) sebesar Rp 1.151.971.205,00
   c) Pembangunan Rusun Untuk Semper (Fisik) Rp. 510.011.895,00

   Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

8) Utang Kepada Pihak Ketiga di Suku Dinas Tata Air Jakarta Timur sebesar Rp 2.252.793.433,00, yang diantaranya terdiri atas kegiatan :

   a) Normalisasi Saluran Air Jl. Taruna Jaya Kel. Cibubur Kec. Ciracas sebesar Rp 375.472.150,00

   b) kegiatan Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,14,15 Kelurahan Pisangan Timur sebesar Rp 395.413.978,00

Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2016 yang belum dibayar.

9) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar Rp 1.746.444.730,00, yang merupakan kegiatan Perbaikan Pagar Taman Tebet Sisi Utara dan Sisi Selatan di wilayah Jakarta Selatan.

   Utang tersebut terjadi karena ada sisa pekerjaan fisik di tahun 2013 yang belum dibayar.

Nilai utang kepada pihak ketiga diatas tidak termasuk pekerjaan tahun 2016 yang dilanjutkan pada tahun 2017 yang nantinya akan diakui sebagai utang pada Laporan Keuangan semester pertama tahun 2017 yang pembayarannya dibebankan pada DPPA SKPD/UKPD Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut diatur pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 248 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan Serta Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2016.

Sisa pekerjaan tahun 2016 yang dilanjutkan di tahun 2017 diantaranya terdapat pada :

1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp123.417.603.665,00 yang diantaranya adalah :
   a) Pembangunan Gedung Blok F dan GWT Balaikota Provinsi DKI Jakarta (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 15% dengan nilai Rp5.216.958.675,00
   b) Perbaikan Rumah Susun Marunda Cluster A (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 29,80% dengan nilai Rp26.270.691.090,00
   c) Pembangunan Rusun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 29,83% dengan nilai Rp22.864.974.866,00

d) Pembangunan Rusun Rawa Bebek, Jakarta Timur (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 24,51% dengan nilai Rp21.457.242.507,00
e) Pembangunan Rusun KS. Tubun, Jakarta Barat (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 5% dengan nilai Rp7.466.900.000,00
f) Pembangunan Rusun Cakung Barat dengan sisa progress pekerjaan 34,84% dengan nilai Rp20.310.538.626,00
g) Pembangunan Rusun Jl. Bekasi Km. 2, Jakarta Timur (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 34,74% dengan nilai Rp14.312.287.650,00
h) Perbaikan Rumah Susun Marunda Cluster A (Fisik) dengan sisa progress pekerjaan 12,23% dengan nilai Rp1.639.860.821,00

2. Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 1.710.237.985,00 dengan sisa progress pekerjaan sebesar 4,97% yang merupakan pembangunan dan Peningkatan sistem Polder Aliran barat Prov. DKI Jakarta.

3. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 172.135.531.758,00 yang diantaranya adalah :
   a) Pembangunan dan design gedung AGD Dinas Kesehatan dengan sisa progress pekerjaan 20% dengan nilai Rp23.639.172.806,00
   b) Manajemen konstruksi pembangunan dan rehab total gedung puskesmas di Provinsi DKI Jakarta dengan sisa progress pekerjaan 49,05% dengan nilai Rp1.164.935.930,00
   c) Design and Build Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta dengan sisa progress pekerjaan 54,19% dengan nilai Rp106.182.649.771,00
   d) Design dan pembangunan rehab total gedung rumah sakit umum kelas D kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dengan

sisa progress pekerjaan 47,50% dengan nilai Rp40.380.700.000,00

4. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp9.410.966.366,00 yang diantaranya adalah :
   a) Rehab total Gedung SMPN 162 Jakarta Utara dengan sisa progress pekerjaan 18,77% dengan nilai Rp4.326.784.757,00
   b) Rehab total Gedung SMPN 244 Jakarta Utara dengan sisa progress pekerjaan 9,10% dengan nilai Rp2.115.888.775,00
   c) Rehab total Gedung SMPN 266 Jakarta Utara dengan sisa progress pekerjaan 9,79% dengan nilai Rp 1.818.595.882,00

Rincian lebih lanjut Utang kepada pihak ketiga di SKPD disajikan dalam lampiran 15.

Akun Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD tersebut tidak termasuk potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 sebesar Rp391.422.000.000,00 dan potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Portanigra atas lahan sengketa di Kelurahan Meruya Selatan merujuk pada CaLK 5.1.4.3.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT Dharma Winata Karya terjadi karena adanya lahan sengketa di Kelurahan Papanggo. Pada tahun 1992 Pemerintah DKI Jakarta melakukan Kerjasama dengan PT Super Progress atas lokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas ± 144.240 m2 untuk pembangunan perumahan. PT Dharma Winata Karya sebagai penggarap sebagian tanah tersebut kemudian menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Putusan PTUN Nomor 063/G/1993/ij/PTUN-jkt tanggal 24 Januari 1994 jo. Putusan PTUN Jakarta Nomor 52/B/1994/PTTUN.JKT tanggal 29

Juli 1994 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 113K/TUN/1994 tanggal 20 Juli 1995 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap yang amar keputusannya antara lain menghukum Tergugat I (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) untuk menerbitkan/mengeluarkan SIPPT atas tanah sengketa.

Menunjuk kepada keputusan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta bantuan Kejaksaan Tinggi sebagai pengacara negara Provinsi DKI Jakarta dengan membuat Surat Kuasa Khusus.

Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta selaku Penerima Kuasa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tanah seluas ± 30.000 m2 atas nama PT Dharma Winata Karya;

Sebagai tindaklanjut Surat Kuasa Khusus Nomor 206/1.711.37 tanggal 11 Maret 2014 dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pemberi Kuasa kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengirim surat Nomor B-7418/O.1/Gs/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 Perihal tindak lanjut penyelesaian ganti kerugian terhadap PT Dharma Winata Karya. Dengan pokok surat merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk tim penilai.

Selain itu masih terdapat potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 107/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst jo Nomor 700 PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015 dengan amar putusan menolak Peninjauan Kembali Dinas Perumahan dan menerintahkan Tergugat (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) memberikan ganti rugi sebesar Rp.4.730.000.000,- (empat milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah kepada Penggugat (473 KK), Atas kasus Perkara pembebasan

tanah seluas ± 2,4 Ha di wilayah Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk dibangun Rumah Susun Milik (Rusunami) sebanyak 6 Blok (200 unit/blok);

Biro hukum akan mengundang pihak-pihak terkait untuk mencari bukti baru/novum dalam rangka upaya hukum.

d. Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS

Saldo Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS merupakan Utang Belanja kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat di Dinas Kesehatan.

Saldo Utang Belanja kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp2.403.252.865,00 dan Rp4.686.258.162,00. Rincian Utang Belanja Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS disajikan pada Tabel 5.52.

Tabel 5.52
Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)
Per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Utang Gakin, SKTM, dan Gizi Buruk	2.403.252.865,00	4.626.372.236,00
2.	Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS	0,00	59.885.926,00
Jumlah		**2.403.252.865,00**	**4.686.258.162,00**

Saldo tersebut merupakan tagihan dari 5 lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mutasi sebagai berikut:

Utang per 31 Desember 2015	Rp	4.686.258.162,00
Jumlah klaim yang diajukan tahun 2016	Rp	28.320.854.791,00
Pembayaran tahun 2016	Rp	(31.947.268.937,00)
Koreksi	Rp	2.266.192.679,00
Pengurangan atas utang yang tidak layak klaim (Selisih Paket Pelayanan Esensial/Katastropik)	Rp	(922.783.830,00)
Utang per 31 Desember 2016	**Rp**	**2.403.252.865,00**

Rincian utang kepada lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2016 disajikan pada pada tabel 5.53

Tabel 5.53

Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Per 31 Desember 2016

No.	Lembaga Medis	Utang JPK Gakin (Rp)	Utang JPK PNS (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	PMI DKI Jakarta	2.343.300.000,00	0,00	2.343.300.000,00
2.	Jakarta	7.944.970,00	0,00	7.944.970,00
3.	Sukmul	28.740.878,00	0,00	28.740.878,00
4.	Pelni	19.277.466,00	0,00	19.277.466,00
5.	Sulianti Suroso	3.989.551,00	0,00	3.989.551,00
Jumlah		**2.403.252.865,00**	**0,00**	**2.403.252.865,00**

e. Utang Belanja BLUD

Utang Belanja BLUD merupakan utang-utang pada BLUD yang sumber pembayarannya berasal dari dana operasional BLUD. Saldo Utang Belanja BLUD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp 71.157.554.989,00,00 dan Rp65.304.595.501,00.

Saldo Utang Belanja BLUD per 31 Desember 2016 terdiri dari:

Tabel 5.54

Utang Belanja BLUD

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Utang Belanja BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat	122.159.348,00	623.974.135,00
2.	Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD	70.451.567.487,00	64.175.543.212,00
3.	Utang Belanja BLUD Pengelola Kawasan Pulogadung	505.078.154,00	505.078.154,00
4.	Utang Belanja BLUD Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	78.750.000,00	0,00
	Jumlah	**71.157.554.989,00**	**65.304.595.501,00**

Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD sebesar Rp 70.451.567.487,00. Rincian dapat dilihat di Tabel 5.55.

Tabel 5.55

Utang Belanja BLUD RSUD dan RSKD

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	SKPD	2016	2015
1.	RSUD Kepulauan Seribu	110.000,00	13.925.750,00
2.	RSU Kec. Kemayoran	678.742.338,00	6.048.000,00
3.	RSU Kec. Sawah Besar	6.199.973,00	-
4.	RSU Kec. Cempaka Putih	899.807.607,00	-
5.	RSU Kec. Johar Baru	364.475.607,00	2.750.000,00
6.	RSU Kec. Pademangan	197.935.483	34.924.250,00
7.	RSU Kec. Jagakarsa	182.117.699,00	47.641.000,00
8.	RSU Kec. Kramat Jati	9.631.333,00	3.355.569,00
9.	RSU Kec. Tanjung Priok	8.755.000,00	-
10.	BLUD RS Koja	11.536.783.499,00	23.655.381.431,00
11.	BLUD RS Cengkareng	21.313.669.767,00	19.709.917.147,00
12.	BLUD RS Budhi Asih	35.253.339.186,00	20.686.306.545,00
13.	BLUD RS Duren Sawit	-	15.293.520,00
Jumlah		**70.451.567.492,00**	**64.175.543.212,00**

f. Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD

Penyajian akun ini merupakan konversi dari laporan keuangan BLUD versi Standar Akuntansi Keuangan ke laporan keuangan versi Standar Akuntansi Pemerintahan.

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp73.060.241.575,00 dan Rp50.645.006.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) BLUD RS Tarakan

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Tarakan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp40.192.174.410,00 dan Rp31.468.213.526,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi.

2) BLUD RS Pasar Rebo

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Pasar Rebo per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp21.538.447.694,00 dan Rp18.977.913.399,00. Utang

tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi dan rekanan RSUD Pasar Rebo.

3) BLUD RS Cengkareng

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Cengkareng per 31 Desember 2016 dan 2015 yaitu Rp8.274.392.902,00 dan Rp0,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga penyedia makan pasien dan pedagang besar farmasi.

4) BLUD RSUD Pasar Minggu

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RSUD Pasar Minggu per 31 Desember 2016 dan 2015 yaitu Rp1.334.376.068,00 dan Rp0,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pihak ketiga pedagang besar farmasi dan alat kesehatan.

5) BLUD RSU Kecamatan

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RSU Kecamatan per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.048.290.567,00 dan Rp0,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi dan alat kesehatan.

6) BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp672.559.934,00 dan Rp0,00. Utang tersebut merupakan utang kepada pedagang besar farmasi.

7) Kantor Pengelola Taman Mergasatwa Ragunan

Utang Kepada Pihak Ketiga di Kantor Pengelola Taman Mergasatwa Ragunan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp198.880.000,00. Utang tersebut merupakan jasa pengobatan (*general check up*) untuk karyawan dan sudah dibayarkan di tahun 2016

5.5.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka pendek lainnya per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.501.393.820,00 dan Rp5.819.970.609,00. Utang Tahun 2016 tersebut Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame sebesar Rp2.283.500,00, utang restitusi pajak sebesar Rp1.499.110.320,00 dan utang hubungan istimewa kewajiban setor surplus dana BLUD Rp445.403.200,00. Untuk data rincian disajikan pada tabel 5.56.

Tabel 5.56

Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame	2.283.500,00	5.114.604.408,00
2.	Utang restitusi pajak	1.499.110.320,00	705.366.201,00
	Jumlah	**1.501.393.820,00**	**5.819.970.609,00**

5.5.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp537.058.594.103,00 dan Rp197.707.784.670,00. Rincian Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2016 dan 2015 dapat dilihat padaTabel 5.57 berikut ini:

Tabel 5.57

Kewajiban Jangka Panjang

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Utang Dalam Negeri	504.949.300.724,00	169.192.675.455,00
2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	32.109.293.379,00	28.515.109.215,00
	Jumlah	**537.058.594.103,00**	**197.707.784.670,00**

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.2.2.1 Utang Dalam Negeri

5.5.2.2.1.1 Utang Kepada Pemerintah Pusat

Saldo Utang Kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp504.949.300.724,00 dan Rp169.192.675.455,00 . Kewajiban ini merupakan utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat dengan Naskah Penerusan Perjanjian Pinjaman (NPPP) nomor SLA–1247/DSMI/2012 untuk pembiayaan kegiatan pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal, dan waduk di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun dana pinjaman tersebut telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp120.308.375.049,00 pada tahun 2014, sebesar Rp48.884.300.406,00 pada tahun 2015, dan sebesar Rp335.756.625.269,00 pada tahun 2016, sehingga saldo utang menjadi Rp504.949.300.724,00. Berdasarkan NPPP tersebut pembayaran pokok utang JEDI jatuh tempo setiap tanggal Jatuh tempo 1 Maret dan 1 September dan akan dimulai pembayaran awal pada tanggal 1 September 2017, sehingga tidak terdapat penyajian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok di Neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2015. Sedangkan untuk pembayaran bunga pinjaman sudah mulai jatuh tempo pada tahun 2015.

5.5.2.2.2 Utang Jangka Panjang Lainnya

5.5.2.2.2.1 Utang Jangka Panjang di BLUD

Besaran Utang Jangka Panjang di BLUD pada tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp32.109.293.379,00 dan Rp28.515.109.215,00. Saldo tersebut dimiliki okeh RSUD Cengkareng sebesar Rp13.945.788.064,00 dan RSUD Pasar Rebo sebesar Rp18.163.505.315,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. RSUD Cengkareng

   Utang Jangka Panjang di BLUD pada RSUD Cengkareng adalah reklasifikasi dari utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Cengkareng. Utang Jangka Panjang di BLUD per 31 Desember

2016 dan 2015 sebesar Rp13.945.788.064,00 dan Rp20.694.256.477,00. Terjadi penurunan sebesar Rp6.748.468.413,00 dikarenakan adanya penilaian kembali terkait imbalan pasca kerja. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RSUD Cengkareng adalah sebagai berikut:

Tabel 5.58

Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Cengkareng

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Imbalan Pasca Kerja Karyawan	11.095.160.126,00	17.843.628.539,00
2.	Bagi Hasil Optik	0,00	0,00
3.	Utang Lain (Eks. PT RS. Cengkareng)	2.850.627.938,00	2.850.627.938,00
	JUMLAH	**13.945.788.064,00**	**20.694.256.477,00**

b. RSUD Pasar Rebo

Utang Jangka Panjang di BLUD pada RSUD Pasar Rebo besaranya pada tahun 2016 dan 2015 sebesar Rp18.163.505.315,00 dan Rp7.820.852.738,00. Rincian Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RSUD Pasar Rebo adalah sebagai berikut:

Tabel 5.59

Rincian Utang Jangka Panjang di RSUD Pasar Rebo

Per 31 Desember 2016 dan 2015

No	Uraian	31 Desember 2016 (Rp)	31 Desember 2015 (Rp)
1.	Imbalan Pasca Kerja Karyawan	17.367.672.523,00	7.165.379.494,00
2.	Penghargaan Masa Bakti	795.832.792,00	655.473.244,00
	JUMLAH	**18.163.505.315,00**	**7.820.852.738,00**

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2016 di Neraca sebesar Rp441.491.839.269.867,00 adalah nilai Ekuitas Akhir yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2016.

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

   Nilai Ekuitas pada neraca awal per 1 Januari 2016 yang disusun berdasarkan basis akrual adalah Rp420.104.811.786.307,00.

2. Koreksi Ekuitas

   Koreksi Ekuitas pada LPE Tahun 2016 adalah sebesar negatif Rp417.333.061.469,00, yang terdiri dari:

   a. Koreksi Penambahan Ekuitas

      Koreksi Penambahan Ekuitas Tahun 2016 adalah sebesar Rp2.771.191.181.891,00, dengan rincian sebagai berikut:

      1) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp123.451.664.142,00 terdiri dari:
         a) Kurang catat Piutang Tahun 2015 sebesar Rp116.632.780.040,00;
         b) Koreksi Lebih Catat Penyisihan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp38.062.195,00;
         c) Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Bunga Deposito sebesar Rp6.780.821.907,00
      2) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp21.452.028.936,00 merupakan kurang catat persediaan awal.
      3) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal nilai investasi permanen sebesar Rp80.996.166.299,00.

4) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp673.560.055.167,00 terdiri dari:
   a) Kurang Catat Aset Tetap dan Lain-lain sebesar Rp666.826.280.009,00;
   b) Koreksi Kurang Catat Transfer Masuk Aset Tetap dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp188.200.000,00;
   c) Koreksi kurang catat nilai Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp6.545.575.158,00;
5) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.651.231.213.549,00 terdiri dari:
   a) Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya yang Diserahkan ke Pihak Lain di Luar SKPD sebesar Rp1.195.169.894,00;
   b) Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Tahun 2015 sebesar Rp1.616.482.327.078,00;
   c) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atas Belanja Modal sebelum Tahun 2016 karena Temuan sebesar Rp3.350.381.370,00;
   d) Koreksi Lebih Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp120.511.000,00;
   e) Koreksi Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Aset Tetap/Lainnya karena Reklasifikasi Aset Tetap dan Aset Lainnya ke Ekstrakomtabel sebesar Rp22.867.375.700,00;
   f) Koreksi Penyajian Saldo Awal Akum. Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Tahun 2016 sebesar Rp3.962.484.108,00;

g) Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya yang lebih catat sebesar Rp2.005.534.000,00;

h) Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum yang Double Catat dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp1.247.430.399,00.

6) Penambahan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal kewajiban sebesar Rp3.974.234.164,00 terdiri dari:

a) Koreksi Utang Tahun 2015 sebesar Rp852.513.163,00;

b) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp3.121.721.001,00.

7) Koreksi penambahan lainnya sebesar Rp216.525.819.634,00 terdiri dari:

a) Pembatalan Penyisihan atas Piutang yang Telah Terbayar sebesar Rp626.367.185,00;

b) Pembatalan Kesepakatan Pengadaan Transjakarta sebesar Rp131.039.134.160,00;

c) Hasil Perkembangbiakan untuk Diserahkan ke Pihak Lain/Dijual sebesar Rp422.090.000,00;

d) Koreksi Kurang Catat Pendapatan (Lainnya) sebesar Rp37.062.310,00

e) Penerimaan Kas dari Penjualan Aset Tetap dengan SK Penghapusan sebelum tahun berjalan sebesar Rp467.668.555,00;

f) Aset Tetap yang Belum Ditetapkan Statusnya (sebelum tahun 2016) sebesar Rp7.319.821.537,00;

g) Selisih Transfer Aset Tetap di SKPD (tahun 2016) sebesar Rp76.356.259.072,00;

h) Selisih Transfer Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (tahun 2016) sebesar Rp257.416.815,00.

b. Koreksi Pengurangan Ekuitas

Koreksi Pengurangan Ekuitas Tahun 2015 adalah sebesar Rp3.188.524.243.360,00 dengan rincian sebagai berikut

1) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Piutang sebesar Rp7.769.704.576,00 terdiri dari:
   a) Lebih Catat Piutang Tahun 2015 dan 2014 sebesar Rp380.621.953,00;
   b) Koreksi Kurang Catat Penyisihan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp4.711.503,00;
   c) Koreksi Kurang Catat Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2015 sebesar Rp6.990.965.200,00;
   d) Eliminasi Penyisihan Piutang Tahun 2015 sebesar Rp1.866.190,00;
   e) Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan sebesar Rp9.279.458,00;
   f) Koreksi Penyajian Saldo Awal Piutang Bunga Deposito sebesar Rp382.260.272,00.
2) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal persediaan Rp4.611.307.752,00 merupakan lebih catat persediaan awal.
3) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian Saldo Awal Nilai Investasi Non Permanen Rp77.309.253,00.
4) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp802.899.998.669,00 terdiri dari:
   a) Lebih Catat Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp501.326.286.546,00;
   b) Penyerahan Aset Tetap Ke Pihak Lain di Luar SKPD (Selain Belanja Modal 2016) sebesar Rp13.986.232.059,00;
   c) Koreksi Aset Tetap dan Aset Lainnya atas Temuan sebesar Rp12.384.724.773,00;

d) Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp120.511.000,00;
e) Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Aset Kemitraaan dengan Pihak Ketiga (dobel catat dengan SKPD) sebesar Rp27.893.082.000,00;
f) Koreksi Lebih Catat Saldo Awal Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya (dobel catat dengan SKPD) sebesar Rp243.254.093.457,00;
g) Koreksi Aset Fasos Fasum yang dobel catat dengan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp3.183.689.600,00;
h) Koreksi Aset Tidak Berwujud yang Tidak Memenuhi Kriteria sebesar Rp751.379.234,00.

5) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Akum. Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.948.833.887.386,00 terdiri dari:
   a) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi Tahun 2015 sebesar Rp960.150.095.356,00;
   b) Koreksi Kurang Catat Akumulasi Penyusutan dan/atau Amortisasi atas Transfer Keluar Aset Tetap/Lainnya dari SKPD Lain (Sebelum Tahun 2015) sebesar Rp 5.005.446.540,00;
   c) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp1.919.773.038,00;
   d) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah / *Bulit Operate Transfer* (BOT) sebesar Rp772.512.000,00;
   e) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna / *Bulit Transfer Operate* (BTO) sebesar Rp47.141.179.800,00;

f) Koreksi Kurang Catat Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Fasos Fasum sebesar Rp933.844.880.652,00.

6) Pengurangan ekuitas dari koreksi penyajian saldo awal Utang sebesar Rp11.448.024.654,00 terdiri dari koreksi kurang catat utang sebesar Rp7.853.840.490,00 dan penilaian kembali Utang Jangka Panjang BLUD sebesar Rp3.594.184.164,00.

7) Koreksi pengurangan lainnya sebesar Rp412.884.011.070,00 terdiri dari:

a) Koreksi Saldo Awal Kas BLUD sebesar Rp20.339.342,00

b) Setoran Kas Pembubaran SKPD/BLUD sebesar Rp89.142.333.769,00;

c) Koreksi Kurang Catat Pendapatan Pajak – LO sebesar Rp323.718.623.959,00;

d) Koreksi Kas Konsinyasi sebesar Rp2.714.000,00.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang disajikan di LPE menyajikan nilai koreksi ekuitas sebagai dampak dari perubahan kebijakan. Pada tahun 2016, tidak terdapat koreksi ekuitas atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.

Sedangkan pada tahun 2015, Koreksi atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan yang disajikan di LPE menyajikan nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 sebagai dampak dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual pada tahun 2015. Adapun nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Lain-lain dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan tahun 2014 adalah sebesar Rp25.946.813.122.084,00, yang terdiri dari:

a. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp24.737.392.389.270,00,
b. Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Fasos Fasum sebesar Rp1.100.232.508.224,00.
c. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Dijual sebesar Rp41.835.372.724,00.
d. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp67.352.851.866,00.

4. Surplus – LO

Surplus–LO per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp21.804.360.545.029,00. Perhitungan Surplus – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LO	65.201.703.739.643,00	
Beban	(43.337.726.678.390,00)	
Surplus Kegiatan Operasional		21.863.973.811.253,00
Surplus Kegiatan Non Operasional		(58.078.462.418,00)
Beban Luar Biasa		(1.538.053.806,00)
Surplus – LO		**21.804.360.545.029,00**

5.6 Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2016.

Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2016.

5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per 31 Desember 2016, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar Rp52.230.431.811.668,00 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp38.115.926.329.644,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2016 sebesar Rp14.114.505.482.024,00.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah, dan (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 disajikan dalam tabel 5.60 sebagai berikut:

Tabel 5.60

Arus Kas Aktivitas Operasi

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2016	31 Desember 2015 (Audited)
1	2		
1	**ARUS KAS MASUK :**		
a.	Penerimaan Pajak Daerah	31.613.197.634.662,00	29.076.926.598.506,00
b.	Penerimaan Retribusi daerah	675.475.066.072,00	459.459.498.063,00
c.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	303.204.423.956,00	527.280.486.037,00
d.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.355.795.634.264,00	3.530.447.056.431,00
e.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	12.304.612.421.602,00	5.751.741.852.400,00
f.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	83.970.656.912,00	135.525.792.297,00
g.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	0,00	0,00
h.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	2.883.078.374.200,00	0,00
i.	Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	2.755.110.753.389,00
j.	Penerimaan/Pendapatan Hibah	11.097.600.000,00	10.589.130.000,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	**52.230.431.811.668,00**	**42.247.081.167.123,00**
2	**ARUS KAS KELUAR :**		
a.	Pembayaran Pegawai	19.359.807.013.530,00	17.312.344.016.739,00
b.	Pembayaran Barang	13.015.256.877.649,00	10.584.935.805.485,00
c.	Pembayaran Bunga	11.739.277.402,00	5.478.639.527,00
d.	Pembayaran Subsidi	903.898.736.862,00	659.081.781.344,00
e.	Pembayaran Hibah	2.161.217.950.484,00	1.717.428.915.536,00
f.	Pembayaran Bantuan Sosial	2.452.948.130.000,00	2.087.123.200.000,00
g.	Pembayaran Bantuan Keuangan	210.314.034.030,00	371.152.504.510,00
h.	Pembayaran Tak Terduga	744.309.687,00	877.074.802,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	**38.115.926.329.644,00**	**32.738.421.937.943,00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI (I-II)		14.114.505.482.024,00	9.508.659.229.180,00

1. Arus Kas Masuk

a. Penerimaan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp31.613.197.634.662,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.536.271.036.156,00 atau 8,72% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp29.076.926.598.506,00.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp675.475.066.072,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp216.015.568.009,00 atau 47,02% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp459.459.498.063,00.

c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp303.204.423.956,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp224.076.062.081,00atau 42,50% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp527.280.486.037,00.

d. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp4.355.795.634.264,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp825.348.577.833,00 atau 23,38% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar 3.530.447.056.431,00.

Arus kas masuk Lain-lain PAD per 31 Desember 2016 termasuk pendapatan bunga dari Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah sebesar Rp81.575.989.831,00 sebagaimana dijelaskan CaLK 5.1.1.1.4.7 tentang Pendapatan Bunga.

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp12.304.612.421.602,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.552.870.569.202,00 atau 113,93% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp5.751.741.852.400,00

f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp83.970.656.912,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp51.555.135.385,00 atau 38,04% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp135.525.792.297,00.

g. Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat nihil dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 yang juga tercatat nihil.

h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Arus kas masuk dari Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp2.883.078.374.200,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar 100% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 yang tercatat nihil.

i. Penerimaan Dana Penyesuaian

Arus kas masuk dari Dana Penyesuaian untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat nihil. Arus kas masuk

tersebut mengalami penurunan sebesar 100% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Dana Alokasi Umum untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp2.755.110.753.389,00.

j. Penerimaan Hibah

Arus kas masuk dari Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp11.097.600.000,00 merupakan hibah dari PT Jasa Raharja. Apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp10.589.130.000,00 maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 naik sebesar Rp508.470.000,00 atau 4,80%.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pegawai

Belanja Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2016.

Arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp19.359.807.013.530,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.a. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.047.462.996.791,00 atau 11,83% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp17.312.344.016.739,00.

b. Pembayaran Barang

Belanja Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Arus kas keluar Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp13.015.256.877.649,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.430.321.072.164,00 atau 22,96% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp10.584.935.805.485,00.

c. Pembayaran Bunga

Belanja Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman.

Arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp11.739.277.402,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp6.260.637.875,00 atau 114% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp5.478.639.527,00

d. Pembayaran Subsidi

Arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp903.898.736.862,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d, sedangkan arus kas keluar Belanja Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 adalah Rp659.081.781.344,00.

Arus Kas tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp244.816.955.518,00 atau 37,15% dibandingkan dengan arus kas keluar belanja subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015.

e. Pembayaran Hibah

Belanja Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.161.217.950.484,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp443.789.034.948,00 atau 25,84% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp1.717.428.915.536,00.

f. Pembayaran Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2016.

Arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp2.452.948.130.000,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp365.824.930.000,00 atau 17,53% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp2.087.123.200.000,00

g. Pembayaran Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan keuangan atau sejenisnya.

Arus kas keluar Belanja Bantuan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp210.314.034.030,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.g. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp160.838.470.480,00 atau 43,33% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp371.152.504.510,00

h. Pembayaran Tak Terduga

Arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp744.309.687,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp132.765.115,00 atau 15,14% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp877.074.802,00

5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2015, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat yaitu ditunjukkan oleh pengadaan Belanja Modal sebesar Rp10.244.016.709.208,00 dan penjualan aset sebesar Rp92.063.176.671,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2016 Arus kas keluar belanja modal sebesar Rp8.752.096.406.943,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.2 dan penjualan aset sebesar Rp14.807.187.252,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 5.1.1.1.4.1.

Arus Kas Aktivitas Investasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Aset Lainnya (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun 2016 dan periode yang berakhir 31 Desember 2016, sebagai berikut:

Tabel 5.61
Arus Kas Aktivitas Investasi
Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

(dalam rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)
1	2	3	3
1	**ARUS KAS MASUK :**		
a.	Penjualan atas Tanah	0,00	78.888.677.000,00
b.	Penjualan atas Brandgang	0,00	0,00
c.	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	333.248.664,00	0,00
d.	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	6.692.905.476,00	7.617.870.887,00
e.	Penjualan Aset Tetap Lainnya	7.781.033.112,00	5.556.628.784,00
f.	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman	338.475.881.320,00	0,00
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	**353.283.068.572,00**	**92.063.176.671,00**
2	**ARUS KAS KELUAR :**		
a.	Pembentukan Dana Cadangan	81.575.989.831,00	78.999.209.715,00
b.	Perolehan Tanah	1.970.939.912.239,00	3.451.775.763.772,00
c.	Perolehan Peralatan dan Mesin	1.894.719.648.105,00	2.002.190.574.946,00
d.	Perolehan Gedung dan Bangunan	1.693.089.644.158,00	2.063.978.323.661,00
e.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.953.696.738.790,00	2.685.243.694.385,00
f.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	239.650.463.651,00	40.828.352.444,00
g.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.861.853.026.360,00	3.501.000.000.000,00
h.	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	**11.695.525.423.134,00**	**13.824.015.918.923,00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI (I-II)		**(11.342.242.354.562,00)**	**(13.731.952.742.252,00)**

1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga dan adanya Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2016 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melakukan Penjualan Aset Tetap berupa penjualan perlatan/perlengkapan kantor tidak terpakai, penjualan atas gedung dan bangunan serta Penjualan Aset Lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas Daerah sebesar Rp14.807.187.252,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp92.063.176.671,00. Selama tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

mendapatkan Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman sebesar Rp338.475.881.319,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembentukan Dana Cadangan

Arus Kas keluar Pembentukan dana cadangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp81.575.989.831,00 Sebagaimana telah diungkapkan pada Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, arus kas masuk yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 yang diakui sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan). Arus kas keluar dari pembentukan dana cadangan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.576.780.116,00 atau 3,26% dibandingkan yang diperoleh dari bunga deposito Dana Cadangan Periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp78.999.209.715,00.

b. Perolehan Aset Tetap

Arus Kas Keluar berupa Perolehan Aset Tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset dan akan menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2016 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp8.752.096.406.943,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.491.920.302.265,00 dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp10.244.016.709.208,00.

c. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada BUMD, PT Patungan, dan Badan Pengelola (BP).

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Patungan sebesar Rp3.501.000.000.000,00.

Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp2.861.853.026.360,00 dengan rincian sebagai berikut :

1)	PT Mass Rapid Transportstation (MRT)	Rp	149.000.000.000,00
2)	PT Bank DKI	Rp	500.000.000.000,00
3)	PT Food Station Cipinang	Rp	300.000.000.000,00
4)	PT Jakarta Propertindo	Rp	1.000.000.000.000,00
5)	PD Dharma Jaya	Rp	72.853.026.360,00
6)	PD Pasar Jaya	Rp	170.000.000.000,00
7)	PD PAL Jaya	Rp	140.000.000.000,00
8)	PT Transportasi Jakarta	Rp	330.000.000.000,00
9)	PT Penjamin Kredit Daerah	Rp	200.000.000.000,00

d. Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Tidak ada Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015.

5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Aktivitas Pendanaan mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan bertujuan untuk memprediksi klaim pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah Daerah di masa akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan berasal dari Penerimaan Belanja Dibayar di Muka (Sisa Kas di Bendahara TA 2015) sebesar

Rp374.971.318.364,00 sedangkan Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan per 31 Desember 2016 berasal dari Penerimaan Belanja dibayar dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2015) sebesar Rp813.781.599.291,00, dan Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA 2015 sebesar Rp1.675.259.235,00. Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015, dijelaskan pada Tabel 5.62 sebagai berikut:

Tabel 5.62

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

No.	Uraian	31 Desember 2016 (Audited)	31 Desember 2015 (Audited)
1	2	3	3
1	**ARUS KAS MASUK :**		
a.	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2015)	813.781.599.291,00	374.971.318.364,00
b.	Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2015	1.675.259.235,00	
	JUMLAH ARUS KAS MASUK (I)	**815.456.858.526,00**	**374.971.318.364,00**
2	**ARUS KAS KELUAR :**		
a.	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	0,00	4.084.644.411,00
b.	Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara Semester I TA.2016)	21.603.202.103,00	0,00
c.	Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)	467.779.919,00	813.781.599.291,00
	JUMLAH ARUS KAS KELUAR (II)	**22.070.982.022,00**	**817.866.243.702,00**
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN (I-II)		**793.385.876.504,00**	**(442.894.925.338,00)**

1. Arus Kas Masuk

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2016, arus kas masuk dari Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2015) sebesar Rp813.781.599.291,00 naik sebesar Rp438.810.280.927,00 atau 117,03% dibandingkan dari periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp374.971.318.364,00. Arus Kas masuk selain dari Belanja Dibayar di Muka juga berasal dari Piutang Kelebihan Pembayaran Pajak TA.2015 sebesar Rp1.675.259.235,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran Utang Pokok Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-Lembaga Keuangan. Arus kas keluar Pembayaran Utang Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp4.084.644.411,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tidak ada pembayaran Utang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Pusat.

b. Belanja Dibayar di Muka

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 arus kas keluar Belanja Dibayar di Muka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2016 tercatat sebesar Rp21.603.202.103,00.

c. Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 arus kas keluar Piutang Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga (Akhir Tahun) Tahun Anggaran 2016 tercatat sebesar Rp467.779.919,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp813.781.599.291,00.

5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

1 Arus Kas Masuk

a. Penerimaan Uang Jaminan

Penerimaan Uang Jaminan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp343.265.050,00 sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat

penerimaan sebesar Rp74.679.500,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 268.585.550,00.

b. Penerimaan Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 terdapat penerimaan jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp61.410.498,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 terdapat penerimaan dan pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp399.754.105,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp338.343.607,00 atau 84,64%.

c. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 jumlah penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp3.216.017.892.289,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.847.126.182.700,00 dibandingan periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebesar Rp368.891.709.589,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Hasil Eksekusi Uang Jaminan

Pengeluaran atas Hasil Eksekusi Uang Jaminan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 masing-masing tercatat sebesar Rp5.455.585.958,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.436.589.618,00 atau 20,84% dibandingkan dengan periode yang berakhir 31 Desember 2015 tercatat pengeluarannya sebesar Rp.6.892.175.576,00.

b. Jasa Giro Rekening Kas Non Anggaran

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 terdapat pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp61.410.498,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 terdapat pengeluaran jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar Rp399.754.105,00 mengalami penurunan sebesar Rp338.343.607,00.

c. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 jumlah pengeluaran PFK sebesar Rp3.540.283.069.748,00. Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 jumlah pengeluaran PFK sebesar Rp316.452.058.679,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.223.831.011.069,00.

Tabel 5.63

Perhitungan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2016

(dalam rupiah)

No	Jenis Potongan	Penerimaan PFK per 31 Desember 2016	Pengeluaran PFK Per 31 Desember 2016
1.	PPN	876.043.755.306,00	1.046.961.295.780,00
2.	PPh Pasal 21	1.626.679.537.841,00	1.739.825.983.181,00
3.	PPh Pasal 22	44.597.154.345,00	49.333.677.759,00
4.	PPh Pasal 23	12.087.064.377,00	12.911.614.605,00
5.	PPh Pasal 4 ayat 2	163.994.574.029,00	197.068.322.285,00
6.	BPJS Ketenagakerjaan	6.099.545.415,00	6.875.841.509,00
7.	Asuransi	28.811.345.000,00	29.803.505.000,00
8.	Dana Pensiun	155.074.360.901,00	155.074.360.901,00
9.	Pot BPJS Kesehatan	65.294.046.801,00	65.294.046.801,00
10.	Tabungan Hari Tua	106.105.289.355,00	106.105.289.355,00
11.	Taperum	6.535.113.000	6.535.113.000,00
12.	PFK di BLUD	124.696.105.919,00	124.494.019.572,00
	Jumlah	**3.216.017.892.289,00**	**3.540.283.069.748,00**

5.6.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016 terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp3.236.271.505.599,00, sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 terjadi penurunan kas bersih sebesar Rp4.622.241.542.811,00. Saldo awal kas di BUD tahun 2016 sebesar Rp4.447.646.232.438,00, sehingga atas kenaikan yang terjadi maka saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah per 31 Desember 2016 menjadi sebesar Rp8.701.388.553.769,00.

Saldo Kas di Neraca per 31 Desember 2016 sebesar Rp8.723.737.512.402,00 merupakan jumlah seluruh uang yang ada dalam penguasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saldo kas tersebut terdiri dari saldo akhir Kas di BUD/Kas Daerah dan Setara Kas BLUD, Saldo akhir kas di bendahara penerimaan serta saldo akhir kas di bendahara pengeluaran. Saldo kas tersebut berbeda dengan jumlah

SiLPA tahun 2016 sebesar Rp7.706.289.336.723, dimana SiLPA tahun 2016 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan - LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.

Selisih antara Kas di Neraca dengan SiLPA tahun 2016 sebesar Rp1.017.448.175.679,00 dikarenakan SiLPA tidak memperhitungkan Potongan PFK, Kas Transitoris, dan Pendapatan yang Belum Dilakukan Pengesahan di BUD. Selain itu, terdapat pengurang SiLPA dikarenakan kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.5.1.1.5.11.g.

Penjelasan selisih saldo kas dan SiLPA dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo Kas		8.723.737.512.402,00
SiLPA		7.706.289.336.723,00
Selisih		**1.017.448.175.679,00**
Rincian Selisih SiLPA		
Utang PFK		1.600.892.901,00
Potongan Pajak dan Jamsostek	1.771.000,00	
Pajak di SKPD yang Belum Disetor	414.974.370,00	
Pajak di BLUD yang Belum Disetor	1.086.455.531,00	
Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	97.692.000,00	
Uang Jaminan		2.283.500,00
Kas Transitoris		
Pendapatan Belum Disahkan		1.016.312.779.197,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	2.377.506,00	
Kas Tunai - BLUD	1.320.020.275,00	
Kas di Bank - BLUD	1.013.150.761.377,00	
Uang Muka Pasien RSUD/K	1.608.907.385,00	
Pendapatan yang Belum Disetor	230.712.654,00	
Kelebihan Penyetoran Pajak ke Kas Negara		(467.779.919,00)
Total		**1.017.448.175.679,00**

BAB VI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2007, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 (tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan 1 Kabupaten Administrasi yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km, yang menjadi bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI Jakarta, di sebelah utara Laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Otonomi yang diletakkan pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan menurut azas desentralisasi,

dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.2. Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017. Selain bertugas dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:

1) Pendidikan;
2) Kesehatan;
3) Pekerjaan Umum;
4) Perumahan Rakyat
5) Penataan Ruang;
6) Perencanaan Pembangunan;
7) Perhubungan;
8) Lingkungan Hidup;
9) Pertanahan;
10) Kependudukan dan Catatan Sipil;

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12) Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS);
13) Sosial;
14) Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16) Penanaman Modal;
17) Kebudayaan;
18) Pemuda dan Olahraga;
19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah;
21) Ketahanan Pangan;
22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
23) Statistik;
24) Kearsipan;
25) Komunikasi dan Informatika;
26) Perpustakaan;

Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup

1) Pertanian
2) Kehutanan
3) Energi dan Sumberdaya Mineral
4) Pariwisata
5) Kelautan dan Perikanan
6) Perdagangan
7) Industri.

6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan prioritas daerah dapat digambarkan secara grafis sebagai berikut :

Skema Penjabaran Visi Misi RPJMD 2013-2017

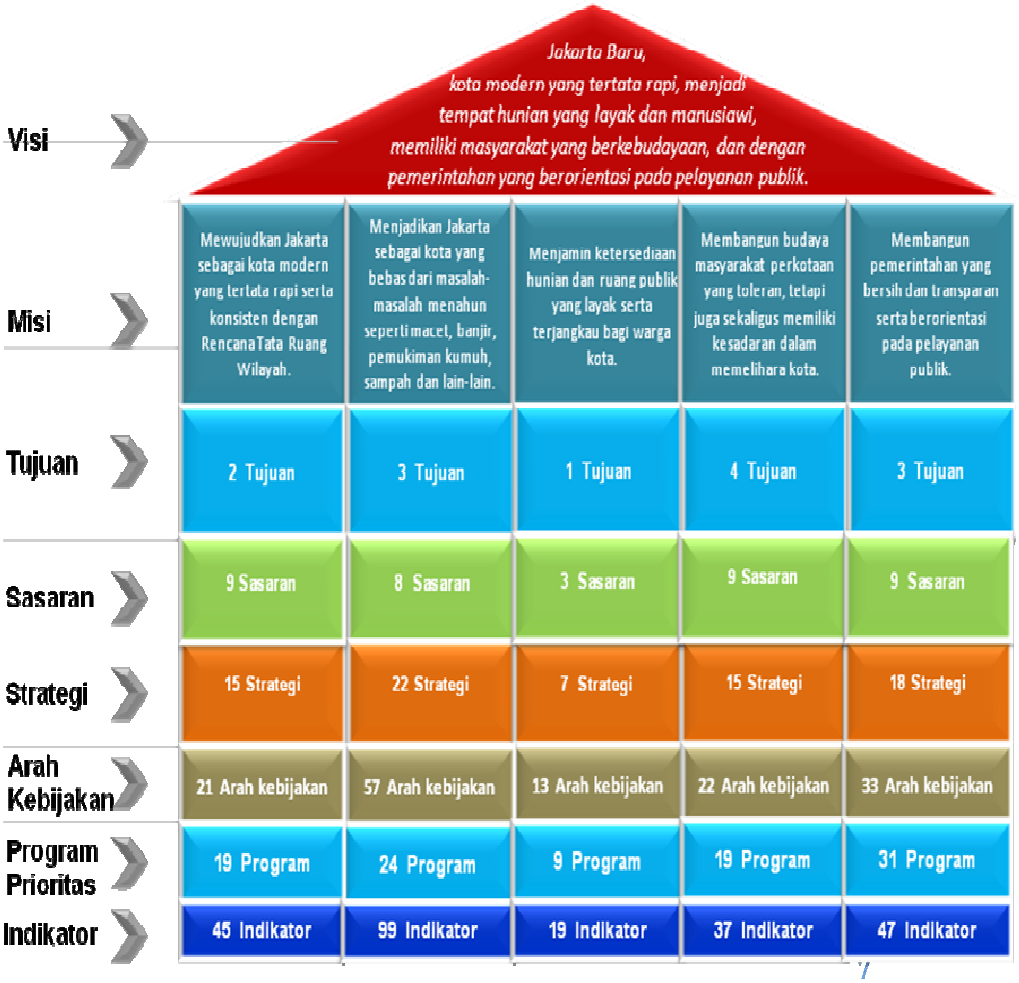

Sumber : RPJMD 2013 - 2017

Adapun penjelasan untuk masing-masing elemennya dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Visi Dan Misi

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 adalah **"JAKARTA BARU, KOTA MODERN YANG TERTATA RAPI, MENJADI TEMPAT HUNIAN YANG LAYAK DAN MANUSIAWI, MEMILIKI MASYARAKAT YANG**

BERKEBUDAYAAN, DAN DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK".

Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah:

a. Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.
b. Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
c. Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.
d. Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan dalam rangka menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut :

a. Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lain-lain;
c. Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota;
d. Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota;
e. Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik.

6.4 Kerjasama Antar Daerah

a. Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP)

Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur), yang didirikan sejak tahun 1976 (saat itu masih meliputi Jabotabek) telah mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan mensimplikasikan program/kegiatan kerjasama pembangunan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur.

Kerjasama pembangunan ini telah berkembang pesat, kelembagaannya telah disempurnakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 tanggal 8 Oktober 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabek serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi kerjasama di wilayah Jabodetabekjur, dalam aturan kelembagaan kerjasama BKSP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diwajibkan memberi kontribusi dana untuk pembiayaan operasional sekretariat. Kontribusi dimaksud sesuai ketentuan diberikan dalam bentuk bantuan hibah yang digunakan untuk kegiatan operasional Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dalam menjalankan tugas-tugas koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi program/kegiatan kerjasama di wilayah Jabodetabekjur.

b. Kerja Sama Provinsi DKI Jakarta Dengan Provinsi Se Jawa-Bali

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbang Reg) Jawa-Bali Tahun 2016 dilaksanakan di Ballroom Prama Grand Preanger Hotel Bandung, Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh 7 Provinsi seJawa-Bali, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Pada acara tersebut seluruh Gubernur seJawa-Bali diminta untuk memberikan paparan dengan tema “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Konektivitas Infrastruktur Sektor Pertanian dan Kelautan ”.

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan dalam Musrenbang Regional se Jawa-Bali Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1) Distribusi Produksi Pertanian dan kelautan yang belum memadai;
2) Perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan permukiman penduduk, industri, pertokoan dan pariwisata;
3) Stigma pelaku sektor pertanian dan kelautan tidak "bankable", dan tidak memiliki akses memadai terhadap lembaga keuangan dan pembiayaan;
4) Minat generasi muda terhadap profesi sektor pertanian dan kelautan semakin menurun;
5) Ketergantungan impor terhadap pangan relatif tinggi; dan
6) Ketimpangan pendapatan masyarakat.

Pada Musrenbang Regional seJawa-Bali tersebut direkomendasikan perlunya upaya-upaya strategi dalam percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif sektor pertanian dan kelautan di Wilayah Jawa dan Bali, sebagai berikut:

1) Perlunya kerjasama regional (regionalisasi) ekonomi wilayah Jawa-Bali terutama pada pemenuhan substitusi bahan baku impor, pemasaran output produksi dan pengendalian inflasi melalui integrasi data harga bahan pokok;
2) Akselerasi pembangunan dan pengembangan sarana prasarana transportasi darat (prioritas jalan lintas pantai selatan) dan laut berikut fasilitas pendukungnya, guna peningkatan konektivitas intra dan antar wilayah untuk memperlancar distribusi hasil pertanian, peternakan dan perikanan;
3) Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif menjadi perekonomian berkeunggulan kompetitif terutama pada IKM di kawasan agropolitan dan minapolitian regional;
4) Penguatan pengawasan jejaring terutama pada angkutan hasil pertanian, peternakan dan kelautan dan penerapan sanksi bagi pelaku usaha angkutan yang melanggar;

5) Mendorong dan mengupayakan perlindungan lahan pertanian melalui pembuatan aturan insentif dan disinsentif bagi para petani pemilik LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
6) Mendorong dan mengupayakan perlindungan lahan pertanian melalui percepatan pendetailan LP2B berupa pemetaan by name, by adress dan by puzzle, serta pembuatan aturan insentif dan disinsentif bagi para petani pemilik LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan);
7) Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8) Penguatan kelembagaan keuangan petani dan nelayan melalui revitalisasi organisasi dan usaha koperasi petani dan nelayan; dan
9) Peningkatan investasi industri kemaritiman melalui kemudahan perijinan, jaminan pasokan bahan baku serta jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan ikan.

c. Kerja Sama Multilateral Mitra Praja Utama (MPU)

Kerjasama antar Pemerintah Provinsi dalam lingkup Mitra Praja Utama meliputi 10 Provinsi yaitu Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, JawaTimur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Tujuan MPU adalah mensinergikan sumber daya alam, potensi dan peluang ekonomi, potensi SDM dan Sumber Daya non alami, penelitian, pengembangan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara optimal potensi antar daerah serta berbagai masalah yang dianggap penting sesuai bidang kerjasama.

Beberapa kegiatan MPU selama Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

a. Rapat Gabungan FKD-MPU ke XVI Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d 20 Mei 2016 bertempat di Prov. DI Yogyakarta. Adapun Agenda Rapat Gabungan ini diantaranya:
   1. Pembahasan Draft SKB tentang Pendelegasian Wewenang 10 Gubernur FKD-MPU kepada Ketua Sekretaris Bersama;

2. Pembahasan Draft SKB tentang Dukungan Operasional Gedung ITIC;
3. Pembahasan Draft SKB Program Kerjasama Tahun 2017;
4. Pembahasan Rakergub XVI di Semarang (Tema, Agenda, Narasumber);
5. Isu-isu Aktual Lain.

b. Rapat Kerja Gubernur FKD-MPU ke XVI yang dilaksanakan pada tanggal 28 s.d 30 Sepember 2016 di Semarang, dengan agenda rapat yaitu:
   1. Rapat Kerja para Gubernur Provinsi Anggota FKD-MPU dengan para Menteri;
   2. Kelompok Kebijakan membahas Naskah Keputusan Bersama;
   3. Kelompok Teknis dengan SKPD/UKPD yang terkait yang mempunyai Program Kerja Sama Tahun 2017 melakukan rapat kecil;
   4. Dialog Interaktif diikuti oleh semua peserta Rakergub FKD-MPU
   5. Isu-isu aktual lain.

   Rapat Kerja Gubernur Tahun 2016 mengambil Tema: "Pengembangan Program Konektivitas Tourism, Trade & Investment (TTI) Guna Memperkuat Kerjasama MPU dalam rangka Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Lokal Masyarakat.

c. Rapat Khusus FKD-MPU yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 18 Desember 2016 bertempat di Prov. Bali, dengan Agenda Rapat yaitu:
   1. Paparan Agenda ITIC Tahun 2017;
   2. Penyusunan Program Kerjasama MPU Tahun 2017 terkait dengan Pemanfaatan Gedung ITIC;
   3. Diskusi

d. Kerjasama Provinsi, Kabupaten/Kota

   Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Kerjasama dengan provinsi dan kabupaten lain dalam rangka penyelenggaraan program transmigrasi untuk mengatasi masalah

kepadatan penduduk dan pengurangan kemiskinan melalui pembangunan kawasan produksi baru di daerah tujuan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran dan masyarakat sekitar lokasi transmigrasi. Juga dibuat Kesepakatan Bersama (KB) dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Tengah dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Provinsi Sumatera Barat serta Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Anggota Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU). Pada Tahun 2016 kerjasama dimaksud dituangkan dalam 1 Kesepakatan Bersama (KB), dan 5 Surat Keputusan Bersama (SKB), sebagai berikut:

a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2016 dan Nomor 415.4/1/1.20.03.3/2016 tentang Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi untuk Penyediaan Daging Sapi bagi Kebutuhan Labupaten Bangka Barat danProvinsi DKI Jakarta;
b. Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor 68/SK/MPU/2016 tentang Program dan Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Tahun 2017;
c. Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor 69/SK/MPU/2016 tentang Pemberian Kewenangan kepada Ketua Sekretariat Bersama FKD-MPU untuk Menerima Hibah dan Penerimaan Lainnya yang Sah dari Anggota FKD-MPU atau Pihak Lain bagi Kepentingan FKD-MPU;
d. Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor 70/SK/MPU/2016 tentang Penyelenggaraan Bersama Tourism, Trade & Investment FKD-MPU yang diselenggarakan di Gedung TIC (ITIC) Kuta-Provinsi Bali;

e. Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor 71/SK/MPU/2016 tentang Penyediaan Informasi Pangan dan Pengendalian Inflasi Daerah;

f. Keputusan Bersama Gubernur Anggota FKD-MPU Nomor 72/SK/MPU/2016 tentang Rekomendasi Kepada Pemerintah;

6.5. Kerja Sama Luar Negeri

1. Program *Sister City*

Provinsi DKI Jakarta memiliki 21 sister city/state/province di seluruh dunia yakni : Jeddah, Seoul, Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Arkansas, Berlin, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi, Istanbul, Maputo, Kyiv, Moscow, Al-Quds As Shareef, Pyongyang dan Budapest. Adapun 10 kota yang aktif yaitu Seoul, Rotterdam, Tokyo, Beijing, Berlin, New South Wales, Bangkok, Moscow, Pyongyang dan Budapest.

Adapun program kerja sama sister city/state/province selama tahun 2016 yaitu :

1) Partisipasi Jakarta pada World Tourism Cities Federation (WTCF) di Tokyo pada tahun 2016
2) Beijing City Youth Program Exchange Camp, pada Agustus 2016
3) Pengiriman Atlet Tenis Meja DKI Jakarta/Beelya ke Beijing, pada April -Oktober 2016
4) Kunjungan DPRD DKI Jakarta ke kota Seoul, Beijing dan Tokyo pada April 2016.
5) Partisipasi remaja pada Beijing Joy Dancing pada Agustus 2016
6) Pertemuan antara Dubes Korea Utara dengan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2016
7) Keikutsertaan 2 (dua) pegawai Pemprov DKI Jakarta dalam Program S2 MUAP Seoul Metropolitan Government-Universit of Seoul (SMG-UoS) Tahun 2016-2018.

8) Keikutsertaan 5 (lima) orang tenaga kerja Jakarta dalam Pelatihan Kejuruan (Vocational Training) selama 9 bulan di Seoul (Maret 2016-Januari 2017)
9) Partisipasi Jakarta pada Tokyo Football Cup dan Asia Sport Exchange di Tokyo, Agustus 2016.
10) Kunjungan Delegasi Tim Teknis Pemprov DKI Jakarta ke kota Beijing, Chengdu dan Shanghai pada bulan Mei 2016.
11) Pengiriman Delegasi Jakarta dalam acara 2016 Bycicle City Forum di Seoul pada Agustus 2016.
12) Pengiriman Tim Olimpiade Sains Jakarta ke kota Moskow pada September 2016.
13) Pengiriman Delegasi DKI Jakarta dalam acara workshop ITC di Gyeonggi, Korea pada Desember 2016.

2. Keanggotan Organisasi Internasional Di Tahun 2016

No.	Organisasi Internasional	Ruang Lingkup Organisasi
1.	UCLG ASPAC	Pemerintah Daerah
2.	METROPOLIS	Pemerintah Daerah
3.	CITYNET	Manajemen Pemukiman
4.	WEGO	E-Government
5.	ANMC 21	Manajemen Krisis, Lingkungan dan Pengembangan Industri
6.	C40	Perubahan Iklim
7.	Asem Meeting Of Governors and Mayors	Politik, Ekonomi dan Sosial-Budaya
8.	100 RESILIENT CITIES	Ketahanan Kota
9.	World Association Of Zoos and Aquariums (WAZA)	Konservasi Satwa Liar
10.	South East Asian Zoo Association (SEAZA)	Konservasi Satwa Liar

No.	Organisasi Internasional	Ruang Lingkup Organisasi
11.	Zoo and Aquarium Association (ZAA)	Konservasi Satwa Liar
12.	International Congress and Convention Association (ICCA)	Maskapai dan Destinasi Wisata
13.	Tourism Promotion Organization (TPO)	Organisasi Promosi Pariwisata
14.	Pacific Asia Travel Associationn (PATA)	Organisasi Perjalanan Wisata
15.	PATA Indonesia Chapter	Organisasi Perjalanan Wisata
16.	International Association of Golf Tour Operator (IAGTO)	Asosiasi Operator Golf
17.	World Tourism Cities Federation (WTCF)	Organisasi Pariwisata
18.	Destination Marketing Association International (DMAI)	Industri Pariwisata
19.	The Global Association Of The Exhibition Industry (UFI)	Industri Pariwisata
20	Council For Promotion Of Tourism In Asia (CPTA)	Promosi Pariwisata

3. Kerjasama Teknik Luar Negeri

Realisasi program kerjasama teknik luar negeri Tahun 2016 :

1) Hubungan Internasional

Taiwan Institute of Diplomacy and International Affairs (IDIA) Sumer Program di Taipei, Taiwan

2) Kebersihan

Training the framework of the Project for Fostering's Japan Recycling Industries and Promoting Their Environmental Business Overseas di Tokyo, Jepang

3) Kesehatan

1) Kunjungan ke National Cancer Singapura di Singapura
2) Kunjungan Kerja Kementerian Kesehatan RI di Denmark di Denmark

4) Lingkungan Hidup
   1) International Forum On Urban Policy For The Sustainable Development Goals di Seoul, Korea Selatan
   2) ANMC 21 Inter-City Workshop di KL, Malaysia
   3) Video Tapping C40 di Jakarta, Indonesia
   4) UN Habitat 3, Earth Hour Award (undangan WWF) di Quito, Ecuador
   5) UN Habitat 3, Networking Event, (undangan dari Plan International) di Quito, Ecuador
   6) The 7th 3R Forum di Adelaide, Australia
5) Olahraga

   Asian Para Games di Bangkok, Thailand
6) Pariwisata

   The Global Innovation Competition 2016 di Accra, Ghana
7) Pekerjaan Umum

   Bauma Trade Fair dan Pabrik Wirtgen Group di Jerman di Jerman
8) Pemerintahan
   1) European Union Visitor Programme (EUVP) di Brussel, Belgia
   2) Pra Seminar Meeting Persiapan WORLD CITIES SUMMIT 2016 di Singapura di Singapura
   3) UCLG ASPAC Bureau Executive Meeting di New Delhi, India
   4) The 6th UCLG ASPAC Congress di Jeollabuk-do, Korea Selatan
   5) Global Mayoral Forum di Quezon City, the Philippines
   6) TFGPA Training di Singapore
   7) UCLG World Congress di Bogota, Colombia
   8) Collaborative Culture: UCLG ASPAC Forum on Culture in Local Planning and UCLG ASOAC Culture Committee di Solo, Jawa Tengah
   9) D8 Meeting of Mayors of Capitals and Metropolitan Cities di Teheran, Iran
   10) ASEAN Governors/Mayors Meeting di Vientiane, Laos

9) Penanggulangan Banjir
   1) Operation and Maintenance of Sewerage System di Tokyo, Jepang
   2) Counterpart Training for the Project for Improving Planning Capacity for the Sewerage System in DKI Jakarta "Adminitrative Management Capacity Development of Sewerage System in Japan" di Tokyo, Jepang
   3) Duct Taining and Exposure Programme Integrated Urban Water Management in Rotterdam and Jakarta di Rotterdam, Belanda di Rotterdam, Belanda
   4) Technical Deep Dive on Integrated Urban Flood Risk Management di Tokyo, Jepang
10) Penanggulangan Bencana
   1) Workshop on Knowledge and Policy Gaps in Disaster Risk Reduction and Development and Planning di Bangkok, Thailand
   2) BNPB - NDMI Knowledge Exchange di Seoul, Korea Selatan
   3) Konfrensi ke-29 International Fire's Chief Association of Asia di Osaka, Jepang
   4) ANMC 21 Crisis Management Conference 2016 di Singapore
11) Penanggulangan Kebakaran
   1) New Fire Review di Tokyo, Jepang
   2) Fire Safety Asia Conference di Malaysia
   3) Firefighting Training Advance Team di Suva, Fiji
   4) Firefighting Training Advance Team di Mexico City, Mexico
12) Perdagangan
   1) KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta
   2) Workshop on Knowledge Management For SME Top Management di Cambodia
13) Perencanaan Kota
   1) Counterpart Training for Technical Cooperation Project on MPA Support Facilities Indonesia "PPP Implement Capacities Development in Japan" di Tokyo, Jepang

2) The 5th Urban Renewal Forum di Singapore
3) CityNet Executive Strategic Planning and 34th Executive Committee Meeting 2016 di Makati, Filipina

14) Teknologi Informasi
1) Open Data Leaders' Network di London, Inggris di London, Inggris
2) Mobile World Congress 2016 di Barcelona Spanyol di Spanyol
3) The 3rd South Asian Cities Summit 2016 di New Delhi, India
4) WeGO e-Government Training 2016 The Seoul Program di Seoul, Korea Selatan
5) Joint Workshop for SmartCity and E-Government di Seoul, Korea Selatan
6) CSIS-JICA RI Joint Research Projec on Transformative Innovation for Sustainable Development and Poverty Reduction di Osaka, Jepang
7) The Annual WeGo Executive Committee Meeting di Beyoglu, Turki

15) Transportasi
1) Counterpart Training for Jakarta-MRT Project di Tokyo, Jepang
2) Local Government Transport Officer Forum di Salatiga
3) ADB Meeting di Frankfrut, Jerman
4) Global Harbor Cities Forum di Kaohsiung, Taiwan

6.6. Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai pengembangan dari kebijakan Kota Layak Anak menjadi strategi penting Pemerintah Provinsi DKI jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik

dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak. RPTRA dibangun dalam rangka menyediakan ruang publik terpadu ramah anak yang dilengkapi fasilitas fisik, berfungsi sebagai sarana pemberian layanan dan kegiatan terutama bagi anak dan warga, sehingga RPTRA menjadi tempat tumbuh dan kembang anak, tempat kegiatan sosial warga setempat, sekaligus menambah ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah. RPTRA merupakan pusat pembelajaran, pelatihan, pengembangan dan rujukan dari berbagai kelompok kegiatan (Poktan) yang mendukung terpenuhinya 31 (tiga puluh satu) indikator Kota Layak Anak.

Dasar Hukum Pembentukan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA):

a. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 tentang Tim Pelaksana Pembangunan dan Pemeliharaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dan
b. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Dalam RPTRA setidaknya terdapat fasilitas dengan aspek-aspek sebagai berikut:

a. Permainan edukatif indoor dan outdoor yang aman dan ramah anak,
b. Olahraga dan kesehatan ibu anak seperti Posyandu, Ruang Laktasi,Konsultasi tumbuh kembang anak, lansia, dan sebagainya,

c. Pendidikan masyarakat seperti BKB PAUD, Pojok Baca, Perpustakaan, Papan Informasi, Penerapan Jam Belajar, Panggung interaktif serta penyediaan sarana wifi/internet,
d. Ruang Terbuka Hijau, mencakup taman yang indah, taman obat-obatan dan lain-lain,
e. Kebersihan seperti tempat sampah terpilah dan sarana cuci tangan, toilet bersih, dan ramah anak.

Program dan kegiatan RPTRA terintegrasi dengan 10 Program pokok PKK yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan dasar manusia termasuk anak-anak meliputi :

a. Penghayatan danPengamalan Pancasila,
b. Gotong Royong,
c. Pangan,
d. Sandang,
e. Perumahan dan Tatalaksansa Rumah Tangga
f. Pendidikan dan Keterampilan
g. Kesehatan
h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
i. Pelestarian Lingkungan Hidup, dan
j. Perencanaan Hidup Sehat.

Kesepuluh program pokok PKK ini pada dasarnya bersinergi dengan 31 indikator pemenuhan hak-hak anak yang sekaligus menjadi dasar dalam upaya Jakarta Menuju Kota Layak Anak dengan RPTRA sebagai wadah konkretnya.

Program Unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari :

a. Keluarga
b. BKB-PAUD
c. Hatinya PKK
d. Perkuatan Posyandu, dan
e. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UP2K

Kelima program inti dari Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta ini akan menjadi ruh dari seluruh aktivitas di RPTRA. Dengan adanya sinergi yang positif antara kegiatan di RPTRA dengan 10 Program Pokok PKK dan lima program unggulan Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta maka langkah menuju dan menjadi kota yang ramah serta layak untuk anak segera terwujud di wilayah DKI Jakarta. Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta memberikan penguatan SDM dalam pengelolaan RPTRA, mulai dari tingkat kelurahan, kota sampai dengan provinsi.

Dalam kelanjutannya, BPMPKB Provinsi DKI Jakarta dan SKPD terkait beserta Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta menggandeng Perguruan Tinggi dan CSR perusahaan yang ada di DKI Jakarta menjadi satu tim terpadu untuk mendukung terwujudnya RPTRA baik secara fisik ataupun non fisik mulai dari penyediaan lokasi, kelengkapan, sarana prasarana, pembinaan SDM pengelola RPTRA sampai dengan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dasar melibatkan PKK Provinsi DKI Jakarta adalah Permendagri 1/2013 tentang Pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK.

RPTRA dilengkapi berbagai fasilitas, pada tahap awal dibangun dengan menggunakan dana CSR perusahaan di atas lahan aset pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Operasional dan Pemeliharaan RPTRA menjadi domain dari TP PKK Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD, serta CSR. Berbagai bentuk dukungan dalam pengembangan RPTRA baik berupa sumbangan fisik dan non fisik diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Gubernur. Selanjutnya, masyarakat dilibatkan secara aktif agar RPTRA menjadi milik masyarakat, berkelanjutan dan mandiri. Dengan demikian RPTRA menjadi milik bersama masyarakat yang harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi.

RPTRA dikelola oleh pengelola yang ditetapkan dengan SK Gubernur dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan. Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, dibentuk pengurus RPTRA Provinsi pada tingkat Kota/Kabupaten dibentuk pengurus RPTRA Kota/Kabupaten, dan pada tingkat Kelurahan dibentuk Pengurus RPTRA Kelurahan.

Kemudian untuk pelaksanaan teknis RPTRA dibentuk Pelaksanaan Kegiatan RPTRA. Kepengurusan RPTRA dilaksanakan secara kolegial. Artinya proses pengambilan keputusan dalam rapat pengurus diusahakan semaksimal mungkin dengan musyawarah mufakat setelah mendengarkan seluruh pendapat pengurus. Kedepan, RPTRA akan diupayakan dibangun di setiap Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Besar harapan bahwa RPTRA akan menjadi pusat aktivitas masyarakat khususnya anak, sehingga upaya pemenuhan hak-hak anak dapat dipantau dan ditingkatkan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka peningkatan pelayanan publik merencanakan membangun sebanyak 184 lokasi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA), sebagaimana dalam Lampiran 17. Pembangunan RPTRA dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut :

a. Tahap I sebanyak 6 lokasi RPTRA Seluruhnya telah diresmikan pada tahun 2015;
b. Tahap II sebanyak 52 lokasi RPTRA. Dari jumlah tersebut telah diresmikan pada tahun 2015 sebanyak 5 RPTRA. Sisanya sebanyak 49 lokasi RPTRA dibangun pada tahun 2016 dan sampai dengan Bulan Desember 2016 telah diresmikan sebanyak 49 Lokasi RPTRA
c. Tahap III sebanyak 12 lokasi RPTRA seluruhnya telah diresmikan pada tahun 2016. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan membuat RPTRA sebanyak 114 lokasi RPTRA yang direncanakan selesai pada tahun 2017;

6.7. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksananaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah.

Realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2016 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

A. Dasar Hukum Tugas Pembantuan Dan Dekonsentrasi

Dasar hukum pelaksanaan Tugas pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

B. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pasal 48 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas pembantuan.

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan (TP) Dan Instansi Pelaksana Pada tahun 2016 Provinsi DKI Jakarta menerima dana tugas pembantuan dari 4 Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar 17,728 milyar rupiah dengan realisasi sebesar 1,989 milyar rupiah atau 11 persen. Adapun instansi penerima TP adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Para Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1

Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Tahun Anggaran 2016

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4:3)
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta	1,000,000,000	825,862,000	82.58
2	Kementerian Pertanian	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta	397,890,000	393,211,951	98.80
3	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta	596,763,000	520,568,884	87.23
4	Kemeterian Dalam Negeri	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15,733,636,000	250,043,450	1.58
		Kota Adm. Jakarta Pusat	2,110,298,000	66,058,250	3.13
		Kota Adm. Jakarta Utara	2,415,339,000	59,356,850	2.46
		Kota Adm. Jakarta Selatan	3,350,787,000	83,828,350	2.50
		Kota Adm. Jakarta Timur	4,082,995,000	0	0.00
		Kota Adm. Jakarta Barat	3,331,557,000	0	0.00
		Kab. Adm. Kepulauan Seribu	442,660,000	40,800,000	9.22
JUMLAH			17,728,289,000	1,989,686,285	11.22

Sumber : Biro Tata Pemerintahan 2016

2. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

   Program dan realisasi pelaksanaanya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut:

   a. Kementerian Pertanian

      1) SKPD pelaksana : Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

      2) Program :

         Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

      3) Realisasi :

         a) Terjaminnya keamanan dan kehalalan pangan asal hewan serta fasilitasi model penerapan kesejahteraan hewan pada pemotongan

b) Dokumen perencanaan peternakan dan kesehatan hewan, evaluasi serta dokumen pelaporan keuangan dan barang dan operasional pelaksanaan satuan kerja

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

1) SKPD pelaksana : Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta

2) Program:

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

3) Realisasi

a) Produk indukan dan pembenihan ikan yang siap sertifikasi

b) Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi, dan pelaporan dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat

4) Permasalahan:

Penghematan anggaran sebesar Rp. 144.191.000,- berupa self blocking

c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

2) Program

Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

3) Realisasi

a) Pelayanan Teknis dan Administratif

b) Keluarga yang difasilitasi penempatan pada pemukiman Transmigrasi

c) Kerjasama Antar Daerah

d) Permasalahan :

Penempatan Transmigrasi kurang dari 16 KK menjadi 11 KK

d. Kementerian Dalam Negeri

1) SKPD pelaksana : Dinas Dalam Negeri Provinsi DKI Jakarta

2) Program

Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3) Realisasi

Laporan penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

4) Permasalahan :

a) Terjadi duplikasi dengan kegiatan pada APBD.

b) Merujuk pada PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan 2016, terdapat perangkapan tugas dan fungsi pada pelaksanaan kegiatan.

c) Revisi DIPA terkait penghematan anggaran melalui blokir mandiri (self-blocking) menyebabkan pagu minus, karena blokir dikenakan pada akun yang sebelumnya telah direalisasi.

C. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 4 disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa Otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat Provinsi.

Sesuai dengan peraturan dimaksud, Provinsi DKI Jakarta tidak dibagi lagi dalam wilayah kota dan kabupaten selain hanya sebagai wilayah administratif. Dengan demikian, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tidak dilakukan alokasi penugasan dari pemerintah provinsi kepada kota/kabupaten atau dari pemerintah kota/kabupaten kepada desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

D. Dekonsentrasi

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

Adapun penyelenggaraan Dekonsentrasi pada tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Instansi Pemberi Dekonsentrasi Dan Instansi Pelaksana

Untuk tahun 2016 Provinsi DKI Jakarta menerima dana dekonsentrasi dari 15 Kementerian dan 3 Badan sebagai berikut : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usuha Kecil Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Sosial. Adapaun Badan yang memberikan dana dekonsentrasi ke Provinsi DKI Jakarta adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 123.254.001.000,- pada tahun 2016 dengan realisasi sebesar Rp. 101.619.494.070,-

atau 82.45 persen. Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang diterima tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 6.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2016

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4:3)
1	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Prov. DKI Jakarta	242.318.000	53.169.200	21,94
2	Kementerian Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. DKI Jakarta	335.570.000	148.700.000	44,31
3	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	818.911.000	94.775.500	11,57
4	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta	35.930.612.000	29.133.500.191	81,09
5	Kementerian Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta	650.000.000	634.500.100	97.62
6	Kementerian Pertanian	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	7.887.000.000	6.619.587.741	84,00
7	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	1.004.445.000	695.785.880	69,27
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Pertanian Prov. DKI Jakarta	8.330.691.000	5.454.186.202	65,00
9	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Energi Prov. DKI Jakarta	1.599.000.000	1.318.214.256	82,44
10	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta	13.622.573.000	12.304.794.272	90,33
11	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta	21.026.467.000	17.291.119.094	82,24
12	Kementerian Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta	5.752.441.000	4.695.838.330	82,00
13	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Prov. DKI Jakarta	16.369.476.000	15.656.300.600	95,64
14	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta	1.382.186.000	978.984.000	76,25
15	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan Prov. DKI Jakarta	1.475.114.000	990.255.004	67,00
16	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	Dinas Olah Raga dan Pemuda Prov. DKI Jakarta	4.362.886.000	4.009.011.600	91,89
17	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI Jakarta	1.185.000.000	754.361.800	64,00
18	Arsip Nasional RI	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	307.650.000	302.949.200	98,47
19	Perpustakaan Nasional RI	Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah	248.480.000	236.266.400	95,08
20	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Prov. DKI Jakarta	723.181.000	247.194.700	34,18
JUMLAH			**123.254.001.000**	**101.619.494.070**	**82,45**

Sumber : Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

2. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya

Program dan realisasi pelaksanaanya dari tiap-tiap Kementerian pemberi dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

1) SKPD pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta

2) Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN

3) Realisasi :

a) Dukungan Manajemen Pengelolaan Program KKBPK di Provinsi

b) Pengawasan Intern yang efektif dan efesien terhadap pengelolaan program KKBPK

c) Pendidikan dan pelatihan program KKBPK di Provinsi

d) Penelitian dan Pengembangan program KKBPK di Provinsi

e) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitias penduduk

f) Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standard pelayanan

g) Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingakatan wilayah

h) Penggerakan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam program KKBPK

b. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

1) SKPD pelaksana : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Pengambangan Perpustakaan

3) Realisasi :

Perpustakaan yang dikembangkan dan dibina

c. Arsip Nasional Republik Indonesia

1) SKPD Pelaksana : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

3) Realiasi :

Peserta Diklat pada Provinsi penerima dana dekonsentrasi (Prioritas K/L)

d. Kementerian Pemberdayaan Prempuan dan Perlindungan Anak

1) SKPD Pelaksana : Badan Pemberdayaan Masyarakat Prempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI KPPPA

3) Realisasi :

Pemda yang di fasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG dan PP

4) Permasalahan

Pencairan dana berupa GUP sedikit menghambat kelancaran kegiatan, karena rata-rata anggaran perkegiatan melebihin nominal satu kali UP

e. Kementerian Dalam Negeri

Program :

<u>Bina Administrasi Kewilayahan</u>

1) SKPD pelaksana : Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Biro Tata Pemerintahan)

2) Realisasi :

Fasilitasi Pusat dan Daerah Bidang Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan, Kerjasama Daerah, Pelayanan Publik, dan Pembinaan Kecamatan

3) Permasalahan

Adanya penghematan anggaran sehingga kegiatan tidak dapat berjalan dengan maksimal dan adanya pemotongan anggaran mencapai Rp. 185.638.000,-

Program :

<u>Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</u>

1) SKPD pelaksana : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
2) Realisasi :
3) Laporan Fasilitasi/Pembinaan/Monev/Kegiatan Bidang Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya

4) Permasalahan

Ada efisiensi anggaran sehinga menyebabkan pagu anggaran akun belanja yang nilainya berlebih dan ada pagu anggaran belanja yang kurang

Program :

<u>Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u>

1) SKPD pelaksana : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
2) Realisasi :

   Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3) Permasalahan:
   a) Terjadi duplikasi dengan kegiatan pada APBD.
   b) Merujuk pada PMK 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan 2016, terdapat perangkapan tugas dan fungsi pada pelaksanaan kegiatan.

c) Revisi DIPA terkait penghematan anggaran melalui blokir mandiri (self-blocking) menyebabkan pagu minus, karena blokir dikenakan pada akun yang sebelumnya telah direalisasi.

f. Kementerian Kelautan dan Perikanan

1) SKPD Pelaksana : Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

2) Program dan Kegiatan :

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

b) Pengelolaan Perikanan Tangkap

c) Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

d) Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

e) Penguatan Daya saing Produk Kelautan dan Perikanan

f) Pengelolaan Ruang laut

g) Pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat Kelautan dan perikanan

3) Realisasi :

a) Dokumen laporan Wilayah uang dan barang, Dokumen Pembinaan dan koordinasi perencanaan, penganggaran dan monev pembangunan KP di Provinsi dan Aplikasi dan system infomasi

b) perikanan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap dan laik simpan serta aak kapal yang tersertifikasi, identifikasi dan penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan yang dilakukan pengendalian pembangunan konstruksi, pelabuhan perikanan yang optimal menerapkan sistem informasi dan keterpaduan serta pengembangan sentra perikanan terpadu, penguatan dan integrasi

sistem perizinan pusat-daerah, Jumlah nelayan yang terlindungi, memiliki akses pendaaan dan Penguatan kelembagaan Usaha Nelayan dan Informasi nelayan, Ketersediaan data, statistik, pengevaluasian sumber daya serta revitalisasi laut dalam dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat dan Terdatanya kelompok produsen dan jenis pakan ikan

c) Terjaminnya mutu, keamanan, kualitas lingkungan dan kesehatan perikanan, Pembenihan Ikan Air Tawar yang bersertifikat, Pemanfaatan peralatan untuk budidaya secara tepat guna, Pembudidayaan ikan bersertifikat dan mendapatkan perizinan, Dokumen perencanaan, kerjasama, evaluasi dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat, Terdatanya kelompok produsen dan jenis pakan ikan.

d) Hasil Pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak pidana perikanan, sosialisasi peraturan pemanfaatan SDKP, Masyarakat Pengawasan [POKMASWAS] yang berperan aktif Dalam Pengawasan SDKP, Hasil pemantauan dan analisis pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, dan Laporan Perencanaan, Keuangan, Barang dan Pengawasan.

e) Data dan Informasi Neraca Ketersediaan Ikan Daerah, Jumlah Jaminan Pasar Produksi Hasil Tangkapan dan Budidaya di Pusat Produksi, Pengumpulan dan Disitribusi, Pengendalian Pemasukan dan Pengeluaran Hasil Perikanan Daerah dan Penataan sistem logistik, Informasi ketersediaan dan permintaan serta adanya sosialisasi gemar ikan kepada masyarakat,

Dihasilkannya ragam olahan dan sertifikasi kelayakan dalam pengolahan ikan, Peningkatan Mutu UMKM dan Pelaku usaha hasil kelautan dan perikanan yang mendapat fasilitas pelayanan investasi.

f) Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan efektif, NSPK (norma, standar, prosedur, dan ketentuan) Penataan dan pemanfaatan jasa kelautan, Pulau-pulau kecil yang tertata lingkungannya dan tahan terhadap bencana dan perubahan iklim, Kawasan pesisir yang difasilitasi reklamasi dan pengembangan kawasan dan Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Operasional Satuan Kerja.

g) Kelompok yang disuluh

4) Permasalahan:

a) Pelaksanaan sudah dilaksanakan menunggu proses pencairan anggaran

b) Pelaksanaan sudah dilaksanakan menunggu proses pencairan anggaran

g. Kementerian Pertanian

1) SKPD Pelaksana : Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

2) Program dan Kegiatan :

a) Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura;

b) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;

c) Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat;

d) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan;

e) Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

3) Realisasi :

a) Terlaksananya sertifikasi benih tanaman hortikultura untuk menghasilkan benih tanaman sebanyak 3.000 tanaman, Tersedianya dokumen perencanaan, keuangan, barang dan terlaksananya operasional satuan kerja dan Fasilitasi Pemasaran Hortikultura baik ketersediaan data maupun harga dan promosi hasil pertanian.

b) Terpantaunya harga dan stok pangan di wilayah DKI Jakarta, Hasil Analisa Neraca Bahan Makanan, Pemberdayaan Pekarangan Pangan dan Hasil analisis pola dan kebutuhan konsumsi pangan, dan Tersusunnya rencana program, anggaran, keuabngan, barang dan layanan satuan kerja.

c) Menurunnya kasus penyakit hewan ternak (Brucellosis) di wilayah DKI Jakarta, Terjaminnya ketersediaan bibit ternak dan mutu bibit ternak, Terjaminnya keamanan dan kehalalan pangan asal hewan, Dokumen Perencanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Evaluasi serta dokumen pelaporan keuangan dan barang dan operasional pelaksanaan satuan kerja, dan Tersedianya dokumen terkait permintaan, persediaan dan harga hasil ternak.

d) Ketersediaan benih Bersertifikat dari areal penangkaran, Terealisasinya Insentif POPT dan Bantuan Transport untuk petani pengamat, Tersusunnya data perencanaan, keuangan, barang, dan operasional satuan kerja, dan Didapatnya perkembnagan harga dan stok pangan di DKI Jakarta.

e) Peningkatan Kinerja Penyuluh Pertanian, Peningkatan kapasitas kelembagaan petani, Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian//Ketenagaan Penyuluhan yang Difasilitasi dan Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi,

h. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1) SKPD Pelaksana : Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

2) Program dan Kegiatan :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK;

3) Realisasi :

Capaian sasaran strategis Kementerian LHK 95%.

i. Kementerian Perindustrian

1) SKPD pelaksana : Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3) Realisasi :

Daerah Pengembangan Industri Melalui Dekonsentrasi

4) Permasalahan :

Ada Pemotongan Anggaran Sebesar Rp. 263.467.700

j. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1) SKPD pelaksana : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

b) Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;

c) Pendidikan Dasar dan Menengah;

d) Guru dan Tanaga Kependidikan

3) Realisasi :

a) Dukungan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

b) Dokumen Perencanaan, Koordinasi, Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Dekonsentrasi;

c) Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;

d) Data guru dan tenaga kependidikan yang terverifikasi dan tervalidasi menurut Kabupaten/kota.

4) Permasalahan:

Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan karena kebijakan Kemdikbud RI untuk tidak melaksanakan kegiatan pada tingkat Nasional

k. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1) SKPD pelaksana : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Pengembangan Kepariwisataan

3) Realisasi :

Kab/Kota/Kawasan Pariwisata yang difasilitasi pemberdayaan masyarakat

4) Permasalahan:

a) Kegiatan Anggaran di Blokir sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2016 Sebesar Rp 1,765,000,000

b) Tidak dilaksanakan karena sudah di Anggarkan di APBD

l. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) SKPD pelaksana : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

2) Program:

a) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja;

b) Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

c) Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan;

d) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan

Produktivitas.

3) Realisasi:
   a) Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja Melalui Mekanisme Antar Kerja;
   b) Pelaku Hubungan Industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi;
   c) Pengawas yang mendapatkan pembinaan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
   d) Jumlah Lembaga Pelatihan yang Terakreditasi.
4) Permasalahan :

   Ada beberapa kegiatan dalam sub program ini yang anggarannya diblokir

m. Kementerian Sosial

1) SKPD pelaksana : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2) Program:
   a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial;
   b) Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
   c) Rehabilitas Sosial;
   d) Perlindungan dan Jaminan Sosial;
   e) Penanganan Fakir Miskin.
3) Realisasi:
   a) Dokumen Perencanaan Anggaran Kementerian Sosial yang ditindaklanjuti;
   b) TMPN/TMP/MPN yang di rehab dan dipelihara;
   c) SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang rehabilitas dan perlindungan sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
   d) Lokasi Kampung Siaga Bencana;
   e) Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
4) Permasalahan :

Kajian Pemetaan Desa Rawan Bencana Sosial Merupakan Tupoksi dari Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta

n. Kementerian Koperasi dan UMKM

1) SKPD pelaksana : Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2) Program :
   Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
3) Realisasi :
   Perencaan Program Kementerian Koperasi dan UKM
4) Permasalahan :
   a) Rotasi pegawai yang menyebabkan perubahan pejabat penandatangan SPM sehingga proses pencairan anggaran terhambat
   b) Penghematan anggaran yang dilakukan pada tengah tahun anggaran
   c) Juklak dan Juknis program kegiatan yang diterbitkan terlambat, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.
   d) Terdapat juklak dan juknis yang tidak sesuai dengan komponen anggaran, sehingga anggaran tidak dapat diserap maksimal
   e) Sosialisasi perubahan rekonsiliasi dengan sistem berbasis WEB kurang efektif

o. Kementerian Perdagangan

1) SKPD pelaksana : Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
2) Program :
   a) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri;
   b) Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
3) Realisasi :
   a) Kegiatan Pasar Murah;
   b) Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar

Negeri di Daerah

4) Permasalahan:

Adanya pengurangan anggaran pada tengah tahun anggaran

p. Kementerian Pemuda dan Olahraga

1) SKPD pelaksana : Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Kepemudaan dan Keolahragaan

3) Realisasi :

Pemuda Kader yang difasilitasi Dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

1) SKPD Pelaksana : Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

Pengembangan Perumahan.

3) Realisasi :

Pembinaan Kelembagaan dan Perencanaan.

BAB VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2016, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1767 Tahun 2016 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 740 UKPD/SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi dan 53 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi pengabung. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khusus untuk entitas akuntansi yang menerapkan pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan PPKD, selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Opasional,Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan SAL. Laporan Keuangan dari setiap entitas akuntansi tersebut kemudian digabungkan oleh entitas akuntansi penggabung menjadi Laporan Keuangan Gabungan SKPD.

Laporan Keuangan Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi

sebagai entitas akuntansi, kecamatan dan kelurahan di bawahnya. Laporan Keuangan Dinas merupakan gabungan dari laporan keuangan dinas sebagai entitas akuntansi, suku dinas, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang berada di bawahnya. Laporan Keuangan Badan merupakan gabungan dari laporan keuangan badan sebagai entitas akuntansi dan kantor-kantor yang ada di bawahnya. Laporan Keuangan Sekretariat Daerah merupakan gabungan dari Laporan Keuangan Sekretariat Daerah sebagai entitas akuntansi dan biro-biro yang ada di bawahnya. Selain itu ada beberapa SKPD yang tidak melakukan penggabungan laporan keuangan karena hanya terdiri dari satu entitas akuntansi, yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Inspektorat, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Penanaman Modal dan Promosi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan BLUD rumah sakit. Khusus untuk PPKD, sebagai entitas pelaporan selain menyusun laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, juga menyusun Laporan Arus Kas. Laporan keuangan dari 53 SKPD entitas akuntansi penggabung tersebut kemudian disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada target pendapatan sebesar Rp57.161.248.465.732,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 tercatat sebesar Rp53.784.706.312.513,00 atau 94,09%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp9.575.468.143.930,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015 sebesar Rp44.209.238.165.583,00.

Di sisi lain capaian anggaran belanja dan transfer pada Tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp57.365.040.315.366,00. Realisasi belanja dan transfer sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp47.128.810.245.854,00 atau 82,16%,

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp10.236.230.069.512,00 atau 17,84%. Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar Rp4.097.487.298.297,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2015 yaitu sebesar Rp43.031.322.947.557,00. Dari kondisi tersebut dapat digambarkan bahwa di Tahun 2016 terjadi surplus sebesar Rp6.655.896.066.659,00. Surplus ini disebabkan realisasi pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan yang ditargetkan sebesar Rp5.748.789.849.634,00 dan terealisasi sebesar Rp5.607.751.958.338,00 atau 97,55%. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp5.544.998.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.557.358.688.274,00 atau 82,19%. Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp2.705.210.960.660,00 jika dibandingkan dengan Realisasi Pembiayaan Netto Daerah Tahun 2015 yaitu sebesar Rp3.755.604.230.724,00

Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp7.706.289.336.723,00 dikarenakan Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar dari Realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp6.655.896.066.659,00 dan pembiayaan neto sebesar Rp1.050.393.270.064,00. SiLPA Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp2.772.769.884.973,00 jika dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp4.933.519.451.570,00

Demikian Laporan Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2016.

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

LAMPIRAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2016 AUDITED

DAFTAR ASET TETAP DARI LUAR PROVINSI DKI JAKARTA
Per 31 Desember 2016

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	B	PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967	Mesin Potong Rumput	5	6.500.000,00	-	6.500.000,00	Dinas Pertamanan & Pemakaman (3 buah) ; Sudin Pertamanan & Pemakaman - Jaktim (2 buah)
					6.500.000,00	**-**	**6.500.000,00**	
DINAS KESEHATAN	B	Hibah kemenkes satker 01	Printer epson ink tank L120	2	2.600.000,00	520.000,00	2.080.000,00	Dinas Kesehatan
	B	Hibah kemenkes satker 01	Laptop HP ENVY 14-4211TX corei7	3	43.500.000,00	8.700.000,00	34.800.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	mannequin panel	1	7.040.000,00	-	7.040.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	vikuiti	1	15.290.000,00	-	15.290.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	playback system	1	25.190.000,00	-	25.190.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	proyektor EPSON	1	8.470.000,00	-	8.470.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	speaker Simbadda	1	1.760.000,00	-	1.760.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	televisi samsung	1	8.030.000,00	-	8.030.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	Box proyektor	1	7.810.000,00	-	7.810.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	shooting	1	4.840.000,00	-	4.840.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	animation	1	2.090.000,00	-	2.090.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	instalation unit system	1	3.190.000,00	-	3.190.000,00	Dinas Kesehatan
	B	hibah kemenkes satker 03	alignment setting	1	3.190.000,00	-	3.190.000,00	Dinas Kesehatan
	B	HIBAH Kemenkes satker 07	laptop asusX303LB I7	2	29.600.000,00	5.920.000,00	23.680.000,00	Dinas Kesehatan
	B	HIBAH Kemenkes satker 07	scanner Brother DS720	2	8.580.000,00	1.716.000,00	6.864.000,00	Dinas Kesehatan
	B	HIBAH Kemenkes satker 07	Printer Epson L220	2	4.730.000,00	946.000,00	3.784.000,00	Dinas Kesehatan
	B	Hibah DERAP HIV	Mobil kijang Inova DERAP HIV	1	169.580.000,00	105.987.500,00	63.592.500,00	BLUD PKM Kec. Kramat Jati
					345.490.000,00	**123.789.500,00**	**221.700.500,00**	
Sudin Kesehatan - Jakut	B	Kemenkes RI	Sky Dancer Balon	1	9.900.000,00	-	9.900.000,00	Sudin Kesehatan - Jakut
					9.900.000,00	**-**	**9.900.000,00**	
BLUD RS Koja	B	PT. Surgika Alkesindo	Suction Pump	1	27.132.550,00	-	27.132.550,00	BLUD RS Koja
	B	PT. Surgika Alkesindo	Suction Pump	1	27.132.550,00	-	27.132.550,00	BLUD RS Koja

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
					54.265.100,00	**-**	**54.265.100,00**	
BLUD RS Cengkareng	B	Hibah dari PT. Aztrazeneca Indonesia	Meja Nebulizer	2	1.250.000,00	-	1.250.000,00	BLUD RS Cengkareng
	B	Hibah dari PT. Aztrazeneca Indonesia	Meja Konsultasi dan administrasi	1	2.550.000,00	-	2.550.000,00	BLUD RS Cengkareng
	B	Hibah dari PT. Aztrazeneca Indonesia	Kabinet Kaca	1	1.875.000,00	-	1.875.000,00	BLUD RS Cengkareng
	B	Hibah dari PT. Aztrazeneca Indonesia	Kursi	4	2.600.000,00	-	2.600.000,00	BLUD RS Cengkareng
	B	hibah dari UKRIDA	Laptop	1	4.675.000,00	-	4.675.000,00	BLUD RS Cengkareng
	B	hibah dari UKRIDA	LCD	1	6.850.000,00	-	6.850.000,00	BLUD RS Cengkareng
					19.800.000,00	**-**	**19.800.000,00**	
DINAS OLAHRAGA & PEMUDA	B	Kementrian Pemuda Dan Olahraga	Mini Bus	1	383.946.666,00	383.946.666,00	-	Dinas Olahraga & Pemuda
					383.946.666,00	**383.946.666,00**	**-**	
PSAA Putra Utama 3	B	Kementerian ESDM	P.C. Unit	2	2.028.000,00	2.028.000,00	-	PSAA Putra Utama 3
	B	Kementerian ESDM	P.C. Unit	8	8.192.000,00	8.192.000,00	-	PSAA Putra Utama 3
					10.220.000,00	**10.220.000,00**	**-**	
PSBR Taruna Jaya	C	ADRF DREAM CENTER	Gedung Furniture	1	1.024.632.000,00	-	1.024.632.000,00	PSBR Taruna Jaya
					1.024.632.000,00	**-**	**1.024.632.000,00**	
PSBL Harapan Sentosa 2	C	Sumbangan Warga	Musholla	1	199.263.629,00		199.263.629,00	PSBL Harapan Sentosa 2
					199.263.629,00	**-**	**199.263.629,00**	
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	B	HIBAH LPMJ	Layar LCD Projector	1	3.679.500,00	3.679.500,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	TV	1	4.794.500,00	4.794.500,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	DVD Player	1	1.839.750,00	1.839.750,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Sound System	1	28.265.250,00	28.265.250,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Papan Nama LPMJ	1	4.950.000,00	4.950.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lemari Besi	1	3.500.000,00	3.500.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Flip Chart	1	2.605.000,00	2.605.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja Sudut GRD - 60	1	1.800.000,00	1.800.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja Tengah	1	1.198.000,00	1.198.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja 1/2 Biro	1	5.940.000,00	5.940.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
	B	HIBAH LPMJ	Meja Rapat	1	2.250.000,00	2.250.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Vertikal Blind	1	11.970.000,00	11.970.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Komputer	1	9.350.000,00	9.350.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	OHP+Screen Focos	1	4.950.000,00	4.950.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Screen Projector	1	8.140.000,00	8.140.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Horizontal Blind	1	14.091.000,00	14.091.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Kaca Film	1	5.544.000,00	5.544.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Bingkai dan Foto Display Gambar Masalah J	1	20.000.000,00	20.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Jam Dinding	1	1.800.000,00	1.800.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	LCD Projector ACER	1	30.000.000,00	30.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Camera Digital Sony	1	5.500.000,00	5.500.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Mesin Tik Royal	1	2.310.000,00	2.310.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Mesin Paper Scheeder	1	825.000,00	825.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja (Office desk OD 3-150/Series 3)	1	2.875.000,00	2.875.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Roll Banner dan Flexy Banner	1	1.125.000,00	1.125.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Mic Profesional Meeting+stand mic	1	2.560.000,00	2.560.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Speaker BMB Gold 10"+mata bor+cable	1	2.370.000,00	2.370.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Tiang Bendera beserta pondasi lengkap	1	6.500.000,00	6.500.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lemari ES LG & Dispenser	1	1.668.000,00	1.668.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	AC	1	29.425.000,00	29.425.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Radio Compo Samsung	1	1.950.000,00	1.950.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lemari Perpustakaan Uk. 1,8 X 2M	1	9.900.000,00	9.900.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Rollup Banner	1	2.850.000,00	2.850.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Gambar Display Permasalahan Jakarta	1	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja Direktur	1	6.875.500,00	6.875.500,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Papan Nama LPMJ	1	9.950.000,00	9.950.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
	B	HIBAH LPMJ	Stand Mikropron	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Air Conditoner	1	12.000.000,00	12.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Komputer + Printer	1	12.500.000,00	12.500.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Handycam	1	6.770.000,00	6.770.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Jam Dinding	1	2.750.000,00	2.750.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	LCD Projektor	1	6.711.000,00	6.711.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	AC	1	3.100.000,00	3.100.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lemari Buku	1	4.000.000,00	4.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lemari Buku	1	7.500.000,00	7.500.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lemari Buku	1	1.750.000,00	1.750.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lemari Buku	1	1.750.000,00	1.750.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja	1	3.300.000,00	3.300.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Laptop + Mouse	1	9.000.000,00	9.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Monitor	1	1.900.000,00	1.900.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja	1	5.800.000,00	5.800.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Alat-alat internet	1	3.500.000,00	3.500.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Mesin tik	1	2.600.000,00	2.600.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Sound system	1	17.060.000,00	17.060.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja dll	1	16.819.000,00	16.819.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Infocus	1	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Vertical blind	1	6.885.000,00	6.885.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lampu	1	5.380.000,00	5.380.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	MIC	1	1.320.000,00	1.320.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Printer	1	3.800.000,00	3.800.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	PRINTER	1	4.500.000,00	3.600.000,00	900.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Penangkal Petir	1	6.000.000,00	4.800.000,00	1.200.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
	B	HIBAH LPMJ	sound system aplifier	1	9.960.000,00	7.968.000,00	1.992.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Jet Shower Waser Vory	1	2.300.000,00	1.840.000,00	460.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja Tamu A 29 + Kaca	1	2.250.000,00	1.800.000,00	450.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Meja Tamu A 4 + Kaca	1	2.250.000,00	1.800.000,00	450.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Pompa Bosca Pump PC 261 B	1	2.650.000,00	2.120.000,00	530.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Kamera Nikon DSLR D300 + Tas Nikon	1	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	PC HP DELL	1	6.000.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Notebook Accer Ultra Book	1	9.000.000,00	5.400.000,00	3.600.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Screen Tripod	1	5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	AC Standing Floor	1	27.500.000,00	16.500.000,00	11.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Printer	1	4.900.000,00	2.940.000,00	1.960.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Wifi & Genius	1	2.100.000,00	1.260.000,00	840.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	JV 6	1	8.000.000,00	3.200.000,00	4.800.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Torn Air	1	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Kabel	1	4.150.000,00	1.660.000,00	2.490.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Alat-alat listrik	1	4.665.000,00	1.866.000,00	2.799.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Lampu & alat -alat listrk	1	5.335.000,00	2.134.000,00	3.201.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	PC + printer	1	21.000.000,00	12.600.000,00	8.400.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	PC	1	7.800.000,00	4.680.000,00	3.120.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Laptop	1	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Kamera	1	4.320.000,00	2.592.000,00	1.728.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	HDD WD	1	3.000.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	UPS	1	2.000.000,00	1.200.000,00	800.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	LED	1	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Alat Listrik	1	12.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	TELEPON PABX	1	4.500.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
	B	HIBAH LPMJ	Laptop	1	4.900.000,00	2.940.000,00	1.960.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Micophone TOA ZM - 420	1	3.460.000,00	1.384.000,00	2.076.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Pompa Air Jet Pump	1	8.000.000,00	1.600.000,00	6.400.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Server	1	20.000.000,00	4.000.000,00	16.000.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Dispenser	1	4.465.000,00	893.000,00	3.572.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH KEMENDAGRI BAST No. 414.24	Komputer PC	1	6.200.000,00	6.200.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH KEMENDAGRI BAST No. 414.24	GIS Delta 9	1	84.400.000,00	84.400.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH KEMENDAGRI BAST No. 414.24	Digitizer	1	5.000.000,00	5.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH KEMENDAGRI BAST No. 414.24	Printer	1	480.000,00	480.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Jam Dinding	1	225.000,00	225.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Jam Dinding	1	435.000,00	435.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Wall Mount	1	330.000,00	330.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Jam Dinding	1	250.000,00	250.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Adaptor	1	350.000,00	350.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Asbak Hitam Kensi	1	701.500,00	701.500,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Perlengkapan listrik	1	2.725.500,00	2.725.500,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Karpet	1	10.060.000,00	10.060.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Peralatan Daur Ulang	1	5.045.000,00	5.045.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Karpet R.Auditorium	1	11.000.000,00	11.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	HIBAH LPMJ	Baterai Sony DCR	1	1.200.000,00	240.000,00	960.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	Hibah Kementerian PPPA	Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak	1	223.750.000,00		223.750.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	LPMJ	Notebook	1	15.052.500,00	15.052.500,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	LPMJ	Vacum Cleaner Z 813	1	1.288.000,00	1.288.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	LPMJ	Wireless Set+mic	1	40.255.000,00	40.255.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	LPMJ	Note Book	1	10.000.000,00	10.000.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	B	LPMJ	Notebook	1	9.540.000,00	9.540.000,00	-	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
	B	LPMJ	Mesin Potong Rumput	1	3.500.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	E	PT. Pendawa Properti Indonesia	RPTRA Borobudur	1	1.627.602.994,00	-	1.627.602.994,00	RPTRA Borobudur Kelurahan Pegangsaan
	E	PT. Intiland Development Tbk	RPTRA Intiland Teduh Rawa Buaya	1	983.052.860,00	-	983.052.860,00	RPTRA Intiland Teduh Kelurahan Rawa Buaya
	E	Yayasan Bakti Barito	RPTRA Duri Pulo	1	770.000.000,00	-	770.000.000,00	RPTRA Duri Pulo Kelurahan Duri Pulo
	E	Yayasan Bakti Barito	RPTRA Amir Hamzah	1	636.781.200,00	-	636.781.200,00	RPTRA Amir Hamzah Kelurahan Pegangsaan
	E	PT. Intiland Development Tbk	RPTRA Intiland Teduh Karet Tengsin	1	969.567.106,00	-	969.567.106,00	RPTRA Intiland Teduh Kelurahan Karet Tengsin
	E	PT. Pembangunan Jaya	RPTRA Amiterdam	1	1.048.887.689,00	-	1.048.887.689,00	RPTRA Amiterdam, Kelurahan Pulau Untung Jawa
	E	PT. Pembangunan Jaya	RPTRA Kenanga	1	1.101.043.949,00	-	1.101.043.949,00	RPTRA Kenanga, Kelurahan Cideng
	E	PT. Pembangunan Jaya	RPTRA Bahari	1	1.107.731.115,00	-	1.107.731.115,00	RPTRA Bahari Kelurahan Gandaria Selatan
	E	PT. Pembangunan Jaya	RPTRA Cililitan	1	1.383.684.512,00	-	1.383.684.512,00	RPTRA Cililitan Kelurahan Cililitan
	E	PT. Pembangunan Jaya	RPTRA Sungai Bambu	1	1.016.533.276,00	-	1.016.533.276,00	RPTRA Sungai Bambu Kelurahan Sungai Bambu
	E	HIBAH LPMJ	Penghijauan Taman	1	9.880.000,00		9.880.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
	E	HIBAH LPMJ	Buku Perpustakaan	1	11.200.000,00		11.200.000,00	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB
					11.724.802.701,00	**732.600.000,00**	**10.992.202.701,00**	
UPT. Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender	B	Hibah APBN	Hand Phone & Kartu memori	28	55.160.000,00	-	55.160.000,00	UPT. Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender
					55.160.000,00	**-**	**55.160.000,00**	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	B	BNPB	Perahu Lipat 3.85 m	2	179.300.000,00	35.860.000,00	143.440.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Perahu lipat 2,85 m	3	212.850.000,00	42.570.000,00	170.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Perahu Karet Kap 6 Orang	1	173.250.000,00	34.650.000,00	138.600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Perahu Polythelylene	4	511.720.000,00	102.344.000,00	409.376.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Mesin Perahu Kap 9,8 PK	4	98.560.000,00	19.712.000,00	78.848.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Tenda Pengungsi	5	321.860.000,00	64.372.000,00	257.488.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Mesin Perahu 18 PK	1	29.370.000,00	5.874.000,00	23.496.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Handy Talky	25	45.375.000,00	9.075.000,00	36.300.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Genset 5,5 KVA	6	70.950.000,00	14.190.000,00	56.760.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	B	BNPB	Rig	6	36.300.000,00	7.260.000,00	29.040.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
					1.679.535.000,00	**335.907.000,00**	**1.343.628.000,00**	

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	B	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya	Laptop	2	10.000.000,00	-	10.000.000,00	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	C	Kementerian Kelautan dan Perikanan Dirjen Perikanan Budidaya	Kolam dan Pagar Rumah Jaga,UPR Ciganjur	1	496.100.000,00	24.805.000,00	471.295.000,00	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
					506.100.000,00	**24.805.000,00**	**481.295.000,00**	
DINAS KEBERSIHAN	B	PT. Hino Motors Sales Indonesia	Kendaraan Penyuluhan Kebersihan	1	602.000.000,00	-	602.000.000,00	DINAS KEBERSIHAN
					602.000.000,00	**-**	**602.000.000,00**	
DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN	C	Kementrian Pariwisata	Hibah Toilet umum dari dana dekon Kementerian Pariwi		198.811.000,00	9.940.550,00	188.870.450,00	DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN
					198.811.000,00	**9.940.550,00**	**188.870.450,00**	
KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	E	Sumbangan Masyarakat	Garangan Merah	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Ayam Kalkun	2	2,00	-	2,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Nuri Merah Kepala Hitam	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Ayam Kalkun	2	2,00	-	2,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Kura-Kura Darat	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Kura-Kura Moncong Babi	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Hibah dari PPS Tegal Alur	Kijang Mas	2	2,00	-	2,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Tangkapan liar	Beruk	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Musang Luwak	3	3,00	-	3,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Tarsius Singapuar	3	3,00	-	3,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Ayam Kapas	5	5,00	-	5,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Ayam Polandia	2	2,00	-	2,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Kasuari Gelambir Dua	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Beruang Madu	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Elang Ular Bido	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Kasuari Gelambir Dua	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Elang Ular Putih/Brontok	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
	E	Sumbangan Masyarakat	Buaya Muara	1	1,00	-	1,00	KANTOR PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN
					30,00	**-**	**30,00**	

SKPD	Jenis KIB	Pemberi Hibah	Jenis Barang	Jumlah	Nilai Perolehan Hibah	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Peruntukan Hibah
BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	B	PT.Bank Rakyat Indonesia	Kendaraan Roda 3 (tiga)	10	565.000.000,00	-	565.000.000,00	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
					565.000.000,00	**-**	**565.000.000,00**	
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	B	Yayasan Nusa Membaca	Mobil Perpustakaan	1	214.560.000,00	-	214.560.000,00	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel
	B	Yayasan Nusa Membaca	Buku Bacaan	1003	25.639.900,00	-	25.639.900,00	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel
	B	Yayasan Nusa Membaca	Dvd dan Vcd Edutaimen	54	1.714.000,00	-	1.714.000,00	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel
	B	Yayasan Nusa Membaca	Tablet Gramedia	2	4.400.000,00	-	4.400.000,00	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel
	B	Yayasan Nusa Membaca	Tablet Samsung Galaxy Tab 3 V	5	8.495.000,00	-	8.495.000,00	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel
	B	Yayasan Nusa Membaca	LCD TV 32"	1	3.795.000,00	-	3.795.000,00	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel
	B	Yayasan Nusa Membaca	Modem Internet	2	1.548.000,00	-	1.548.000,00	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel
					260.151.900,00	**-**	**260.151.900,00**	
Kelurahan Semper Barat - Jakut	B	PT. Justus Sakti Raya	Gerobak Motor	1	38.000.000,00	-	38.000.000,00	KDO PPSU Kelurahan Semper Barat - Jakut
					38.000.000,00	**-**	**38.000.000,00**	
Kabupaten Adm.Kepulauan Seribu	B	PT. Panorama Pulau Seribu	Mesin SWRO/BWRO	1	1.092.300.525,00	-	1.092.300.525,00	Sudin Tata Air Kepulauan Seribu
					1.092.300.525,00	**-**	**1.092.300.525,00**	
TOTAL					**18.775.878.551**	**1.621.208.716**	**17.154.669.835**	

Lampiran 2

DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

No	Nama SKPD/UKPD	Sisa Uang Persediaan	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	Uang Titipan	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1	Sekretariat DPRD	18.319.438	-	-	-	-	18.319.438
2	Biro Administrasi Keuangan dan Aset	20.688.024	-	-	-	-	20.688.024
3	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	19.688.355	-	-	-	-	19.688.355
4	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I	29.182.842	-	-	-	-	29.182.842
5	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKPUS	2.406.000	-	-	-	-	2.406.000
6	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	19.199.990	-	-	-	-	19.199.990
7	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKUT	49.937.504	-	-	-	-	49.937.504
8	Sudin Bina Marga - JAKPUS	54.480.351	-	-	-	-	54.480.351
9	Sudin Bina Marga - JAKUT	24.431.712	-	-	-	-	24.431.712
10	DINAS TATA AIR	1.710.567.042	-	-	-	-	1.710.567.042
11	Sudin Tata Air - JAKPUS	138.470.594	-	-	-	-	138.470.594
12	Sudin Tata Air - JAKUT	5.072.408.182	-	-	-	-	5.072.408.182
13	Sudin Tata Air - JAKBAR	25.797.638	-	64.823.192	-	-	90.620.830
14	Sudin Tata Air - JAKSEL	1.816.361.000	-	-	-	-	1.816.361.000
15	Sudin Tata Air - JAKTIM	264.311.888	-	3.227.249	-	-	267.539.137
16	DINAS PENATAAN KOTA	14.370.243	-	-	-	-	14.370.243
17	Sudin Penataan Kota - JAKPUS	6.826.192	-	-	-	-	6.826.192
18	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	176.126.540	-	-	-	-	176.126.540
19	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	130.318	-	-	-	-	130.318
20	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	212.741	-	-	-	-	212.741
21	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	-	-	1.344.000	-	-	1.344.000
22	Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	4.790.837	-	-	-	-	4.790.837
23	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa	12.649.005	-	-	-	-	12.649.005
24	Sudin Perhubungan - JAKUT	17.996.216	-	-	-	-	17.996.216
25	Sudin Perhubungan - JAKTIM	39.828.628	-	-	-	-	39.828.628
26	DINAS KESEHATAN	1.570.295.942	-	212.589.859	-	-	1.782.885.801
27	RSUD Pasar Minggu	39.012.176	-	-	-	-	39.012.176
28	Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres	333.000	-	-	-	-	333.000
29	Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	269.497	-	-	-	-	269.497
30	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus	-	219.205	-	-	-	219.205
31	BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jakpus	-	384.083	-	-	-	384.083
32	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jakpus	7.555.733	-	-	-	-	7.555.733
33	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jaksel	-	110.161	-	-	-	110.161
34	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel	-	175.981	-	-	-	175.981
35	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel	3.259.000	-	-	-	-	3.259.000
36	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	-	475.320	60.381.903	-	-	60.857.223
37	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	-	-	4.651.620	-	-	4.651.620
38	BLUD RS Koja	-	-	-	-	97.692.000	97.692.000
39	BLUD RS Tarakan	2.140.347.690	-	-	-	-	2.140.347.690
40	BLUD RS Duren Sawit	112.299.127	829.321	-	-	-	113.128.448
41	DINAS PENDIDIKAN	1.420.232.578	-	2.626.032	-	-	1.422.858.610
42	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKPUS	3.470.886	-	-	-	-	3.470.886
43	Sudin Pendidikan II - JAKPUS	229.445.418	-	-	-	-	229.445.418
44	Sudin Sosial - Jaktim	89.644	-	-	-	-	89.644
45	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	1.610.465.087	-	-	-	-	1.610.465.087
46	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakpus	10.640.000	-	-	-	-	10.640.000
47	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	965.740.700	-	-	-	-	965.740.700
48	Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	-	2.764	-	-	-	2.764
49	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	7.958.356	-	-	-	-	7.958.356
50	Satpol PP - Jakpus	88.161.493	-	-	-	-	88.161.493
51	Satpol PP - Jakut	54.251.259	-	-	-	-	54.251.259
52	Satpol PP - Jakbar	39.677.720	-	-	-	-	39.677.720
53	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	93.552.295	-	-	-	-	93.552.295
54	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakpus	10.309.430	-	-	-	-	10.309.430
55	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	15.194.553	-	-	-	-	15.194.553
56	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	25.619.856	-	-	-	-	25.619.856
57	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23.527.516	-	-	-	-	23.527.516
58	DINAS KEBERSIHAN	55.513.805	-	-	-	-	55.513.805
59	Unit Pengelola Sampah Terpadu	1.551.558.515	-	-	-	-	1.551.558.515
60	Sudin Kebersihan - Jakpus	288.810.385	-	-	-	-	288.810.385
61	Sudin Kebersihan - Jakut	471.207.791	-	-	-	-	471.207.791
62	Sudin Kebersihan - Jaksel	148.922.640	-	-	-	-	148.922.640
63	Sudin Kebersihan - Jaktim	162.491.054	-	-	-	-	162.491.054
64	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	205.323.464	-	2.171.309	-	-	207.494.773
65	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat	4.200.000	-	-	-	-	4.200.000
66	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN	6.731.132	-	-	-	-	6.731.132
67	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakpus	1.824.508	-	-	-	-	1.824.508
68	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakut	8.621.917	-	-	-	-	8.621.917

No	Nama SKPD/UKPD	Sisa Uang Persediaan	Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor	Pajak di SKPD yang Belum Disetor	Uang Titipan	Potongan Non Pajak yang Belum Disetor	Kas di Bendahara Pengeluaran
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
69	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakbar	130.100	-	-	-	-	130.100
70	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	3.036.327	-	-	-	-	3.036.327
71	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	33.511.860	-	-	-	-	33.511.860
72	Kota Administrasi Jakarta Pusat	12.004.329	-	-	-	-	12.004.329
73	Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus	7.742.788	-	-	-	-	7.742.788
74	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus	7.672.500	-	-	-	-	7.672.500
75	Kecamatan Menteng - Jakpus	3.922.626	-	-	-	-	3.922.626
76	Kelurahan Menteng - Jakpus	64.144.394	-	-	-	-	64.144.394
77	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	8.145.253	-	-	-	-	8.145.253
78	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	18.208.879	-	-	-	-	18.208.879
79	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus	81.400.000	-	-	-	-	81.400.000
80	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut	-	180.671	23.000	-	-	203.671
81	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar	10.968.720	-	-	-	-	10.968.720
82	Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakbar	-	-	2.186.025	-	-	2.186.025
83	Kelurahan Pegadungan - Jakbar	197.900	-	-	-	-	197.900
84	Kelurahan Tomang - Jakbar	14.674.280	-	-	-	-	14.674.280
85	Kelurahan Grogol - Jakbar	13.137.976	-	-	-	-	13.137.976
86	Kelurahan Jelambar - Jakbar	18.288.265	-	-	-	-	18.288.265
87	Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar	7.397.015	-	-	-	-	7.397.015
88	Kelurahan Wijaya Kesuma - Jakbar	13.645.733	-	41.065.620	-	-	54.711.353
89	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakbar	2.733.673	-	-	-	-	2.733.673
90	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	91.917.487	-	272.936	-	-	92.190.423
91	Kelurahan Pekojan - Jakbar	339.118	-	19.611.625	-	-	19.950.743
92	Kelurahan Maphar - Jakbar	4.970.962	-	-	-	-	4.970.962
93	Kelurahan Keagungan - Jakbar	7.779.033	-	-	-	-	7.779.033
94	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel	2.871.673	-	-	-	-	2.871.673
95	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	2.084.322	-	-	-	-	2.084.322
96	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	798.880	-	-	-	-	798.880
97	Kelurahan Pesanggrahan - Jaksel	11.590.945	-	-	-	-	11.590.945
98	Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel	1.124.027	-	-	-	-	1.124.027
99	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	21.890.596	-	-	-	-	21.890.596
100	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel	1.386.617	-	-	-	-	1.386.617
101	Kelurahan Kalibata - Jaksel	8.899.000	-	-	-	-	8.899.000
102	Kelurahan Pengadegan - Jaksel	368.903	-	-	-	-	368.903
103	Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel	1.787.555	-	-	-	-	1.787.555
104	Kelurahan Pulo - Jaksel	3.316.454	-	-	-	-	3.316.454
105	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel	1.865.284	-	-	-	-	1.865.284
106	Kecamatan Setiabudi - Jaksel	4.262.755	-	-	-	-	4.262.755
107	Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel	8.761.314	-	-	-	-	8.761.314
108	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	3.094.169	-	-	-	-	3.094.169
109	Kecamatan Tebet - Jaksel	1.327.468	-	-	-	-	1.327.468
110	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	30.412.431	-	-	-	-	30.412.431
111	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel	3.720.880	-	-	-	-	3.720.880
112	Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel	12.459.817	-	-	-	-	12.459.817
113	Kelurahan Pondok Labu - Jaksel	14.663.538	-	-	-	-	14.663.538
114	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	3.249.182	-	-	-	-	3.249.182
115	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	7.729.723	-	-	-	-	7.729.723
116	Kota Administrasi Jakarta Timur	42.773.054	-	-	-	-	42.773.054
117	Kelurahan Pekayon - Jaktim	21.311.407	-	-	-	-	21.311.407
118	Kelurahan Gedong - Jaktim	36.995.559	-	-	-	-	36.995.559
119	Kecamatan Cipayung - Jaktim	1.199.265	-	-	-	-	1.199.265
120	Kelurahan Tengah - Jaktim	1	-	-	-	-	1
121	Kelurahan Cililitan - Jaktim	3.632.610	-	-	-	-	3.632.610
122	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	944.647	-	-	-	-	944.647
123	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	6.615.362	-	-	-	-	6.615.362
	TOTAL	**21.603.202.103**	**2.377.506**	**414.974.370**	**-**	**97.692.000**	**22.118.245.979**

DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD
PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama SKPD/UKPD	Kas Tunai	Kas di Bank	Pajak di BLUD yang Belum Disetor	Uang Muka Pasien RSUD/K	Kas dan Setara Kas BLUD
1	2	3	4	5	6	7
1	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	-	233.554.122.644,00	-	-	233.554.122.644,00
2	Unit Pengelola Perparkiran	-	20.233.494.333,00	213.632.346,00	-	20.447.126.679,00
3	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	10.115.000,00	8.253.858.578,00	-	-	8.263.973.578,00
4	BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta	-	1.553.527.453,00	-	-	1.553.527.453,00
5	RSUD Kepulauan Seribu	2.888.840,00	156.083.156,00	-	-	158.971.996,00
6	RSUD Pasar Minggu	66.229.540,00	18.934.797.224,00	16.443.603,00	-	19.017.470.367,00
7	Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran	26.626.155,00	3.669.199.306,00	1.934.212,00	-	3.697.759.673,00
8	Rumah Sakit Umum Kec. Sawah Besar	49.719.112,00	873.773.590,00	96.600,00	-	923.589.302,00
9	Rumah Sakit Umum Kec. Cempaka Putih	6.966.000,00	1.896.855.936,00	-	-	1.903.821.936,00
10	Rumah Sakit Umum Kec. Johar Baru	6.220.348,00	1.226.169.595,00	91.000,00	-	1.232.480.943,00
11	Rumah Sakit Umum Kec. Koja	7.952.253,00	1.691.862.558,00	-	-	1.699.814.811,00
12	Rumah Sakit Umum Kec. Cilincing	4.562.943,00	3.670.238.302,00	5.811.500,00	-	3.680.612.745,00
13	Rumah Sakit Umum Kec. Pademangan	17.282.000,00	2.030.175.767,00	-	-	2.047.457.767,00
14	Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan	21.792.400,00	2.103.885.804,00	10.518.200,00	-	2.136.196.404,00
15	Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres	23.915.165,00	2.836.503.441,00	32.268,00	-	2.860.450.874,00
16	Rumah Sakit Umum Kec. Jagakarsa	25.505.620,00	3.252.676.572,00	-	-	3.278.182.192,00
17	Rumah Sakit Umum Kec. Tebet	20.336.300,00	1.841.693.068,00	-	-	1.862.029.368,00
18	Rumah Sakit Umum Kec. Mampang Prapatan	19.239.170,00	7.902.536,00	40.839.394,00	-	67.981.100,00
19	Rumah Sakit Umum Kec. Pesanggrahan	52.505.293,00	1.472.949.143,00	-	-	1.525.454.436,00
20	Rumah Sakit Umum Kec. Kramat Jati	14.908.881,00	3.012.032.978,00	-	-	3.026.941.859,00
21	Rumah Sakit Umum Kec. Ciracas	17.474.500,00	3.133.463.248,00	-	-	3.150.937.748,00
22	Rumah Sakit Umum Kec. Matraman	3.047.700,00	381.230.061,00	-	-	384.277.761,00
23	Rumah Sakit Umum Kec. Taman Sari	5.885.422,00	74.796.412,00	-	-	80.681.834,00
24	Rumah Sakit Umum Kec. Tanjung Priok	8.499.900,00	850.338.983,00	-	-	858.838.883,00
25	Rumah Sakit Umum Kec. Tanah Abang	-	312.258.424,00	-	-	312.258.424,00
26	BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)	-	12.528.348.753,00	-	-	12.528.348.753,00
27	BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - Jakpus	1.072.000,00	12.401.620.223,00	-	-	12.402.692.223,00
28	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus	-	6.813.632.338,00	33.729.402,00	-	6.847.361.740,00
29	BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jakpus	-	11.261.603.225,00	-	-	11.261.603.225,00
30	BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - Jakpus	710.000,00	6.718.608.362,00	-	-	6.719.318.362,00
31	BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - Jakpus	1.330.000,00	11.423.069.222,00	-	-	11.424.399.222,00
32	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus	35.121.412,00	9.216.734.630,00	21.085.831,00	-	9.272.941.873,00
33	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jakpus	2.301.004,00	3.162.171.390,00	-	-	3.164.472.394,00
34	BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus	-	6.427.675.741,00	-	-	6.427.675.741,00
35	BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - Jakut	1.716.000,00	19.592.516.505,00	-	-	19.594.232.505,00
36	BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - Jakut	632.000,00	5.945.922.346,00	-	-	5.946.554.346,00
37	BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - Jakut	1.247.000,00	21.725.272.637,00	-	-	21.726.519.637,00
38	BLUD Puskesmas Kec. Koja - Jakut	1.177.000,00	29.003.822.766,00	-	-	29.004.999.766,00
39	BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - Jakut	-	3.309.069.744,00	-	-	3.309.069.744,00
40	BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - Jakut	9.990.096,00	21.933.846.225,00	-	-	21.943.836.321,00
41	BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - Jakbar	12.625.000,00	5.487.255.771,00	-	-	5.499.880.771,00
42	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - Jakbar	3.883.997,00	17.877.426.515,00	-	-	17.881.310.512,00
43	BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - Jakbar	3.320.000,00	22.998.105.958,00	-	-	23.001.425.958,00
44	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar	382.000,00	11.782.930.954,00	440.763,00	-	11.783.753.717,00
45	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar	6.846.000,00	2.804.214.778,00	182.688.262,00	-	2.993.749.040,00
46	BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar	1.772.000,00	12.599.339.521,00	20.020,00	-	12.601.131.541,00
47	BLUD Puskesmas Kec. Tambora - Jakbar	-	6.286.242.639,00	-	-	6.286.242.639,00
48	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar	681.000,00	4.340.018.498,00	-	-	4.340.699.498,00
49	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel	-	9.522.398.750,00	-	-	9.522.398.750,00
50	BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - Jaksel	19.419.124,00	13.801.703.061,00	-	-	13.821.122.185,00
51	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel	1.513.102,00	18.538.441.566,00	-	-	18.539.954.668,00
52	BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - Jaksel	1.111.000,00	11.539.246.921,00	-	-	11.540.357.921,00
53	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - Jaksel	147.000,00	8.236.910.066,00	-	-	8.237.057.066,00
54	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - Jaksel	2.729.095,00	4.321.579.554,00	-	-	4.324.308.649,00
55	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jaksel	-	2.133.088.812,00	-	-	2.133.088.812,00
56	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel	-	2.358.130.386,00	-	-	2.358.130.386,00
57	BLUD Puskesmas Kec. Tebet - Jaksel	1.733.000,00	10.438.326.312,00	-	-	10.440.059.312,00
58	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel	5.481.882,00	8.372.792.218,00	96.714,00	-	8.378.370.814,00
59	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - Jaktim	4.952.879,00	4.003.117.535,00	-	-	4.008.070.414,00
60	BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - Jaktim	2.341.547,00	15.526.014.542,00	-	-	15.528.356.089,00
61	BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - Jaktim	1.291.125,00	10.851.830.601,00	-	-	10.853.121.726,00
62	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim	40.583.404,00	13.650.050.884,00	61.199.352,00	-	13.751.833.640,00
63	BLUD Puskesmas Kec. Makasar - Jaktim	437.000,00	11.714.038.172,00	-	-	11.714.475.172,00
64	BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - Jaktim	1.030.708,00	16.849.337.378,00	-	-	16.850.368.086,00
65	BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim	3.177.000,00	21.485.961.505,00	-	-	21.489.138.505,00
66	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	15.154.189,00	13.228.761.252,00	131.004.147,00	-	13.374.919.588,00
67	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - Jaktim	2.124.000,00	12.408.648.190,00	-	-	12.410.772.190,00
68	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim	1.407.000,00	22.828.776.535,00	-	-	22.830.183.535,00
69	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	-	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00
70	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	1.519.500,00	110.125.197,00	-	-	111.644.697,00
71	BLUD RS Koja	46.895.846,00	28.161.410.210,00	87.071.193,00	1.025.489.633,00	29.320.866.882,00
72	BLUD RS Tarakan	33.342,00	2.863.495.555,00	-	61.033.840,00	2.924.562.737,00
73	BLUD RS Cengkareng	86.780.500,00	78.502.244.380,00	-	356.558.541,00	78.945.583.421,00
74	BLUD RS Pasar Rebo	246.798.300,00	28.162.877.439,00	279.720.724,00	57.140.271,00	28.746.536.734,00
75	BLUD RS Budhi Asih	28.756.741,00	11.882.560.587,00	-	105.185.100,00	12.016.502.428,00
76	BLUD RS Duren Sawit	8.123.940,00	9.287.565.082,00	-	3.500.000,00	9.299.189.022,00
77	Mikro, Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung	-	1.255.768.152,00	-	-	1.255.768.152,00
78	KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAGUNAN	300.000.000,00	38.252.222.682,00	-	-	38.552.222.682,00
	SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD	**1.320.020.275,00**	**1.013.150.761.377,00**	**1.086.455.531,00**	**1.608.907.385,00**	**1.017.166.144.568,00**

Lampiran 4

REKAPITULASI DAFTAR PIUTANG PAJAK DAERAH
PER 31 DESEMBER 2016

NO	JENIS PIUTANG PAJAK	PIUTANG UNTUK SPPT/SKDP TERBIT SEBELUM TAHUN 2016						PIUTANG UNTUK SPPT/SKPD TERBIT TAHUN 2016					PIUTANG UNAUDITED S.D 31 DESEMBER 2016
		PIUTANG PAJAK PER 1 JAN 2016 (AUDITED)	PEMBAYARAN S.D 31 DESEMBER 2016	KEPUTUSAN KEBERATAN S.D 31 DESEMBER 2016	KOMPENSASI S.D 31 DESEMBER 2016	KOREKSI S.D 31 DESEMBER 2016	SISA PIUTANG PER AWAL PER 31 DES 2016	KETETAPAN TH BERJALAN S.D 31 DESEMBER 2016	PEMBAYARAN TH BERJALAN S.D 31 DESEMBER 2016	KEPUTUSAN KEBERATAN (FAKTOR PENGURANG) S.D 31 DESEMBER 2016	KOMPENSASI S.D 31 DESEMBER 2016	SISA PIUTANG TAHUN BERJALAN S.D 31 DESEMBER 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8=3-4-5-6-7	9	10	11	12	13=9-10-11-12	14=8+13
1	HOTEL	17.476.631.388	3.721.503.163	-	-	(33.443.130)	13.721.685.095	16.920.983.181	13.599.144.273	1.652.354.636		1.669.484.272	15.391.169.367
2	RESTORAN	129.880.233.572	21.789.560.889	384.717.877	-	(4.909.234.878)	102.796.719.928	34.498.432.203	23.877.037.053	851.882.648		9.769.512.502	112.566.232.430
3	HIBURAN	67.165.075.129	19.230.185.840	890.312.958	-	(3.748.943.820)	43.295.632.511	53.158.688.824	39.331.838.738	4.313.258.348		9.513.591.738	52.809.224.249
4	PARKIR	2.794.391.418	208.976.706	319.673.713	-	(322.221.613)	1.943.519.386	6.282.117.982	2.907.670.398	52.572.172	-	3.321.875.412	5.265.394.798
5	REKLAME	210.655.068.042	66.742.594.722	40.477.837	232.214.601	(18.637.797.068)	125.001.983.814	987.470.795.065	876.068.977.985	1.052.147.565	1.559.928.236	108.789.741.279	233.791.725.093
6	PBB-KB	4.095.221.225	-	-	-	(65.170.903)	4.030.050.322	-	-	-	-	-	4.030.050.322
7	PPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Pajak Rokok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	BPHTB	17.841.149.604	194.460.975	-	-	(4.901.962)	17.641.786.667	2.080.817.983	127.168.118	-	-	1.953.649.865	19.595.436.532
10	PBB-P2	5.727.070.247.396	588.182.629.618	85.068.301.696	18.368.257	(233.666.197.343)	4.820.134.750.482	8.042.387.713.965	6.414.417.502.415	434.539.484.994	1.135.450.755	1.192.295.275.801	6.012.430.026.283
11	P A T	83.087.525.295	8.967.167.396	334.183.739	507.997.001	(4.744.444.890)	68.533.732.269	115.172.425.941	103.104.019.357	-	-	12.068.406.584	80.602.138.853
12	BBN-KB	238.627.010	-	-	-	-	238.627.010	4.600.000	720.000	-	-	3.880.000	242.507.010
13	PKB	50.386.958.545	7.235.161.100	-	-	(8.106.579.241)	35.045.218.204	558.466.554.390	514.447.783.740	-	-	44.018.770.650	79.063.988.854
	Grand Total	**6.310.691.128.624**	**716.272.240.409**	**87.037.667.820**	**758.579.859**	**(274.238.934.848)**	**5.232.383.705.688**	**9.816.443.129.534**	**7.987.881.862.077**	**442.461.700.363**	**2.695.378.991**	**1.383.404.188.103**	**6.615.787.893.791**

Lampiran 5.1

DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK SEWA PER 31 DESEMBER 2016

NO	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET						Keterangan
					Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan			
			Mulai	Berakhir		PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi			PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16	
1	PT Happyday Utama Indonesia	1.500.000.000	23-Dec-13	22-Dec-18	-					-	-					-	
2	Nusantara Sejahtera Raya	1.060.000.000	19-Aug-14	18-Aug-19	-					-	-					-	
3	PT Panca Permata Istana Pasar Baru	4.496.856.804	16-Jul-12	15-Jul-17	1.188.162.687,00	31.131.555		1.188.162.687		31.131.555,00	215.723.894	53.113.155	48.727.666			317.564.715,00	
4	PT Lingkar Seni Indonesia	5.000.000.000	10-Mar-13	9-Mar-18	-					-	-					-	
5	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda)	5.000.000	26-May-14	25-May-19	-					-	-					-	
6	Yayasan Gandhi Memorial International School (GMIS)	2.000.000.000	13-Jan-14	12-Jan-19	-					-	-					-	
7	Yayasan Pendidikan Elka	1.650.000.000	23-Mar-13	23-Mar-18	-					-	-					-	
8	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	625.000.000	19-Oct-13	18-Oct-18	-					-	-					-	
9	PT Prima Indo Bahari	876.218.235	15-Jun-14	14-Jun-19	-					-	-					-	
10	Prima Alto Sejahtera	2.367.579.043	2-Mar-10	1-Mar-15	1.502.379.043,00					1.502.379.043,00	75.118.952					75.118.952,00	
11	UD Matahari Terbit	84.556.394	5-May-10	5-Apr-15	-					-	-					-	
12	Yayasan Al-Amanah Sunter Agung	275.000.000	9-Jan-14	8-Jan-19	-					-	-					-	
13	PT Pembangunan Jaya Ancol	1.643.957.703	5-Apr-15	4-Apr-20	-					-	3.181.442	2.163.911				5.345.353,00	
14	Koperasi Pegawai Dinas Perikanan (SPBU)	1.324.800.000	18-Feb-16	17-Feb-21	-					-	-					-	
15	PD Sumber Alam	225.483.718	16-Feb-11	16-Feb-16	-					-	-					-	
16	PT Bank DKI (34 Bangunan Kantor)	14.300.660.100	31-May-11	30-May-16	-					-	160.137.985			121.704.861	38.433.124	-	
17	PT Bank DKI (38 lokasi utk 41 ruang ATM)	3.120.130.953	7-Jul-11	6-Jul-16	-					-	63.905.500			25.749.421	38.156.079	-	
18	PT Bank DKI (22 kantor kecamatan)	2.609.622.450	7-Jul-11	6-Jul-16	-					-	56.206.269			28.152.756	28.053.513	-	
19	PT Astra Daihatsu Motor	298.765.927	3-Jan-11	2-Jan-16	-					-	-					-	
20	Perkumpulan Pemberantasan Tuberculosis Indonesia (PPTI)	25.000.000	18-Oct-11	17-Oct-16	-					-	-					-	
21	PT Alam Segar Jaya	719.293.062	28-Feb-12	27-Feb-17	-					-	-					-	
22	Yayasan Ancol Barat	160.784.300	12-Apr-12	11-Apr-17	-					-	-					-	
23	PT Obayashi Jaya Konstruksi Joint Operation	990.000.000	12-Apr-12	11-Apr-15	-					-	-					-	
24	Yayasan Harapan Bangsa (3 unit	507.338.366	15-Jun-12	14-Jun-17	-					-	-					-	
25	Yayasan Harapan Bangsa (TK	338.225.578	27-Jan-15	26-Jan-20	-					-	-					-	
26	PT Wiradharma Sportindo	563.709.296	8-Nov-12	7-Nov-17	218.359.999,00		69.475.934			287.835.933,00	11.870.813	5.002.267				16.873.080,00	
27	Koperasi Puteri Salju	208.572.440	22-Nov-12	21-Nov-17	-					-	440.676	1.018.842		1.366.095		93.423,00	
28	RS Atmajaya	25.000.000	29-Aug-13	29-Aug-18	-					-	-					-	
29	Kajima Waskita (KAWA)	496.110.320	2-Sep-14	31-Dec-15	-					-	-					-	
30	PT Rukun Gaya Baru	650.000.000	12-Aug-09	10-Aug-14	-					-	-					-	
31	Yayasan Jemaat Sungai Yordan	125.000.000	5-Jul-12	4-Jul-17	-					-	-					-	
32	Gereja Tiberias Indonesia	375.000.000	14-May-12	13-May-15	-					-	-					-	
33	PT Nata Sempurna Abadi	75.000.000	4-Apr-05	3-Apr-10	60.000.000,00					60.000.000,00	158.160.000	43.860.000				202.020.000,00	
34	Koperasi Karyawan Bina Sejahtera BP3W Kodya Jakarta Utara	42.750.000	30-May-05	29-May-10	-					-	718.200			718.200		-	
35	Yayasan Mahatma Gading	1.266.767.531	28-Oct-13	27-Oct-18	-					-	-					-	
36	Yayasan Al - Hidayah	40.000.000	14-Mar-13	14-Mar-18	-					-	-					-	
37	PT KMC Indonesia	400.000.000	25-Apr-14	25-Apr-19	-					-	-					-	
38	Koperasi Pembina Profesi dan Olahraga Perairan (KPPOP)	430.400.000	19-Jun-14	18-Jun-19	-					-	-					-	
39	Yayasan Masjid Raya Al-Musyawarah	545.000.000	14-Oct-14	13-Oct-19	-					-	-					-	
40	Koperasi Perikanan Mina Jaya	97.282.208	14-Oct-14	13-Oct-19	-					-	-					-	
41	Yayasan Al-Hikmah Sunter Jaya	30.000.000	31-Oct-14	30-Oct-19	-					-	-					-	
42	PT Flora Hijau Permai	120.000.000	14-Jul-03	13-Jul-08	48.000.000,00					48.000.000,00	-					-	
43	Kadin Jakarta Barat	40.000.000	22-Feb-08	21-Feb-13	28.000.000,00			28.000.000		-	39.692.000	16.072.000		19.760.000		36.004.000,00	
44	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	845.563.944	18-Sep-13	17-Sep-18	-					-	-					-	
45	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	828.844.687	24-Aug-13	23-Aug-18	-					-	-					-	
46	PT Antilope Madju Puri Indah	1.806.415.004	30-Nov-13	29-Nov-18	-					-	-					-	
47	Palang Merah Indonesia Jakarta Barat	50.000.000	18-Sep-13	19-Sep-18	-					-	-					-	
48	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	1.050.000.000	18-Aug-14	18-Aug-19	-					-	-					-	
49	Yayasan Pendidikan Kemurnian	563.708.802	23-Apr-13	22-Apr-18	-					-	-					-	
50	PT Petross Gas	3.718.465.786	31-Mar-15	30-Mar-20	-					-	-					-	
51	Yayasan Suhargo Gondokusumo	530.000.000	25-Jun-12	24-Jun-17	-					-	-					-	
52	Yayasan Muslim Bojong Indah	30.000.000	19-Apr-12	18-Apr-17	-					-	-					-	

NO	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET						Keterangan
					Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan			
			Mulai	Berakhir		PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi			PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16	
53	Yayasan Pendidikan Citra Kasih (Blok bl. 11-12	855.000.000	12-Apr-12	11-Apr-17	-					-	4.400.000			4.400.000		-	
54	PT Davalty Mugitama Gasindo	2.395.764.506	15-Mar-12	14-Mar-17	-					-	-					-	
55	Yayasan Pendidikan Islam Al Huda	45.000.000	29-Apr-08	28-Apr-11	15.000.000,00			15.000.000		-	40.080.000	9.135.000				49.215.000,00	
56	PT Petroleum Sukses	882.950.000	27-Apr-06	26-Apr-11	706.360.000,00					706.360.000,00	1.587.721.190	516.349.160				2.104.070.350,00	
57	Pentrago Fertila Utama	500.000.000	23-Oct-07	23-Oct-12	500.000.000,00					500.000.000,00	944.000.000	365.500.000				1.309.500.000,00	
58	Yayasan Diannanda (TK)	253.643.183	20-Nov-12	19-Nov-17	-					-	-					-	
59	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Kedoya Jakarta Barat	175.000.000	14-Nov-12	14-Nov-17	-					-	1.645.000					1.645.000,00	
60	Alfa Indah Sportindo	546.411.042	15-Mar-12	14-Mar-17	-					-	-					-	
61	PT Alita Praya Mitra	802.200.000	23-Nov-07	21-Feb-12	204.030.000,00					204.030.000,00	120.971.760	8.984.640				129.956.400,00	
62	Perusahaan Umum Damri	2.500.000.000	1-Nov-12	1-Nov-17	-					-	-					-	
63	Yayasan Tanimbar Lestari	136.370.930	5-May-12	8-May-17	-					-	-					-	
64	Ikrar Anugerah Perkasa	385.000.000	12-Sep-12	11-Sep-17	305.000.000,00	26.666.667			20.000.000	311.666.667,00	15.250.000	4.000.000				19.250.000,00	
65	Koperasi Pegawai Dinas Pariwisata	125.000.000	30-Dec-08	29-Nov-13	100.000.000,00			100.000.000		-	163.075.000	6.000.000				169.075.000,00	
66	Koperasi Pegawai Dinas Koperasi & UKM	30.000.000	14-Jul-08	13-Jul-13	12.000.000,00					12.000.000,00	12.978.000	8.772.000				21.750.000,00	
67	PT Multi Kontrol Nusantara	602.228.090	14-Dec-14	13-Dec-19	-					-	-					-	
68	Yayasan Putera Bahagia	1.157.559.375	14-Jun-14	13-Jun-19	-					-	1.157.559	694.536		1.157.559		694.536,00	
69	CV Kandang Mas	180.386.975	29-Dec-10	28-Dec-15	40.399.263,00					40.399.263,00	2.019.963					2.019.963,00	
70	Himpunan Penyayang Binatang	30.000.000	30-Jun-11	29-Jun-16	-					-	-					-	
71	PT Safari Persada	986.491.268	7-Jul-11	6-Jul-16	811.491.268,00					811.491.268,00	40.574.563					40.574.563,00	
72	PT Asri Karya Indah Pesona	620.080.226	1-Jan-12	31-Dec-16	-					-	-					-	
73	Yayasan Pantara	112.741.859	8-Aug-12	7-Aug-17	-					-	-					-	
74	PT Griya Berlian	3.190.000.000	29-Nov-12	28-Nov-17	54.583.333,00	656.250.000				710.833.333,00	20.305.000	670.000	12.445.000			33.420.000,00	
75	CV Satu Nafas	500.000.000	3-Jul-08	2-Jul-13	350.000.000,00					350.000.000,00	325.400.000	383.600.000				709.000.000,00	
76	Koperasi Taman Marga Satwa	1.268.345.916	1-Jan-12	31-Dec-16	-					-	-					-	
77	CV Virgini	986.491.268	4-Apr-12	3-Apr-17	-					-	-					-	
78	PT Figurkarya Semesta	507.338.366	10-Dec-12	10-Dec-17	101.124.000,00	107.191.440		101.124.000		107.191.440,00	5.056.200			5.056.200		-	
79	PD Pembangunan Sarana Jaya	1.200.000.000	4-Apr-05	4-Apr-10	-					-	720.000					720.000,00	
80	Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga	37.500.000	13-Oct-06	12-Oct-11	-					-	735.000					735.000,00	
81	PT Harkat Abadi Sukses				-					-	-					-	
82	Yayasan Nawami Bhakti	375.000.000	15-Oct-12	15-Oct-17	-					-	-					-	
83	PT Harco Jaya Abadi	2.100.000.000	1-Jun-06	30-May-11	-					-	-					-	
84	PT Aksara Andalan Prima Lokasi Kp. Rambutan	4.246.908.500	21-Apr-08	21-Apr-13	1.167.725.100,00			1.167.725.100		-	6.164.861.686	4.670.900				6.169.532.586,00	
85	PT T. Energy (PKS Lama)	2.700.000.000	1-Dec-08	30-Nov-13	-		316.342.950			316.342.950,00	198.516.286	346.711.873				545.228.159,00	
86	PT T. Energy (PKS Baru)	1.832.055.212	1-Dec-13	1-Dec-18	1.034.670.000,00	32.256.683				1.066.926.683,00	45.160.440	18.959.626				64.120.066,00	
87	Yayasan Perguran Rakyat	750.000.000	2-Feb-14	1-Feb-19	-					-	-					-	
88	Koperasi Serba Usaha Ceger Jaya	150.000.000	25-Apr-13	24-Apr-18	-					-	90.000	60.000		90.000		60.000,00	
89	Yayasan Dharma Siswa	250.000.000	27-Apr-13	26-Apr-18	-					-	-					-	
90	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia	32.500.000	25-May-11	24-May-16	-					-	-					-	
91	PT Bank BNI (Persero) Tbk	375.000.000	1-Jun-09	31-May-14	-					-	375.000				375.000	-	Koreksi krn tidak telat
92	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.202.960.000	7-Jun-14	6-Jun-19	-					-	16.841.440					16.841.440,00	
93	Yayasan Rumah Bersalin Bidara Mulia	100.000.000	16-Jun-14	15-Jun-19	-					-	-					-	
94	PT Bianglala Metropolitan	2.189.585.000	13-Jan-11	12-Jan-16	875.834.000,00			875.834.000		-	43.791.700			43.791.700		-	
95	Kadin Jakarta Timur	125.000.000	13-Sep-11	12-Sep-16	75.000.000,00					75.000.000,00	3.750.000					3.750.000,00	
96	Yayasan Baitul Muhajirin	30.000.000	1-Jan-13	31-Dec-18	5.000.000,00			5.000.000		-	-					-	
97	PT Paljaya Bumi Utama	1.250.000.000	18-Jan-06	18-Jan-11	1.000.000.000,00					1.000.000.000,00	2.179.750.000	915.000.000				3.094.750.000,00	
	Yayasan Nurmala Hikmah		1-Jun-11	1-Jun-16	-					-	-					-	
98	Yayasan Nurmala Hikmah	56.370.930	1-Jun-11	1-Jun-16	-					-	-					-	
99	PT Hyunwoo Trading Indonesia	1.111.600.000	5-May-08	4-May-13	1.111.600.000,00					1.111.600.000,00	1.068.914.560	1.624.047.600				2.692.962.160,00	
100	PT BNI (Persero) Tbk (Cabut Jatinegara)	425.000.000	1-Apr-11	31-Mar-16	-					-	-					-	
101	Koperasi Karyawan RSUD Pasar Rebo	842.181.687	1-Jan-12	31-Dec-16	-					-	-					-	

NO	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET						Keterangan
					Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan			
			Mulai	Berakhir		PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi			PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16	
102	Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia (DPP PAMMI)	50.000.000	29-Apr-14	28-Apr-19	-					-	-					-	
103	PT Satria Cipta Perkasa	2.252.972.568	13-May-14	12-May-19	287.000.000,00	440.545.000				727.545.000,00	42.105.000	22.278.375				64.383.375,00	
104	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Falah Pondok Kelapa	112.741.859	18-Sep-13	17-Sep-18	-					-	-					-	
105	Yayasan Al-Muhsinin Alfa Indah	550.000.000	24-Jul-06	23-Jul-18	-					-	-					-	
106	PT Bumi Bintang Bersatu	700.000.000	2-Jul-14	1-Jul-19	-					-	-					-	
107	Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat "Wijaya Kusuma'	55.000.000	8-Aug-14	7-Aug-19	-					-	-					-	
108	PT Swadaya Niaga Jaya (Smesco's)	22.500.000.000	10-Apr-15	9-Apr-20	-					-	6.000.000					6.000.000,00	
109	Swadaya Panduartha	500.000.000	30-Oct-14	30-Oct-19	-					-	-					-	
110	Yayasan Al Muhajirin Pondok Kopi	422.781.972	17-Nov-14	16-Nov-19	79.500.000,00			79.500.000		-	3.498.000			3.498.000		-	
111	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Indonesia Puri Indah	175.000.000			-					-	-					-	
112	PT Tunas Dipta Persada	4.350.000.000			1.425.000.000,00		160.000.000			1.585.000.000,00	-					-	
113	PT Setia Utama Island	5.590.000.000	18-Dec-14	17-Dec-19	1.118.000.000,00			1.118.000.000		-	30.186.000			30.186.000		-	
114	PT Gagas Energi Indonesia	572.432.513	1-Sep-13	1-Sep-15	-					-	10.303.785			2.289.730	8.014.055	-	koreksi karena sesuai tanggal bayar sesuai slip setoran dari PT Gagas
115	PT PLN Persero	145.139.715	4-Feb-15	3-Feb-20	-					-	-					-	
116	Yayasan Abdi Karya (Yadika)	2.222.665.229	26-Feb-15	25-Feb-20	-					-	-					-	
117	PT Holcim Beton	5.500.000.000	8-Apr-15	7-Apr-20	-					-	-					-	
118	PT Swarna Jaya Sejahtera	100.000.000	11-Mar-15	10-Mar-20	-					-	-					-	
119	Yayasan Pendidikan Dakwah Islam Al-Falah	25.000.000	8-Apr-15	7-Apr-20	-					-	-	20.000		20.000		-	
120	Yayasan Bait-el Indonesia	425.000.000	30-Aug-11	29-Aug-16	112.500.000,00			112.500.000		-						-	
121	UD Lautan Mutiara	2.254.837.184	23-Apr-14	22-Apr-19	-					-	2.544.000			2.544.000		-	
122	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	25.000.000	5-May-15	4-May-20	-					-	-					-	
123	PT Balats Dwi Tunggal	325.859.614	26-May-15	25-May-17	-					-	-					-	
124	Yayasan Diannanda (SD)	1.710.857.713	26-Sep-13	27-Sep-18	-					-	-					-	
125	Yayasan Pendidikan Pelita Harapan	3.750.000.000	1-Jul-15	30-Jun-20	-					-	-					-	
126	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta	400.000.000	31-Jan-13	30-Jan-18	-					-	-					-	
127	PT Surya Jaya Mandiri	110.000.000	9-Jul-15	8-Jul-20	-					-	-					-	
128	PT Jamkrida Jakarta	31.373.624	1-Jul-15	30-Jun-17	-					-	-					-	
129	Yayasan Meek Nusantara	27.000.000	27-Jul-15	26-Jun-18	-					-	-					-	
130	Yayasan Rasa Sayang Mandiri	310.040.112	26-Oct-15	25-Oct-20	-					-	-					-	
131	Yayasan Al-Ikhwan Meruya	56.370.930	29-Oct-15	28-Oct-20	-					-	-					-	
132	Yayasan Haleluya Jakarta	1.691.127.888	18-Nov-15	17-Nov-20	-					-	-					-	
133	Yayasan Pelita Bangsa	2.333.333.340	23-Dec-15	22-Dec-20	-					-	-					-	
134	PT Bank DKI (22 ATM dan Loket)	11.000.000	6-Oct-15	5-Oct-20	-					-	550.000				550.000	-	sudah dibayar tgl 31 desember 2015
135	PT Bank DKI (58 ATM dan Loket)	29.000.000	28-Dec-15	27-Dec-20	-					-	87.000			87.000		-	
136	PT Bank DKI (Walikota Jakarta Pusat)	1.675.547.578	28-Dec-15	27-Dec-20	-					-	-					-	
137	PT Jaya Sejati Dua	555.000.000	11-Feb-16	10-Feb-21						-						-	
138	PT Indocater	1.691.127.888	12-Feb-16	11-Feb-21						-						-	
139	PT Duta Graha Karya	125.000.000	11-Mar-16	10-Mar-17						-						-	
140	Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat	281.854.648	20-Nov-14	21-Nov-19						-		1.467.000				1.467.000,00	
141	PT Badra Abadi Perkasa	541.160.924	9-Feb-16	8-Feb-21						-						-	
142	PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia (RSUD Koja)	106.372.475	18-Mar-16	17-Mar-21						-						-	
143	Yayasan Pondok Karya Pembangunan	693.945.000	8-Apr-15	7-Apr-20						-						-	
144	PT Unggul Dian Perkasa	1.944.374.289	7-Mar-16	6-Mar-21						-						-	
145	Yayasan Tanimbar Lestari	500.000.000	26-Apr-16	25-Apr-21						-						-	
146	Yayasan Pendidikan Citra Adhi Pratama	197.298.253	25-Apr-16	24-Apr-21						-						-	

NO	PIHAK KETIGA	Nilai PKS Sewa	Jangka Waktu Sewa		POKOK PIUTANG SEWA ASET						DENDA PIUTANG SEWA ASET						Keterangan
					Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	Saldo Audited 31-12-2015	Mutasi Tahun 2016				Saldo 31 Desember 2016	
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan			
			Mulai	Berakhir		PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi			PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16	
147	PT Bank Mandiri (RSUD Budhi Asih, Pasar Rebo, RSKD Duren Sawit)	540.000.000	3-Mar-16	2-Mar-21						-						-	
148	PT Usaha Cerah Berjaya Indonesia (RSUD Tarakan)	230.244.170	14-Apr-16	13-Apr-21						-						-	
149	PT Bank DKI (Gedung Prasada Sasana Karya)	7.448.704.003	2-May-16	1-May-21						-						-	
150	PT Pertamina Gas	260.000.000	2-May-16	1-May-21						-						-	
151	Yayasan Safa Marwah	25.000.000	30-May-16	29-May-21						-						-	
152	Yayasan Kanker Indonesia Provinsi DKI Jakarta	5.000.000	9-May-16	8-May-21						-						-	
153	PT Seabreez Indonesia	270.580.462	22-Apr-16	21-Apr-21						-						-	
154	Yayasan Anak Bangsa Basmol	250.000.000	22-Feb-16	21-Feb-16													
155	PD PAL Jaya	120.000.000	1-Feb-16	31-Jan-17													
156	Yayasan El-Shaddai Jakarta Barat (SD)	563.709.296	23-Jul-16	22-Jul-16													
157	PT Trust Parking Indonesia	1.200.000.000	1-Nov-14	31-Oct-19													
158	PT Diansyah Dinamika Warna	225.483.718	15-Oct-15	14-Oct-20													
159	Koperasi Pegawai RSUD Tarakan	466.074.846	29-Oct-15	28-Oct-20													
160	PT Gagas Energi Indonesia (Jakbar)	622.624.753	14-Nov-15	13-Nov-20													
161	Yayasan Suhargo Gondokusumo	2.760.000.000	1-Apr-16	31-Mar-21													
162	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Tua	5.000.000	29-Oct-16	28-Oct-21													
TOTAL PIUTANG					***14.536.718.693,00***	***1.294.041.345***	**545.818.884**	**4.790.845.787**	**20.000.000**	**11.565.733.135,00**	**13.888.569.863,00**	**4.358.150.885**	**61.172.666**	**290.571.521**	**113.581.772**	**17.903.740.121,00**	

Lampiran 5.2

DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2016

No.	Pihak Ketiga	Thn	Jangka Waktu	Nilai Kontribusi PKS	Piutang Pokok	Mutasi Tahun 2016				Piutang Pokok Per 31 Desember 2016	Piutang Denda Per 31 Desember 2015	Mutasi Tahun 2016				Piutang Denda Per 31 Desember 2016	Keterangan
						Penambahan		Pengurangan				Penambahan		Pengurangan			
		PKS	PKS	BOT/BTO	Per 31 Des 2015	PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi			PKS	Koreksi	Pendapatan	Koreksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+8-9-10	12	13	14	15	16	17=12+13+14-15-16	
1	PT. Kempas Indah Indonesia	1997	1999 s/d 2024	910.000.000	-					-	-					-	
2	PT. Duta Pertiwi Tbk	1997	1997 s/d 2017	460.000.000	-					-	-					-	
3	PT. Duta Pertiwi Tbk	1999	1999 s/d 2029	1.450.000.000	-					-	-					-	
4	PT. Rointa Eka Jaya	2001	2001 s/d 2031	1.250.000.000	-					-	14.400.000			14.400.000,00		-	
5	PT. Duta Masa Nusa	2003	2006 s/d 2031	2.000.000.000	500.000.000					500.000.000	-					-	
6	PT. Duta Pertiwi Tbk	2003	2004 s/d 2029	1.500.000.000	-					-	-					-	
7	PT. Gading Raya Propertindo	2004	2004 s/d 2029	3.500.000.000	-					-	-					-	
8	PT. Hotel Cikini Raya	2006	2008 s/d 2032	6.150.000.000	-					-	-					-	
9	PT. Grand Indonesia	2009	2008 s/d 2035	53.074.000.000	-					-	-					-	
10	PT. Jaya Real Property	2011	2012 s/d 2037	6.957.000.000	-					-	-					-	
11	PT. Fajar Setia Mandiri	2002	2003 s/d 2023	2.218.000.000	-					-	82.350.000	2.100.000		2.350.000,00		82.100.000,00	
12	PT. AGB Tuna (Coldstorage)	2004	2004 s/d 2024	600.000.000	-					-	73.150.000			24.500.000,00		48.650.000,00	
13	Yayasan Al-Muhajirin	2005	2005 s/d -	-	-					-	-					-	
14	PT. Gamma Investa Lestari	2006	2005 s/d 2030	1.500.000.000	-					-	-					-	
15	Gereja Protestan Minahasa	2006	2006 s/d -	-	-					-	-					-	
16	PT. AGB Tuna (Pabrik Es)	2006	2006 s/d 2026	450.000.000	-					-	37.700.000			37.700.000,00		-	
17	PT. Duta Pertiwi Tbk	2008	2006 s/d 2031	7.453.280.000	-					-	-					-	
18	PT. Gerak Maju Abadi	1997	1997 s/d 2017	5.315.000.000	-					-	-					-	
19	PT. Bina Citra Tataswati	2000	2002 s/d 2040	200.000.000	-					-	-					-	
20	Yayasan Tunas Muda	2000	2000 s/d 2025	911.281.328	-					-	-					-	
21	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	2001	2001 s/d 2026	562.500.000	-					-	-					-	
22	Yayasan Katolik Mardi Luhur	2001	2001 s/d 2026	911.281.326	230.780.000				37.069.583	193.710.417	271.673.533	6.090.568				277.764.101,00	
23	PT. Pesona Marga Mandiri	2003	2004 s/d 2029	7.494.152.500	296.450.000			296.450.000		-	82.729.150	31.423.700				114.152.850,00	
24	Yayasan Patmos	2003	2006 s/d 2031	2.629.958.657	-					-	-					-	
25	Yay. Pusat Pelatihan E&P	2003	2006 s/d 2031	2.446.290.730	-					-	-					-	
26	Gereja Bethel Jemaat Ecclesia	2005	2005 s/d -	-	-					-	-					-	
27	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	2006	2008 s/d 2033	6.929.568.694	85.850.000			85.850.000		-	152.594.650	5.724.180		51.738.830,00		106.580.000,00	
27	PT. Langgeng Ayom Lestari	1990	1991 s/d 2021	2.605.000.000	-					-	-					-	
28	Yay. Sapta Nawami Bhakti	1992	1992 s/d 2012	351.779.690	-					-	-					-	
29	PT. Dharma Alumas Sakti	1992	1997 s/d 2044	22.271.759.150	-			-		-	60.081.243.256			15.204.024,00		60.066.039.232,00	
30	PT. Bakrie Investindo	1992	1997 s/d 2044	18.237.500.000	-					-	23.977.383.262					23.977.383.262,00	
31	PT. Pasific Bangun Mas	2001	2001 s/d 2026	700.000.000	-					-	116.600.000					116.600.000,00	
32	PT. Perwita Margasakti	2003	2003 s/d 2028	2.500.000.000	-					-	19.500.000					19.500.000,00	
33	PT. Metropolitan Kentjana	2008	2006 s/d 2031	24.912.000.000	-					-	20.752.000			20.752.000,00		-	
34	PT. Perwita Margasakti	2010	2010 s/d 2035	5.220.000.000	-					-	2.700.000					2.700.000,00	
35	Yayasan Tugasku	1998	2004 s/d 2024	1.250.950.000	-					-	-					-	
36	Yay. Pend. Pemb. Bangsa	2003	2003 s/d 2028	-	-					-	-					-	
37	PT. Fajar Setia Mandiri	2003	2003 s/d 2023	1.600.000.000	60.000.000					60.000.000	335.063.000	33.000.000				368.063.000,00	
38	PT. Pasific Prima Buana Mas	2004	2004 s/d 2029	250.000.000	-					-	1.530.047.517			179.867.956,00		1.350.179.561,00	
39	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2004	2004 s/d 2029	2.350.000.000	-					-	-					-	
40	PT. Wahana Cipta Sejahtera	2006	2006 s/d 2031	3.000.000.000	-					-	63.500.000			63.500.000,00		-	
41	PT. AAP				4.302.396					4.302.396	-					-	
42	Eks. Unit Komp. Aloca PT. TDP (PT Tunas Dipta Persada)	JP	30 Tahun		540.000.000					540.000.000	-					-	
43	Eks. PDUK		30 Tahun		400.000.000					400.000.000	-					-	
44	T. Kav No.I.C.2	JT	25 Tahun		525.000.000					525.000.000	-					-	
45	Tanah Kavling Blok III A (PT. MML) (PT Majuan Masitah Latief)	JT	30 Tahun		1.510.000					1.510.000	-					-	
46	Tanah Kav Blok II/J.14 (Eks. PD.P)	JT	30 Tahun		450.000.000					450.000.000	-					-	
	JUMLAH			**202.121.302.075**	**3.093.892.396**	**-**			**37.069.583**	**2.674.522.813**	**86.861.386.368**	**78.338.448**	**-**	**410.012.810**	**-**	**86.529.712.006**	

Lampiran 5.3

REKAPITULASI PENDAPATAN DAN PIUTANG SEWA PEMANFAATAN TITIK REKLAME
PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2015	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2016	Keterangan
1	PT. Nindhotama Kharisma	JPO	Jl. MH. Thamrin dpn Gedung BII, Kebon Kacang, Jakarta Pusat	341.500.000	0			0	Lunas 14 Mei 2014
2	PT. Caesar	Bahu Jalan	Jl. Tol Pluit Tomang / Jl. Latumenten, Jakarta Barat	170.000.000	170.000.000			170.000.000	Titik B-6A; SK Nomor 46/SK/BPKD/PPTR/X/09 tanggal 6-10-2009
3	PT. Billy Sinar Pratama	JPO	Jl. Daan Mogot dpn Suzuki Motor Ex. Kymco Motor, Jakarta Barat	39.500.000	39.500.000			39.500.000	SK Nomor 145/SK/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 11-03-2010
4	PT. Ditadini Neo Swara	Halte Busway Bagian Dalam	Koridor 1 (19 unit)	25.000.000	25.000.000			25.000.000	SPS Nomor 177/SPS/BPKD-PPTR/IV/2010 tanggal 23-04-2010
5	PT. Starindo Pola Abadi	Halte Bus Reguler	Jl. Mayjen Sutoyo dpn UKI, Jakarta Timur	25.741.000	25.741.000			25.741.000	
6	PT. Garis Mediatama	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Depkes, Jakarta Selatan	157.500.000	157.500.000			157.500.000	SPS Nomor 158/SPS/BPKD-PPTR/III/2010 tanggal 19-03-2010
7	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Mampang Prapatan dpn Imigrasi, Kec.Mampang Prapatan, Jaksel	372.000.670	186.000.335			186.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
8	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Matraman Raya-Slamet Riyadi, Kec.Matraman Jak Timur	68.000.670	34.000.335			34.000.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
9	PT. Dinamika Mitra Internusa	Pos Polisi	Jl. Bekasi Barat samping Fly Over, Kec.Jatinegara Jak Timur	27.000.670	13.500.335			13.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
10	PT. Dinamika Mitra Internusa	Titik S-9B	Jl. Panglima Polim_Jl.Sambas, Kec.Keb Baru, Jak Sel	400.000.670	200.000.335			200.000.335	Tahap I Lunas 6 Sept 2011
11	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Warung Jati Barat depan Hotel Jati Padang, Kec.Ps Minggu Jak Sel	226.000.670	113.000.335			113.000.335	Tahap I Lunas 7 Sept 2011

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2015	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2016	Keterangan
12	PT. Puri Anugerah Utama	Pos Polisi	Jl. S.Parman-Jl.Palmerah, Kec.Palmerah Jak Barat	105.000.670	52.500.335			52.500.335	Tahap I Lunas 18 Nov 2011
13	PT. Simpati Advertising	JPO	Samping Pasar raya Blok M, Jl. Sultan Iskandrsyah Melawai, Jakarta Selatan	6.690.450	6.690.450			6.690.450	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
14	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Rivoli/Xerox, Senen, Jakarta Pusat	254.589.000	127.294.500			127.294.500	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
15	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya depan UI, Senen, Jakarta Pusat	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
16	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Kramat Raya depan Gd YAI/CTC, Senen, Jakarta Pusat	289.900.000	289.900.000			289.900.000	Belum dibayar
17	PT. Semarak Tata Pariwara	JPO	Jl. Salemba Raya dpn Carolus, Senen, Jakarta Pusat	22.100.000	22.100.000			22.100.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
18	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. HayamWuruk depan Htl Jayakarta, Taman Sari, Jakarta Barat	285.500.000	142.750.000			142.750.000	Tahap I Lunas 27 Feb 2012
19	PT. Caesar	Titik B1B	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta Barat	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
20	PT. Caesar	Titik B1A	Jl Letjen S.Parman Palmerah, Jakarta Barat	472.600.000	236.300.000			236.300.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
21	PT. Caesar	Titik P7B	Jl, HR Rasuna/Latuharhari, Menteng Jakarta Pusat	945.000.000	472.500.000			472.500.000	Tahap I Lunas 7 Sept 2011
22	PT. Mida Jaya	Titik B10A	Jl. Arjuna/Jl Tol Jakarta-Merak, Kec. Grogol Petamburan Jak-Bar	122.000.000	122.000.000			122.000.000	Belum dibayar Denda Pembatalan Sewa Tirek
23	PT. Puri Anugerah Utama	JPO	Jl. Warung buncit raya dpn Grha Inti Fauji, Kec Ps Minggu, Jak Sel	353.000.670	176.500.335			176.500.335	Tahap I Lunas 25 Januari 2012 dikeluarkan 2x SPS
24	PT. Puri Anugrah Utama	JPO	Jl. Matraman Raya dpn BCA, Kec. Matraman Jak-Sel	280.067.000	0			0	Lunas 20 Mei 2014

No	Nama Perusahaan	Jenis Sarana	Lokasi	Nilai SPS	Piutang per 31 Desember 2015	Penambahan	Pengurangan	Saldo Piutang s/d 31 Desember 2016	Keterangan
25	PT. Dinamika Mitra Internusa	JPO	Jl. Casablanca depan Halte SD/Pemakaman, Kec.Tebet Jak-Sel	200.900.000	0			0	Lunas 25 Agustus 2014
26	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Four Season Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.551.000.000	0			0	SPS No. 5247/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
27	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Kedubes Turki Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.610.000.000	0			0	SPS No. 5246/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
28	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Depkes Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.850.900.000	0			0	SPS No. 5248/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
29	PT. Magna Astro Prontonusa	JPO	Jl. HR. Rasuna Said depan Indorama Kec.Setiabudi Jak-Sel	1.967.000.000	0			0	SPS No. 5243/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
30	PT. Unggul Dian Perkasa	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	3.500.000.000	0			0	SPS No. 5244/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
31	PT. Insite Media	JPO	Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro Jaya Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	5.849.800.000	0			0	SPS No. 5249/-078.615 Tanggal 1 Desember 2014
32	PT. Prisma Harapan	JPO	Jl. HR. Rasuna Said dpn Pasar Festival, Kec.Setiabudi Jak-Sel	2.101.000.000	0			0	Lunas 30 Desember 2014
				5.684.292.140	**2.871.178.295**	**0**	**0**	**2.871.178.295**	

Lampiran 6

DAFTAR STOCK OPNAME PERSEDIAAN DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2016

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	90.241.778.940,00
2	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB	34.574.569.814,00
3	DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI	31.894.704.644,00
4	DINAS PELAYANAN PAJAK	24.670.842.965,00
5	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	24.436.304.921,00
6	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakut	21.502.079.657,00
7	BLUD RS Pasar Rebo	20.817.226.479,00
8	BLUD RS Cengkareng	20.544.099.480,00
9	BLUD RS Koja	19.538.519.118,00
10	DINAS TATA AIR	17.451.522.399,00
11	RSUD Pasar Minggu	16.663.632.875,00
12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	16.098.759.637,00
13	BLUD RS Tarakan	15.271.988.944,00
14	Unit Pengelola Anjungan dan Informasi	13.547.182.770,00
15	Sudin Perindustrian dan Energi - Jaksel	12.700.469.401,00
16	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	12.490.360.077,00
17	Sudin Perindustrian dan Energi - Jaktim	10.929.026.779,00
18	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakbar	10.899.451.797,00
19	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.651.115.112,00
20	Sudin Perindustrian dan Energi - Jakpus	10.263.719.445,00
21	DINAS KEBERSIHAN	9.846.639.423,00
22	BLUD RS Budhi Asih	9.008.578.316,00
23	BLUD Puskesmas Kec. Senen - Jakpus	8.659.536.232,00
24	Sudin Kebersihan - Jakut	8.645.392.503,00
25	Sudin Kebersihan - Jaktim	7.833.681.435,00
26	Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air	7.773.611.080,00
27	BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah	6.025.609.086,00
28	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	5.468.552.387,00
29	BLUD RS Duren Sawit	5.421.751.089,00
30	Sudin Kebersihan - Jakbar	5.295.370.526,00
31	Sudin Kesehatan - Jakbar	5.001.162.210,00
32	Unit Pengelola Sampah Terpadu	4.978.615.929,00
33	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus	4.905.716.042,00
34	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKSEL	4.884.048.982,00
35	Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai	4.663.059.595,00
36	BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.631.198.075,00
37	BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - Jaktim	4.440.921.415,00
38	BLUD Puskesmas Kec. Koja - Jakut	4.424.528.790,00
39	BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - Jakut	4.355.283.780,00
40	UPT Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman	4.178.842.540,00
41	DINAS KESEHATAN	3.817.418.122,00
42	Rumah Sakit Umum Kec. Sawah Besar	3.760.608.654,00
43	BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - Jakut	3.681.196.825,00
44	BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - Jakut	3.647.231.832,00
45	BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - Jakbar	3.592.447.248,00
46	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	3.563.036.707,00
47	KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAGUNAN	3.549.915.034,00
48	BLUD Puskesmas Kec. Tambora - Jakbar	3.520.503.949,00
49	BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - Jaktim	3.485.619.500,00
50	BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - Jakpus	3.451.779.785,00
51	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - Jaksel	3.411.624.989,00
52	BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - Jakut	3.375.798.802,00
53	Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan, Teknologi Peternakan dan Pengujian Mutu Hasil Peternakan	3.359.971.215,00
54	BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - Jakbar	3.327.224.928,00
55	Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran	3.316.386.145,00
56	Sudin Kesehatan - Jaktim	3.274.973.252,00
57	BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - Jakpus	3.213.113.105,00
58	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	3.174.745.898,00
59	BLUD Puskesmas Kec. Gambir - Jakpus	3.164.982.476,00
60	BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - Jaktim	3.126.312.901,00
61	BLUD Puskesmas Kec. Makasar - Jaktim	3.092.190.324,00
62	Sudin Tata Air - JAKBAR	2.995.527.533,00
63	BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - Jaktim	2.988.560.271,00
64	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim	2.849.419.972,00
65	Rumah Sakit Umum Kec. Mampang Prapatan	2.827.575.559,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
66	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jaksel	2.796.074.981,00
67	Sudin Kesehatan - Jaksel	2.727.369.370,00
68	BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - Jakbar	2.724.890.836,00
69	Rumah Sakit Umum Kec. Pademangan	2.724.330.962,00
70	Rumah Sakit Umum Kec. Pesanggrahan	2.720.158.597,00
71	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar	2.589.217.296,00
72	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.532.340.924,00
73	BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - Jaksel	2.526.765.633,00
74	Rumah Sakit Umum Kec. Ciracas	2.498.976.315,00
75	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Ujung Menteng	2.475.765.875,00
76	Rumah Sakit Umum Kec. Koja	2.468.390.862,00
77	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	2.440.242.519,00
78	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus	2.435.266.745,00
79	BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - Jaktim	2.429.627.334,00
80	Rumah Sakit Umum Kec. Kramat Jati	2.409.043.185,00
81	BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar	2.404.747.792,00
82	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar	2.363.433.733,00
83	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.324.040.815,00
84	DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA	2.245.102.744,00
85	DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI	2.243.431.873,00
86	Rumah Sakit Umum Kec. Tebet	2.159.104.309,00
87	Sudin Kesehatan - Jakpus	2.147.840.730,00
88	Sudin Tata Air - JAKTIM	2.109.012.525,00
89	Rumah Sakit Umum Kec. Johar Baru	2.020.190.952,00
90	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel	1.959.195.040,00
91	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - Jaksel	1.939.312.883,00
92	BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - Jaksel	1.906.595.115,00
93	Rumah Sakit Umum Kec. Jagakarsa	1.906.292.274,00
94	BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - Jaksel	1.904.356.717,00
95	Unit Pengelola Perparkiran	1.887.272.850,00
96	Sudin Kesehatan - Jakut	1.882.906.945,00
97	BLUD Puskesmas Kec. Tebet - Jaksel	1.872.508.048,00
98	Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres	1.851.981.190,00
99	BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - Jakpus	1.802.134.601,00
100	BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - Jaksel	1.764.189.650,00
101	Rumah Sakit Umum Kec. Cilincing	1.732.478.178,00
102	Rumah Sakit Umum Kec. Cempaka Putih	1.709.124.851,00
103	BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim	1.670.186.658,00
104	BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - Jaktim	1.660.746.650,00
105	Kota Administrasi Jakarta Timur	1.646.876.471,00
106	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung	1.630.056.075,00
107	Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian	1.600.094.210,00
108	Sudin Perindustrian dan Energi - Kep. Seribu	1.597.021.361,00
109	Sudin Kebersihan - Jaksel	1.590.253.935,00
110	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	1.576.073.125,00
111	Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan	1.568.254.904,00
112	BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD)	1.566.599.328,00
113	BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - Jakpus	1.540.333.098,00
114	Pusat Penyimpanan Barang Daerah	1.519.697.779,00
115	BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.518.435.904,00
116	BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - Jakbar	1.511.765.171,00
117	Kantor Keluarga Berencana - Jaktim	1.500.780.105,00
118	BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - Jakut	1.432.380.291,00
119	Kota Administrasi Jakarta Barat	1.427.754.471,00
120	Rumah Sakit Umum Kec. Matraman	1.377.845.969,00
121	DINAS SOSIAL	1.333.704.673,00
122	Sudin Kebersihan - Jakpus	1.211.773.803,00
123	KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS	1.202.399.442,00
124	BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - Jaksel	1.173.571.552,00
125	Rumah Sakit Umum Kec. Taman Sari	1.099.529.064,00
126	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu	1.097.345.068,00
127	Sudin Tata Air - Kep. Seribu	1.095.916.397,00
128	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke	1.079.303.588,00
129	DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1.039.295.777,00
130	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakpus	1.025.052.215,00
131	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	1.023.230.612,00
132	Kota Administrasi Jakarta Utara	1.011.991.813,00
133	Rumah Sakit Umum Kec. Tanjung Priok	1.011.917.408,00
134	Biro Umum	1.004.485.008,00
135	Kantor Keluarga Berencana - Jakbar	996.228.898,00
136	Biro Administrasi Keuangan dan Aset	978.845.346,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
137	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKPUS	959.468.790,00
138	DINAS PENATAAN KOTA	958.732.159,00
139	BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	956.437.142,00
140	Sekretariat DPRD	905.816.150,00
141	Kantor Keluarga Berencana - Jakpus	853.419.259,00
142	Sudin Perhubungan - JAKSEL	811.777.600,00
143	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, SERTA PERDAGANGAN	797.500.447,00
144	Rumah Sakit Umum Kec. Tanah Abang	757.974.866,00
145	Planetarium dan Observatorium	719.624.239,00
146	BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - Jaksel	715.850.602,00
147	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jaktim	690.460.851,00
148	Kota Administrasi Jakarta Selatan	677.087.971,00
149	PSBL Harapan Sentosa 2	652.422.291,00
150	INSPEKTORAT	637.603.586,00
151	Kota Administrasi Jakarta Pusat	616.597.166,00
152	Unit Pengelola Metrologi	607.278.600,00
153	Sudin Bina Marga - JAKSEL	606.452.354,00
154	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKTIM	582.151.942,00
155	Kantor Keluarga Berencana - Jakut	535.466.446,00
156	UP Konservasi dan Cagar Budaya	531.265.580,00
157	Kantor Keluarga Berencana - Jaksel	529.411.098,00
158	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakbar	519.134.960,00
159	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakut	495.048.348,00
160	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	480.283.326,00
161	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	444.706.713,00
162	PSTW Budi Mulia 4	432.041.641,00
163	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakbar	429.192.160,00
164	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakbar	427.632.068,00
165	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaktim	426.860.500,00
166	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu	422.536.200,00
167	Unit Pengelola Museum Seni	419.975.738,00
168	DINAS PENDIDIKAN	413.993.880,00
169	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKBAR	391.163.615,00
170	Sudin Tata Air - JAKSEL	374.404.935,00
171	Sudin Pertamanan dan Pemakaman - JAKUT	373.995.958,00
172	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jaktim	370.276.293,00
173	PSTW Budi Mulia 1	366.643.637,00
174	DINAS BINA MARGA	360.873.010,00
175	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	352.708.984,00
176	PSTW Budi Mulia 2	347.237.731,00
177	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat	346.726.441,00
178	PSAA Putra Utama 2	345.790.650,00
179	UPT Pusat Pengujian Kendaraan Bermotor Cilincing	317.471.566,00
180	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	316.919.818,00
181	Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan	314.140.492,00
182	RSUD Kepulauan Seribu	313.013.893,00
183	Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup	310.272.296,00
184	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	308.839.360,00
185	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	308.640.285,00
186	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	304.564.449,00
187	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN	294.273.971,00
188	BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENANAMAN MODAL	285.152.541,00
189	SATPOL PP	272.311.435,00
190	Sudin Penataan Kota - JAKSEL	270.874.237,00
191	PSTW Budi Mulia 3	270.789.166,00
192	Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan	268.274.831,00
193	Kelurahan Pondok Kelapa - Jaktim	262.511.497,00
194	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jaksel	261.976.093,00
195	Kecamatan Koja - Jakut	251.894.378,00
196	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakpus	250.089.180,00
197	Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta	234.852.113,00
198	Pusat Pelatihan Seni Budaya	221.737.444,00
199	Inspektorat Pembantu - JAKSEL	221.412.621,00
200	Kantor Lingkungan Hidup - Jaktim	219.008.850,00
201	PSBR Taruna Jaya	213.789.994,00
202	Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya	210.604.636,00
203	PSAA Putra Utama 3	209.845.165,00
204	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakut	204.357.631,00
205	PSBD Budi Bhakti	203.421.191,00
206	PSP Bhakti kasih	199.520.498,00
207	Kelurahan Johar Baru - Jakpus	198.546.621,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
208	Sudin Penataan Kota - JAKTIM	197.326.528,00
209	Kelurahan Cengkareng Barat - Jakbar	190.285.450,00
210	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKSEL	189.101.385,00
211	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	188.061.190,00
212	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakut	187.894.200,00
213	Kelurahan Duri Pulo - Jakpus	183.192.189,00
214	PSAA Balita Tunas Bangsa	182.038.445,00
215	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKTIM	180.816.877,00
216	BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta	177.468.870,00
217	Kelurahan Pondok Bambu - Jaktim	177.392.137,00
218	Sudin Perhubungan - JAKBAR	176.656.296,00
219	Unit Pengelola Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar Elektronik (ERP)	175.245.209,00
220	Kelurahan Kampung Rawa - Jakpus	173.990.612,00
221	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Jakpus	173.065.528,00
222	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKUT dan Kep.Seribu	172.181.811,00
223	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakbar	167.529.114,00
224	Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kep.Seribu	166.937.785,00
225	Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	162.378.091,00
226	Biro Tata Pemerintahan	162.077.547,00
227	PSAA Putra Utama 1	161.618.149,00
228	Pulogadung	160.508.735,00
229	Sudin Perhubungan - JAKUT	160.143.392,00
230	Unit Pengelola Graha Wisata	160.099.698,00
231	Kelurahan Pekayon - Jaktim	158.837.800,00
232	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu	158.744.090,00
233	Kecamatan Pasar Minggu - Jaksel	156.983.808,00
234	Kelurahan Roa Malaka - Jakbar	155.718.926,00
235	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jaktim	154.449.819,00
236	Kelurahan Kebon Manggis - Jaktim	154.026.600,00
237	Kelurahan Sukabumi Selatan - Jakbar	153.528.400,00
238	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara	149.140.616,00
239	Inspektorat Pembantu - JAKBAR	147.599.001,00
240	Kelurahan Duri Kosambi - Jakbar	147.398.493,00
241	Kelurahan Kebon Pala - Jaktim	145.547.461,00
242	Sudin Pelayanan Pajak - Jakut	144.718.197,00
243	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jakut	143.827.918,00
244	Kelurahan Klender - Jaktim	143.184.900,00
245	Kelurahan Meruya Selatan - Jakbar	142.664.050,00
246	PSBN Cahaya Bathin	142.196.354,00
247	Kecamatan Pasar Rebo - Jaktim	142.107.923,00
248	PSBKW Harapan Mulya	141.048.030,00
249	Kelurahan Duri Kepa - Jakbar	140.651.600,00
250	Unit Pengelola Museum Prasasti	134.662.798,00
251	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jaksel	133.493.687,00
252	Gelanggang Olahraga Sunter	132.397.398,00
253	Kelurahan Gandaria Utara - Jaksel	130.004.089,00
254	Kelurahan Keagungan - Jakbar	129.286.665,00
255	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	128.455.503,00
256	Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah - Kep. Seribu	127.674.074,00
257	Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Betawi	127.482.410,00
258	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jaktim	126.598.539,00
259	Inspektorat Pembantu - JAKPUS	126.588.080,00
260	Kelurahan Bambu Apus - Jaktim	125.735.812,00
261	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	124.060.530,00
262	PSBI Bangun Daya 1	123.647.260,00
263	Sudin Bina Marga - JAKTIM	120.115.600,00
264	Kecamatan Pancoran - Jaksel	118.955.036,00
265	Sudin Tata Air - JAKPUS	117.941.547,00
266	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	117.772.997,00
267	Sudin Tata Air - JAKUT	116.740.408,00
268	Kelurahan Tugu Utara - Jakut	115.337.039,00
269	Kelurahan Gandaria Selatan - Jaksel	113.805.626,00
270	Kantor Lingkungan Hidup - Jakpus	112.836.560,00
271	Kelurahan Kalisari - Jaktim	112.730.032,00
272	Kelurahan Dukuh - Jaktim	112.135.925,00
273	Kelurahan Kramat Jati - Jaktim	111.619.211,00
274	Kelurahan Pulo - Jaksel	110.512.100,00
275	Kelurahan Duren Sawit - Jaktim	110.260.573,00
276	Kecamatan Kelapa Gading - Jakut	109.075.628,00
277	Sudin Perhubungan - JAKTIM	107.305.103,00
278	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKBAR	107.262.935,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
279	Kecamatan Pademangan - Jakut	106.812.465,00
280	Kelurahan Susukan - Jaktim	106.107.946,00
281	Kecamatan Kebayoran Baru - Jaksel	106.106.590,00
282	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jakbar	104.717.572,00
283	Sudin Sosial - Jakpus	104.260.971,00
284	Kecamatan Duren Sawit - Jaktim	103.872.966,00
285	Kelurahan Cipete Utara - Jaksel	103.571.765,00
286	Kelurahan Kebagusan - Jaksel	100.328.041,00
287	Kecamatan Cengkareng - Jakbar	96.889.210,00
288	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jaktim	95.907.007,00
289	Kelurahan Cilandak Barat - Jaksel	95.788.744,00
290	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	95.566.250,00
291	Kelurahan Cililitan - Jaktim	94.907.450,00
292	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jakbar	94.837.057,00
293	Kelurahan Kramat Pela - Jaksel	93.617.266,00
294	Kelurahan Bangka - Jaksel	93.560.384,00
295	Kecamatan Ciracas - Jaktim	93.133.480,00
296	Kelurahan Rawa Bunga - Jaktim	93.111.590,00
297	Kecamatan Kramat Jati - Jaktim	92.909.113,00
298	Inspektorat Pembantu - JAKTIM	92.539.916,00
299	Kelurahan Petamburan - Jakpus	92.134.900,00
300	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Utara	91.635.272,00
301	Kelurahan Tegal Alur - Jakbar	88.960.458,00
302	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Selatan	88.670.251,00
303	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jaktim	86.037.385,00
304	Kecamatan Pulogadung - Jaktim	84.673.915,00
305	Kelurahan Taman Sari - Jakbar	84.337.825,00
306	Kelurahan Kedoya Utara - Jakbar	84.258.220,00
307	Kelurahan Kedoya Selatan - Jakbar	84.258.220,00
308	Sudin Bina Marga - JAKPUS	84.127.486,00
309	Biro Hukum	83.028.045,00
310	Kelurahan Kembangan Selatan - Jakbar	81.862.429,00
311	Kelurahan Malaka Sari - Jaktim	81.296.387,00
312	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jakut	79.888.702,00
313	Sudin Pelayanan Pajak - Jaktim	79.872.121,00
314	Kantor Lingkungan Hidup - Jaksel	79.226.300,00
315	Kecamatan Cilincing - Jakut	78.875.578,00
316	PSAA Putra Utama 4	78.715.521,00
317	Sudin Pelayanan Pajak - Jaksel	78.420.752,00
318	PSBL Harapan Sentosa 3	77.816.382,00
319	Kecamatan Jagakarsa - Jaksel	77.127.530,00
320	Kelurahan Lagoa - Jakut	77.067.380,00
321	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jaksel	76.837.340,00
322	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Jakut	76.739.997,00
323	Kelurahan Cakung Timur - Jaktim	75.898.256,00
324	Kelurahan Pondok Labu - Jaksel	75.684.125,00
325	Sudin Pelayanan Pajak - Jakbar	75.089.657,00
326	Kelurahan Rambutan - Jaktim	74.975.230,00
327	Unit Industri Kerajinan dan Tekstil	74.424.504,00
328	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jakbar	74.389.984,00
329	Kelurahan Gunung - Jaksel	74.327.120,00
330	Kelurahan Pademangan Timur - Jakut	74.253.157,00
331	Pusat Pelatihan Profesi Kepariwisataan	74.246.026,00
332	Kelurahan Menteng Atas - Jaksel	73.200.752,00
333	Sudin Pelayanan Pajak - Jakpus	70.611.796,00
334	Kelurahan Guntur - Jaksel	70.581.390,00
335	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat	70.531.077,00
336	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakpus	70.308.597,00
337	Kelurahan Ceger - Jaktim	70.009.000,00
338	Kelurahan Pondok Kopi - Jaktim	69.347.575,00
339	Kelurahan Kuningan Barat - Jaksel	69.176.800,00
340	Kelurahan Lebak Bulus - Jaksel	68.640.234,00
341	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Kep. Seribu	68.044.147,00
342	Kelurahan Tebet Timur - Jaksel	67.842.021,00
343	Kelurahan Palmeriam - Jaktim	67.599.180,00
344	UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender	67.437.723,00
345	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	66.939.985,00
346	Kecamatan Kebon Jeruk - Jakbar	66.537.285,00
347	Sudin Penataan Kota - JAKPUS	66.261.607,00
348	Kelurahan Gedong - Jaktim	63.704.044,00
349	Pusat Pengembangan Manajemen Sekolah	63.492.220,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
350	Kelurahan Tengah - Jaktim	62.975.190,00
351	Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Timur	62.727.687,00
352	Unit Industri Bahan dan Barang Teknik	62.579.085,00
353	Kelurahan Kebon Kelapa - Jakpus	62.377.480,00
354	Kecamatan Johar Baru - Jakpus	61.791.784,00
355	Kelurahan Menteng Dalam - Jaksel	61.400.708,00
356	Kelurahan Wijaya Kesuma - Jakbar	60.747.225,00
357	Kelurahan Pasar Manggis - Jaksel	59.451.700,00
358	Kelurahan Kali Baru - Jakut	59.093.335,00
359	Inspektorat Pembantu - JAKUT	58.969.595,00
360	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Barat	58.939.513,00
361	Kelurahan Cilandak Timur - Jaksel	58.545.436,00
362	Kelurahan Ujung Menteng - Jaktim	58.349.167,00
363	PSBI Bangun Daya 2	57.871.763,00
364	Kelurahan Pulo Gebang - Jaktim	57.355.045,00
365	Kelurahan Pengadegan - Jaksel	57.184.903,00
366	Kelurahan Palmerah - Jakbar	56.318.560,00
367	Kelurahan Rawamangun - Jaktim	55.974.866,00
368	Kantor Kepegawaian - Jakbar	55.273.470,00
369	Kelurahan Cakung Barat - Jaktim	55.221.480,00
370	Kelurahan Srengseng Sawah - Jaksel	55.205.490,00
371	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan	54.463.530,00
372	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakbar	54.387.850,00
373	Kelurahan Jelambar Baru - Jakbar	54.082.875,00
374	Kecamatan Mampang Prapatan - Jaksel	53.937.358,00
375	Kelurahan Pancoran - Jaksel	53.534.195,00
376	Satpol PP - Jakut	52.411.854,00
377	Kelurahan Bukit Duri - Jaksel	52.090.610,00
378	Kelurahan Utan Panjang - Jakpus	51.979.235,00
379	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jaksel	51.102.454,00
380	Kelurahan Jati Pulo - Jakbar	51.003.121,00
381	Kecamatan Matraman - Jaktim	50.699.858,00
382	Kelurahan Tegal Parang - Jaksel	50.165.100,00
383	Kelurahan Pluit - Jakut	50.155.923,00
384	Kelurahan Ragunan - Jaksel	49.878.082,00
385	Kelurahan Sunter Jaya - Jakut	49.776.506,00
386	Kelurahan Pinang Ranti - Jaktim	49.640.322,00
387	Kelurahan Harapan Mulia - Jakpus	49.618.806,00
388	Kelurahan Utan Kayu Utara - Jaktim	49.224.800,00
389	Unit Pengelola Dokumen Administrasi Kependudukan	49.130.686,00
390	Kecamatan Jatinegara - Jaktim	48.884.011,00
391	Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jaksel	48.687.980,00
392	Kelurahan Kwitang - Jakpus	48.402.862,00
393	Kelurahan Petukangan Selatan - Jaksel	47.600.391,00
394	Pusat Perencanaan, Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional	47.583.635,00
395	Kelurahan Petogogan - Jaksel	47.128.076,00
396	Kelurahan Jatinegara - Jaktim	46.868.385,00
397	Kelurahan Makasar - Jaktim	46.692.811,00
398	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakut	46.626.066,00
399	Kelurahan Senayan - Jaksel	46.344.740,00
400	Kelurahan Cipulir - Jaksel	46.246.530,00
401	Kelurahan Rawa Terate - Jaktim	46.194.655,00
402	Kecamatan Senen - Jakpus	45.525.645,00
403	Kelurahan Cempaka Putih Timur - Jakpus	45.518.000,00
404	Kelurahan Jagakarsa - Jaksel	45.456.125,00
405	Kelurahan Kota Bambu Selatan - Jakbar	45.346.925,00
406	Kelurahan Penjaringan - Jakut	45.271.000,00
407	Kelurahan Cipinang Besar Selatan - Jaktim	45.171.700,00
408	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jaktim	44.931.260,00
409	Kecamatan Cempaka Putih - Jakpus	44.839.472,00
410	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep. Seribu	44.761.799,00
411	Kelurahan Kebon Bawang - Jakut	43.941.692,00
412	Kelurahan Tangki - Jakbar	43.902.210,00
413	Kelurahan Gelora - Jakpus	43.760.211,00
414	Kelurahan Cawang - Jaktim	43.631.863,00
415	Kecamatan Tambora - Jakbar	43.620.225,00
416	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	42.950.520,00
417	Biro Kesejahteraan Sosial	42.801.586,00
418	Kelurahan Kampung Bali - Jakpus	42.691.700,00
419	Sudin Perhubungan - JAKPUS	42.657.675,00
420	Kelurahan Pondok Pinang - Jaksel	42.419.380,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
421	Kelurahan Cikoko - Jaksel	42.383.055,00
422	Pelaksana Penanggulangan Bencana - JAKSEL	42.306.205,00
423	Biro Perekonomian	42.212.473,00
424	Kelurahan Cipinang - Jaktim	42.093.318,00
425	Kelurahan Pela Mampang - Jaksel	41.961.820,00
426	Kelurahan Ulujami - Jaksel	41.417.805,00
427	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta	41.159.870,00
428	Kelurahan Glodok - Jakbar	40.700.550,00
429	Kelurahan Pegangsaan - Jakpus	40.536.030,00
430	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jakpus	40.123.030,00
431	Kelurahan Bali Mester - Jaktim	40.043.080,00
432	Kelurahan Paseban - Jakpus	39.621.980,00
433	Kelurahan Kayu Putih - Jaktim	39.533.950,00
434	Kelurahan Rawa Badak Utara - Jakut	38.983.920,00
435	Kelurahan Rawa Barat - Jaksel	38.931.112,00
436	Kelurahan Cipinang Cempedak - Jaktim	38.862.762,00
437	Kecamatan Cilandak - Jaksel	38.506.342,00
438	Kelurahan Kelapa Gading Timur - Jakut	38.363.907,00
439	Kelurahan Rawajati - Jaksel	38.307.610,00
440	Kelurahan Galur - Jakpus	38.182.705,00
441	Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu	38.170.117,00
442	Kelurahan Bendungan Hilir - Jakpus	38.059.396,00
443	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah II	37.852.550,00
444	Kelurahan Sukapura - Jakut	37.826.360,00
445	Kelurahan Melawai - Jaksel	37.490.035,00
446	Kelurahan Grogol Utara - Jaksel	37.329.490,00
447	Kelurahan Kebon Baru - Jaksel	37.316.158,00
448	Kelurahan Semper Barat - Jakut	37.171.225,00
449	Kelurahan Kebon Jeruk - Jakbar	36.990.274,00
450	Kelurahan Gunung Sahari Selatan - Jakpus	36.966.570,00
451	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jaksel	36.670.335,00
452	Kelurahan Pejaten Timur - Jaksel	36.617.900,00
453	Kecamatan Gambir - Jakpus	36.597.176,00
454	Kelurahan Pasar Minggu - Jaksel	36.570.710,00
455	Kecamatan Cakung - Jaktim	36.272.200,00
456	Kelurahan Mampang Prapatan - Jaksel	35.791.264,00
457	Kelurahan Jatinegara Kaum - Jaktim	35.214.354,00
458	Kelurahan Selong - Jaksel	34.948.923,00
459	Kelurahan Batu Ampar - Jaktim	34.939.724,00
460	Kelurahan Kebon Sirih - Jakpus	34.870.201,00
461	Kelurahan Karet Semanggi - Jaksel	34.207.060,00
462	Kelurahan Joglo - Jakbar	33.878.510,00
463	Kelurahan Gambir - Jakpus	33.778.140,00
464	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut	33.518.881,00
465	Kelurahan Maphar - Jakbar	33.470.125,00
466	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jakpus	33.279.342,00
467	Kecamatan Kemayoran - Jakpus	33.150.337,00
468	Kelurahan Pulo Gadung - Jaktim	33.071.352,00
469	Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Jagakarsa	33.038.880,00
470	Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur	32.971.611,00
471	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKUT	32.795.620,00
472	Kecamatan Tanjung Priok - Jakut	32.533.628,00
473	Kelurahan Kebon Kacang - Jakpus	32.524.580,00
474	Kelurahan Cideng - Jakpus	32.099.375,00
475	Kelurahan Karet Kuningan - Jaksel	32.081.037,00
476	Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri	32.041.702,00
477	Kelurahan Pinangsia - Jakbar	31.915.700,00
478	Kelurahan Utan Kayu Selatan - Jaktim	31.653.560,00
479	Kecamatan Cipayung - Jaktim	31.112.722,00
480	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel	31.024.070,00
481	Kelurahan Gunung Sahari Utara - Jakpus	30.915.566,00
482	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut	30.649.850,00
483	Kelurahan Kuningan Timur - Jaksel	30.453.830,00
484	Unit Pengelola Angkutan Sekolah	30.291.305,00
485	Kelurahan Kemanggisan - Jakbar	30.177.100,00
486	Kelurahan Kebayoran Lama Utara - Jaksel	29.630.700,00
487	Kelurahan Karang Anyar - Jakpus	29.608.650,00
488	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakpus	29.160.010,00
489	Kelurahan Kenari - Jakpus	28.987.301,00
490	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakut	28.811.000,00
491	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakut	28.669.720,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
492	Sudin Bina Marga - JAKBAR	28.601.100,00
493	Kelurahan Senen - Jakpus	28.466.167,00
494	Kelurahan Jelambar - Jakbar	28.201.135,00
495	Satpol PP - Jakbar	27.897.093,00
496	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jakpus	27.230.093,00
497	Kelurahan Manggarai - Jaksel	27.128.400,00
498	Kelurahan Tambora - Jakbar	27.083.223,00
499	Kelurahan Tanjung Duren Selatan - Jakbar	27.072.724,00
500	Kelurahan Pejaten Barat - Jaksel	26.735.705,00
501	Kecamatan Grogol Petamburan - Jakbar	26.657.500,00
502	Kelurahan Pisangan Timur - Jaktim	26.616.557,00
503	Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakbar	26.578.530,00
504	Kelurahan Munjul - Jaktim	26.570.282,00
505	Kelurahan Pejagalan - Jakut	26.285.050,00
506	Kantor Pengelolaan Aset Daerah - Jaktim	26.042.034,00
507	Kelurahan Sunter Agung - Jakut	25.978.121,00
508	Kelurahan Cengkareng Timur - Jakbar	25.959.500,00
509	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jakpus	25.684.200,00
510	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKBAR	25.208.850,00
511	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut	25.197.799,00
512	Kelurahan Semper Timur - Jakut	25.053.600,00
513	Kelurahan Pesanggrahan - Jaksel	24.903.250,00
514	Gelanggang Olahraga Ragunan	24.739.300,00
515	Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan - Kep. Seribu	24.597.386,00
516	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jaksel	24.571.108,00
517	Kelurahan Cipinang Melayu - Jaktim	24.459.098,00
518	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jakut	23.962.000,00
519	Kelurahan Halim Perdana Kusuma - Jaktim	23.894.541,00
520	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaktim	23.859.150,00
521	Laboratorium Kebakaran dan Penyelamatan	23.844.559,00
522	Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah - Jaktim	23.684.592,00
523	Kelurahan Cempaka Putih Barat - Jakpus	23.651.100,00
524	Kecamatan Tebet - Jaksel	23.527.240,00
525	Sudin Pendidikan I - JAKUT	23.390.300,00
526	Sudin Pendidikan II - JAKBAR	23.359.174,00
527	Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan Mohammad Husni Thamrin	23.152.855,00
528	Kelurahan Tanah Tinggi - Jakpus	22.043.647,00
529	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakpus	21.673.270,00
530	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel	21.605.045,00
531	Kecamatan Makasar - Jaktim	21.322.198,00
532	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat	21.308.890,00
533	Kelurahan Cijantung - Jaktim	21.022.265,00
534	PSPP Khusnul Khotimah	20.967.306,00
535	Sudin Sosial - Jakbar	20.911.110,00
536	Kelurahan Lubang Buaya - Jaktim	20.469.735,00
537	Kelurahan Kampung Melayu - Jaktim	20.362.407,00
538	Kecamatan Kembangan - Jakbar	20.107.588,00
539	Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Adm - Kep. Seribu	19.999.521,00
540	Kelurahan Jatipadang - Jaksel	19.725.035,00
541	Kelurahan Ancol - Jakut	19.438.427,00
542	Kelurahan Kelapa Dua - Jakbar	19.421.600,00
543	Sudin Pendidikan II - JAKSEL	19.335.000,00
544	Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu	19.324.505,00
545	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKTIM	19.310.225,00
546	Kelurahan Pondok Ranggon - Jaktim	19.241.507,00
547	Kelurahan Rorotan - Jakut	19.133.050,00
548	Kelurahan Cipayung - Jaktim	19.132.711,00
549	Pelaksana Penanggulangan Bencana - JAKPUS	18.812.105,00
550	Pelaksana Penanggulangan Bencana - JAKUT	18.812.105,00
551	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.790.750,00
552	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakpus	18.759.573,00
553	Kelurahan Marunda - Jakut	18.641.700,00
554	Kelurahan Kali Anyar - Jakbar	18.457.100,00
555	Kelurahan Baru - Jaktim	18.228.375,00
556	Kelurahan Warakas - Jakut	18.192.050,00
557	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKPUS	18.143.700,00
558	Kelurahan Kembangan Utara - Jakbar	18.036.722,00
559	Kelurahan Srengseng - Jakbar	17.839.250,00
560	Kelurahan Cilincing - Jakut	17.518.658,00
561	Kecamatan Palmerah - Jakbar	17.360.075,00
562	Kelurahan Rawa Badak Selatan - Jakut	17.020.300,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
563	Kantor Lingkungan Hidup - Kab Adm Kep. Seribu	16.952.881,00
564	Kecamatan Taman Sari - Jakbar	16.724.345,00
565	Kelurahan Pisangan Baru - Jaktim	16.552.552,00
566	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKPUS	16.371.000,00
567	Kelurahan Bale Kambang - Jaktim	16.097.895,00
568	Kelurahan Sukabumi Utara - Jakbar	15.992.928,00
569	Sudin Pendidikan II - JAKTIM	15.965.545,00
570	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakbar	15.791.281,00
571	Kantor Kepegawaian - Jaksel	15.661.910,00
572	Kelurahan Koja - Jakut	15.612.025,00
573	Kecamatan Kalideres - Jakbar	15.497.441,00
574	Kelurahan Pegadungan - Jakbar	15.358.575,00
575	Kelurahan Slipi - Jakbar	15.144.851,00
576	Gelanggang Olahraga Rawamangun	15.123.335,00
577	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan	15.075.030,00
578	Kelurahan Papanggo - Jakut	15.058.145,00
579	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi	15.030.500,00
580	Kecamatan Pesanggrahan - Jaksel	15.015.220,00
581	Kelurahan Ciganjur - Jaksel	14.598.570,00
582	Kelurahan Setia Budi - Jaksel	14.416.490,00
583	Kantor Kepegawaian - Jaktim	14.279.760,00
584	Sudin Perhubungan - Kep. Seribu	14.191.493,00
585	Kecamatan Kebayoran Lama - Jaksel	14.177.474,00
586	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel	14.122.796,00
587	Kelurahan Malaka Jaya - Jaktim	13.732.950,00
588	PSBG Belaian Kasih	13.729.260,00
589	Kelurahan Kapuk Muara - Jakut	13.463.000,00
590	Kecamatan Setiabudi - Jaksel	13.171.500,00
591	Kelurahan Gondangdia - Jakpus	13.073.020,00
592	Kelurahan Meruya Utara - Jakbar	13.023.720,00
593	Kelurahan Cipinang Besar Utara - Jaktim	13.021.360,00
594	Kelurahan Duren Tiga - Jaksel	12.955.972,00
595	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jakbar	12.951.922,00
596	Gelanggang Olahraga Cendrawasih	12.921.700,00
597	Kecamatan Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu	12.864.500,00
598	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKBAR	12.853.280,00
599	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Jakbar	12.816.760,00
600	Kelurahan Manggarai Selatan - Jaksel	12.562.220,00
601	Kelurahan Grogol - Jakbar	12.258.950,00
602	Kelurahan Mangga Dua Selatan - Jakpus	12.196.262,00
603	Sudin Sosial - Jakut	12.121.000,00
604	Kelurahan Bintaro - Jaksel	12.114.440,00
605	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jaksel	12.062.600,00
606	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jaktim	12.014.205,00
607	Kelurahan Tanjung Duren Utara - Jakbar	11.955.900,00
608	Kelurahan Tebet Barat - Jaksel	11.745.114,00
609	Kelurahan Duri Utara - Jakbar	11.632.390,00
610	Kelurahan Karet - Jaksel	11.576.070,00
611	Kelurahan Kalideres - Jakbar	11.548.538,00
612	Sudin Penataan Kota - Kep. Seribu	11.489.500,00
613	Kelurahan Krukut - Jakbar	11.355.300,00
614	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jakpus	10.879.069,00
615	Kelurahan Setu - Jaktim	10.569.714,00
616	Kelurahan Kapuk - Jakbar	10.532.616,00
617	Kelurahan Rawa Buaya - Jakbar	10.414.746,00
618	Pelaksana Penanggulangan Bencana - JAKTIM	10.211.010,00
619	Kelurahan Grogol Selatan - Jaksel	10.189.768,00
620	Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur	10.032.189,00
621	Sudin Penataan Kota - JAKBAR	9.860.083,00
622	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jakut	9.768.500,00
623	Kelurahan Tomang - Jakbar	9.765.500,00
624	Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu	9.469.900,00
625	Kelurahan Bidara Cina - Jaktim	9.467.586,00
626	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Kep. Seribu	9.388.052,00
627	Sudin Pendidikan I - JAKBAR	9.337.806,00
628	Pusat Data dan Informasi	9.318.962,00
629	Kelurahan Kelapa Gading Barat - Jakut	9.072.728,00
630	Kelurahan Pademangan Barat - Jakut	8.886.760,00
631	Kantor Kepegawaian - Jakut	8.718.930,00
632	Kecamatan Tanah Abang - Jakpus	8.711.720,00
633	Kelurahan Tanjung Barat - Jaksel	8.619.362,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
634	Kelurahan Kelapa Dua Wetan - Jaktim	8.555.745,00
635	Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu	8.387.147,00
636	PSBK Harapan Jaya	8.156.439,00
637	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut	8.081.843,00
638	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jakpus	8.032.750,00
639	Kelurahan Angke - Jakbar	7.909.022,00
640	Kelurahan Cipinang Muara - Jaktim	7.786.780,00
641	Kelurahan Kramat - Jakpus	7.544.130,00
642	Kelurahan Jati - Jaktim	7.532.360,00
643	Sudin Bina Marga - JAKUT	7.390.900,00
644	Kelurahan Kamal - Jakbar	7.334.700,00
645	Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal	7.306.500,00
646	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakut	6.994.130,00
647	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakut	6.974.110,00
648	Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja	6.529.870,00
649	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	6.444.890,00
650	Kelurahan Penggilingan - Jaktim	6.353.380,00
651	Kelurahan Cempaka Baru - Jakpus	6.024.700,00
652	Kelurahan Tidung - Kep. Seribu	5.899.373,00
653	Kelurahan Pasar Baru - Jakpus	5.817.130,00
654	Kecamatan Penjaringan - Jakut	5.751.000,00
655	Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan - Jakut	5.661.040,00
656	Kantor Lingkungan Hidup - Jakut	5.660.050,00
657	Kelurahan Karet Tengsin - Jakpus	5.525.630,00
658	Kelurahan Kayu Manis - Jaktim	5.414.200,00
659	Kelurahan Jembatan Lima - Jakbar	5.326.805,00
660	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jakbar	5.315.500,00
661	Kelurahan Menteng - Jakpus	5.168.470,00
662	Sudin Sosial - Jaksel	5.104.666,00
663	Pelaksana Penanggulangan Bencana - JAKBAR	5.054.413,00
664	Pusat Pengembangan Kompetensi Guru dan Kejuruan - JAKPUS	4.996.915,00
665	Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Jaksel	4.943.890,00
666	Kelurahan Kalibata - Jaksel	4.837.350,00
667	Kelurahan Duri Selatan - Jakbar	4.780.476,00
668	Kelurahan Rawasari - Jakpus	4.773.424,00
669	Kelurahan Kemayoran - Jakpus	4.740.450,00
670	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - Jaksel	4.696.991,00
671	Kelurahan P. Harapan - Kep. Seribu	4.681.755,00
672	Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu	4.667.850,00
673	Kecamatan Sawah Besar - Jakpus	4.657.840,00
674	Kelurahan Cipedak - Jaksel	4.261.248,00
675	Pusat Budidaya dan Konservasi Laut	4.057.818,00
676	Satpol PP - Jakpus	4.004.550,00
677	Unit Pengelola Kereta Api Ringan	3.988.050,00
678	Kecamatan Menteng - Jakpus	3.662.780,00
679	Sudin Pendidikan - Kep. Seribu	3.295.305,00
680	Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Kep. Seribu	3.282.400,00
681	Kelurahan Kebon Kosong - Jakpus	3.264.600,00
682	Kelurahan Tanah Sereal - Jakbar	3.246.815,00
683	Kelurahan Ciracas - Jaktim	3.215.300,00
684	Kelurahan Kebon Melati - Jakpus	3.121.250,00
685	Unit Pengelola Kawasan Kota Tua	3.051.345,00
686	Sudin Pendidikan II - JAKPUS	2.905.951,00
687	Kelurahan Kamal Muara - Jakut	2.894.850,00
688	Sudin Pendidikan I - JAKPUS	2.868.096,00
689	Sudin Olah Raga dan Pemuda - Jaksel	2.764.710,00
690	Kelurahan Cibubur - Jaktim	2.642.580,00
691	Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan	2.613.750,00
692	Kantor Kepegawaian - Jakpus	2.612.203,00
693	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakpus	2.547.169,00
694	Sudin Sosial - Jaktim	2.418.000,00
695	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKSEL	2.095.725,00
696	Kantor Lingkungan Hidup - Jakbar	2.084.650,00
697	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKTIM	2.047.500,00
698	Kelurahan Krendang - Jakbar	1.981.595,00
699	Kelurahan Pekojan - Jakbar	1.978.900,00
700	PSBL Harapan Sentosa 1	1.916.354,00
701	Kelurahan Kartini - Jakpus	1.662.980,00
702	Satpol PP - Jaktim	1.620.366,00
703	Kelurahan Jembatan Besi - Jakbar	1.573.000,00
704	Kelurahan Cikini - Jakpus	1.468.000,00

NO	NAMA SKPD/UKPD	NILAI PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
705	Kelurahan Serdang - Jakpus	1.352.203,00
706	Kelurahan P. Untung Jawa - Kep. Seribu	1.267.606,00
707	Kelurahan Sumur Batu - Jakpus	1.183.182,00
708	Sudin Pendidikan I - JAKSEL	1.179.620,00
709	Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Adm - Kep. Seribu	1.151.040,00
710	Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - Jaksel	1.083.720,00
711	Satpol PP - Jaksel	1.080.450,00
712	Kelurahan Semanan - Jakbar	957.167,00
713	Kelurahan Petojo Selatan - Jakpus	824.615,00
714	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - Kep. Seribu	760.210,00
715	Kelurahan Mangga Besar - Jakbar	747.703,00
716	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Jaktim	722.880,00
717	Kelurahan Petojo Utara - Jakpus	570.130,00
718	Sudin Pendidikan II - JAKUT	536.729,00
719	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jaksel	477.109,00
720	Sudin Pendidikan I - JAKTIM	269.500,00
721	Kelurahan Cilangkap - Jaktim	193.840,00
722	Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - Jakbar	147.420,00
723	PPKD	-
724	DPRD Propinsi	-
725	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah I	-
726	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III	-
727	Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL	-
728	Sudin Bina Marga - Kep. Seribu	-
729	Sudin Penataan Kota - JAKUT	-
730	Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah	-
731	Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Soemantri Brojonegoro	-
732	Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan	-
733	Unit Pengelola Lokasi Binaan dan Pusat Promosi UMKM	-
734	Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Kep.Seribu	-
735	Pelaksana Penanggulangan Bencana - Kep. Seribu	-
736	Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hutan	-
737	Unit Pengelola Rumah Potong Hewan	-
738	Inspektorat Pembantu - Kep. Seribu	-
739	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jakbar	-
740	Kantor Perencanaan Pembangunan - Jaktim	-
741	Kantor Kepegawaian - Kep. Seribu	-
742	Pusat Penyiapan dan Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	-
743	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI - JAKUT	-
744	Kelurahan Bungur - Jakpus	-
	JUMLAH PERSEDIAAN	**823.482.567.777,00**

IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2016

No.	Perusahan Daerah	Lapkeu Tahun	Tahun Penyertaan	Dasar Hukum	Bentuk Penyertaan	& Kepemilikan	Saldo per 31 Desember 2015 (Audited)	Mutasi Tambah Tahun 2016				Mutasi Kurang Tahun 2016			Nilai PMP per 31 Desember 2016
								Tambahan Modal Disetor	Pengumuman Laba	Lain-lain	Koreksi Ekuitas	Pembagian Dividen	Pengumuman Rugi	Lain-lain	
1	PD AM Jaya	Audited 2016	1992	Perda No. 13/1992	Lainnya	100%	-								-
2	PD Dharma Jaya	Unaudited 2016	1985	Perda No.20/2010	Lainnya	100%	70.432.916.065	72.853.026.360	587.415.037		(4.307.825.620)			42.169.321	139.523.362.521,00
3	PD Pembangunan Sarana Jaya (Konsolidasi)	Audited 2016	1982	Perda No. 6/1990	Lainnya	100%	1.046.058.060.401		105.095.890.606		(82.367.192.706)	31.732.962.062		36.112.524.645	1.000.941.271.594,00
4	PD Pasar Jaya	Audited 2016	1982	Perda No. 2/2009	Lainnya	100%	509.599.788.856	170.000.000.000	52.956.979.173	108.167.340.000	198.049.212.285	33.457.930.232		20.831.467.434	984.483.922.648,00
5	PD PAL Jaya	Unaudited 2016	1991	Perda No. 14/1997	Lainnya	100%	516.175.438.571	140.000.000.000	31.566.002.268	10.494.131.944	1.995.514.530	13.666.126.111		16.228.479.467	670.336.481.735,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD						**2.142.266.203.893**	**382.853.026.360**	**190.206.287.084**	**118.661.471.944**	**113.369.708.489**	**78.857.018.405**	**-**	**73.214.640.867**	**2.795.285.038.498,00**
6	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2016	1961	Akta No.256-265/2005	Saham	38,80%	1.942.067.255.754		396.558.147.574	160.300.755.651	28.127.219.113	24.800.000.000		2.132.814.198	2.500.120.563.894,00
7	PT Food Station Tjipinang	Unaudited 2016	1972	RUPS 26-08-1991	Saham	74,67%	49.234.489.310	300.000.000.000	8.835.176.902	16.352.944.110		3.007.195.324		1.023.090.657	370.392.324.341,00
8	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2016	1973	Akta No.77/19-02-2009	Saham	50,00%	161.799.741.564		37.048.133.513		(13.157.888.960)	4.613.538.245			181.076.447.872,00
9	PT Delta Djakarta, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2015	1970	Laporan Keuangan th. 2005	Saham	26,25%	222.250.087.306					25.224.084.000			197.026.003.306,00
10	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (Konsolidasi)	Audited 2016	1991	Akta No. 13/1-04-2004	Saham	72,00%	1.211.045.540.918		91.353.627.741			79.487.999.931			1.222.911.168.728,00
12	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	1971	Akta No. 23/11-05-99	Saham	28,00%	-								-
13	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2016	2002	Akta No. 13/05-06-03	Saham	26,85%	209.692.695.000								209.692.695.000,00
15	PT Cemani Toka	Unaudited 2016	1971	Akta No. 5/7-07-99	Saham	27,42%	27.059.360.000								27.059.360.000,00
16	PT Pakuan International	Audited 2010	1971	-	Saham	1,94%	1.345.900.000								1.345.900.000,00
17	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2012	1992	Akta No. 172/20-07-1992	Saham	8,08%	3.951.000.000								3.951.000.000,00
19	PT Asuransi Bangun Askrida	Unaudited 2016	1989	Akta No. 1192/25-7-05	Saham	4,45%	8.680.000.000								8.680.000.000,00
20	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Audited 2015	1997	Akta No. 293/30-06-05	Saham	99,98%	4.322.661.011.016	1.000.000.000.000	77.272.817.688	173.310.825	(47.342.872.343)	7.351.856.970		783.818	5.345.411.626.398,00
21	PT Bank DKI Jakarta	Audited 2016	1999	Akta No. 12/14-01-10	Saham	99,98%	5.884.333.774.627	500.000.000.000	803.287.677.461	276.679.664.566		69.522.075.465		3.230.898	7.394.775.810.291,00
22	PT Jakarta International Expo	*Audited 2007*	2004	Akta Hibah No. 67/22-07-2004	Saham	13,14%	39.375.000.000								39.375.000.000,00
23	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2016	2004	Akta No. 6/17-09-04	Saham	99,35%	484.300.436.222					500.000.000	16.408.997.317	26.800.350	467.364.638.555,00
24	PT RS Haji Jakarta 4)	Unaudited 2015	2004	Perda No. 12/2004	Saham	51,00%	51.157.222.000								51.157.222.000,00
25	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2016	2008	Perda No. 4 Tahun 2008	Saham	99,99%	3.759.293.639.511	1.762.929.672.083		831.418.575			36.408.860.369		5.486.645.869.800,00
26	PT Transportasi Jakarta	Unaudited 2016	2014	Perda No. 4 Tahun 2014	Saham	99,36%	1.481.923.171.895	330.000.000.000	128.701.602.302					2.127.659.574	1.938.497.114.623,00
27	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2016	2013	Perda No.13 Tahun 2013	Saham	95,00%	95.791.607.592	200.000.000.000	2.009.752.258	27.775.704		237.500.000		24.569.675	297.567.065.879,00
															-
	Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan						**19.955.961.932.715**	**4.092.929.672.083**	**1.545.066.935.439**	**454.365.869.431**	**(32.373.542.190)**	**214.744.249.935**	**52.817.857.686**	**5.338.949.170**	**25.743.049.810.687,00**
	JUMLAH						**22.098.228.136.608**	**4.475.782.698.443**	**1.735.273.222.523**	**573.027.341.375**	**80.996.166.299**	**293.601.268.340**	**52.817.857.686**	**78.553.590.037**	**28.538.334.849.185,00**

DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
PER 31 DESEMBER 2016

Uraian	Jumlah Aset Tetap
Saldo per 31 Desember 2015	**363.584.467.256.156,00**
Mutasi Penambahan	
Belanja Modal Tahun Anggaran 2016	8.976.221.837.156,00
Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	18.878.406.551,00
Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	124.022.671.231,00
Hutang Pihak Ke-3	4.793.861.079,00
Hasil Tukar Guling	-
Penambahan dari Uang Muka	133.414.843.537,00
	-
Reklasifikasi :	-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	68.881.178.056,00
Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	1.215.677.495,00
Reklasifikasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya Menjadi Aset Tetap	125.542.250.810,00
Reklasifikasi Aset Tak Berwujud Menjadi Aset Tetap	-
Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	318.890.889.896,00
Reklasifikasi Aset Fasos Fasum Menjadi Aset Tetap	9.395.930.606.334,00
Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP	2.203.091.342.900,00
Reklasifikasi antar Aset Lainnya	-
	-
Kapitalisasi :	-
Kapitalisasi dari Beban Pegawai	-
Kapitalisasi dari Beban Persediaan	646.731.304.882,00
Kapitalisasi dari Beban Barang	1.545.172.445,00
Kapitalisasi dari Beban Jasa	33.854.308.851,00
Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	289.729.454.923,00
	-
Koreksi:	-
Kurang Catat Transfer Masuk dari SKPD Lain :	-
Transfer masuk sebelum Tahun 2015	188.200.000,00
Transfer masuk Tahun 2015	12.370.644.088,00
Koreksi Kurang Catat:	-
Koreksi Kurang Catat Nilai	336.807.631.580,00
Koreksi Kurang Catat Barang	470.716.072.425,00
Koreksi Penambahan Lain-lain	
Jumlah Mutasi Penambahan	**23.162.826.354.239,00**
Mutasi Pengurangan	
Penghapusan	212.129.441.946,00
Diserahkan Ke Pihak Lain di Luar SKPD:	-
Dari Belanja Modal Tahun 2016	8.379.163.352,00
Dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2016)	13.986.232.059,00
Aset Tetap Yang Ditukar Guling/Ruislag	-
	-
Reklasifikasi :	-
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	68.881.178.056,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	215.485.488.950,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Tak Berwujud	19.576.666.274,00
Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya	89.252.037.971,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 Ke Beban:	-
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pegawai	-
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Barang	254.139.623.563,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	235.785.000,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Pemeliharaan	57.004.792.071,00
Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 menjadi Persediaan	6.766.672.800,00
Reklasifikasi Aset Tetap Ke Ekstrakomtabel (Selain Belanja Modal Tahun 2016)	-
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Pegawai	-
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Barang	38.209.708.349,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Jasa	-
Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2016) ke Beban Pemeliharaan	33.052.000,00
Reklasifikasi Aset Tetap (Belanja Modal Selain Tahun 2016) menjadi Persediaan	34.469.977.206,00
Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	318.890.889.896,00
Reklasifikasi Dari Belanja Modal Tahun 2016 Ke KDP	2.203.091.342.900,00
Reklasifikasi ke Kas Dikonsinyasikan	54.113.438.831,00
	-
Koreksi:	-
Koreksi Lebih Catat Transfer Keluar dari SKPD Lain:	-
Transfer keluar sebelum Tahun 2015	120.511.000,00
Transfer keluar Tahun 2015	-
Koreksi Belanja Modal atas Temuan, Klaim Bank Garansi dan Koreksi Lainnya	-
Belanja Modal Tahun 2016 (Temuan, Klaim Bank Garansi, dan Koreksi Lainnya)	10.751.822.623,00
Belanja Modal sebelum Tahun 2016	12.384.724.773,00
Koreksi Lebih Catat	-

Uraian	Jumlah Aset Tetap
Koreksi Lebih Catat Nilai	267.758.572.498,00
Koreksi Lebih Catat Barang	233.391.385.048,00
Koreksi Belanja Modal menjadi Uang Muka	108.270.807.500,00
Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	20.172.934.259,00
Koreks Lain-Lain	34.009.590,00
Jumlah Mutasi Pengurangan	**4.247.530.258.515,00**
Saldo per 31 Desember 2016	**382.499.763.351.880,00**

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
PER 31 DESEMBER 2016

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
																		4.722.469.085.757
1.		**DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA (GABU**	**574.469.947.930**	**649.447.199.409**	-	-	-	-		-	**13.332.328.282**	-	-	**226.215.000**	**32.921.270.559**	**5.446.946.961**	-	**1.198.655.043.101**
		DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA	**574.469.947.930**	**649.447.199.409**	-	-	-	-		-	**13.332.328.282**	-	-	**226.215.000**	**32.921.270.559**	**5.446.946.961,00**	-	**1.198.655.043.101**
1		Pembangunan Gedung Kantor Pemda Kepulauan Seribu	3.215.932.000,00							-								3.215.932.000
2		Rehab Kantor Gedung Pemda Jl. Pemuda Rawamangun Jakarta Timur	42.626.680,00							-								42.626.680
3		Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat, Jakarta Timur	42.552.952.700,00							-					194.047.977,00			42.358.904.723
4		Pembangunan Rumah Susun Untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Sempe	38.539.891.146,00							-					100.000.000,00			38.439.891.146
5		Pembangunan rumah susun untuk lokasi binaan (lokbin) rawa buaya+perencanaar	49.705.264.484,00							-								49.705.264.484
6		Pembangunan rumah susun rawa bebek, jakarta timur+Perancangan Dasar Rusun Rawa Bebek	37.044.398.467,00							-					42.924.750,00			37.001.473.717
7		Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rumah Susun Blok Mawar+perencanaan dasar rusun blok mawar	513.136.250,00	360.327.000						-					315.796.250,00			557.667.000
8		Pematangan Tanah dan Turap Lokasi rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur	42.560.100,00	12.493.316.100						-					42.560.100,00			12.493.316.100
9		Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara	162.470.000,00							-								162.470.000
10		Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta	76.534.060.500,00							-						345.192.333,00		76.188.868.167
11		Pembangunan Gedung PMI Kepulauan Seribu	45.891.000,00							-								45.891.000
12		Pembangunan Gedung UPPD Kecamatan Ciracas	4.864.092.300,00							-								4.864.092.300
13		Pembangunan Gedung UPPD Kecamatan Penjaringan	4.461.362.812,00							-								4.461.362.812
14		Pembangunan Masjid Raya Jakarta	83.604.966.850,00							-						3.703.025.642,00		79.901.941.208
15		Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana Penunjang di Rumah Susun Pulo Gebang	5.578.423.002,00							-								5.578.423.002
16		Pembangunan Musholla dan Sarana Prasarana Pendukung di Rumah Susun Pondok Bambu	1.164.977.925,00							-								1.164.977.925
17		Penyelesaian Pembangunan Masjid Marunda, Jakarta Utara	7.124.210.980,00							-								7.124.210.980
18		Pemb Masjid & Sarana Prasarana Penunjang di Rusun Cipinang Besar Selatan	167.330.625,00							-								167.330.625
19		Pembangunan Rusun KS Tubun (Struktur - Tahap I) Jak Pus	65.874.550.111,00							-						947.634.066,00		64.926.916.045
20		Pembangunan rumah susun jatinegara kaum, jakarta timur+perencanaan	27.850.357.087,00							-								27.850.357.087
21		Perencanaan Pekerjaan Pembangunan Badiklat	2.982.985.000,00							-								2.982.985.000
22		Pembebasan Tanah Untuk Rusun di Kel. Rawa Teratai Kec. Cakung Jakarta Timur (Luas 8000 m2)	20.482.000,00							-								20.482.000
23		Belanja Jasa Konsultansi Penilai/Appraisal Muara Baru, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara	**37.686.000,00**							-								37.686.000
24		Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat	**12.435.354.375,00**							-					12.435.354.375,00			-
25		Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat	**1.601.497.000,00**							-								1.601.497.000
26		Pembangunan Gedung BPMPKB Provinsi DKI Jakarta	**6.621.298.000**							-								6.621.298.000
27		Pembangunan Kantor Pusdiklatkar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	**44.638.801.000,00**							-								44.638.801.000
28		Rehab Gedung PPMKRI (selesai)	**542.582.581,00**							-					542.582.581			-
29		Rehab Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (selesai)	**7.994.527.776,00**							-					7.994.527.776			-
30		Rehab Gedung KPUD Jakarta Utara(selesai)	**5.048.788.901,00**							-					5.048.788.901			-
31		Rehab Gedung KPUD Jakarta Barat (selesai)	**455.683.760,00**							-					455.683.760			-
32		Rehab Gedung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan (selesai)	**1.578.224.086,00**							-					1.578.224.086			-
33		**Rehab Rutan Pondok Bambu (selesai)**	**4.464.827.980,00**							-					4.464.827.980			-
34		Pembangunan Musholla dan Sarana Prasarana Pendukung di Rumah Susun Komaruddin	**2.019.611.650,00**							-								2.019.611.650
35		Pembangunan rumah susun jl. bekasi km. 2 jakarta timur	**23.080.641.215,00**							-						157.046.943,00		22.923.594.272
36		Pembangunan rumah susun pinus elok 1 blok	**3.118.588.000,00**							-								3.118.588.000
37		**Pembangunan jaringan pipa gas pada rumah susun jatinegara kaum, jakarta timur**	**18.027.625,00**							-								18.027.625
38		**Pembangunan jaringan pipa gas pada rumah susun pulo gebang, jakarta timur**	**18.027.625,00**							-								18.027.625
39		Perbaikan Rumah Susun Kapuk Muara, Jakarta Utara	**973.202.500,00**							-								973.202.500
40		Perbaikan Rumah Susun Bulak Wadon, Jakarta Barat	**361.341.000,00**							-								361.341.000
41		Perbaikan Rumah Susun Penjaringan, Jakarta Utara	**513.223.000,00**							-								513.223.000
42		Perbaikan Rumah Susun Pulo Jahe, Jakarta Timur	**276.638.500,00**							-								276.638.500
43		Perbaikan Rumah Susun Cipinang Muara, Jakarta Timur	**254.437.424,00**							-								254.437.424
44		Perencanaan DED Rumah Susun	**1.189.276.000,00**							-								1.189.276.000
45		Perencanaan Perumahan dan Gedung Pemda	**1.255.258.950,00**							-								1.255.258.950
46		Perancangan Dasar Rusun BLK Pasar Rebo	**163.735.000,00**	3.314.054.180						-								3.477.789.180
47		Perancangan Dasar Rusun Daan Mogot	**197.340.000,00**	428.900.000						-								626.240.000
48		Perancangan Dasar Rusun Lokasi Binaan Tegal Alur	**161.425.000,00**	367.477.000						-								528.902.000
49		Perancangan Dasar Rusun Pengadegan	**192.362.499,00**	428.989.880						-								621.352.379
50		Perancangan Dasar Rusun Penjaringan	**197.340.000,00**	425.200.000						-								622.540.000
51		Perancangan Dasar Rusun Pulogebang	**161.590.000,00**	379.853.100						-								541.443.100
52		Perancangan Dasar komplek Rusun Pondok Pinang Jakarta Selatan	**305.681.512,00**							-								305.681.512
53		Basic Design wisma Pondok Karya Pembangunan	**183.997.000,00**							-								183.997.000

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
54		Pembangunan Asrama Perwira dan Bintara serta prasarana pendukung sekolah polisi wanita	574.523.125,00							-								574.523.125
55		Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Pemda	151.548.760,00							-								151.548.760
56		Perbaikan Rumah Susun Cakung Barat	1.237.053.067,00							-								1.237.053.067
57		Rehab Total Kantor PMI Jakarta Selatan	126.670.000,00							-								126.670.000
58		Kajian Bantuan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh	226.215.000,00							-				226.215.000,00				-
59		Pembangunan Rusun KS. Tubun Jakarta Barat		143.159.261.050						-								143.159.261.050
60		Pembangunan Rumah Susun Cakung Barat, Jakarta Timur		38.200.043.610						-								38.200.043.610
61		Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur		66.690.230.093						-								66.690.230.093
62		Pembangunan Rumah Susun Jatinegara Kaum, Jakarta Timur		31.811.538.014						-								31.811.538.014
63		Pembangunan Rumah Susun Jl .Bekasi KM. 2 Jakarta Timur		27.055.656.083						-								27.055.656.083
64		Revitalisasi Rusun Penjaringan, Jakarta Utara		124.080.000						-								124.080.000
65		Pembangunan Rumah Susun Penggilingan, Jakarta Timur								-								-
66		Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara		62.142.442.903						-								62.142.442.903
67		Pembangunan Rumah Susun Kelurahan Pengadegan		716.952.658						-								716.952.658
68										-								-
69		Pembangunan Rumah Susun Pulo Gebang dan Penggilingan		3.511.192.665						-								3.511.192.665
70		Pembangunan Rumah Susun Pinus Elok		10.907.375.160						-								10.907.375.160
71		Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur		2.541.592.358						-								2.541.592.358
72		Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya		78.672.375.243						-								78.672.375.243
73		Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper		54.015.352.934						-								54.015.352.934
74		Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Tegal Alur		722.077.672						-								722.077.672
75		Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya Tower 3, Tower 4		124.410.000						-								124.410.000
76		Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana		28.506.394.000						-								28.506.394.000
77		Penyelesaian Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Jakarta Pusat		17.244.785.000						-								17.244.785.000
78		Pembangunan Gedung Blok F dan GWT Balaikota Provinsi DKI Jakarta		29.562.765.825						-								29.562.765.825
79		Pembangunan Masjid Raya Jakarta		29.470.488.000						-								29.470.488.000
		Penyelesaian Rehab Rutan Pondok Bambu		1.118.920.000														1.118.920.000
		Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta Utara		193.601.100														193.601.100
		Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa Bebek		106.808.625														106.808.625
		Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda		79.749.140														79.749.140
		Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot		82.931.416														82.931.416
		Kajian Pengelolaan Rusun Fungsi Campuran		568.000.000														568.000.000
		Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)		889.185.000														889.185.000
		Perencanaan Dasar Rusun Semper (Kantor Pajak/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)		226.028.000														226.028.000
		Perancangan Dasar Rusun Flamboyan		220.748.000														220.748.000
		Perancangan Dasar Rusun Terminal Pulo Gadung		303.425.000														303.425.000
		Perancangan Dasar Rusun Terminal Rawa Buaya		247.787.000														247.787.000
		Perancangan Dasar Rusun di Kepulauan Seribu		210.180.000														210.180.000
		Perencanaan Gedung Kantor Suku Dinas Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara		120.197.000														120.197.000
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Rusun Rorotan IV		428.989.880														428.989.880
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Rusun Cipinang Besar Utara		428.900.000														428.900.000
		Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rusun BLK Pasar Rebo, Pengadegan, Rorotan IV dan Cipinang Besar Utara		373.300.400														373.300.400
		Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rusun Bekasi Timur, Boker, Penggilingan dan Pulo Gebang		359.514.320														359.514.320
		Kajian Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Masjid Raya Jakarta		111.804.000														111.804.000
		Gedung KONI									13.332.328.282							13.332.328.282
										-								
2.		**DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN (GABUNG**	**8.256.973.133**	**30.726.300**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**30.726.300**	**8.256.973.133**
		DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	**8.032.333.518**	**30.726.300**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**30.726.300**	**8.032.333.518**
1		Jembatan TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama	6.118.241.600							-								6.118.241.600
2		Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan	70.000.000							-								70.000.000
3		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padat Penduduk Wilayah Barat	6.000.000							-								6.000.000
4		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Padat Penduduk Wilayah Selatan	6.000.000							-								6.000.000
5		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Haji Sapih / Jl. Lebak Bulus III, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	74.054.600							-								74.054.600
6		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Kampung Rekreasi RT.007/04, Kel. Cilincing, Kec. Cilncing, Jakarta Utara	134.488.508							-								134.488.508
7		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Tanah Mas Raya RT.003/01, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur	20.000.000							-								20.000.000
8		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Moh. Kahfi I, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	125.695.100							-								125.695.100

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
9		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Madrasah RT.002/12, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	26.000.000							-								26.000.000
10		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Teluk Jakarta RT.006/08, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	11.200.000							-								11.200.000
11		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Mawar Ujung, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	14.000.000							-								14.000.000
12		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. RC-Veteran, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	28.000.000							-								28.000.000
13		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Perdatam Terusan RW.06, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	40.000.000							-								40.000.000
14		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Masjid Nur Imam RT.002 RW.02, Kel. Semanan, Kec. Kalideres, Jakarta Barat	31.100.000							-								31.100.000
15		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Srengseng Sawah RW.07, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	20.000.000							-								20.000.000
16		Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Kp. Joglo, Kel. Kembangan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat	7.000.000							-								7.000.000
17		Tanah RTH Jl. Raya Cilangkap RW 01 Kel. Cilangkap, Jakarta Timur	23.500.000							-								23.500.000
18		Tanah RTH Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur	48.000.000							-								48.000.000
19		Tanah RTH Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar, Jakarta Timur	17.000.000							-								17.000.000
20		Tanah RTH Kel. Pegangsaan Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	38.000.000							-								38.000.000
21		Tanah RTH Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	58.640.900							-								58.640.900
22		Tanah RTH Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	39.405.400							-								39.405.400
23		Tanah RTH Jl. Setu Raya Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta Timur	34.000.000							-								34.000.000
24		Tanah RTH Jl. Gandun RW 08 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	26.802.000							-								26.802.000
25		Tanah RTH Jl. Lapangan Tembak 8 RT. 010/02 Cibubur Jakarta Timur	25.230.000							-								25.230.000
26		Tanah RTH Wilayah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	78.542.500							-								78.542.500
27		Tanah RTH Jl. Kesehatan 6 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan	4.300.000							-								4.300.000
28		Lahan TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur	61.021.600							-								61.021.600
29		Lahan RTH di RT 002, RW 05, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung, Jakarta Timur	20.000.000							-								20.000.000
30		Lahan RTH di Jl. Pulogadel RT 011/04 Pinang Ranti, Kampung Makasar	20.000.000							-								20.000.000
31		Lahan Taman Interaktif Jl. Peta Utara RT 002 RW 06 Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jakarta Barat	10.000.000							-								10.000.000
32		Lahan RTH Jl. H. Gandun RW 08 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak Jakarta Selatan	5.000.000							-								5.000.000
33		Lahan RTH di Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara	48.135.500							-								48.135.500
34		Lahan RTH di Kel. Semper Barat Kec. Cilincing, Jakarta Utara	20.000.000							-								20.000.000
35		RTH Kelurahan Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	20.000.000							-								20.000.000
36		Lahan RTH di Jl. Pos Pengumben Raya Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat	50.000.000							-								50.000.000
37		Lahan RTH di RW 04 Kel. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur	57.093.568							-								57.093.568
38		Lahan Jl. Kebagusan Dalam I (Samping Taman Dadap Merah) Kel. Kebagusan kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan	20.000.000							-								20.000.000
39		Pagar Taman Tebet Utara dan Sisi Selatan, Jakarta Selatan	123.800.950							-								123.800.950
40		Tanah Waduk Ria-Rio, Jakarta Timur	40.000.000							-								40.000.000
41		Tanah RTH di Jl. Sekolah Duta II Rt.013/04 Kel. Pondok Pinang Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	10.000.000							-								10.000.000
42		Tanah RTH Jl. Manunggal Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas, Jakarta Timur	4.959.000							-								4.959.000
43		Tanah RTH Jl. TB Simatupang RW 04 Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur	20.000.000							-								20.000.000
44		Tanah RTH Jl. Kramat Jaya RT 007 RW 05 Kel. Tugu Utara Kec. Koja, Jakarta Utara	10.000.000							-								10.000.000
45		Tanah RTH Jl. Raya Hankam Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta Timur	10.000.000							-								10.000.000
46		Tanah RTH Jl. Setu Raya Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta Timur	4.959.000							-								4.959.000
47		Tanah RTH Jl. Kebagusan I Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan	25.000.000							-								25.000.000
48		Tanah RTH Jl. Jagakarsa Raya (Babakan) Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan	20.000.000							-								20.000.000
49		Tanaman Taman Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat	26.972.856							-								26.972.856
50		Tanaman Taman Catteleya, Jakarta Barat	39.278.419							-								39.278.419
51		Tanaman RTH Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	39.303.444							-								39.303.444
52		Tanaman RTH Jagakarsa Jakarta Selatan	21.739.551							-								21.739.551
53		Pohon Palem Kol	35.080.750							-								35.080.750
54		Tanaman Taman Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta Selatan	40.060.450							-								40.060.450
55		Tanaman Taman RTH Kec. Makasar, Jakarta Timur (SETIA)	15.324.681							-								15.324.681
56		Tanaman RTH Jl. Mangga XIV RT 007 RW 003 Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat	31.467.491							-								31.467.491
57		Tanaman Taman Tebet, Jakarta Selatan	28.931.438							-								28.931.438
58		Tanaman Taman Interaktif Jl. Lingkungan III Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat	29.004.212							-								29.004.212
59		Tanah TPU Semper, Jakarta Utara		30.726.300						-							30.726.300	-
60		Lain - lain								-								-
	SUBTOTAL				-					-			-					-

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
		SUDIN PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN - JAKUT	**224.639.615**	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	224.639.615
1		Taman BMW Jl. Danau Sunter Barat Kel. Sunter Agung Kec. Tanjungpriok	224.639.615							-								224.639.615
										-								
3.		**DINAS BINA MARGA (GABUNGAN)**	**1.132.082.624.304**	**1.211.862.047.669**	-	-	-	**87.854.000.366**		-		-	-		**10.224.526.250**	**38.659.205,00**	-	**2.421.535.486.884**
		DINAS BINA MARGA	**1.121.910.814.385**	**1.211.706.111.889**	-	-	-	**87.854.000.366**		-		-	-		**9.528.607.000**	**38.659.205,00**	-	**2.411.903.660.435**
1		Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda - Rorotan)	14.069.575.092							-						38.659.205,00		14.030.915.887
2		Pemb Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Rorotan - Cakung Timur)	10.206.563.541							-								10.206.563.541
3		Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda - Rorotan)	20.223.424.132							-								20.223.424.132
4		Pemb. Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (segmen Marunda - Rorotan)	25.000.000							-								25.000.000
5		Keg Invent dan PT Jl Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	5.000.000							-								5.000.000
6		Prog. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	25.000.000							-								25.000.000
7		Program optimalisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan (Dedicated) keg invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	15.000.000							-								15.000.000
8		Keg Invent dan PT Jl Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono	25.000.000							-								25.000.000
9		Program Keg pembebasan tanah Jl. Tbs Missing Link (Jl. KH. Mas Mansyur-Jl. Sudirman, STIE Perbanas Kuningan-Jl. Satrio, Jl.asia Afrika/Senayan City-Teuku Nyak arif, Jl.Tbs.Boulevard Timur, Pegangsaan Dua) Sigit Pramono	50.000.000							-								50.000.000
10		Keg PT Jln Tembus Missing Link (JL. KH Mas Mansyur - Jl. Sudirman, dll) Sigit Pramono	20.000.000							-								20.000.000
11		Prog. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan, Keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Sigit Pramono	25.000.000							-								25.000.000
12		Perenc. Peningkatan Jemb. Jln. Bulevart Timur	120.789.000							-					120.789.000			-
13		Pek Pemb Akses Terminal Pulo Gebang / Pemb Akses (FO) Terminal Bus Pulo Gebang								-								-
14		Jl. Joglo Raya Tahap II /pelebaran (termasuk saluran & trotoar)	6.388.302.047							-								6.388.302.047
15		Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi - Pulo Gebang) /pondasi	11.789.361.707							-								11.789.361.707
16		Jalan dan Saluran Pengaman Sejajar BKT (Segmen Pulo Gebang - Pondok Kopi)/termasuk saluran & trotoar	5.887.804.094							-								5.887.804.094
17		Pembangunan Jembatan Jalan Pluit Indah (Biaya Lelang)								-								-
18		Peningkatan Jembatan Jl. Boulevard Timur - Jl. Pegangsaan Dua Lanjutan	16.000.000							-					16.000.000			-
19		Pembangunan Jembatan Bendungan Melayu (Biaya Lelang dan Perencanaan)	130.392.000							-								130.392.000
20		Pembangunan UP. Jl. RA Kartini (Biaya Lelang Konsultan)	169.797.200							-								169.797.200
21		Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang Lanjutan								-								-
22		FO Kuningan Sisi Selatan (Biaya lelang dan Pek. UKL/UPL)								-								-
23		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M Cileduk (Biaya lelang konsultan dan Pek. Amdal)	557.676.000							-								557.676.000
24		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Operasional menuju Waduk Cilangkap (Jalan Sepakat 2 & 3)	25.000.000							-								25.000.000
25		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Deplu Raya	50.000.000							-								50.000.000
26		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Akses Menuju Rusun Pulo Gebang (Jl. Mutiara Mas Raya)	62.500.000							-								62.500.000
27		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Kembang Kereb (untuk Akses Terowongan)	62.500.000							-								62.500.000
28		Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Layang Jl. Kunir - P. Jayakarta	50.000.000							-								50.000.000
29		Inventarisasi Pembebasan Tanah Jalan Tembus Jl. Panjang - Jl. Kapuk Raya	87.500.000							-								87.500.000
30		Biaya Perenc, pengukuran dan gambar trace Pembayaran Ganti Rugi di Jl Perjuangan RT 1 RW 7 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk	50.000.000							-								50.000.000
31		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Layang Non Tol P. Antasari - Blok M Lanjutan	25.000.000							-								25.000.000
32		Inventarisasi Pembebasan Tanah FO Kuningan Sisi Selatan	75.000.000							-								75.000.000
33		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jalan Tembus (Missing Link) Industri Pulogadung - Rajiman - Dr. Sumarno Lanjutan	25.000.000							-								25.000.000
34		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Lanjutan (Jl. Denpasar Raya Utara Lanjutan, Jl. Asia Afrika/ Senayan City - Teuku Nyak Arief, Jl. Setiabudi - Rasuna Said, Jl. Kendal - Mas Mansyur, Jl Latuharhari - Jl Tambak) lanjutan	126.565.040							-								126.565.040
35		Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang								-								-
36		Pembangunan Fly Over Kuningan Sisi Selatan								-								-
37		Pembangunan Jalan Layang Kapt Tendean - Blok M - Cileduk	3.473.030.500							-								3.473.030.500
38		Pembangunan STS Permata Hijau								-								-
39		Pembangunan Jembatan Jalan Pluit Indah								-								-
40		Peningkatan Jembatan Jl Boulevard Timur - Pegangsaan Dua	9.391.818.000							-					9.391.818.000			-

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
41		Pembangunan JPO Kanal Barat PAsar Tanah Abang	11.300.000							-								11.300.000
42		Pembangunan Jembatan Bendungan Melayu	404.219.000							-								404.219.000
43		Pembangunan Busway Layang Koridor 11 Kampung Melayu - Pulo Gebang Paket I	842.949.000							-								842.949.000
44		Pembangunan Busway Layang Koridor 14 Kalimalang - Tendean	834.776.500							-								834.776.500
45		Pembangunan Busway Layang Koridor 15 Pasar Minggu - Manggarai	874.258.000							-								874.258.000
46		STS Bintaro Permai - Rel KA	777.435.200							-								777.435.200
47		Simpang Tak Sebidang Tanjung Barat	999.077.000							-								999.077.000
48		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Simpang Tak Sebidang Lenteng Agung	12.500.000							-								12.500.000
49		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah FO Jl Semanan Rel KA	12.500.000							-								12.500.000
50		Invent Pembebasan Tanah Jl. Tbs. Missing Link Lanjutan (Jl. Denpasar Raya Utara, Jl. Asia Afrika /Senayan City - Teuku Nyak Arief, Jl. Setiabudi - Rasuna Said, Jl. Kendal - Mas Mansyur, Jl. Latuharhari - Jl. Tambak)	14.725.000							-								14.725.000
51		Pembangunan Jalan Tembus Asia Afrika - Jalan Teuku Nyak Arief	37.058.600							-								37.058.600
52		Pembangunan Jalan dan Saluran Pengamanan Sejajar BKT (Segmen Marunda Raya Bekasi)	15.722.322.256							-								15.722.322.256
53		Peningkatan Jalan-Jalan Strategis Jakarta Selatan								-								-
54		Pembangunan Jalan dan saluran Pengaman sejajar BKT (Segmen Raya Bekasi Cipinang)	12.626.836.227							-								12.626.836.227
55		Peningkatan Jalan Caringin Tomang								-								-
56										-								-
57		Pembangunan Jalan Layang Kapt Tendean - Blok M - Cileduk (paket kebayoran lama)	122.578.423.339							-								122.578.423.339
58		Pengembalian UM	10.249.619.000							-								10.249.619.000
59		Pembangunan Jalan Layang Kapt Tendean - Blok M - Cileduk (paket kostrad-cileduk)	94.427.920.150							-								94.427.920.150
60		Pengembalian UM	10.284.862.900							-								10.284.862.900
61		Pembangunan Jalan Layang Kpt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Seskoal - Ciledug)	120.225.810.600							-								120.225.810.600
62		Pengembalian UM	27.136.770.400							-								27.136.770.400
63		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Tendean)	108.839.778.546							-								108.839.778.546
64		Pengembalian UM	8.985.149.000							-								8.985.149.000
65		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Trunojoyo)	135.447.824.600							-								135.447.824.600
66		Pengembalian UM	11.315.867.000							-								11.315.867.000
67		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Taman Puring)	104.829.869.302							-								104.829.869.302
68		Pengembalian UM	8.626.635.148							-								8.626.635.148
69		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Adam Malik)	99.916.433.667							-								99.916.433.667
70		Pengembalian UM	8.178.526.000							-								8.178.526.000
71		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Santa)	104.188.924.080							-								104.188.924.080
72		Pengembalian UM	11.331.150.320							-								11.331.150.320
73		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Koridor Tendean - Taman Puring)	3.000.000.000							-								3.000.000.000
74		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Koridor Trunojoyo)	890.432.400							-								890.432.400
75		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Koridor Ciledug Raya)	2.750.366.667							-								2.750.366.667
76		Jalan dan Saluran pengaman sejajar BKT (segmen Raya Bekasi - Cipinang)	4.423.673.130							-								4.423.673.130
77		Jalan dan Saluran pengaman sejajar BKT (segmen Marunda - Raya Bekasi)	7.859.223.000							-								7.859.223.000
78		Pembangunan Jalan Layang Kapt Tendean - Blok M - Cileduk (paket kebayoran lama)		1.211.706.111.889				87.854.000.366		-								1.299.560.112.255
79		Pembangunan Jalan Layang Kapt Tendean - Blok M - Cileduk (paket kostrad-cileduk)								-								-
80		Pembangunan Jalan Layang Kpt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Seskoal - Ciledug)								-								-
81		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Tendean)								-								-
82		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Trunojoyo)								-								-
83		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Taman Puring)								-								-
84		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Adam Malik)								-								-
85		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Paket Santa)								-								-
86		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Koridor Tendean - Taman Puring)								-								-
87		Pembangunan Jalan Layang Kapt. Tendean - Blok M - Ciledug (Koridor Ciledug Raya)								-								-
88		Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Cipinang Lontar								-								-
89		Pembangunan Simpang Tak Sebidang Bintaro Permai-Rel KA								-								-
90		Pembangunan Simpang Tak sebidang Jl. Panjang								-								-
91		Pembangunan FO Jembatan Tiga Pluit								-								-
92		Pembangunan FO Pancoran								-								-
93		Pembangunan Underpass Kartini								-								-
94		Pembangunan Underpass Santa								-								-
95		Pembangunan Underpass Mampang- Kuningan								-								-
96		Pembangunan Underpass Matraman - Salemba								-								-
97		Pengadaan Tanah Jalan Arteri/Kolektor, Sejajar Rel, Tol dan Sejajar Kali								-								-
		KDP								-								-
		SUDIN BINA MARGA - JAKPUS	**580.005.000**	**155.935.780**	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	**735.940.780**
1		Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu - Pramukasari	45.000.000							-								45.000.000
2		Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu (Jl. Kodam - Suprapto)	50.000.000							-								50.000.000
3		Inventarisasi jl. Inspeksi Kali Baru Barat	50.000.000							-								50.000.000
4		Inventarisasi Jl. Kali Krukut Atas (Jl. Tbs Penjernihan - Bendungan hilir)	50.000.000							-								50.000.000

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
5		Inventarisasi jalan menuju Jl. Karet Pasar Baru Barat 1 (samping TPU Karet Bivak)	25.000.000							-								25.000.000
		Inventarisasi Jl. Mangga Dua Dalam	25.000.000							-								25.000.000
6		Inventarisasi & Appraisal Jl. Kali Baru Barat, Jl. Kali Sejajar Utan Kayu, Jl. Pramukasari	335.005.000							-								335.005.000
7		Peningkatan Jembatan di Wilayah Kota administrasi Jakarta pusat (Jasa Konsultan Perencanaan)		155.935.780						-								155.935.780
										-								-
		SUDIN BINA MARGA - JAKBAR	**1.025.281.250**	-	-	-	-	-		-		-	-	**695.919.250**	-	-		**329.362.000**
1		Peningkatan Jl. Kesejahteraan, Jl. Keagungan	41.832.500							-				41.832.500				-
2		Peningkatan trotoir Tanjung Duren Barat VI, Kel. Tanjung Duren	25.605.000							-								25.605.000
3		Peningkatan Jalan dengan Betonisasi (Jl. Manunggal RT 005/01 Meruya Selatan)	15.497.000							-								15.497.000
4		Penataan Trotoar Jl.Dr.Susilo III RT 004 RT 001,002,009,011,013,014,015 RW 03 Kel.Grogol	16.750.000							-								16.750.000
5		Peningkatan jalan Betonisasi Depan kelurahan Tambora , RW ,05 Kelurahan Tambora	14.138.500							-								14.138.500
6		Peningkatan Jl. Jelambar Selatan 8,9,12	46.370.000							-				46.370.000				-
7		Peningkatan Jl.Empang Bahagia 5 dan 6, Jl. Satria 1,2,3,4,5	46.370.000							-				46.370.000				-
8		Peningkatan Jl. Soleh 2, , Jl. Asiroth Dalam Kp Kecil, Jl. Komplek Migas Sukabumi Selatan, Jl. Qrisdoren. Jl. Marjuki Dalam	46.425.000							-				46.425.000				-
9		Peningkatan Jl. Penyelesaian Tomang I Ujung, II Ujung, Jl.Penyelesaian III Lanjutan Jl. Tembus Penyelesaian III Tembus IV, Jl. Penyelesaian Tomang IV tembus V	3.910.000							-				3.910.000				-
10		Peningkatan Jl. Jalur 20 Ujung, Jl. Puskesmas Joglo, Jl. Rudal Ujung, Jl. H. Hasim (Sawo 3) Joglo, Jl. Strategi	3.910.000							-				3.910.000				-
11		Peningkatan Jalan Lingkungan jl. Waru 2 B RW 09 Kel.Kapuk Kec.Cengkareng	47.789.000							-								47.789.000
12		Peningkatan Jl. Rawa Kompeni, Jl. Lingkungan Bougenvile, Jl. H. Niran, Jl. H. Amat Villa Bandara	46.425.000							-				46.425.000				-
13		Peningkatan Jl. Kavling Polri Blok A9, A10	41.755.500							-				41.755.500				-
14		Peningkatan Trotoar Jl. Anggrek Neli Murni	22.030.000							-								22.030.000
15		Peningkatan Jl. Mandor Husen, Jl. Pangkalan Kramat, Jl. M. Aseni	44.197.500							-				44.197.500				-
16		Peningkatan Jl. Karya Baru Srengseng	45.077.500							-								45.077.500
17		Peningkatan Jl. Bakti Mulya Tegal Alur	45.187.500							-				45.187.500				-
18		Peningkatan Jl. Lingkungan RW 14 Cengkareng Timur	13.990.000							-				13.990.000				-
19		Peningkatan Trotoir Jl. Kebon Jeruk Raya	39.605.000							-								39.605.000
20		Peningkatan Trotoir Jl. Kedoya Raya	46.581.250							-				46.581.250				-
21		Peningkatan Jl. Kav. Polri A4 RT. 03,Blok A5 RT 04,Blok A6 RT. 05 Kel.Jelambar	43.180.000							-				43.180.000				-
22		Peningkatan Jl. Indraloka 2,3,5,6,7	47.195.000							-				47.195.000				-
23		Peningkatan Jl. Tulip, Jl. Flora, Jl. Pidada, Jl. Mandala Wangi, Jl. Sengon	46.425.000							-								46.425.000
24		Peningkatan Jl. Roa Malaka Selatan RT 007 RW 03 Kelurahan Roa Malaka	22.597.500							-								22.597.500
25		Peningkatan Jl. Istiqomah, Jl. Jaya (Rusun Harapan Indah)	22.085.000							-				22.085.000				-
26		Peningkatan Jl. Bambu Larangan, Jl. Peta Utara 3, Jl. Kumbang Pegadungan, Jl. Tanjung Pura 1,3,4	46.425.000							-				46.425.000				-
27		Peningkatan Trotoir Jl. Tanjung Duren Barat. I, Jl. Lontar	20.765.000							-								20.765.000
28		Pemeliharaan jalan (rigrid Jl. Swadaya 2,3,4,5,6,7; Jl. Merpati 1,2,3,4; Rw 06 Kel.Wijaya kusuma	41.849.000							-				41.849.000				-
29		Peningkatan Jalan Manunggal AMD RT 008, 013, 016, RW 11 Kel. Kapuk	18.775.000							-				18.775.000				-
30		Perbaikan Jl. Tanggul Selatan RT 02, 04, 05, 06, 010, 012 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng	13.082.500							-								13.082.500
31		Peningkatan Trotoar Wilayah Kecamatan Palmerah (Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan)	49.456.000							-				49.456.000				-
										-								
		SUDIN BINA MARGA - JAKSEL	**8.566.523.669**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		**8.566.523.669**
1		Cilandak I Ujung (Kel. Cilandak Barat)	73.726.000							-								73.726.000
2		Jl. Tembus Mampang Prapatan 13 (Kantor Kecamatan Mampang)	118.180.000							-								118.180.000
3		Pengukuran Trace kegiatan : Pengukuran dan Perencanaan Trace Jl. Pasar Minggu - Soepomo - Sahardjo Kota Administrasi Jakarta Selatan	45.000.000							-								45.000.000
4		Pengukuran Trace kegiatan : Pengukuran dan Perencanaan Trace Jl. Menuju Kelurahan Duren Tiga Kota Adminiistrasi Jakarta Selatan	6.000.000							-								6.000.000
5		Perencanaan dan Pengukuran Trace Pra Invent Jl. Bangka Raya	30.000.000							-								30.000.000
6		Perencanaan dan Pengukuran Trace Invent Jalan Sejajar Rel Kereta Bukit Duri Sisi Barat	7.500.000							-								7.500.000
7		Perencanaan dan Pengukuran Trace Pra Invent Jl. Menuju Kelurahan Duren Tiga	6.000.000							-								6.000.000
8		Perencanaan dan Pengukuran Trace, Pematokan Trace DTR, Pelaksanaan (Pembayaran Ganti Rugi) Invent + PT Jl. Alwi	94.555.000							-								94.555.000
9		Ducting System Kawasan Blok M Tahap 2	1.927.508.866							-								1.927.508.866
10		Ducting System Kawasan Blok M Tahap 1	4.808.025.637							-								4.808.025.637
11		Ducting System Kawasan Blok M (Tahap 3)	1.088.082.100							-								1.088.082.100
12		Pra Invent Jl. Mampang Prapatan 13	25.000.000							-								25.000.000
13		Pra Invent Jl. AKRI - Garnisun	37.500.000							-								37.500.000
14		Pra Invent Jl. Pinang 1	37.500.000							-								37.500.000
15		Inv. Jl. Bangka	186.946.066							-								186.946.066
16		Pra Invent. Jl. Pinding - Brigif	50.000.000							-								50.000.000
17		Pra-Invent Jl. Seno - Jl. Masjid Al Makmur	25.000.000							-								25.000.000
										-								-
4		**DINAS TATA AIR**	**198.566.724.527**	-	-	-	-	-		-		-	-	**142.741.806.609**	-	-		**55.824.917.918**
		DINAS TATA AIR	**197.503.449.344**	-	-	-	-	-		-		-	-	**142.741.806.609**	-	-		**54.761.642.735**
1		Saluran Sekunder	9.240.260.375							-								9.240.260.375
2		Saluran Sekunder	9.775.589.491							-								9.775.589.491
3		Tanah Jaringan/Saluran	25.000.000							-								25.000.000

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
4		Tanah Jaringan/Saluran	4.125.000							-								4.125.000
5		Tanah Jaringan/Saluran	25.000.000							-								25.000.000
6		Tanah Jaringan/Saluran	25.000.000							-								25.000.000
7		Tanah Jaringan/Saluran	25.000.000							-								25.000.000
8		Tanah Jaringan/Saluran	50.000.000							-								50.000.000
9		Konstruksi Dalam Pengerjaan	275.000.000							-								275.000.000
10		Konstruksi Dalam Pengerjaan	75.000.000							-								75.000.000
11		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
12		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
13		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
14		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
15		Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.419.700							-								9.419.700
16		Konstruksi Dalam Pengerjaan	100.000.000							-								100.000.000
17		Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.195.000							-								41.195.000
18		Konstruksi Dalam Pengerjaan	45.375.000							-								45.375.000
19		Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.000.000							-								85.000.000
20		Konstruksi Dalam Pengerjaan	150.000.000							-								150.000.000
21		Konstruksi Dalam Pengerjaan	41.195.000							-								41.195.000
22		Konstruksi Dalam Pengerjaan	44.600.000							-								44.600.000
23		Saluran Skunder	1.384.610.000							-								1.384.610.000
24		Saluran Skunder	56.025.000							-								56.025.000
25		Saluran Skunder	8.081.999.999							-								8.081.999.999
26		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
27		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
28		Konstruksi Dalam Pengerjaan	75.000.000							-								75.000.000
29		Konstruksi Dalam Pengerjaan	61.600.000							-								61.600.000
30		Konstruksi Dalam Pengerjaan	220.423.000							-								220.423.000
31		Konstruksi Dalam Pengerjaan	101.087.000							-								101.087.000
32		Konstruksi Dalam Pengerjaan	146.434.000							-								146.434.000
33		Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.500.000							-								62.500.000
34		Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.500.000							-								87.500.000
35		Konstruksi Dalam Pengerjaan	100.000.000							-								100.000.000
36		Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.500.000							-								87.500.000
37		Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.500.000							-								62.500.000
38		Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.500.000							-								87.500.000
39		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
40		Konstruksi Dalam Pengerjaan	25.000.000							-								25.000.000
41		Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.000.000							-								30.000.000
42		Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.177.280							-								130.177.280
43		Konstruksi Dalam Pengerjaan	227.040							-								227.040
44		Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.000.000							-								50.000.000
45		Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.741.440							-								13.741.440
46		Konstruksi Dalam Pengerjaan	87.480.560							-								87.480.560
47		Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.227.107.900							-								9.227.107.900
48		Konstruksi Dalam Pengerjaan	266.000.000							-								266.000.000
49		Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.491.655.750							-								3.491.655.750
50		Konstruksi Dalam Pengerjaan	10.151.336.250							-								10.151.336.250
51		Konstruksi Dalam Pengerjaan	287.477.950							-								287.477.950
52		Konstruksi Dalam Pengerjaan	142.741.806.609							-				142.741.806.609				-
										-								-
		SUDIN TATA AIR - JAKPUS	**456.716.183**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	456.716.183
1		Pembangunan Sheet Pile Saluran PHB Nangka, Kali Sentiong dan Saluran PHB Rawa Kerbau	144.842.300							-								144.842.300
2		Pembangunan Sheet Pile Kali Cideng (Dari Jl. Suryo Pranoto - Jl. Zainal Arifin) dan Kali Cideng (Dari Jl. Latuharhary - Jl. Thamrin)	93.903.200							-								93.903.200
3		Koreksi tambah atas Perencanaan X-1 Tahun 2014 Normalisasi sistem drainase kawasan kec menteng, kec cempaka putih, kec kemayoran, dan kec johar baru yang belum dicatat sebagai KDP	34.219.000							-								34.219.000
4		Koreksi tambah atas Perencanaan X-1 Tahun 2014 Pembangunan Sheet Pile Kali Ciragil, Krukut Atas, Bendungan Hilir yang belum dicatat sebagai KDP	58.193.000							-								58.193.000
5		Koreksi tambah atas Perencanaan X-1 Tahun 2014 Normalisasi sistem drainase kawasan kec tanah abang dan kec senen yang belum dicatat sebagai KDP	33.997.000							-								33.997.000
6		Koreksi tambah atas Perencanaan X-1 Tahun 2014 Pekerjaan Penyelidikan Tanah untuk Pembangunan Sheet Pile yang belum dicatat sebagai KDP	46.311.000							-								46.311.000
7		Koreksi tambah atas Perencanaan X-1 Tahun 2014 Normalisasi Sistem Drainase kawasan kec sawah besar yang belum dicatat sebagai KDP	13.640.000							-								13.640.000
8		Koreksi tambah atas perencanaan X-1 Tahun 2013 pekerjaan Normalisasi Sistem Drainase Kawasan Jl Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang yang belum dikapitalisasi sebagai penambah aset tetap KDP karena pekerjaan fisik per 31 Desember 2014 belum dilaksanakan namun telah dianggarkan di Tahun 2015	31.610.683							-								31.610.683
										-								-
		SUDIN TATA AIR - JAKBAR	**4.350.000**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	**4.350.000**
1		Saluran Drainase (Perencanaan X-1 Kawasan Kali Anyar)	2.175.000							-								2.175.000
2		Saluran Drainase (Perencanaan X-1 Kel. Kalideres)	2.175.000							-								2.175.000
										-								-
		SUDIN TATA AIR - JAKTIM	**330.000.000**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	330.000.000
1		Inventarisasi Sal. Phb. Cipayung	70.000.000							-								70.000.000
2		Pembebasan Tanah Waduk Surilang Jakarta Timur	90.000.000							-								90.000.000
3		Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Waduk Surilang	70.000.000							-								70.000.000
4		Inventarisasi lanjutan pembebasan tanah sal. Phb. Cipayung	100.000.000							-								100.000.000
										-								-
		SUDIN TATA AIR - KEP.SERIBU	**272.209.000**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	272.209.000
1		Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Pulau Kelapa RW 04	114.816.000							-								114.816.000
2		Perencanaan X-1 Pemeliharaan dan Peningkatan Bidang Jalan, Jembatan dan Pengendali Banjir Tahun 2015	157.393.000							-								157.393.000
										-								
5		**DINAS PERHUBUNGAN GABUNGAN**	**131.835.956.430**	-	-	-	-	-	**95.785.250**	-		-	-	**23.846.125.315**	-	**79.941.926.000**	**28.143.690.365**
		DINAS PERHUBUNGAN	**80.178.405.125**	-	-	-	-	-	**95.785.250**	-		-	-	-	-	**79.941.926.000**	**332.264.375**
1		Bus Busway	11.988.900.000							-						11.988.900.000	-
2		Bus Busway	12.525.645.000							-						12.525.645.000	-
3		Bus Busway	13.011.185.000							-						13.011.185.000	-
4		Bus Busway	13.752.000.000							-						13.752.000.000	-

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
5		Bus Busway	20.879.100.000							-							20.879.100.000	-
6		Bus Busway	7.735.200.000							-							7.735.200.000	
7		Jembatan Penyebrangan Orang	67.392.875							-								67.392.875
8		Jembatan Penyebrangan Orang	32.992.000							-								32.992.000
9		Jembatan Penyebrangan Orang	136.094.250							-								136.094.250
10		Tanah	49.896.000							-							49.896.000	-
11		JPO (sondir)							95.785.250									95.785.250
																		-
		UNIT PENGELOLA TERMINAL ANGKUTAN JALAN	**27.733.593.550**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	27.733.593.550
1		Revitalisasi Terminal Klender	15.781.293.550							-								15.781.293.550
2		Revit Terminal Klender	5.962.030.000							-								5.962.030.000
3		Pengawasan Terminal Klender	73.881.500							-								73.881.500
4		Revit Terminal Klender	5.843.970.000							-								5.843.970.000
5		Pengawasan Terminal Klender	72.418.500							-								72.418.500
										-								-
		UNIT PENGELOLA ANGKUTAN PERAIRAN DAN KE	**23.846.125.315**	-	-	-	-	-		-		-	-	**23.846.125.315**	-	-	-	-
1		KM. Catamaran	23.846.125.315		0					-				23.846.125.315				-
										-								-
		UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEE	**77.832.440**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	77.832.440
1		Kapitalisasi non belanja modal untuk kas yang dikonsinyasikan	77.832.440		-					-								77.832.440
										-								-
6		**DINAS KESEHATAN (GABUNGAN)**	**2.538.964.629**	**234.311.696.294**	**-**	**-**	**626.332.400**	**-**	**2.968.258.320**	**-**		**-**	**-**	**5.894.985.200**	**-**	**239.068.185**	**234.311.198.258**
		DINAS KESEHATAN	**-**	**228.962.886.494**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.968.258.320**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**231.931.144.814**
1		Manajemen Konstruksi Manajemen Konstruksi Pembangunan Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan		228.962.886.494					2.826.768.320								231.789.654.814
2		Pembangunan Puskesmas Kelurahan Rawa Badak								-								-
3		Manajemen Konstruksi Pembangunan Puskesmas Kelurahan Ciganjur								-								-
4		Manajemen Konstruksi Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu								-								-
5		Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD Kelas D Kecamatan Kebayoran								-								-
6		Manajemen Konstruksi Rehab Total Puskesmas Kecamatan Sawah Besar								-								-
7		Manajemen Konstruksi Design dan Build Gedung AGD Dinas Kesehatan								-								-
8		Rehab Total Pembangunan Puskesmas Kelurahan Grogol Utara II								-								-
9		Pembangunan Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan								-								-
10		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Kemayoran								-								-
11		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Koja								-								-
12		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Kalideres								-								-
13		Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pulau Harapan								-								-
14		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Tanah Abang								-								-
15		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Taman Sari								-								-
16		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok								-								-
17		Pembangunan Puskesmas Kelurahan Rawa Badak								-								-
18		Pembangunan Puskesmas Kelurahan Ciganjur								-								-
19		Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu								-								-
20		Pembangunan RSUD Kelas D Kecamatan Kebayoran								-								-
21		Pembangunan Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih								-								-
22		Pembangunan Puskesmas Kecamatan Matraman								-								-
23		Pembangunan Puskesmas Kecamatan Kembangan								-								-
24		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Cilincing								-								-
25		Rehab Total Puskesmas Kecamatan Sawah Besar								-								-
26		Pembangunan Puskesmas Kecamatan Ciracas								-								-
27		Pembangunan Puskesmas Kecamatan Kramat Jati								-								-
28		Design dan Build Gedung AGD Dinas Kesehatan								-								-
29		Manajemen Konstruksi RSUK Kebayoran Baru							35.372.500	-								35.372.500
30		Manajemen Konstruksi RSUK Pasar Minggu							106.117.500	-								106.117.500
										-								-
		SUDIN KESEHATAN - JAKPUS	**895.971.376**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**895.971.376**
1		X-1 Bungur	211.049.000							-								211.049.000
2		X-1 Gambir	439.531.500							-								439.531.500
3		X-1 Senen	245.390.876							-								245.390.876
										-								-
		SUDIN KESEHATAN - JAKBAR	**114.027.500**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**114.027.500**
1		Perencanaan Pembangunan Gudang Obat di Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk sebagai Penunjang Rawat Inap	70.127.500							-								70.127.500
2		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Kemanggisan	43.900.000							-								43.900.000
										-								-
		SUDIN KESEHATAN - JAKSEL	**907.887.465**	**5.268.652.800**	**-**	**-**	**626.332.400**	**-**		**-**		**-**	**-**	**5.894.985.200**	**-**	**239.068.185**	**668.819.280**
1		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai	195.712.000	5.268.652.800			626.332.400			-				5.894.985.200				195.712.000
2		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II	167.876.200							-								167.876.200
3		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan	192.825.000							-								192.825.000
4		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Ciganjur	112.406.080							-								112.406.080
5		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Jatipadang	78.034.705							-							78.034.705	-
6		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Menteng Dalam	78.304.445							-							78.304.445	-
7		Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Tanjung Barat	82.729.035							-							82.729.035	-

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
										-								-
		SUDIN KESEHATAN - JAKTIM	**493.273.288**	**80.157.000**	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	**573.430.288**
1		Puskesmas Kel. Cililitan	126.864.000							-								126.864.000
2		PerencanaanRehab Total Eks Kantor Lurah Cipayung Menjadi Gedung Puskesmas Kelurahan Cipayung	114.680.775							-								114.680.775
3		Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Cijantung dengan Rawat Inap (ditambah lahan eks kantor Lurah Cijantung)	123.659.800							-								123.659.800
4		Perencanaan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Bali Mester	128.068.713							-								128.068.713
5		Penyelesaian pembangunan gedung RSUK Ciracas (Perencanaan)Konsultansi		26.653.000						-								26.653.000
6		Penyelesaian pembangunan gedung RSUK Kramat Jati Perencanaan) Konsultansi		26.752.000						-								26.752.000
7		Penyelesaian pembangunan gedung RSUK Matraman (Perencanaan) Konsultansi		26.752.000						-								26.752.000
										-								
		SUDIN KESEHATAN - KEP SERIBU	**127.805.000**	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	**127.805.000**
1		Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Kelurahan Pulau Lancang	36.600.000							-								36.600.000
2		Perencanaan Pembangunan Puskesmas Kelurahan PULAU HARAPAN	91.205.000							-								91.205.000
7		**BLUD RS KOJA**	-	**4.227.552.721**	-	-	-	-	**1.125.470.484**	**63.702.281.777**		-	-		-	-	-	**69.055.304.982**
1		Pengadaan konstruksi gedung	-	4.227.552.721		-												4.227.552.721
2		Belanja pemeliharaan gedung kantor blok B	-							35.560.703.708								35.560.703.708
3		Belanja pemeliharaan gedung kantor blok C	-							8.734.652.315								8.734.652.315
4		Belanja pemeliharaan gedung kantor blok E	-							19.406.925.754								19.406.925.754
		Lain - lain							1.125.470.484									1.125.470.484
										-								-
8		**BLUD RS PASAR REBO**	**639.021.873**	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	**639.021.873**
1		Green Building	95.076.873							-								95.076.873
2		Perencanaan Gedung P	543.945.000							-								543.945.000
										-								-
9		**BLUD RS DUREN SAWIT**	**477.732.810**	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-	**477.732.810**	-
1		Bangunan Gudang Tertutup Permanen	477.732.810		-					-							477.732.810	-
										-								-
10		**BLUD RSU TARAKAN**	**11.292.919.226**	**80.552.252.536**	-	-	-	-		-		-	-		**11.292.919.226**	-	-	**80.552.252.536**
1		Bangunan Rumah Sakit	11.292.919.226	80.552.252.536						-					11.292.919.226			80.552.252.536
										-								-
11		**DINAS PENDIDIKAN**	**278.426.445.368**	-	-	-	-	-		-		**78.215.380.634**	-		-	-	**50.446.587.523**	**306.195.238.479**
1		Rehabilitasi Total Gedung SDN Cakung Barat 14	5.267.972.000							-								5.267.972.000
2		Rehabilitasi Total Gedung SDN Karet Tengsing 13	6.204.260.000							-								6.204.260.000
3		Rehabilitasi Total Gedung SDN Balimester 04	4.001.910.205							-								4.001.910.205
4		Rehabilitasi Total Gedung SDN Kalibata 07	3.256.613.000							-								3.256.613.000
5		Rehabilitasi Total Gedung SDN Jagakarsa 06	3.288.488.000							-								3.288.488.000
6		Rehabilitasi Total Gedung SDN Cilangkap 01	4.229.312.000							-								4.229.312.000
7		Rehabilitasi Total Gedung SDN Pondok Bambu 14	6.047.720.000							-								6.047.720.000
8		Rehabilitasi Total Gedung SDN Kalisari 01	522.610.000							-								522.610.000
9		Rehabilitasi Total Gedung SDN Rawajati 06	5.463.753.940							-								5.463.753.940
10		Rehabilitasi Total Gedung SDN Baru 02	5.488.921.000							-								5.488.921.000
11		Rehabilitasi Total Gedung SDN Petukangan Selatan 04/05	12.515.109.000							-								12.515.109.000
12		Rehabilitasi Total Gedung SDN Tegal Alur 07	8.187.425.000							-								8.187.425.000
13		Rehabilitasi Total Gedung SDN Balimester 06	4.376.469.000							-							4.376.469.000	-
14		Rehabilitasi Total Gedung SDN Pejagalan 09/10	5.028.720.000							-								5.028.720.000
15		Rehabilitasi Total Gedung SDN Petukangan Selatan 03/07	9.893.067.000							-								9.893.067.000
16		Rehabilitasi Total Gedung SDN Rawabadak Selatan 07/08	2.880.438.000							-								2.880.438.000
17		Rehabilitasi Total Gedung SDN Rawabadak Selatan 09/10	3.522.428.000							-								3.522.428.000
18		Rehabilitasi Total Gedung SDN Sumur Batu 03	6.110.882.000							-								6.110.882.000
19		Rehabilitasi Total Gedung SDN Penjaringan 10	4.014.625.062							-								4.014.625.062
20		Rehabilitasi Total Gedung SDN Petukangan Utara 01/04	5.988.885.200							-								5.988.885.200
21		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 241	501.780.000							-								501.780.000
22		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 252	14.078.204.000							-							14.078.204.000	-
23		Rehabilitasi Total Gedung SMP 151	16.963.600.000							-								16.963.600.000
24		Rehabilitasi Total Gedung SMP 235	712.363.000							-								712.363.000
25		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 238	5.481.960.000							-								5.481.960.000
26		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 171	3.063.427.000							-								3.063.427.000
27		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 73	12.882.023.000							-								12.882.023.000
28		Pembangunan Asrama SMK Negeri 61	13.438.881.000							-								13.438.881.000
29		Rehabilitasi Total Gedung SMAN 27	228.482.000							-								228.482.000
30		Rehabilitasi Total Gedung SMKN 2	16.697.704.000							-								16.697.704.000
31		Rehabilitasi Total Gedung Kantor Puslatdikjur Jakarta Timur	28.296.675.038							-								28.296.675.038
32		Rehabilitasi Total Gedung SDN Kebon Kosong 02/04	3.073.964.000							-								3.073.964.000
33		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 186	3.323.463.000							-							3.323.463.000	-
34		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 263	836.737.000							-								836.737.000
35		Rehabilitasi Total Gedung SDN Cakung Barat 05	6.046.452.000							-								6.046.452.000
36		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 97	7.088.476.000							-								7.088.476.000
37		Rehabilitasi Total Gedung SMAN 66	2.952.250.000							-								2.952.250.000
38		Rehabilitasi Total Gedung SDN di Kepulauan Seribu	1.407.324.000							-								1.407.324.000
39		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 210	3.803.050.000							-								3.803.050.000
40		11/12	2.452.574.073							-							2.452.574.073	-
41		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 125	7.096.552.450							-							7.096.552.450	-
42		Rehabilitasi Total Gedung SMP 282	5.938.890.000							-							5.938.890.000	-
43		Rehabilitasi Total Gedung SMP 197	5.522.580.000							-							5.522.580.000	-
44		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 164	2.591.570.400							-								2.591.570.400
45		Rehabilitasi Total Gedung SMPN 112	7.657.855.000							-							7.657.855.000	-
46		Rehab Total Gedung SDN Penjaringan 06/07/08/09/11								-		13.984.462.619						13.984.462.619

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
47		Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 11/12								-		7.613.009.429						7.613.009.429
48		Rehab Total Gedung SMPN 162								-		18.724.812.243						18.724.812.243
49		Rehab Total Gedung SMPN 244								-		21.135.636.225						21.135.636.225
50		Rehab Total Gedung SMPN 266								-		16.757.460.118						16.757.460.118
										-								
12		**DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA (GABUNGAN)**	**26.895.213.940**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**11.582.180.000**	**-**	**-**	**15.313.033.940**
		DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA	**26.527.718.390**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**11.582.180.000**	**-**	**-**	**14.945.538.390**
1		Perencanaan Stadion BMW	4.763.805.625							-								4.763.805.625
2		Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemuda	147.155.765							-								147.155.765
3		Perencanaan, Appraisal dan Konsultasi Pembebasan Penggantian Tanah Stadion Lebak Bulus	398.365.000							-								398.365.000
4		Perencanaan Desain Meubelair dan Interior Dinas Olah Raga	92.000.000							-								92.000.000
5		Pembangunan Fasilitas Olahraga Jalan Alamanda Kelurahan Sunter Jaya	1.821.238.000							-					1.821.238.000			-
6		Pembangunan Ramp, Ruang Multifungsi dan Fasilitas Luar Gelanggang Remaja Kecamatan Ciracas	6.325.873.000							-					6.325.873.000			-
7		Pembangunan Fasilitas Luar dan Pengadaan Genset Gelanggang Remaja Kecamatan Tanah Abang	3.490.130.000							-								3.490.130.000
8		Pembangunan Fasilitas Luar Ruang Gelanggang Remaja Kecamatan Tambora	2.766.684.000							-								2.766.684.000
9		Pembangunan Fasilitas Luar Ruang Gelanggang Remaja Kecamatan Koja	3.435.069.000							-					3.435.069.000			-
10		Rehabilitasi Pagar keliling UPT Cenderawasih	2.342.109.000							-								2.342.109.000
11		Pemagaran Taman BMW	945.289.000							-								945.289.000
12		rehabilitasi Lapangan Tenis Kelurahan Pondok Kelapa kecamatan duren sawit								-								-
										-								-
		GELANGGANG OLAHRAGA SUNTER	**49.758.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	49.758.500
1		Perencanaan lanjutan rehab kolam renang Rawa Badak	49.758.500							-								49.758.500
										-								-
		SUDIN PEMUDA DAN OLAHRAGA - JAKBAR	**317.737.050**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	317.737.050
1		Perencanaan Pemb. Gelanggang Olahraga Jl. Bandengan Utara III RT 009/12 Kel. Pekojan Kec. Tambora	317.737.050							-								317.737.050
										-								-
13		**DINAS PENANGGULANAN KEBAKARAN DAN PENY**	**412.291.327**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**114.858.314**	**-**	**-**	**297.433.013**
		DINAS PENANGGULANAN KEBAKARAN DAN PENY	**368.511.327**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**71.078.314**	**-**	**-**	**297.433.013**
1		Kantor Sektor Tanjung Priok	187.854.013							-								187.854.013
2		Pembangunan Kantor Sektor Tanjung Priok	12.084.000							-								12.084.000
3		Pembangunan Rumah Dinas	48.895.000							-								48.895.000
4		Pembangunan Masjid Rusun Pengadungan (Perencanaan)	48.600.000							-								48.600.000
5		Kantor Kepala Suku Dinas Pemadam Jakarta Barat	71.078.314							-					71.078.314			-
										-								-
		SUDIN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PEN	**43.780.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**43.780.000**	**-**	**-**	-
1		Biaya Perencanaan Pemagaran Kantor Sudin dan Asrama Matraman	43.780.000							-					43.780.000			-
										-								-
14		**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MEN**	**262.922.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**262.922.000**
		Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usa	**262.922.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**262.922.000**
1		Perencanaan Penyediaan untuk Pengembangan	262.922.000		-					-			-					262.922.000
										-								
15		**DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN**	**1.323.526.899**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.349.250**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1.436.876.149**
		DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN	**899.692.774**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113.349.250**	**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**1.013.042.024**
1		Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Jakarta Timur	106.895.000							-								106.895.000
2		Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Tanjung Barat Jakarta Selatan	100.000.000							-								100.000.000
3		Tahap Perencanaan Pembangunan TC. Pertanian Klender Jakarta Timur	169.275.375							-								169.275.375
4		Tahap Perencanaan Pembangunan Kamal Muara Jakarta Utara	46.939.750							-								46.939.750
5		Tahap Perencanaan Pembangunan Pulau Pari Kepulauan Seribu	72.659.125							-								72.659.125
6		Tahap Perencanaan Pembangunan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu	74.064.375							-								74.064.375
7		Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Cengkareng Timur Jakarta Barat	48.886.750							-								48.886.750
8		Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Penilaian Tanah JL. Gintung Tanjung Barat Jakarta Selatan	97.864.250							-								97.864.250
9		Tahap Kajian Pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan Penilaian Tanah JL. Joe Lenteng Agung Jakarta Selatan	97.864.250							-								97.864.250
10		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.483.787							-								42.483.787
11		Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	42.760.112							-								42.760.112
12		Perencanaan ex- pelelangan ikan							113.349.250	-								113.349.250
										-								
		Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perika	**265.559.500**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**265.559.500**
1		Rehab gedung serbaguna (perencanaan)	169.958.500							-								169.958.500
2		Pembangunan rumah jaga (perencanaan)	95.601.000							-								95.601.000
										-								
		Unit Pengelola Peredaran dan Pemanfaatan Hasil Hu	**101.363.375**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**		**-**	**-**		**-**	**-**	**-**	**101.363.375**
1		Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah Kayu di TPK Pondok Pinang	31.347.250							-								31.347.250
2		Dokumen Tender Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah Kayu di TPK Pondok Pinang	545.000							-								545.000
3		Honor Pejabat Pengadaan Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah Kayu di TPK Pondok Pinang	1.030.000							-								1.030.000
4		Perencanaan Pembangunan Jalan di TPK Ujung Menteng	21.983.500							-								21.983.500
5		Dokumen Tender Perencanaan Pembangunan Jalan di TPK Ujung Menteng	540.000							-								540.000
6		Honor Lelang Perencanaan Pembangunan Jalan di TPK Ujung Menteng	1.030.000							-								1.030.000
7		Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor UPT Pusat Perkayuan	9.285.375							-								9.285.375
8		Dokumen Tender Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor UPT Pusat Perkayuan	542.000							-								542.000
9		Honor Lelang Perencanaan Pembangunan Pagar Kantor UPT Pusat Perkayuan	1.030.000							-								1.030.000

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
10		Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase TPK Pusat Perkayuan	15.415.125							-								15.415.125
11		Dokumen Tender Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase TPK Pusat Perkayuan	540.000							-								540.000
12		Honor Lelang Perencanaan Pemeliharaan Saluran Drainase TPK Pusat Perkayuan	1.030.000							-								1.030.000
13		Perencanaan Relokasi Ruang Mesin Pengawet Kayu TPK Sukapura	15.470.125							-								15.470.125
14		Dokumen Tender Perencanaan Relokasi Ruang Mesin Pengawet Kayu TPK Sukapura	545.000							-								545.000
15		Honor Lelang Perencanaan Relokasi Ruang Mesin Pengawet Kayu TPK Sukapura	1.030.000							-								1.030.000
										-								-
		Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan -	**56.911.250**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	**56.911.250**
1		Pengadaan Lahan RTH Untuk Hutan Kota Kel. Setu Jakarta Timur	52.311.250							-								52.311.250
2		Pengadaan Lahan RTH Untuk Hutan Kota Jl. Tipar Pekayon Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur	4.600.000							-								4.600.000
										-								-
16		**DINAS PELAYANAN PAJAK(GABUNGAN)**	**16.095.550.102**	-	-	-	-	-		-		-	-	**4.811.413.531**	-	-	**11.284.136.571**
		DINAS PELAYANAN PAJAK	**16.095.550.102**	-	-	-	-	-		-		-	-	**4.811.413.531**	-	-	**11.284.136.571**
1		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Mampang Prapatan	125.910.000							-				125.910.000			-
2		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Pesanggrahan	125.910.000							-				125.910.000			-
3		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Grogol Petamburan	125.910.000							-				125.910.000			-
4		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Cipayung	104.810.000							-				104.810.000			-
5		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Ciracas	104.810.000							-							104.810.000
6		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Koja	125.910.000							-				125.910.000			-
7		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Kelapa Gading	125.910.000							-				125.910.000			-
8		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Penjaringan	125.910.000							-							125.910.000
9		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Pasar Minggu	3.215.435.607							-							3.215.435.607
10		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Pancoran	2.925.447.879							-							2.925.447.879
11		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Cilandak	65.000.000							-							65.000.000
12		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Kembangan	65.000.000							-							65.000.000
13		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Palmerah	65.000.000							-							65.000.000
14		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Kalideres	65.000.000							-							65.000.000
15		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Duren Sawit	704.347.825							-							704.347.825
16		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Ciliincing	3.923.185.260							-							3.923.185.260
17		Bangunan Gedung Permanen Kantor UPPD Kebayoran Lama	25.000.000							-							25.000.000
18		Bangunan Gedung Permanen	4.077.053.531							-				4.077.053.531			-
										-							-
17		**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN(GABUNGA**	**31.720.694.318**	**248.499.875**	**25.687.426.630**	-	-	-		-		-	**25.687.426.630**	-	-	-	**31.969.194.193**
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	**25.687.426.630**	-	-	-	-	-		-		-	**25.687.426.630**	-	-	-	**-**
1		Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan Permanen	25.687.426.630		-					-			25.687.426.630				-
										-							-
		Unit Pengelola Anjungan dan Informasi	**5.931.037.688**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**5.931.037.688**
1		Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Lanjutan	5.885.485.148							-							5.885.485.148
2		Pekerjaan Rumah Delman	45.552.540							-							45.552.540
										-							-
		Unit Pengelola Kawasan Perkampungan Budaya Be	-	-	**25.687.426.630**	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**25.687.426.630**
1		Mess/Wisma/Bungalaw/Tempat Peristirahatan permanen			25.687.426.630					-							25.687.426.630
										-							-
		Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Jakut	-	**248.499.875**	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**248.499.875**
1		Perencanaan Pembangunan Gedung Kesenian	-	37.295.500						-							37.295.500
2		Perencanaan Pembuatan gapura di Kawasan Toegoe	-	23.375.000						-							23.375.000
3		Perencanaan pembangunan 4 gapura di jakut	-	59.440.125						-							59.440.125
4		Perencanaan dan pengawasan penyempurnaan pembangunan komplek rumah si pitung	-	128.389.250						-							128.389.250
										-							-
		Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu	**102.230.000**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**102.230.000**
1		Pembangunan Plaza di Pulau Tidung	51.170.000							-							51.170.000
2		Pembangunan Plaza di Pulau Pramuka	51.060.000							-							51.060.000
										-							-
18		**KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAG**	**1.480.686.029**	**519.681.864**	-	**1.639.653.552**	-	-		-		-	-	-	-	-	**3.640.021.445**
		KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASATWA RAG	**1.480.686.029**	**519.681.864**	-	**1.639.653.552**	-	-		-		-	-	-	-	-	**3.640.021.445**
1		Rehab Kandang Mamalia Kecil (Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan)	4.824.100							-							4.824.100
2		Rehab Kandang Binturong (Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan)	4.571.900							-							4.571.900
3		Rehabilitasi Terarium (Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan)	5.530.000							-							5.530.000
4		Perencanaan Paving Block	13.957.000							-							13.957.000
5		Perbaikan Jalan Paving Block	1.447.831.429							-							1.447.831.429
6		Kapitalisasi Belanja Modal (Honor Panitia Pengadaan Barang dan Jasa)	250.000							-							250.000
7		Jaringan Distribusi Air	3.721.600							-							3.721.600
8		Rehab Pagar Keliling TMR				1.639.653.552				-							1.639.653.552
9		Rehab Turap kali Serua		519.681.864						-							519.681.864
										-							-
19		**BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH(GA**	**42.536.193.050**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**42.536.193.050**
		BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	**42.447.450.550**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**42.447.450.550**
1		Pembangunan Gedung Blok A Pulomas	25.061.600.000							-							25.061.600.000
2		Pembangunan Gedung Blok B Cikini	14.533.698.000							-							14.533.698.000
3		Pembangunan Konstruksi/Pembelian Gedung KPAK Jakarta Selatan	2.852.152.550							-							2.852.152.550
										-							-
		Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah - Jaksel	**88.742.500**	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	**88.742.500**
1		Perencanaan Pembangunan (X-1) Gedung Kantor	88.742.500							-							88.742.500
										-							-
20		**Kota Administrasi Jakarta Utara(GABUNGAN)**	**18.494.986.871**	**14.544.107.724**	-	-	-	-		-		-	-	**11.758.182.688**	-	-	**21.280.911.907**

No	Reke	Nama Kegiatan/Pekerjaan	SALDO PER 31 DESEMBER 2015	MUTASI														SALDO PER 31 DESEMBER 2016
				PENAMBAHAN									PENGURANGAN					
				Reklasifikasi dari Belanja Modal Tahun 2016	Transfer Masuk dari SKPD Lain	Pengadaan dari Dana Operasional BLUD	Hutang Pihak Ke-3	Penambahan dari Uang Muka	Kapitalisasi dari Beban Jasa	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	Koreksi Kurang Catat Nilai	Transfer Keluar ke SKPD Lain	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2016 ke Beban Jasa	Reklasifikasi KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	Belanja Modal sebelum Tahun 2016	Koreksi Lebih Catat Nilai	
		Kota Administrasi Jakarta Utara	**18.494.986.871**	**14.544.107.724**	-	-	-	-		-		-	-		**11.758.182.688**	-	-	**21.280.911.907**
1		Lanjutan Pembangunan Kantor Lurah Koja	6.571.518.283							-								6.571.518.283
2		Rehab Total Kantor Lurah Kapuk Muara	6.377.033.013							-					6.377.033.013			-
3		Rehab Total Kantor Lurah Klp Gading Barat	5.381.149.675							-					5.381.149.675			-
		Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading	165.285.900							-								165.285.900
4		PENAMBAHAN		14.544.107.724						-								14.544.107.724
										-								-
21		**Kota Administrasi Jakarta Selatan(GABUNGAN)**	**26.648.575.500**	-	-	-	-	-		-		-	-		**24.711.078.500**	-	-	**1.937.497.000**
		Kota Administrasi Jakarta Selatan	**26.648.575.500**	-	-	-	-	-		-		-	-		**24.711.078.500**	-	-	**1.937.497.000**
1		Pemb. Gd Ktr Lurah Kalibata	1.937.497.000							-								1.937.497.000
2		Pemb. Gd Ktr Lurah Melawai	5.818.637.000							-					5.818.637.000			-
3		Pemb. Gd Ktr Lurah Pesanggrahan	6.287.981.500							-					6.287.981.500			-
4		Pemb. Gd Ktr Lurah Rawajati	6.239.635.000							-					6.239.635.000			-
5		Pemb. Gd Ktr Lurah Kebon Baru	6.364.825.000							-					6.364.825.000			-
										-								-
22		**Kota Administrasi Jakarta Timur(GABUNGAN)**	**40.585.676.917**	**7.347.578.508**	-	-	-	-		-		-	-		**38.991.543.704**	-	-	**8.941.711.721**
		Kota Administrasi Jakarta Timur	**40.585.676.917**	**7.347.578.508**	-	-	-	-		-		-	-		**38.991.543.704**	-	-	**8.941.711.721**
1		Perencanaan Rehab Sedang Kantor Kec. Pulogadung	16.462.050							-								16.462.050
2		Perencanaan Gedung Parkir Walikota Jakarta Timur	497.155.750							-					497.155.750			-
3		Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Ciracas	43.510.000							-								43.510.000
4		Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Utan Kayu Utara	43.400.000							-								43.400.000
5		Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Makasar Berkonsep Hemat Energi dan Ramah Lingkungan	301.171.000							-								301.171.000
6		Rehab Total Kantor Camat Ciracas	11.801.373.062							-					11.754.695.500			46.677.562
7		Pembangunan Gedung Parkir Komplek Kantor Walikota Jakarta Timur	18.794.402.880							-					18.794.402.880			-
8		Penyesuaian Perencanaan Gedung Parkir Kantor Walikota Jakarta Timur	32.318.000							-					32.318.000			-
9		Rehab Total Kantor Camat Makasar	8.977.884.174							-					7.912.971.574			1.064.912.600
10		Rehab Total Kantor Lurah Utan Kayu Utara	78.000.001							-								78.000.001
11		Kelurahan Pondok Kopi		5.684.572.957						-								5.684.572.957
12		Kelurahan Lubang Buaya		778.435.188						-								778.435.188
13		Kelurahan Cilangkap		884.570.363						-								884.570.363
										-								-
23		**Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. S**	**84.535.189.400**	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	**84.535.189.400**
		Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Se	**84.535.189.400**	-	-	-	-	-		-		-	-		-	-	-	**84.535.189.400**
1		Landasan Pacu Pesawat Terbang Permukaan Beton	84.535.189.400							-								84.535.189.400
										-								-
		JUMLAH	2.629.578.816.583,00	2.203.091.342.900,00	25.687.426.630,00	1.639.653.552,00	626.332.400,00	87.854.000.366,00	4.302.863.304,00	63.702.281.777,00	13.332.328.282,00	78.215.380.634,00	25.687.426.630,00	226.215.000,00	318.890.889.896,00	5.485.606.166,00	131.136.040.818,00	4.626.604.247.918

Lampiran 10

DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT, BTO, DAN KSO
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Bangunan	Nilai Aset Kerjasama BTO	Nilai Aset Kerjasama BOT	Nilai Aset Kerjasama KSO	Keterangan
1	2	3	4	6	5	7	8	9	9
I	**BPMP**								
1	PT. Bakrie Investindo	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Tanah	2.155.516.125.000,00	41.990.830.572,00	-	2.197.506.955.572,00	-	-
2	PT. Metropolitan Kencana	JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2	Jembatan	-	32.924.000.000,00	-	-	-	-
3	PT. Langgeng Ayom Lestari	Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M	Tanah Terminal	537.964.575.000,00	47.701.292.300,00	585.665.867.300,00	-	-	Bangunan belum diserahkan
4	PT. Gerak Maju Abadi	Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro	Gedung	18.243.975.000,00	1.900.000.000,00	-	20.143.975.000,00	-	-
5	PT. Duta Pertiwi	JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP	Jembatan	-		-	-	-	-
6	PT. Duta Pertiwi	JPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl. Aquarium Jakarta Pusat	Jembatan	-	20.127.253.186,90	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
7	PT. Duta Pertiwi	Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu	Jembatan	-	50.409.075.784,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
8	PT. Kempas Indah Indonesia		Jembatan	-	-	-	-	-	-
9	PT. Rointa Eka Jaya	JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan	Jembatan	-	20.092.540.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
10	PT. Pacific Bangun Mas*	JPO Pasar Cipulir Jaksel	Jembatan	-	14.624.400.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
11	PT. Dharma Alumas Sakti	Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan	Gedung	577.563.000.000,00	17.321.632.000,00	-	594.884.632.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
12	PT. Bina Citra Tataswati*	JPO Pertokoan Glodok	Jembatan	-	9.768.000.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
13	PT. Bumi Grafika jaya	Pengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 M	Tanah	48.508.000.000,00	-	-	48.508.000.000,00	-	-
14	PT. Pacific Prima Buana Mas	Jl. Bekasi Barat Raya,Rawa Bunga Jaktim Nomor Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2	Tanah Bangunan Toko dan SRO	24.406.500.000,00	-	-	24.406.500.000,00	-	-
15	PT. AGB Tuna (pabrik es)	Pelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara Luas 2800 M2	Tanah	22.806.000.000,00	-	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
16	PT. AGB Tuna (cold storage)	Jl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara 3234 m2	Tanah	5.087.082.000,00	-	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
17	PT. Gading Raya Propertindo*	Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858M	Jembatan	71.438.310.000,00	123.467.608.000,00	-	71.438.310.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
18	PT. Duta Masa Nusa*	JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh Abang Blok D luas tanah 8310,52M	Jembatan	-	28.782.859.949,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
19	PT. Perwita Margasakti*	JPO Mal Ambasador Kuningan, Jembatan 1.338M dan 1.662M	Jembatan	-	46.794.087.000,00	-	-	-	Bangunan belum diserahkan
20	PT. Hotel Cikini Realty*	Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2 dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001	Tanah	49.334.175.000,00	70.000.000.000,00	-	49.334.175.000,00	-	Bangunan belum diserahkan
21	PT. Grand Indonesia*	Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.	Jembatan Multiguna	-	222.000.000.000,00	-		-	Bangunan belum diserahkan
		JUMLAH I		3.510.867.742.000,00	747.903.578.791,90	585.665.867.300,00	3.006.222.547.572,00	-	-
II	**Dinas Perhubungan (KSO)**								
1	PT. Suar Andika WU	Tempat Uji KIR di Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan	Tanah	-	-	-	-	-	-
2	PT. Nakia Dwipradita	Tempat uji KIR di Kedaung Angke Jakarta Barat Luas 23.350 m2	Tanah	21.388.600.000,00	-	-	-	21.388.600.000,00	
	BP LIP								
		JUMLAH II		21.388.600.000,00	-	-	-	21.388.600.000,00	

No	Nama Pihak Ketiga	Lokasi	Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Bangunan	Nilai Aset Kerjasama BTO	Nilai Aset Kerjasama BOT	Nilai Aset Kerjasama KSO	Keterangan
1	2	3	4	6	5	7	8	9	9
III	**BPKD (Eks Biro Perlengkapan)**								
1	Yayasan Pendidikan Tiara Kasih	Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar	Tanah Sekolah	6.223.392.000,00	6.254.605.100,00	12.477.997.100,00	-	-	-
2	Yayasan Pendidikan Tunas Muda*	Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan	Tanah Sekolah	9.896.145.000,00	4.403.361.276,00	14.299.506.276,00	-	-	-
3	PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*	Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Penjaitan Jatinegara Jakarta Timur	Tanah SPBU	7.128.225.000,00	4.883.444.400,00	12.011.669.400,00	-	-	-
4	PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)	Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan Sunter Jaya Tg.Priok Jakut	Tanah SPBU	11.564.560.000,00	4.313.800.000,00	15.878.360.000,00	-	-	-
5	Yayasan Patmos	Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	5.880.000.000,00	4.090.967.000,00	9.970.967.000,00	-	-	-
6	Yayasan Pusat Pelatihan E&P Indonesia	Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4 Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	10.387.500.000,00	6.600.000.000,00	16.987.500.000,00	-	-	-
7	PT. Pesona Marga Mandiri	Pembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi luas 3300m,Jl. Petak Baru Pasar pagi	Tanah	16.813.500.000,00	10.482.000.000,00	27.295.500.000,00	-	-	-
8	Yayasan Pendidikan Katolik Mardi Luhur*	Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 Joglo Kembangan Jakarta Barat	Tanah Sekolah	5.309.436.000,00	4.170.342.000,00	9.479.778.000,00	-	-	-
9	Yayasan Bukit Sion*	Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng Kembangan Jakbar	Tanah Sekolah	21.522.900.000,00	12.609.562.352,00	34.132.462.352,00	-	-	-
10	PT. Gama Investa Lestari	Komplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading Jakarta Utara	Tanah	195.432.825.000,00	101.658.000.000,00	297.090.825.000,00	-	-	-
11	PT. Wahana Sejahtera	Tanah Terminal Transit Cililitan	Tanah	17.550.000.000,00	1.226.000.000,00	-	18.776.000.000,00	-	-
12	Yayasan Tugasku	Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo Gadung Jaktim seluas 4000 M2	Tanah	12.400.000.000,00	12.000.000.000,00	24.400.000.000,00	-	-	-
13	Gereja Protestan Minahasa Sidang Yeremia Jakarta	Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading Barat Jakarta Utara.	Gereja	19.329.075.000,00	1.465.000.000,00	20.794.075.000,00	-	-	-
14	Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*	Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa gading Timur Jakarta Utara.	Masjid	13.326.720.000,00	11.105.600.000,00	24.432.320.000,00	-	-	-
15	Gereja Bethel Indonesia Jemaat Ecclesia*	Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat.	Gereja	6.039.936.000,00	3.080.986.780,00	9.120.922.780,00	-	-	-
16	Yayasan Pendidikan Pembangunan Bangsa*	Sarana Pendidikan di JL. Swadaya Kelurahan Duren Sawit Jakarta Timur.	Sekolah	3.675.936.000,00	-	3.675.936.000,00	-	-	-
17	Yayasan Darul Ma'arif*	Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.	Masjid	1.699.200.000,00	2.797.818.600,00	4.497.018.600,00	-	-	-
18	PT. Jaya Real Property	Jembatan Penyebrangan Multiguna di Daerah Senen Jakarta Pusat	Tanah Jalan	-	19.011.075.000,00		-	-	-
JUMLAH III				364.179.350.000,00	210.152.562.508,00	536.544.837.508,00	18.776.000.000,00	-	
JUMLAH I + II + III				3.896.435.692.000,00	958.056.141.299,90	1.122.210.704.808,00	3.024.998.547.572,00	21.388.600.000,00	
TOTAL ASET KERJASAMA BOT, BTO DAN KSO								**4.168.597.852.380,00**	

Lampiran 11

DAFTAR UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA (PFK) DI SKPD
PER 31 DESEMBER 2016

No.	NAMA SKPD/UKPD	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22	Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23	Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)	Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Jumlah Utang PFK di SKPD
1	2	3	4	5	7	8	9=3+4+5+6+7
1	PPKD	242.071.200	-	-	-	-	242.071.200
2	Sudin Tata Air - JAKBAR	36.508.677	7.619.177	733.240	-	19.962.098	64.823.192
3	Sudin Tata Air - JAKTIM	-	262.749	-	-	2.964.500	3.227.249
4	Unit Pengelola Perparkiran	-	10.942.403	21.623.432	-	181.066.511	213.632.346
5	Unit Pengelola Sistem Pengendalian Lalulintas	-	-	-	-	1.344.000	1.344.000
6	DINAS KESEHATAN	66.725.249	16.605.486	10.246.593	7.727	119.004.804	212.589.859
7	RSUD Pasar Minggu	-	2.129.166	120.000	-	14.194.437	16.443.603
8	Rumah Sakit Umum Kec. Kemayoran	-	(727.320)	-	-	2.661.532	1.934.212
9	Rumah Sakit Umum Kec. Sawah Besar	-	12.600	-	-	84.000	96.600
10	Rumah Sakit Umum Kec. Johar Baru	-	-	-	-	91.000	91.000
11	Rumah Sakit Umum Kec. Cilincing	-	734.500	-	-	5.077.000	5.811.500
12	Rumah Sakit Umum Kec. Kembangan	654.500	2.537.562	7.326.138	-	-	10.518.200
13	Rumah Sakit Umum Kec. Kalideres	-	-	32.268	-	-	32.268
14	Rumah Sakit Umum Kec. Mampang Prapatan	3.053.875	2.780.564	2.683.997	-	32.320.958	40.839.394
15	BLUD Puskesmas Kec. Menteng - Jakpus	-	5.236.837	-	-	28.492.565	33.729.402
16	BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - Jakpus	5.000	2.937.821	239.700	-	17.903.310	21.085.831
17	BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - Jakbar	440.763	-	-	-	-	440.763
18	BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - Jakbar	7.446.328	20.434.298	3.886.142	-	150.921.494	182.688.262
19	BLUD Puskesmas Kec. Palmerah - Jakbar	-	-	-	-	20.020	20.020
20	BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - Jaksel	96.714	-	-	-	-	96.714
21	BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - Jaktim	30.000	7.446.121	1.458.293	-	52.264.938	61.199.352
22	BLUD Puskesmas Kec. Matraman - Jaktim	54.507.392	13.733.857	3.678.253	-	119.466.548	191.386.050
23	Sudin Kesehatan - Kep. Seribu	-	-	1.833.620	-	2.818.000	4.651.620
24	BLUD RS Koja	46.380.643	12.365.461	5.398.864	1.119.587	21.806.638	87.071.193
25	BLUD RS Pasar Rebo	273.140.024	(2.726.110)	5.563.358	-	3.743.452	279.720.724
26	DINAS PENDIDIKAN	2.430.000	196.032	-	-	-	2.626.032
27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2.133.750	-	37.559	-	-	2.171.309
28	Kelurahan Sungai Bambu - Jakut	-	-	23.000	-	-	23.000
29	Kelurahan Kedaung Kali Angke - Jakbar	-	603.525	204.000	-	1.378.500	2.186.025
30	Kelurahan Wijaya Kesuma - Jakbar	41.065.620	-	-	-	-	41.065.620
31	Kelurahan Kota Bambu Utara - Jakbar	160.000	-	-	-	112.936	272.936
32	Kelurahan Pekojan - Jakbar	13.118.450	-	-	-	6.493.175	19.611.625
	SALDO PERHITUNGAN	**789.968.185**	**103.124.729**	**65.088.457**	**1.127.314**	**784.192.416**	**1.743.501.101**

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWA
PER 31 DESEMBER 2016

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
1	YAY. PENDIDIKAN ELKA	Tanah dan Bangunan berupa	179/2014	25/04/2014	5 Tahun	3	27.500.000	82.500.000,00
		15 Unit Gedung Sekolah	04/02/2014		23/03/2013			-
		Perum Kelapa Gading Permai dan			s.d			-
		Perum Sunter Hijau, Jak-Utr			22/03/2018			-
		(Sarana Pendidikan)						-
								-
2	Yayasan The Gandhi	Tanah	181/2014	26/03/2014	5 Tahun	24	27.777.778	666.666.667,00
	Memorial Internasional	Jalan Parang Tritis VI	04/02/2014		13/01/2014			-
	School	Kel. Ancol, Kec. Pademangan			s.d.			-
		Jakarta Utara			12/01/2019			-
		(Sarana Pendidikan)						-
								-
3	PT. Prima Indo Bahari	Tanah Areal Kawasan Pelabuhan	1547/2014	31/10/2014	5 tahun	6	14.603.637	87.621.823,00
		Muara Angke, Jakarta Utara	29/09/2014		15/06/2014			-
		(Coldstorage)			s.d			-
					14/06/2019			-
								-
4	PT. PEMBANGUNAN	Tanah dan Bangunan Gedung BP	748/2015	01/07/2015	5 Tahun	3	25.760.843	77.282.528,00
	JAYA ANCOL	Pantura, Jl. Lodan Timur Kel. Ancol	05/05/2015		05/04/2015			-
		Kec. Pademangan Jakarta Utara			s.d.			-
		(Perluasan Kantor DUFAN dan			04/04/2020			-
		Kegiatan Lainnya)						-
								-
5	KOPERASI PEGAWAI DINAS	Tanah	5/2016	25/1/2016	5 Tahun	2	19.583.333	39.166.667,00
	PERIKANAN	Di Areal Pasar Ikan Muara Angke	04/01/2016		18/2/2016			-
		Penjaringan Jakarta Utara			s.d.			-
		(SPBU)			17/2/2021			-
								-
6	PT. ASTRA DAIHATSU	Berupa Ruang Publik (Udara)	122/2016	18/03/2016	5 Tahun	12	6.625.000	79.500.000,00
		Jalan Gaya Motor Kel. S. Bambu	11/01/2016		01/02/2016			-
		Kec. Tj. Priok Jakarta Utara			s.d			-
		(Jembatan Penyebrangan			01/01/2021			-
		Barang)						-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
								-
7	PT. ALAM SEGAR JAYA	Tanah	1977/2011	28/2/2012	5 Tahun	2	13.424.338	26.848.677,00
		Pasar Ikan Muara Angke	20/12/2011		28/2/2012			-
		Kel. Pluit Kec. Penjaringan			s.d.			-
		Jakarta Utara			27/2/2017			-
		(Coldstorage dan Gudang						-
		Barang atau Mesin)						-
								-
8	YAY. ANCOL BARAT	Tanah	165/2012	12/04/2012	5 Tahun	3	2.679.738	8.039.215,00
		Parang Tritis IX Blok B4 Kel. Ancol	27/1/2012		12/04/2012			-
		Kec. Pademangan, Jakarta Utara			s.d.			-
		(Sarana Pendidikan)			11/04/2017			-
								-
9	PT. OBAYASHI KONTR.	Tanah			1 Tahun	3	37.500.000	112.500.000,00
	JOIN OPERASION	Jl. Ketel No. 1, Kel. Ancol			12/04/2016			-
		Kec. Pademangan Jakarta Utara			s.d.			-
		(Tempat menyimpan alat berat)			11/04/2017			-
								-
10	PT. PETROSS GAS	Tanah	71/2015	26/02/2015	5 Tahun	3	58.268.416	174.805.248,00
		Jln. Perintis Kemerdekaan JT	16/01/2015		31/03/2015			-
		Jln. Lingkar Luar Cengkareng JB			s.d.			-
		(SPBG)			30/03/2020			-
								-
11	YAYASAN SUHARGO	Tanah dan Bangunan Sarana	842/2012	25/6/2012	5 Tahun	6	8.833.333	53.000.000,00
	GONDOKUSUMO	Pendidikan	29/5/2012		25/6/2012			-
		Perum Taman Surya Blok MM			s.d			-
		Kel. Pegadungan Kalideres			24/6/2017			-
		Jakarta Barat						-
		(Sarana Pendidikan)						-
								-
12	PT. DAVALTI MUGI UTAMA	Tanah	1215/2012	19/10/2012	5 Tahun	2	44.712.726	89.425.451,00
	GASINDO	Jl. Daan Mogot N0. 94-95	13/08/2012		15/03/2012			-
		Kel. Kali Angke Kec. Cengkareng			s.d.			-
		Jakarta Barat			14/03/2017			-
		(SPBG)						-
								-
13	HIMPUNAN PENYAYANG	Sebagian Tanah dan Bangunan	880/2011	30/6/2011	5 Tahun	0	500.000	-
	BINATANG	Jl. Harsono RM. No. 10 Ragunan	13/06/2011		30/6/2011			-
		Jakarta Selatan			s.d.			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
					29/6/2016			-
								-
14	PT. ASRI KARYA	Tanah dan Bangunan Kolom Renang	608/2012	16/5/2012	5 Tahun	0	11.572.706	-
		dan Lapangan Tenis			01/01/2012			-
		Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1			s.d.			-
		Kel. Bintaro Kec. Pasanggrahan			31/12/2016			-
		Jakarta Selatan						-
		(Sarana Olahraga)						-
								-
15	YAYASAN PERGURUAN	Tanah dan Bangunan Sekolah	05/05/2014	19/06/2014	5 Tahun	1	12.500.000	12.500.000,00
	RAKYAT	Jl. Lampiri Raya No. 28	742/2014		02/02/2014			-
		Kel. Pd. Kelapa Kec. D. Sawit			s.d			-
		Jakarta Timur			01/02/2019			-
		(Sarana Pendidikan)						-
								-
16	YAY. DHARMA SISWA	Tanah dan Bangunan Sekolah	02/06/2014	08/12/2014	5 Tahun	4	4.166.667	16.666.667,00
		Blok B Perumahan Pulo Gebang	954/2014		27/04/2013			-
		Permai, Kel. Pulo Gebang, Kec.			s.d			-
		Cakung Jakarta Timur			26/04/2018			-
		(Sarana Pendidikan)						-
								-
17	PT. BANK MANDIRI	Tanah dan Bangunan	26-Agt-14	10/12/2014	5 Tahun	29	20.049.333	581.430.667,00
		Kantor BP2TKI	1360/2014		07/06/2014			-
		Jakarta Timur			s.d			-
		(Kantor Cabang Mandiri)			06/06/2019			-
								-
18	PT Lingkar Seni Indonesia	Tanah dan Bangunan Ex. Kantor Imigrasi	01/10/2012		5 Tahun	2	83.333.333	166.666.667,00
		Jl. Teuku Umar No. 1, Menteng	1529/2012	29/11/2012	10/03/2013			-
		Jakarta Pusat			s.d			-
		(Galeri Budaya dan Kunstring)			09/03/2018			-
								-
19	GEREJA TIBERIAS	Tanah	11/06/2013		5 Tahun	4	6.250.000	25.000.000,00
		Jl. Kelapa Nias Raya HT 60	918/2013	28/08/2013	14/05/2012			-
		Kelapa Gading			s.d			-
		(Sarana Ibadah/Gereja)			13/05/2017			-
								-
20	YAYASAN JEMA'AT SUNGAI JORDAN	Tanah	08/07/2014	15/09/2014	5 TAHUN	6	2.083.333	12.500.000,00
		Jl. Danau Indah Kelurahan Sunter Jaya	1126/2014		05/07/2012			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
		Kec. Tj. Priok			s.d			-
					04/07/2017			-
								-
21	KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN (KPPOP)	Tanah		19/06/2014	5 TAHUN	6	7.173.333	43.040.000,00
		Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung			19/06/2014			-
		Kec. Tanjung Priok			s.d			-
					18/06/2019			-
								-
22	PT KMC INDONESIA	Tanah		25/04/2014	5 TAHUN	4	6.666.667	26.666.667,00
		Jl. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Agung			25/04/2014			-
		Kec. Tanjung Priok			s.d			-
					25/04/2019			-
								-
23	Yayasan Al Hikmah Sunter Jaya	Tanah dan Bangunan			5 TAHUN	34	416.667	14.166.667,00
		Jl. Agung Timur 8 Blok O2, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok		31/10/2014	31/10/2014			-
					s.d			-
					30/10/2019			-
								-
24	MAJELIS JEMAAT GEREJA KRISTEN INDONESIA PURI INDAH	TANAH	1421/2014	26/02/2014	5 Tahun	32	2.916.667	93.333.333,00
		Jl. Pulau Pantara IV Blok N2 Perum Permata	11/09/2014		11/09/2014			-
		Buana, Kel. Kembangan Utara			s.d			-
					10/09/2019			-
								-
25	YAYAYASAN PUTERA BAHAGIA	Tanah dan Bangunan	1689/2014		5 Tahun	5	19.292.656	96.463.281,00
		Desa Palasari Kec. Pacet, Jawa barat	27/10/2014	11/12/2014	14/06/2014			-
					s.d			-
					13/06/2019			-
								-
26	DPP PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU DANGDUT INDONESIA (DPP PAMMI)	Sebagian Gedung Nyi Ageng Serang		29/04/2014	5 Tahun	4	833.333	3.333.333,00
					29/04/2014			-
					s.d			-
					28/04/2019			-
								-
27	PT. ALFA INDAH SPORTINDO	Tanah dan Bangunan Sarana	1583/2012	11/07/2012	5 Tahun	2	6.838.417	13.676.834,00

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
		Olahraga	10/01/2012		15/3/2012			-
		Kompleks Perum Taman Alfa Indah			s.d			-
		Blok A. 10 Joglo Jakarta Barat			14/3/2017			-
		(sarana Olahraga)						-
								-
28	PERUSAHAAN UMUM DAMRI	Sebagian Tanah Eks Pool Depo K			5 Tahun	4	41.666.667	166.666.667,00
		Jl. Daan Mogot Pesing 94-95		22/11/2013	11/01/2012			-
		Kedaung Angke, Jakarta Barat			s.d			-
		Pool Busway Koridor I dan			31/10/2017			-
		Koridor 8						-
								-
29	Yayasan Tanimbar Lestari	Tanah dan Gedung	1494/2013	23/12/2013	5 Tahun	04/01/1900	993.637	3.974.548,00
		Blok F/5 Perumahan Citra Garden 1	25/09/2013		05/05/2012			-
		Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat			s.d			-
		Sekolah TK			04/05/2017			-
								-
30	Happyday Utama Indonesia	Tanah dan Bangunan	182/2014	30/04/2014	5 Tahun	12	27.083.333	325.000.000,00
		Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Kel. Kebon Pala	04/02/2014		23/12/2013			-
		Kec. Gambir, Jakarta Pusat			s.d			-
		Restoran			22/12/2018			-
								-
31	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam Al-Fa	Tanah dan Bangunan	540/2014	19/06/2014	5 Tahun	9	1.985.027	17.865.240,00
		Komp. Perumahan Karyawan DKI Jkt	04/04/2014		18/09/2013			-
		Blok M, Kel. Pondok Kelapa			s.d			-
		Kec. Duren Sawit Jakarta Timur			17/09/2018			-
		Balai Pertemuan Warga						-
								-
32	PT. T Energy	Sebagian Tanah	293/2014	10/11/2014	5 Tahun		27.895.833	-
		Terminal Bus Pinang Ranti Jl. Raya	18/08/2014		01/12/2013			-
		Pondok Gede Jakarta Timur			s.d			-
		SPBG			01/12/2018			-
								-
33	Yayasan Al-Amanah Sunter Agung	Tanah dan Bangunan	1363/2014	31/10/2014	5 Tahun	0	4.583.333	-
		Jl. Sunter Karya Selatan IV, Blok H RT.02	26/08/2014		09/01/2014			-
		RW. 13 Kel. Sunter Agung, Kec. Tanjung			s.d			-
		Priok, Jakarta Utara			08/01/2019			-
		Sarana Pendidikan						-
								-
34	PT. Antilope Madju Puri Indah	Tanah dan Bangunan	1691/2014	10/12/2014	5 Tahun	11	32.600.321	358.603.533,00

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
		Pasar Puri Indah Jakarta Barat	27/10/2014		30/11/2013			-
		Pasar			s.d			-
					29/11/2018			-
								-
35	Koperasi Putri Salju	Tanah	1260/2012	22/11/2012	5 Tahun	11	3.892.619	42.818.804,00
		Areal Pasar Ikan Muara Angke	23/08/2012		22/11/2012			-
		Jakarta Utara			s.d			-
					21/11/2017			-
								-
36	PT. Gagas Energi Indonesia	Tanah	1039/2016	18/07/2016	5 Tahun	8	27.579.947	220.639.574,00
		Lahan Parkir Taman Irti Monas	19/04/2016		02/09/2015			-
		Jl. Medan Merdeka Selatan			s.d			-
		Jakarta Pusat			01/09/2020			-
		SPBG						-
								-
37	PT. PLN Persero	Sebagian Lahan	69/2015	04/02/2015	5 Tahun	37	2.418.995	89.502.824,00
		Jl. Sriwijaya Raya No. 47, Kel. Selong	16/01/2015		04/02/2015			-
		Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan			s.d			-
		Gardu PLN			03/02/2020			-
								-
38	Yayasan Abdi Karya	Tanah	59/2015	26/02/2015	5 Tahun	2	36.918.950	73.837.900,00
		Blok EE4, Perumahan Taman Ratu Indah	14/01/2015		26/02/2015			-
		Kel. Duri Kepa Kec. Kebon Jeruk			s.d			-
		Jakarta Barat			25/02/2020			-
		Sarana Pendidikan						-
								-
39	PT. Holcim Beton	Sebagian Tanah	418/2015	08/04/2015	5 Tahun	40	91.666.667	3.666.666.667,00
			19/03/2015		08/05/2015			-
					s.d			-
					07/05/2020			-
								-
40	KOPERASI SERBA USAHA CEGER JAYA	TANAH DAN BANGUNAN	2019/2014	04/02/2015	5 TAHUN	4	2.500.000	10.000.000,00
		RT. 001 RW 02, KEL. CEGER	26/11/2014		25/04/2013			-
		, KEC. CIPAYUNG, KOTA ADM. JAKTIM			S.D			-
					24/04/2018			-
								-
41	PT. Nusantara Sejahtera Raya	Sebagian Tanah dan Bangunan	303/2015	1737/-076.11	5 TAHUN	7	20.416.667	142.916.667,00
		Kompleks Taman Ismail Marzuki	27/02/2015	05/05/2015	19/08/2014			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
		Jl. Cikini Raya No. 73 kel. Cikini Kec.			S.D			-
		Menteng Jakarta Pusat			18/08/2019			-
		(Bioskop)						-
								-
42	RS. Atmajaya	Tanah dan Bangunan	735/2013		5 TAHUN	8	416.667	833.333,00
		Rusunawa Penjaringan Jakarta Utara	06/05/2013	29/08/2013	29/08/2013			-
		(Balkesmas)			s.d			-
					29/08/2018			-
								-
43	PT. Balats Dwi Tunggal	Sebagian Tanah	646/2015		2 TAHUN	5	14.654.968	73.274.839,00
		Jl. Gerbang Pemuda No. 1, Kel. Gelora	23/04/2015	26/05/2015	26/05/2015			-
		Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat			s.d			-
		(Restauran)			25/05/2017			-
								-
44	Yayasan Pendidikan Citra Kasih	Tanah dan Bangunan	1748/2012	19/04/2012	5 Tahun	3	18.333.333	183.333.333,00
		Perum Citra 5 Ext. Blok B.I. 11-12	01/12/2012		12/04/2012			-
		Kel. Pegadungan Kec. Kalideres Jak-bar			s.d			-
		(Sarana Pendidikan)			11/04/2017			-
								-
45	Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara	Tanah dan Bangunan	592/2015	05/05/2015	5 Tahun	4	416.667	1.666.667,00
		Jalan Melur I/4 Rt.006/013, Kel. Koja,	15/04/2015		05/05/2015			-
		Kec. Koja, Kota Administrasi Jakut			s.d			-
		(Kantor)			04/05/2020			-
								-
46	Yayasan Diannanda	Tanah dan Bangunan (SD)	590/2015		5 Tahun	9	30.122.780	271.105.017,00
		Blok N-3, Perumahan Citra Garden II,	15/04/2015	08/06/2015	26/09/2013			-
		Kelurahan Pegadungan, Kec. Kalideres			s.d			-
		Kota Administrasi Jakarta Barat			27/09/2018			-
								-
47	Yayasan Pelita Harapan	Tanah dan Bangunan	725/2015		5 Tahun	42	62.500.000	2.625.000.000,00
		Perumahan Daan Mogot Baru, Blok Na-1	30/04/2015	17/06/2015	01/07/2015			-
		Kelurahan Kali Deres, Kec. Kalideres,			s.d			-
		Kota Administrasi Jakarta Barat			30/06/2020			-
								-
48	Jamkrida	Sebagian Bangunan BPBUMDPM	724/2015	2593/-076.35	2 TAHUN	6	1.307.234	7.843.406,00
			30/04/2015	01/07/2015	01/07/2015			-
					s.d			-
					30/06/2017			-
								-
49	PT Surya Jaya Mandiri	Sebagian Bangunan (TPO)	1137/2015	2712/-1.754.12	5 TAHUN	42	1.833.333	77.000.000,00

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
		Sebagian Bangunan Tempat Penyeberangan	19/06/2015	09/07/2015	09/07/2015			-
		Orang (Tpo) Kota Yang Terletak Di Jalan			s.d			-
		Pintu Besar Utara, Kelurahan Pinangsia			08/07/2020			-
		Kecamatan Taman Sari						-
								-
50	Yayasan Al-Muhsinin Alfa Indah	Tanah dan Bangunan	535/2014	19/06/2014	5 TAHUN	7	8.333.333	58.333.333,00
		Perumahan Taman Alfa Indah Blok G1	04/04/2014		23/07/2013			-
		Kel. Joglo, Kec. Kembangan			s.d			-
		Kota Adm. Jakarta Barat			23/07/2018			-
								-
51	Yayasan Rumah Bersalin Bidara	Tanah	966/2015		5 TAHUN	6	1.666.667	10.000.000,00
		Jalan Otista Raya Nomor 64	27/05/2015	29/07/2015	16/06/2014			-
		Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara			s.d			-
		Kota Administrasi Jakarta Timur			15/06/2019			-
								-
52	Yayasan Al-Hidayah	Tanah	542/2014	19/06/2014	5 TAHUN	2	416.667	833.333,00
		Jl. Tari Klasik Rt. 005 Rw. 08	04/04/2014		14/03/2013			-
		Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading			s.d			-
		Kota Adm Jakarta Utara			14/03/2018			-
								-
53	Yayasan Pendidikan Kemurnian	Tanah dan Bangunan	541/2014	19/06/2014	5 TAHUN	4	9.925.092	39.700.369,00
		Perumahan Citra Garden II, Blok B6	04/04/2014		23/04/2013			-
		Dan Blok A3, Kota Adm. Jakarta Barat			s.d			-
					22/04/2018			-
								-
54	UD Lautan Mutiara	Sebagian Tanah dan Keseluruhan Bangunan	645/2015	12/06/2015	5 TAHUN	4	37.453.333	149.813.333,00
		Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke	23/04/2015		23/04/2014			-
		Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan			s.d			-
		Kota Administrasi Jakarta Utara			22/04/2019			-
								-
								-
55	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	Tanah	1207/2013	18/09/2013	5 TAHUN	9	14.887.700	133.989.300,00
	Indonesia	Jalan Pulau Tidung Perumahan Permata	25/07/2013		18/09/2013			-
		Buana Kel. Kembangan Utara			s.d			-
		Kec. Kembangan			17/09/2018			-
								-
56	Yayasan Pendidikan Da'wah Islam	Tanah	336/2015	1377/-076.25	5 TAHUN	3	416.667	1.250.000,00
	Al-Falah	Komplek Perumahan Karyawan Pemerintah	05/03/2015	08/04/2015	08/04/2015			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
		DKI Jakarta Blok M Kelurahan Pondok Kelapa			s.d			-
		Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur			07/04/2020			-
		Masjid						-
								-
57	Yayasan Pendidikan Cengkareng 1	Tanah dan Bangunan	1726/2015	3924/-076.11	5 TAHUN	32	17.500.000	560.000.000,00
		Kawasan Rumah Susun Cengkareng No. 2	26/08/2015	01/10/2015	18/08/2014			-
		Kel. Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng			s.d			-
		Kota Administrasi Jakarta Barat			18/08/2019			-
								-
58	Yayasan Sapta Nawami Bhakti	Tanah dan Bangunan	569/2013	27/06/2013	5 TAHUN	10	6.250.000	62.500.000,00
		Jl. Harsono Rm Nomor 28, Kel. Ragunan	16/03/2013		15/10/2012			-
		Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan			s.d			-
					15/10/2017			-
								-
59	Yayasan Masjid Raya Al-Musyawarah	Tanah dan Bangunan	1359/2014	14/10/2014	5 TAHUN	9	8.333.333	75.000.000,00
		Jl. Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B-2	26/08/2014		14/10/2014			-
		Kel. Kelapa Gading Timur			s.d			-
		Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara			13/10/2019			-
								-
60	Perkumpulan Pemberantasan	Tanah						-
	Tuberkolosis Indonesia (PPTI)	Tanah di Areal Pasar Ikan Muara Angke	1241/2011	18/10/2011	5 TAHUN	10	416.667	4.166.667,00
	(PKS sedang Proses Perpanjangan)		19/08/2011		18/10/2011			-
					s.d			-
					17/10/2016			-
								-
61	Yayasan Pendidikan Rasa Sayang	Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan	1862/2015	4335/-076.76	5 TAHUN	10	4.858.333	48.583.333,00
	Mandiri	Perumahan Taman Ratu, Blok F-7	04/09/2015	26/10/2015	26/10/2015			-
		Dan Blok F-13 No. 2, Kelurahan Duri Kepa			s.d			-
		Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi JakBar			25/10/2020			-
								-
62	Yayasan Meek Nusantara	Sebagian Bangunan	2027/2015	3923/-076.73	3 TAHUN	19	750.000	14.250.000,00
		Jalan Marunda Pulo Rt 003 Rw 007,	25/09/2015	01/10/2015	27/07/2015			-
		Kel. Marunda Kec. Cilincing Jakarta Utara			s.d			-
					26/06/2018			-
								-
63	Dewan Kerajinan Nasional Provinsi	Sebagian Bangunan	516/2014	26/05/2014	5 TAHUN	5	83.333	416.667,00
	DKI Jakarta (Dekranasda)	Lantai Dasar Blok G Gedung Balaikota	04/04/2014		26/05/2014			-
		Provinsi DKI Jakarta			s.d			-
					25/05/2019			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
								-
64	Yayasan Al-Ikhwan Meruya	Tanah	1927/2015	4405/-076.25	5 TAHUN	10	883.333	8.833.333,00
		Taman Meruya Ilir Utara, Blok I-8	10/09/2015	29/10/2015	29/10/2015			-
		Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan			s.d			-
		Jakarta Barat			28/10/2020			-
								-
65	Swadaya Panduartha	Tanah	1420/2014	30/10/2014	5 TAHUN	10	8.333.333	83.333.333,00
		Jl. Kumala Artha Gading Blok D-11	11/09/2014		30/10/2014			-
		Kota Adm. Jakarta Utara			s.d			-
					30/10/2019			-
								-
66	PD Sumber Alam	Tanah	687/2016	1676/-076.25	5 TAHUN	2	5.000.000	10.000.000,00
		Areal Pasar Ikan Muara Angke Jak-Ut	14/04/2016	14/04/2016	16/02/2016			-
					s.d			-
					15/02/2021			-
								-
67	Koperasi Pegawai Dinas Pelayanan	Sebagian Ruangan	250/2015	08/04/2015	5 TAHUN	1	6.666.667	6.666.667,00
	Pajak Provinsi DKI Jakarta	Gedung Dinas Teknis Abdul Muis,	16/02/2015		31/01/2013			-
		Kantor Samsat Jakarta Pusat dan Utara,			s.d			-
		Kantor Samsat Kota Administrasi Jakbar			30/01/2018			-
		dan Jaktim						-
								-
68	Yayasan Purna Bhakti Abdi Negara	Tanah dan Bangunan	1358/2014	31/10/2014	5 TAHUN	10	10.416.667	104.166.667,00
		Perumahan Taman Pegangsaan Indah Dan	26/08/2014		19/10/2013			-
		Perumahan Gading Griya Lestari			s.d			-
		Kec. Kelapa Gading Kota Adm. Jakarta Utara			18/10/2018			-
								-
69	Yayasan Harapan Bangsa	Tanah dan Bangunan	1920/2014	27/01/2015	5 TAHUN	1	5.150.000	5.150.000,00
		Blok A.6, Perumahan Citra 3 Ekstension,	19/11/2014		27/01/2015			-
		Kelurahan Pegadungan, Kec. Kalideres,			s.d			-
		Kota Adm. Jakarta Barat			26/01/2020			-
								-
70	Koperasi Perikanan Mina Jaya	Sebagian Tanah	1294/2014	14/10/2014	5 TAHUN	9	1.217.233	10.955.100,00
		Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke	18/08/2014		14/10/2014			-
		Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jak-Ut			s.d			-
					13/10/2019			-
								-
71	Yayasan Pelita Bangsa	Tanah dan Bangunan	2512/2015	23/12/2015	5 TAHUN	48	38.888.889	1.866.666.672,00
		Perumahan Citra 5, Blok E-7 Citra	19/11/2015		23/12/2015			-
		Garden City, Kelurahan Pegadungan,			s.d			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
		Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat			22/12/2020			-
								-
72	PT Bank DKI (22 ATM dan Loket)	Sebagian Tanah dan Bangunan	1278/2015	06/10/2015	5 TAHUN	45	183.333	8.250.000,00
		22 Kelurahan di 5 Wilayah Kota Administrasi	09/07/2015		06/10/2015			-
		Provinsi DKI Jakarta			s.d			-
					05/10/2020			-
								-
73	PT Bank DKI (58 ATM dan Loket)	Sebagian Tanah dan Bangunan	2054/2015	28/12/2015	5 TAHUN	48	483.333	23.200.000,00
		58 Kelurahan di 5 Wilayah Kota Administrasi	30/09/2015		28/12/2015			-
		Provinsi DKI Jakarta			s.d			-
					27/12/2020			-
								-
74	PT Multi Kontrol Nusantara	Sebagian Bangunan Gedung Nyi Ageng	613/2015	15/07/2015	5 TAHUN	11	10.003.139	110.034.527,00
		Serang	21/04/2015		14/12/2014			-
					s.d			-
					13/12/2019			-
								-
75	PT Bank DKI	Sebagian Bangunan yang terletak di		530/-076.11	5 TAHUN	0	24.769.676	-
		Lantai Dasar Blok C Walikota Jak-Pus	11/01/2015	03/02/2016	28/12/2015			-
					s.d			-
								-
								-
								-
					27/12/2021			-
								-
76	Yayasan Safa Marwah	Tanah dan Bangunan		2108/-076.25	5 TAHUN	53	416.667	22.083.333,00
		Jalan Muzdalifah, Komplek Perumahan Qarya		30/05/2016	30/05/2016			-
		Srengseng, Kembangan Jakbar			s.d			-
					29/05/2021			-
								-
77	Yayasan Kanker Indonesia Provinsi	Tanah dan Bangunan		2018/-076.11	5 TAHUN	52	833.333	43.333.333,00
	DKI Jakarta	Jalan Kramat Sawah, Kelurahan Paseban		09/05/2016	09/05/2016			-
		Kecamatan Senen			s.d			-
					08/05/2021			-
								-
78	PT Pertamina Gas	Ruang Bawah Tanah		1973/-1.823.3	5 TAHUN	52	21.666.667	1.126.666.667,00
		Areal Pergudangan Jalan Tongkol (Krapu)		02/05/2016	02/05/2016			-
		Kel. Ancol, Kec. Pademangan Jak-ut			s.d			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
					01/05/2021			-
								-
79	PT Bank DKI	Tanah dan Bangunan		1628/-076.1	5 TAHUN	4	110.114.440	440.457.759,00
		Lantai 1 s.d 3 Gd. Prasada Sasana Karya		08/04/2016	02/05/2016			-
		Suryo pranoto Jakpus			s.d			-
					01/05/2021			-
								-
80	Yayasan Pendidikan Citra Adhi Pratama	Tanah		1847/-076.25	5 TAHUN	4	2.916.667	11.666.667,00
		Jl. Outer Ring Road Kayu Besar No. 1		25/04/2016	25/4/2016			-
		Jakarta Barat			s.d			-
					24/4/2021			-
								-
81	Yayasan Tanimbar Lestari	Tanah		1887/-076.25	5 TAHUN	52	8.333.333	433.333.333,00
		Komplek Perumahan I Citra Ext. Blok AA.5		26/04/2016	26/4/2016			-
		Jakarta Barat			s.d			-
					25/4/2021			-
								-
82	PT Unggul Dian Perkasa	Tanah		1030/-076.25	5 TAHUN	2	28.743.750	57.487.500,00
		Terminal Pulo Gebang Jakarta Timur		07/03/2016	07/03/2016			-
					s.d			-
					06/03/2021			-
								-
83	Yayasan Pondok Karya Pembangunan	Tanah dan Bangunan		487/-076.11	5 TAHUN	3	11.565.750	34.697.250,00
		Jl. Raya PKP		01/02/2016	08/04/2016			-
		Jakarta Timur			s.d			-
					07/04/2021			-
								-
84	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan		1151/-076.11	5 TAHUN	11	4.681.667	51.498.333,00
		Komplek Perumahan Citra 5 Blok A.6		15/03/2016	20/11/2014			-
		Jakarta Barat			s.d			-
					19/11/2019			-
								-
85	PT Duta Graha Karya	Tanah Jalan dan Jembatan		1078/-1.792	5 TAHUN	2	10.416.667	20.833.333,00
		Kawasan Stadion Olah Raga Kamal Muara		11/03/2016	11/03/2016			-
		Jakarta Utara			s.d			-
					10/03/2017			-
								-
86	Yayasan Anak Bangsa Basmol	Tanah dan Bangunan		870/-076.11	5 TAHUN	2	4.166.667	8.333.333,00
		Jl. Tanggul Cengkareng Drain No. 1 Basmol		22/02/2016	22/2/2016			-
		Jakarta Barat			s.d			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
					21/2/2021			-
								-
87	PT Indocater	Jaringan Distribusi Kabel Listrik Bawah Laut		695/-1.795.133	5 TAHUN	1	25.000.000	25.000.000,00
		Pulau Kaliage		12/02/2016	12/02/2016			-
		Kepulauan Seribu			s.d			-
					11/02/2021			-
								-
88	PT Jaya Sejati Dua	Tanah dan Bangunan		658/-076.11	5 TAHUN	49	9.250.000	453.250.000,00
		Jalan Mandala Bahari No. 5, Muara Angke		11/02/2016	11/02/2016			-
		Jakarta Utara			s.d			-
					10/02/2021			-
								-
89	Yayasan Harapan Bangsa	Tanah dan Bangunan		08/11/2012	5 TAHUN	5	9.468.577	47.342.886,00
		Perumahan Bisma Hankamnas dan Perum Sunter Garden			05/06/2012			-
		Jakarta Utara			s.d			-
					04/06/2017			-
								-
90	Yayasan Mahatma Gading	Tanah dan Bangunan		10/12/2014	5 TAHUN	10	21.041.283	210.412.827,00
		Perum Villa Gading Indah Blok D Kel. Kelapa Gading Jakarta Utara			28/10/2013			-
					s.d			-
					27/10/2018			-
								-
91	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	Tanah		18/09/2013	5 TAHUN	9	14.887.700	133.989.300,00
		Blok I. 1 Perumahan Permata Buana			18/09/2013			-
		Kel. Kembangan Jakarta Barat			s.d			-
					17/09/2018			-
								-
92	Yayasan Pusat Pelatihan E&P	Tanah		13/11/2014	5 TAHUN	8	14.470.313	115.762.500,00
		Perumahan Permata Buana Blok 1.1 Kel. Kembangan Jakarta Barat			24/08/2013			-
		Jakarta Barat			s.d			-
					23/08/2018			-
								-
93	Yayasan Jemaat Gereja Kristen Kedoya Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan Gereja		28/10/2013	5 TAHUN	10	2.916.667	29.166.667,00
		Jl. Angsana Raya Blok D.8 Perum Taman Kedoya Selatan			14/11/2012			-
		Jakarta Barat			s.d			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
					14/11/2017			-
								-
94	PT Bumi Bintang Bersatu	Tanah dan Bangunan		02/07/2014	5 TAHUN	6	11.666.667	70.000.000,00
		Komplek Perumahan Taman Duta Mas			02/07/2014			-
		Kelurahan Wijaya Kusuma, Kec. Grogol			s.d			-
					02/07/2019			-
								-
95	Yayasan Al Muhajirin Pondok Kopi	Tanah dan Bangunan		17/11/2014	5 TAHUN	11	7.022.500	77.247.500,00
		Jl. Pondok Kopi V Blok E2 dan Blok E7 Kel. Pondok Kopi Duren Sawit			02/07/2014			-
					s.d			-
					02/07/2019			-
								-
96	PT Swarna Jaya Sejahtera	Sebagian Tanah		1377/-076.25	5 TAHUN	38	1.666.667	63.333.333,00
		Kawasan Dermaga Pelabuhan Penumpang Kali Adem Muara Angke		11/03/2015	11/03/2015			-
					s.d			-
					10/03/2020			-
								-
97	Yayasan El Shaddai Jakarta Barat	Tanah dan Bangunan		2788/-076.11	5 TAHUN	7	9.363.333	65.543.333,00
		Komplek Perumahan Citra 5, Blok D-6		23/06/2016	23/07/2014			-
		Kel. Pegadungan, Kec. Kalideres			s.d			-
		Jakarta Barat			22/07/2019			-
								-
98	Yayasan Suhargo Gondokusumo	Tanah dan Bangunan		4309/-076.11	5 TAHUN	51	46.000.000	2.346.000.000,00
		Jl. Paradise Boulevard Utara, Blok Paradise 16		30/09/2016	01/04/2016			-
		Komplek Perumahan Taman Surya 5			s.d			-
		Jakarta Barat			31/03/2021			-
								-
99	Dekranasda (Kota Tua)					60	83.333	5.000.000,00
100	Koperasi Pegawai Dinas Perikanan					60	22.473.333	1.348.400.000,00
101	PKK					60	1.000.000	60.000.000,00
102	PT Gabungan Samudera					60	16.708.333	1.002.500.000,00
103	PT Karya Syukur Maju Bersama					60	12.698.333	761.900.000,00
104	PT Sanjaya Fishery Internasional					60	16.708.333	1.002.500.000,00
								-
105	PT. MAC Sarana Djaya	RSUD Pasar Rebo Jl. Raya Condet No. 30 Jakarta Timur	1500/2013	23/12/2013	5 Tahun	24	8.333.333	200.000.000,00
			25/09/2013		23/12/2013			-
					sd			-
					23/12/2018			-

NO.	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	KEPGUB	PKS	JANGKA WAKTU SEWA	SISA BULAN YG BELUM DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA PER 31 DES 2016	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
		PERUNTUKAN	NO./TGL	NO. / TGL				PER 31 DES 2016
106	PT. MAC Sarana Djaya	Terminal Pulogebang Jl. Sejajar Tol Cakung Timur Kel Pulogebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur	1725 / 2013	23/12/2013	5 Tahun	24	9.166.667	220.000.000,00
			06/11/2013		23/12/2013			-
					sd			-
					23/12/2018			-
107	PT. MAC Sarana Djaya	Gedung Lama & Gedung Baru DPRD Prov DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih Kel Gambir Kec Gambir Jakarta Pusat	1726 / 2013	23/12/2013	5 Tahun	24	10.416.667	250.000.000,00
			06/11/2013		23/12/2013			-
					sd			-
					23/12/2018			-
108	PT. MAC Sarana Djaya	Bangunan Kantor Walikota Jakarta Utara Jl. Yos Sudarso No. 27-29 Jakarta Utara	2253 / 2014	15/01/2015	5 Tahun	24	8.802.500	211.260.000,00
			24/12/2014		24/12/2013			-
					sd			-
					23/12/2018			-
109	PT. Indosat, Tbk.	Lahan SMPN 240 Jl. H. Raya No. 16 B Gandaria Jakarta Selatan	257 / 2015	13/05/2015	5 Tahun	21	8.916.667	187.250.000,00
			17/02/2015		07/10/2013			-
					sd			-
					06/10/2018			-
110	PT. Indosat, Tbk.	Bangunan SMKN 35 Jl. Kerajinan No. 42 Jakarta Barat	251 / 2015	12/05/2015	5 Tahun	21	8.916.667	187.250.000,00
			16/02/2015		07/10/2013			-
					sd			-
					06/10/2018			-
111	PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo	Lahan SMUN 3 Jl. Setiabudi II Jakarta Selatan	106 / 2015	27/04/2015	5 Tahun	7	9.864.913	69.054.389,00
			27/01/2015		09/08/2012			-
					sd			-
					08/08/2017			-
112	PT. Indosat, Tbk.	Lahan Gudang Pulomas Jl. Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur	1665 / 2015	07/10/2015	5 Tahun	12	15.780.962	189.371.544,00
			18/08/2015		17/12/2012			
					sd			
					16/12/2017			
	JUMLAH							**25.939.367.165,00**

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO
PER 31 DESEMBER 2016

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2016	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2016
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS Tgl 8 Oktober 1997	20 Tahun	16.000.000	9	1.333.333	12.000.000
		Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan						-
		Kec. Sawah Besar JakPus						-
		(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal						-
		Mangga Dua)						-
								-
2	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS No. 65 Tahun 1999	30 Tahun	31.666.667	152	2.638.889	401.111.115
		Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan	Tgl 13 September 1999					-
		Kec. Sawah Besar JakPus						-
		(JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC						-
		dan Gedung Mal Mangga Dua						-
								-
3	PT Rointa Eka Jaya	BOT	PKS No. 27 Tahun 2001	30 Tahun	41.666.667	168	3.472.222	583.333.333
		Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus	Tgl 30 Maret 2001					-
		(Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang						-
		dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhrudin)						-
								-
4	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS Tgl 14 Mei 2003	25 Tahun	60.000.000	156	5.000.000	780.000.000
		Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan	Addendum Tgl 30 Agustus 2005					-
		Kec. Sawah Besar JakPus						-
		(jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga						-
		Dua dengan Mal Mangga Dua)						-
								-
5	PT. Gading Raya Propertindo	BOT	PKS Tgl 27 Oktober 2004	25 Tahun	140.000.000	154	11.666.667	1.796.666.667
		Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus						-
		(jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi						-
		Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)						-
								-
6	PT. Grand Indonesia	BOT	PKS Tgl 4 Mei 2009	28 Tahun	505.000.000	0	42.083.333	-
		Jln. Teluk Betung Kel. Kebon Melati						-
		Kec. Tanah Abang JakPus						-
		(jembatan multiguna antara Hotel Indonesia & Eks						-
		Hotel Wisata - 7 lantai & 2 basement)						-
								-
7	PT. Fajar Setia Mandiri	BTO	PKS No. 1500/073.511	20 Tahun	100.000.000	8	8.333.333	66.666.667
		Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya	Tgl 10 Mei 2002					-
		Kec. Tanjung Priok JakUtara						-
		(stasiun pengisian bahan bakar umum)						-
								-
8	PT. AGB Tuna (cold storage)	BOT	PKS Tgl 28 Peb 2004	20 Tahun	30.000.000	86	2.500.000	215.000.000
		Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit						-
		Kec. Penjaringan JakUtara						-

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2016	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2016
1	2	3	4	5	7	8	9	10
		(pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta						-
		sarana pelengkapnya)						-
								-
9	PT. AGB Tuna (pabrik es)	BOT	PKS Tgl 21 November 2006	20 Tahun	22.500.000	119	1.875.000	223.125.000
		Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit						-
		Kec. Penjaringan JakUtara						-
		(pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana						-
		pelengkapnya)						-
								-
10	PT. Duta Pertiwi	BOT	PKS Tgl 13 Maret 2008	25 Tahun	252.000.000	0	21.000.000	-
		Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan						-
		Kec. Sawah Besar JakPus						-
		(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal						-
		Mangga Dua)						-
								-
11	PT. Gerak Maju Abadi	BOT	PKS Tgl 21 Juli 1997	20 Tahun	265.750.000	7	22.145.833	155.020.833
		Jl. Blustru, Kelurahan Glodok Jakarta Barat						-
		(Gedung Pertokoan & Fasilitas Parkir)						-
								-
12	Yay. Patmos	BTO	PKS No. 210/073.551	25 Tahun	80.525.500	2	6.710.458	13.420.917
		Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7	Tgl 6 Pebruari 2003					-
		Kec. Kembangan Jakarta Barat	Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006					-
		(sarana pendidikan)	Tgl 1 Juni 2006					-
								-
13	Yay. Pusat Pelatihan E & P	BTO	PKS No. 130/073.511	25 Tahun	77.812.274	1	6.484.356	6.484.356
		Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4,	Tgl 28 Januari 2003					-
		Kec. Kembangan Jakarta Barat	BAST Bangunan Tgl. 8 Pebruari 2006					-
		(sarana pendidikan)						-
								-
14	PT Langgeng Ayom	BOT	PKS tahun 1990	30 Tahun	250.000.000	0	20.833.333	-
		Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru	Addendum Tgl 18 Juli 2012					-
		Jakarta Selatan.						-
		(Pengelolaan Kawasan Terminal Blok M)						-
								-
15	PT. Pasific Bangun Mas	BOT	PKS No. 40 Tahun 2001	25 Tahun	28.000.000	112	2.333.333	261.333.333
		Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan	Tgl 1 Mei 2001					-
		(Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan Cipulir Plaza)						-
								-
16	PT. Perwita Margasakti	BOT	PKS Tgl 12 April 2010	25 Tahun	82.000.000	3	6.833.333	20.500.000
		Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel						-
		(jembatan multiguna antara Mal Ambasador & ITC Kuningan Jaksel)						-
								-

NO	NAMA PIHAK KETIGA	JENIS DAN LOKASI ASET	PKS NO & TANGGAL	JANGKA WAKTU PKS	KONTRIBUSI TAHUN 2016	SISA BULAN YG BLM DIGUNAKAN	KONTRIBUSI PER BULAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DES 2016
1	2	3	4	5	7	8	9	10
17	PT. Perwita Margasakti	BOT	PKS Tgl 8 Oktober 2003	25 Tahun	100.000.000	141	8.333.333	1.175.000.000
		Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel						-
		(jembatan multiguna antara Mal Ambasador & ITC Kuningan Jaksel)						-
								-
18	PT. Wahana Cipta Sejahtera	BOT	PKS Tgl 7 April 2004	25 Tahun	94.000.000	147	7.833.333	1.151.500.000
		Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal Cililitan)						-
		Jakarta Timur						-
		(Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan (Bangunan A)						-
		& Gedung Parkir (Bangunan B))						-
								-
19	PT. Wahana Cipta Sejahtera	BOT	PKS Tgl 13 Juli 2006	25 Tahun	100.000.000	36	8.333.333	300.000.000
		Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan	BAST Tgl 19 Mei 2008					-
		Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur						-
								-
20	PT. Metropolitan	BOT	PKS Tgl 4 April 2008	25 Tahun	810.000.000	6	67.500.000,00	405.000.000
	Kentjana Tbk	Antara Pondok Indah Mal I & II						-
		Jl.Metro Pondok Indah Kec. Keb lama Jaksel						-
		(Jembatan Multiguna)						-
								-
21	PT. Gamma Investa	BTO	PKS No. 15/AK/BP/III/2006	25 Tahun	60.000.000	4	5.000.000	20.000.000
	Lestari	Kompleks Bola Basket Internasional	Tanggal 24 Maret 2006					-
		Sport Mall di Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF 3						-
		Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.						-
		(Sarana Olahraga)						-
								-
22	Yayasan Pendidikan Bukit Sion	BTO	PKS No. 37/AK/BP/IX/2006	25 Tahun	133.402.500	4	11.116.875	44.467.500
		Kompleks Taman Kebon Jeruk Blok G.VII Kel. Srengseng Kec. Kembangan Jakarta Barat.	Tanggal 6 September 2006.					
		Sarana Pendidikan	PKS Addendum Tanggal 26 Oktober 2010					
JUMLAH								**8.029.893.944,00**

Lampiran 14

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA HASIL LELANG TITIK REKLAME ATAS ASET PEMDA
PER 31 DESEMBER 2016

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Masa Manfaat	Tanggal PKS	Jangka Waktu Pemanfaatan Aset		Nilai SPS	Sewa Titik Lelang yang Telah Diakui per 31 Des 2016	Sisa Bulan yang Belum Digunakan oleh Pihak Ketiga	Sewa Titik Lelang Diterima Dimuka per 31 Des 2016
					Awal	Akhir				
1	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Four Season Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.551.000.000	0 Bulan	24 Bulan	1.551.000.000
2	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Kedubes Turki Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.610.000.000	0 Bulan	24 Bulan	1.610.000.000
3	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Depkes Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.850.900.000	0 Bulan	24 Bulan	1.850.900.000
4	PT. Magna Astro Prontonusa	Jl. HR. Rasuna Said depan Indorama Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)		PKS dalam proses		1.967.000.000	0 Bulan	24 Bulan	1.967.000.000
5	PT. Unggul Dian Perkasa	Jl. Jend. Sudirman depan Ratu Plaza Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	17/03/2015	27 Mei 2015	26 Mei 2017	3.500.000.000	19 Bulan	5 Bulan	729.166.667
6	PT. Insite Media	Jl. Jend. Sudirman depan Polda Metro Jaya Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	10/02/2015	22 April 2015	21 April 2017	5.849.800.000	20 Bulan	4 Bulan	974.966.667
7	PT. Prisma Harapan	Jl. HR. Rasuna Said dpn Pasar Festival, Kec.Setiabudi Jak-Sel	730 hari (2 tahun)	01/09/2015	10 Nopember 2015	09 Nopember 2017	2.101.000.000	14 Bulan	10 Bulan	875.416.666
	JUMLAH						**18.429.700.000**			**9.558.450.000**

DAFTAR UTANG PEGAWAI
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2016

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
A.	UTANG PEGAWAI						
1	Sekretariat DPRD	686.086.991	424.654.999	686.086.991	-	424.654.999	
			179.987.626			179.987.626	Kekurangan TKD pegawai Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dari bulan April s.d bulan November 2015
			244.667.373			244.667.373	Kekurangan TKD pegawai Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dari bulan Januari s.d bulan Februari 2016
2	Biro Administrasi Keuangan dan Aset	4.304.427.930	6.128.402.650	4.304.427.930	-	6.128.402.650	
			74.195.000			74.195.000	Utang Tunjangan Transport BKSP Jabodetabekjur Bulan September s.d Desember 2016
			10.785.808			10.785.808	Utang TKD KPU Jakarta Utara Tahun 2015 a.n Herawati
			4.348.862.726			4.348.862.726	Kekurangan Pembayaran TKD Tahun 2015
			84.455.283			84.455.283	Tunjangan PPh
			4.534.920			4.534.920	Iuran Wajib 2% atas Gubernur dan Wagub
			601.501.404			601.501.404	IWP yang belum dibayarkan pada 9 SKPD/UKPD
			7.753.830			7.753.830	Atas Nama Anggi Putri Setianty
			996.313.679			996.313.679	Kekurangan Pembayaran TKD Bulan Januari-Maret 2016
3	DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMI	320.100.000	1.020.664.396	310.310.000	9.790.000	1.020.664.396	
			437.445.437			437.445.437	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan April 2015 s.d November 2015
			2.721.264			2.721.264	Kekurang TKD Tahap Kedua Bulan Februari 2016 an.Bambang Pursanto
			6.254.825			6.254.825	Kekurang TKD Tahap Kedua Bulan Februari 2016 an. Elveri
			574.242.870			574.242.870	Kekurang TKD Tahap Kedua Bulan Januari 2016 sd Maret 2016
4	DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	1.345.019.327	688.436.907	1.345.019.327	-	688.436.907	
			688.436.907			688.436.907	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah Pegawai
5	DINAS BINA MARGA	1.887.266.286	1.273.841.008	1.887.266.286	-	1.273.841.008	
			39.701.399			39.701.399	TKD bulan Maret dan Agustus 2014
			565.787.957			565.787.957	TKD bulan April s/d November 2015
			668.351.652			668.351.652	Kekurangan TKD Pegawai Jan s/d Maret 2016
6	DINAS TATA AIR	497.532.470	1.590.557.146	497.532.470	-	1.590.557.146	
			13.068.713			13.068.713	TKD Bulan Agustus 2014 a/n Maryana
			7.139.741			7.139.741	TKD Bulan Agustus 2014 a/n Maryana
			6.895.638			6.895.638	TKD Bulan Mei 2014 a/n Dudi Gardesi Asikin
			6.243.125			6.243.125	TKD Bulan ke 13 a/n Dudi Gardesi Asikin
			7.104.537			7.104.537	TKD Bulan September 2014 a/n Nur Aprileny
			68.265.345			68.265.345	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan April Tahun 2015
			57.808.274			57.808.274	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan Mei Tahun 2015
			97.730.158			97.730.158	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan Juni Tahun 2015
			112.926.151			112.926.151	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan Juli Tahun 2015
			111.199.895			111.199.895	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan Agustus Tahun 2015
			59.866.729			59.866.729	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan September Tahun 2015
			40.361.552			40.361.552	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan Oktober Tahun 2015
			119.786.465			119.786.465	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan November Tahun 2015
			326.000.000			326.000.000	Tunjangan Transport Pejabat Struktural Bulan Desember 2016

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
			556.160.823			556.160.823	Koreksi -review-kekurangan TKD 2016
7	**DINAS PENATAAN KOTA**	**3.252.291.759**	**2.800.363.661**	**3.252.291.759**	**-**	**2.800.363.661**	
			131.612.231			131.612.231	Kekurangan TKD Tahap II - April 2015
			109.971.289			109.971.289	Kekurangan TKD Tahap II - Mei 2015
			280.628.058			280.628.058	Kekurangan TKD Tahap II - Juni 2015
			280.279.282			280.279.282	Kekurangan TKD Tahap II - Juli 2015
			264.310.159			264.310.159	Kekurangan TKD Tahap II - Agustus 2015
			50.591.965			50.591.965	Kekurangan TKD Tahap II - September 2015
			38.235.820			38.235.820	Kekurangan TKD Tahap II - Oktober 2015
			499.188.243			499.188.243	Kekurangan TKD Tahap II - Nopember 2015
			1.119.678.398			1.119.678.398	Kekurangan TKD Tahap II - Januari 2016
			23.281.305			23.281.305	Kekurangan TKD Tahap II - Februari 2016
			2.586.911			2.586.911	Kekurangan TKD Tahap II - Maret 2016
8	**DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORT**	**5.840.529.850**	**5.255.975.376**	**5.840.529.850**	**-**	**5.255.975.376**	
			2.537.844.092			2.537.844.092	Daftar Hutang Pembayaran Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Tahap Kedua Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2015 Bulan April Sampai Dengan November 2015
			2.718.131.284			2.718.131.284	Bulan Januari Sampai Dengan Maret 2016 Dinas Perhubungan dan Transportasi hal ini terjadi karena listing baru dikeluarkan BKD
9	**DINAS KESEHATAN**	**62.026.472.530**	**36.349.402.814**	**62.026.472.530**	**-**	**36.349.402.814**	
			6.024.052.161			5.988.052.161	Rapelan TKD Tahap dua tahun 2015
			4.508.534.556			4.508.534.556	Kekurangan TKD Tahap dua 2016
			25.816.816.097			25.816.816.097	Pajak PPH21 atas Gaji dan TKD Desember 2016
10	**Rumah Sakit Umum Kec. Ciracas**		**8.060.000**			**8.060.000**	
			8.060.000			8.060.000	Hutang BPJS Pegawai tahun 2016
11	**BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - Jaktim**		**21.498.153**			**21.498.153**	
			21.498.153			21.498.153	Hutang TKD Pegawai Non PNS
12	**BLUD RS Koja**	**-**	**146.383.255**	**-**	**-**	**146.383.255**	
			146.383.255			146.383.255	Kekurangan TKD Tahap dua April s/d November 2015
13	**BLUD RS Budhi Asih**	**-**	**122.790.084**	**-**	**-**	**122.790.084**	
			1.007.819			1.007.819	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan April
			5.337.505			5.337.505	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Mei
			70.911.555			70.911.555	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Juni
			11.758.582			11.758.582	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Juli
			16.615.966			16.615.966	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Agustus
			1.980.722			1.980.722	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan September
			1.754.848			1.754.848	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Oktober
			13.423.087			13.423.087	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan November
14	**BLUD RS Duren Sawit**	**17.437.089**	**188.074.225**	**17.437.089**	**-**	**188.074.225**	
			15.915.600			15.915.600	Rapel Tunjab Fungsional dan Gaji Pokok
			172.158.625			172.158.625	Tunjangan Khusus Daerah (TKD)
15	**RSUD Pasar Minggu**	**-**	**27.032.528**	**-**	**-**	**27.032.528**	**Gaji/Tunjangan November & Desember Pegawai Non PNS**
			27.032.528			27.032.528	
16	**DINAS PENDIDIKAN**	**178.853.271**	**93.704.272.175**	**178.853.271**	**-**	**93.704.272.175**	
			52.294.155			52.294.155	Kekurangan TKD bulan Januari 2015
			222.905.856			1.148.887.824	Kekurangan TKD bulan April 2015
			235.597.237			1.148.620.130	Kekurangan TKD bulan Mei 2015
			519.402.886			1.426.191.087	Kekurangan TKD bulan Juni 2015
			392.467.676			405.167.916	Kekurangan TKD bulan Juli 2015
			484.291.035			494.633.478	Kekurangan TKD bulan Agustus 2015
			120.867.157			159.955.780	Kekurangan TKD bulan September 2015
			136.385.197			189.600.070	Kekurangan TKD bulan Oktober 2015
			632.310.235			847.819.048	Kekurangan TKD bulan November 2015

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
			4.396.250			4.396.250	Kekurangan TKD bulan Januaril 2015 Guru
			33.788.950			33.788.950	Kekurangan TKD bulan Februari 2015 Guru
			27.448.120			27.448.120	Kekurangan TKD bulan Maret 2015 Guru
			28.513.679.578			28.513.679.578	Kekurangan TKD bulan April 2015 Guru
			28.098.099.736			28.098.099.736	Kekurangan TKD bulan Mei 2015 Guru
			28.012.988.259			28.012.988.259	Kekurangan TKD bulan Juni 2015 Guru
			158.677.056			158.677.056	Kekurangan TKD bulan Juli 2015 Guru
			207.118.503			207.118.503	Kekurangan TKD bulan Agustus 2015 Guru
			378.025.531			378.025.531	Kekurangan TKD bulan September 2015 Guru
			826.013.268			826.013.268	Kekurangan TKD bulan Oktober 2015 Guru
			2.598.749.455			2.598.749.455	Kekurangan TKD bulan November 2015 Guru
			1.489.036.543			1.489.036.543	Kekurangan TKD bulan Januaril 2016 Guru
			356.141.368			356.141.368	Kekurangan TKD bulan Februari 2016 Guru
			185.149.386			185.149.386	Kekurangan TKD bulan Maret 2016 Guru
			2.947.531			2.947.531	Kekurangan TKD bulan Mei 2016 Guru
			13.547.025			13.547.025	Kekurangan TKD bulan Juni 2016 Guru
			1.944.182			1.944.182	Kekurangan TKD bulan Juli 2016 Guru
17	**DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA**	**320.073.408**	**1.532.644.457**	**320.073.408**	**-**	**1.532.644.457**	
			361.736.308			361.736.308	Kekurang TKD Tahap Kedua Bulan Januari 2016 sd Maret 2016
			1.170.908.149			1.170.908.149	Kekurangan TKD Tahap Kedua Bulan April 2015 s.d November 2015
18	**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.277.786.497**	**1.072.223.031**	**1.277.786.497**	**-**	**1.072.223.031**	
			144.588.293			144.588.293	TKD April s/d November 2015
			213.781.738			213.781.738	Rapel TKD Jan s/d Maret 2016
			713.853.000			713.853.000	Kekurangan Pembayaran Tunjangan Pegawai Tugas Belajar
19	**DINAS SOSIAL**	**4.521.386.220**	**1.744.689.728**	**4.521.386.220**	**-**	**1.744.689.728**	
			1.021.299.971			1.021.299.971	Tahap II Bulan April S.D Nopember 2015 Dinas Sosial
			723.389.757			723.389.757	Tahap II Bulan Januari s.d Maret 2016 Dinas Sosial
20	**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT,**	**-**	**3.166.476.821**	**-**	**-**	**3.166.476.821**	
			107.732.000			107.732.000	Tunjangan Fungsional (Ditangguhkan)
			1.610.465.087			1.610.465.087	Kekurangan TKD Tahun 2015 (apr s.d Nov)
			1.448.279.734			1.448.279.734	Kekurangan TKD Tahun 2016 jan s.d Mrt)
21	**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN**	**137.887.462**	**6.589.157.357**	**137.887.462**	**-**	**6.589.157.357**	
			1.317.554			1.317.554	Kekurangan TKD Pegawai Sudin Utara
			11.610.000			11.610.000	Kekurangan TKD Bulan Maret 2015
			124.959.908			124.959.908	Kekurangan April sd November berdasarkan Pergub. No.248/2015
			2.665.507.329			2.665.507.329	Sisiran Kekurangan TKD Tahap II Bulan April sd November 2015
			3.753.569.059			3.753.569.059	Kekurangan TKD Tahap Kedua Januari Bdsrkan Pergub 193/2015
			23.471.404			23.471.404	Kekurangan TKD Tahap Kedua Februari Bdsrkan Pergub 193/2015
			8.722.103			8.722.103	Kekurangan TKD Tahap Kedua Maret Bdsrkan Pergub 193/2015
22	**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL D**	**3.868.556.793**	**2.568.691.796**	**3.868.556.793**	**-**	**2.568.691.796**	
			848.456.357			848.456.357	Utang TKD Jan s/d Nov 2015
			743.352.362			743.352.362	Utang TKD Jan s/d Maret 2016
			971.606.727			971.606.727	Utang TKD Desember 2016
			5.276.350			5.276.350	Utang gaji a/n M.Sayuti Desember 2016
23	**SATPOL PP**	**6.095.909.934**	**5.823.605.987**	**6.095.909.934**	**-**	**5.823.605.987**	
			510.651.703			510.651.703	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai April 2015
			519.931.005			519.931.005	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Mei 2015
			856.383.622			856.383.622	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Juni 2015

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
			358.820.226			358.820.226	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Juli 2015
			309.494.524			309.494.524	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Agustus 2015
			159.975.948			159.975.948	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai September 2015
			190.121.386			190.121.386	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Oktober 2015
			905.958.307			905.958.307	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai November 2015
			1.930.892.360			1.930.892.360	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Januari 2016
			53.542.343			53.542.343	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Februari 2016
			27.834.563			27.834.563	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Maret 2016
24	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA D**	**-**	**416.133.521**	**-**	**-**	**416.133.521**	
			147.029.119			147.029.119	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Januari 2016
			1.840.158			1.840.158	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Februari 2016
			24.499.513			24.499.513	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Maret 2016
			48.715.915			48.715.915	Kekurangan TKSD tahap ke 2 April 2015
			49.372.250			49.372.250	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Mei 2015
			60.851.156			60.851.156	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Juni 2015
			25.743.675			25.743.675	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Juli 2015
			18.989.821			18.989.821	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Agustus 2015
			30.246.581			30.246.581	Kekurangan TKSD tahap ke 2 September 2015
			4.913.783			4.913.783	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Oktober 2015
			3.931.550			3.931.550	Kekurangan TKSD tahap ke 2 Nopember 2015
25	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAT/**	**4.206.494.531**	**3.077.584.313**	**4.206.494.531**	**-**	**3.077.584.313**	
			218.047.467			218.047.467	Kekurangan pembayaran TKD bulan April 2015
			220.856.468			220.856.468	Kekurangan pembayaran TKD bulan Mei 2015
			314.078.461			314.078.461	Kekurangan pembayaran TKD bulan Juni 2015
			237.538.614			237.538.614	Kekurangan pembayaran TKD bulan Juli 2015
			390.314.115			390.314.115	Kekurangan pembayaran TKD bulan Agustus 2015
			82.340.332			82.340.332	Kekurangan pembayaran TKD bulan September 2015
			82.423.672			82.423.672	Kekurangan pembayaran TKD bulan Oktober 2015
			337.626.963			337.626.963	Kekurangan pembayaran TKD bulan November 2015
			1.065.706.720			1.065.706.720	Kekurangan pembayaran TKD bulan Januari 2016
			69.927.806			69.927.806	Kekurangan pembayaran TKD bulan Februari 2016
			58.723.695			58.723.695	Kekurangan pembayaran TKD bulan Maret 2016
26	**DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETA**	**-**	**2.736.897.283**	**-**	**-**	**2.736.897.283**	
			3.486.325			3.486.325	Utang gaji November 2014
			1.544.008.344			1.544.008.344	Kekurangan TKD Tahap dua April s/d November 2015
			1.189.402.614			1.189.402.614	Kekurangan TKD Tahap dua Januari s/d Maret 2016
27	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI**	**1.362.892.388**	**782.397.532**	**1.362.892.388**	**-**	**782.397.532**	
			62.698.562			62.698.562	Listing terbit pada 15 Agustus 2016, 16 Desember 2016 dan belum dianggarkan pada tahun 2016
			193.851.664			193.851.664	Listing terbit pada 23 Desember 2016 dan belum dianggarkan pada tahun 2016
			525.847.306			525.847.306	
28	**BADAN PEMBINAAN BUMD DAN PENAN/**	**325.873.372**	**425.306.824**	**325.873.372**	**-**	**425.306.824**	
			145.765.288			145.765.288	Kekurangan TKD bulan April s/d November 2015
			97.872.558			97.872.558	Kekurangan TKD bulan Jan s/d Maret 2016
			181.668.978			181.668.978	Kekurangan TKD bulan Desember 2016
29	**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASI**	**6.460.435**	**1.759.347.026**	**6.460.435**	**-**	**1.759.347.026**	
			818.556.327			818.556.327	Kekurangan TKD Pegawai Tahun 2015
			940.790.699			940.790.699	Kekurangan TKD Pegawai Tahun 2016
30	**Pusat Penyimpanan Barang Daerah**	**-**	**4.020.000**	**-**	**-**	**4.020.000**	
			2.820.000			2.820.000	Rapel Kenaikan Gaji PTT Jan s/d Juli dan bulan ke 13 a/n Miharyadi
			1.200.000			1.200.000	Rapel Kenaikan TPP PTT Jan s/d Juli dan bulan ke 13 a/n Miharyadi
31	**INSPEKTORAT**	**2.258.923.880**	**1.073.686.117**	**2.258.923.880**	**-**	**1.073.686.117**	

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
			689.387.430			689.387.430	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua PNS/CPNS Inspektorat Provinsi bulan April s.d Nov 2015
			384.298.687			384.298.687	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah Tahap Kedua PNS/CPNS Inspektorat Provinsi bulan Januari s.d Maret 2016
32	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**	**-**	**950.920.493**	**-**	**-**	**950.920.493**	
			750.375.725			750.375.725	Kekurangan TKD Pegawai Bappeda, Kanppeko dan Kanppekab dari bulan April s.d. November 2015
			200.544.768			200.544.768	Kekurangan TKD Pegawai Bappeda, Kanppeko dan Kanppekab dari bulan Januari s.d. Maret 2016
33	**BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP**	**885.177.275**	**890.387.011**	**885.177.275**	**-**	**890.387.011**	
			86.154.833			86.154.833	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai April 2015
			85.232.519			85.232.519	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Mei 2015
			164.715.223			164.715.223	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Juni 2015
			86.656.859			86.656.859	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Juli 2015
			32.348.062			32.348.062	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Agustus 2015
			18.175.615			18.175.615	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai September 2015
			28.400.468			28.400.468	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Oktober 2015
			90.269.469			90.269.469	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai November 2015
			236.630.487			236.630.487	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Januari 2016
			34.757.913			34.757.913	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Februari 2016
			27.045.563			27.045.563	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Maret 2016
34	**DINAS KEBERSIHAN**	**7.541.900.826**	**2.380.601.535**	**7.541.900.826**	**-**	**2.380.601.535**	
			2.380.601.535			2.380.601.535	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah
35	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**	**2.091.660.912**	**6.645.771.383**	**2.091.660.912**	**-**	**6.645.771.383**	
			185.608.096			185.608.096	Hutang (Kekurangan) TKD 2015 April dan Mei 2015
			897.036.893			897.036.893	Hutang (Kekurangan) TKD 2015 April s.d. November 2015
			4.499.093.371			4.499.093.371	Hutang Tunjangan Pajak Pegawai Oktober, November, Desember 2016
			1.064.033.023			1.064.033.023	Hutang Pembayaran Kekurangan TKD Tahap Kedua Berdasarkan Pergub Nomor 193 Tahun 2015 Bulan Januari, Februari, Maret 2016
36	**KANTOR PENGELOLA TAMAN MERGASAT**	**-**	**220.556.309**	**-**	**-**	**220.556.309**	
			220.556.309			220.556.309	Kekurangan TKD bulan April s/d Desember 2015
37	**KANTOR PENGELOLA KAWASAN MONAS**	**377.419.042**	**205.658.403**	**377.419.042**	**-**	**205.658.403**	
			153.616.070			153.616.070	Hutang PPH 21 atas Gaji Pegawai
			52.042.333			52.042.333	Hutang TKD tahun 2015 dan 2016
38	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**910.399.297**	**322.024.283**	**910.399.297**	**-**	**322.024.283**	
			192.968.755			192.968.755	Kekurangan TKD April s.d Nov 2015
			129.055.528			129.055.528	Kekurangan TKD Januari s.d Februari 2016
39	**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**	**7.926.768.854**	**2.023.225.011**	**7.926.768.854**	**-**	**2.023.225.011**	
			224.305.800			224.305.800	Hutang belanja pegawai yang belum mendapatkan uang duka wafat pada bulan Januari sampai dengan Juni 2015 sebanyak 9 orang.
			4.440.000			4.440.000	Hutang kekurangan tunjangan fungsional pegawai BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebanyak 7 orang.
			539.528.135			539.528.135	Hutang kekurangan TKD tahap kedua pegawai BKD dan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 (sebanyak 2.321 orang)
			1.254.951.076			1.254.951.076	Hutang kekurangan TKD Tahap kedua pegawai BKD dan CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 (sebanyak 2.091 orang)
40	**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRA**	**9.130.244.066**	**2.645.097.870**	**9.130.244.066**	**-**	**2.645.097.870**	
			1.444.068.504			1.444.068.504	Kekurangan TKD Bln April-Nov 2015 listing terbit 23 Des 2016

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
			1.201.029.366			1.201.029.366	Kekurangan TKD Bln Jan-Maret 2016 listing terbit 9 Feb 2017
41	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN	1.601.965.302	865.268.176	1.601.965.302	-	865.268.176	
			348.612.285			348.612.285	Kekurangan TKD berdasarkan Pergub 193 Tahun 2015 bulan April s/d November 2015
			516.655.891			516.655.891	Kekurangan TKD berdasarkan Pergub 193 Tahun 2015 bulan Januari s/d Maret 2016
42	BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAE	-	479.280.411	-	-	479.280.411	
			45.025.229			45.025.229	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai April 2015
			36.169.963			36.169.963	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Mei 2015
			81.160.289			81.160.289	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Juni 2015
			24.056.808			24.056.808	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Juli 2015
			32.564.651			32.564.651	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Agustus 2015
			4.486.393			4.486.393	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai September 2015
			1.789.079			1.789.079	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Oktober 2015
			33.952.220			33.952.220	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai November 2015
			168.299.941			168.299.941	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Januari 2016
			4.182.315			4.182.315	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Februari 2016
			47.593.523			47.593.523	Kekurangan Pembayaran TKD Pegawai Maret 2016
43	Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Pro	269.405.362	393.216.559	269.405.362	-	393.216.559	
			25.483.869			25.483.869	KekuranganTKD Tahap Kedua Bulan April 2015
			31.374.292			31.374.292	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan Mei 2015
			37.004.680			37.004.680	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan Juni 2015
			36.668.942			36.668.942	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan Juli 2015
			22.337.547			22.337.547	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan Agustus 2015
			12.409.189			12.409.189	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan September 2015
			11.462.878			11.462.878	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan Oktober 2015
			19.311.671			19.311.671	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan November 2015
			194.706.561			194.706.561	KekuranganTKD Tahap KeduaTKD Bulan Januari 2016
			2.456.930			2.456.930	KekuranganTKD Tahap Kedua TKD Bulan Februari 2016
44	BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PIN	7.792.422.055	3.582.379.368	7.792.422.055	-	3.582.379.368	
			1.237.621.711			1.237.621.711	Kekurangan TKD Tahap dua Jan s/d Mar 2016
			2.119.992.380			2.119.992.380	Kekurangan TKD Tahap dua Apr s/d Nov 2015
			224.765.277			224.765.277	
45	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARA	822.254.749	715.547.831	822.254.749	-	715.547.831	
			715.547.831			715.547.831	Utang Pajak PPH 21 TKD bulan Desember 2016
46	Sekretariat Pusat Pengkajian dan Pengen	-	49.424.056	-		49.424.056	
			26.736.270			26.736.270	Tunjangan Kinerja Bulan April - November 2015
			22.687.786			22.687.786	Tunjangan Kinerja Bulan Januari - Maret 2016
47	Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	5.048.951.007	-	-	5.048.951.007	
			66.619.194			66.619.194	Kekurangan TKD Kel. Karang Anyar (Nov 2014)
			3.917.058			3.917.058	Kekurangan TKD Kel. Kramat (Desember 2014)
			1.188.386.298			1.188.386.298	TKD tahun 2015 (April s/d November)
			2.909.088			2.909.088	TKD tahun 2016 (Kel. Cikini Juni 2016)
			1.682.254.386			1.682.254.386	TKD tahun 2016 (Januari s/d Maret)
			2.104.864.983			2.104.864.983	TKD tahun 2016 (Desember 2016) 20%
48	Kota Administrasi Jakarta Utara	-	1.671.655.158	-	-	1.671.655.158	
			956.136.521			956.136.521	Kekurangan TKD Tahun 2015
			715.518.637			715.518.637	Kekurangan TKD Tahun 2016
49	Kelurahan Tanjung Priok - Jakut	2.280.000	-	2.280.000	-	-	
50	Kota Administrasi Jakarta Barat	6.384.935.932	3.530.499.941	6.384.935.932	-	3.530.499.941	
			191.208.315			191.208.315	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan April
			193.030.258			193.030.258	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Mei
			380.501.856			380.501.856	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Juni
			158.563.955			158.563.955	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Juli

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	Ket.
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN			
				PEMBAYARAN	KOREKSI		
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8
			299.546.458			299.546.458	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Agustus
			234.111.436			234.111.436	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan September
			50.256.066			50.256.066	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan Oktober
			275.889.940			275.889.940	Kekurangan TKD Tahun 2015 bulan November
			1.499.489.986			1.499.489.986	Kekurangan TKD Tahun 2016 bulan Januari
			153.415.490			153.415.490	Kekurangan TKD Tahun 2016 bulan Februari
			94.486.181			94.486.181	Kekurangan TKD Tahun 2016 bulan Maret
51	**Kota Administrasi Jakarta Selatan**	**-**	**4.007.808.800**	**-**	**-**	**4.007.808.800**	
			1.892.510.138			1.892.510.138	Kekurangan TKD Tahun 2015
			2.115.298.662			2.115.298.662	Kekurangan TKD Tahun 2016
52	**Kota Administrasi Jakarta Timur**	**6.925.677.498**	**-**	**6.925.677.498**	**-**	**-**	
53	**Kabupaten Administrasi Kepulauan Serib**	**28.583.700**	**505.824.940**	**28.583.700**	**-**	**505.824.940**	
			356.045.656			356.045.656	Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah
			149.779.284			149.779.284	
54	**BLUD RS Cengkareng**		**36.559.713**			**36.559.713**	
			36.559.713			36.559.713	
	JUMLAH	**157.429.357.293,00**	**219.693.929.428,00**	**157.419.567.293,00**	**9.790.000,00**	**219.693.929.428,00**	

Lampiran 15.2

DAFTAR UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI SKPD
PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2016

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
B	**Utang Kepada Pihak Ke Tiga**							
1	Dinas Pekerjaan Umum (Dinas Bina Marga)	65.010.000				65.010.000	PT. Arga Bhuana Cipta Consultant	
		58.719.000				58.719.000	PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati	
		59.607.900				59.607.900	PT. Cinipta Triutama Jaya	
		196.945.690		196.945.690		-	PT. Pahala Milik Abadi	
		113.935.580		110.006.000	3.929.580	-	CV. Tri Cahaya Arta	
		151.550.520		126.659.720	24.890.800	-	CV. Bonansa Naga Jaya	
		51.909.000		51.909.000		-	CV. Madju Prima Jaya	
		196.807.864		114.090.152	82.717.712	-	PT. Kinviodela Gumilang	
		166.624.029				166.624.029	CV. Henpriz	
		194.307.993				194.307.993	PT. Tamena Efando Berkarya	
		196.035.873				196.035.873	PT. Philamelia Berkat	
			188.325.000			188.325.000	PT. Pualam Tirta Sentosa	
2	Sudin Bina Marga - JAKBAR	36.652.000				36.652.000	PT. CAKRA GATRA UTAMA	Peningkatan trotoar wilayah kec. Kebonjeruk (pengawasan)
		42.941.800				42.941.800	PT.JAGAD ALAM SEMESTA	Peningkatan trotoar wilayah Kec. Tambora
		49.412.000				49.412.000	PT. NABELA KARYA ABADI	Pemeliharaan berkala berat jalan di kec. Kalideres (pengawasan)
3	Sudin Bina Marga - JAKPUS	948.554.138				948.554.138	PT. Probicindo Tunggal Taruna	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Kebon Kacang 32/36/37/39, Administasi Negara, Kota Bumi, Martapura, Talang Betutu Ujung, Plaju, Sungai Gerong,Palembang, Batu Raja, Martapura Dalam, Tmn Kebon Sirih, Bendungan Jati Luhur, Petamburan)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		640.171.977				640.171.977	PT. Lampiri Djaya Abadi	Pemeliharaan Jalan (Layer Hotmix) Kec. Kemoyoran dan sawah besar (jl. Tembaga2, cempakasari 1, cempaka baru tengah 1/2 cempaka baru e3, taruna jaya 1/2, Flamboyan , lapangan pors 4/6, serdang baru 12, E Raya,
		1.519.630.788				1.519.630.788	PT. Probicindo Tunggal Taruna	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Johar baru dan cempaka putih (jl. Tendean, johar baru4, johar baru utara 2/6, Galur Selatan, Rawa Tengah, Galur Jaya, Rawa Selatan1, Bacang, Sayuti, Pramuka Jayasari, Rawasari Barat 8/9, Cempaka putih timur 17, cempaka warna, cempaka Putih 2A/2B/2C/ 2D/2J/2H, Mardani3, Cempaka1)
		2.001.723.660				2.001.723.660	PT. Intan Sari Manik Perkasa	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec. Senen (Jl. Kramat Sentiong Mesjid, Kramat Lontar, Kramat Sentiong, Kramat Kwitang 1F, Kramat Kwitang 1H, Kali Baru Barat, Kepu 6, Angsana, Kali Baru Timur 6, Kali Baru Timur 4)
		1.378.824.875				1.378.824.875	CV. Arjuna Haranggaol Mandiri	Pemeliharaan jalan (layer hotmix) Kec Tanah Abang (Jl. Kota Bumi Ujung, Martapura 1/2, Dukuh Pinggir 3/4/5, Kebon Sayur, Kebon Melati, Lontar Sawah, Jati Bunder, Kebon Pala3, Kampung Bali 30/32/33)
4	Sudin Bina Marga - JAKSEL	361.240.000		361.240.000		-	PT.SAPINDO ODORMA PUTRA	Perbaikan Jalan Lingkungan /Orang /SaluranKec. Pesanggrahan (Jasa Konsultan PekerjaanSaluran)
5	Dinas Tata Air	60.082.875				60.082.875	PT. Dwi Eltis Konsultan	Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendali banjir DKI Jakarta, Inlet Waduk Sunter III (PHB Layar), Inlet Waduk Tomang, Inlet Waduk Rumah Tomang Barat, Inlet Rumah Pompa Bendungan Melayu, Inlet Pompa Bimoli (pengawasan)
		39.013.425				39.013.425	PT. Daya Cipta Dianrancana	Pengerukan Waduk Pluit (pengawasan)
		68.259.070				68.259.070	PT. Jasakon Putra Utama	Pembangunan Pompa Waduk Pluit Tengah (pengawasan)
		14.795.000				14.795.000	PT. Delima Laksana Tata	Peningkatan saluran Jl. Kapuk Poglar (penyelesaian Kampung Teko) (pengawasan)
		25.742.072				25.742.072	PT. Dwi Eltis Konsultan	Perbaikan perkuatan tebing dan pengerukan Kali Utan Kayu (pengawasan)
		932.561.891				932.561.891	PT. Asa Jaya Amalia	Pemeliharaan situ-situ dan waduk retensi di Provinsi DKI Jakarta (fisik)
		25.551.895				25.551.895	PT. Gihon Wahana Cipta	Pemeliharaan situ-situ dan waduk retensi di Provinsi DKI Jakarta (pengawasan)
		36.811.000				36.811.000	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	Pengawasan pengerukan waduk Kelapa Dua Wetan & RW Dongkal

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		36.811.000				36.811.000	PT. Dua Ribu Satu Pangripta	Pengawasan Dumping site
		1.617.103.500				1.617.103.500	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan situ Kodamar
		36.894.000				36.894.000	PT. Kencana Biru Engineering	Pengawasan Pengerukan Situ Kodamar & K. IKIP
		36.894.000				36.894.000	PT. Kencana Biru Engineering	Pengawasan Dumping site
		1.367.292.000				1.367.292.000	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan situ RW Dongkal
		1.366.470.000				1.366.470.000	PT. Rosa Lisca	Pelaksanaan pengerukan situ mangga bolong
		36.729.000				36.729.000	PT. Abdi Nusa Kreasi	Pengawasan Pengerukan situ mangga bolong
		36.729.000				36.729.000	PT. Andira Karya Persada	Pengawasan Dumping site
		36.663.000				36.663.000	PT. Miko Cordaniel	Pengawasan Pengerukan Kali Cipinang
		36.663.000				36.663.000	PT. Miko Cordaniel	Pengawasan Dumping site
		875.688.000				875.688.000	PT. Asagolan Sejahtera	Pelaksanaan pengerukan Kali IKIP
,		1.192.524.125				1.192.524.125	PT. Wibawa Tata Rizky	Pelaksanaan pengerukan Kali Semongol
		13.811.000				13.811.000	CV. Fortuna Konsulindo	Pengawasan Pengerukan Kali Semongol
		13.811.000				13.811.000	CV. Fortuna Konsulindo	Pengawasan Dumping site
		13.811.000				13.811.000	PT. Sava Bintang Padang	Pengawasan Pengerukan Waduk Setiabudi Timur
		13.811.000				13.811.000	PT. Sava Bintang Padang	Pengawasan Dumping site
		17.894.250				17.894.250	PT. Daffa Brother Cons	Pengawasan Pengerukan waduk Tomang Barat
		18.321.000				18.321.000	PT. Abdi Nusa Kreasi	Pengawasan Dumping site
		18.438.750				18.438.750	PT. Sekepar Bilikon	Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Selatan
		18.141.750				18.141.750	PT. Sugitec Indotama	Pengawasan Dumping site
		47.553.000				47.553.000	PT. Andira Karya Rusada	Pengawasan Pengerukan Kali Sodetan Sekretaris
		47.982.000				47.982.000	PT. Bina Mitra Wahana	Pengawasan Dumping site
		48.378.000				48.378.000	PT. Sugitec Indotama	Pengawasan Pengerukan Kali Grogol
		47.718.000				47.718.000	PT. Daffa Brother Cons	Pengawasan Dumping site
		47.982.000				47.982.000	PT. Bina Mitra Wahana	Pengawasan Pengerukan Kali Mookervart
		47.982.000				47.982.000	PT. Arenco Centra	Pengawasan Dumping site
		4.145.043.375				4.145.043.375	PT. Bangun Makmur Utama	Pelaksanaan pengerukan Waduk Sunter Utara
		36.811.000				36.811.000	PT. Bagastama Persada	Pengawasan Pengerukan Waduk Sunter Utara
		13.811.000				13.811.000	PT. Bagastama Persada	Pengawasan Dumping site
		36.894.000				36.894.000	PT. Eltra Wiratma Konsultan	Pengawasan Pengerukan Kali Pademangan
		36.894.000				36.894.000	PT. Eltra Wiratma Konsultan	Pengawasan Dumping site
		1.105.677.750				1.105.677.750	PT. Rosa Lisca	Pelaksanaan pengerukan Kali Duri
		36.300.000				36.300.000	PT. Arenco Sentra	Pengawasan Pengerukan Kali Duri
		36.003.000				36.003.000	PT. Arenco Sentra	Pengawasan Dumping site
		291.398.250				291.398.250	PT. Tungkir Jaya	Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
		13.811.000				13.811.000	PT. Giri Awas	Pengawasan Dumping site

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		443.959.125				443.959.125	PT. Malaka Jaya Indah	Pelaksanaan pengerukan Waduk Setiabudi Barat
		13.811.000				13.811.000	PT. Giri Awas	Pengawasan Dumping site
		49.203.000				49.203.000	PT. Marina Widya Karsa	Pengawasan Cakung Drain
		49.203.000				49.203.000	PT. Marina Widya Karsa	Pengawasan Dumping site
		190.984.000				190.984.000	CV. Tri Cahaya Artha	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan waduk pluit
		191.924.000				191.924.000	PT. Melia Hutama Pande	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan spill way waduk pluit
		192.141.000				192.141.000	PT. Kapezta Multi Mandiri	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan kali pakin
		145.910.000				145.910.000	PT. Runggu Prima Jaya	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan waduk pluit
		76.813.000				76.813.000	PT. Cahaya Erna Abadi	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan spill way waduk pluit
		192.141.000				192.141.000	PT. Hosindo Indah Perkasa	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan kali pakin
		168.850.000				168.850.000	PT. Runggu Prima Jaya	Sewa dump truk untuk angkut lumpur buang ke ancol timur (PLTU) hasil pengerukan Kali angke Budha Suci
		44.000.000		44.000.000		-	CV. Empat Petulai	Embung di Kel. Kramat Jati
		44.000.000		44.000.000		-	PT. Sisarti Baksya Asasta	Embung di Jl. Sejuk
		48.000.000		48.000.000		-	CV. Empat Petulai	Embung di Kel. Penggilingan
		44.000.000		44.000.000		-	PT. Sisarti Baksya Asasta	Embung di Jl. Cendrawasih
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Marga Sarana Bhumi	Embung di Kampung Bambu Kuning
		46.000.000		46.000.000		-	CV. Empat Petulai	Embung di Jl. Lebak Bulus III
		45.000.000		45.000.000		-	PT. Muara Consult	Pembebasan Tanah untuk Embung di Jl. Tanjung Kel. Ciracas Kec.Ciracas Jakarta Timur (Kajian Teknis)
		48.000.000		48.000.000		-	PT. Marga Sarana Bhumi	Pembebasan Tanah Waduk di Jl. Lapangan Tembak Rt. 01/07 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo , Jakarta Timur (Kajian Teknis)
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Muara Consult	Pembebasan Tanah untuk Embung di Jln. Penganten Ali 3 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (Kajian Teknis)
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Marga Sarana Bhumi	Pembebasan Tanah untuk Embung di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan (Kajian Teknis)
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Muara Consult	Pembebasan Lahan untuk Waduk di RW 03 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur (Kajian Teknis)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Sisarti Baksya Asasta	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Jl. Pdk. Gede Kel. Rambutan, Kec. Ciracas Jakarta Timur
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Marga Sarana Bhumi	Pembebasan Tanah Untuk Embung di Kel. Susukan, Kec. Ciracas Jakarta Timur
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Muara Consult	Pembebasan Tanah untuk Embung di Pinangrant Kel. Makasar Kec.Makasar Jakarta Timur
		46.000.000		46.000.000		-	CV. Empat Petulai	Pembebasan Lahan untuk embung di Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur
		46.000.000		46.000.000		-	PT. Sisarti Baksya Asasta	Pembebasan Tanah Waduk di Kel. Tegal Alur Kec.Kalideres Jakarta Barat
		35.854.500		35.854.500		-	KJPP Kampianus Roman, SE	Konsultan Appraisal Pembebasan Tanah Waduk Pondok Ranggon III, Kel. Cilangkap, Kec. Cipayung
		16.621.000		16.621.000		-	KJPP Kampianus Roman, SE	Konsultan Appraisal Pembebasan Tanah Embung di Jalan Cendrawasih, Kel. Cibubur, Kec. Ciracas
		115.719.000		115.719.000		-	CV. Hasanah	Pengadaan papan tanda larangan dan pagar di lokasi waduk kp. Rambutan 1
		38.659.000		38.417.000	242.000	-	CV. Santika Jaya Abadi	Pengadaan papan tanda larangan dan pagar di lokasi waduk lebak bulus
		195.140.000				195.140.000	PT. PERMATA ELANG SAKTI	Service Berat Pompa (Service Berat pompa untuk perbaikan pompa Gedung 1 pompa Sunter Utara
		88.218.000				88.218.000	PT. ABDHIKA KREASI MANDIRI	1.03.08.042 Peninggian Lantai Rumah Trafo Pompa Gate Poglar
		118.315.000				118.315.000	CV. Yuafa Mandiri	1.03.08.039 Service berat pompa (service berat pompa untuk perbaikan pompa no-2 dan pompa apung di pompa waduk grogol)
		599.279.600				599.279.600	PT. MELIA HUTAMA PANDE	1.03.08.021 pengadaan Bahan Untuk Mendukung Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Drainase Aliran Barat
6	Sudin PU Tata Air Jakarta Barat		5.383.810.312			5.383.810.312	PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk	Normalisasi Saluran Kecamatan Cengkareng
			4.742.559.440			4.742.559.440	PT. Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk	Normalisasi Saluran Kecamatan Grogol Petamburan
			1.790.808.000			1.790.808.000	PT. Virama Karya	Pembangunan Sheet Pile Kali Duri (Tahap II)
			12.419.061			12.419.061	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Grogol Petamburan
			65.407.521			65.407.521	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Palmerah
			68.113.078			68.113.078	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Tambora
			67.750.477			67.750.477	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Cengkareng
			63.922.255			63.922.255	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Kalideres

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			156.454.158			156.454.158	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Kebon Jeruk
			62.485.799			62.485.799	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Kembangan
			66.704.515			66.704.515	PT. Virama Karya	Pengawasan Normalisasi Saluran Kecamatan Tamansari
			283.387.500			283.387.500	PT. Waskita Beton Recast - Jaya Kontruksi (KSO)	Pengawasan Pembangunan Sheetpile Sal. Phb BCT (Tahap II)
			237.176.611			237.176.611	PT. Waskita Beton Recast - Jaya Kontruksi (KSO)	Pengawasan Pembangunan Sheetpile Kali Duri (Tahap II)
			283.387.500			283.387.500	PT. Waskita Beton Recast - Jaya Kontruksi (KSO)	Pengawasan Pembangunan Sheetpile Sal. Phb. Taman Ratu (Tahap II)
			266.404.074			266.404.074	PT. Putri Indah Berkarya	Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Sumur Resapan di Wilayah Jakarta Barat
			64.368.269			64.368.269	PT. Bagastama Persada	Pelaksanaan Pembangunan dan Peningkatan Prasarana dan Sarana Sumur Resapan di Wilayah Jakarta Barat
7	Sudin PU Tata Air Jakarta Timur		375.472.150,00			375.472.150	PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	Hutang Pihak ke III TA 2016 - 012 Normalisasi Sal. Jl. Taruna Jaya Kel. Cibubur Kec. Ciracas
		178.190.064,00				178.190.064	CV. MITRA ABADI SENTOSA	Hutang Pihak ke III TA.2015 Crossing Jl. Radin Inten s.d Kali Buaran
		196.585.306,00				196.585.306	PT. KARANG UNARANG JAYA	Hutang Pihak ke III TA.2014 Pembangunan dan Peningkatan Sal Jl. Bambu Mas Raya + Phb Sibolga (Samping SD 10 dan SMPN 202) Kel. Pondok Bambu
		48.344.178,00				48.344.178	PT. AKSA LESTARI SEJATI	Hutang Pihang ke III TA 2013-002. Peningkatan Saluran Jl. Bambu Mas Raya
		119.524.356,00				119.524.356	CV. JADI JAYA BERSAMA	Hutang Pihak ke III TA 2013-010. Normalisasi Sal.Jl. Condet Raya, Jl. Batu Ampar I dan Jl. Budaya
		223.214.093,00				223.214.093	CV. FORTITO BARITO	Hutang Pihak ke III TA 2013-046. Pembangunan Sal. Jl. SMU 64 Cipayung dan Normalisasi Sal. Jl. Raya Cipayung dan Crossing Urindo
		59.729.468,00				59.729.468	PT. ARTAGUNA MANDIRI	Hutang Pihak ke III TA 2013-021. Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 3,5 Kelurahan Bambu Apus
		226.276.875,00				226.276.875	PT. JABAT JAYA UTAMA	Hutang Pihak ke III TA 2013-070. Peningkatan Sal. Phb. Cibening Area Tinja Cakung s.d Kali Cakung Lama + Sal. Phb Pulo Halmahera s.d kali Cakung
		50.140.140,00				50.140.140	CV. MITRA PAHAE	Hutang Pihak ke III TA 2013-001 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di Kelurahan Kampung Rambutan
		72.785.962,00				72.785.962	CV. PUTRA SIAMPUDAN	Hutang Pihak ke III TA 2013-002 Pembuatan Saluran Lokasi Jl. SPG 7 RW 09, Jl. Manunggal XVII RW 011 dan RT 001, 002, 003, 004

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		105.913.551,00				105.913.551	PT. CIAMOSSAD IRANI PRIMA	Hutang Pihak ke III TA 2013-044 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 1, 3 Kel. Kebon Manggis
		395.413.978,00				395.413.978	PT. LAMPUNG TEGAR CEMERLANG	Hutang Pihak ke III TA 2013-045 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 1, 2,3,4,5,6,7,8, 11, 12, 14, 15 Kelurahan Pisangan Timur
		148.908.882,00				148.908.882	PT. LAMPUNG TEGAR CEMERLANG	Hutang Pihak ke III TA 2013-062 Normalisasi dan Pembangunan Saluran di RW 2,4,6,9,17,18 Kel. Penggilingan
		35.189.722,00				35.189.722	PT. GIHON WAHANA CIPTA	Hutang Pihak ke III TA 2013-002. Pengawasan/Supervisi Kegiatan Fisik, Zona I (Jasa Konsultansi)
		11.539.299,00				11.539.299	PT. KENCANA BIRU ENGINEERING	Hutang Pihak ke III TA 2013-004. Pengawasan/Supervisi Kegiatan Fisik, Zona III (Jasa Konsultansi)
		5.565.409,00				5.565.409	PT. PRATIWI ADHIGUNA KONSULTAN	Hutang Pihak ke III TA 2013-010. Pengawasan/Supervisi Kegiatan Fisik, Zona IV (Jasa Konsultansi)
8	Dinas Perhubungan	3.600.000				3.600.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Emplesemen Terminal Kampung Rambutan (Konsultan Pengawasan)
		3.600.000				3.600.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti (Konsultan Perencanaan)
		1.210.000				1.210.000	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Gedung Kantor UPT. Terminal, Gedung Sudinhub Jakarta Barat, Gedung Kantor Penertiban Sudinhub Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan)
		1.950.000				1.950.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pengadaan Armada Bus Busway Koridor X (Konsultan - Legal Opinion)
		50.000.000				50.000.000	Dinas Tata Ruang	Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI (Konsultan - Legal Opinion)
		3.600.000				3.600.000	Dinas Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 2, Gedung Eks Kanwil, Ruang Aula Dishub (Konsultan Pengawasan)
		50.000.000				50.000.000	Sugeng W,M.Widigdo & Reka	Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 1 (Eks Pertanian), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur (Konsultan Pengawasan)
		50.000.000				50.000.000	Sugeng W,M.Widigdo & Reka	Suku Cadang & Pemeliharaan Kendaraan

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		12.364.000				12.364.000	PT. Alfriz Auliatama	Peningkatan Emplasement Terminal/Depo (Konsultan Perencanaan)
		24.519.000				24.519.000	CV. Galuh	Pemeliharaan Terminal Muara Angke (Konsultan Pengawasan)
		12.364.000				12.364.000	PT. Andalusia Konsulindo	Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan (Konsultan Perencanaan)
		29.305.500				29.305.500	CV. Cipta Sukses Raya	Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulogebang (Konsultan Pembuatan Lampiran SK Gub)
		38.875.375				38.875.375	PT. Hardja Moekti Consultant	Pembangunan JPO Sentra Primer Timur
		27.014.250				27.014.250	PT. Bahana Nusantara	By. Konsultan Pengawas atas Kegiatan Pekerjaan Fasilitas Integrasi Halte Busway Dengan Stasiun KRL Manggarai
9	UPT. Terminal Angkutan Jalan	5.843.970.000				5.843.970.000	PT. SARTONIA AGUNG	Penyelesaian Revitalisasi TB Klender
		72.418.500				72.418.500	PT. BUMI MADANI	Pengawasan Penyelesaian Revitalisasi TB. Klender
		143.660.000				143.660.000	CV. APIK KARYA	Pengawasan Penyelesaian Revitalisasi TB. Rawamangun
10	UP PKB UJUNG MENTENG		9.454.500			9.454.500	PT. HERPIS PERTOMA MULIA	Penyempurnaan Drive thru PKB Ujung Menteng Belanja jasa konsultan perencanaan/planningSPK NO.739/-076.931, TGL 2/9/2014BAST N0.816/-076.93, TGL 12/9/2014
			18.591.100			18.591.100	PT. HERPIS PERTOMA MULIA	Penyempurnaan Drive thru PKB Ujung Menteng Belanja jasa konsultan pengawasan/supervisionSPK NO.987/-076.932, TGL 21/10/2014BAST NO.1161/-076.93, TGL 3/12/2014
11	UP. Angkutan Perairan dan Kepelabuhan	59.166.000				59.166.000	PT. Sae Petrolium Indonesia	Belanja Bahan Bakar Minyak Gas
			54.110.500			54.110.500	PT. BAHTERA PRIMA PERSADA	Belanja Bahan Bakar Minyak Kapal
12	Sudin Pendidikan II - JAKUT	49.183.000				49.183.000	PT. CENTRUM CIKINI CREASI	Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan 007/ Perawatan Berat Gedung SDN CILINCING 06/12
13	Dinas Sosial	36.471.000		36.471.000		-	PT. ADHIKARA MITRACIPTA	Belanja Jasa Konsultasi pengawasan Rehab Panti Sosial Bina Insani (PSBI) Bangun Daya 1
14	PSBG Belaian Kasih		20.460.000			20.460.000	BPJS Kesehatan	
15	Pusat Produksi, Inspeksi dan Sertifikasi Hasil Perikanan	105.602.550		105.602.550		-	CV. PAGA RAYA	Penanganan Jaminian Pengujian Mutu

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		24.915.000		24.915.000		-	CV. SUNDUNG DILANGIT	Penanganan Jaminian Pengujian Mutu
		14.000.000		14.000.000		-	PT. KINGLAB INDONESIA	Pengadaan Sarana Prasarana
16	Dinas Kesehatan		297.109.747			297.109.747		SPJ yang belum terbayar
			141.490.000			141.490.000	PT. Arkitek Team Empat	Konstruksi Design and Build RSUD Kebayoran Baru
			16.586.400			16.586.400		Utang Fotokopi
17	Rumah Sakit Umum Kec. Pademangan		16.080.000			16.080.000	PT DOS NI ROHA	Berkas kelengkapan SPJ belum selesai
18	Sudin Kesehatan Jaktim	15.240.000				15.240.000	PT. HUDA TATA SARANA	NENJA Konsultasi Perencanaan
19	Sudin Kesehatan - Jakbar	52.822.000		52.822.000		-	CV. ANUGERAH MULTI KREASI	SPM sudah diinput SKPD , Berkas terselip di KASDA tidak ada tanda terima dan Tidak tercatat di BKU
20	Sudin Kesehatan - Jaksel		287.525.036			287.525.036	PT Ramadika Mandiri	Belanja Modal Konstruksi Pembangunan Puskesmas Kelurahan Pondok Labu
			338.807.364			338.807.364	PT Indah Utama Jaya Mandiri	Belanja Modal Konstruksi Pembangunan Puskesmas Kelurahan Rawa Barat
21	RSUD Koja		17.787.712.094			17.787.712.094	PT. Adhi Karya, PT Pandu P	Rehab Berat Gedung Blok B
			2.685.607.032			2.685.607.032	PT. Adhi Karya, PT Pandu P	Rehab Ringan Gedung Blok C
			248.222.971			248.222.971	PT. Adhi Karya, PT Pandu P	Rehab Sedang Gedung Blok E
22	Kelurahan Semper Timur - Jakut	96.602.000		96.602.000		-	SALMI AZIS	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan PPSU Kel. Semper Timur
23	Kecamatan Kalideres - Jakarta Barat	107.220.872		107.220.872		-	CV. MARSINDO CEMERLANG	1.20.32 Program KebijakanPengelolaan keuangan dan Aset Daerah, 045. Perawatan Jalan . Jl. Gang utama Rw 01. Kel semanar
24	Dinas Pendidikan	32.400.500		32.400.500		-	CV Kasih Sinar Abadi	Pengadaan Buku Pustaka Anak Cerdas
		38.824.360		38.824.360		-	PT Borisdo Jaya	Pengadaan Ensiklopedia Anak Islam
		46.340.420		46.340.420		-	PT Mena Rohipasibrave	Pengadaan Wireless Interactive Live DLP System(W.I.L.D.S)
		57.323.185		57.323.185		-	PT Solusi Datama Tafuji	Pengadaan Interaktif Modern Class Complit With Audio Visual
		31.500.400		31.500.400		-	PT Sriayu Multi Kreasi	Ensiklopedia Karakter Bangsa-12 jilid
		32.570.000		32.570.000		-	CV Panior Girestari	Matematika Menyenangkan-8Jilid
		38.890.375		38.890.375		-	CV Feradi Rejeki	Pengadaan Buku Aku Tahu Aku Bisa
		28.525.000		28.525.000		-	CV Mega Surya Abadi	Usaha Kesehatan Sekolah
		54.750.000		54.750.000		-	PT Anpridis Morangta	Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SMP
		54.950.000		54.950.000		-	PT Reva Mustika Karya	Pengadaan ICT For Learning School Management untuk SD
		69.516.960		69.516.960		-	PT Karunia Lautan Semesta A	Pengadaan Classroom Audio System MIC untuk SD
		69.975.000		69.975.000		-	PT Bintang Jaya Kreasi	Pengadaan Classroom Audio System MAC untuk SMA

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		115.432.000		115.432.000		-	PT Bintang Jaya Kreasi	Pengadaan Laboratorium Komputer Terintegrasi
		66.293.190		66.293.190		-	PT Karya Mavoli	Pengadaan Interaktif Digital Classroom
		68.820.000		68.820.000		-	PT Genta Cipta Abadi	Pengadaan Interaktif Portable Learning System (I-Port Learning System)
		45.349.507				45.349.507	PT Rendi Narumiris Jaya	Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMA
		48.437.440				48.437.440	PT Citra Abadi Persada	Pengadaan alat Lab Biologi berbasis TI dan Komunikasi untuk SMP
		32.098.740				32.098.740	CV Alpin Sejahtera Sentosa	Pengadaan Integrated Library Equipment SMA
		38.243.212				38.243.212	CV Rapina Rejeki	Pengadaan Integrated Library Equipment SMP
		44.911.500				44.911.500	CV Achmad Jaya	Pengadaan Bangku Tunggu SD
		43.246.155				43.246.155	CV Gok Uli Rejeki	Pengadaan Kursi Kuliah/Kursi Serba Guna
		40.621.500				40.621.500	CV Charissa Sejati	Pengadaan Bangku Tunggu SMP
		44.804.250				44.804.250	PT Abrooro Haya	Pengadaan Bangku Tunggu SMA
		48.930.623				48.930.623	PT Surya Menara Indah	Pengadaan File Cabinet
		22.132.815				22.132.815	CV Wanni Star	Pengadaan Tempat Sampah
		53.500.000				53.500.000	CV Lima Putri Jaya	Pengadaan Papan Tulis IT
		47.745.727				47.745.727	PT Revalino Agung Pratama	Pengadaan Mikroskop Digital Observasi untuk Pengajaran dan Praktikum
		26.019.000				26.019.000	CV Anugerah Indah Maha Kar	Pengadaan Classroom Audio System MTC untuk SMP
		-	1.370.199.558			1.370.199.558	PT. JIEP	Biaya Maintenance Fee
			1.190.950.000			1.190.950.000		Sewa Gudang & Mobiltas darat Jakut & Jabar
			816.940.000			816.940.000		Sewa Gudang & Mobiltas darat Jakpus & Jaksel
			983.460.000			983.460.000		Sewa Gudang & Mobiltas darat Jaktim & P.1000
25	Kelurahan Jatinegara - Jaktim	2.249.100		2.249.100		-	BPJS	BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 70 Orang PPSU Bulan Desember 2015
26	Dinas Pelayanan Pajak	334.664.330		334.664.330		-		
27	Dinas Perumahan	2.567.842.040		2.567.842.040		-	PT. BANGUN KHARISMA PRIMA	Pembangunan Mess dan GOR TNI AU di Halim (Fisik)
		17.851.100		17.851.100		-	PT. WAHANA CIPTA BANGUN WISMA	PembangunanMess dan GOR TNI AU di Halim (Pengawasan)
		4.113.500.000		4.113.500.000		-	PT.AGUNG SERBA TULEN	Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat (Fisik)
		31.618.125		31.618.125		-	PT. BAYU BERLIAN MANDIRI	Pembangunan Gedung Pemda Daan Mogot Jakarta Barat (Pengawasan)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		602.455.600		602.455.600		-	PT.HALAHATI NAPOSOBULUNG	Rehab Asrama AURI Halim Perdana Kusuma (Fisik)
		7.570.350		7.570.350		-	PT. ROHIM KHOIRUL CIPTA SENTOSA	Rehab Asrama AURI Halim Perdana Kusuma (Pengawasan)
		4.730.000.000		4.730.000.000		-	PT. KARTIKA EKAYASA	Pembangunan Gedung Kantor UPPD Ciracas (Fisik)
		84.397.500		84.397.500		-	PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN	Pembangunan Gedung Kantor UPPD Ciracas (Pengawasan)
		1.940.673.500		1.940.673.500		-	PT. HALAHATI NAPOSOBULUNG	Pembangunan Gedung Kantor UPPD Kec. Mampang Prapatan (Fisik)
		38.937.250		38.937.250		-	PT. SEWUN INDO KONSULTAN	Pembangunan Gedung Kantor UPPD kec. Mampang Prapatan (Pengawasan)
		252.170.504		252.170.504		-	PT.ERA BANGUN JAYA ABADI	Pembangunan Gedung KPUD Jakarta Utara (Fisik)
		8.084.175		8.084.175		-	PT.GALIH KARSA UTAMA	Pembangunan Gedung KPUD Jakarta Utara (Pengawasan)
		7.156.771.100		7.156.771.100		-	PT.TOTALINDO EKA PERSADA	Pembangunan Masjid Raya Jakarta (Fisik)
		46.572.500		46.572.500		-	PT.ELSADAI SERVO CONS	Pembangunan Masjid Raya Jakarta (pengawasan)
		49.071.000		49.071.000		-	4 CIPTA KOSULTAN	Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat (Pengawasan)
		52.151.000		52.151.000		-	4 CIPTA KONSULTAN	Perluasan Gedung PMI Jakarta Timur
		37.686.000				37.686.000	KJPP DAMIANUS AMBUR & REKAN	Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Muara Baru, Kel, Penjaringan, Kec. Penjaringan-Jakarta Utara
		47.404.500				47.404.500	KJPP DAMIANUS AMBUR & REKAN	Belanja Jasa Konsultasi Penilai/ Appraisal Pembebasan Lahan Untuk Pembangunan Rusun di Kel. Cengkareng Barat, kec. Cengkareng - Jakarta Barat
		1.453.600.000		1.453.600.000		-	PT. DAKSIANA PERSADA (KSO)-PT.ROSA LISCA	Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rusun Rawa Bebek - Jakarta Timur
		24.219.408		24.219.408		-	PT. SEWUN INDO KONSULTAN	Pematangan Tanah dan Turap Lokasi Rusun Rawa Bebek - Jakarta Timur
			371.415.738			371.415.738	PT. KARYA BISA	Perbaikan Rumah Susun Marunda Cluster A (Fisik)
			9.405.770			9.405.770	PT. BENNATIN SURYA CIPTA	Perbaikan Rumah Susun Marunda Cluster A (Pengawasan)
			150.629.596			150.629.596	PT. KARYA BISA	Perbaikan Rumah Susun Penjaringan (Fisik)
			4.396.854			4.396.854	PT. BENNATIN SURYA CIPTA	Perbaikan Rumah Susun Penjaringan (Pengawasan)
			87.189.408			87.189.408	PT. KARYA BISA	Perbaikan Rumah Susun Jatirawasari (Fisik)
			2.512.488			2.512.488	PT. BENNATIN SURYA CIPTA	Perbaikan Rumah Susun Jatirawasari (Pengawasan)
			149.866.107			149.866.107	PT. KARYA BISA	Perbaikan Rumah Susun Komarudin (Fisik)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			3.962.112			3.962.112	PT. BENNATIN SURYA CIPTA	Perbaikan Rumah Susun Komarudin (Pengawasan)
			1.151.971.205			1.151.971.205	PT. KARYA BISA	Perbaikan Rumah Susun Muara Baru (Fisik)
			27.995.584			27.995.584	PT. BENNATIN SURYA CIPTA	Perbaikan Rumah Susun Muara Baru (Pengawasan)
			510.011.895			510.011.895	PT. KARYA BISA	Perbaikan Rumah Susun Semper (Fisik)
			12.492.480			12.492.480	PT. BENNATIN SURYA CIPTA	Perbaikan Rumah Susun Semper (Pengawasan)
28	Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III	224.509.197		224.509.197		-	PT. FITRI Utama Mandiri	Pelaksanaan Fisik Perbaikan Rumah Susun Cakung Barat Blok C dan D
29	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan	93.489.000		93.489.000		-	PT. GIANT SOLID MANDIRI	Pengadaan Audio VisualKtr. Walikota Jakarta Selatan
		114.444.000		114.444.000		-	PT.SINAR PROTEKSINDO	Perawatan AC. Gd, Sayap Belakang Ktr. Walikota
30	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Pusat	86.657.650		86.657.650		-	CV. GRAND PERMATA MULANA	050. Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Taman Sudin Pertamanan dan Pemakausdur Kecil
		119.843.500		119.843.500		-	CV. WAHANA PRIMA ABADI	050. Pemeliharaan / Perbaikan Rutin Taman sudin dan Pemakaman Jakarta Pusat-
31	Sudin Pertamanan dan Pemakaman Jakarta Selatan	81.334.880		81.334.880		-	CV. HASANAH	Pemeliharaan / Perbaikan Rutin sarana dan Prasarana Taman di Wilayah Jakarta selatan sesuai dengan SPK no. 1975/-1.795.22 Tanggal, 29 April 2015
		36.033.088		36.033.088		-	CV. HASANAH	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan
			5.418.710			5.418.710	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Depan SMP 107 Pejaten Barat Pasar Minggu)
			4.325.640			4.325.640	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan JH Pasar Bata Putih)
			10.948.080			10.948.080	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan separator JH. FO Tanjung Barat sisi selatan)
			14.872.880			14.872.880	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan JH separator Jl.Hang Tuah 7 dan pulau Segitiga Jalan Patimura Ujung)
			14.336.080			14.336.080	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan Taman Bawah FO Kuningan sisi timur)

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
			28.656.100			28.656.100	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan JH Jl. Prapanca Raya depan Walkot Selatan)
			28.576.350			28.576.350	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan Taman Bawah FO Pancoran)
			41.110.300			41.110.300	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Penyulaman Tanaman Hias di separator JH Jl. Patimura)
			41.087.200			41.087.200	CV. Melyda Bersaudara	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan JH Jl. Gatot Subroto sisi utara)
			33.624.690			33.624.690	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Penyulaman Median JH Jl. Iskandarsyah-JH Jl.Prapanca)
			43.218.120			43.218.120	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan separator JH Jl. Jenderal Sudirman sisi barat)
			48.972.880			48.972.880	PT. Kebon Asri Indonesia	Pemeliharaan /Perbaikan Rutin Sarana dan Prasarana taman di wilayah Jakarta Selatan (Perbaikan separator JH Jl. Jenderal Sudirman sisi timur)
			93.269.428			93.269.428	PT. Bintang Pratama Equipment	Pemeliharaan Taman di KecamatanPancoran Jakarta Selatan
32	Biro Umum	94.968.324		94.968.324		-	PT. Sinmar Eklesia Sejahtera	
		88.740.280		86.240.440	2.499.840	-	PT. Sinmar Eklesia Sejahtera	Koreksi Kesalahan Perhitungan Pajak
		100.931.670		100.931.670		-	PT. Solusi Jaya Utama	
		192.958.997		84.393.419	108.565.578	-	PT. Arimanda Persada	hanya dibayarkan sesuai BAST
		47.469.044		41.583.520	5.885.524	-	PT. Hosea Jaya Lestari	Koreksi Kesalahan Perhitungan Pajak
		36.180.100		36.180.100		-	PT. Solusi Jaya Utama	
		38.091.361		38.091.361		-	PT. Media Solusindo Pratama	
		85.162.000		85.162.000		-	PT. Media Solusindo Pratama	
		180.531.126		-	180.531.126	-	PT. Media Solusindo Pratama	Dihapuskan
33	Dinas Koperasi UMKM dan Pedagangan	44.495.000				44.495.000	Kantor jasa penilai Febriman Siregar & Rekan	
		44.495.000				44.495.000	Kantor jasa penilai Publik Tri Kurniawan, Zarifin, Pardomuan,Nazir & Rekan	
		2.335.148		2.335.148		-	BPJS	
		751.186.125		751.186.125		-		Utang Pesangon Pegawai Eks UPDB PEMK Tahun 2015

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		14.650.000		14.650.000		-		Utang Jasa Akuntan Penyusun Laporan Penutup UPDB PEMK per 31 Des 2015
34	Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah	158.400.000			158.400.000	-	PT. Metro Security Delta 311	
		157.850.000		157.850.000		-	PT. Metro Security Delta 311	
		45.950.000			45.950.000	-	Tenaga Ahli BPKP	
		55.775.000			55.775.000	-	Tenaga Ahli BPKP	
35	Sudin Kebersihan-Jakbar		106.715.505			106.715.505	PT. Pertamina Retail	Belanja BBM
36	Badan Pelayanan Satu Pintu	2.056.800		2.056.800		-	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kelurahan di wilayah kecamatan Cempaka Putih
		15.345.000		15.345.000		-	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan Kemayoran
		23.760.000		23.760.000		-	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi kelurahan di wilayah kecamatan kepulauan seribu selatan
	-	7.141.200		7.141.200		-	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan Senen
		7.500.000		7.500.000		-	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi kelurahan di wilayah kecamatan Cempaka Putih
		28.670.400		28.670.400		-	PT. Setiawan Kumalagiri	Belanja sewa mesin foto kopi BPTSP
		29.000.400		29.000.400		-	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja modal alat pendingin kecamatan Tebet
		19.874.580		19.874.580		-	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kecamatan Kepulauan Seribu Selatan
		216.150		216.150		-	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Kembangan
		14.520.000		14.520.000		-	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi Kantor PTSP Jakarta Timur
		12.546.600		12.546.600		-	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Kebayoran Baru
		47.960.000		47.960.000		-	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kelurahan di wilayah kecamatan Pasar Rebo
		7.920.000		7.920.000		-	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan cilincing
		50.920.320		50.920.320		-	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kecamatan Matraman
		3.109.046		3.109.046		-	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kelurahan di wilayah kecamatan menteng
		215.600		215.600		-	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Cengkareng
		746.454		746.454		-	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kelurahan di wilayah kecamatan menteng
		22.088.000		22.088.000		-	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja modal alat pendingin kelurahan di wilayah kecamatan Pesanggrahan
		28.891.500		28.891.500		-	CV. Richardo	Belanja modal filling kabinet kelurahan di wilayah kecamatan Sawah Besar
		7.920.000		7.920.000		-	PT. Mahaza Mitra Solusi	Belanja sewa mesin foto kopi kecamatan Kepulauan Seribu Selatar

No.	NAMA SKPD	UTANG PER 31 DESEMBER 2015	PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2016			UTANG PER 31 DESEMBER 2016	NAMA PIHAK KETIGA	URAIAN/KEGIATAN (KETERANGAN)
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN				
				PEMBAYARAN	KOREKSI			
1	2	3	4	5	6	7=3+4-5-6	8	9
		1.740.000		1.740.000		-	PT. Bhinneka Mentaridimensi	Belanja alat tulis kantor kantor PTSP Kep. Seribu
		9.818.600		9.818.600		-	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja modal alat pendingin kelurahan di wilayah kecamatan Johar Baru
		308.000		308.000		-	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan Grogol Petamburan
		23.067.000		23.067.000		-	PT. Kurnia Agung Rezeki	Belanja alat pendingin kecamatan Pancoran
		67.806.200		67.806.200		-	CV. Manggala Jaya Mandiri	Belanja alat tulis kantor kelurahan di wilayah kecamatan Pulo Gadung
		8.536.000		8.536.000		-	CV. Rhema Makmur	Belanja alat tulis kantor kecamatan Mampang Prapatan
		14.520.000		14.520.000		-	PT. Dekana Langit Biru	Belanja modal papan visual kantor PTSP Jakarta Barat
		4.088.700		4.088.700		-	CV. Rhema Makmur	Belanja cetakan umum kecamatan sawah besar
37	Kelurahan Pegangsaan Dua - Jakut		8.580.000			8.580.000		Sewa Fotocopy
38	Kelurahan Petukangan Utara - Jaksel		27.249.000			27.249.000		BPJS
39	Kelurahan Lenteng Agung - Jaksel		13.686.190			13.686.190		BPJS
40	Kelurahan Cipete Selatan - Jaksel		75.691			75.691		BBM
41	Dinas Pertamanan dan Pemakaman		1.746.444.730			1.746.444.730	PT. Masa Remaja	Utang tahun 2013 yang belum terbayar untuk kegiatan Perbaikan Pagar Taman Tebet Sisi Utara dan Sisi Selatan, Jakarta Selatan
42	Kelurahan Pademangan Timur - Jakut		29.016.000			29.016.000		
43	Kelurahan Tugu Selatan - Jakut		31.000			31.000		
44	Kelurahan Koja - Jakut		2.325.000			2.325.000		
	JUMLAH	**63.239.308.201**	**45.286.650.833**	**29.368.775.428**	**669.387.160**	**78.487.796.446**		

Lampiran 16

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA
PER 31 DESEMBER 2016

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahan Daerah	Sumber Lapkeu	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Hak Minoritas	Modal Disetor	Tambahan Modal Disetor	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah		
																	Cost Method	*Equity Method*	*Jumlah*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (16 X 17)	20 (18 + 19)
1	**Bidang Perbankan**																		
1.	PT Bank DKI	Audited 2016	14.898.602.000	25.351.571.000	317.254.000	40.567.427.000	27.654.298.000	2.060.354.000	29.714.652.000	-	4.431.159.000	1.000	982.339.000	1.982.946.000	7.396.445.000	99,98%	-	7.394.775.810	7.394.775.810
	Sub Total 1		**14.898.602.000**	**25.351.571.000**	**317.254.000**	**40.567.427.000**	**27.654.298.000**	**2.060.354.000**	**29.714.652.000**	**-**	**4.431.159.000**	**1.000**	**982.339.000**	**1.982.946.000**	**7.396.445.000**		**-**	**7.394.775.810**	**7.394.775.810**
2	**Bidang Asuransi**																		
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Unaudited 2016	1.504.152.556	808.124.415	-	2.312.276.971	1.536.391.834	4.000.000	1.540.391.834		470.541.572	-	38.426.182	262.917.383	771.885.137	4,45%	8.680.000		8.680.000
	Sub Total 2		**1.504.152.556**	**808.124.415**	**-**	**2.312.276.971**	**1.536.391.834**	**4.000.000**	**1.540.391.834**	**-**	**470.541.572**	**-**	**38.426.182**	**262.917.383**	**771.885.137**		**8.680.000**	**-**	**8.680.000**
3	**Bidang Konstruksi**																		
1.	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2016	4.255.426.370	2.368.502.997	-	6.623.929.366	457.617.214	431.278.941	888.896.154	389.122.243	3.746.730.231	1.000.000.000	-	599.180.737	5.345.910.968	99,99%		5.345.411.626	5.345.411.626
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2016	5.968.201.499	8.567.809.583	-	14.536.011.082	4.583.920.839	1.127.816.909	5.711.737.748		3.117.000	523.004.346	472.205.554	5.445.261.489	6.443.588.389	38,80%		2.500.120.564	2.500.120.564
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2016	251.804.731	1.021.976.660	-	1.273.781.392	107.658.285	205.569.112	313.227.397	1.651.079	939.002.771	-	-	61.938.501	1.000.941.272	100,00%		1.000.941.272	1.000.941.272
	Sub Total 3		**10.475.432.601**	**11.958.289.240**	**-**	**22.433.721.840**	**5.149.196.338**	**1.764.664.962**	**6.913.861.299**	**390.773.323**	**4.688.850.002**	**1.523.004.346**	**472.205.554**	**6.106.380.727**	**12.790.440.629**		**-**	**8.846.473.462**	**8.846.473.462**
4	**Bidang Jasa Lainnya**																		
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	19.597.963	1.317.961.793	-	1.337.559.756	43.977.931	1.003.234.399	1.047.212.329		300.000.000	-	-	(9.652.573)	290.347.427	13,14%	39.375.000		39.375.000
2.	PDAM Jaya	Audited 2016	747.497.025	291.831.551	-	1.039.328.575	891.255.005	1.093.905.669	1.985.160.675		127.573.411	195.790.689,13	(3.077.246,96)	(1.266.118.952)	(945.832.099)	100,00%			-
3.	PD PAL Jaya	Unaudited 2016	513.076.884	190.804.639	1.389.431	705.270.953	27.630.492	7.303.980	34.934.472		587.752.402	-	-	82.584.080	670.336.482	100,00%		670.336.482	670.336.482
4.	PD Pasar Jaya	Audited 2016	1.136.300.335	3.354.579.442	-	4.490.879.777	175.008.934	3.331.386.921	3.506.395.854		775.343.269	-	(101.680.869)	310.821.522	984.483.923	100,00%		984.483.923	984.483.923
5.	PT Penjamin Kredit Daerah	Audited 2016	297.780.352	17.084.438	-	314.864.790	12.254.214	-	12.254.214		300.000.000	-	(16.512)	2.627.087	302.610.575	98,33%		297.567.066	297.567.066
	Sub Total 4		**2.714.252.558**	**5.172.261.863**	**1.389.431**	**7.887.903.851**	**1.150.126.576**	**5.435.830.969**	**6.585.957.545**	**-**	**2.090.669.082**	**195.790.689**	**(104.774.627)**	**(879.738.837)**	**1.301.946.308**		**39.375.000**	**1.952.387.470**	**1.991.762.470**
5	**Bidang Perdagangan**																		
1.	PT Food Station Tjipinang	Unaudited 2016	434.523.444	47.077.253	1.017.444	482.618.140	90.374.397	21.495.183	111.869.580		347.800.000	-	-	22.948.560	370.748.560	99,90%		370.392.324	370.392.324
2.	PD Dharma Jaya	Unaudited 2016	127.460.907	45.080.121		172.541.029	20.707.754	12.309.912	33.017.666		186.275.053	-	-	(46.751.691)	139.523.363	100,00%		139.523.363	139.523.363
	Sub Total 5		**561.984.351**	**92.157.374**	**1.017.444**	**655.159.169**	**111.082.151**	**33.805.095**	**144.887.246**	**-**	**534.075.053**	**-**	**-**	**(23.803.130)**	**510.271.923**		**-**	**509.915.687**	**509.915.687**
6	**Bidang Pariwisata**																		
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2016	915.674.262	2.852.876.773	-	3.768.551.035	1.028.727.063	911.711.483	1.940.438.546	129.624.756	400.000.000	36.709.233		1.261.778.501	1.698.487.734	72,00%		1.222.911.169	1.222.911.169
2.	PT Jakarta Tourisindo	Audited 2016	30.155.818	499.181.984	-	529.337.802	12.024.750	46.893.816	58.918.566		462.011.000	-	-	8.408.236	470.419.236	99,35%		467.364.639	467.364.639
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2012	15.127.244	328.529.635	-	343.656.879	127.627.509	67.394.810	195.022.319		48.870.000	592.242.796	-	(492.478.236)	148.634.560	8,08%	3.951.000		3.951.000
4.	PT Pakuan International	Audited 2010	820.579	37.187.456	3.149.640	41.157.675	374.485	1.923.279	2.297.764		50.000.000	236.600	2.039.534	(13.416.224)	38.859.910	1,94%	1.345.900		1.345.900
	Sub Total 6		**961.777.903**	**3.717.775.848**	**3.149.640**	**4.682.703.391**	**1.168.753.806**	**1.027.923.389**	**2.196.677.195**	**129.624.756**	**960.881.000**	**629.188.629**	**2.039.534**	**764.292.277**	**2.356.401.440**		**5.296.900**	**1.690.275.807**	**1.695.572.707**
7	**Bidang Kawasan Industri**																		
1.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Audited 2016	269.560.960	168.178.732	-	437.739.693	71.996.765	3.590.032	75.586.797		200.000.000	-	383.483	161.769.413	362.152.896	50,00%	-	181.076.448	181.076.448
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2016	514.410.750	1.330.270.043	-	1.844.680.793	423.675.230	161.669.213	585.344.443		363.945.000	111.967.695	(9.010.512)	792.434.168	1.259.336.350	26,85%	209.692.695		209.692.695
	Sub Total 7		**783.971.711**	**1.498.448.775**	**-**	**2.282.420.486**	**495.671.994**	**165.259.245**	**660.931.240**	**-**	**563.945.000**	**111.967.695**	**(8.627.029)**	**954.203.580**	**1.621.489.246**		**209.692.695**	**181.076.448**	**390.769.143**
8	**Bidang Angkutan Darat**																		
1.	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	135.826	3.385.949		3.521.775	253.635	5.322.734	5.576.369		5.500.000	-	-	(7.554.594)	(2.054.594)	28,00%	-	-	-
2.	PT Mass Rapid Transit Jakarta	Audited 2016	475.866.752	5.619.354.464	-	6.095.221.216	262.754.516	345.127.788	607.882.304		3.958.878.000	1.763.174.595	1.574.599	(236.288.282)	5.487.338.912	99,99%	-	5.486.645.870	5.486.645.870
3.	PT Transportasi Jakarta	Unaudited 2016	2.959.966.867	442.879.157		3.402.846.023	217.890.545	428.788.889	646.679.434		360.000.000	1.380.000.000	75.012	211.001.578	1.951.076.590	99,36%	-	1.938.497.115	1.938.497.115
	Sub Total 8		**475.866.752**	**5.619.354.464**	**-**	**6.095.221.216**	**480.645.061**	**773.916.676**	**1.254.561.737**	**-**	**4.318.878.000**	**3.143.174.595**	**1.649.611**	**(25.286.705)**	**7.438.415.502**		**-**	**7.425.142.984**	**7.425.142.984**
9	**Bidang Aneka Industri**																		
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2015	902.006.833	136.315.083	-	1.038.321.916	140.419.495	4.828.094	145.247.589	3.066.052	16.013.181	19.015.656	-	811.526.592	846.555.429	26,25%	-	222.250.087	222.250.087
2.	PT Cemani Toka	Unaudited 2016	302.339.932	62.038.236	3.772.318	368.150.485	211.021.228	28.343.827	239.365.054		110.099.020	-	-	18.686.411	128.785.430	27,42%	27.059.360	-	27.059.360
	Sub Total 9		**1.204.346.765**	**198.353.319**	**3.772.318**	**1.406.472.401**	**351.440.723**	**33.171.921**	**384.612.643**	**3.066.052**	**126.112.201**	**19.015.656**	**-**	**830.213.003**	**975.340.859**		**27.059.360**	**222.250.087**	**249.309.447**
10	**Bidang Rumah Sakit**																		
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2015	48.329.134	68.034.930	12.299.475	128.663.538	15.717.828	59.597.454	75.315.282		100.308.278		-	(46.960.021)	53.348.257	51,00%	51.157.222	-	51.157.222
	Sub Total 10		**48.329.134**	**68.034.930**	**12.299.475**	**128.663.538**	**15.717.828**	**59.597.454**	**75.315.282**	**-**	**100.308.278**	**-**	**-**	**(46.960.021)**	**53.348.257**		**51.157.222**	**-**	**51.157.222**
	Total Seluruh Bidang Industri		**33.628.716.330**	**54.484.371.227**	**338.882.307**	**88.451.969.862**	**38.113.324.311**	**11.358.523.711**	**49.471.848.021**	**523.464.130**	**18.285.419.188**	**5.622.142.610**	**1.383.258.225**	**9.925.164.277**	**35.215.984.300**	**-**	**341.261.177**	**28.222.297.756**	**28.563.558.933**

Lampiran 17

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2016

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Perusahan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
1	**Bidang Perbankan**								
1.	PT Bank DKI	Audited 2015	3.678.100.000	(1.454.832.000)	2.223.268.000	122.017.000	(2.003.031.000)	-	342.254.000
	Sub Total 1		**3.678.100.000**	**(1.454.832.000)**	**2.223.268.000**	**122.017.000**	**(2.003.031.000)**	**-**	**342.254.000**
2	**Bidang Asuransi**								
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	Unaudited 2016	2.099.991.015	(1.842.061.629)	257.929.386	-	(14.053.414)	-	243.875.973
	Sub Total 2		**2.099.991.015**	**(1.842.061.629)**	**257.929.386**	**-**	**(14.053.414)**	**-**	**243.875.973**
3	**Bidang Konstruksi**								
1.	PT Jakarta Propertindo (Konsolidasi)	Unaudited 2016	1.115.604.231	(975.957.773)	139.646.458	307.587.034	(319.382.368)	(890.081)	126.961.043
2.	PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi)	Audited 2015	2.244.102	(816.779)	1.427.323	148.340	(282.714)	(74.565)	1.218.384
3.	PD Pembangunan Sarana Jaya	Audited 2015	119.699.196	(12.450.988)	107.248.209	20.290.270	(45.652.879)	(2.553.195)	79.332.405
	Sub Total 3		**1.237.547.530**	**(989.225.540)**	**248.321.990**	**328.025.645**	**(365.317.961)**	**(3.517.841)**	**207.511.832**
4	**Bidang Jasa Lainnya**								
1.	PT Jakarta International Expo	Audited 2007	136.690.927	(127.448.089)	9.242.838	259.482	(8.501.489)		1.000.832
2.	PD AM Jaya	Unaudited 2016	2.683.832.743	(2.472.744.258)	211.088.484	71.169.960	(132.125.260)	(34.608.625)	115.524.559
3.	PD PAL Jaya	Unaudited 2016	71.359.997	(48.544.979)	22.815.018	19.434.678	(161.693)	(10.522.000)	31.566.002
4	PD Pasar Jaya	Audited 2015	577.574.907	(107.535.114)	470.039.793	54.246.590	(415.890.123)	(24.751.434)	83.644.826
4.	PT Penjamin Kredit Daerah	Unaudited 2016	12.730.844	(10.669.069)	2.061.775	12.748	(36.511)	-	2.038.013
	Sub Total 4		**3.482.189.419**	**(2.766.941.509)**	**715.247.908**	**145.123.458**	**(556.715.076)**	**(69.882.059)**	**233.774.231**
5	**Bidang Perdagangan**								
1.	PT Food Station Tjipinang	Unaudited 2016	462.588.469	(449.957.815)	12.630.654	2.645.604	(4.172.722)	(2.259.861)	8.843.674
2.	PD Dharma Jaya	Audited 2015	45.320.088	(51.879.877)	(6.559.788)	2.741.219	(1.904.782)	(954.140)	(6.677.491)
	Sub Total 5		**507.908.557**	**(501.837.692)**	**6.070.866**	**5.386.823**	**(6.077.504)**	**(3.214.001)**	**2.166.183**
6	**Bidang Pariwisata**								
1.	PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk	Audited 2015	540.165.259	(119.719.453)	420.445.806	30.299.498	(72.145.533)	(89.179.850)	289.419.921
2.	PT Jakarta Tourisindo	Unaudited 2016	108.527.417	(123.904.136)	(15.376.719)	1.625.539	(95.854)	(69.450)	(13.916.484)
3.	PT Grahasahari Suryajaya	Audited 2012	29.471.298	(29.153.103)	318.195	-	(20.590.891)	(2.741.229)	(23.013.924)
4.	PT Pakuan International	Audited 2010	3.674.178	(5.243.660)	(1.569.482)	97.737	(57.106)	-	(1.528.851)
	Sub Total 6		**681.838.151**	**(278.020.352)**	**403.817.800**	**32.022.774**	**(92.889.384)**	**(91.990.529)**	**250.960.662**
7	**Bidang Kawasan Industri**								
1.	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Unaudited 2016	168.904.110	(46.142.085)	122.762.025	12.084.646	(48.807.906)	(16.200.284)	69.838.481
2.	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2016	604.668.397	(312.133.379)	292.535.018	45.435.885	(163.487.764)	(31.404.602)	143.078.536
	Sub Total 7		**773.572.508**	**(358.275.464)**	**415.297.043**	**57.520.530**	**(212.295.670)**	**(47.604.886)**	**212.917.017**
			.						
	Jumlah dipindahkan		**12.461.147.180**	**(8.191.194.186)**	**4.269.952.993**	**690.096.230**	**(3.250.380.009)**	**(216.209.316)**	**1.493.459.897**

No.	Perusahan Daerah	Sumber Lapkeu	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-lain / Hak Minoritas	Taksiran Pajak Penghasilan	Laba (Rugi) Setelah pajak
1	2	3	4	5	6	4	5	6	7
	Jumlah pindahan		**12.461.147.180**	**(8.191.194.186)**	**4.269.952.993**	**690.096.230**	**(3.250.380.009)**	**(216.209.316)**	**1.493.459.897**
8	**Bidang Angkutan Darat**								
1.	PT Ratax Armada	Unaudited 2014	1.591.567	(3.740.272)	(2.148.705)	97	-	-	(2.148.608)
2.	PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta	Audited 2015	-	(63.667.034)	(63.667.034)	18.829.278	(17.919.831)	-	(62.757.587)
3.	PT Transportasi Jakarta	Audited 2015	150.006.630	(58.178.279)	91.828.351	25.179.442	(867.436)	(21.940.128)	94.200.230
	Sub Total 8		**151.598.197**	**(125.585.585)**	**26.012.612**	**44.008.818**	**(18.787.267)**	**(21.940.128)**	**29.294.034**
9	**Bidang Aneka Industri**								
1.	PT Delta Djakarta, Tbk	Audited 2015	699.506.819	(233.153.268)	466.353.551	23.939.843	(240.095.652)	(58.152.543)	192.045.199
2.	PT Cemani Toka	Unaudited 2016	522.124.142	(474.374.959)	47.749.184	5.131.936	(8.283.514)	-	44.597.605
	Sub Total 9		**1.221.630.961**	**(707.528.227)**	**514.102.735**	**29.071.779**	**(248.379.166)**	**(58.152.543)**	**236.642.804**
10	**Bidang Rumah Sakit**								
1.	PT RS Haji Jakarta	Unaudited 2015	174.555.294	(187.964.351)	(13.409.057)	2.610.861	(319.147)	-	(11.117.343)
	Sub Total 10		**174.555.294**	**(187.964.351)**	**(13.409.057)**	**2.610.861**	**(319.147)**	**-**	**(11.117.343)**
	Total Seluruh Bidang Industri		**14.008.931.632**	**(9.212.272.349)**	**4.796.659.282**	**765.787.687**	**(3.517.865.590)**	**(296.301.987)**	**1.748.279.392**

Lampiran 18

Data Pembangunan
Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)
Periode Pembangunan 2015 - 2016

No	Nama RPTRA	Alamat Lengkap RPTRA	Kelurahan	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Luas (m^2)	Dukungan Pembangunan	Tahap Pembangunan	Waktu Peresmian
1	Kenanga	Jl. Makian No. 1, RT 02 RW 05, Kode Pos 10150	Cideng	Gambir	Jakarta Pusat	2.583	CSR	1	30 Mei 2015
2	Sungai Bambu	Jl.Jati Raya, RT 10 RW 06, Kode Pos 14330	Sungai Bambu	Tanjung Priok	Jakarta Utara	3.838	CSR	1	13 Mei 2015
3	Kembangan	Jl.Kompas, RT 01 RW 01, Kode Pos 11610	Kembangan Utara	Kembangan	Jakarta Barat	3.250	CSR	1	5 Juni 2015
4	Bahari	Jl. Bahari Raya, RT 09 RW 07, Kode Pos 12420	Gandaria Selatan	Cilandak	Jakarta Selatan	1.000	CSR	1	21 Mei 2015
5	Cililitan	Jl. Buluh, RT 010 RW 016, Kode Pos 13640	Cililitan	Kramat Jati	Jakarta Timur	2.642	CSR	1	22 Oktober 2015
6	Amiterdam	Pulau Untung Jawa, RT 02 RW 03, Kode Pos 14510	Untung Jawa	Kepulauan Seribu Selatan	Kepulauan Seribu	2.204	CSR	1	10 Oktober 2015
7	Pintu Air	Jl.Krekot, RT 01 RW 02, Kode Pos 10710	Pasar Baru	Sawah Besar	Jakarta Pusat	5.000	CSR	2	24 Mei 2016
8	Intiland Teduh @ Karet Tengsin	Jl. Karet Pasar Baru Barat I, RT 18 RW 07, Kode Pos 10220	Karet Tengsin	Tanah Abang	Jakarta Pusat	800	CSR	2	30 Desember 2015
9	Madusela	Jl. Mangga Besar XIII, RT 02 RW 03, Kode Pos 10730	Mangga Dua Selatan	Sawah Besar	Jakarta Pusat	5.000	CSR	2	1 Juni 2016
10	Tanah Abang 3	Jl.Taman tanah abang 3, RT 02 RW 04, Kode Pos 10160	Petojo Selatan	Gambir	Jakarta Pusat	1.054	CSR	2	24 Maret 2016
11	Amir Hamzah	Jl.Taman Amir Hamzah No.1, RT 02 RW 04, Kode Pos 10320	Pegangsaan	Menteng	Jakarta Pusat	3.988	CSR	2	26 Februari 2016
12	Rustanti	Jl.Baladewa, Rumah Susun Tanah Tinggi, RT 16 RW 03, Kode Pos 10540	Tanah Tinggi	Johar Baru	Jakarta Pusat	987	CSR	2	21 April 2016
13	Borobudur	Jl.Borobudur no.9, RT 09 RW 02, Kode Pos 10320	Pegangsaan	Menteng	Jakarta Pusat	1.750	CSR	2	5 Februari 2016

No	Nama RPTRA	Alamat Lengkap RPTRA	Kelurahan	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Luas (m²)	Dukungan Pembangunan	Tahap Pembangunan	Waktu Peresmian
14	Harapan Mulia	Jl. Harapan Mulia Barat, RT 01 RW 04, Kode Pos 10640	Harapan Mulia	Kemayoran	Jakarta Pusat	3.446	CSR	2	1 Juni 2016
15	Karang Anyar	Jl. Karang Anyar Utara Raya, RT 00 RW 00, Kode Pos 10220	Karang Anyar	Sawah Besar	Jakarta Pusat	5.000	CSR	2	24 Mei 2016
16	Krida Serdang	Jl.Bendungan jago, RT 09 RW 01, Kode Pos 10650	Serdang	Kemayoran	Jakarta Pusat	639	CSR	2	1 Juni 2016
17	Melati Duri Pulo	Jl. Petojo Barat V, RT 12 RW 01, Kode Pos 10140	Duri Pulo	Gambir	Jakarta Pusat	2.027	CSR	2	20 Januari 2016
18	Pulo Gundul	Jl. Kramat pulo gundul, RT 05 RW 013, Kode Pos 10540	Tanah Tinggi	Johar Baru	Jakarta Pusat	2.028	CSR	2	17 Maret 2016
19	Pademangan Timur	Jl. Pademangan 7 raya no 12, RT 09 RW 10, Kode Pos 14410	Pademangan Timur	Pademangan	Jakarta Utara	1.551	CSR	2	21 April 2016
20	H. Oyar	Jl. H. Oyar, RT 02 RW 02, Kode Pos 14250	Pegangsaan Dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	1.500	CSR	2	21 April 2016
21	Manunggal Juang	Jl. Manunggal Juang Dua, RT 02 RW 07, Kode Pos 14140	Sukapura	Cilincing	Jakarta Utara	1.145	CSR	2	21 April 2016
22	Rawa Badak Utara	Jl. Inspeksi Kali Sunter, RT 012 RW 08, Kode Pos 14230	Rawa Badak Utara	Koja	Jakarta Utara	2.000	CSR	2	26 Mei 2016
23	Dharma Suci	Jl.Pluit mas, RT 07 RW 016, Kode Pos 14450	Pejagalan	Penjaringan	Jakarta Utara	5.000	CSR	2	6 April 2016
24	Penjaringan Indah	Jl. Bandengan Utara 80, RT 010 RW 016, Kode Pos 14440	Penjaringan	Penjaringan	Jakarta Utara	4.741	CSR	2	23 Juni 2016
25	Marunda	Rusunawa Marunda Kluster A Blok 9 RT 09 RW 010, Kode Pos 14150	Marunda	Cilincing	Jakarta Utara	2.777	CSR	2	18 Oktober 2016
26	Intiland Teduh @ Semper Barat	Jl. Bengawan Solo RW 01	Semper Barat	Cilincing	Jakarta Utara	2.388	CSR	2	22 Oktober 2016
27	Sunter Jaya Berseri	Jl. SKY IV Bentengan 6 , RT 013 RW 05, Kode Pos 14350	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	3.513	CSR	2	18 Desember 2015
28	NKRI	Jl.Kelapa lilin VIII, RT 031 RW 012, Kode Pos 14250	Pegangsaan Dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	2.224	CSR	2	1 April 2016

No	Nama RPTRA	Alamat Lengkap RPTRA	Kelurahan	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Luas (m²)	Dukungan Pembangunan	Tahap Pembangunan	Waktu Peresmian
29	Duri Kosambi	Jl Daan Mogot Rusunawa pesakih, RT 014 RW 014, Kode Pos 11750	Duri Kosambi	Cengkareng	Jakarta Barat	2.000	CSR	2	5 Maret 2016
30	Intiland Teduh @ Rawa Buaya	Jl. Bojong Raya, RT 05 RW 04, Kode Pos 11740	Cengkareng	Rawa Buaya	Jakarta Barat	678	CSR	2	19 April 2016
31	Cengkareng Timur Berseri	Jl. Kayu Besar Outer Ringroad, RT 012 RW 011, Kode Pos 11730	Cengkareng Timur	Cengkareng	Jakarta Barat	*1.651*	CSR	2	18 Februari 2016
32	Kalideres	Jl.Bukit elok blok e6, RT 01 RW 09, Kode Pos 11840	Kalideres	Kalideres	Jakarta Barat	3.401	CSR	2	3 Mei 2016
33	Pegadungan	Citra Garden 2 Blok M3, RT 02 RW 012, Kode Pos 11830	Pegadungan	Kalideres	Jakarta Barat	788	CSR	2	4 Mei 2016
34	Krendang	Jln.Krendang Selatan, RT 05 RW 07, Kode Pos 11260	Krendang	Tambora	Jakarta Barat	2.692	CSR	2	3 Februari 2016
35	Kedoya Utara	Jl. Ratu Mawar Blok J Ujung, RT 02 RW 01, Kode Pos 11520	Kedoya Utara	Kebon Jeruk	Jakarta Barat	2.374	CSR	2	3 Februari 2016
36	Meruya Utara	Kampung Kembang Kerep, RT 017 RW 04, Kode Pos 11620	Meruya Utara	Kembangan	Jakarta Barat	4.994	CSR	2	29 Desember 2015
37	Meruya Selatan	Jl. H.Saaba Ujung, RT 08 RW 03, Kode Pos 11650	Meruya Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	1.189	CSR	2	17 Maret 2016
38	Kembangan Selatan	Jl.Kembang Abadi, RT 01 RW 08, Kode Pos 11620	Kembangan Selatan	Kembangan	Jakarta Barat	2.304	CSR	2	10 Maret 2016
39	Anggrek	Jl. H. Gandun, RT 07 RW 08, Kode Pos 12440	Lebak Bulus	Cilandak	Jakarta Selatan	1.000	CSR	2	30 Desember 2015
40	Ciganjur Berseri	Rumah Dinas Guru, Jl.Pasir, RT 01 RW 06, Kode Pos 12630	Ciganjur	Jagakarsa	Jakarta Selatan	2.800	CSR	2	20 Januari 2016
41	Saharjo Mentas	Jl. DR. Sahardjo N0. 121, RT 01 RW 08, Kode Pos 12960	Menteng Atas	Setiabudi	Jakarta Selatan	700	CSR	2	10 Februari 2016
42	Taman Sawo	Jl. Villa Sawo, RT 05 RW 02, Kode Pos 12150	Cipete Utara	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	1.108	CSR	2	26 April 2016
43	Rasamala	Jl. Rasamala III, RT 03 RW 013, Kode Pos 12870	Menteng Dalam	Tebet	Jakarta Selatan	1.588	CSR	2	29 April 2016

No	Nama RPTRA	Alamat Lengkap RPTRA	Kelurahan	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Luas (m²)	Dukungan Pembangunan	Tahap Pembangunan	Waktu Peresmian
44	Permai	Jln.Permai III, RT 02 RW 09, Kode Pos 12330	Bintaro	Pesanggrahan	Jakarta Selatan	2.030	CSR	2	29 April 2016
45	Anggrek Bintaro	Bintaro permai III, RT 02 RW 09, Kode Pos 12330	Bintaro	Pesanggrahan	Jakarta Selatan	6.500	CSR	2	17 Mei 2016
46	Puspita	Jl. H.Gari, RT 01 RW 03, Kode Pos 12320	Pesanggrahan	Pesanggrahan	Jakarta Selatan	2.238	CSR	2	13 Oktober 2016
47	Mawar	Jl. Mawar Indah RT 08 RW 02, Kode Pos 12440	Lebak Bulus	Cilandak	Jakarta Selatan	700	CSR	2	13 Oktober 2016
48	Manunggal	Jl. Inpres, RT 04 RW 02, Kode Pos 12270	Petukangan Selatan	Pesanggrahan	Jakarta Selatan	2.400	CSR	2	20 Oktober 2016
49	Gria Tipar	Rusun gria tipar cakung, RT 010 RW 010, Kode Pos 13910	Cakung Barat	Cakung	Jakarta Timur	2.500	CSR	2	21 April 2016
50	Dahlia	Jl. Generasi, RT 06 RW 03, Kode Pos 13540	Tengah	Kramat Jati	Jakarta Timur	3.219	CSR	2	15 Juni 2016
51	Kebon Pala Berseri	Jl. Kamboja, RT 010 RW 01, Kode Pos 13650	Kebon Pala	Makasar	Jakarta Timur	4.609	CSR	2	28 Januari 2016
52	Cibesut	Jl. Swadaya II, RT 06 RW 014, Kode Pos 13410	Cipinang Besar Utara	Jatinegara	Jakarta Timur	2.500	CSR	2	30 Maret 2016
53	Jatinegara	Jl. Swadaya Rawa Buntu Kp. Pulo Jahe No.12A, RT 07 RW 014, Kode Pos 13930	Jatinegara	Cakung	Jakarta Timur	1.094	CSR	2	12 Mei 2016
54	Utakara Beriman	Jl.Balai Rakyat no.11, RT 014 RW 06, Kode Pos 13120	Utan Kayu Utara	Matraman	Jakarta Timur	2.394	CSR	2	3 Juni 2016
55	Penggilingan	Perum Aneka Elok..Jl Rengas Elok I Blok A, RT 010 RW 09, Kode Pos 13940	Penggilingan	Cakung	Jakarta Timur	1.675	CSR	2	12 Mei 2016
56	Cipinang Besar Selatan	Jl. Griya Wartawan, Rusunawa Cipinang Besar Selatan, Blok E, RT 19 RW 05, Lantai Dasar, Kode Pos 13410	Cipinang Besar Selatan	Jatinegara	Jakarta Timur	3.451	CSR	2	23 Agustus 2016
57	Pulogebang Indah	Jl. Mutiara Raya Komplek Rusunawa Pulogebang, RT 013 RW 011, Kode Pos 13950	Pulogebang	Cakung	Jakarta Timur	3.642	CSR	2	23 Desember 2015
58	Tanjung Elang Berseri	Pulau Pramuka, RT 01 RW 05, Kode Pos 14530	Panggang	Kepulauan Seribu Utara	Kepulauan Seribu	1000	CSR	2	20 September 2016

No	Nama RPTRA	Alamat Lengkap RPTRA	Kelurahan	Kecamatan	Kota / Kabupaten	Luas (m^2)	Dukungan Pembangunan	Tahap Pembangunan	Waktu Peresmian
59	Kampung Benda	Jl. Cempaka Putih Tengah XV RT 002 RW 08, Kode Pos 10510	Cempaka Putih Timur	Cempaka Putih	Jakarta Pusat	1.300	APBD	3	20 Oktober 2016
60	Tunas Harapan	Jalan Haji Amsir RW. 003	Sunter Jaya	Tanjung Priok	Jakarta Utara	954	APBD	3	20 Oktober 2016
61	Kelapa Nias IX	Jl. Kelapa Nias IX RT. 08 RW. 017, Kode Pos 14250	Pegangsaan Dua	Kelapa Gading	Jakarta Utara	6.000	APBD	3	20 Oktober 2016
62	Biru Laut	Komplek Walikota, Jl. Biru Laut Tengah RT. 009 RW. 010, Kode Pos 14240	Kelapa Gading Timur	Kelapa Gading	Jakarta Utara	1.750	APBD	3	20 Oktober 2016
63	Ceria	Komplek Rusun Damkar Jl. Taman Surya II RT 01 RW 05, Kode Pos 11730	Cengkareng Barat	Cengkareng	Jakarta Barat	1.750	APBD	3	20 Oktober 2016
64	Joglo	Komplek DKI Joglo Blok R, RT 12 RW 04, 11640	Joglo	Kembangan	Jakarta Barat	800	APBD	3	20 Oktober 2016
65	Pinang Pola	Jalan Pinang 2, RT 04 RW 08, Kode Pos 12450	Pondok Labu	Cilandak	Jakarta Selatan	857	APBD	3	8 Maret 2016
66	Bhinneka	Jl. Swadarma Raya, RT 06 RW 04, Kode Pos 12260	Petukangan Utara	Pesanggarahan	Jakarta Selatan	980	APBD	3	19 Mei 2016
67	Kecapi	Jl. Kebagusan 4 RT 011 RW 04, Kode Pos 12520	Kebagusan	Pasar Minggu	Jakarta Selatan	2.416	APBD	3	31 Mei 2016
68	Akasia	Tebet Barat Raya Trijaya 3, Rt 011, Rw 07	Tebet Barat	Tebet	Jakarta Selatan	2.310	CSR	3	20 Oktober 2016
69	Ikapola	Jl Pondok Kelapa Raya RT 01 RW 04, Kode Pos 13450	Pondok Kelapa	Duren Sawit	Jakarta Timur	1.419	APBD	3	20 Oktober 2016
70	Gebang Sari	Jl. Gebangsari, RT 02/ RW 05, Kode Pos 13890	Bambu Apus	Cipayung	Jakarta Timur	4.846	APBD	3	20 Oktober 2016

DAFTAR SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN LAHAN YANG BERATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2016

No	Nomor Sertifikat	Kelurahan	Luas (m^2)
1	HPL No. 1	Ancol	4.779.120,00
2	HPL No. 12	Ancol	536.823,00
3	HPL No. 1	Pluit	208.665,00
4	HPL No. 2	Pluit	752.000,00
5	HPL No. 3	Pluit	20.100,00
6	HPL No. 9	Pluit	2.230,00
7	HPL No. 1	Kamal Muara	178.020,00
8	HPL No. 16	Kamal Muara	5.628,00
9	HPL No. 3	Penjaringan	13.590,00
10	HPL No. 1	Cideng	13.395,00
11	HPL No. 1	Cikini	2.221,00
12	HPL No. 1	Mangga Dua Selatan	134.442,00
13	HPL No. 2	Mangga Dua Selatan	14.790,00
14	HPL No. 3	Mangga Dua Selatan	907,00
15	HPL No. 4	Mangga Dua Selatan	333,00
16	HPL No. 1	Karet Tengsin	4.014,00
17	HPL No. 3	Kebon Kacang	1.262,00
18	HPL No. 1	Sunter Jaya	139.145,00
19	HPL No. 6	Ancol	124.289,00
20	HPL No. 1	Semper Barat	4.770,00
21	HPL No. 1	Panpanggo	144.240,00
22	HPL No. 1	Glodok	10.480,00
23	HPL No. 1	Wijaya Kusuma	86.074,00
24	HPL No.1	Taman Sari	1.230,00
25	HPL No. 2	Taman Sari	2.198.00
26	HPL No. 1	Tangki	54.395,00
27	HPL No. 1	Karet Kuningan	160.920,00
28	HPL No. 00001	Penggilingan	371.480,00
29	HPL No. 1	Penggilingan	60.319,00
30	HPL No. 2	Penggilingan	272.569,00
31	HPL No. 4	Jatinegara	29.070,00
32	HPL No. 10	Jatinegara	151.797,00
33	HPL No. 11	Jatinegara	40.605,00
34	HPL No. 1	Kayu Putih	88.200,00